PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN;

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026;

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA;

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun :

a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026; dan
b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Juli 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : JUNI 2025

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya dokumen RKPD tersebut, arah kebijakan pembangunan dapat dicapai lebih terarah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kepala Daerah melalui perwujudan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Selain itu, dokumen RKPD juga dijadikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, pedoman bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menyusun RKPD Tahun 2026, pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026, sebagai alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 dari sisi proses dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top-down*

dan *bottom up* serta partisipatif melalui tahapan yaitu : 1) Persiapan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada bagan alir berikut ini.

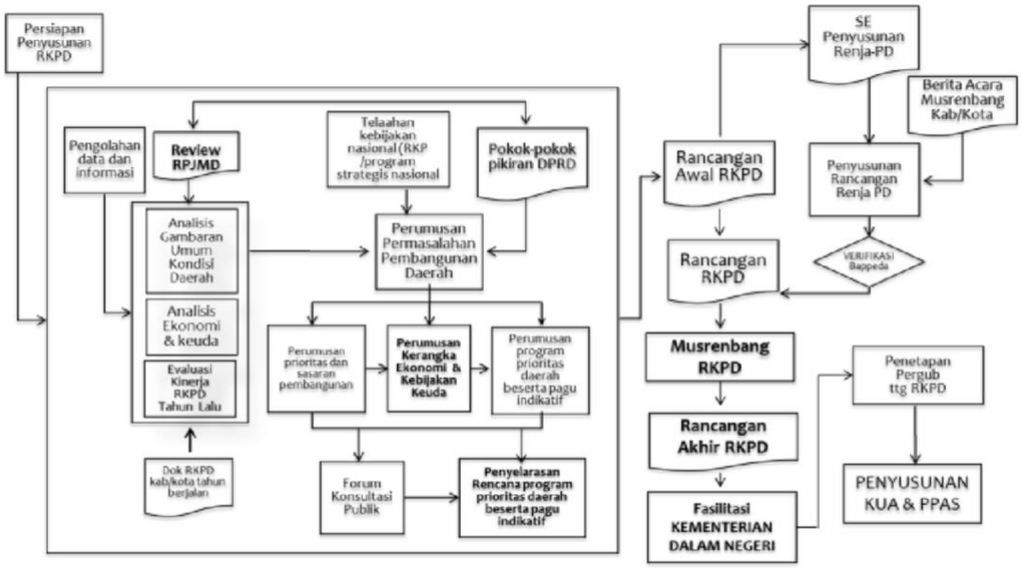

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Jambi
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Peerubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

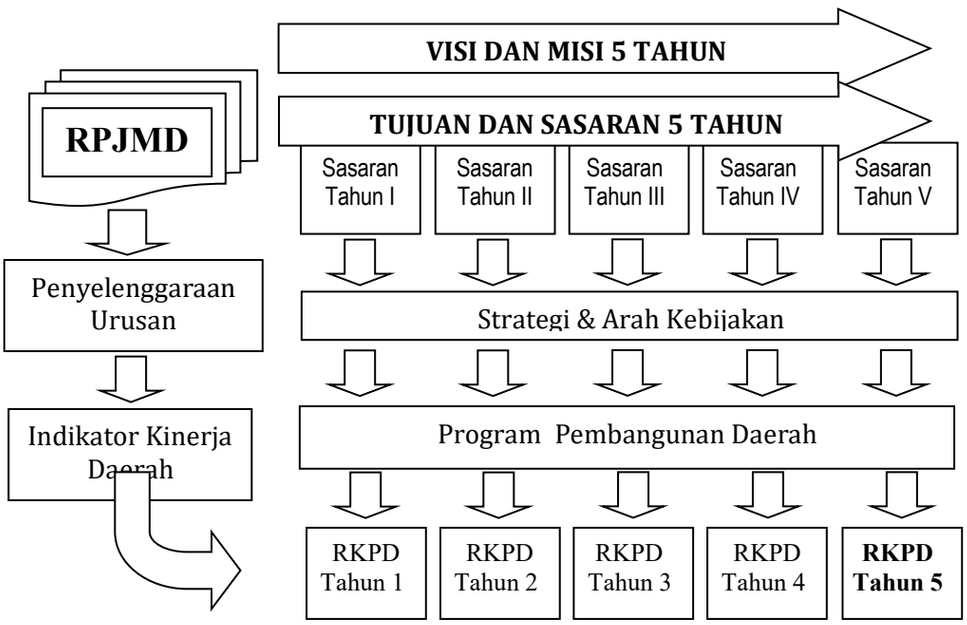

Gambar 1-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup tiga kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan tema, pokok-pokok arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah
- RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS yang selanjutnya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Sedangkan penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;

3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

   Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika dokumen RKPD agar tercapai koherensi substansi pada bab-bab berikutnya.
2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.
3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

   Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2024 dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2025) yang tertuang dalam arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

   Bab ini mengemukakan secara eksplisit tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 dan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2026, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2026, yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah.
5. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

   Bab ini mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

6. Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

   Dalam bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

   Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
8. Bab VIII Penutup

   Dalam bab ini menguraikan prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Provinsi Jambi secara geografis terletak diantara 00º45'– 20º45' Lintang Selatan dan antara 101º 12' – 104º 44' Bujur Timur sedangkan secara geografis Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera dan berbatasan Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau.

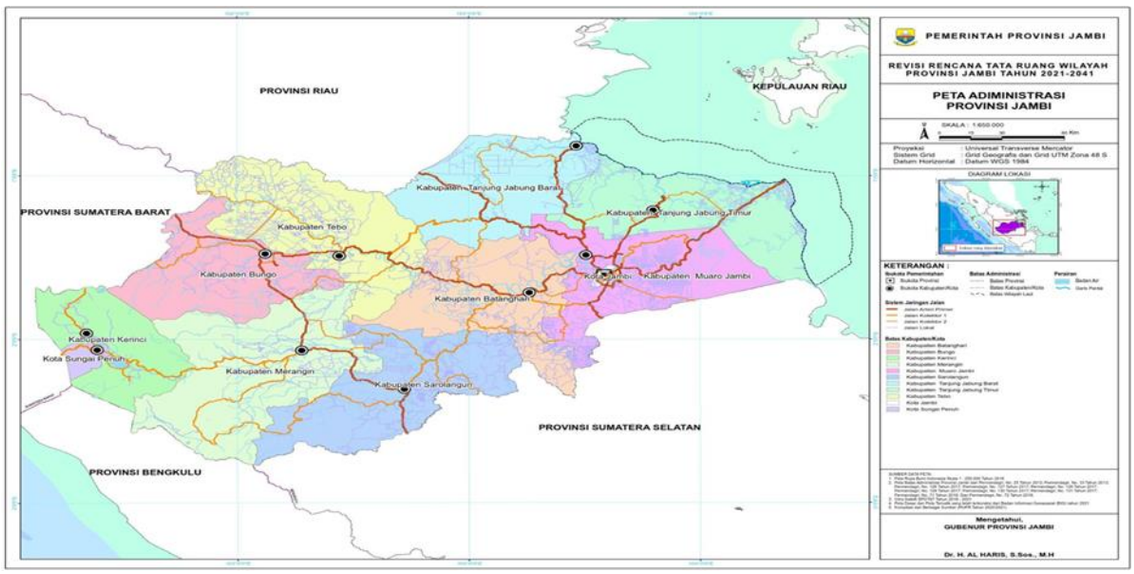

Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

Sumber : RTRW Provinsi Jambi, 2023

Provinsi Jambi berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 49.026,579 $Km^{2,}$ dimana luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.540,12 km^2 atau sebesar 15,38% dari total luas

wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.103,74 km^2 dan 5.935,89 km^2.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km^2)	%
1	Kerinci	3.445,15	7,03
2	Merangin	7.540,12	15,38
3	Sarolangun	5.935,89	12,11
4	Bungo	4.760,83	9,71
5	Tebo	6.103,74	12,45
6	Batanghari	5.387,52	10,99
7	Muaro Jambi	5.225,79	10,66
8	Tanjung Jabung Barat	5.546,06	11,31
9	Tanjung Jabung Timur	4.546,62	9,27
10	Kota Sungai Penuh	364,92	0,74
11	Kota Jambi	169,89	0,35
Total		**49.026,58**	**100**

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2024 (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022)

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2024 sebanyak 144 kecamatan, 1.585 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 24 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci mencapai 287 desa/kelurahan.

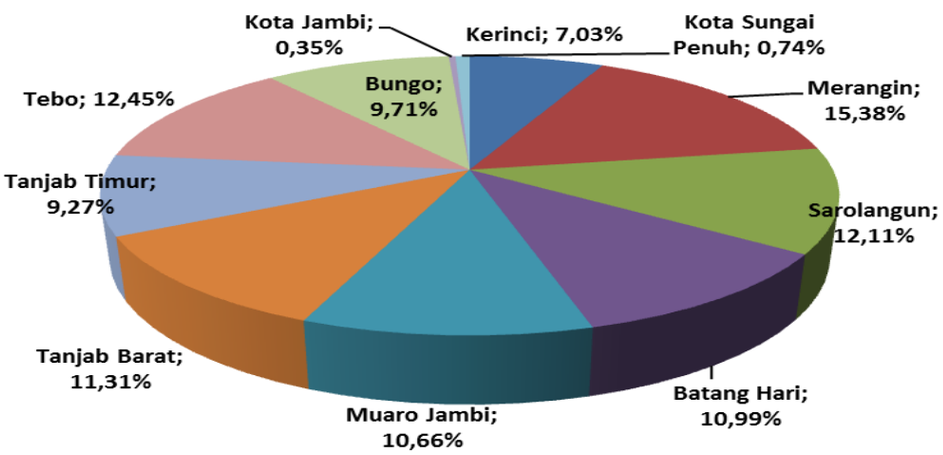

Gambar 2-2 Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2024

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang

berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2-2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

No	Topografi (meter dpl)	Luas		Wilayah/Kabupaten
		Ha	%	
1	Dataran rendah (0 – 100)	3.282.315	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
2	Dataran sedang (100 – 500)	832.826,26	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat
3	Dataran tinggi (>500)	783.836,48	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah Luas Daratan		4.898.978	100	

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Jambi, PK-RTRW Provinsi Jambi

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Jambi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl), mempunyai kelerengan antara (20^0-40^0), kawasan ini terletak di bagian barat Jambi yang membujur barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Sebagian besar termasuk wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan sebagian kecil Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo.
- Perbukitan bergelombang, ketinggian antara (100-500) meter dengan kemiringan lereng (10^0 - 20^0). Wilayah ini terletak di bagian tengah Jambi yang merupakan wilayah sebagian Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Dataran Ketinggian antara (0-100) meter dengan kelerengan antara (0^0-10^0) wilayah ini terletak di bagian timur Jambi yang sebagian besar merupakan wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan dataran pantai.

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.

a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan Alluvium, Endapan Rawa dan Endapan Undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang mengandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, Resen.
b. Batuan Sedimen, berumur Permo-Karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda mulai dari Mentulu (Permo-Karbon), Mengkarang (Perem), Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura), Telangakar (Oligo Miosen), Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen), Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen), Muara Enim, Lakitan (Mio-Pliosen) dan Bintunan, Pengasih (Pliosen). Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung, dengan sisipan batubara, batu lanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batupasir tufan, batu pasir gampingan, batu gamping, konglomerat polemik dan breksi.
c. Batuan malihan, terbagi atas Formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi Mentulu, dan Formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batu tanduk, filit, sekis dan batu pasir meta.
d. Batuan Gunung Api, berumur Perem hingga Kuarter. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunung api, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.

e. Batuan Terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horenblenda dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar pun banyak dijumpai dimana struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo serta Batanghari sedangkan struktur kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari Sesar Besar Sumatera.

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani.

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS Batanghari yang mencakup 6 sub DAS didalamnya yaitu Sub DAS Batanghari Hulu, Sub DAS Batang Merangin Tembesi, Sub DAS Batang Tabir, Sub DAS Batang Bungo, Sub DAS Batang Tebo, dan Sub DAS Batanghari Hilir.

Selain DAS Batanghari, ada 6 (enam) DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu DAS Betara Pengabuan mencakup 7 Sub DAS, DAS Mendahara mencakup 9 Sub DAS dan DAS Air Hitam Laut mencakup 4 Sub DAS.

Tabel 2-3 Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai	Luas Daerah Pengaliran	Debit Max (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
Kerinci	Batang Merao	187,5	245	5,11
Merangin	Batang Merangin	3.645,00	2.300,00	26,07
Sarolangun	Batang Sarolangun	1.258,00	-	-
Batang Hari	Batang Hari	35.984,38	8.484,00	202
Muaro Jambi	Batang Hari	38.704,00	8.363,00	515
Tanjab Barat	Batang Pengabuhan Merlung	4.300,00	57,11	2,5
Tebo	Batang Tebo	1.831,60	742	20,6
Bungo	Batang Bungo	410,6	177,2	6,54
Kota Jambi	Batang hari	42.142,00	12.059,00	-

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

Di Provinsi Jambi terdapat 15 danau yang yaitu Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Belibis, Danau Lingkat, Danau Duo, Danau Sipin, Danau Kenali, Danau Teluk, Danau Biaro, Danau Baru, Danau Sarang Burung, Danau Sepati Empat, Danau Kecil dan Danau Pauh. Selain itu, terdapat juga beberapa Rawa Pasang Surut yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari dan Rawa Non Pasang Surut yang berada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Stasiun Klimatologi Jambi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi; suhu maksimum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024 mencapai 36,30^{0}C, sedangkan suhu minimum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024 mencapai 22,60^{0}C, dengan rata-rata suhu udara di tahun 2024 adalah 27,70^{0}C. Kelembaban udara maksimum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024 mencapai 99%, kelembaban udara minimum mencapai

57%, dengan rata-rata kelembaban udara dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024 yaitu 86,55%.

Dari bulan Januari sampai Desember 2024, tekanan udara rata-rata mencapai 1.008,26 mbar, kecepatan angin rata-rata 0,65 knot, jumlah curah hujan 2.408,40 mm/tahun dan rata-rata penyinaran matahari sebanyak 4,36 jam.

Tabel 2-4 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Uraian	2024
1	Suhu (°C)	
	Maksimum	36,30
	Minimum	22,60
	Rata-rata	27,70
2	Kelembaban Udara (%)	
	Maksimum	99
	Minimum	57
	Rata-rata	86,55
3	Tekanan Udara (mbar) rata-rata	1.008,26
4	Kecepatan Angin (knot) rata-rata	0,65
5	Curah Hujan (mm/tahun)	2.408,40
6	Penyinaran Matahari (jam)	4,36

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi

Penggunaan lahan di Provinsi Jambi menjadi 2 fungsi yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan permukiman. Luas lahan hutan mencapai 1.327.992,55 Ha atau 27,07% dari luas keseluruhan tutupan lahan di Provinsi Jambi. penggunaan lahan kawasan permukiman mencapai 151.542,42 Ha atau sebesar 3,09% dari luas keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-5 Tutupan Lahan Provinsi Jambi

Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Persentase (%)
Air Danau / Situ	10.340,01	0,21
Air Tawar Sungai	33.921,02	0,69
Hutan Rimba	1.327.992,55	27,07
Perkebunan / Kebun	856.202,64	17,45
Permukiman dan Tempat Kegiatan	151.542,42	3,09
Sawah	115.215,79	2,35
Semak Belukar / Alang - Alang	1.102.391,46	22,47
Tegalan / Ladang	1.308.103,11	26,66
Jumlah	**4.905.709,00**	**100**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi 2023-2043

Jumlah penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak 3.724.300 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 76 jiwa/km^2 dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.738 jiwa/km^2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 276 jiwa/km^2, kepadatan terendah berada di Kabupaten Merangin sebesar 50 jiwa/km^2.

Tabel 2-6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerinci	250.300	251.900	250.300	251.120	256.700
2	Merangin	354.100	355.700	354.100	366.390	373.400
3	Sarolangun	290.100	293.600	290.000	302.240	306.500
4	Batang Hari	301.700	306.700	301.700	312.730	316.600
5	Muaro Jambi	402.000	406.800	402.000	418.800	424.600
6	Tanjab Timur	229.800	231.800	229.800	236.730	239.000
7	Tanjab Barat	317.500	320.600	317.500	330.470	335.100
8	Tebo	337.700	340.900	337.700	350.760	355.300
9	Bungo	362.400	367.200	362.400	376.380	381.300
10	Kota Jambi	606.200	612.200	606.200	627.770	635100
11	Kota Sungai Penuh	96.600	97.800	96.600	99.770	100.800
Provinsi Jambi		3.548.200	3.585.100	3.631.136	3.679.170	3.724.300

Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2025

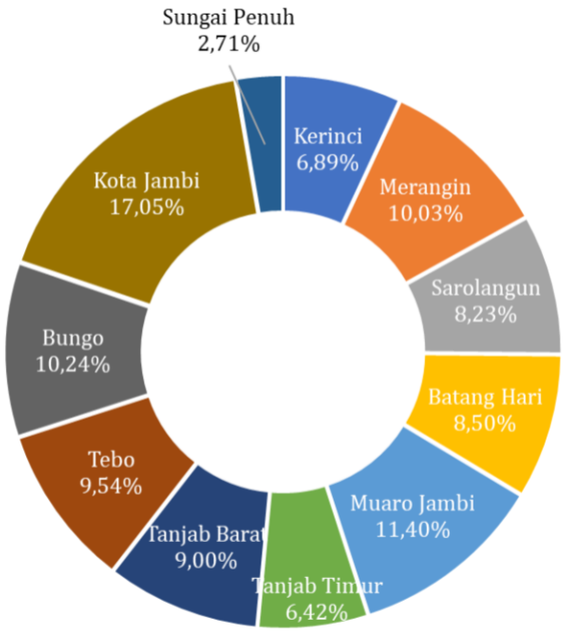

Gambar 2-3 Persentase Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/ Kota Tahun 2024

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,37 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 47,63 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo). Bila dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio 103,42

Tabel 2-7 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk(jiwa/km^2)
1	Kerinci	75
2	Merangin	50
3	Sarolangun	52
4	Batang Hari	59
5	Muaro Jambi	81
6	Tanjab Timur	53
7	Tanjab Barat	60
8	Tebo	58
9	Bungo	80
10	Kota Jambi	3.738
11	Sungai Penuh	276
Jumlah		**76**

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025,

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menjadi cerminan penting bagi dinamika sosial dan ekonomi suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Provinsi Jambi, tren pertumbuhan penduduk selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang patut diperhatikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan.Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebesar 1,30 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sarolangun sebesar 1,48 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,68 persen.

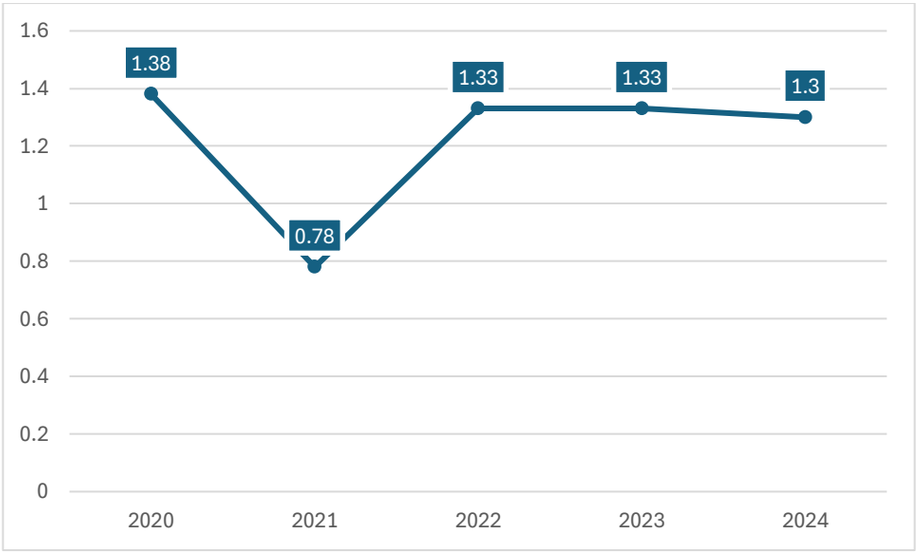

Gambar 2-4 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025

Kondisi demografi Provinsi Jambi Kondisi demografi Provinsi Jambi dapat dianalisis lebih lanjut melalui piramida penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2023. Piramida ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Provinsi Jambi masih didominasi oleh kelompok usia muda, terutama pada rentang usia 0–19 tahun. Kelompok usia 0–4 tahun mencatat jumlah tertinggi, dengan 158,4 ribu jiwa perempuan dan 163,82 ribu jiwa laki-laki, menandakan angka kelahiran yang masih relatif tinggi.

Kelompok usia sekolah dasar hingga menengah (5–19 tahun) juga cukup besar, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap penyediaan layanan pendidikan yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, kelompok usia produktif (20–59 tahun)

mendominasi struktur penduduk, mencerminkan potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Namun, pada kelompok usia 15–24 tahun, terlihat adanya penurunan jumlah penduduk dibandingkan kelompok usia sebelumnya, terutama pada usia 15–19 tahun dan 20–24 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan migrasi keluar daerah untuk keperluan pendidikan atau pekerjaan, yang sejalan dengan fenomena sebelumnya di mana usia tersebut cenderung meninggalkan daerah asal.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) menunjukkan jumlah yang lebih kecil, tetapi tetap perlu diperhatikan terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jambi berada pada fase bonus demografi, yang jika dimanfaatkan secara optimal, dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

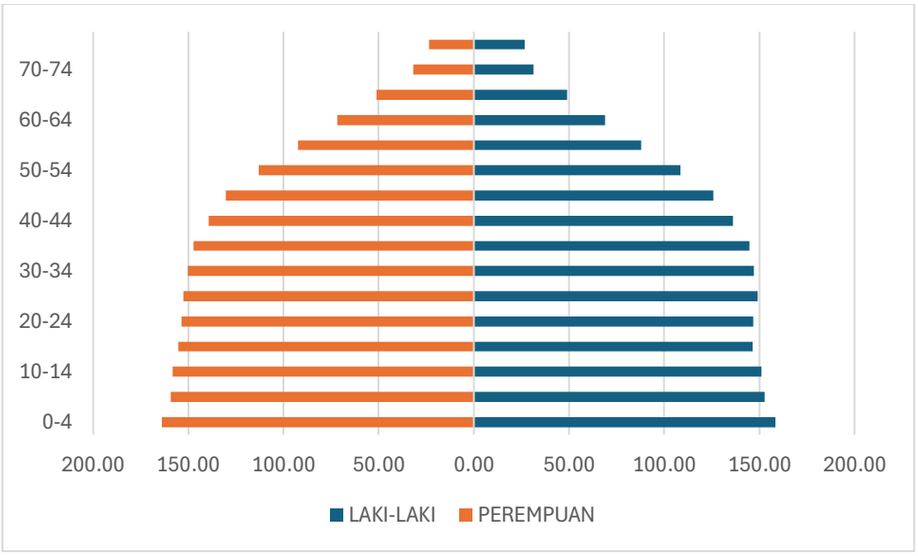

Gambar 2-5 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024

Sumber: BPS , 2025 (data diolah)

Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2021, dimana dalam kurun waktu sembilan tahun, telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok penduduk usia sekolah yang hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan usia lanjut yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat.

Peningkatan jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan, namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta perubahannya yaitu PP Nomor 13 Tahun 2017, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, ditetapkan dengan kriteria :

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Menurut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Rawan bencana alam nasional; Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. Kawasan Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh; dan
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah

Kawasan Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, Perkotaan Muara Bulian – Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari, Kawasan Strategis Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo, Perkotaan Muaro Tebo di Kabupaten Tebo, Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin, Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun, Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi, dan Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis daerah teknologi tinggi di Kabupaten Kerinci. Untuk Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu di Kawasan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana yaitu :

A. Bencana geologi

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara (mematikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusat di tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

2. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu,

ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusat di tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

B. Bencana banjir

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir diperoleh potensi luas dan kelas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-8 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	Batang Hari	63.456	209.625	260.103	533.184	Tinggi
2	Kerinci	330.854	10.743	2.197	343.794	Tinggi
3	Merangin	399.518	288.100	41.958	729.576	Tinggi
4	Muaro Jambi	28.670	258.686	264.193	551.549	Tinggi
5	Sarolangun	185.256	245.441	168.473	599.170	Tinggi
6	Tanjung Jabung Barat	41.247	127.735	325.886	494.868	Tinggi
7	Tanjung Jabung Timur	16.711	176.116	296.549	489.376	Tinggi
8	Tebo	88.565	271.693	269.181	629.439	Tinggi
9	Bungo	111.731	284.776	65.700	462.207	Tinggi
B	**Kota**					
1	Kota Jambi	14.117	2.414	510	17.041	Tinggi
2	Kota Sungai Penuh	35.960	-	-	35.960	Rendah
	Provinsi Jambi	**1.316.085**	**1.875.329**	**1.694.750**	**4.886.164**	**Tinggi**

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023

Potensi bahaya banjir pada tabel di atas memperlihatkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Jambi yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jambi secara keseluruhan adalah 2.425.882,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir

tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.161.515,00 Ha, kelas sedang seluas 695.944,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 568.423,00 Ha.

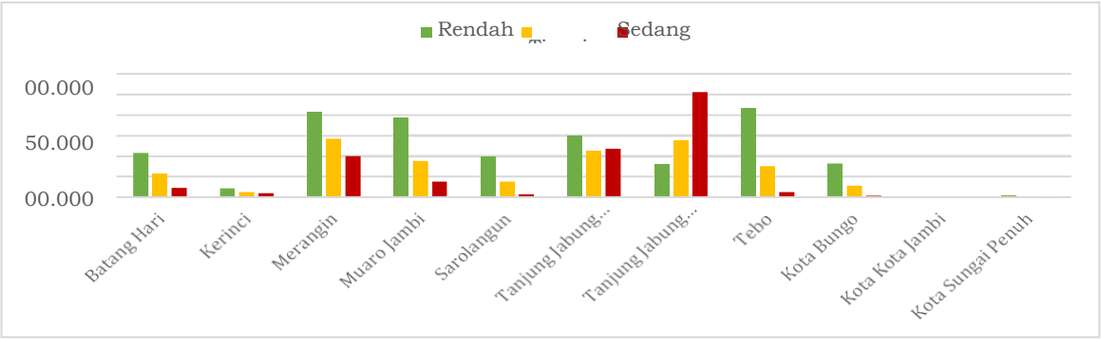

Gambar 2-6 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2022

Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Tebo dengan luas 217.016,00 Ha. Pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Merangin dengan luas 142.623,00 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 255.060,00 Ha.

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-9 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	Batang Hari	63.456	209.625	260.103	533.184	Tinggi
2	Kerinci	330.854	10.743	2.197	343.794	Tinggi
3	Merangin	399.518	288.100	41.958	729.576	Tinggi
4	Muaro Jambi	28.670	258.686	264.193	551.549	Tinggi
5	Sarolangun	185.256	245.441	168.473	599.170	Tinggi

6	Tanjung Jabung Barat	41.247	127.735	325.886	494.868	Tinggi
7	Tanjung Jabung Timur	16.711	176.116	296.549	489.376	Tinggi
8	Tebo	88.565	271.693	269.181	629.439	Tinggi
9	Bungo	111.731	284.776	65.700	462.207	Tinggi
B	**Kota**					
1	Kota Jambi	14.117	2.414	510	17.041	Tinggi
2	Kota Sungai Penuh	35.960	-	-	35.960	Rendah
	Provinsi Jambi	**1.316.085**	**1.875.329**	**1.694.750**	**4.886.164**	**Tinggi**

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2022

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 4.886.164,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.316.085,00 Ha, kelas sedang 1.875.329,00 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.694.750,00 Ha.

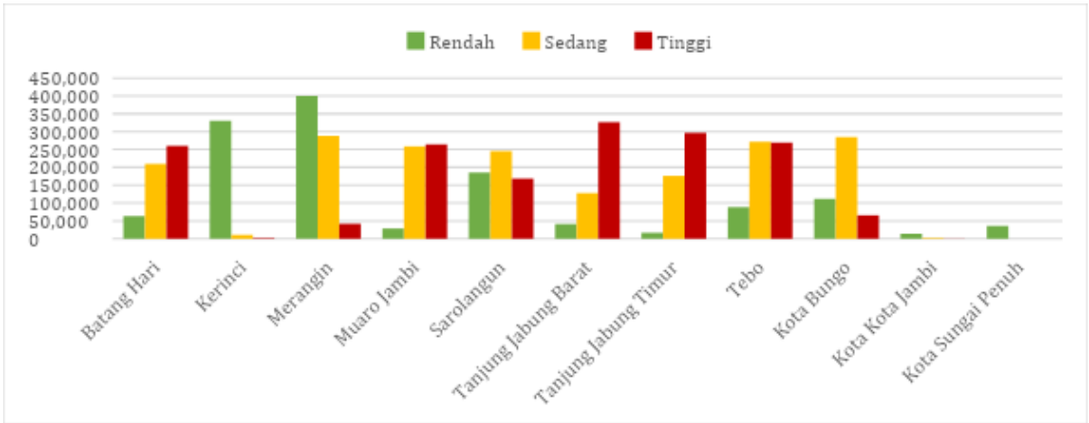

Gambar 2-7 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2022

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan masing-masing kabupaten/kota. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 399.518,00 Ha, yaitu Kabupaten Merangin, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Merangin dengan luas 288.100,00 Ha. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 325.886,00 Ha.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan atau terdeselerasi dari 4,66 persen (yoy) di tahun 2023 menjadi 4,51 persen, serta lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian akibat dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batubara. Di sisi lain, angkutan komoditas batubara via darat masih belum optimal pasca dibuka kembali pada Mei 2024. Selanjutnya, menurunnya produksi CPO akibat adanya penutupan dua pabrik pengolahan kelapa sawit serta menurunnya produksi TBS kelapa sawit juga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.

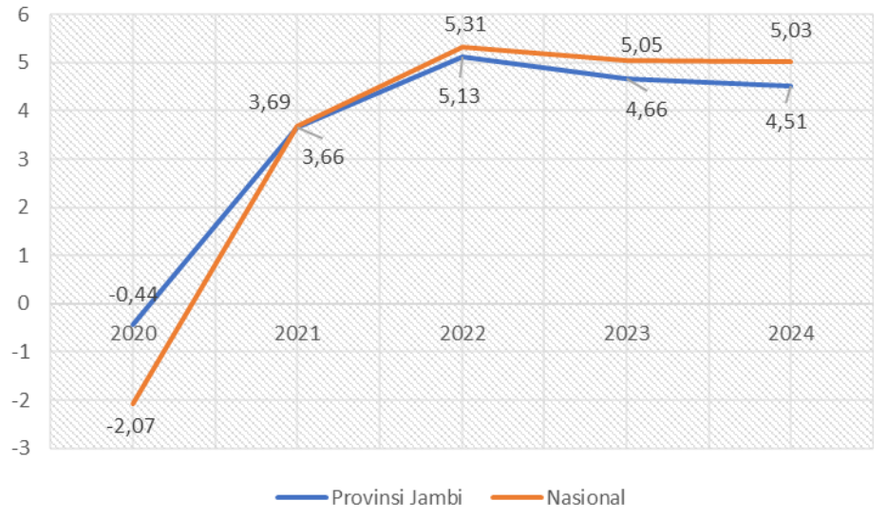

Gambar 2-8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah. BPS, 2025

Jika dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi periode 2020 hingga 2023 masih mengalami pemulihan akibat pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, sehingga berpengaruh terhadap Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, terutama yang dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial sama sekali.

Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terutama Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan

vaksinasi covid-19. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 8,01 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

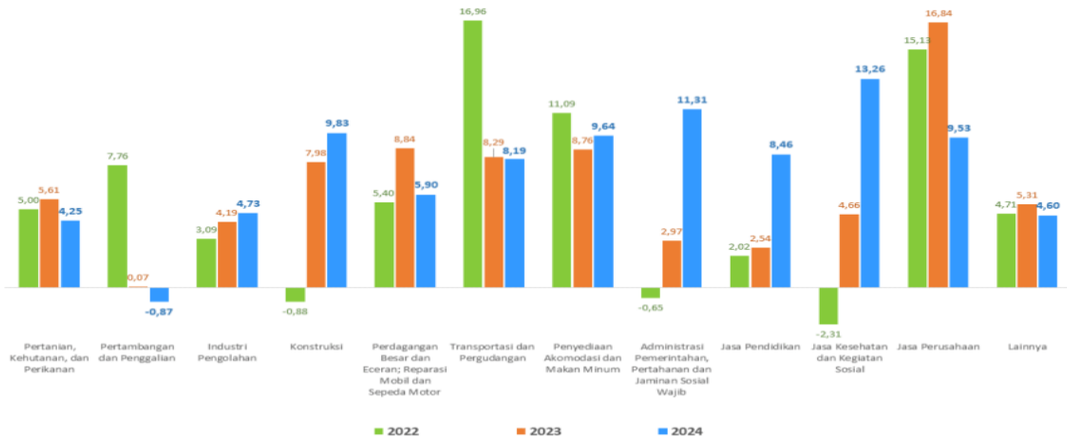

Gambar 2-9 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,66 persen (yoy) dan lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Perlambatan ini disebabkan tertahannya kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai lapangan usaha dengan pangsa terbesar kedua yang tumbuh melambat sebesar 0,07 persen, lebih rendah dibanding tahun 2022. Namun meskipun mengalami perlambatan, pengerjaan berbagai proyek infrastruktur di Provinsi Jambi antara lain PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center dan pembangunan drainase utama di Kota Jambi, yang mendorong kinerja sektor konstruksi di Provinsi Jambi.

Selanjutnya, pada tahun 2024 ekonomi Provinsi Jambi

terdeselerasi dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,51 persen (yoy). Hal tersebut masih disebabkan kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi, sebagai dampak dari permintaan global yang menurun sejalan dengan harga batubara acuan yang masih mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2023. Namun pertumbuhan ekonomi ini masih mengalami pertumbuhan yang didorong oleh masih meningkatnya kinerja Jasa Kesehatan yang tumbuh sebesar 13,26 persen, administrasi pemerintahan turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 11,31 persen, sejalan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Sektor Konstruksi juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,83 persen yang didorong oleh pengerjaan proyek bangunan diantaranya pengerjaan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) Bayung Lencir – Tempino, proyek multi-years Islamic center dan Stadion Swarnabhumi.

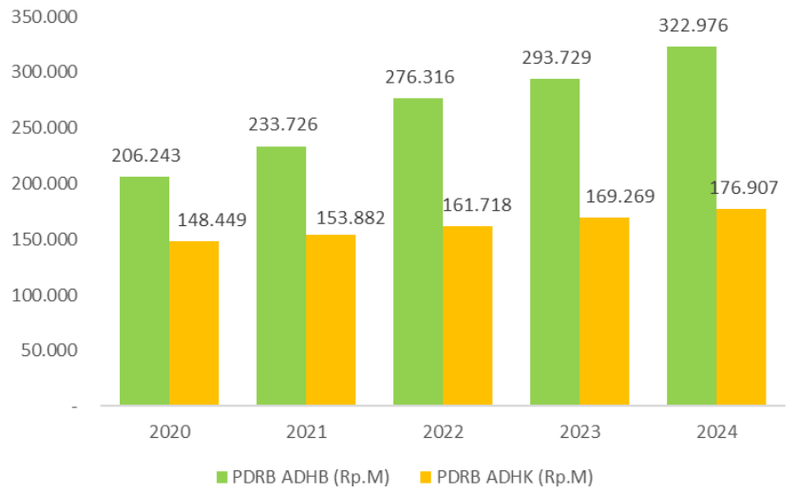

Gambar 2-10 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 (dalam milyar rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir (2020-2024), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 33,93 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,25 persen. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua, meskipun di tahun 2024 kontribusinya menurun dibanding tahun sebelumnya, dari 15,31 persen menjadi 13,41 persen di tahun 2024. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 13,29 persen.

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak keatas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, yang masing-masing tercatat sebesar 3,27 persen dan 2,85 persen.

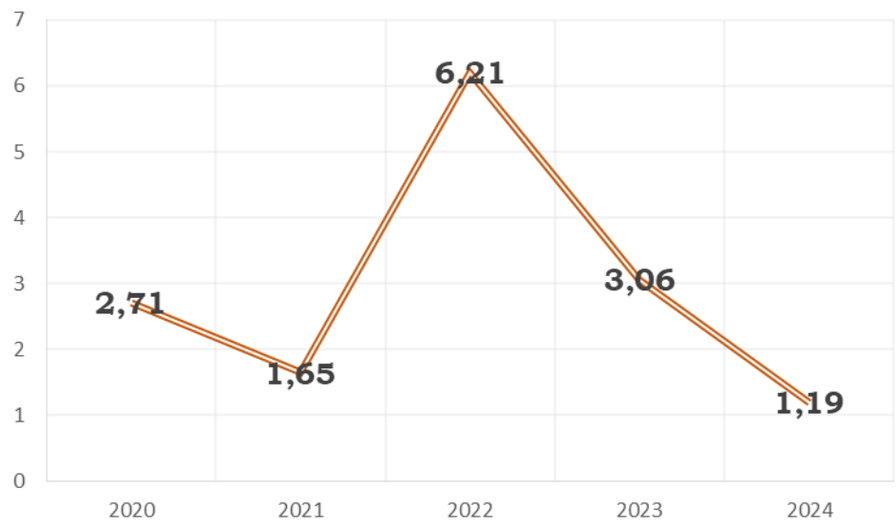

Gambar 2-11 Tingkat Inflasi Gabungan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2025

Inflasi di Provinsi Jambi utamanya didorong oleh kenaikan level IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil yang besar pada Kota Jambi dan Muaro Bungo yang didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Namun, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan level IHK pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT sejakan dengan penurunan

harga minyak dunia dan penurunan kinerja sektor konstruksi serta harga bahan bangunan.

2.1.2.1.2 PDRB Perkapita

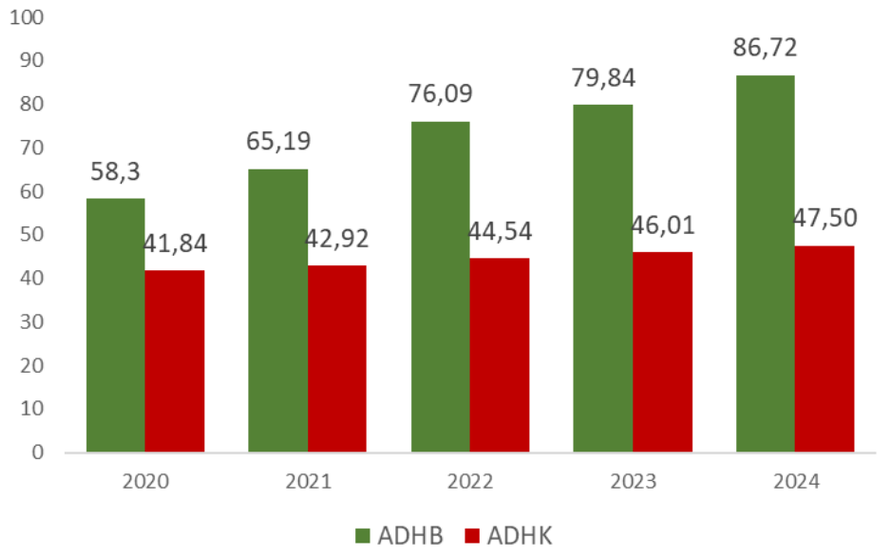

Gambar 2-12 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 -2024 (dalam juta rupiah)

Sumber: BPS, 2025

PDRB perkapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,17 persen per tahun. Sedangkan PDRB perkapita ADHB juga mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 9,93 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah–menengah (*lower–middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah.

Indikator *gini ratio* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

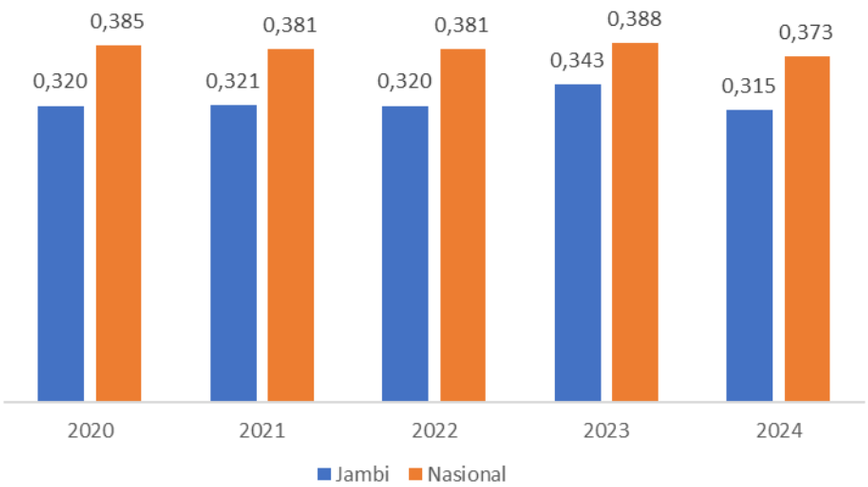

Gambar 2-13 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2020-2024

Sumber : BPS 2025

Selama 5 tahun terakhir, Angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif rendah di bawah nasional, dan termasuk kategori ketimpangan sedang Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dilakukan melalui serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan melibatkan beberapa perangkat daerah, terutama melalui program DUMISAKE.

Berdasarkan daerah tinggal, Koefisien Gini Tahun 2024 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,365 dan 0,320. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit. Hanya beberapa Kabupaten/kota yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan ketimpangan, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang.

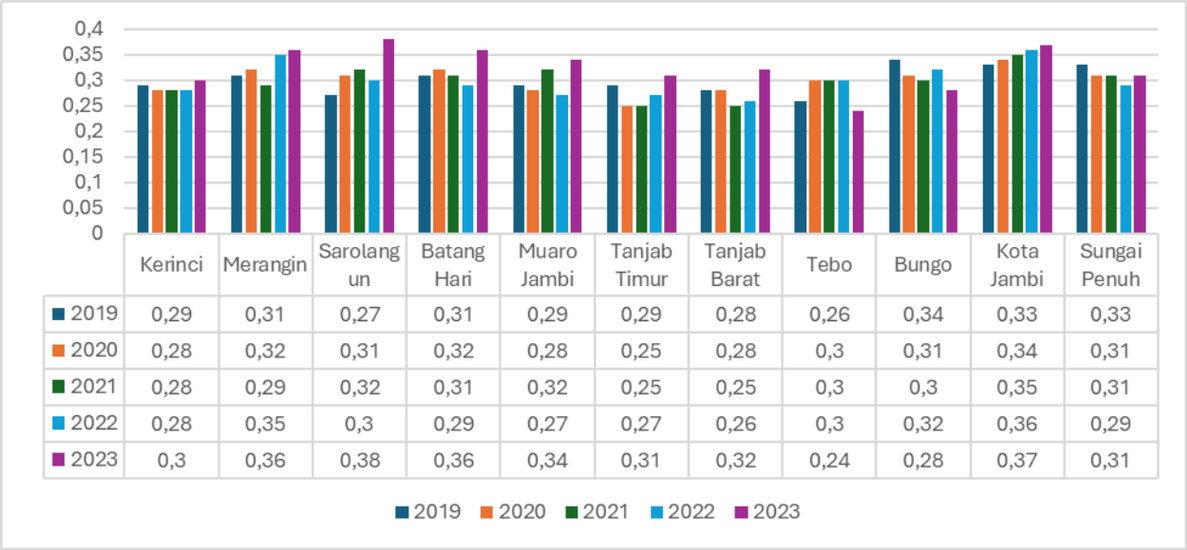

	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Sungai Penuh
2019	0,29	0,31	0,27	0,31	0,29	0,29	0,28	0,26	0,34	0,33	0,33
2020	0,28	0,32	0,31	0,32	0,28	0,25	0,28	0,3	0,31	0,34	0,31
2021	0,28	0,29	0,32	0,31	0,32	0,25	0,25	0,3	0,3	0,35	0,31
2022	0,28	0,35	0,3	0,29	0,27	0,27	0,26	0,3	0,32	0,36	0,29
2023	0,3	0,36	0,38	0,36	0,34	0,31	0,32	0,24	0,28	0,37	0,31

Gambar 2-14 Koefisien Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Sumber : BPS 2024. data diolah

2.1.2.1.4 Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang

yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi terutama di tahun 2021 akibat pandemi covid-19 sehingga banyak aktivitas perekonomian yang mengalami stagnansi, sehingga juga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi penurunan persentase penduduk miskin seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, dan di tahun 2023 hingga 2024 terus mengalami penurunan.

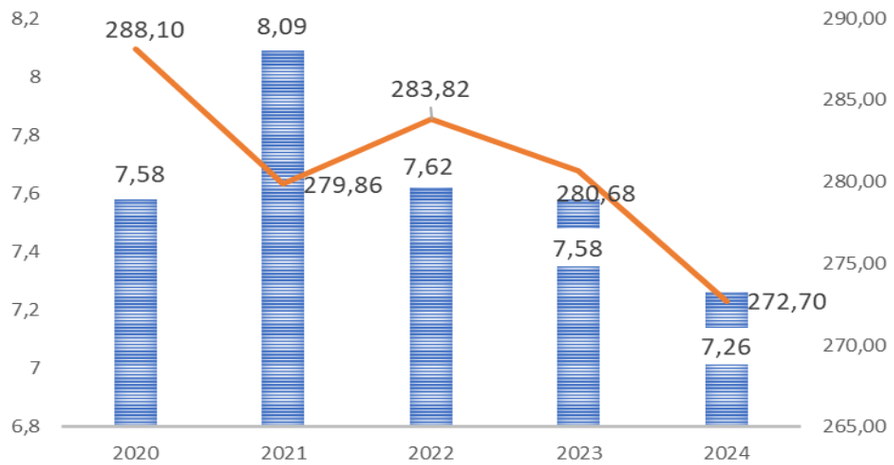

Gambar 2-15 Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2025

Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan dari 7,58 persen di tahun 2020 menjadi 7,26 persen di tahun 2024. walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan dari Rp485.920 per kapita perbulan pada 2020 menjadi Rp658.100 perkapita perbulan pada 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 288,10 ribu orang, mengalami penurunan menjadi 272,70 ribu orang pada tahun 2024.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode Maret 2020 - 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dimana pada Maret 2020 nilai P1 sebesar 1,10 dan meningkat di tahun 2021 akibat covid-19, namun pada tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di daerah perkotaan.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), juga mengalami fluktuasi, namun di tahun 2024 menjadi 0,25. Kenyataan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.

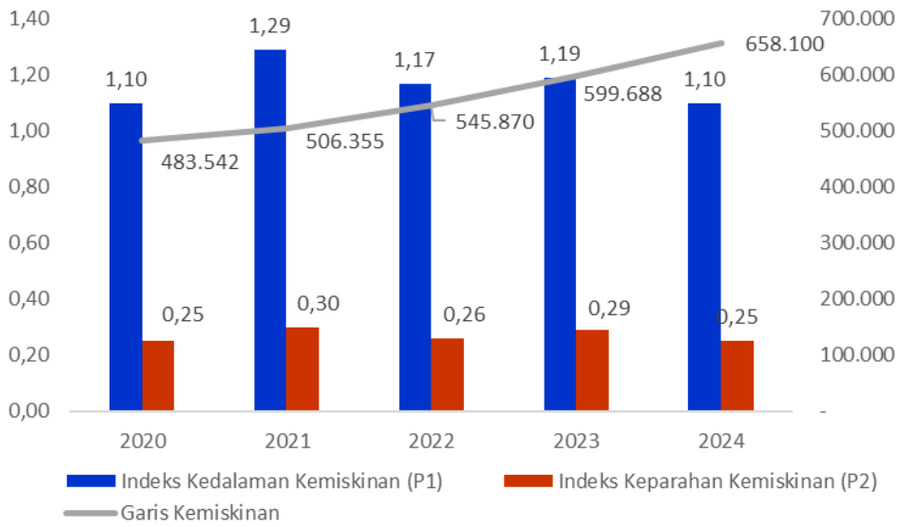

Gambar 2-16 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, data diolah, 2025

2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata- rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan

perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian IPM Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan setiap tahun, bahkan mulai tahun 2018 sudah masuk dalam kategori tinggi. Seluruh komponen menunjukkan tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir seluruh komponen tetap menunjukkan perbaikan, kecuali komponen pengeluaran perkapita. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi, sebagai akibat kontraksi perekonomian secara global maupun nasional dan regional. Namun hingga tahun 2024, capaian IPM mengalami peningkatan menjadi 74,36 di tahun 2024 (Hasil Long Form SP 2020).

Berdasarkan per kabupaten/ kota, IPM seluruh kabupaten/kota juga terus bergerak hampir menuju IPM tinggi, hanya dua kabupaten yang masih jauh untuk mencapai IPM kategori tinggi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian yang masih timpang antar wilayah dalam Provinsi Jambi ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

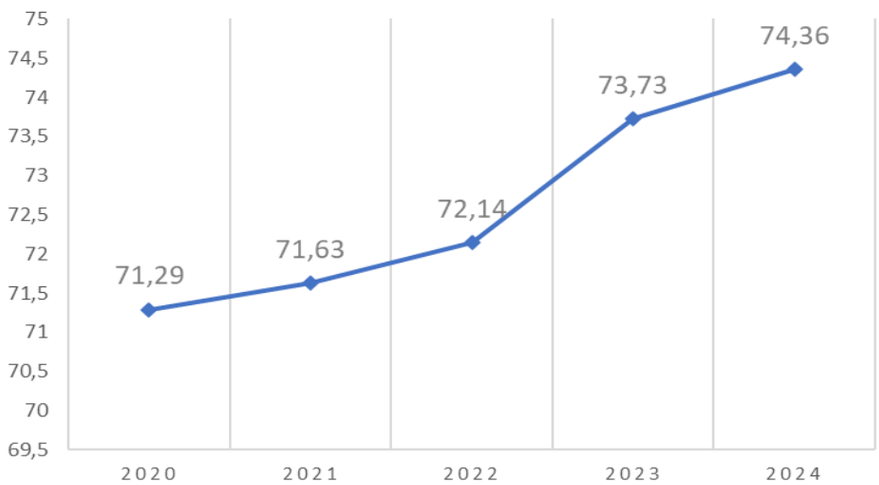

Gambar 2-17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, data diolah, 2025

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Bila melihat capaian usia harapan hidup Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir, terlihat peningkatan yang cukup menggembirakan. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2020-2024 berdasarkan hasil Long Form SP2020, terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 73,33 tahun pada 2020 meningkat menjadi 74,06 tahun pada 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Data tahun 2024 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,22 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 73,84 tahun menjadi 74,06 tahun atau meningkat 0,29%. Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

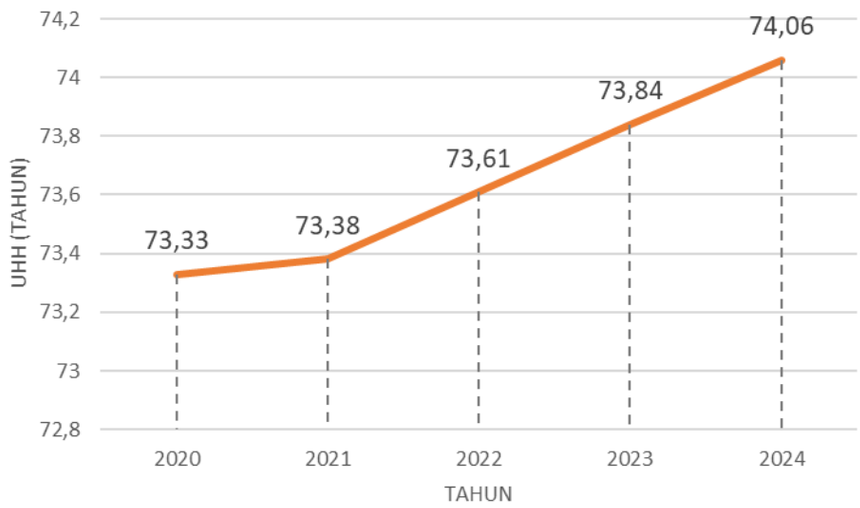

Gambar 2-18 Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 (Tahun)

Sumber : SP2020-LF, BPS Provinsi Jambi dan BPS, 2024 (data diolah)

Peningkatan Usia Harapan Hidup tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat juga mendorong masyarakat untuk

memperoleh pelayanan kesehatan berbayar yang meningkatkan kualitas kesehatan.

2.1.2.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu *(Maternal Mortality Rate)* adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Karena survei tersebut dilakukan 5 tahun sekali, maka data terkait AKI untuk data tahunan didapat dari data jumlah kematian ibu yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020, dimana Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi tercatat sebesar 177 kematian perempuan pada saat hamil, melahirkan, atau masa nifas per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding angka nasional yang sebesar 189 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup.

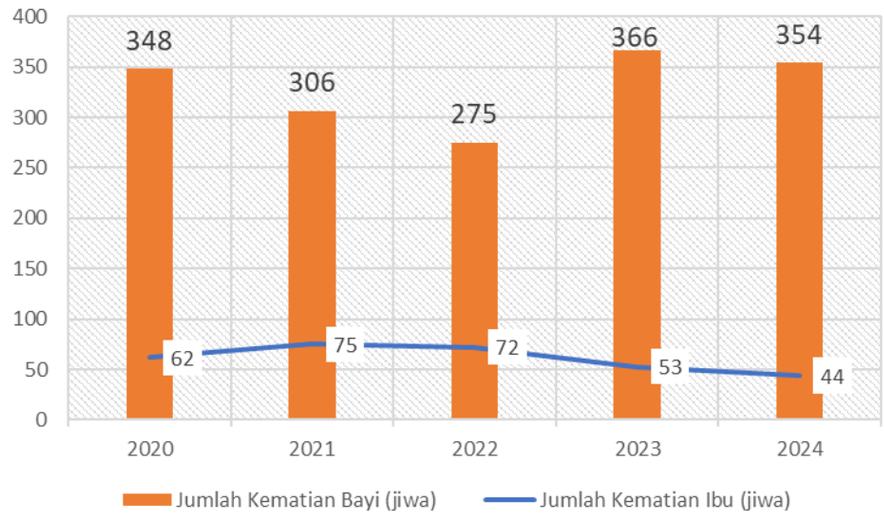

Gambar 2-19 Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 (Kasus)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak 44 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Bungo, sedangkan yang paling sedikit adalah pada Kabupaten Muaro Jambi.

Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.

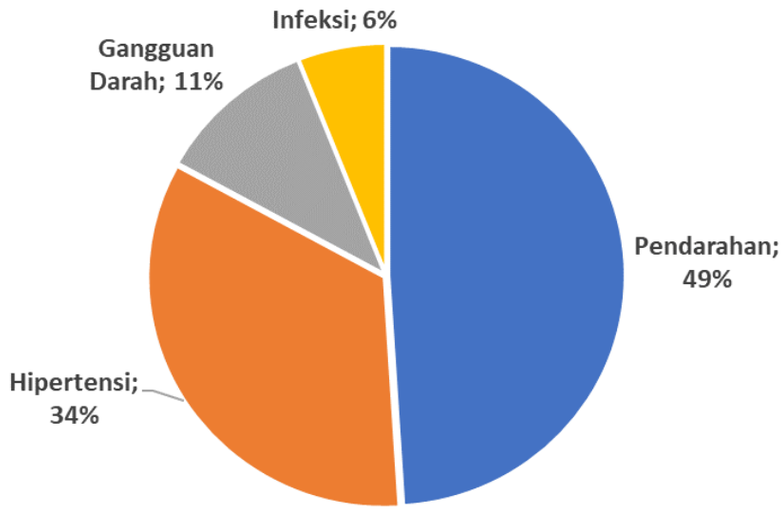

Gambar 2-20 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2024, jenis terbanyak adalah perdarahan dan hipertensi. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga. Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat

menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Berdasarkan Gambar 2-18 diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat kasus kematian bayi di beberapa kabupaten/kota sehingga secara keseluruhan angkanya meningkat di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Bungo, Tebo, Kota Jambi, Merangin dan Batang Hari terdapat peningkatan jumlah kasus kematian bayi. Melihat tren tersebut, perlu dilakukan pemetaan dan lokus penurunan kematian bayi di beberapa kabupaten/kota, serta upaya dalam menurunkan jumlah tersebut. Adapun penyebab kematian bayi tersebut terutama disebabkan oleh BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) sebanyak 36% dan Asfiksia sebanyak 32%.

Penyebab jumlah kasus kematian ibu dan kematian bayi dikarenakan belum semua nakes melaksanakan pelayanan ibu dan anak terstandar, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah, sebaran tenaga bidan yang tidak merata, dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak di beberapa Kabupaten tidak tinggal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) belum maksimal.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Permasalahan stunting merupakan salah satu fokus pemerintah di bidang kesehatan. Stunting bukan hanya terkait dengan tinggi badan anak di bawah standar yang ditetapkan. Stunting dan kekurangan gizi lainnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), di samping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan menyebabkan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Dalam rangka penyelesaian masalah *Stunting*, Pemerintah Pusat dan Daerah menerapkan aksi konvergensi intervensi, yang terdiri dari delapan tahapan, antara lain:

Aksi 1: Melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Aksi 2: Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Aksi 3: Menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat kabupaten/kota.

Aksi 4: Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.

Aksi 5: Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

Aksi 6: Meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.

Aksi 7: Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* kabupaten/kota.

Aksi 8: Melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Selain Pemerintah Pusat dan Daerah, program penurunan *Stunting* ini juga perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat, organisasi/lembaga swasta, dan universitas, melalui gerakan masyarakat sadar s*tunting* untuk pencegahan dan pemberantasan *Stunting*.

Pada Gambar 2-21 terlihat bahwa prevalensi stunting di Provinsi Jambi setiap tahun mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 berdasarkan data SSGBI, prevalensi stunting di Provinsi Jambi sebesar 21,03 persen, dan pada tahun 2024 telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 13,5 persen (Survei Kesehatan Indonesia, 2024).

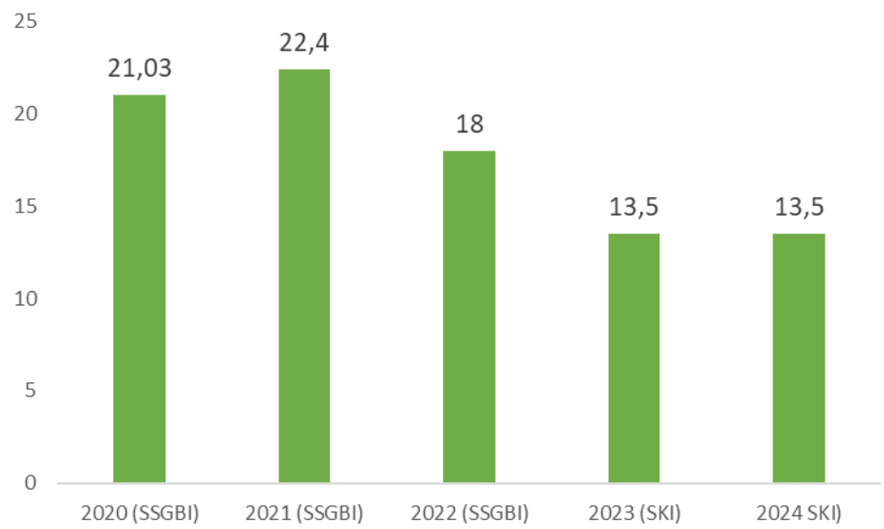

Gambar 2-21 Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (data diolah)

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan, antara lain melalui asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen, sedangkan intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya.

Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari pelibatan lintas sektor melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya 3 kebijakan dalam optimalisasi program tersebut diantaranya SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi, Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, dan SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi. Hingga 31 Desember 2023 telah diterima sebanyak 3.759 paket manfaat dalam bentuk makanan tambahan, paket antropometri kit, paket bantuan usaha, bibit, KIE, fasilitasi jamban, dan air bersih dari sebanyak 301 pemberi manfaat yang terdiri dari pemangku kepentingan, dunia usaha, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu dengan total nilai rupiah mencapai Rp2.221.337.300,00.

2.1.2.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2021 hingga 2024 capaian HLS Provinsi Jambi lebih rendah daripada HLS nasional, hanya pada

tahun 2020 memiliki capaian yang sama dengan nasional. Pada tahun 2024, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,14 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023.

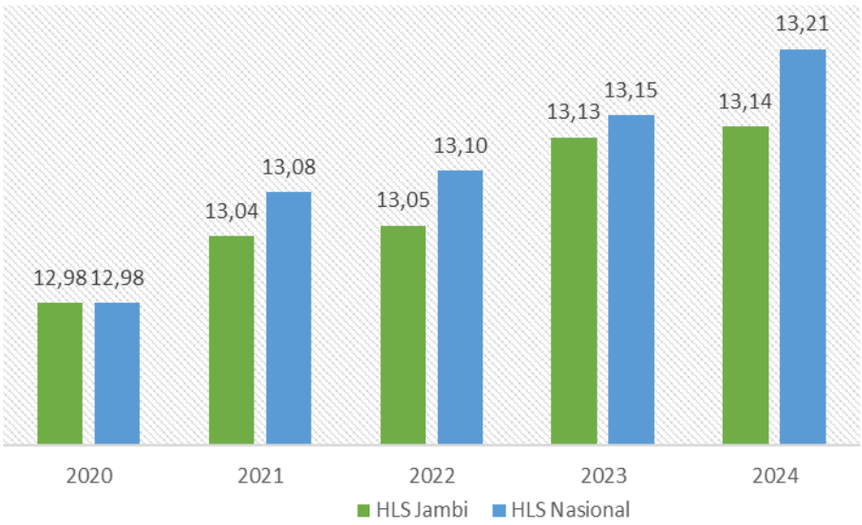

Gambar 2-22 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2020-2024

Sumber : BPS, 2025 (data diolah)

2.1.2.2.5 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang di jalani. Secara umum, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Selama rentang waktu tahun 2020-2024 rata-rata capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian nasional, namun pada tahun 2024 capaiannya berada di bawah nasional. Pada tahun 2024 RLS Provinsi Jambi adalah sebesar 8,90 tahun atau meningkat 0,09 tahun dibanding tahun 2023. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS ini adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.

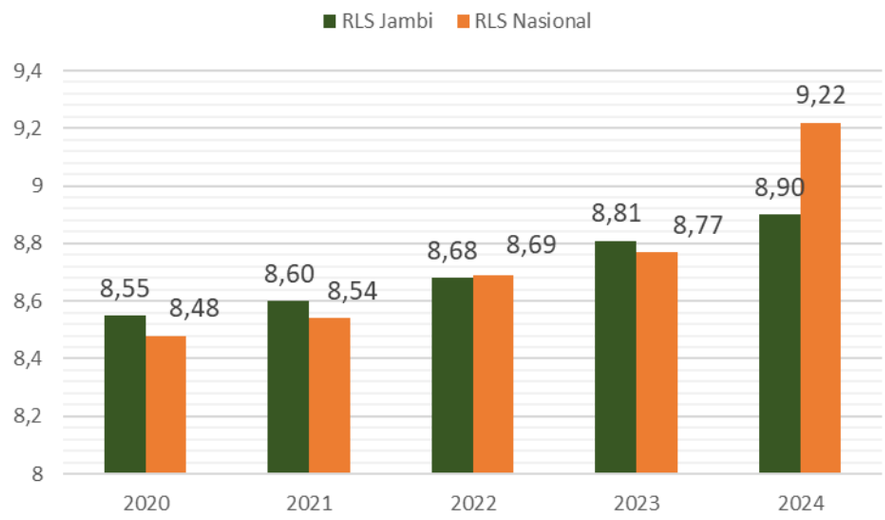

Gambar 2-23 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS, 2025 (data diolah)

2.1.2.2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui **APK** (Angka Partisipasi Kasar) dan **APM** (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

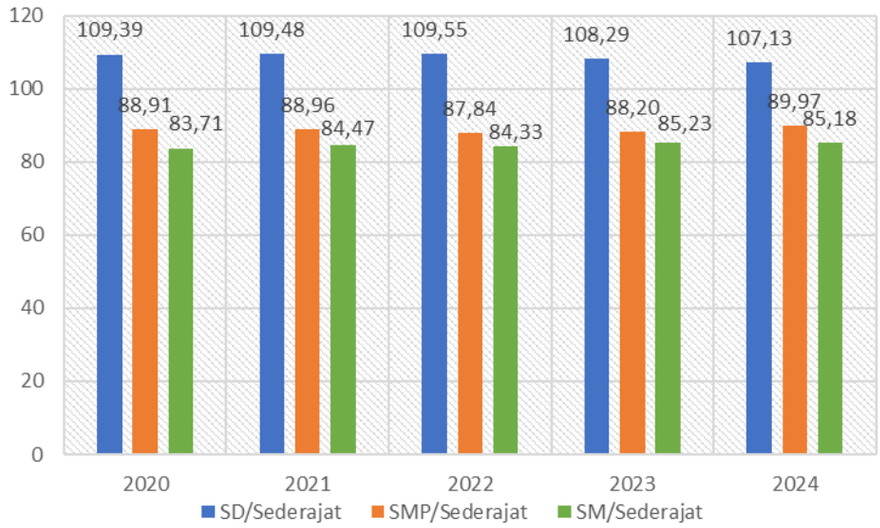

Gambar 2-24 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber : BPS, Tahun 2024

Pada tahun 2024, APK pada tingkat SD mencapai 107,13, atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 108,29. Hal ini berarti terdapat 107,13 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, APK SMP sederajat sebesar 88,91 persen menjadi 89,97 persen pada tahun 2024. Sementara, APK SMA Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2020, APK SMA sebesar 83,71 persen, meningkat menjadi 85,18 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu,

maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

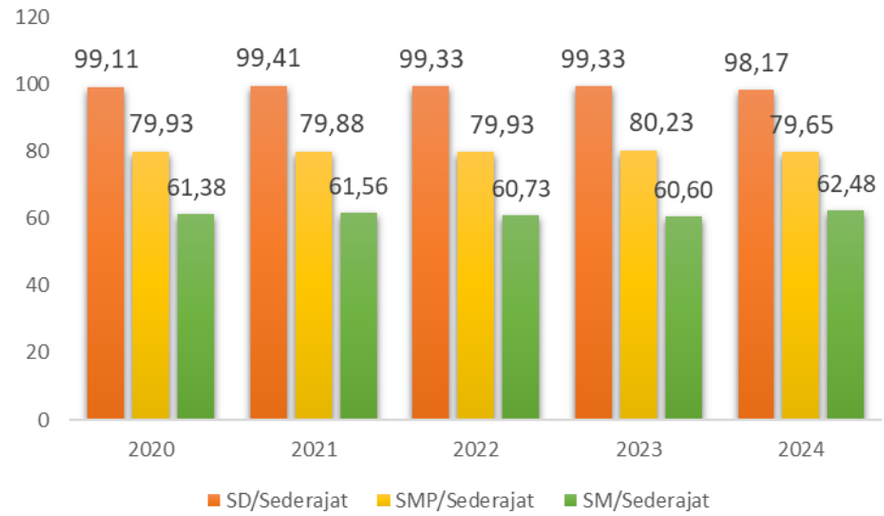

Gambar 2-25 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yaitu dari 99,11 persen pada tahun 2020 menjadi 98,17 persen pada tahun 2024. Demikian juga APM SMP yang mengalami penurunan dari 79,93 persen di tahun 2020 menjadi 79,65 persen di tahun 2024. Namun untuk APM SMA, pada tahun 2020-2024 justru mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020, APM SMA sebesar 61,38 persen, meningkat menjadi 62,48 persen pada tahun 2024. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.

Selain APK dan APM, tingkat partisipasi sekolah juga diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada

berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

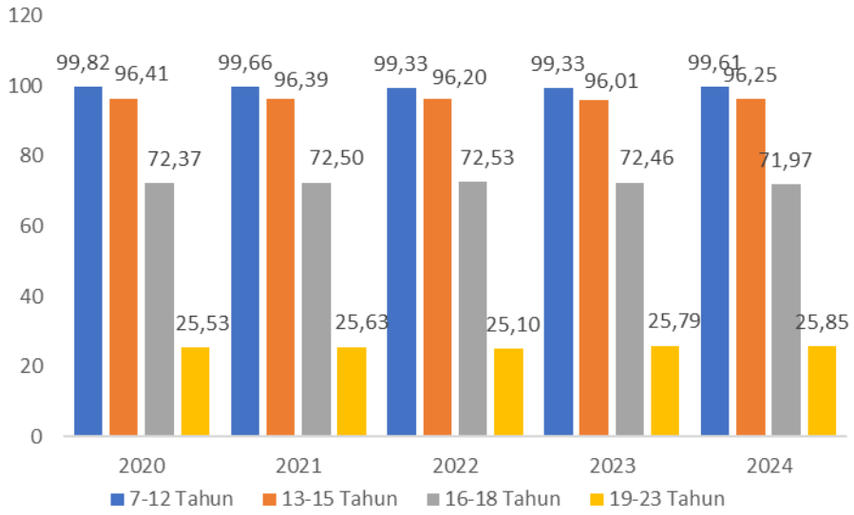

Gambar 2-26 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Meskipun angka partisipasi baik Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah cukup baik, namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas **Sumber Daya Manusia Jambi**, karena masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2024 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.
2. Tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTA menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi
3. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.

4. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Sektor seni dan budaya memegang peranan strategis dalam memperkuat identitas daerah, memperkaya kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kreatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks pembangunan daerah, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya perlu dilakukan secara terpadu melalui kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku seni, serta institusi pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya dukungan anggaran, fasilitas, serta ruang kreatif yang memadai guna menjamin kesinambungan ekosistem seni budaya yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tabel 2-10 Perkembangan Seni Budaya Provinsi Jambi tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Warisan budaya tak benda yang ditetapkan	9	10	2	3	5
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Budpar Provinsi Jambi, 2024

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi agar karya seni dan budaya Jambi mendapatkan pengakuan. Dalam rentang tahun 2019-2023 telah ditetapkan 29 warisan budaya tak benda. Guna memajukan seni budaya di Provinsi Jambi, maka ke depan program-program terkait internalisasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada generasi muda harus dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi.

2.1.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga

Dalam UU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11 Tahun 2022, tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup

kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Sport Development Index (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga.

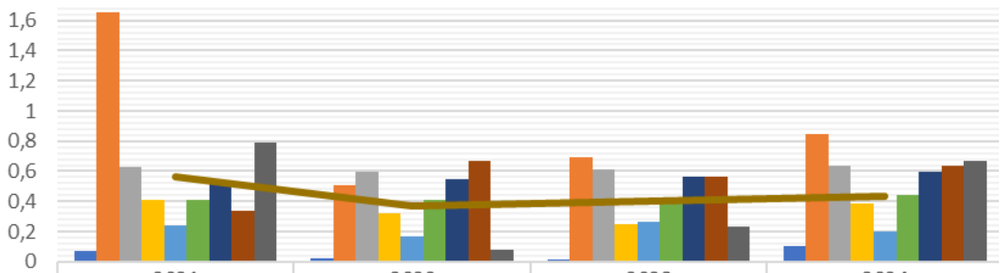

	2021	2022	2023	2024
SDM	0,073	0,019	0,016	0,107
Ruang Terbuka	1,651	0,504	0,691	0,844
Literasi Fisik	0,625	0,599	0,615	0,634
Partisipasi	0,411	0,324	0,247	0,389
Kebugaran	0,239	0,171	0,263	0,201
Kesehatan	0,409	0,412	0,415	0,444
Perkembangan personal	0,541	0,544	0,56	0,597
Ekonomi	0,336	0,667	0,567	0,637
Performa	0,793	0,082	0,233	0,666
SDI	0,564	0,369	0,401	0,436

Gambar 2-27 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)/*Sport Development Index* (SDI) Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Sumber : Kemenpora, 2025 (data diolah)

Sebagai sebuah ukuran pembangunan olahraga secara nasional, SDI sudah dilakukan sejak tahun 2004 dengan empat dimensi, yakni SDM, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran. Seiring perkembangan dan tuntutan perubahan, pada tahun 2021 disempurnakan menjadi sembilan dimensi dengan menambahkan dimensi literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Berdasarkan pada grafik di atas terlihat bahwa IPO/SDI Provinsi Jambi mulai mengalami peningkatan, namun terdapat hal yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Jambi terutama pada komponen indikator SDM yang diukur berdasarkan rasio antara jumlah ketenagaan olahraga (guru, pelatih, instruktur, dan relawan) dengan jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas pada suatu daerah, serta komponen Performa yaitu capaian olahragawan atau kelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Komponen Kebugaran juga perlu

menjadi dilakukan peningkatan, karena komponen ini menyangkut kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti.

Pada tahun 2021, performa diukur berdasarkan capaian setiap daerah dalam PON dengan indikator utama medali dan menambahkan faktor koreksi berupa jumlah atlet yang ikut berpartisipasi. Pada tahun 2022, performa diukur berdasarkan perolehan medali per cabang olahraga dipadu dengan 50 capaian olahraga disabilitas pada kejuaraan nasional setiap cabang olahraga, termasuk 14 cabang olahraga prioritas DBON. Perubahan ini dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah terkait DBON yang tertuang di dalam Perpres No. 86 Tahun 2021. Mengingat tahun 2021 ada penyelenggaraan PON dan Peparnas, praktis tidak banyak cabang olahraga yang menyelenggarakan kejuaraan nasional. Atas dasar itu, capaian cabang olahraga dalam PON dan Peparnas diasumsikan sebagai data kejuaraan nasional.

Cabang olahraga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 43 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi dan tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap, hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap.

Demikian pula dengan perkembangan organisasi olahraga dan gedung olahraga, selama kurun waktu tahun 2022 – 2024 mengalami peningkatan jumlah fasilitas olahraga dimana cabang olahraga Bola voli memliki jumlah peningkatan fasilitas olahraga kepemilikan pemda terbanyak dari 19 menjadi 122 pada tahun 2022 dan kepemilikan swasta dari 92 tahun 2022 menjadi 326 pada tahun 2024.

Tabel 2-11 Pemilikan Jumlah Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

No	Cabang Olahraga	2022		2023		2024	
		Pemda	Swasta	Pemda	Swasta	Pemda	Swasta
1	Sepak Bola	16	68	15	225	19	230
2	Tenis	24	31	24	31	17	21
3	Bulu Tangkis	16	92	16	92	20	250
4	Bola Voli	19	110	19	110	122	326
5	Basket	2	47	27	47	11	44
6	Tenis Meja	22	91	22	91	15	57
7	Pencak Silat	11	18	11	18	10	16

No	Cabang Olahraga	2022		2023		2024	
		Pemda	Swasta	Pemda	Swasta	Pemda	Swasta
8	Lap. Menembak	0	0	0	0	-	1
9	Angkat Besi	5	1	5	1	3	6
10	Senam	1	0	1	0	1	-
11	Kolam Renang	0	12	0	12	3	15
12	Taekwondo	3	3	3	3	1	3
13	Judo	3	2	3	2	1	2
14	Kempo	1	4	1	4	1	3
15	Gulat	2	4	2	4	2	2
16	Panjat Tebing	7	2	7	2	13	1
17	Golf	0	2	0	2	1	1
18	GOR	1	4	1	4	15	16
19	Dayung	3	6	3	6	8	3
20	Tinju	0	3	0	3	1	5
21	Sepak Takraw	2	29	2	29	3	31
22	Karate	5	11	5	11	3	5
23	Catur	5	4	5	4	2	3

Sumber: BPS, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Kesehatan

2.1.3.1.1.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang kesehatan suatu daerah atau negara. Indeks Kesehatan berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, serta mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan pemerintah, seperti pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan penyakit, dan gizi masyarakat. Peningkatan nilai Indeks Kesehatan menunjukkan perbaikan dalam taraf kesehatan penduduk, sedangkan stagnasi atau penurunan bisa menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

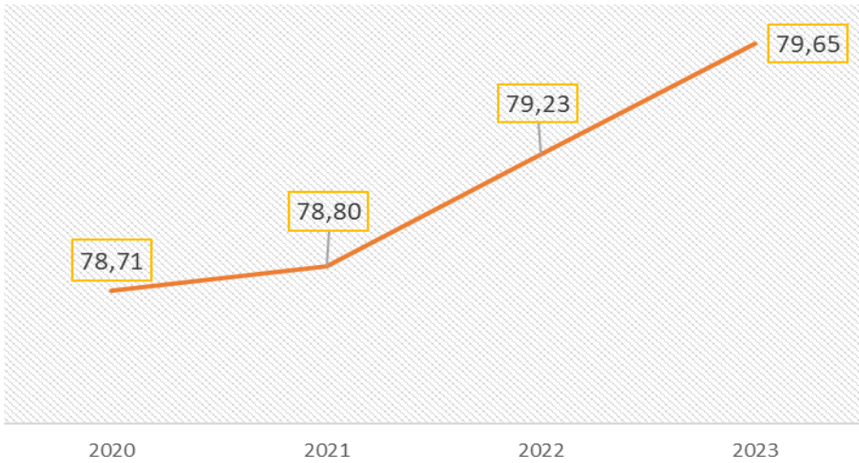

Gambar 2-28 Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Sumber : BPS, 2025 (data diolah) / data termutakhir

Pada Gambar 2-28 di atas, Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020–2023 terdapat tren peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 78,71 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai 79,65 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi baik dari sisi aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi, penanganan penyakit menular maupun tidak menular, dan lain-lain. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dari 78,80 menjadi 79,23, yang merupakan hasil dari peningkatan program kesehatan pasca pandemi Covid-19, seperti program optimalisasi pelayanan primer, peningkatan cakupan imunisasi, serta promosi kesehatan masyarakat yang lebih masif.

2.1.3.1.1.2 Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi tahun 2020-2024 sedikit mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah puskesmas tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah puskesmas. Di masa yang akan datang diharapkan terjadi keseimbangan antara penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.

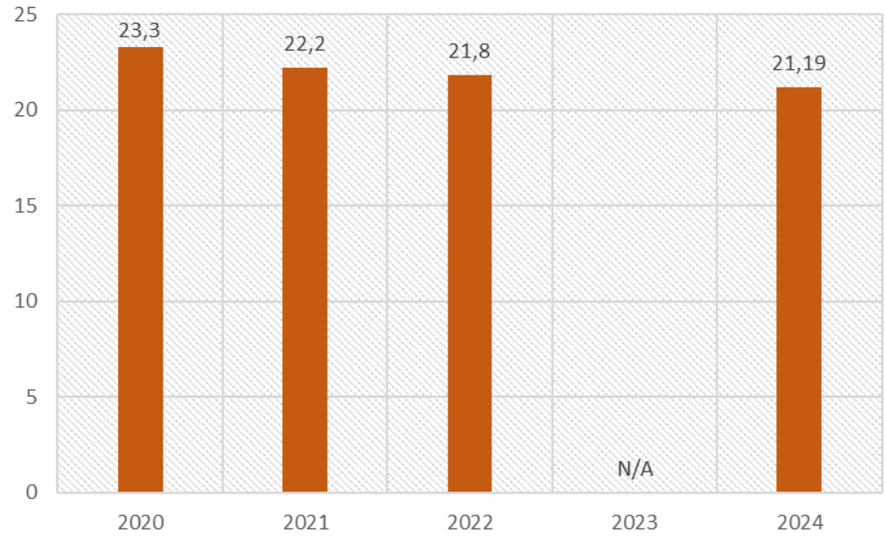

Gambar 2-29 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber : BPS, 2025 (data diolah)

2.1.3.1.1.3 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Perkembangan jumlah rumah sakit dan rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk dari tahun 2020-2024 cenderung stabil, namun di tahun 2020 dan 2022 terjadi sedikit peningkatan sebagaimana gambar berikut ini. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 2,1 persen, serta di tahun 2022 terdapat penambahan jumlah rumah sakit khusus.

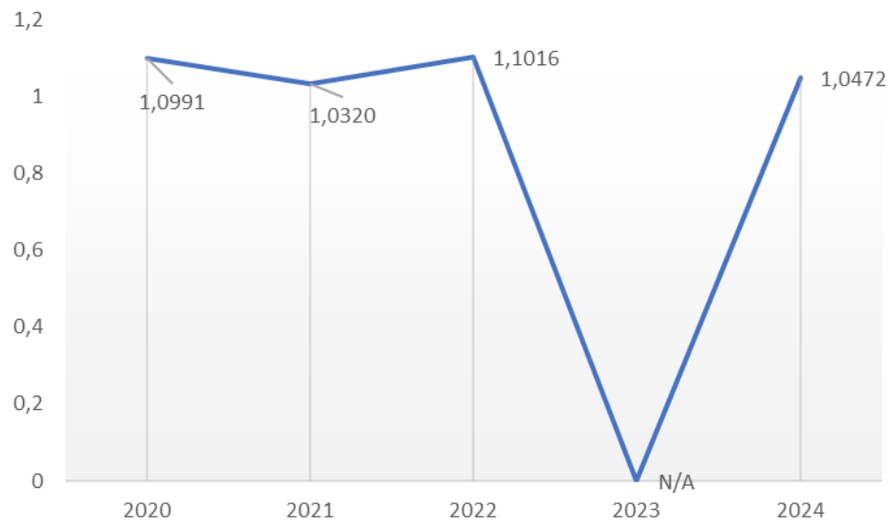

Sumber : BPS, 2025 (data diolah)

Gambar 2-30 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

2.1.3.1.1.4 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Jumlah dan rasio dokter di Provinsi Jambi dapat dilihat pada data berikut ini.

Pada tahun 2020-2024, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Provinsi Jambi masih berkisar antara 11 – 12 orang dokter spesialis, sementara rasio ideal dokter spesialis per 100.000 satuan penduduk lebih kurang 28 dokter spesialis, artinya Provinsi Jambi masih kekurangan jumlah dokter spesialis yang dapat melayani penduduk. Demikian juga dengan ketersediaan dokter umum di Provinsi Jambi, dimana pada tahun 2020-2024 berkisar antara 27 – 32 orang dokter umum per 100.000 penduduk. Sesuai standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), rasio ideal dokter umum per satuan penduduk di Indonesia adalah 1 dokter umum untuk setiap 1.000 penduduk atau 100 dokter per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa

Provinsi Jambi juga masih memiliki banyak kekurangan dokter umum untuk melayani penduduk.

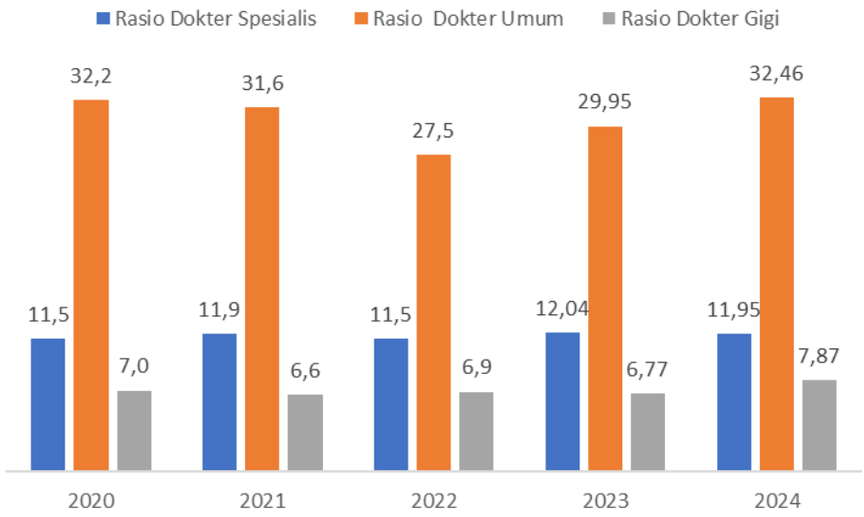

Gambar 2-31 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2020-2024

Sumber : BPS, 2025 (data diolah)

Selanjutnya, untuk rasio dokter gigi di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 berkisar antara 6 – 7 dokter gigi per 100.000 penduduk. Sementara itu, rasio ideal dokter gigi per penduduk Indonesia menurut standar WHO adalah 1 dokter gigi untuk 2.000 penduduk atau 50 dokter gigi per 100.000 penduduk. Jika melihat fakta tersebut, Provinsi Jambi masih sangat kekurangan jumlah dokter gigi yang dapat melayani penduduk.

Dengan memperhatikan standar ketersediaan tenaga medis terutama dokter, maka baik untuk dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dari sisi jumlah belum memenuhi target. Untuk itu, ke depan perlu diprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas dokter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, terutama untuk daerah-daerah terpencil.

2.1.3.1.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan

ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

2.1.3.1.2.1 Rasio Murid-Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Rasio Murid – Guru adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu tahun agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, menunjukkan semakin berkurang efektivitas proses pembelajaran, dikarenakan tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang. Hal ini memberikan pengaruh juga pada mutu pengajaran.

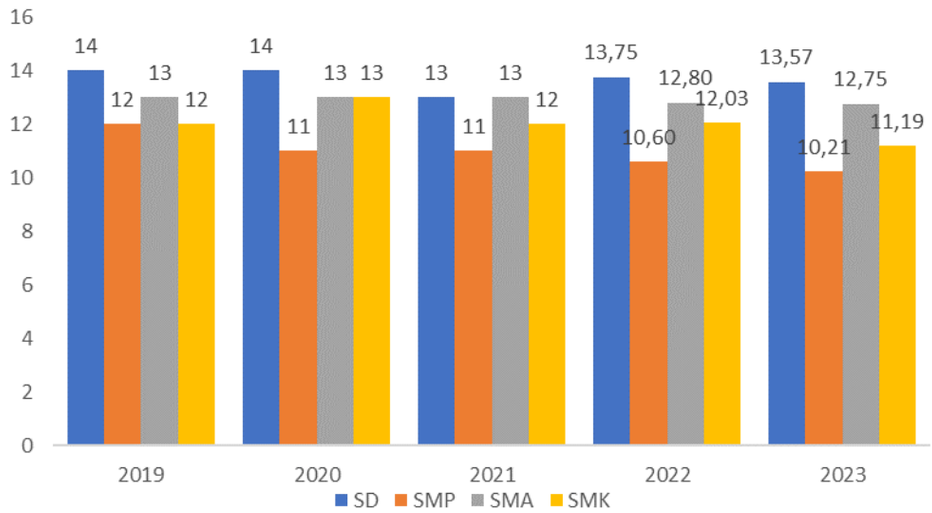

Gambar 2-32 Rasio Murid – Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, 2024 (data diolah)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid, sementara pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Berdasarkan Gambar 2.27, terlihat bahwa rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan masih memenuhi standar ideal yang ditetapkan.

Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Jambi. Pendidkan kejuruan ini akan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil pada jenjang tenaga kerja menengah untuk mendorong

percepatan pembanguan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis dan agroindustri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa inovatif produktif yang menjadi salah satu progam unggulan Provinsi Jambi. Untuk itu pembangunan pendidikan kejuruan akan menjadi prioritas baik dari segi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana, guru maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berkualitas.

2.1.3.1.2.2 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi

Kualitas seorang guru menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Karena perannya tersebut, jumlah dan kualitas guru menjadi salah satu target pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Hal ini tertuang pada target SDGs 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama dalam pelatihan guru. Target tersebut diukur dengan indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDGs, guru yang memenuhi kualifikasi adalah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yaitu bahwa kualifikasi akademik guru SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SM/sederajat adalah minimal D4 atau S1.

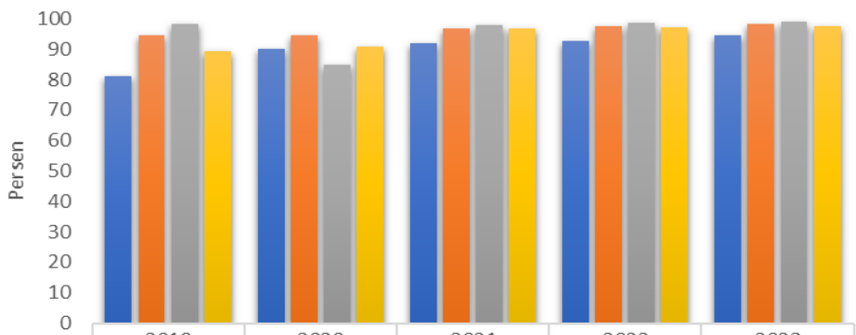

	2019	2020	2021	2022	2023
SD	81,03	90,01	92,07	92,58	94,50
SMP	94,46	94,46	96,95	97,68	98,11
SMA	98,39	84,87	97,8	98,52	98,91
SMK	89,42	90,9	96,85	97,29	97,47

Gambar 2-33 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 2.28, secara umum persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 pada setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA, maupun SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas pendidik sebagai ujung tombak pendidikan. Namun, setidaknya dapat mengindikasikan bahwa kualitas pendidik di Provinsi Jambi menjadi semakin baik

2.1.3.1.3 Sosial

Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya dapat menuntaskan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Konsep PPKS menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah sosial, meliputi : kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

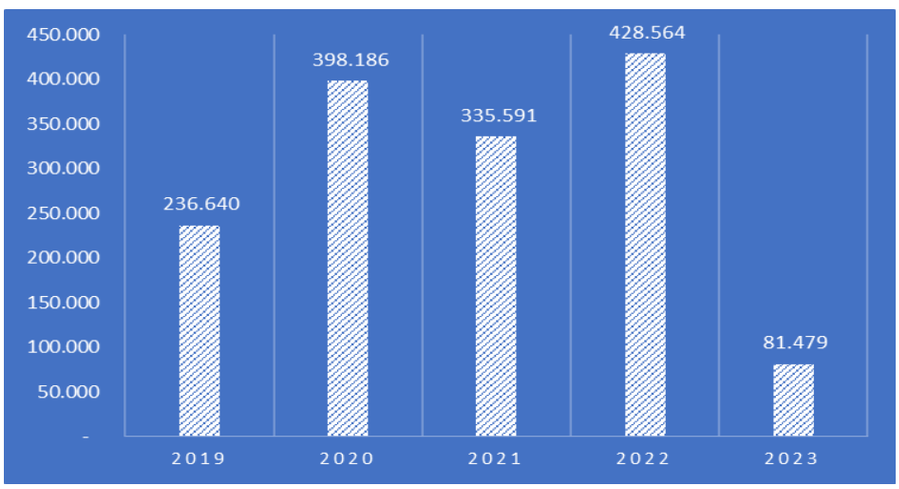

Gambar 2-34 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Sosdukcapil, 2024

Pada tahun 2019-2023, jumlah PPKS berfluktuatif, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 236.640 orang di tahun 2019 menjadi 81.479 orang, dimana persentase terbesar adalah pada kelompok fakir miskin (61,77 persen) diikuti oleh kelompok lansia terlantar (10,66 persen) dan keluarga

bermasalah sosial psikologi (8,24 persen) serta kelompok perempuan rawan sosial ekonomi (7,24 persen). Fakir miskin masih mendominasi dengan persentase terbesar dan memiliki kecenderungan meningkat, sehingga banyak masyarakat yang terdapat dalam kelompok rentan miskin menjadi penduduk miskin.

Bila dikaitkan dengan Program Penanganan PMKS secara umum ataupun program-program lain yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, program –program tersebut belum efektif atau belum dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat secara layak, sehingga dibutuhkan metode penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif**,** meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.1.3.1.4 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik Beberapa potensi konflik dan konflik yang terjadi di Provinsi Jambi pada kurun waktu tersebut terkait dengan unjuk rasa, konflik lahan, konflik sumber daya alam dan konflik politik, sosial dan budaya serta konflik SARA.

Berdasarkan data potensi konflik, pada tahun 2023 terdapat 270 desa potensi konflik, di mana yang terbanyak berada di Kabupaten Tebo dan di sektor perkebunan, salah satunya konflik Kelompok Tani Sakato Jaya dengan PT Wirakarya Sakti (WKS), di mana objek konflik yaitu terdapat 99 Kepala Keluarga mengklaim lahan seluas 1.500 Ha di areal konsesi. Potensi konflik ini tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dengan rincian dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2-12 Potensi Konflik di Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa Potensi Konflik						
		Sektor Perkebunan	Sektor Kehutanan	Sektor Pertambang-an	Sektor Industri/ Ekonomi	Sektor Batas Adminis-trasi	Sektor Per-lindungan Satwa	Sektor Konflik SARA
1	Batanghari	6	2	1	3			1
2	Bungo			2	7			
3	Kerinci	3		1	1	11		
4	Kota Jambi							
5	Kota Sungai Penuh		4				2	
6	Merangin	9	32	13		2		
7	Muaro Jambi	18			3	7		
8	Sarolangun	9						
9	Tanjung Jabung Barat	20						
10	Tanjung Jabung Timur	5				7		
11	Tebo	61	8	23		4	4	1
	Grand Total	**131**	**46**	**40**	**14**	**31**	**6**	**2**

Sumber: Badan Kesbangpol Prov. Jambi, 2024

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pada Bulan Agustus 2024 merupakan kondisi tahun 2023. Berdasarkan Gambar 2-30 di bawah, terlihat bahwa capaian indeks ini berfluktuatif. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. Pada tahun 2024 (kondisi tahun 2023) realisasi IDI Provinsi Jambi terealisasi sebesar 74,47 dalam skala indeks 0 sampai 100 atau menurun 2,72 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60), berdasarkan kriteria tersebut, tingkat demokrasi Provinsi Jambi secara umum termasuk dalam kategori “sedang”.

Secara umum, IDI dibentuk oleh 22 indikator yang terbagi dalam tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan terdiri dari 7 indikator, Aspek Kesetaraan ada 7 indikator, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi disusun oleh 8 indikator. Pada Aspek Kebebasan tertinggi pada kategori Tinggi sebanyak 4 indikator. Aspek Kesetaraan masih terdapat dua indikator berkategori buruk. Adapun indikator dengan kategori baik tertinggi pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yaitu sebanyak 5 indikator.

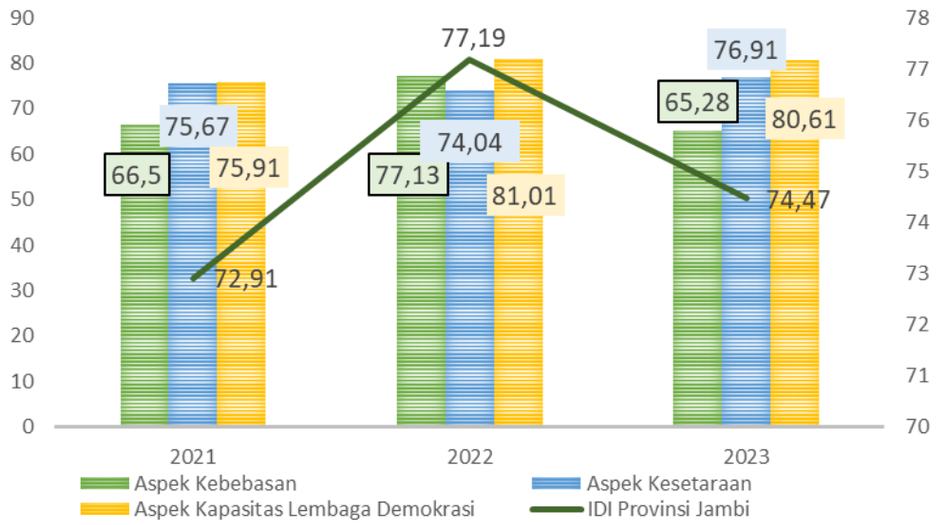

Gambar 2-35 Perkembangan Aspek IDI Tahun 2021-2023 Provinsi Jambi

Sumber: BPS, 2025 (data termutakhir)

Berdasarkan data tersebut, yang perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kebebasan yang mengalami penurunan, dan merupakan aspek terendah dalam IDI tahun 2024. Penurunan tersebut terutama terjadi pada indikator 1 (terjaminnya kebebasan berkumpul berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara), Indikator 2 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat), Indikator 3 (Terjaminnya kebebasan berkeyakinan), dan Indikator 7 (Kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya). Penurunan tersebut disebabkan masih ditemukan beberapa kasus/kejadian yang menyebabkan nilai dari keempat indikator tersebut mengalami penurunan.

Demikian juga untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, indikator 18 (Putusan pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan satu-satunya indikator yang berkinerja rendah, yang disebabkan masih ditemukan putusan amar yang dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian dan pihak tergugatnya adalah Pemerintah. Indikator 21 (Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik) juga perlu diwaspadai karena mengalami penurunan signifikan dari 80,80)kategori tinggi) menjadi 65,60 (kategori sedang). Indikator ini diukur melalui pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, yang menjadi alat ukur sistematis bagi suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna mendapatkan nilai indeks pelayanan publik. Pelayanan publik dimaksud adalah bentuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

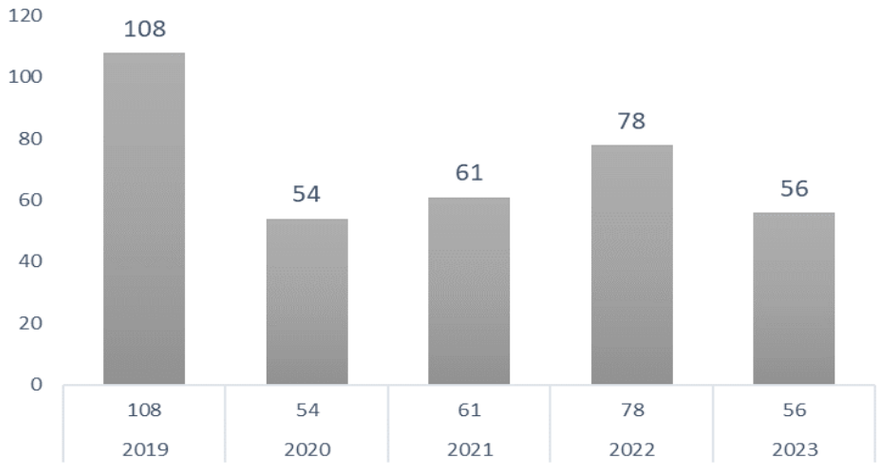

Gambar 2-36 Unjuk rasa yang terjadi tahun 2019-2023

Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2024

Perkembangan jumlah demo pada tahun 2019-2023 berfluktuatif, di mana pada tahun 2019 jumlah demo paling banyak terjadi yaitu sebanyak 108 demo, dengan beberapa kriteria demo terutama terkait sumber daya alam, politik, dan ekonomi, namun tidak berujung anarkis. Pada tahun 2020 terjadi 6 kali demo yang berujung anarkis, namun pada tahun 2021 semua merupakan demo damai. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan.

Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana alam maupun non-alam. Tingginya risiko bencana dapat menghambat proses pembangunan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik seperti infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak. Oleh karena itu, upaya penurunan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap bencana, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini dan mitigasi.

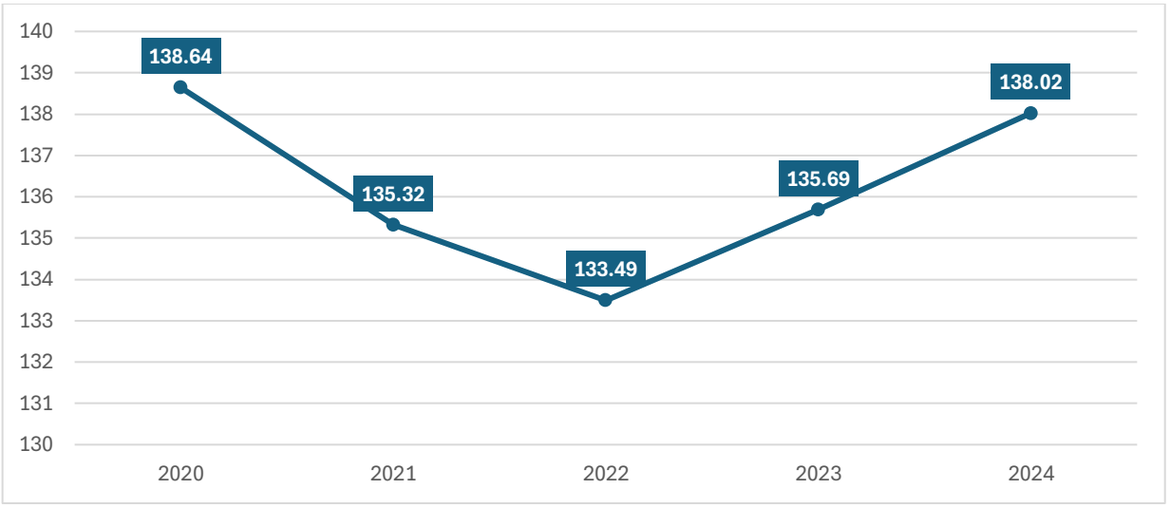

Gambar 2-37 Indeks Resiko Bencana Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: Inarisk, 2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2022, nilai indeks mengalami penurunan dari 138,64 menjadi 133,49. Namun pada tahun 2023 hingga 2024 nilai IRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai sebesar 138,02. Nilai IRB Provinsi Jambi yang kembali meningkat dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan kerentanan atau berkurangnya kapasitas wilayah dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya potensi kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan apabila terjadi bencana, serta dapat menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa hal antisipasi seperti penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko berbasis data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah.

Beberapa wilayah di Provinsi Jambi termasuk wilayah rawan terhadap bencana, terutama bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan masyarakat di desa/kelurahan tersebut memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana, mampu mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2021 telah terbentuk 98 Desa Tangguh Bencana, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-13 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana
2016	38
2017	21
2018	18
2019	14
2020	3
2021	4
2022	2

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023

2.1.3.1.5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.5.1 Jalan dan Jembatan

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral. Apabila tidak mampu dilaksanakan berakibat pada aktivitas barang dan orang akan terhambat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi adalah 1.129,906 km, selisih diantaranya sepanjang 375,025 km ruas jalan provinsi tersebut dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

Panjang jalan Provinsi Jambi tahun 2023 adalah 1.032,84 km dan belum termasuk panjang jalan nasional dan kabupaten/kota, dan di tahun 2024 dengan dinaikkannya status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang mencapai 151,30 km, sehingga panjang jalan kewenangan provinsi menjadi 1.183,79 km. Jalan Provinsi Jambi didominasi dengan kondisi jalan yang beraspal sepanjang 823,05 km, sedangkan jalan yang tidak beraspal sepanjang 90,08 km. Kondisi jalan dengan kondisi baik sebesar 58,89 persen, kondisi sedang sebanyak 15,81 persen, sisanya berstatus rusak sebanyak 5,48 persen, dan rusak berat sebanyak 19,82 persen.

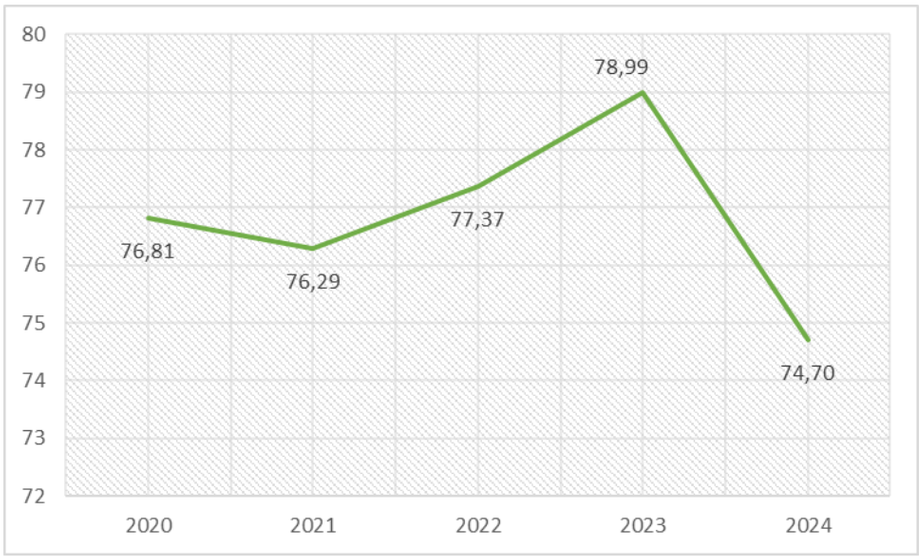

Gambar 2-38 Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Hasil yang dicapai terhadap upaya peningkatan kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan kondisi Mantap sampai tahun 2024 adalah 74,70 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 78,99 persen. Hal tersebut dikarenakan pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang 151,30 km, dimana terdapat delapan ruas jalan kabupaten yang kondisinya sudah rusak berat, sementara anggaran pembangunan jalan Provinsi Jambi juga terbatas, sehingga memperlambat perbaikan atau pemantapan jalan provinsi tersebut.

2.1.3.1.6 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berfokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dalam meningkatkan standar hidup 40% terbawah, tantangan yang di hadapi ialah akses terhadap hunian layak.

Berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/DPUPR-7/2024 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Jambi bahwa total kawasan kumuh Kewenangan Provinsi adalah sebanyak 134,36 Hektar,

dengan luasan terbanyak adalah di Kabupaten Sarolangun sebanyak 45,10 hektar, dan yang paling sedikit yaitu Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 10,82 hektar.

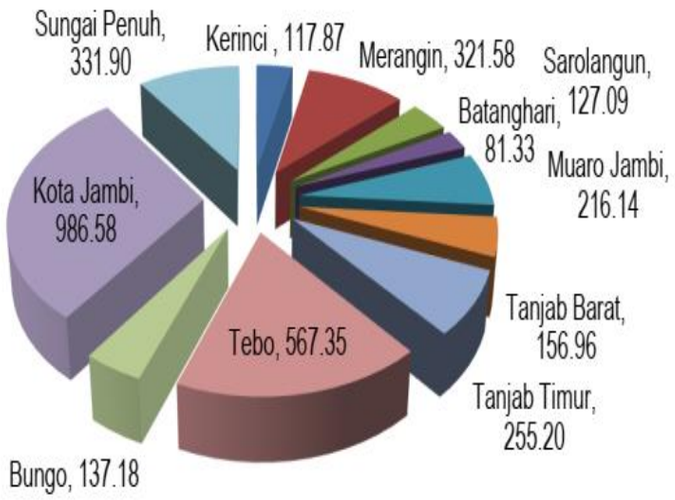

Gambar 2-39 Jumlah Luasan Kawasan Kumuh di Provinsi Jambi

Sumber: Dinas PUPR, 2023

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2020 rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses hunian layak sebesar 61,41 persen, hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 66,21 persen. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan menjadi perhatian, terutama dengan pertimbangan antara lain kepadatan penduduk yang terus meningkat, penyediaan sumber air yang aman, dan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Untuk itu, ke depan diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk, memperbanyak ketersediaan sumber air aman, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

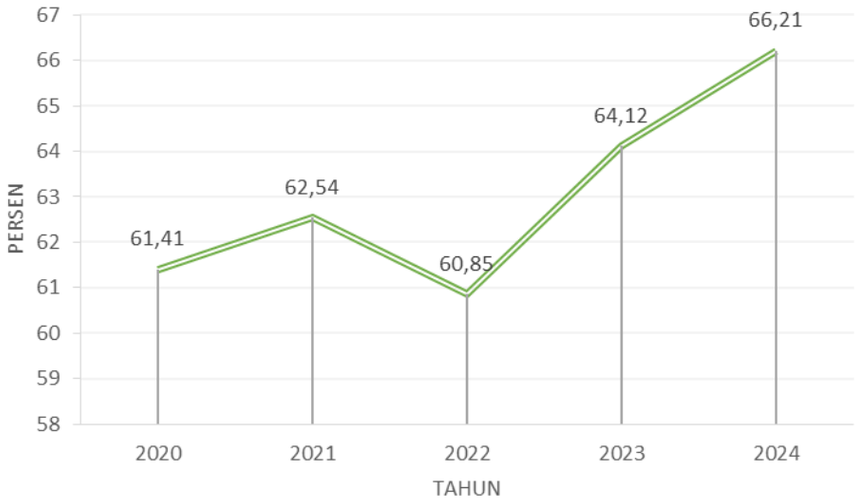

Gambar 2-40 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Jambi 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Gambar 2.37 menunjukkan bahwa sekitar 83,97 persen rumah tangga di Provinsi Jambi pada tahun 2024 telah memiliki akses ke sanitasi layak, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga di perkotaan dengan akses ke sanitas layak lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di perdesaan.

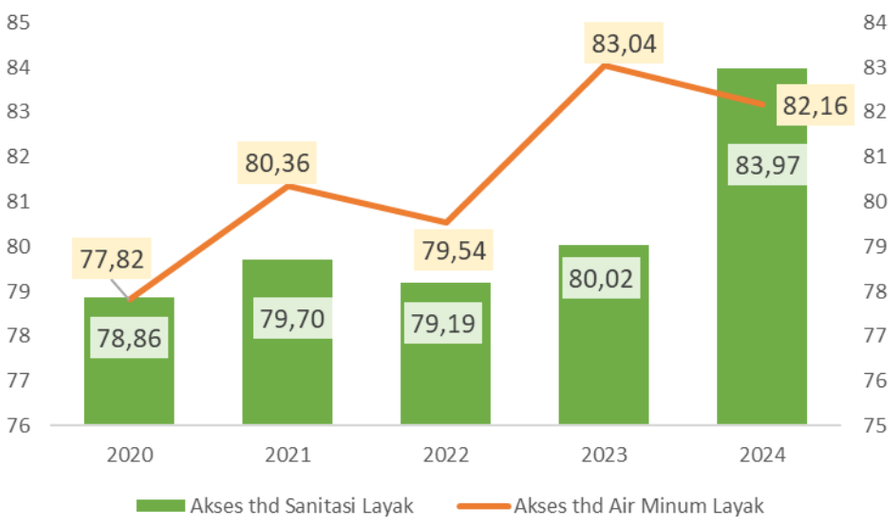

Gambar 2-41 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Air Minum Layak di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber : BPS, 2025

Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain (contoh: memasak dan MCK). Rumah dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindung, dan (9) mata air terlindung.

Di Provinsi Jambi, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 hanya mencapai sebesar 75,82 persen rumah tangga, dan semakin meningkat di tahun 2024 menjadi 82,16 persen. Namun meskipun memang menunjukkan tren peningkatan, tetapi capaian 82,16% pada tahun 2024 masih jauh dari ideal dan memperlihatkan disparitas antar kabupaten/kota: Kota Jambi mencapai 95,30%, sedangkan Merangin hanya 51,26%. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi air bersih karena terdapat banyak desa belum terkoneksi dengan sistem perpipaan PAM dan mengandalkan sumber air permukaan atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, kapasitas instalasi pengolahan air minum di PDAM regional belum mencukupi kebutuhan, sementara dana perbaikan dan penggantian pipa tua sering tertunda akibat prosedur pengadaan yang kompleks. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di daerah terpencil atau perdesaan belum menikmati layanan dasar yang memadai.

2.1.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 32.160 orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2024 adalah sebesar 68,87 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin dibanding Agustus 2023 yang menunjukkan data sebesar 68,75 persen. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Namun, perlu dilakukan peningkatan upaya

perluasan lapangan pekerjaan dan penumbuhan wirausaha baru untuk menampung angkatan kerja yang ada di masa yang akan datang.

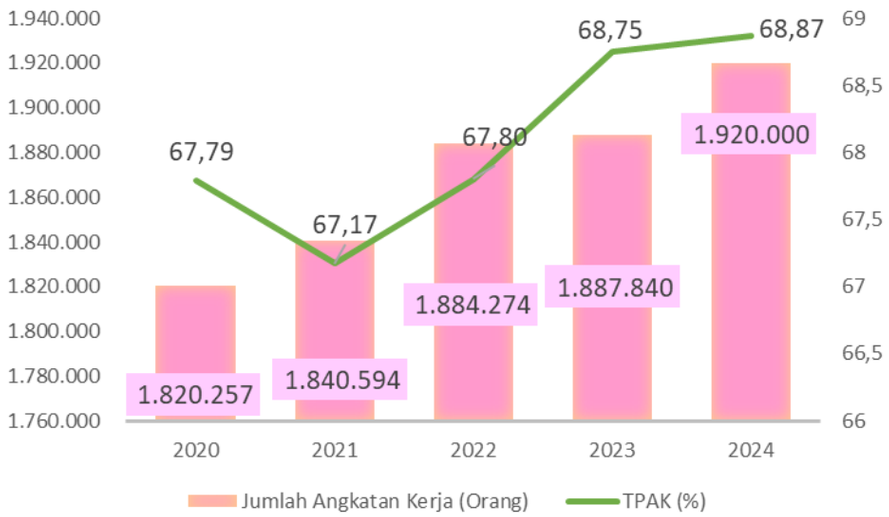

Gambar 2-42 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Bila dilihat tren sektoral, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,92 persen, perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,64 persen, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 5,64 persen. Sementara jika dilihat pertumbuhannya pada periode Agustus 2023 – Agustus 2024, beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (32.760 orang), pertambangan dan penggalian (8.810 orang), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5.790 orang). Sementara untuk lapangan pekerjaan Pertanian mengalami penurunan sebesar 9.210 orang.

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 35,07 persen. Sementara penduduk yang pernah sekolah tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 12,66 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SMA dan SMK mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 0,83 poin dan 0,19 poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP turun 0,30 persen poin.

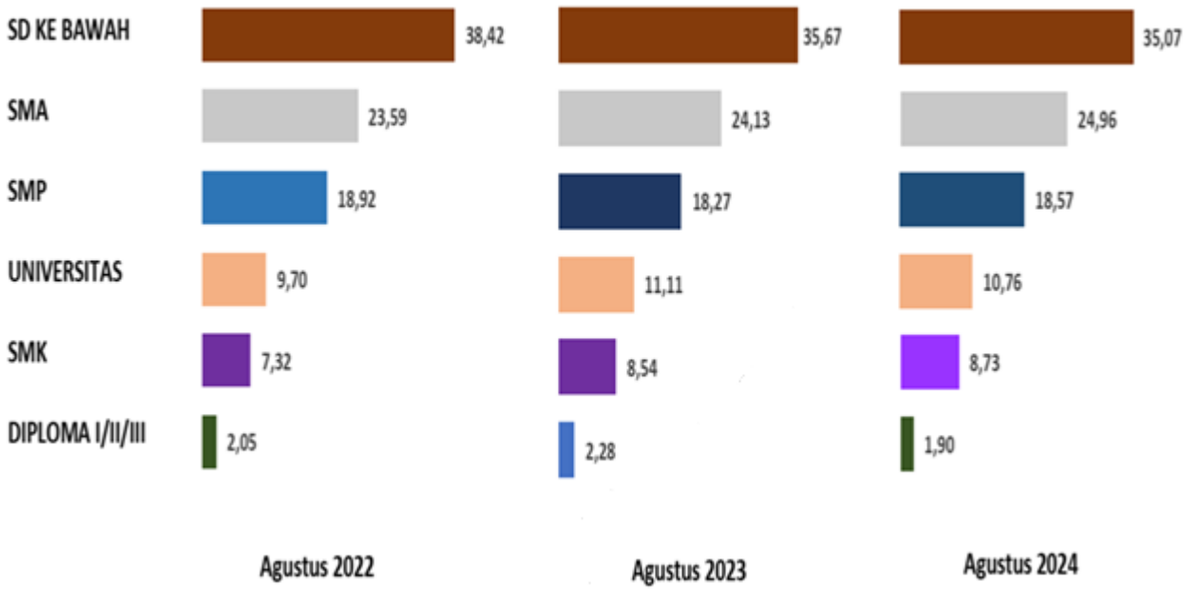

Gambar 2-43 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022-2024

Sumber: BPS, 2025

Untuk mendorong tingkat produktivitas, maka angkatan kerja perlu diarahkan kepada pendidikan kejuruan, sehingga angkatan kerja yang tamat SLTA sederajat akan memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya, dan capaiannya lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai 4,91 persen di tahun 2024.

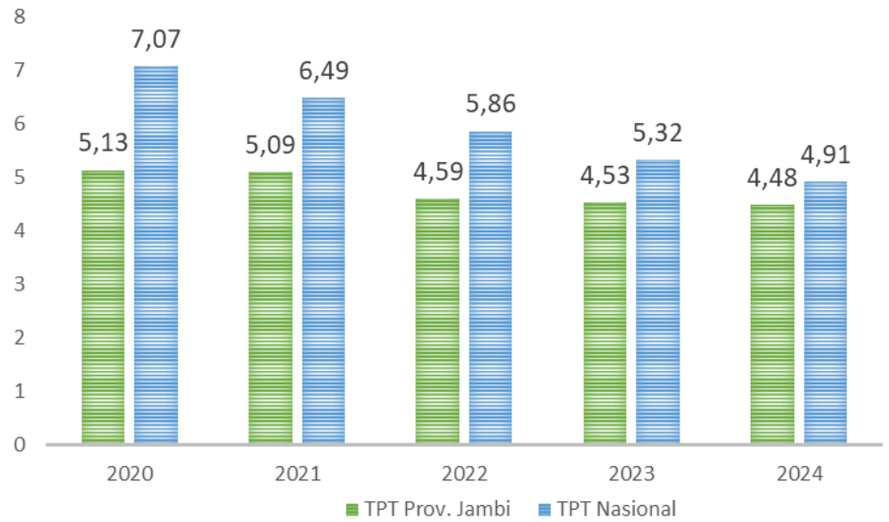

Gambar 2-44 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi didominasi oleh penganggur dengan pendidikan SMK, meskipun setiap tahun semakin menurun, sementara yang paling sedikit adalah penganggur dengan pendidikan SD ke bawah. Untuk itu, ke depannya perlu dilakukan percepatan dalam mengatasi penganggur pada tingkat SMK dengan lebih banyak bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga penganggur dengan pendidikan SMK dapat lebih banyak terserap di pasar tenaga kerja.

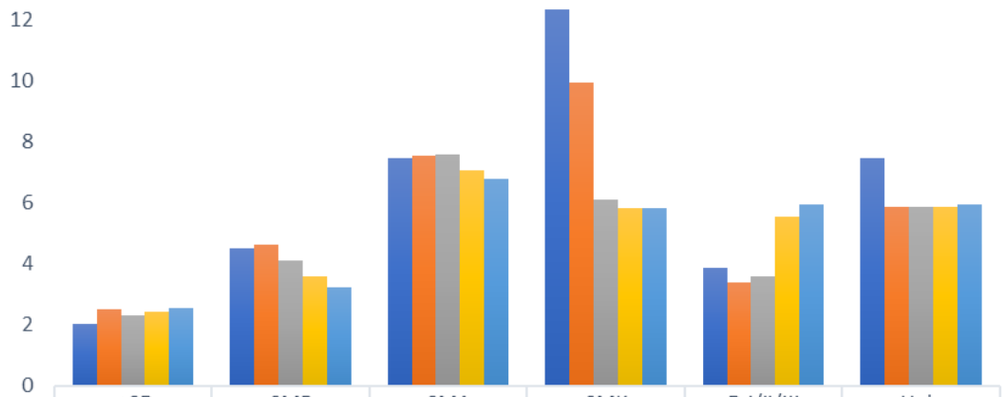

	≤ SD	SMP	SMA	SMK	D I/II/III	Univ
2020	2,03	4,51	7,45	12,35	3,86	7,47
2021	2,52	4,63	7,55	9,950	3,39	5,88
2022	2,32	4,10	7,57	6,110	3,59	5,86
2023	2,42	3,60	7,05	5,820	5,54	5,85
2024	2,53	3,24	6,8	5,820	5,96	5,95

Gambar 2-45 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2025

2.1.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung menguntungkan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi yang masih belum optimal.

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender, yang dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi (pasar tenaga kerja). Idealnya, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut serta dalam pembangunan dan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari pembangunan. Nilainya berkisar dari 0, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai nilai yang sama, hingga 1, dimana salah satu gender mempunyai nilai yang lebih rendah dalam semua dimensi yang diukur.

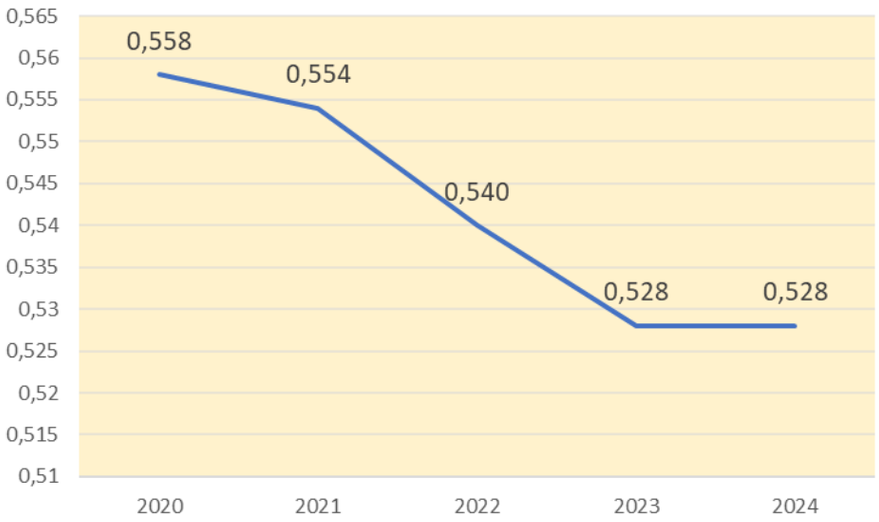

Gambar 2-46 IKG Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS, 2025 (data diolah)

Ketimpangan gender di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,03 poin, rata-rata turun 0,0008 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022, turun 0,014 poin yang utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam pemberdayaan perempuan. Proporsi anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2021 menjadi 16,36 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, pada dimensi pasar tenaga kerja yang direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengalami peningkatan dari 50,04 persen pada tahun 2020 menjadi 51,17 persen pada tahun 2024. Ketiga dimensi pembentuk IKG secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi yang membaik berarti risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Perbaikan pada indeks kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Provinsi Jambi telah berhasil diminimalkan.

Pada Tabel 2-18 di bawah ini menggambarkan perkembangan indikator pembentuk IKG Provinsi Jambi. Pada Dimensi Kesehatan Reproduksi Perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Pada tahun 2020, angka MTF sebesar 33,1 persen, kemudian secara berturut-turut turun hingga menjadi 19,9 persen pada tahun 2024. Indikator MHPK20 selama tahun 2020–2024 juga mengalami penurunan dari 32,8 persen menjadi 30,0 persen. Hal tersebut menunjukkan kesehatan reproduksi perempuan yang semakin membaik karena risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun.

Tabel 2-14 Perkembangan Indikator Pembentuk Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,331	0,325	0,259	0,238	0,199
MHPK20	Perempuan	0,328	0,312	0,334	0,324	0,300
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-Laki	85,45	85,45	83,64	83,64	87,27
	Perempuan	14,55	14,55	16,36	16,36	12,73
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-Laki	38,96	39,74	40,53	41,37	42,75
	Perempuan	33,33	33,73	35,28	35,93	35,98
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-Laki	84,96	83,01	86,17	85,27	86,04
	Perempuan	50,05	49,89	48,97	51,68	51,17

Sumber : BPS, 2025

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator yang dibagi menurut gender, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2020–2023, persentase anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi cenderung meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2020 menjadi 16,36 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, persentase anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan menjadi 12,73 persen. Kondisi ini merepresentasikan bahwa peran laki-laki dalam pengambilan keputusan menjadi lebih dominan daripada perempuan. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bagi Provinsi Jambi adalah meningkatkan komponen persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen serta persentase sumbangan pendapatan perempuan.

Sementara itu, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan minimal SMA ke atas selama kurun waktu 2020–2024 konsisten meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas pada tahun 2020 sebesar 38,96 persen, meningkat menjadi 42,75 persen pada tahun 2024 (naik 3,79 persen poin), sementara perempuan meningkat dari 33,33 persen pada tahun 2020 menjadi 35,98 persen pada tahun 2024 (naik 2,65 persen poin). Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki juga membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki makin setara

Kaum perempuan umumnya memiliki peluang yang terbatas untuk mendapatkan penghasilan tinggi. Bagi perempuan yang memasuki angkatan kerja, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Pada kedua sektor tersebut, perempuan rentan dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Hal ini menunjukkan posisi perempuan yang lemah dalam pasar tenaga kerja, di mana terdapat ketidaksetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga dan kesulitan beralih dari pekerjaan di dalam rumah ke pekerjaan di luar rumah. Pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki umumnya dihubungkan dengan faktor biologis, psikologis, dan sosial laki-laki, seperti identik dengan pekerjaan yang mengandalkan fisik kuat. Sementara pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan identik dengan fisik lemah dan tanpa keahlian. Kaum perempuan pada umumnya lebih terampil dalam hal pelayanan atau berkomunikasi dengan orang lain, sebagai contoh menjadi pedagang, pramuniaga, pramusaji, tenaga pendidik, tenaga kesehatan (perawat), dan profesi jasa lainnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pekerja perempuan lebih banyak bekerja di sektor

perdagangan, penyediaan makanan dan minuman, dan sektor jasa dibandingkan pekerja laki- laki.

Hal tersebut dapat dilihat pada Dimensi pasar tenaga kerja yang direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama tahun 2019–2023 baik TPAK perempuan maupun laki-laki semakin meningkat. TPAK laki-laki pada tahun 2019 sebesar 84,16 persen meningkat menjadi 85,27 persen pada tahun 2023 (meningkat 1,11 persen poin), sementara TPAK perempuan meningkat dari 46,74 persen pada tahun 2019 menjadi 51,68 persen pada tahun 2023 (meningkat 4,94 persen poin). Peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara

Sehubungan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Selanjutnya, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2024, terdapat 293 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang tercatat, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 224 kasus. Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 104 kasus, Psikis 80 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 64 kasus. Peningkatan kasus ini lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, di samping itu juga disebabkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan sehingga meningkatkan jumlah pelaporan. Untuk jenis kasus kekerasan pada anak yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 227 kasus, disusul Fisik sebanyak 88 kasus, dan Kekerasan Psikis sebanyak 87 kasus.

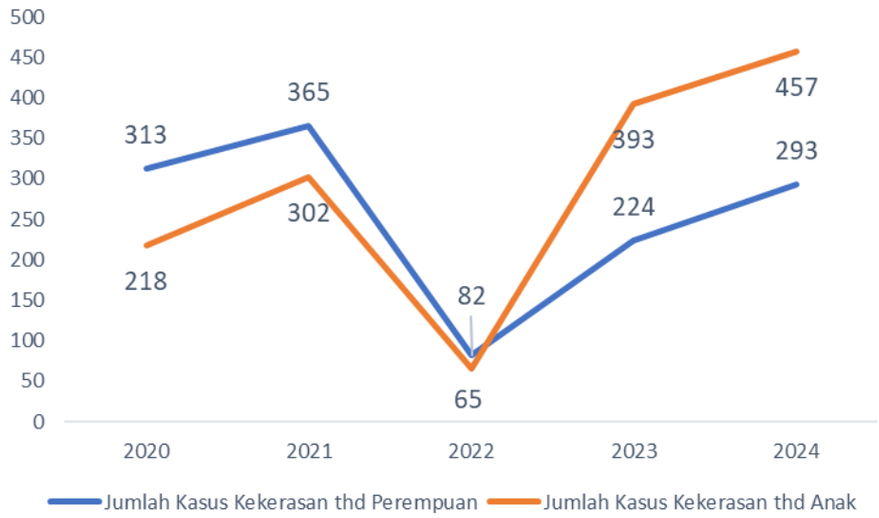

Gambar 2-47 Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024

Sumber : Kementerian PPPA, 2025 (data diolah)

2.1.3.1.9 Urusan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data

secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi periode tahun 2020-2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2024 mencapai 74,94, meningkat dibanding capaian pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada aspek Keterjangkauan yang terdiri dari persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik, serta Aspek Pemanfaatan Pangan, yang terdiri dari Rata-rata Lama Sekolah Perempuan berusia di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup pada saat lahir.

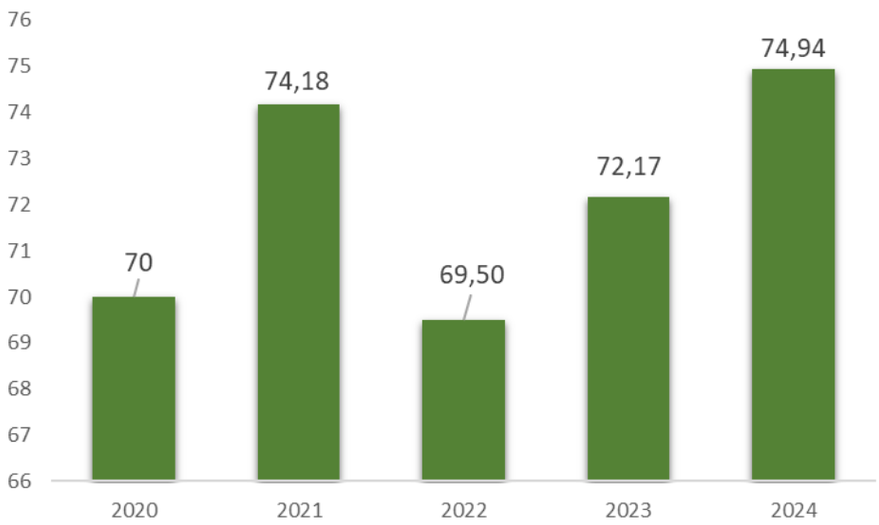

Gambar 2-48 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi tahun 2020-2024, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita meskipun sedikit mengalami penurunan namun telah melebihi angka kecukupan gizi untuk energi di tingkat ketersediaan ideal sebesar 2.400 Kkal/kap/Hari.

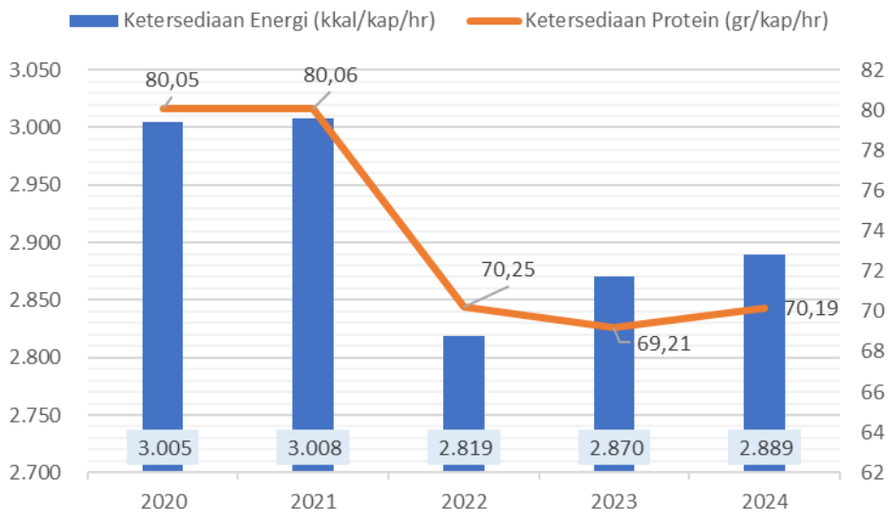

Gambar 2-49 Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi telah melebihi ketersediaan energi ideal, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi dapat terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2020-2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian) yaitu lebih dari 50 persen.

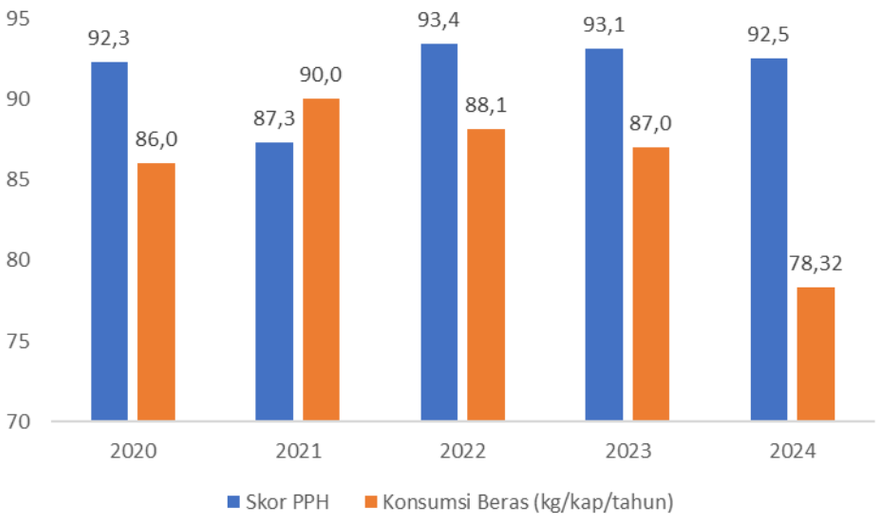

Gambar 2-50 Perkembangan Skor PPH dan Konsumsi Beras Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

2.1.3.2 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menggambarkan persentase penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan

harian secara layak, angka ini mencerminkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko rawan pangan dan gizi buruk. Penurunan prevalensi ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di suatu daerah. Oleh karena itu, upaya perbaikan pola konsumsi masyarakat, peningkatan akses pangan bergizi, serta penguatan program perlindungan sosial menjadi langkah penting yang perlu terus diperkuat oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan.

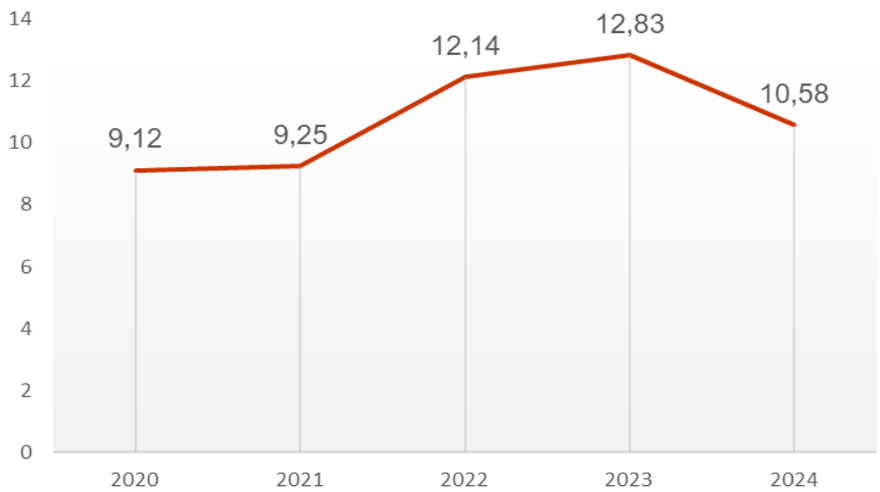

Gambar 2-51 Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

2.1.3.2.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP)

Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, angka PKKP tercatat sebesar 9,12%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,25% pada tahun 2021. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi daya beli masyarakat serta distribusi pangan di sejumlah wilayah. Pada tahun 2022, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 12,14 persen. Kondisi ini mengindikasikan memburuknya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, di mana semakin banyak penduduk yang belum memperoleh asupan energi minimum yang dianjurkan. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan angka PKKP kembali meningkat menjadi 12,83 persen. Lonjakan selama dua tahun berturut-turut ini mencerminkan tekanan serius terhadap sistem ketahanan pangan, khususnya dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan PKKP ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama, antara lain tingginya volatilitas harga pangan pokok, ketimpangan distribusi logistik antarwilayah, serta masih kuatnya

ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Harga beras, telur, dan minyak goreng yang mengalami kenaikan selama periode tersebut memberikan tekanan langsung pada daya beli rumah tangga miskin dan rentan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur distribusi, khususnya di wilayah perdesaan, turut memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang bersifat lintas sektor dan berbasis wilayah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem cadangan pangan daerah, mengembangkan produksi pangan lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperbaiki rantai pasok dan distribusi pangan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selain itu, penguatan data dan sistem pemantauan ketahanan pangan sangat diperlukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pasar serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan dengan menurunnya angka PKKP menjadi 10,58%. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam sistem distribusi pangan, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta penguatan intervensi pemerintah melalui berbagai program ketahanan pangan.

2.1.3.2.2 Urusan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kinerja urusan lingkungan hidup Provinsi Jambi dapat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dan merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Penghitungan nilai IKLH didasarkan pada 4 indikator utama, yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut.

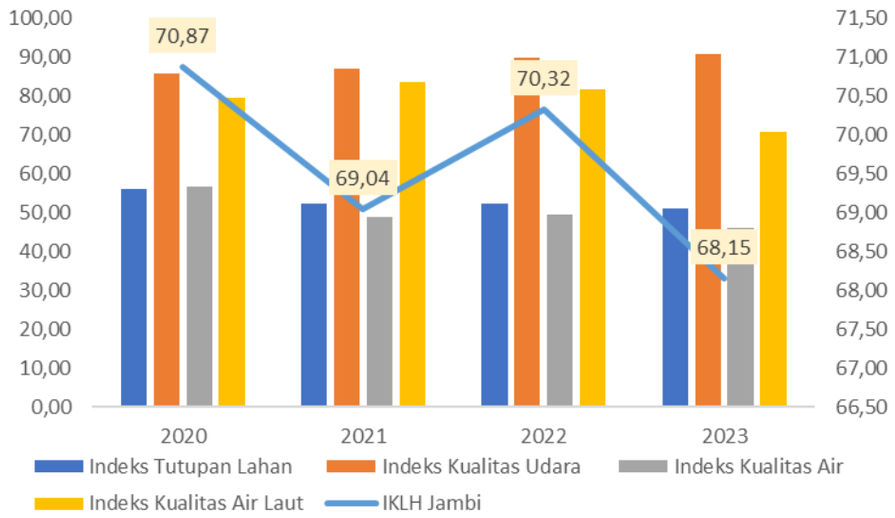

Gambar 2-52 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2020-2023

Sumber : BPS, 2024 (data termutakhir)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rentang waktu 2020 – 2023 mengalami fluktuasi. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah indeks kualitas air yang semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan antara lain karena pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar, Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik), deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi, serta tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan. Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut. Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air seperti meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar, serta meningkatkan pelibatan masyarakat terhadap usaha peningkatan kualitas air.

Pada tahun 2020-2023 Indeks Kualitas Udara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan IKU ini antara lain dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri), serta penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya.

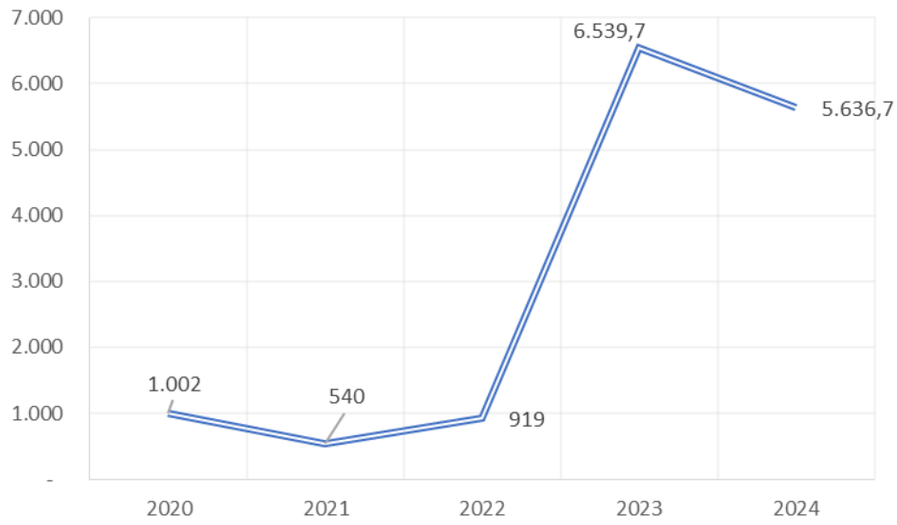

Gambar 2-53 Perkembangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Hektar)

Sumber: Dinas Kehutanan, 2024

Berdasarkan data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tahun 2020–2024, terlihat tren yang sangat fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebesar 6.539,69 hektare, jauh di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar pada periode tersebut. Lonjakan luas karhutla di tahun 2023 menunjukkan adanya tekanan serius terhadap ekosistem lingkungan yang dapat berdampak luas, antara lain menurunnya kualitas udara, kerusakan ekosistem gambut, gangguan kesehatan masyarakat, serta ancaman terhadap produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat kerusakan lahan. Selain itu, tingginya angka karhutla juga dapat menghambat capaian target pengurangan emisi gas rumah kaca dan memperbesar risiko bencana ekologis di Provinsi Jambi. Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem pencegahan dini, pengendalian kebakaran, serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan tanpa izin. Provinsi Jambi perlu melakukan upaya pencegahan agar potensi kebakaran dapat berkurang dengan melakukan penguatan patroli

terpadu karhutla, optimalisasi sistem peringatan dini berbasis spasial, rehabilitasi kawasan gambut dan lahan kritis, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, penting mendorong sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat peduli api, serta pelaku usaha perkebunan dan kehutanan dalam strategi pencegahan dan pengendalian karhutla yang berkelanjutan. Edukasi dan kampanye bahaya karhutla kepada masyarakat juga harus diperluas untuk menekan kejadian serupa di tahun-tahun mendatang

2.1.3.2.3 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. Sebagaimana ketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, dan berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.631.100 jiwa, meningkat dari 3.570.272 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya akan berimplikasi antara lain pada pemenuhan sandang, pangan, papan, energi, kemacetan bahkan kriminalitas. Untuk itu, perkembangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas harus terus dikendalikan.

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan Kesehatan Reproduksi saat ini tidak hanya di tujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.

Adapun capaian yang berhasil diraih terkait Pengendalian Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi antara lain yaitu *Total Fertility Rate/*Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Jambi yang menunjukkan trend penurunan lima dekade. TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya. Tingkat fertilitas Provinsi Jambi hasil Sensus Penduduk 1971 sampai LF SP2020 dapat dilihat pada Gambar 2-51 di bawah ini yang menyajikan hasil estimasi penghitungan TFR dengan metode Anak Kandung (*Own Children Method*). Fertilitas Provinsi Jambi menurun dalam lima dekade terakhir. Sensus Penduduk 1971 mencatat angka TFR sebesar 6,39 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 6 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form

SP2020 mencatat TFR sebesar 2,28 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan seorang perempuan umur 15-49 tahun secara rata-rata selama masa reproduksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil LF SP2020 menuju *Replacement Level* di mana setiap perempuan akan digantikan oleh seorang wanita yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya.

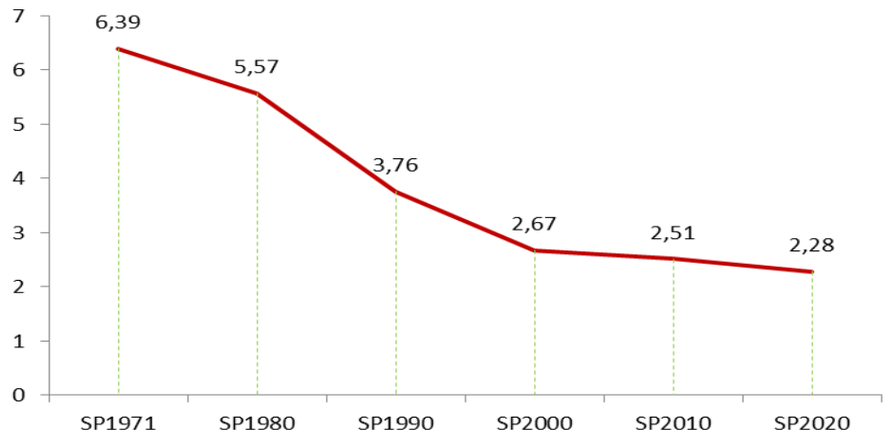

Gambar 2-54 Angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi

Sumber: BPS, 2022 (data termutakhir)

Sensus tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga tidak setiap tahun juga angka TFR bisa didapat. Data terakhir adalah angka TFR tahun 2017, dan pada tahun 2022 baru dilakukan survei kembali. Angka TFR dijadikan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi serta menunjukkan tingkat keberhasilan program KB.

Pembangunan keluarga merupakan upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya secara lahir dan batin, sekaligus berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan daerah. Tujuan dari pembangunan keluarga adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, harmonis, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai fungsi sosialnya, seperti fungsi agama, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan keluarga, digunakan Indeks Kualitas Keluarga yang merupakan indikator komposit untuk menilai kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dari berbagai aspek. Indeks ini mencerminkan kemampuan keluarga dalam menjalankan perannya secara optimal, baik dari segi ketahanan ekonomi, keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, fungsi perlindungan dan pendidikan, hingga partisipasi aktif dalam lingkungan sosial.

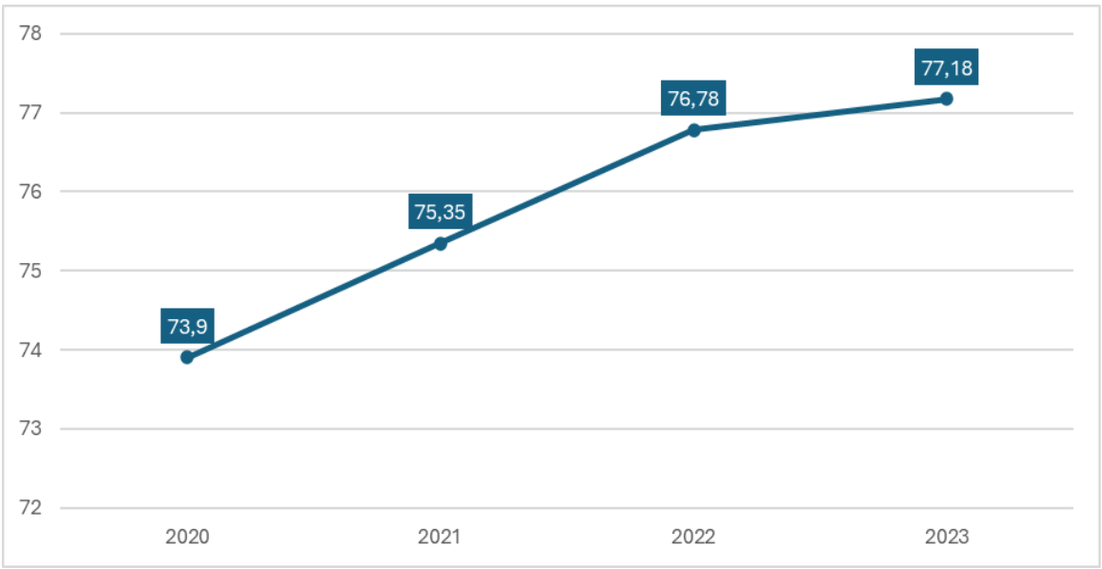

Gambar 2-55 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020-2023 (data termutakhir)

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020–2023. Pada tahun 2020, indeks kualitas keluarga tercatat sebesar 73,9, kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,35 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian indeks sebesar 76,78, dan kembali meningkat menjadi 77,18 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kesejahteraan keluarga, termasuk kesehatan, pendidikan, ketahanan ekonomi, serta keharmonisan relasi antaranggota keluarga. Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan layanan dasar, dan penguatan fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tingkat keluarga sebagai basis ketangguhan daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

2.1.3.2.4 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Jambi terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Jumlah mobil dan kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tentu saja berimplikasi terhadap kemacetan di berbagai wilayah terutama wilayah perkotaan. Untuk itu, perlu kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengurai kemacetan yang terjadi.

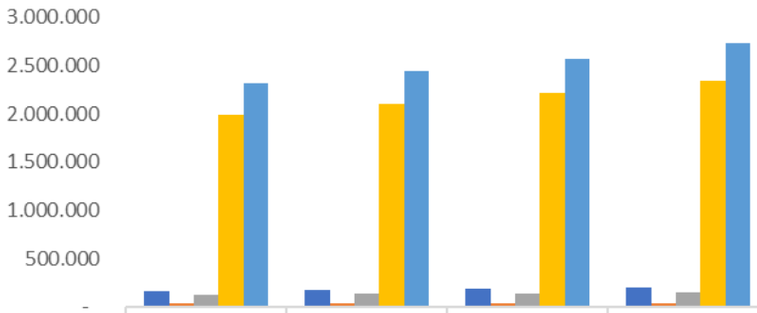

	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	162.107	171.300	182.176	205.320
Mobil Bis	35.001	35.004	35.108	35.738
Mobil Barang	130.604	138.876	142.349	147.200
Sepeda Motor	1.991.271	2.097.846	2.213.171	2.338.498
Jumlah Kendaraan Bermotor	2.318.983	2.439.026	2.572.804	2.726.756

Gambar 2-56 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi

Sumber: BPS, 2025 (data termutakhir)

Moda transportasi udara memperlihatkan perkembangan yang kurang menggembirakan seiring dengan kenaikan harga tarif angkutan udara serta telah dibangunnya tol Palembang-Lampung, sehingga perubahan preferensi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi dalam pemilihan moda transportasi antar provinsi. Saat ini Provinsi telah memiliki 3 buah Bandara yaitu Bandara Sultan Thaha yang berada di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Pasir Mayang di Kabupaten Bungo. Pada Gambar dibawah ini dapat dilihat perkembangan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui ketiga bandara tersebut, dimana terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mulai terjadi peningkatan, namun di tahun 2021 mulai terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan adanya pengurangan armada pesawat udara ke Bandara Pasir Mayang Muaro Bungo serta perbaikan runway bandara Depati Parbo Kerinci. Untuk mengoptimalkan pelayanan ketiga bandara ini pemenuhan perlengkapan dan peralatan khususnya untuk membantu operasional bandara pada cuaca yang kurang baik perlu disediakan, seperti pada saat terjadi bencana asap dan lain-lain.

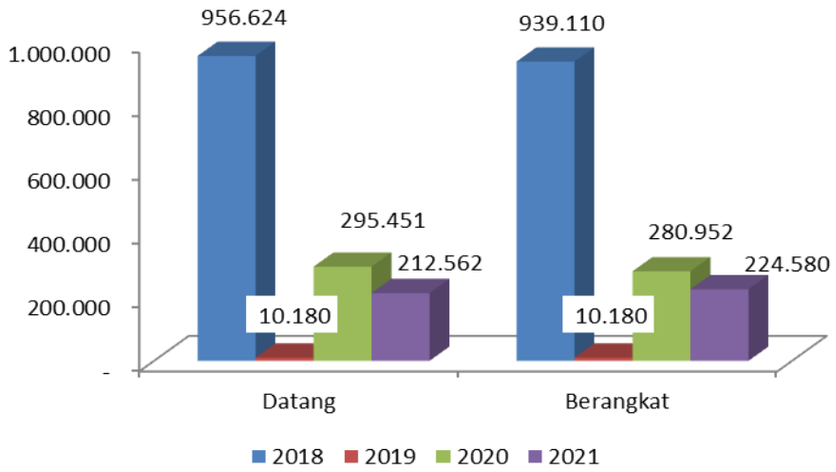

Gambar 2-57 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Untuk Penerbangan Dalam Negeri di Provinsi Jambi (orang)

Sumber: BPS, 2022

Pada transportasi laut, saat ini Provinsi Jambi memiliki 12 buah pelabuhan laut dan kedepan akan mendorong program prioritas yang berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yaitu pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan utama. Jika dilihat dari alur lintasan barang dan orang yang melalui laut sesungguhnya memberikan pengaruh pada sektor perhubungan dan distribusi barang yang menghubungkan ke Pulau-pulau perbatasan dengan Provinsi Jambi. Untuk kebutuhan dasar adalah dominan dari produksi sumberdaya alam di Provinsi Jambi yang melalui Pelabuhan Kuala Tungkal, pelabuhan Muara Sabak, dan pelabuhan-pelabuhan sungai lainnya.

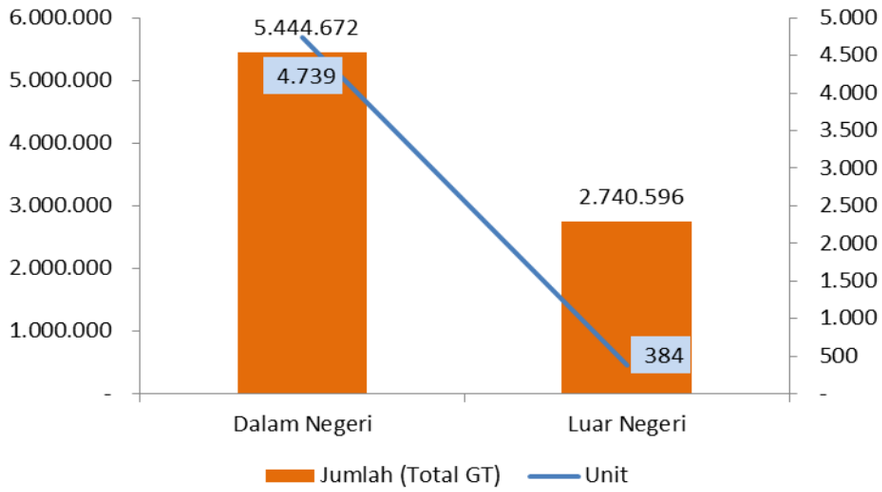

Gambar 2-58 Kunjungan Kapal pelayaran Dalam dan Luar Negeri di Pelabuhan Provinsi Jambi Tahun 2021

Sumber: BPS, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, arus barang pelayaran dalam dan luar negeri baik bongkar dan muat di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori “sedang”, dimana potensi untuk bongkar muat arus

barang cukup baik. Namun masih diperlukan Pelabuhan yang lebih besar dan layak untuk pelayaran arus penumpang dan barang.

Oleh karena itu, sejak tahun 2012, Provinsi Jambi fokus untuk mendorong pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai outlet distribusi sumberdaya alam yang nantinya diharapkan tidak hanya dari Provinsi Jambi, akan tetapi dari Provinsi lainnya yang berbatasan sehingga peran pelabuhan tidak hanya komoditas lokal saja.

Tabel 2-15 Perbandingan Arus Barang (Peti Kemas dan Non Peti Kemas) Pelayaran Dalam dan Luar Negeri menurut Provinsi di Sumatera tahun 2021

Provinsi/ Pelabuhan	Domestik		Luar Negeri	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
Aceh	2.736.967	1.864.185	219.371	8.396.790
Sumut	7.243.319	949.964	2.149.699	5.677.682
Sumbar	4.257.617	3.417.833	297.104	5.339.059
Riau	13.538.298	10.287.349	1.592.981	8.525.026
Jambi	3.076.880	2.867.323	23.539	1.997.689
Sumsel	1.803.158	1.441.931	977.250	1.526.529
Bengkulu	630.459	3.099.892	5.029	1.355.282
Lampung	13.675.452	19.010.644	4.350.546	14.458.382
Kep Babel	3.481.453	8.593.905	51.580	45.837
Kep Riau	5.495.723	2.855.323	2.124.394	3.207.169

Sumber: BPS, 2022

2.1.3.2.5 Urusan Komunikasi dan Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Karena manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Saat ini teknologi digital sudah semakin berkembang, masyarakat sudah semakin mahir berinteraksi menggunakan teknologi digital, dimana emua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas menjadi hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi, dimana semua lini kehidupannya mulai dari produksi, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan salah satu parameter untuk melihat kondisi masyarakat digital. Terdiri dari 4 pilar yaitu Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, Pilar Keterampilan Digital, Pilar Pemberdayaan, dan Pilar Pekerjaan.

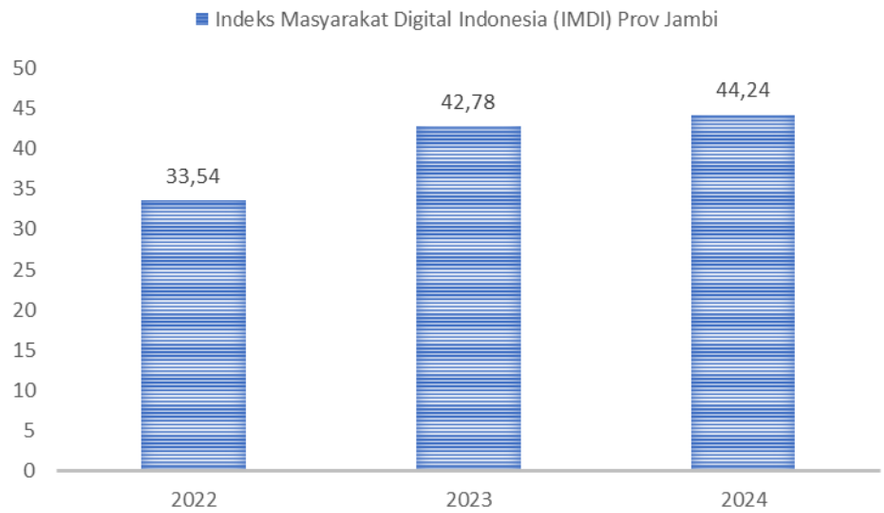

Gambar 2-59 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

Sumber: BPS, 2025

IMDI Provinsi Jambi semakin meningkat meskipun tidak begitu signifikan, dimana masih tergolong kategori "cukup". Nilai pilar tertinggi adalah Pilar Keterampilan Digital sebesar 60,13, dan nilai pilar terendah adalah Pilar Pemberdayaan sebesar 25,26.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah mengubah cara setiap orang dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi. Di era serba digital ini penguasaan terhadap TIK penting dimiliki agar bisa menyerap informasi dan pengetahuan seluas mungkin, berkarya dengan lebih produktif dan kreatif, serta mengembangkan inovasi. Pembangunan TIK yang baik sangat berguna bagi suatu daerah. Pasalnya, kompetensi digital berpotensi besar dalam mendorong terciptanya sistem yang lebih terintegrasi yang pada akhirnya mendukung kinerja berbagai sektor dan industri.

Untuk melihat gambaran tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah, termasuk kesenjangan digital dan potensi pengembangan TIK dapat menggunakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).

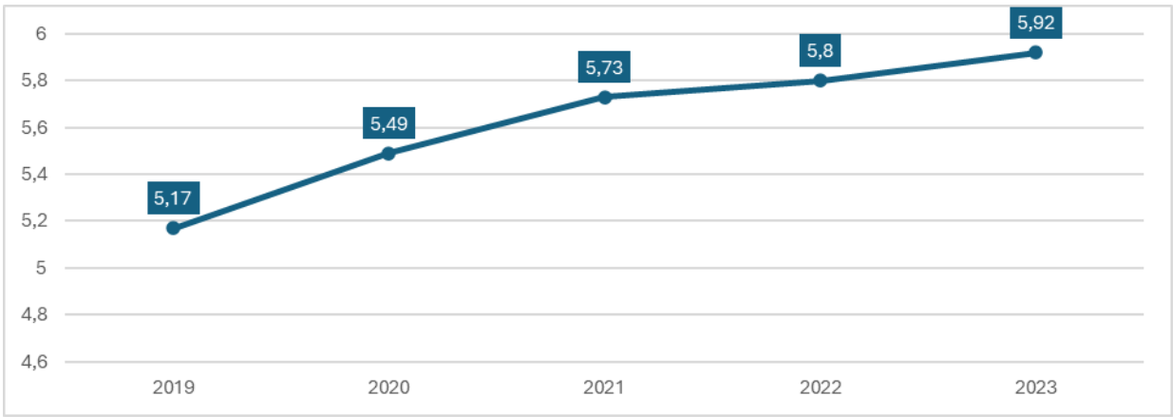

Gambar 2-60 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2025 (data termutakhir)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tahun 2019–2023. Pada tahun 2019, IP-TIK Provinsi Jambi tercatat sebesar 5,17 dan mengalami peningkatan menjadi 5,49 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IP-TIK Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 5,73 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 5,92. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas digital masyarakat, serta perluasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital daerah yang berkelanjutan serta penguatan daya saing ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah, kemajuan TIK juga berperan sebagai *enabler* dalam peningkatan efisiensi layanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, serta integrasi ekonomi digital secara lebih luas.

2.1.3.2.6 Urusan Koperasi dan UKM

Ekonomi rakyat perlu mendapat perhatian layak. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsistem, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.

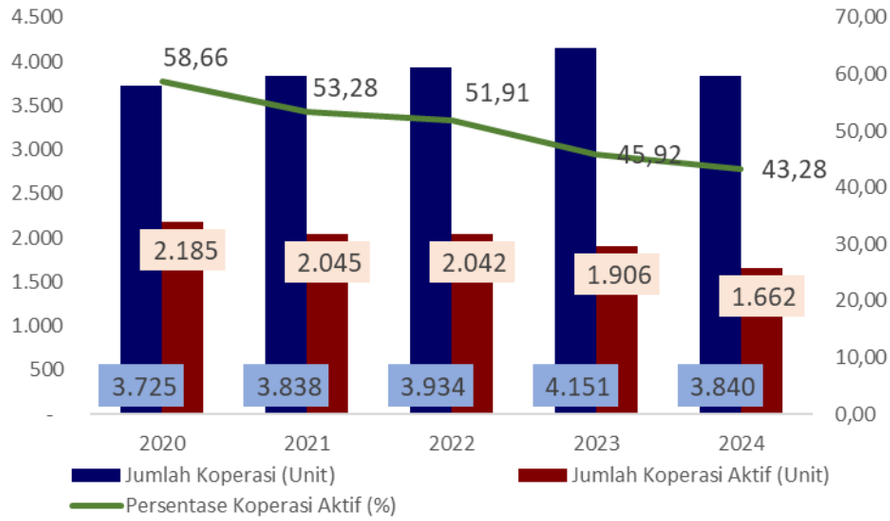

Gambar 2-61 Perkembangan Koperasi di Provinsi Jambi

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025

Pada periode tahun 2020-2024, jumlah lembaga koperasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 berjumlah 3.725 unit menjadi 3.840 unit pada tahun 2024. Demikian juga dengan jumlah lembaga koperasi yang aktif mengalami penurunan yaitu dari 2.185 unit pada tahun 2020 menjadi 1.662 unit pada tahun 2024, sehingga persentasenya juga menunjukkan penurunan dari 58,66 persen menjadi 43,28 persen, atau mengalami rata-rata penurunan sebesar 6,84 persen per tahun.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, dimana keaktifan koperasi dapat menunjukkan tingkat profesionalisme dalam hal pengelolaan koperasi, dan juga menunjukkan produktivitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Menurunnya persentase koperasi aktif perlu perhatian untuk menjadikan suatu koperasi menjadi berkualitas maka perlu upaya penguatan kelembagaan bagi koperasi terutama koperasi nelayan, KUD bidang Pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar saat ini di Provinsi Jambi. Penguatan kelembagaan dimulai dari legalitas koperasi juga peningkatan kualitas SDM dari pengurus atau pengelola koperasi yang berdampak pada terciptanya koperasi yang baik, mandiri dan berdaya saing.

Sementara itu, perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jambi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, namun menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 32,6 persen dari tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu dari 72.125 unit pada tahun 2020 menjadi 265.843 unit di

tahun 2024. Namun bila dilihat dari jumlahnya, maka terlihat bahwa jumlah terbesar adalah pada usaha mikro, dimana jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 59.197 unit meningkat signifikan menjadi 258.790 unit. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu menurunnya jumlah usaha kecil dan usaha menengah rata-rata sebesar 13,6 persen dan 41,71 persen. Salah satu penyebabnya masih banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi keterbatasan modal, serta kesulitan bersaing dengan UKM lain akibat kurang inovatif dalam mengembangkan produknya.

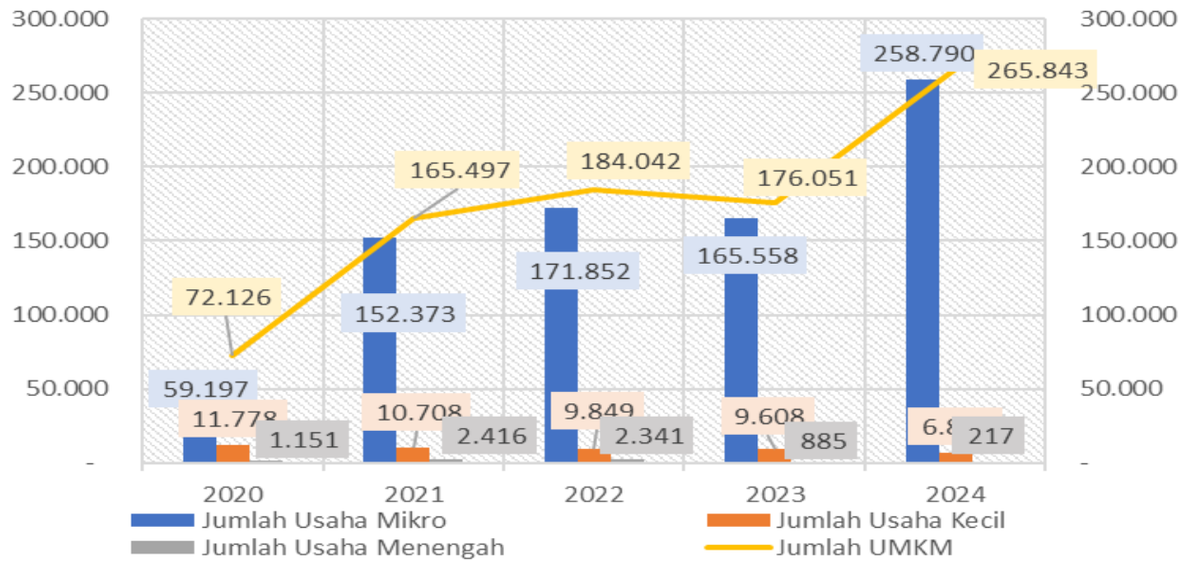

Gambar 2-62 Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Selain peningkatan jumlah UMKM, pada periode yang sama terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 101.972 orang pada tahun 2020, bertambah menjadi 565.588 orang pada tahun 2024, dimana penyerapan tenaga kerja dari UMKM meningkat setiap tahun rata-rata sebesar 42,83 persen. Hal ini seiring dengan kebutuhan tenaga kerja akibat peningkatan jumlah UMKM tersebut. Demikian juga dengan jumlah aset serta omset usaha yang mulai meningkat, meskipun masih cukup jauh jika dibandingkan capaian pada tahun 2021.

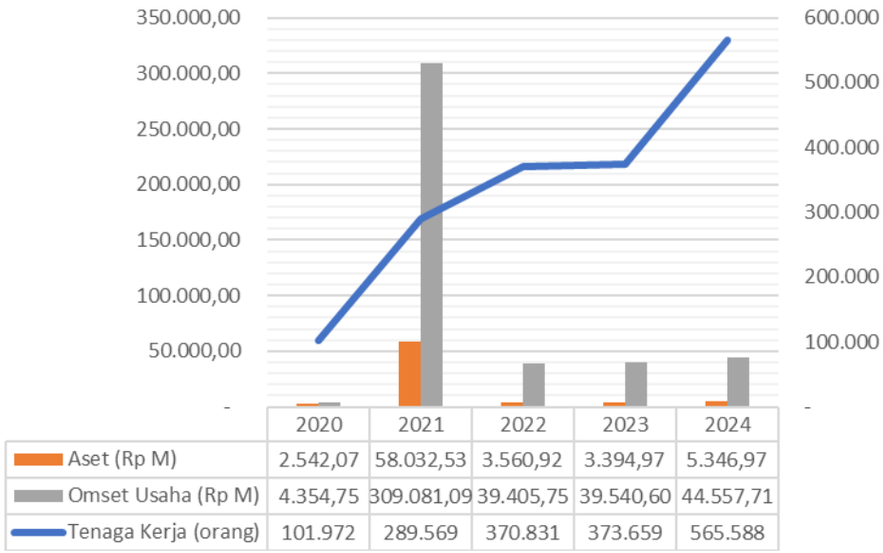

	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (Rp M)	2.542,07	58.032,53	3.560,92	3.394,97	5.346,97
Omset Usaha (Rp M)	4.354,75	309.081,09	39.405,75	39.540,60	44.557,71
Tenaga Kerja (orang)	101.972	289.569	370.831	373.659	565.588

Gambar 2-63 Perkembangan Tenaga Kerja, Aset dan Omset Usaha UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

2.1.3.2.7 Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2024, perkembangan realisasi penamanan modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun nilainya. Demikian juga yang terjadi pada realisasi penanaman modal asing, bila dilihat pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.584.505.610 juta dari Rp26.967,4 Juta di tahun 2020.

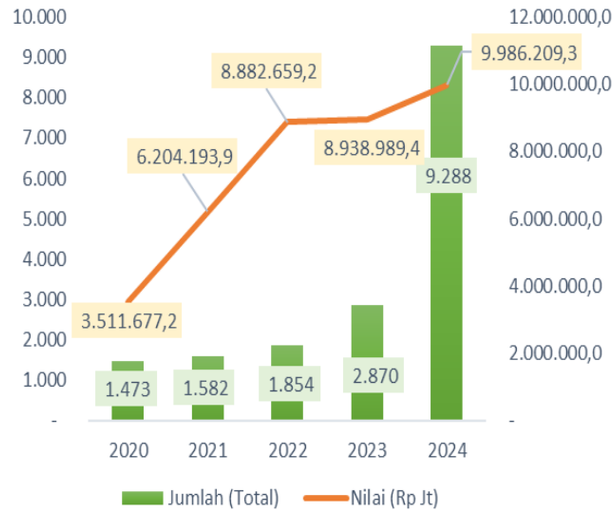

PMDN

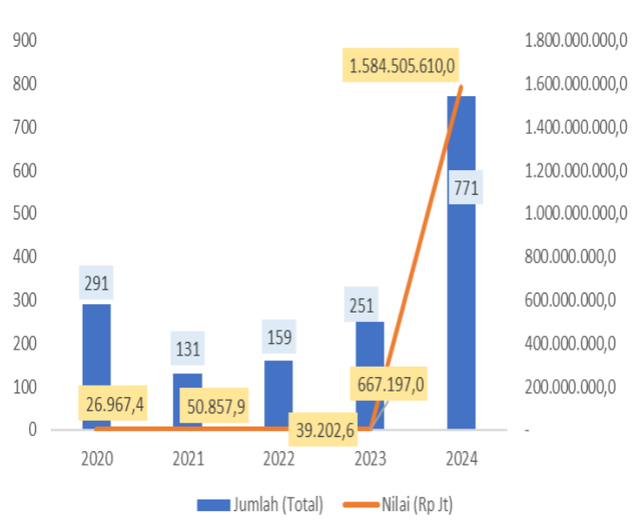

PMA

Gambar 2-64 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Prov.Jambi, 2025

Kinerja investasi PMDN pada tahun 2024 mengalami peningkatan seiring dengan investasi pada beberapa sektor, diantaranya yaitu berlanjutnya pengerjaan proyek PLTA Kerinci Merangin Hidro berkapasitas 350 Megawatt di Kabupaten

Kerinci serta Jalan Tol Trans Sumatera Bayung Lencir – Tempino Seksi 3 yang rampung pada September 2024. Disamping itu, berlanjutnya JTTS Baleno seksi 4 ruas Tempino – Ness yang sudah dalam proses konstruksi dan diperkirakan akan selesai pada Juli 2025 mendatang. Berlanjutnya proyek pembangunan Stadion Swarnabhumi di Muaro Pijoan Kabupaten Muaro Jambi yang sudah mencapai proses konstruksi 75%, masih berlanjutnya pembangunan *Islamic Center* dengan nilai investasi mencapai Rp30 Miliar serta pembangunan jalur khusus batubara sepanjang 101 km. Namun demikian, peningkatan laju investasi lebih lanjut tertahan oleh tersendatnya perizinan Kawasan Industri Kemingking yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, serta belum terealisasinya pengerjaan proyek Pelabuhan Ujung Jabung.

Untuk mempertahankan investasi yang sudah berjalan, mempercepat realisasi investasi yang sudah mendapat persetujuan, maka pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perusahaan PMA/PMDN serta menarik investor baru untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi ada beberapa permasalahan/hambatan antara lain masih banyak pelaksanaan penyelesaian pelayanan perizinan yang melewati limit waktu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan : a) Permohonan yang disampaikan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; b) Tim Teknis dari Instansi teknis kadang belum siap dan masih diinstansinya; c) Pemohon kurang mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan; d) Sistem yang dilaksanakan untuk melayani perizinan sebahagian besar masih manual.

2.1.3.2.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka oleh raga merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Meskipun demikian budaya masyarakat Provinsi Jambi dalam berolah raga masih rendah. Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlet Provinsi Jambi juga belum menggembirakan.

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuh kembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 43 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap. Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-16 Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Cabang Olahraga	2023*	
		Pemda	Swasta
1	Sepak Bola	15	225
2	Tenis	24	31
3	Bulu Tangkis	16	92
4	Bola Voli	19	110
5	Basket	27	47
6	Tenis Meja	22	91
7	Pencak Silat	11	18
8	Lap. Menembak	0	0
9	Angkat Besi	5	1
10	Senam	1	0
11	Kolam Renang	0	12
12	Taekwondo	3	3
13	Judo	3	2
14	Kempo	1	4
15	Gulat	2	4
16	Panjat Tebing	7	2
17	Golf	0	2
18	GOR	1	4
19	Dayung	3	6
20	Tinju	0	3
21	Sepak Takraw	2	29
22	Karate	5	11
23	Catur	5	4

Sumber: Dispora Provinsi Jambi, 2023
**: Data Sementara*

Pemuda merupakan komponen masyarakan yang memiliki peran strategis di dalam pembangunan daerah. Prosentase jumlah yang besar dalam komposisi penduduk provinsi Jambi di satu sisi merupakan kekuatan, namun di sisi lain juga dapat menjadi penghambat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu pembinaan kepemudaan agar lebih produktif merupakan kebijakan yang perlu ditempuh. Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) termasuk juga pramuka, sebagai wadah dalam berhimpun dan menempa kemampuan dan keterampilan pemuda untuk itu perlu ditumbuhkembangkan.

Tabel 2-17 OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2023

No	Bidang	Organisasi Kemasyarkatan Pemuda
1	Keagamaan	PW. Pemuda Muhammadiyah (PM)
		GP. Ansor
		DPD Angkatan Muda Indoneia (AMII)
		PW. Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU)
2	Kebangsaan	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)

		KNPI
3	Kemahasiswaan	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
		Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
		Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila(Satma-PP)
4	Kepartaian	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
		Pemuda Ka'bah
		BM PAN
5	Kekeluargaan	Forum Komunikasi Putra/putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)
6	kepanduan	Pramuka
		Hisbul Wathan

Sumber: Dispora, 2023

2.1.3.2.9 Urusan Kebudayaan

Guna mengukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat dilakukan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pengukuran ini terdiri dari beberapa dimensi yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender.

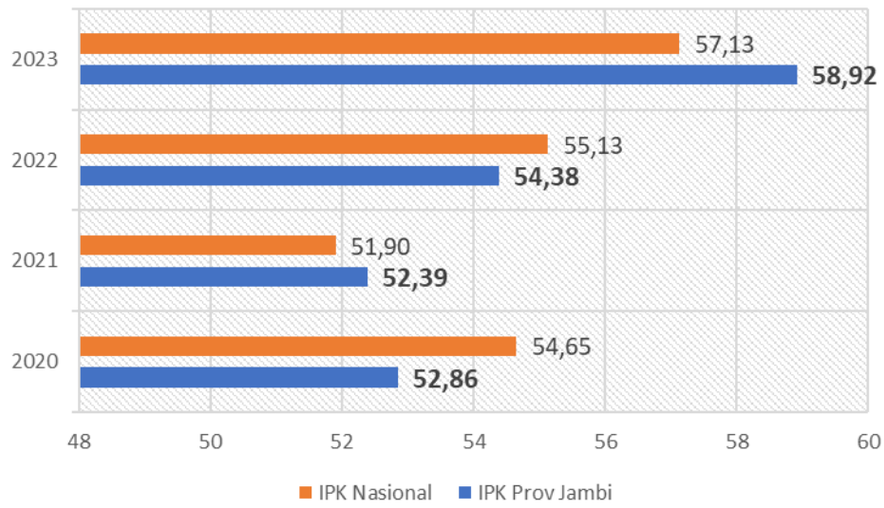

Gambar 2-65 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Sumber: Kemendikbud, 2024 (data termutakhir)

Pada tahun 2020-2023, IPK Provinsi Jambi semakin meningkat, dibanding dengan pencapaian nasional, capaian Provinsi Jambi lebih tinggi di tahun 2023 yaitu sebesar 58,92. Beberapa dimensi yang perlu menjadi perhatian yaitu Dimensi

Ekonomi Budaya, yang menunjukkan bahwa aspek kebudayaan telah menjadi penopang dan berpengaruh terhadap perekonomian, sehingga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi "amunisi" dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pada Dimensi Ekspresi Budaya juga memerlukan perhatian khusus dimana capaiannya masih lebih rendah dibanding capaian Nasional. Dimensi Ekspresi Budaya ini terkait dengan aspek kebebasan sipil, dimana budaya yang kaya dan ekspresif mencerminkan kebebasan sipil dan kesehatan demokrasi.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan_Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang meliputi aspek-aspek: kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; permuseuman; kebahasaan; kesusastraan; tradisi; kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kepustakaan; kenaskahan;dan perfilman.

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota selama ini telah dilaksanakan dan menetapkan agenda berkala kegiatan festival lomba dan pawai berbagai seni budaya Melayu Jambi.

Terkait dengan warisan budaya, penetapan Candi Muaro Jambi sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini telah terdaftar di UNESCO untuk di ajukan sebagai sebagai salah satu Warisan Dunia. Selain itu ditetapkannya Geopark Merangin Jambi sebagai salah satu Jaringan Geopark Nasional oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang saat ini dalam proses pengajuan untuk menjadi Global Geopark Network (GGN) UNESCO. Sementara itu di Provinsi Jambi masih terdapat sejumlah cagar budaya yang belum dilakukan proses penetapan.

Beberapa data capaian objek Kebudayaan di Provinsi Jambi dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-18 Jumlah Obyek Kebudayaan Provinsi Jambi

No	Objek Kebudayaan	Capaian
1.	Jumlah Objek Manuskrip	38
2.	Jumlah Objek Kebudayaan Tradisi Lisan	96
3.	Jumlah Objek Kebudayaan Adat Istiada	100
4.	Jumlah Objek Kebudayaan Ritus	88
5.	Jumlah Objek Kebudayaan Pengetahuan Tradisional	217
6.	Jumlah Objek Kebudayaan Teknologi Tradisional	104
7.	Jumlah Objek Kebudayaan Seni	180
8.	Jumlah Objek Kebudayaan Bahasa	57
9.	Jumlah Objek Kebudayaan Permainan Rakyat	114
10.	Jumlah Objek Kebudayaan Olahraga Tradisional	54
11.	Jumlah Objek Kebudayaan cCgar Budaya	249

Sumber: Disbudpar, 2025

Aspek budaya daerah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tradisi yang masyarakat, lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dan dokumentasi sejarah daerah Provinsi Jambi, serta ragam bahasa daerah. Selain itu museum sebagai bagian dari pelestarian budaya keberadaannya di Provinsi Jambi cukup mendapat apresiasi.

2.1.3.2.10 Urusan Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks inilah, maka masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidupnya.

Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perpustakaan menjadi urusan wajib tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Artinya, pembangunan perpustakaan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat.

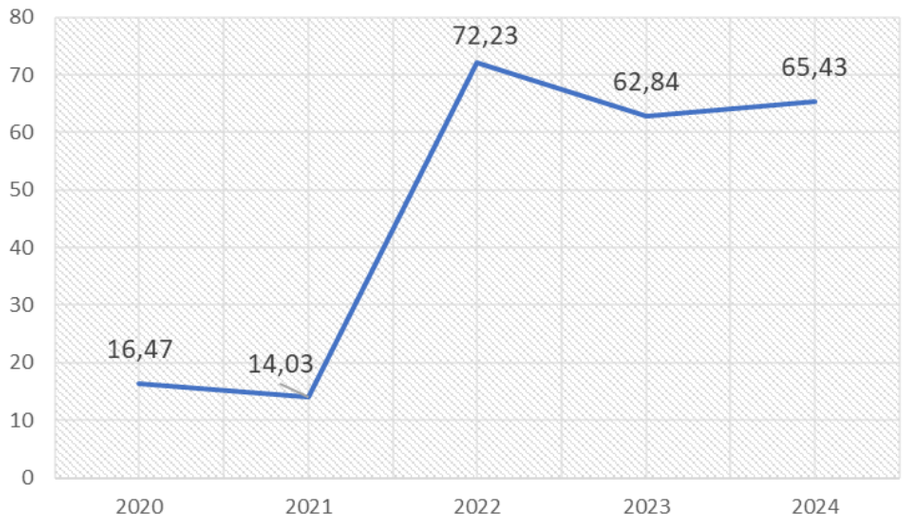

Gambar 2-66 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

IPLM terdiri dari beberapa komponen pengukuran yaitu Pemerataan Layanan perpustakaan, Ketercukupan Koleksi perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan, serta Anggota Perpustakaan. Pada Gambar di atas, terlihat bahwa IPLM Provinsi Jambi berfluktuatif, dimana pada periode 2020-2024, capaian tertinggi berada pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 sudah mulai meningkat kembali menjadi 65,43. Komponen yang perlu menjadi perhatian adalah pada komponen Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan per Hari yang belum mencapai standar.

Penurunan ini disebabkan akibat pesatnya kemajuan internet sehingga mengurangi minat baca masyarakat ke perpustakaan. Di sisi lain perlu juga dievaluasi terkait dengan fasilitas, sarana prasarana dan sistem layanan perpustakaan, termasuk koleksi buku yang dibutuhkan pembaca. Kecenderungan penurunan jumlah anggota perpustakaan dipengaruhi oleh semakin mudah dan murahnya akses internet. Melihat tren minat baca yang mulai beralih ke digital, perpustakaan Provinsi Jambi sebaiknya mulai beralih secara perlahan menjadi perpustakaan digital menyesuaikan perkembangan kemajuan zaman.

Dibidang Kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metode pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang

mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan kearsipan.

Tabel 2-19 Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Pemberkasan arsip in-aktif	5.000 berkas pendataan/tata	1.500 berkas arsip in aktif		7.891 berkasmusnah
		700 berkas akuisisi	1.000 berkas usul musnah 3.501	nihil	15.765 arsip In-aktif
2	Penyusutan Arsip			6.901 berkas	7.891 berkasmusnah
				(7 OPD)	
3	Akuisisi			34 album	34 Album
				285 CD	285 CD
				5 profil dewan	5 Profil dewan
4	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	550 photo	200 photo		157 Photo
		4.267 lembar peta	250 peta		10.898 peta
		1.262 arsip buku	60 arsip buku		325 arsipbuku
		150 naskah dinas	154 naskah dinas	nihil	2.970 naskah kuno
5	Telaksanany a pameran kearsipan	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2023

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan tahun 2020–2023 (data termutakhir) menunjukkan fluktuasi. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 52.686 ton dan mengalami peningkatan menjadi 54.808,43 ton pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak signifikan dikarenakan kondisi alam, terutama cuaca ekstrim yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut cenderung berkurang.

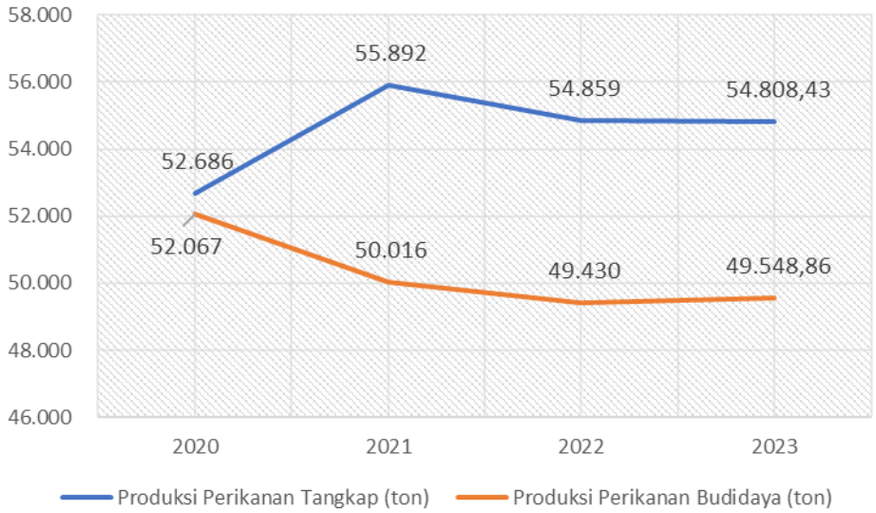

Gambar 2-67 Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Provinsi Jambi (ton) Tahun 2020-2023

Sumber: BPS, 2025 (data termutakhir)

Perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2020-2023 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebanyak 52.067 ton menjadi 49.548,86 ton di tahun 2023. Hal tersebut salah satunya akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2022 mengalami kecenderungan meningkat. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, peningkatan mutu produk, pengembangan produk dan lain sebagainya.

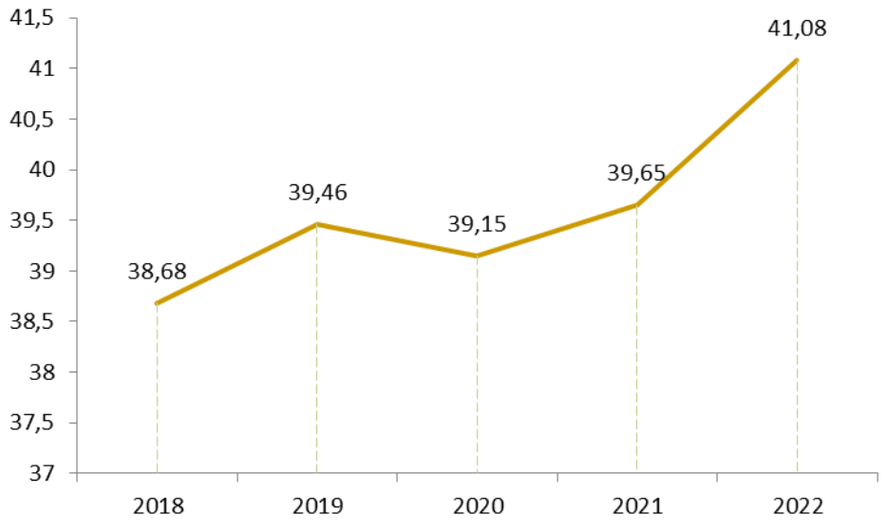

Gambar 2-68 Perkembangan angka konsumsi ikan perkapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun)

Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2023

2.1.3.3.2 Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan pariwisata dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Terkait dengan hal tersebut, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terlihat semakin meningkat selama tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, pandemi covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi. Namun hingga tahun 2024, kunjungan wisatawan baik nusantara maupun wisatawan asing jumlahnya semakin meningkat. Hal tersebut berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor akomodasi dan makan minum, transportasi, dan lain-lain.

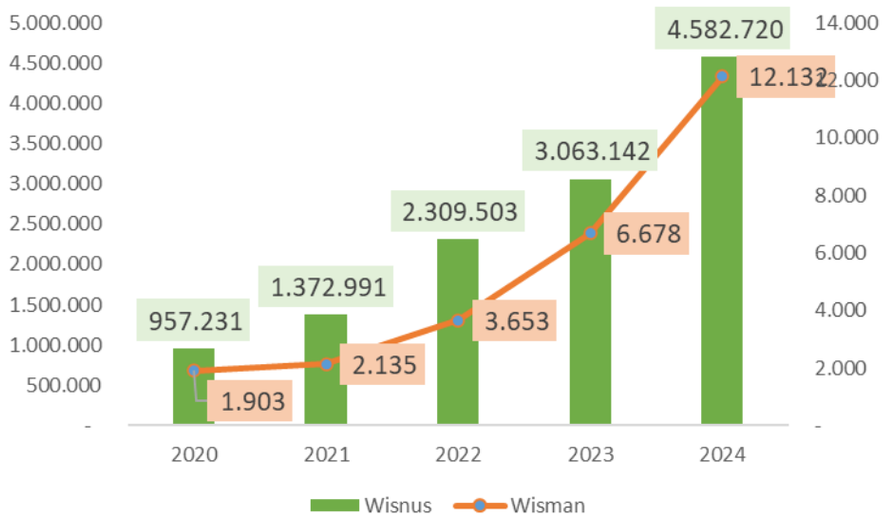

Gambar 2-69 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (orang)

Sumber: BPS,2025

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata sudah mulai berkembang di Provinsi Jambi, karena potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kurangnya promosi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Provinsi Jambi, sehingga pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3.3 Urusan Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif, tapi tidak ada satu Negara majupun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Pertanian menjadi landasan perekonomian suatu Negara, menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa, sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor manufaktur dan sektor jasa di perkotaan.

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). *Pertama*, kontribusi produk, diartikan bahwa produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi

lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Kedua*, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian. *Ketiga*, kontribusi faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. *Keempat*, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

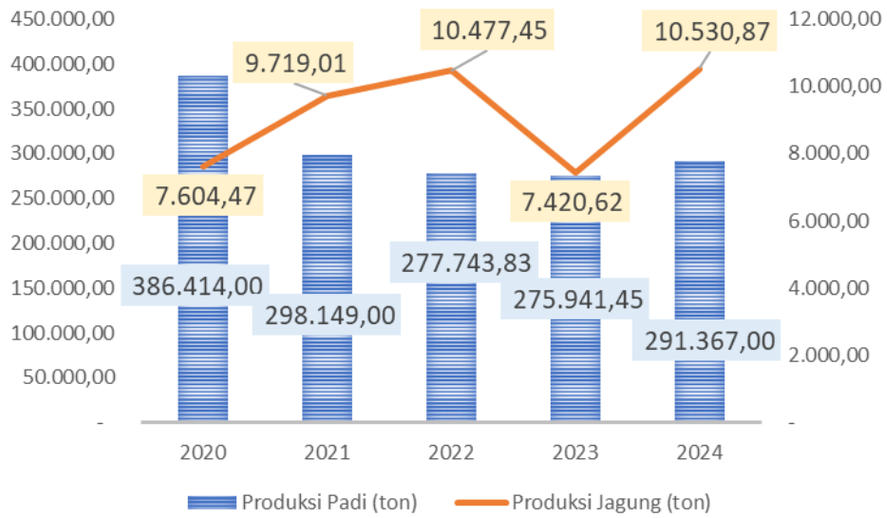

Gambar 2-70 Produksi Padi dan Jagung (Ton) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas TPHP, 2025

Produksi tanaman padi di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2020 – 2024, terutama disebabkan akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen, serta terjadi penurunan luas

panen akibat alih fungsi lahan. Disamping itu juga, pada akhir tahun 2023 banyak luasan sawah yang terdampak banjir dan puso atau gagal panen. Namun pada tahun 2024, produksi padi sedikit mengalami peningkatan, terutama karena terdapat peningkatan luas panen, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi seperti perbaikan teknologi budidaya dan pasca panen. Demikian juga produksi jagung yang mengalami peningkatan di tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama didorong karena luas panen yang juga mengalami peningkatan, dimana puncak panen terjadi pada November 2024 dengan luas panen tertinggi mencapai 725 hektar, berbeda dari tahun sebelumnya yang terjadi pada bulan Juni. Ini menunjukkan pola panen yang mulai berubah seiring adaptasi petani terhadap kondisi iklim dan teknis budidaya.

Namun ke depan perlu kebijakan yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani, sehingga kerugian akibat bencana pertanian dapat diminimalisir.

Sektor perkebunan masih belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2020 – 2023. Hal ini terlihat pada produksi komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan, hanya kinerja komoditas sawit yang cukup baik dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

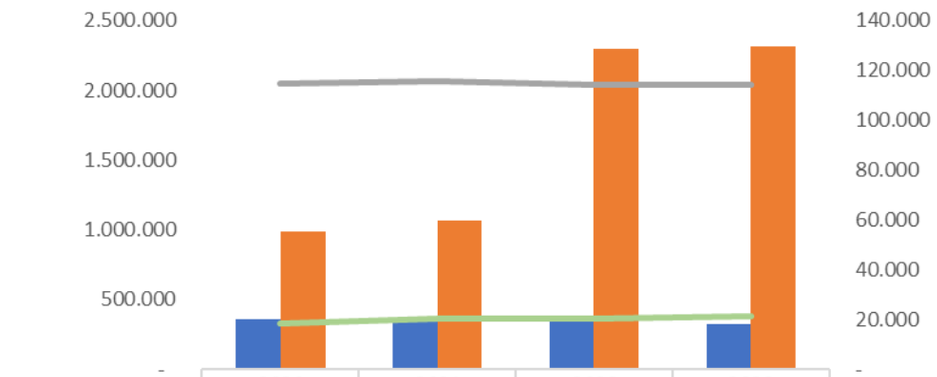

	2020	2021	2022	2023
Karet	357.488	358.055	347.144	326.407
Kelapa Sawit	983.496	1.063.677	2.298.301	2.312.301
Kelapa Dalam	114.944	115.657	114.137	114.171
Kopi	18.580	20.135	20.476	21.384

Gambar 2-71 Perkembangan produksi komoditi perkebunan Provinsi Jambi (ton) Tahun 2020 -2024

Sumber: BPS, 2025 (data termutakhir)

2.1.3.3.4 Urusan Kehutanan

Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Jambi yang dikelola dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dari 2.113.775,33 Ha di tahun 2019, dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan serta Tata Guna Hutan kesepakatan (TGHK), di tahun 2021, luas hutan di Provinsi Jambi mengalami penurunan, yaitu menjadi 1.429.999,75 Ha di tahun 2022. Penurunan yang terjadi tersebut terjadi karena konversi lahan dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. Namun pada tahun 2022, luas kawasan hutan meningkat menjadi 2.124.481,73 Ha, terutama karena terdapat penambahan luasan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Tabel 2-20 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Ha) di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

No	Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan	2019	2020	2021	2022
1.	Hutan Lindung	181.794,96	179.588,0	181.675,46	186.778,05
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	694.586,00	685.471,0	6.779,49	-
3.	Hutan Produksi Terbatas	260.386,14	258.285,0	259.329,95	264.513,18
4.	Hutan Produksi Tetap	966.704,47	963.792,0	970.813,47	953.493,80
5.	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	10.303,75	11.399,0	11.341,38	11.108,44
Jumlah Luas Hutan dan Perairan		2.113.775,33	2.098.535,0	1.429.999,75	2.124.481,75

Sumber: BPS, 2024

2.1.3.3.5 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Potensi sumber enenrgi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Data-data lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 2-21 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-

5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2023 (data termutakhir)

Tabel 2-22 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4	SAROLANGUN	17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsat	
5	BUNGO	21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2023 (data termutakhir)

Tabel 2-23 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2023 (data termutakhir)

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di atas. Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar dibeberapa kabupaten di Provinsi.

2.1.3.3.6 Urusan Perdagangan

Perkembangan ekspor asal Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020, mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas termasuk ekspor. Namun seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 dan 2022 nilai ekspor Provinsi Jambi mulai mengalami peningkatan menjadi US$ 1,558 Milyar dan US$ 2,613 Milyar. Peningkatan nilai ekspor tersebut bersumber dari kenaikan permintaan komoditas batubara dan minyak nabati. Berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina masih berdampak pada gangguan rantai pasok dan *energy*

crunch yang mendorong peningkatan permintaan komoditas energi termasuk batu bara, terutama dari negara kawasan Eropa guna pemenuhan kebutuhan bahan baku pembangkit listrik selama musim dingin. Adapun ekspor batu bara Jambi sebagian besar ditujukan ke negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan

Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga masih berdampak pada berkurangnya pasokan produk substitusi minyak nabati berbahan kelapa sawit, seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai. Hal ini berimbas pada terjaganya harga CPO pada level tinggi, sehingga kinerja ekspor kelapa sawit Provinsi Jambi masih tumbuh positif, meskipun mulai melambat menuju normal.

Namun di tahun 2023 dan 2024, ekspor kembali tumbuh melambat, akibat penurunan kinerja kelompok batubara, kokas dan briket, serta diikuti kelompok pulp[, kertas, kertas karton, dan olahannya. Terkontraksinya kinerja ekspor batubara dipengaruhi oleh menurunnya produksi batubara dampak dari berlanjutnya perlemahan harga batu bara acuan, terganggunya distribusi jalur angkutan komoditi batubara, serta permintaan ekspor batubara yang turut melemah dampak dari ketidakpastian ekonomi global serta isu lingkungan di berbagai negara mitra yang telah beralih ke energi terbarukan.

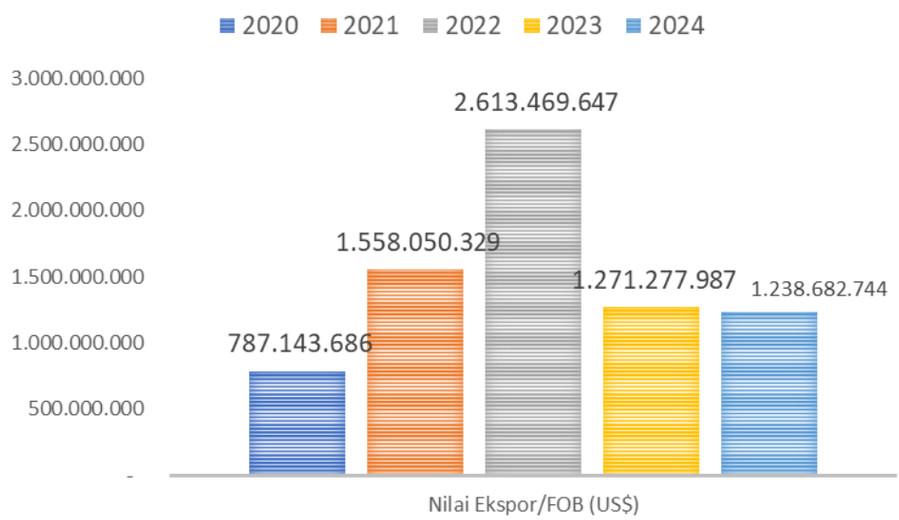

Gambar 2-72 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (US$)

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Ekspor asal Provinsi Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. Pada 2020-2024 struktur nilai ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas. Komoditas ekspor non migas Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditas Karet Olahan, Minyak Nabati (CPO dll) dan Kertas/Pulp, sementara dari pertambangan didominasi komoditi migas. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 83 Negara,

dengan negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Singapura, Malaysia, India dan Amerika Serikat. Kinerja yang ada tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian insentif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada.

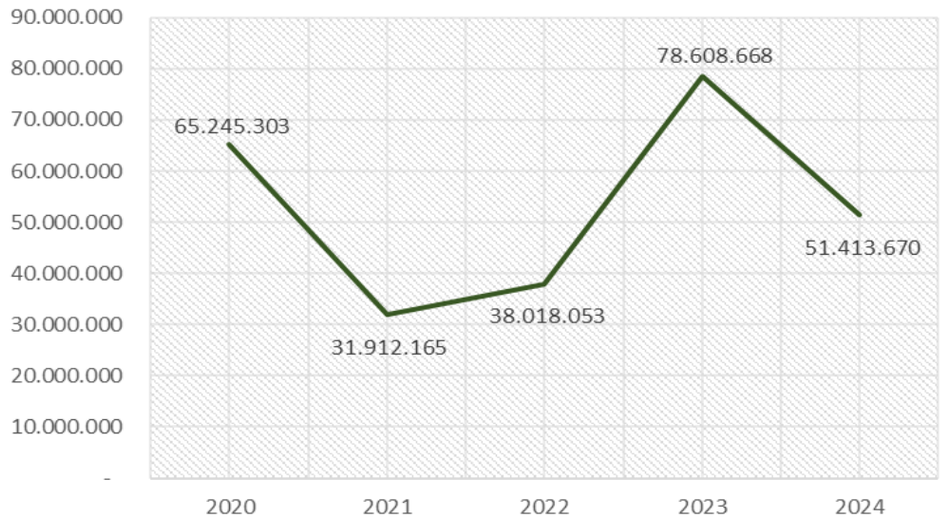

Gambar 2-73 Perkembangan Nilai Impor/*CIF Value* Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (US$)

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Sementara itu, perkembangan impor Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 juga berfluktuasi, baik nilai maupun volumenya. Nilai impor pada tahun 2020 mencapai US$ 65,24 juta, menurun pada tahun 2021 hingga mencapai US$ 31,91 akibat pandemi covid-19. Namun pada tahun 2022 hingga 2023 nilai impor semakin membaik mencapai US$ 78,01 juta. Tahun 2024 kinerja impor menurun nilainya yang dipicu oleh turunnya nilai impor pada kelompok komoditi makanan dan sejenisnya, serta kelompok komoditi bahan kimia. Impor terbesar terjadi pada kelompok Hasil Industri dan Lainnya serta kelompok Mesin dan Alat Angkutan yang berkontribusi masing-masing sebesar 38,78 dan 38,10 persen. Diikuti oleh kelompok Bahan Kimia dan Sejenisnya sebesar 20,57 persen.

2.1.3.3.7 Urusan Perindustrian

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk menggeser share sektor primer ke sektor sekunder, salah satunya melalui upaya-upaya meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jambi. Namun upaya ini belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, karena terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu, percepatan perwujudan kawasan Ujung Jabung harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi.

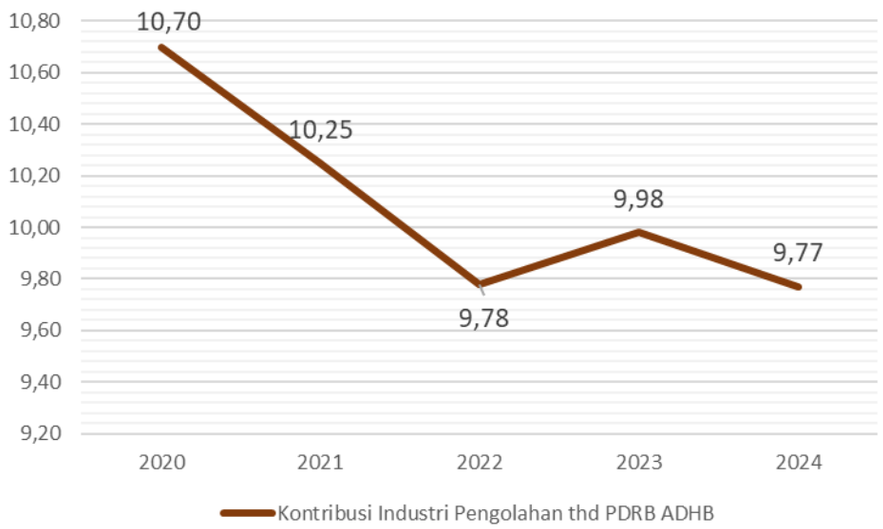

Gambar 2-74 Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS, 2025

2.1.3.3.8 Urusan Transmigrasi

2.1.3.3.8.1 Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penataan pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Jambi. untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi dalam hal ini tanah serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. Selain itu, pelaksanaan urusan ini juga dilakukan dalam rangka pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Sampai dengan tahun 2019, tanah yang telah memiliki sertifikat di Provinsi Jambi baru mencapai 1.251.983 bidang atau baru mencapai 49,51 persen dan masih terdapat 1.276.613 bidang tanah atau 51,49 persen yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun 2019, Kanwil BPN Provinsi Jambi menerbitkan 122.500 bidang tanah, diantaranya adalah 3.000 sertifikat tanah bagi masyarakat kurang

mampu yang merupakan program nawacita pemerintah. Selain itu, dilakukan pula sertifikasi hak atas tanah UKM untuk memberikan modal kepada UKM untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dijalankannya. Sertfikasi hak atas tanah UKM sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-24 Sertifikasi hak Atas Tanah UKM

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	600	1.000	600	1.340	2.706

Sumber: Dinas KUKM Provinsi Jambi, 2021

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2019-2023 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rata-rata Pengeluaran nominal perkapita sebulan untuk makanan Provinsi Jambi meningkat dari Rp560.542/bulan pada tahun 2019 menjadi Rp720.949/bulan pada tahun 2023. Sementara untuk pengeluaran bukan makanan yang antara lain terdiri dari pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, pakaian, pajak, aneka barang dan jasa, lebih rendah dibanding pengeluaran untuk makanan, yaitu dari Rp508.445 menjadi Rp703.176/bulan.

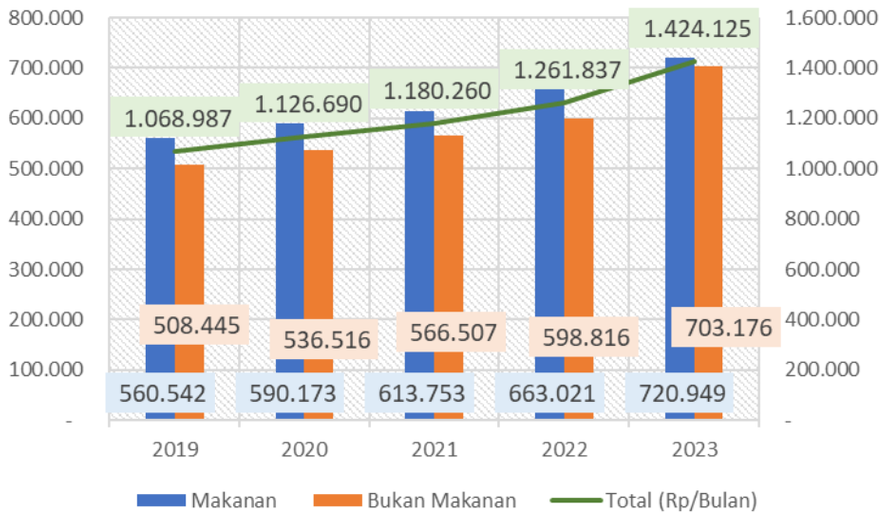

Gambar 2-75 Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan Provinsi Jambi Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, 2024

Bila dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran terbesar masih pada kelompok makanan, kecuali Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh yang telah bergeser komposisi konsumsi masyarakatnya dari dominan kelompok makanan menjadi dominan kelompok bukan makanan, terutama yang didominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga dan aneka barang dan jasa.

Tabel 2-25 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	**Persentase Pengeluaran per Kapita Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan (%)**			
	Makanan		**Bukan Makanan**	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**
PROVINSI JAMBI	**52,54**	**50,62**	**47,46**	**49,38**
KERINCI	56,28	56,57	43,72	43,43
MERANGIN	52,23	47,88	47,77	52,16
SAROLANGUN	50,30	47,85	49,70	52,15
BATANGHARI	56,45	50,84	43,55	49,16
MUARO JAMBI	59,32	54,18	40,68	45,82
TANJUNG JABUNG TIMUR	59,15	57,66	40,85	42,34
TANJUNG JABUNG BARAT	56,80	52,95	43,20	47,05
TEBO	54,15	55,41	45,85	44,59
BUNGO	51,73	54,04	48,27	45,96
KOTA JAMBI	44,64	43,13	55,36	56,87
KOTA SUNGAI PENUH	51,03	49,66	48,97	50,34

Sumber : BPS, 2024

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. *Kedua*, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.

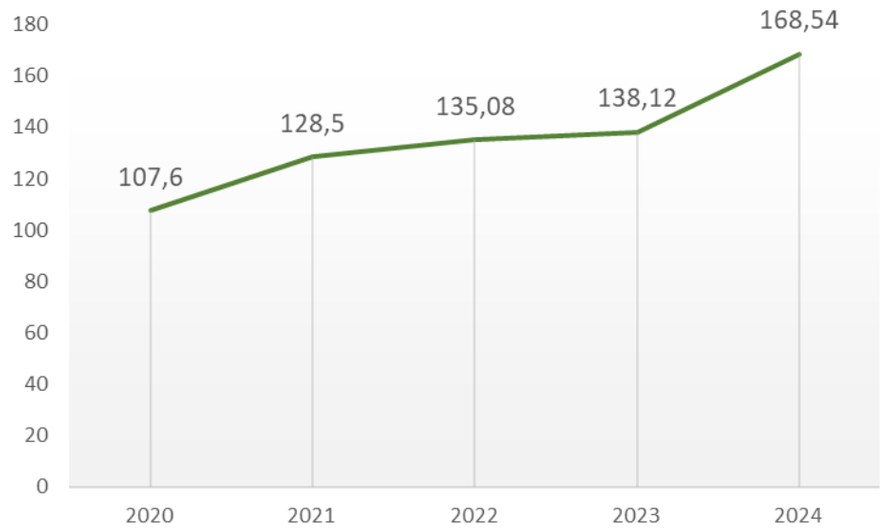

Gambar 2-76 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor tanaman perkebunan, yang disebabkan karena masih terjaganya produktivitas TBS kelapa sawit seiring berangsur masuknya TBS kelapa sawit yang telah di replanting ke usia produktif. Perbaikan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu ke depan kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

2.1.4.2 Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif menanggung hidup (konsumsi) penduduk usia produktif di Provinsi Jambi dapat dilihat dari Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) sebagaimana tersaji pada Gambar di bawah ini.

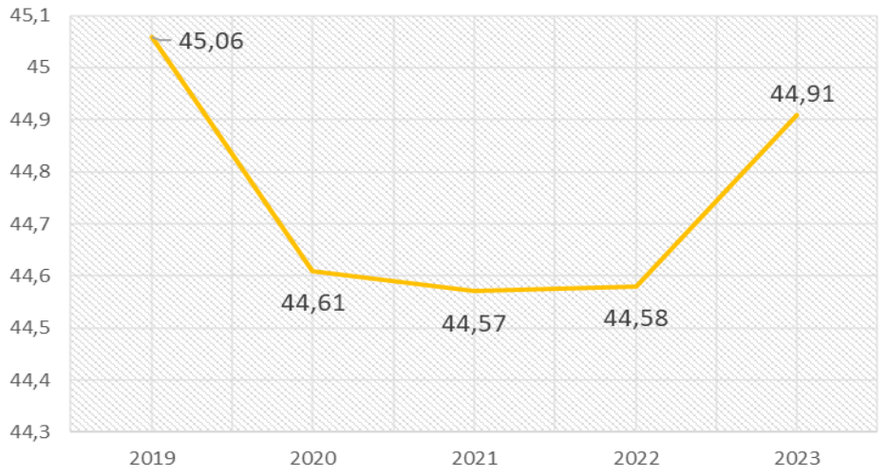

Gambar 2-77 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024 dan Data diolah

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65+ tahun) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2019-2022 semakin menurun, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin berkurang, namun semakin meningkat pada tahun 2023, sehingga jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin bertambah.

2.1.5 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.1.4.3 Bidang Perhubungan

2.1.4.3.1 Proporsi Jalan Kondisi baik

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi tahun 2019 – 2021 berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan menurun, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Penurunan tersebut terjadi karena jalan dalam kondisi baik tersebut menurun kondisinya dan masuk dalam katergori jalan sedang. Namun pada tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik menjadi 46,33 dan 58,58 persen.

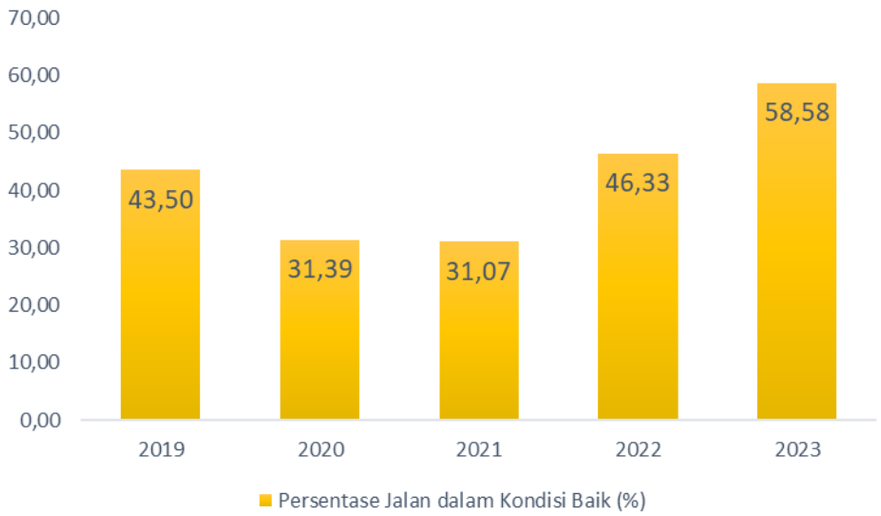

Gambar 2-78 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2019 – 2023
Sumber: BPS,2024

2.1.4.3.2 Bidang Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya pertanian terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan sedangkan kawasan budidaya non-pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan industri.

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. Arahan pola ruang untuk kegiatan budi daya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.

Tabel 2-26 Luas Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jambi

No	Jenis Kawasan	Jumlah	
		Perkiraan Luas (Ha)	% terhadap Luas Wilayah
I	**Kawasan Hutan Produksi**	**1.228.772,60**	**23,20%**
1	Hutan Produksi Tetap	953.293,43	18,00%
2	Hutan Produksi Terbatas	264.381,38	4,99%
3	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	11.097,79	0,21%
II	**Kawasan Pertanian**	**2.650.972,04**	**50,06%**
III	**Kawasan Perikanan**	**231.664,43**	**4,37%**
IV	**Kawasan Pertambangan dan Energi**	**1.446,89**	**0,03%**
V	**Kawasan Peruntukan Industri**	**7.139,26**	**0,13%**
VI	**Kawasan Permukiman**	**48.894,55**	**0,92%**
VII	**Kawasan Transportasi**	**122.348,16**	**2,31%**
VIII	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	**9,73**	**0,00%**
Luas Kawasan Budidaya		**4.291.247,65**	**81,03%**
Luas Wilayah Prov. Jambi		**5.295.816,34**	

Sumber: Matek RTRW Provinsi Jambi 2023-2043, 2023

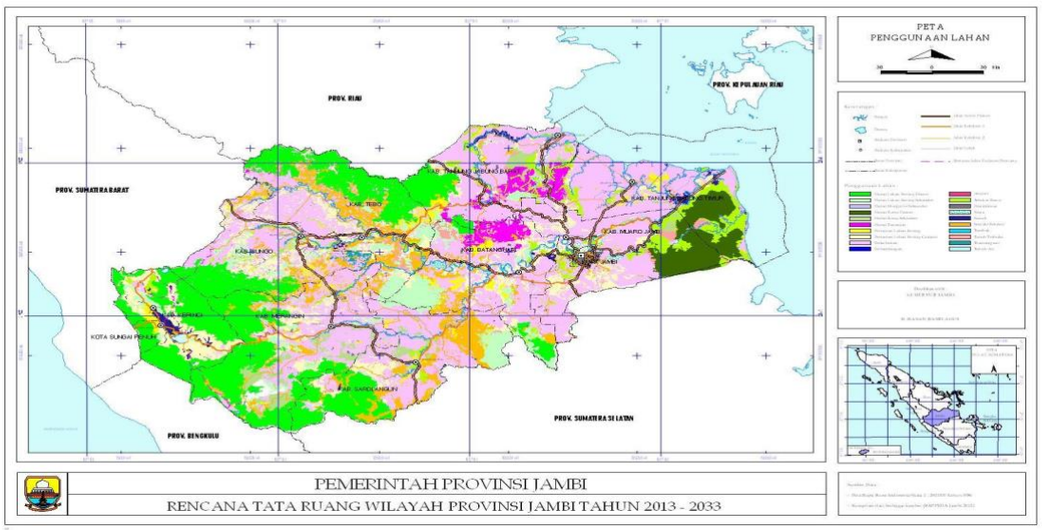

Gambar 2-79 Penggunaan lahan Provinsi Jambi

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043

Pengembangan Kawasan industri di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan seluas kurang lebih 7.139 hektar yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi (Kawasan Industri Kemingking seluas 2.693,70 hektar) dan Tanjung Jabung Timur (Kawasan Industri Ujung Jabung seluas 4.445,55 hektar). Kawasan peruntukan industri kecil diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk daerah perkotaan industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan.

Sedangkan wilayah banjir di Provinsi Jambi tersebar hampir di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jambi terutama pada wilayah barat dan tengah antara lain Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Adapun luas wilayah banjir ± 146.709 Ha. Luas ini

akan terus bertambah apabila tidak dilakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan terutama pada kawasan hulu Provinsi Jambi.

2.1.4.3.3 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.1.4.3.3.1 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel,

Perkembangan hotel di Provinsi Jambi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah hotel kelas bintang cenderung menurun yaitu dari 36 hotel di tahun 2019 menjadi 35 hotel di tahun 2023. Demikian juga untuk kelas non bintang, meskipun mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022, namun jumlah tersebut kembali menurun pada tahun 2023, terutama di Kabupaten Bungo, Merangin dan Kota Jambi yang mengalami penurunan jumlah akomodasi hotel non bintang yang cukup signifikan akibat tingkat okupansi yang cenderung rendah.

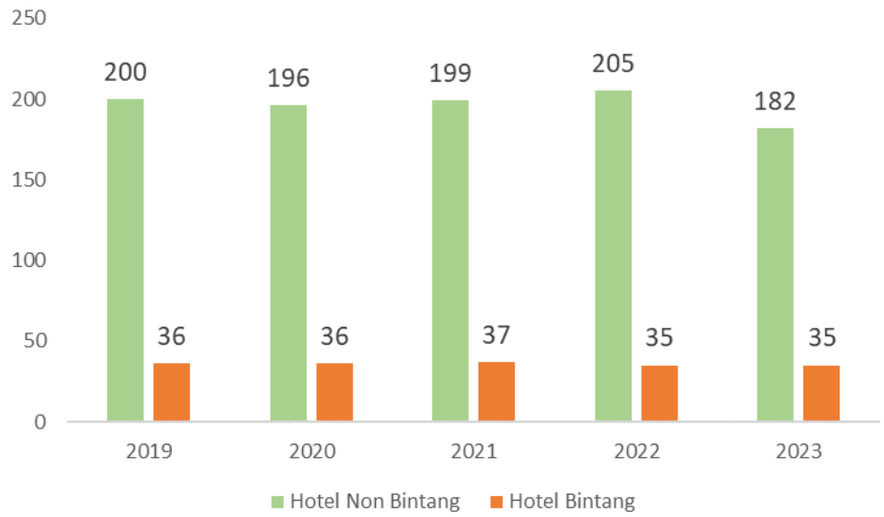

Gambar 2-80 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, 2023

2.1.4.3.4 Bidang Lingkungan Hidup

2.1.4.3.4.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola

dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

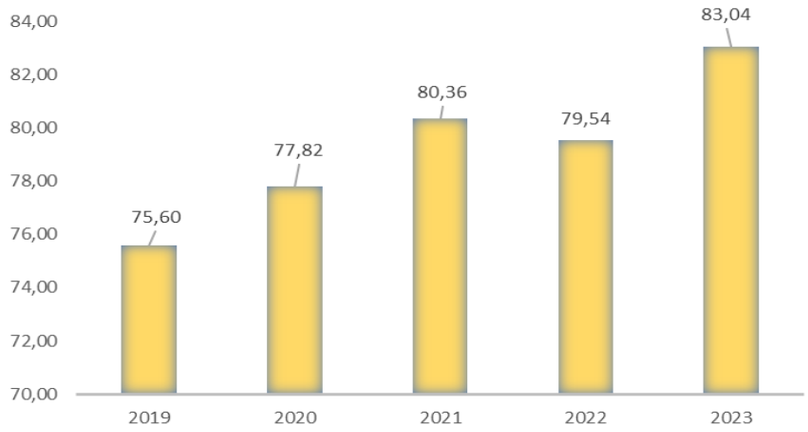

Gambar 2-81 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 83,04% lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

2.1.4.3.5 Bidang Komunikasi dan Informasi

2.1.4.3.5.1 Rasio ketersediaan daya listrik,

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi

Jambi terus meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai 99,99 persen. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

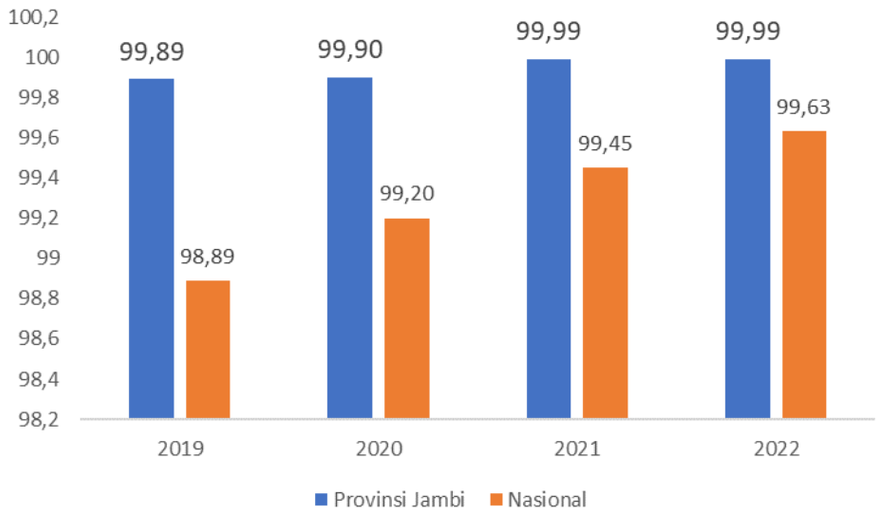

Gambar 2-82 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan Nasional

Sumber: BPS, 2024

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi tahun 2018 masih berada di bawah nasional, namun sejak tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan hingga melebihi capaian nasional.

2.1.5.1 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.5.1.1 Kriminalitas

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (crime total), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (crime clock). Selama selang waktu tahun 2020-2023, jumlah kejahatan di Provinsi Jambi terlihat berfluktuatif. Hal yang sama terlihat pada jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan per 100.000 penduduk, tahun 2023 tingkat kejahatan dan jumlah kejahatan semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pemicu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi, untuk itu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kejahatan di Provinsi Jambi, seiring dengan upaya perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2-83 Jumlah kejahatan dan tingkat risiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Sumber: BPS, 2024 (data termutakhir)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023, meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap RPJMD (tabel terlampir).

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Oleh karena itu identifikasi permasalahan ini sangat dibutuhkan dalam rangka memperkecil "*gap expectatition*" yang mungkin akan timbul.

2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal :

- Belum diterapkannya prinsip aturan hukum dengan baik. Pemerintah belum menjamin kepastian tegaknya hukum terhadap beberapa hal yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masih berlangsung aktivitas yang

mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian dan aktivitas penambangan illegal

- Prinsip daya tanggap yang baik terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi, yang terkait dengan : a) Tata guna lahan (*land-use planning*), yaitu struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharaannya (UUPA No.5 Tahun 1960). Pemerintah Provinsi Jambi perlu menanggapi dengan cepat masalah ini dikarenakan basis perekonomian wilayahnya terletak pada sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya lahan (pertanian, kehutanan dan pertambangan) serta masih tingginya konflik lahan. Dikhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan situasi yang kontra produktif bagi para pelaku usaha serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya; b) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, yaitu separuh anggaran Pendapatan Daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan dasar. Penggalian sumber pendanaan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat mendanai pembangunan wilayah sesuai tujuan dan sasaran yang saat ini kontribusinya relatif rendah merupakan masalah dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
- masih minimnya upaya membangun iklim investasi yang mendukung penguatan infrastruktur perekonomian, khususnya investasi sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.

b. Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan dasar dan perekonomian. Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi Provinsi Jambi mulai tumbuh masing-masing sebesar 3,66 dan 5,13 persen, namun pada tahun 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian akibat dampak dari berlanjutnya pelemahan harga batubara acuan serta isu lingkungan yang menahan permintaan atas komoditas dari negara mitra. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi juga lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 2-84 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

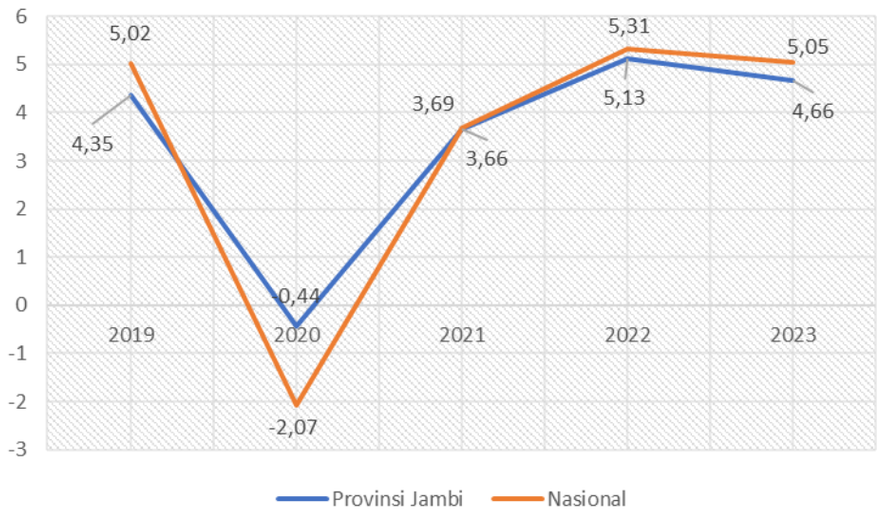

Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi ke dalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan)

serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan di dalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

c. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih di bawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi. Pada Gambar di bawah ini terlihat bahwa hanya Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang capaiannya lebih baik daripada Provinsi dan Nasional, masing-masing yaitu 80,15 dan 76,65. Kabupaten yang capaian IPM-nya lebih baik daripada Provinsi dan di bawah Nasional yaitu Kabupaten Kerinci (72,54). Sementara kabupaten lainnya capaiannya berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Gambar 2-85 Perbandingan IPM Provinsi Jambi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2023

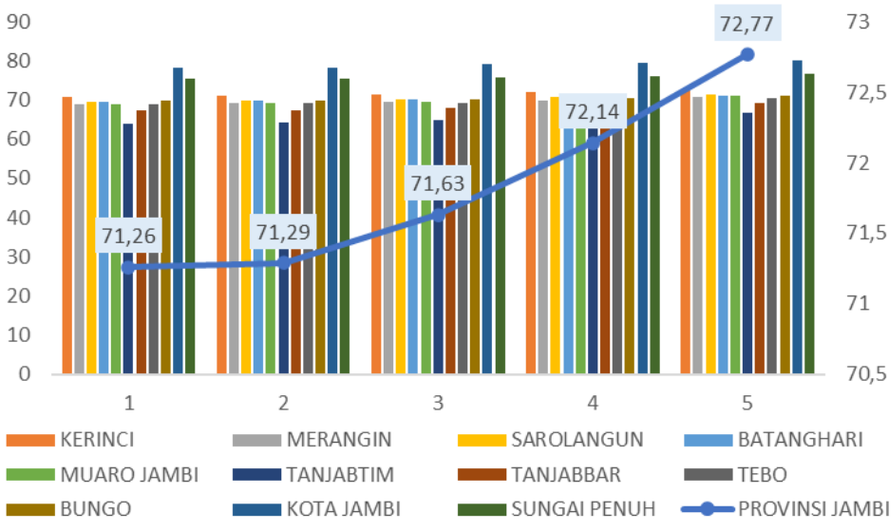

Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Gambar 2-86 Perbandingan IPM Provinsi Jambi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2023

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2023 di Provinsi Jambi adalah 8,81 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau kelas 2 SMP.

Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal. Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (*false unemployment*) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil.

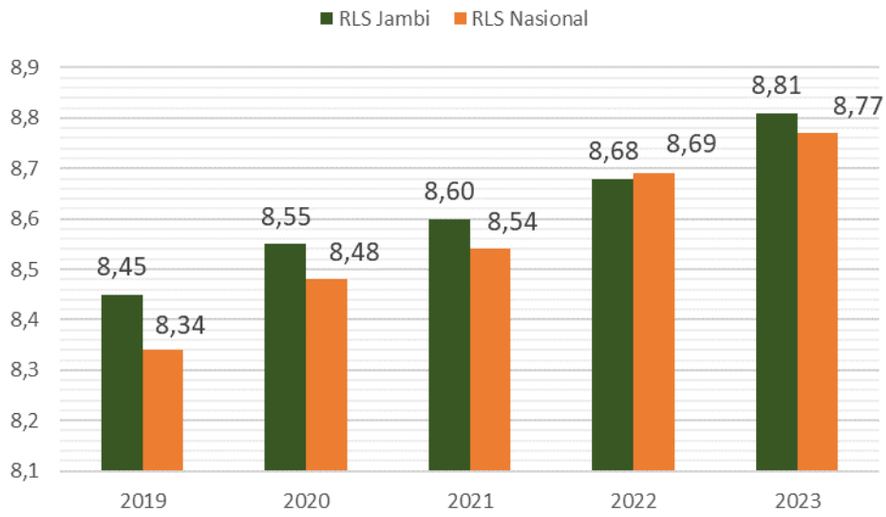

Sumber : BPS, 2024

Gambar 2-87 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2019-2023

Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek

menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional.

Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2020-2023 terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 73,33 tahun pada 2020 meningkat menjadi 73,84 tahun pada 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Namun capaian tersebut masih di bawah capaian nasional.

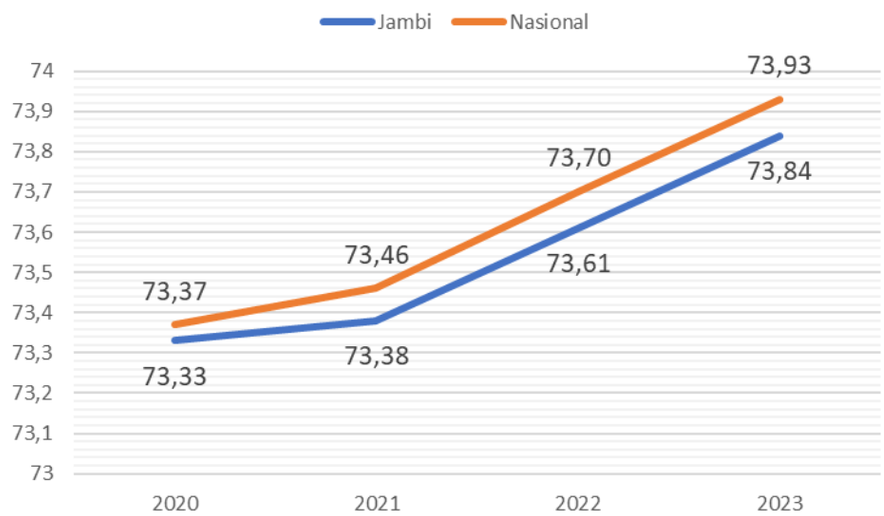

Sumber : BPS, Tahun 2024

Gambar 2-88 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2020-2023 (hasil Long Form)

Hingga kini, Provinsi Jambi masih menghadapi masalah kesehatan bagi masyarakatnya. Masih belum tercapainya target angka kematian ibu, bayi dan balita yang disebabkan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan serta masih tingginya persentase merokok pada masyarakat umur lebih dari 15 tahun merupakan masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

d. Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas linkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (water catchment area) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.

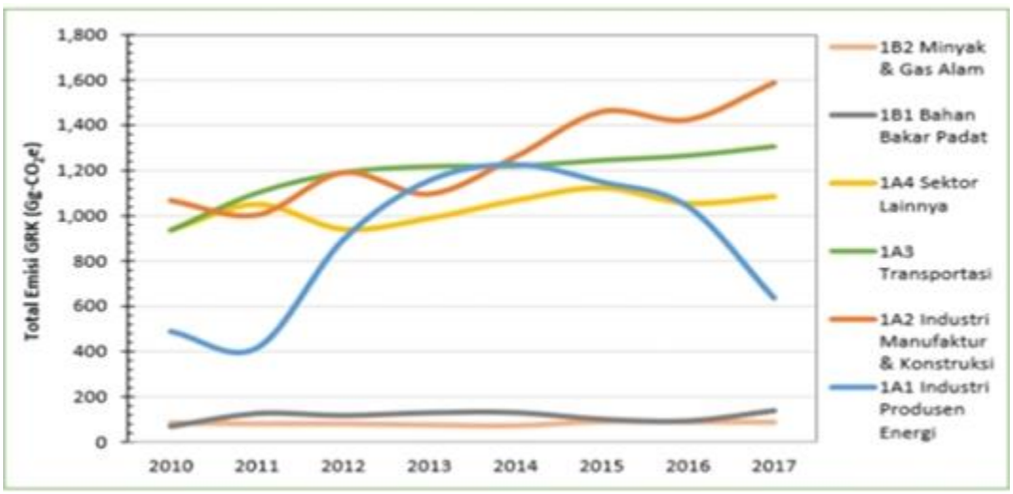

Sumber : KLHS Energi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, UNDP, 2021

Gambar 2-89 Kontributor Emisi Sektor Energi di Provinsi Jambi selama Tahun 2011-2017

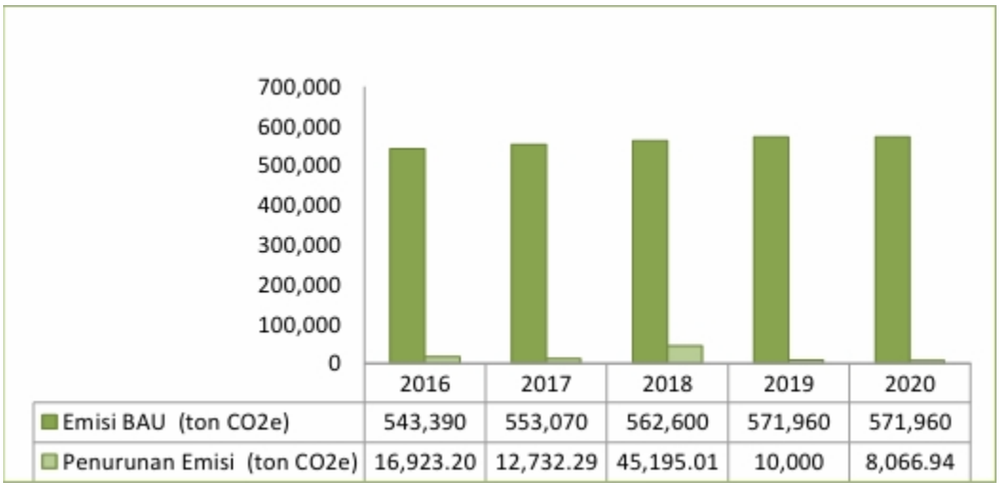

Sumber : Dinas LH Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-90 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi

Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO2e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO2e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat

tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Pada tahun 2023, kebakaran hutan dan lahan mencapai kurang lebih 550,33 hektar, dimana Kabupaten Batanghari memiliki luas lahan terbakar terbanyak dengan luas 439,54 ha, sementara yang paling sedikit terjadi di Kota Jambi dengan luas empat ha. Sementara total titik panas atau *hotspot* berdasarkan Satelit Aquare Terra dan Suomi NPP mencapai 2.063 titik yang tersebar di Kabupaten Batanghari (242 titik), Bungo (80 titik), Kerinci (43 titik), Merangin (357 titik), Muaro Jambi (58 titik), Sarolangun (391 titik), Sungaipenuh (7 titik), Tanjung Barat Barat (517 titik), Tanjung Jabung Timur (39 titik), Tebo (376 titik), dan Kota Jambi (dua titik).

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, dimana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagi intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

Degradasi lingkungan akibat tutupan hutan yang menipis, pengerukan sumber daya alam yang tidak taat aturan dipadukan dengan perubahan iklim yang mendatangkan hujan besar mengakibatkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di tahun 2023 cukup parah, terutama yang terjadi di empat Kabupaten dan Kota, yaitu Bungo, Kerinci, Sungai Penuh dan Tebo. Jika di total korban terdampak banjir dan longsor mencapai 68.086 Jiwa, rumah yang terendam sebanyak 21.578 unit, yang tersebar di 165 Desa dan 28 Kecamatan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

a. Urusan Pendidikan
   1. Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum merata;
   2. Kapasitas pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan baik daring ataupun luring belum merata sehingga kualitas pendidikan juga tidak merata;
   3. Komposisi pendidikan masih didominasi oleh pendidikan umum (SMA) sedangkan pendidikan kejuruan masih pada porsi yang minimal.

b. Urusan Kesehatan
   1. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi terutama di pedesaan;

2. Jumlah tenaga dokter spesialis yang terbatas;
3. Kompetensi tenaga medis masih memerlukan perhatian;
4. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimum untuk kesehatan;

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1. Sarana prasarana irigasi belum mampu melayani kebutuhan air untuk aktivitas pertanian tanaman pangan;
   2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air secara terpadu;
   3. Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas;
   4. Akses penduduk terhadap layanan dasar belum mencapai target 100%;
   5. Belum optimalnya penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah;
   6. Pengembangan kawasan strategis masih lambat;
d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
   1. Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak;
   2. Masih terjadi backlog perumahan.
e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   1. Unjuk rasa berakhir anarkis masih terjadi
f. Urusan Sosial
   1. Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
   2. Masih tingginya ketimpangan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan;
g. Urusan Ketenagakerjaan
   1. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka ;
   2. Masih tingginya angka pengangguran terdidik;
   3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1. Belum optimal perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
   2. Belum optimal peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.
i. Urusan Pangan
   1. Alih fungsi lahan tanaman pangan;
   2. Masih terdapat desa rawan pangan di Provinsi Jambi;
   3. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
   4. Belum optimalnya nilai Pola Pangan Harapan (PPH).
j. Urusan Pertanahan
   1. Sertifikasi hak atas tanah masih rendah
k. Urusan Lingkungan Hidup

1. Kualitas air dan udara mengalami penurunan;

l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   1. Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah

m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1. Belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa;
   2. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

n. Urusan Perhubungan
   1. Perubahan preferensi masyarakat dalam pemilihan moda transportasi harus diiringi dengan peningkatan sarana prasarana perhubungan.

o. Urusan Komunikasi dan Informatika
   1. Kurangnya integrasi berbagai interface pelayanan publik.

p. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   1. Belum optimalnya kontribusi UKM dalam perekonomian daerah;
   2. Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi;

q. Urusan Penanaman Modal
   1. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri menurun;
   2. Tingkat kesenjangan antara realisasi investasi dan persetujuan investasi masih relatif tinggi.

r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
   1. Terbatasnya sarana olah raga berskala nasional;
   2. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas pemuda dalam pembangunan.

s. Urusan Statistik
   1. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu;
   2. Ketersediaa data sektoral masih minim.

t. Urusan Kebudayaan
   1. Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya daerah
   2. Terbatasnya pemanfaatan nilai budaya daerah

u. Urusan Kearsipan
   1. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal.

v. Urusan Kelautan dan Perikanan
   1. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.

2. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasasi nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.
3. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
4. produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
5. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.

w. Urusan Pariwisata
1. Berbagai potensi wisata budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal.
2. Kurangnya promosi pariwisata sehingga potensi pariwisata yang ada belum dikenal masyarakat secara luas dan global
3. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya pembangunan bidang pariwisata belum optimal

x. Urusan Pertanian
1. Tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan rendah;
2. Produktivitas lahan pertanian belum optimal;
3. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi dan daerah pemasaran masih belum lancar.

y. Urusan Kehutanan
1. Tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan;

z. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Eksplorasi bahan tambang dan galian yang dilakukan di Provinsi Jambi belum berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi eksplorasi
2. Potensi energi baru terbarukan belum tereksplorasi optimal untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat

aa. Urusan Perdagangan
1. Masih rendahnya nilai ekspor.

bb. Urusan Perindustrian
1. Kurangnya daya saing produk hasil industri;
2. Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi produksi;-
3. Pengembangan agroindustri belum optimal.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan) (SMK)	0	%	2.554.338.070.690	0	%		100	%	484.894.520.910	72,46	%	423.398.185.557	72,46	%	87,32	36,23	%	423.398.185.557		%	16,58	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan) (SMA)	100	%		0	%		100	%		72,46	%		72,46	%		36,23	%		36,23	%		Dinas Pendidikan	
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	45,5	%		0	%		55,39	%		45,58	%		82,29	%		22,79	%		50,09	%		Dinas Pendidikan	
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	63,12	%		0	%		57,13	%		50,75	%		88,83	%		25,375	%		40,20	%		Dinas Pendidikan	
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	54,54	%		0	%		57,08	%		52,39	%		91,78	%		26,195	%		48,03	%		Dinas Pendidikan	
			Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	59,65	%		0	%		58,4	%		47,77	%		81,80	%		23,885	%		40,04	%		Dinas Pendidikan	
			Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	54,84	%		0	%		52,44	%		49,55	%		94,49	%		24,775	%		45,18	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Keamanan SMA	87,8	%		0	%		78,85	%		71,43	%		90,59	%		35,715	%		40,68	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Kebinekaan SMA	78,65	%		0	%		73,94	%		72,42	%		97,94	%		36,21	%		46,04	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Inklusivitas SMA	67,6	%		0	%		61,94	%		57,49	%		92,82	%		28,745	%		42,52	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Keamanan SMK	79,88	%		0	%		75,88	%		67,72	%		89,25	%		33,86	%		42,39	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,65	%		0	%		69,23	%		69,07	%		99,77	%		34,535	%		45,65	%		Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus)	100	%		0	%		100	%		59,78	%		59,78	%		29,89	%		29,89	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Inklusivitas SMK	63,46	%		0	%		58,96	%		54,74	%		92,84	%		27,37	%		43,13	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Keamanan SDLB	85,31	%		0	%		81,81	%		72,41	%		88,51	%		36,205	%		42,44	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	75,44	%		0	%		72,08	%		65,16	%		90,40	%		32,58	%		43,19	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Inklusivitas SDLB	69,76	%		0	%		64,21	%		58,71	%		91,43	%		29,355	%		42,08	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Keamanan SMPLB	84,2	%		0	%		81,7	%		63,46	%		77,67	%		31,73	%		37,68	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	74,06	%		0	%		68,29	%		63,43	%		92,88	%		31,715	%		42,82	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Inklusivitas SMPLB	69,56	%		0	%		61,92	%		55,78	%		90,08	%		27,89	%		40,09	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Keamanan SMALB	75,79	%		0	%		71,79	%		59,63	%		83,06	%		29,815	%		39,34	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	71,85	%		0	%		67,37	%		61,79	%		91,72	%		30,895	%		43,00	%		Dinas Pendidikan	
			Indeks Inklusivitas SMALB	68,87	%		0	%		65,43	%		58,48	%		89,38	%		29,24	%		42,46	%		Dinas Pendidikan	
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	95,14	%		0	%		94	%		90,06	%		95,81	%		45,03	%		47,33	%		Dinas Pendidikan	
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,89	%		0	%		79,61	%		79,46	%		99,81	%		39,73	%		49,73	%		Dinas Pendidikan	
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	70,34	%		0	%		67,49	%		67,16	%		99,51	%		33,58	%		47,74	%		Dinas Pendidikan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	59,96 %		%		57,48 %		56,63 %		98,52 %		28,315 %		47,22 %		Dinas Pendidikan	
			Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	63,17 %		0 %		63,21 %		63,17 %		99,94 %		31,585 %		50,00 %		Dinas Pendidikan	
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	53,43 %		0 %		54,73 %		53,87 %		98,43 %		26,935 %		50,41 %		Dinas Pendidikan	
			Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB, Berdasarkan Asesmen Nasional	65,22 %		0 %		55,92 %		52,73 %		94,30 %		26,365 %		40,42 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	100 %	1.078.287.260.000	0 %		100 %	226.203.000.671	98,79 %	161.390.558.133	98,79 %	71,35	98,79 %	161.390.558.133	98,79 %	14,97	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	100 Unit	25.000.000.000	0 Unit		18 Unit	26.403.528.040	18 Unit	105.445.051.973	100,00 %	399,36	18 Unit	105.445.051.973	18,00 %	421,78	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	200 Ruang	32.500.000.000	0 Ruang		9 Ruang	9.966.864.320	9 Ruang	9.919.009.440	100,00 %	99,52	9 Ruang	9.919.009.440	4,50 %	30,52	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	320 Paket	12.000.000.000	0 Paket		35 Paket	27.617.575.997	35 Paket	33.206.995.052	100,00 %	120,24	35 Paket	33.206.995.052	10,94 %	276,72	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	0 Paket	0	0 Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	0 Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	15 Unit	3.000.000.000	Unit		1 Unit	2.185.393.352	1 Unit	497.916.316	100,00 %	22,78	1 Unit	497.916.316	6,67 %	16,60	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12,891 Peserta Didik	35.000.000.000	Peserta Didik		3.350 Peserta Didik	5.150.000.000	3.092 Peserta Didik	5.056.710.800	92,30 %	98,19	3.092 Peserta Didik	5.056.710.800	23.985,73 %	14,45	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.500 Peserta Didik	19.340.000.000	0 Peserta Didik		46 Peserta Didik	273.554.500	46 Peserta Didik	605.125.197	100,00 %	221,21	46 Peserta Didik	605.125.197	3,07 %	3,13	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0 Orang	0	0 Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	747 Orang	33.900.000.000	0 Orang		140 Orang	924.500.000	140 Orang	608.615.999	100,00 %	65,83	140 Orang	608.615.999	18,74 %	1,80	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1.170 Satuan Pendidikan	873.847.260.000	Satuan Pendidikan		251 Satuan Pendidikan	132.310.809.654	251 Satuan Pendidikan	131.399.361.126	100,00 %	99,31	251 Satuan Pendidikan	131.399.361.126	21,45 %	15,04	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	90 Orang	3.300.000.000	0 Orang		25 Orang	545.719.460	25 Orang	545.719.460	100,00 %	100,00	25 Orang	545.719.460	27,78 %	16,54	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0057a	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (BTIKP)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0058a	Pengembangan konten digital untuk pendidikan (BTIKP)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0	Konten Digital		0 Konten Digital	0	Konten Digital		%		Konten Digital		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0059a	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (BTIKP)	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	4.500.000.000	Dokumen		1 Dokumen	233.965.400	1 Dokumen	166.083.943	100,00 %	70,99	1 Dokumen	166.083.943	33,33 %	3,69	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0	0 Komunitas		0 Komunitas	0	Komunitas		%		Komunitas		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0064a	Penyediaan infrastruktur TIK (BTIKP)	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	15.000.000.000	0 Unit		7 Unit	14.901.300.070	7 Unit	14.553.960.330	100,00 %	97,67	7 Unit	14.553.960.330	140,00 %	97,03	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang	20.000.000.000	0 Ruang		26 Ruang	5.539.789.878	26 Ruang	5.436.778.864	100,00 %	98,14	26 Ruang	5.436.778.864	32,50 %	27,18	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	741 Orang	900.000.000	0 Orang		240 Orang	150.000.000	240 Orang	106.777.852	100,00 %	71,19	240 Orang	106.777.852	32,39 %	11,86	Dinas Pendidikan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMK yang terpenuhi	100 Persen	1.396.807.040.000	0 Persen		100 Persen	232.207.487.090	99,87 Persen	175.917.273.855	99,87 %	75,76	49,935 Persen	175.917.273.855	49,94 %	12,59	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	0 Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	35.000.000.000	0 Unit		37 Unit	71.731.132.040	37 Unit	105.445.051.973	100,00 %	147,00	37 Unit	105.445.051.973	74,00 %	301,27	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	117 Paket	5.850.000.000	0 Paket		23 Paket	5.800.000.000	23 Paket	33.206.995.052	100,00 %	572,53	23 Paket	33.206.995.052	19,66 %	567,64	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	73 Paket	146.000.000.000	0 Paket		120 Paket	67.547.809.860	114 Paket	67.070.530.797	95,00 %	99,29	114 Paket	67.070.530.797	156,16 %	45,94	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	2.700.000.000	0 Unit		1 Unit	634.000.010	1 Unit	497.916.316	100,00 %	78,54	1 Unit	497.916.316	20,00 %	18,44	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	9.553 Peserta Didik	30.000.000.000	0 Peserta Didik		2.000 Peserta Didik	3.857.924.400	1.800 Peserta Didik	3.782.078.384	90,00 %	98,03	1.800 Peserta Didik	3.782.078.384	18,84 %	12,61	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.240 Peserta Didik	15.900.000.000	0 Peserta Didik		200 Peserta Didik	369.999.800	200 Peserta Didik	605.125.197	100,00 %	163,55	200 Peserta Didik	605.125.197	16,13 %	3,81	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0	0 Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	555 Orang	9.250.000.000	0 Orang		900 Orang	761.721.000	Orang	340.701.000	%	44,73	Orang	340.701.000	%	3,68	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	555 Satuan Pendidikan	3.495.000.000	0 Satuan Pendidikan		180 Satuan Pendidikan	269.597.500	178 Satuan Pendidikan	105.643.850	98,89 %	39,19	178 Satuan Pendidikan	105.643.850	32,07 %	3,02	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	900 Satuan Pendidikan	1.147.862.040.000	Satuan Pendidikan		185 Satuan Pendidikan	81.039.900.000	185 Satuan Pendidikan	80.867.987.326	100,00 %	99,79	185 Satuan Pendidikan	80.867.987.326	20,56 %	7,05	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0	Komunitas		0 Komunitas	0	Komunitas		%		Komunitas		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	546 Orang	750.000.000	0 Orang		180 Orang	195.402.480	180 Orang	106.777.852	100,00 %	54,65	180 Orang	106.777.852	32,97 %	14,24	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	100 Persen	79.243.770.690	0 Persen		100 Persen	26.484.033.149	96,86 Persen	86.090.353.569	96,86 %	325,07	48,43 Persen	86.090.353.569	48,43 %	108,64	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit	5.400.000.000	0 Unit		1 Unit	11.090.331.000	1 Unit	105.445.051.973	100,00 %	950,78	1 Unit	105.445.051.973	2,50 %	1.952,69	Dinas Pendidikan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0	Ruang		0 Ruang	0	Ruang		%		Ruang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	0 Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.335 Peserta Didik	25.255.610.690	0 Peserta Didik		400 Peserta Didik	4.706.965.628	400 Peserta Didik	3.956.006.290	100,00 %	84,05	400 Peserta Didik	3.956.006.290	17,13 %	15,66	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.500 Peserta Didik	7.678.020.000	0 Peserta Didik		824 Peserta Didik	200.000.000	824 Peserta Didik	605.125.197	100,00 %	302,56	824 Peserta Didik	605.125.197	54,93 %	7,88	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	0 Orang	0	0 Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	112 Orang	800.000.000	0 Orang		64 Orang	200.001.710	64 Orang	43.750.500	100,00 %	21,88	64 Orang	43.750.500	57,14 %	5,47	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	112 Satuan Pendidikan	37.460.140.000	Satuan Pendidikan		24 Satuan Pendidikan	9.606.260.000	24 Satuan Pendidikan	9.570.319.150	100,00 %	99,63	24 Satuan Pendidikan	9.570.319.150	21,43 %	25,55	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	124.999.899	1 Dokumen	166.083.943	100,00 %	132,87	1 Dokumen	166.083.943	33,33 %	22,14	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	295.474.912	1 Dokumen	132.932.762	100,00 %	44,99	1 Dokumen	132.932.762	33,33 %	17,72	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	750.000.000	0 Kegiatan		20 Kegiatan	260.000.000	3 Kegiatan	22.550.352	15,00 %	8,67	3 Kegiatan	22.550.352	100,00 %	3,01	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	106 Satuan Pendidikan	400.000.000	0 Satuan Pendidikan		23 Satuan Pendidikan	0	23 Satuan Pendidikan		100,00 %		23 Satuan Pendidikan		21,70 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	100 %	1.125.000.000	0 %		100 %	99.999.900	100 %		100,00 %		50 %		50,00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	100 Persen	1.125.000.000	0 Persen		100 Persen	99.999.900	100 Persen		100,00 %		50 Persen		50,00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	5 Dokumen	1.125.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	99.999.900	1 Dokumen	999.866.900	100,00 %	999,87	1 Dokumen	999.866.900	20,00 %	88,88	Dinas Pendidikan	
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik ASN memenuhi standar jumlah	92,31 %	29.100.000.000	0 %		66,9 %	44.143.542.390	58,27 %	12.484.127.201	87,10 %	28,28	29,135 %	12.484.127.201	31,56 %	42,90	Dinas Pendidikan	
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar kualitas	90,26 %		0 %		87,83 %		97,63 %		111,16 %		48,815 %		54,08 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	100 Persen	29.100.000.000	0 Persen		100 Persen	44.143.542.390	93,98 Persen	12.484.127.201	93,98 %	28,28	46,99 Persen	12.484.127.201	46,99 %	42,90	Dinas Pendidikan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Dokumen	14.550.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	150.043.160	1 Dokumen	17.328.000	100,00 %	11,55	1 Dokumen	17.328.000	20,00 %	0,12	Dinas Pendidikan	
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Laporan	14.550.000.000	0 Laporan		12 Laporan	43.993.499.230	12 Laporan	41.402.371.396	100,00 %	94,11	12 Laporan	41.402.371.396	240,00 %	284,55	Dinas Pendidikan	
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	100 %	1.500.000.000	0 %		60 %	99.999.900	40 %	59.294.400	66,67 %	59,29	20 %	59.294.400	20,00 %	3,95	Dinas Pendidikan	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pembinaan pengembangan dan perlindungan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi	100 Persen	1.500.000.000	Persen		100 Persen	99.999.900	59,29 Persen	59.294.400	59,29 %	59,29	29,645 Persen	59.294.400	29,65 %	3,95	Dinas Pendidikan	
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	680 Peserta Didik	1.500.000.000	0 Peserta Didik		23 Peserta Didik	99.999.900	23 Peserta Didik	59.294.400	100,00 %	59,29	23 Peserta Didik	59.294.400	3,38 %	3,95	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	72 Indeks	1.527.749.400.009	Indeks		74 Indeks	787.535.908.133	72,95 Indeks	2.407.406.320	98,58 %	0,31	72,95 Indeks	2.407.406.320	101,32 %	0,16	Dinas Pendidikan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Persen		0 Persen		85 Persen		84,44 Persen		99,34 %		42,22 Persen		50,87 %		Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja	40 Dokumen	4.485.000.000	0 Dokumen		8 Dokumen	868.436.804	84,25 Dokumen	91.169.980	1.053,13 %	10,50	84,25 Dokumen	91.169.980	210,63 %	2,03	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.100.000.000	0 Dokumen		2 Dokumen	416.492.200	2 Dokumen	343.296.501	100,00 %	82,43	2 Dokumen	343.296.501	16,67 %	16,35	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	155.000.000	0 Dokumen		5 Dokumen	79.584.700	5 Dokumen	42.811.225	100,00 %	53,79	5 Dokumen	42.811.225	100,00 %	27,62	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja	10 Laporan	155.000.000	0 Laporan		13 Laporan	114.520.000	13 Laporan	46.647.201	100,00 %	40,73	13 Laporan	46.647.201	130,00 %	30,09	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	2.075.000.000	0 Laporan		6 Laporan	257.839.904	6 Laporan	248.713.284	100,00 %	96,46	6 Laporan	248.713.284	120,00 %	11,99	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	1.466.145.000.000	0 Laporan		100 Laporan	776.352.174.799	98,29 Laporan	90.110.490	98,29 %	0,01	98,29 Laporan	90.110.490	1.965,80 %	0,01	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	317.700 Orang/bulan	1.464.010.000.000	Orang/bulan		6.000 Orang/bulan	775.965.174.801	6.000 Orang/bulan	515.318.909.791	100,00 %	66,41	6.000 Orang/bulan	515.318.909.791	1,89 %	35,20	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen Penataausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	1.075.000.000	0 Dokumen		12 Dokumen	111.999.998	12 Dokumen	70.863.400	100,00 %	63,27	12 Dokumen	70.863.400	20,00 %	6,59	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	640.000.000	0 Dokumen		4 Dokumen	125.000.000	4 Dokumen	88.235.441	100,00 %	70,59	4 Dokumen	88.235.441	80,00 %	13,79	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	5 Dokumen	420.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	133.351.873	100,00 %	88,90	1 Dokumen	133.351.873	20,00 %	31,75	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset	5 Laporan	1.770.000.000	0 Laporan		100 Laporan	267.508.000	15,59 Laporan		15,59 %		15,59 Laporan		311,80 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah Pada SKPD	10 Laporan	1.770.000.000	0 Laporan		1 Laporan	267.508.000	1 Laporan	41.693.000	100,00 %	15,59	1 Laporan	41.693.000	10,00 %	2,36	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan SKPD	5 Laporan	520.000.000	0 Laporan		100 Laporan	40.000.000	13,29 Laporan		13,29 %		13,29 Laporan		265,80 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	520.000.000	0 Dokumen		2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	5.317.100	100,00 %	13,29	2 Dokumen	5.317.100	40,00 %	1,02	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	6.990.000.000	0 Persen		100 Persen	300.037.220	55,2 Persen	72.797.800	55,20 %	24,26	27,6 Persen	72.797.800	27,60 %	1,04	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	585.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	34.716.000	100,00 %	57,86	1 Dokumen	34.716.000	20,00 %	5,93	Dinas Pendidikan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	615.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen		100,00 %		1 Dokumen		20,00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	10 Dokumen	1.940.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	46.702.000	100,00 %	93,40	1 Dokumen	46.702.000	10,00 %	2,41	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.05.0009a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (BTIKP)	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75 Orang	3.850.000.000	0 Orang		325 Orang	140.037.220	Orang	67.249.094	%	48,02	Orang	67.249.094	%	1,75	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang terpenuhi	100 Persen	21.076.400.000	0 Persen		100 Persen	2.917.752.843	94,79 Persen	562.024.400	94,79 %	19,26	47,395 Persen	562.024.400	47,40 %	2,67	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	698.000.000	0 Paket		3 Paket	119.991.000	3 Paket	118.267.040	100,00 %	98,56	3 Paket	118.267.040	60,00 %	16,94	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	19 Paket	2.135.000.000	0 Paket		4 Paket	575.331.199	4 Paket	300.727.160	100,00 %	52,27	4 Paket	300.727.160	21,05 %	14,09	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0002a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BTIKP)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan (Dinas) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	0 Paket	0	0 Paket		1 Paket	24.506.304	1 Paket	19.638.924	100,00 %	80,14	1 Paket	19.638.924	%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang di sediakan	5 Paket	1.960.000.000	0 Paket		6 Paket	370.851.966	6 Paket	215.000.400	100,00 %	57,97	6 Paket	215.000.400	120,00 %	10,97	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket	3.034.200.000	0 Paket		54 Paket	266.140.000	32 Paket	44.135.000	59,26 %	16,58	32 Paket	44.135.000	400,00 %	1,45	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0005a	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BTIKP)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket	3.034.200.000	0 Paket		1 Paket	221.902.574	1 Paket	156.851.782	100,00 %	70,68	1 Paket	156.851.782	12,50 %	5,17	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen	445.000.000	0 Dokumen		2 Dokumen	118.420.000	2 Dokumen		100,00 %		2 Dokumen		40,00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket bahan/material yang di sediakan	5 Paket	1.290.000.000	0 Paket		2 Paket	30.000.000	2 Paket	29.246.550	100,00 %	97,49	2 Paket	29.246.550	40,00 %	2,27	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	3.050.000.000	0 Laporan		6 Laporan	650.108.000	6 Laporan	544.220.918	100,00 %	83,71	6 Laporan	544.220.918	10,00 %	17,84	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.06.0011a	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BTIKP)	Jumlah Dokumen dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5.430.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	540.501.800	1 Dokumen	521.048.038	100,00 %	96,40	1 Dokumen	521.048.038	20,00 %	9,60	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 Persen	4.050.000.000	0 Persen		100 Persen	813.150.150	89,45 Persen		89,45 %		44,725 Persen		44,73 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	3.300.000.000	0 Unit		1 Unit	407.020.000	1 Unit	347.000.000	100,00 %	85,25	1 Unit	347.000.000	14,29 %	10,52	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Lainnya yang Disedakan	5 Unit	750.000.000	0 Unit		10 Unit	406.130.150	10 Unit	380.354.300	100,00 %	93,65	10 Unit	380.354.300	200,00 %	50,71	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	18.293.000.009	0 Persen		100 Persen	4.549.388.517	94,97 Persen	1.591.303.650	94,97 %	34,98	47,485 Persen	1.591.303.650	47,49 %	8,70	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	3.798.000.000	0 Laporan		12 Laporan	765.859.744	12 Laporan	743.821.103	100,00 %	97,12	12 Laporan	743.821.103	240,00 %	19,58	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	365.000.000	0 Laporan		5 Laporan	257.602.306	5 Laporan	166.845.000	100,00 %	64,77	5 Laporan	166.845.000	100,00 %	45,71	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	14.130.000.009	0 Laporan		12 Laporan	3.525.926.467	12 Laporan	3.409.939.441	100,00 %	96,71	12 Laporan	3.409.939.441	240,00 %	24,13	Dinas Pendidikan	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	4.420.000.000	0 Persen		100 Persen	1.427.459.800	31,94 Persen		31,94 %		15,97 Persen		15,97 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	321 Unit	2.100.000.000	0 Unit		105 Unit	469.715.800	105 Unit	275.069.950	100,00 %	58,56	105 Unit	275.069.950	32,71 %	13,10	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	1.320.000.000	0 Unit		4 Unit	930.000.000	4 Unit		100,00 %		4 Unit		40,00 %		Dinas Pendidikan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	1.01.01.1.09.0011a	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BTIKP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11	Unit	1.000.000.000	0	Unit		1	Unit	27.744.000	1	Unit	27.744.000	100,00	%	100,00	1	Unit	27.744.000	9,09	%	2,77	Dinas Pendidikan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
	1.02.02.004	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bumil Kurang Energi Kronis (KEK)	0	%		10,1	%		10	%		45,5	%		-255,00	%	nan	27,8	%			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	0	%			%		89	%		73,88	%		83,01	%		36,94	%			%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	100	Nilai	76.615.145.000	32	Nilai		70	Nilai	67.456.503.585	70,08	Nilai	20.455.336.120	100,11	%	30,32	102,08	Nilai	20.455.336.120	102,08	%	26,70	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	51.022.381.500	151	%		100	%	39.565.914.859	100	%	9.287.856.428	100,00	%	23,47	251	%	9.287.856.428	251,00	%	18,20	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.500	org/bulan	51.022.381.500	5.004	org/bulan		3.300	org/bulan	39.565.914.859	3.300	org/bulan	36.606.029.231	100,00	%	92,52	8.304	org/bulan	36.606.029.231	50,33	%	71,75	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	98	%	9.055.458.500	69	%		98	%	6.302.505.496	98	%	1.711.744.993	100,00	%	27,16	167	%	1.711.744.993	170,41	%	18,90	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	Laporan	1.683.715.000	4	Laporan		4	Laporan	1.225.809.496	4	Laporan	1.209.771.383	100,00	%	98,69	8	Laporan	1.209.771.383	40,00	%	71,85	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	Laporan	7.371.743.500	4	Laporan		4	Laporan	5.076.696.000	4	Laporan	4.559.983.566	100,00	%	89,82	8	Laporan	4.559.983.566	40,00	%	61,86	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95	%	1.537.305.000	95	%		95	%	2.101.595.188	95	%	855.503.400	100,00	%	40,71	190	%	855.503.400	200,00	%	55,65	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	10	Unit	1.537.305.000	3	Unit		2	Unit	2.101.595.188	2	Unit	2.097.286.200	100,00	%	99,79	5	Unit	2.097.286.200	50,00	%	136,43	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	86	%	15.000.000.000	84	%		84	%	19.486.488.042	84	%	8.600.231.299	100,00	%	44,13	168	%	8.600.231.299	195,35	%	57,33	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5	Unit Kerja	15.000.000.000	1	Unit Kerja		1	Unit Kerja	19.486.488.042	1	Unit Kerja	19.417.370.181	100,00	%	99,65	2	Unit Kerja	19.417.370.181	40,00	%	129,45	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan masyarakat di RSUD Rd. Mattaher	87	Nilai	258.448.931.558	80,26	Nilai		85	Nilai	16.025.707.000	86,36	Nilai	13.030.614.439	101,60	%	81,31	166,62	Nilai	13.030.614.439	191,52	%	5,04	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Raden Mattaher Jambi Yang Teresedia	100	Persen	258.448.931.558		Persen		95	Persen	16.025.707.000	60	Persen	13.030.614.439	63,16	%	81,31	30	Persen	13.030.614.439	30,00	%	5,04	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan, alat penunjang medik, fasilitas kesehatan yang disediakan	770	Unit	143.580.656.250	0	Unit		50	Unit	10.753.541.000	20	Unit	10.585.126.600	40,00	%	98,43	20	Unit	10.585.126.600	2,60	%	7,37	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																								
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	5	Paket	114.868.275.308	0	Paket		1	Paket	5.272.166.000	1	Paket	5.241.083.342	100,00	%	99,41	1	Paket	5.241.083.342	20,00	%	4,56	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Pelayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang disediakan	1	%			%		1	%			%			%	nan		%			%		RSUD Rd. Mattaher	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20								4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Provinsi																	
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 %		0 %		1 %		%		%	nan	%		%		RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi	1 %		0 %		1 %		%		%	nan	%		%		RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NIlai IKM	98 NIlai	16.241.220.900	39 NIlai		85 NIlai	6.862.261.684	85 NIlai	2.671.187.506	100,00 %	38,93	124 NIlai	2.671.187.506	126,53 %	16,45	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95 %	11.431.220.900	74 %		95 %	4.526.064.610	95 %	1.637.140.806	100,00 %	36,17	169 %	1.637.140.806	177,89 %	14,32	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas keshatan lainnya yang ditingkatkan sarana,prasarana,alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	0 unit	0	0 unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	1.600.000.000	4 Unit		3 Unit	1.425.000.000	3 Unit	1.413.000.000	100,00 %	99,16	7 Unit	1.413.000.000	35,00 %	88,31	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	46 Paket	9.831.220.900	2 Paket		2 Paket	3.101.064.610	2 Paket	3.096.128.229	100,00 %	99,84	4 Paket	3.096.128.229	8,70 %	31,49	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	95 %	4.810.000.000	93 %		95 %	2.336.197.074	95 %	1.034.046.700	100,00 %	44,26	188 %	1.034.046.700	197,89 %	21,50	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	160.000.000	3 Dokumen		4 Dokumen	75.817.074	4 Dokumen	47.176.784	100,00 %	62,22	7 Dokumen	47.176.784	35,00 %	29,49	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	20 Dokumen	4.650.000.000	4 Dokumen		4 Dokumen	2.260.380.000	4 Dokumen	2.260.374.700	100,00 %	100,00	8 Dokumen	2.260.374.700	40,00 %	48,61	Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M.Syukur	
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas	90,9 %	9.645.131.000	9,09 %		72,73 %	1.097.893.000	81,82 %	126.035.373	112,50 %	11,48	45,455 %	126.035.373	50,01 %	1,31	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ODF	0 %	6.895.131.000	69,97 %		74 %	815.049.500	75,39 %		101,88 %		145,36 %		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	6.895.131.000	3 Dokumen		3 Dokumen	815.049.500	3 Dokumen	136.216.060	100,00 %	16,71	6 Dokumen	136.216.060	200,00 %	1,98	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tema Pesan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan	10 Tema	1.500.000.000	0 Tema		10 Tema	213.120.500	10 Tema	126.035.373	100,00 %	59,14	10 Tema	126.035.373	100,00 %	8,40	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1.500.000.000	Dokumen		1 Dokumen	213.120.500	1 Dokumen	192.344.873	100,00 %	90,25	1 Dokumen	192.344.873	100,00 %	12,82	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif	54,55 Persen	1.250.000.000	Persen		27,27 Persen	69.723.000	100 Persen		366,70 %		50 Persen		91,66 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	69.723.000	1 Dokumen	67.683.900	100,00 %	97,08	2 Dokumen	67.683.900	200,00 %	5,41	Dinas Kesehatan	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT AKIP/NILAI AKIP	80 (B)Nilai/ Predikat	1.786.319.169.120	70,75 (B)Nilai/ Predikat		75 (B)Nilai/ Predikat	324.582.758.408	70,75 (B)Nilai/ Predikat	99.758.497.101	94,33 %	30,73	141,5 (B)Nilai/ Predikat	99.758.497.101	176,88 %	5,58	RSUD Rd. Mattaher	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	671.817.641		%		100	%	275.222.000	5	%	139.482.054	5,00	%	50,68	5	%	139.482.054	5,00	%	20,76	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14	dokumen	671.817.641	0	dokumen		2	dokumen	275.222.000	2	dokumen	258.254.715	100,00	%	93,84	2	dokumen	258.254.715	14,29	%	38,44	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																								
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																								
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	901.921.878.793		%		100	%	127.948.969.084	25	%	24.787.918.952	25,00	%	19,37	25	%	24.787.918.952	25,00	%	2,75	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.600	orang/bulan	901.921.878.793		orang/bulan		920	orang/bulan	127.948.969.084	859	orang/bulan	117.434.996.306	93,37	%	91,78	859	orang/bulan	117.434.996.306	18,67	%	13,02	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	%		0	%		1	%			%			%	nan		%			%		RSUD Rd. Mattaher	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	%		0	%		1	%			%			%	nan		%			%		RSUD Rd. Mattaher	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	%		0	%		1	%			%			%	nan		%			%		RSUD Rd. Mattaher	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	176	Unit		0	Unit		37	Unit			Unit			%	nan		Unit			%		RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	20	Laporan	80.849.351.185	0	Laporan		4	Laporan	14.959.424.500	4	Laporan	4.133.909.962	100,00	%	27,63	4	Laporan	4.133.909.962	20,00	%	5,11	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	Laporan	35.962.524.624	0	Laporan		1	Laporan	7.175.412.500	1	Laporan	6.894.565.482	100,00	%	96,09	1	Laporan	6.894.565.482	20,00	%	19,17	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	Laporan	44.886.826.561	0	Laporan		1	Laporan	7.784.012.000	1	Laporan	7.763.205.228	100,00	%	99,73	1	Laporan	7.763.205.228	20,00	%	17,30	RSUD Rd. Mattaher	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	1	Unit		0	Unit		292	Unit			Unit			%	nan		Unit			%		RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raden Mattaher Jambi	87	Nilai	802.876.121.501	80,26	Nilai		85	Nilai	181.399.142.824	86,36	Nilai	70.697.186.133	101,60	%	38,97	166,62	Nilai	70.697.186.133	191,52	%	8,81	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	5	Unit	802.876.121.501	0	Unit		1	Unit	181.399.142.824	1	Unit	171.419.589.794	100,00	%	94,50	1	Unit	171.419.589.794	20,00	%	21,35	RSUD Rd. Mattaher	
	1.02.02.005	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mencapai angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) minimal 90%	0	%			%		81,82	%		45,45	%		55,55	%	nan	22,725	%			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	0	%			%		55	%		64	%		116,36	%		32	%			%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kabupaten/Kota Endemis filariasis yang mencapai eliminasi	0	Jumlah			Jumlah		2	Jumlah		4	Jumlah		200,00	%		4	Jumlah			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	0	%		0	%		88	%		8,8	%		190,00	%		4,4	%			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase imunisasi Dasar Lengkap pada usia 12 - 23 Bulan	96	%		0	%		88	%		72	%		81,82	%		36	%		37,50	%		Dinas Kesehatan	
	01.02.02.001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung	78.586	Jiwa		661.126	Jiwa		77.586	Jiwa		77.195	Jiwa		99,50	%	nan	738.321	Jiwa		939,51	%		Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	oleh pemerintah provinsi Jambi (Jiwa)																
			Persentase Ketersediaan Obat di Instansi Farmasi di Provinsi (40 Item Obat)	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		Dinas Kesehatan	
	01.02.02.003	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SDM Kesehatan mendapat sertifikasi kompetensi (Bapelkes)	71,58 %		86,38 %		61,35 %		88,33 %		143,98 %	nan	87,355 %		122,04 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang terakreditasi	100 %	574.871.429.000	100 %		100 %	68.254.430.645	100 %	19.037.921.363	100,00 %	27,89	100 %	19.037.921.363	100,00 %	3,31	Dinas Kesehatan	
			Persentase rumah sakit yang terakreditasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		Dinas Kesehatan	
			Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1,32 %		1,32 %		1,24 %		1,27 %		102,42 %		1,295 %		98,11 %		Dinas Kesehatan	
			Rasio Puskesmas per Kecamatan	1 Puskesmas		Puskesmas		0,99 Puskesmas		0,99 Puskesmas		100,00 %		0,99 Puskesmas		99,00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Penuh (Labkes)	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	70 %	32.269.894.000	55 %		60 %	2.937.712.333	77,4 %	360.638.199	129,00 %	12,28	132,4 %	360.638.199	189,14 %	1,12	Dinas Kesehatan	
			Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	80 %		50 %		60 %		86 %		143,33 %		136 %		170,00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Standar sarana dan prasarana Instalasi farmasi provinsi yg terpenuhi	100 %		100 %		100 %		86,5 %		86,50 %		186,5 %		186,50 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pemenuhan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alkes) dan SDM Kesehatan Laboratorium Kesehatan (Labkes)	95 %		80 %		85 %		96 %		112,94 %		176 %		185,26 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	12.535.354.000	1 Unit		1 Unit	100.000.000	1 Unit	99.105.000	100,00 %	99,11	2 Unit	99.105.000	200,00 %	0,79	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	5.668.909.000	1 Dokumen		1 Dokumen	168.195.000	1 Dokumen	162.373.631	100,00 %	96,54	2 Dokumen	162.373.631	200,00 %	2,86	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	14.065.631.000	1 Paket		1 Paket	2.669.517.333	1 Paket	1.053.033.892	100,00 %	39,45	2 Paket	1.053.033.892	200,00 %	7,49	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan cakupan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 95%	100 %	538.424.260.000	45,45 %		63,64 %	63.967.773.312	27,27 %	17.867.120.528	42,85 %	27,93	72,72 %	17.867.120.528	72,72 %	3,32	Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota dengan cakupan Kunjungan Neonatal sesuai standar minimal 95%	100 %		45,45 %		63,64 %		36,36 %		57,13 %		81,81 %		81,81 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U)	10 %		13 %		12 %		8,9 %		125,83 %		21,9 %		219,00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70%	10 %		45,45 %		63,64 %		54,54 %		85,70 %		99,99 %		999,90 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	76 %		70 %		72 %		88,34 %		122,69 %		158,34 %		208,34 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota yang mencapai Treatment Coverage TBC minimal 50% (Ditemukan dan Diobati)	72,73 %		36,36 %		54,55 %		72,73 %		133,33 %		109,09 %		149,99 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota yang mencapai terduga TBC minimal 70%	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pengobatan Kasus Malaria sesuai standar	95 %		95 %		95 %		100 %		105,26 %		195 %		205,26 %		Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase ODHA Baru yang memulai ARV	87 %		80 %		82 %		86 %		104,88 %		166 %		190,80 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota yang orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapatkan screening minimal 70%	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria	4 Jumlah		2 Jumlah		3 Jumlah		5 Jumlah		166,67 %		7 Jumlah		175,00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui MTBS	90 %		60 %		70 %		100 %		142,86 %		160 %		177,78 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/kota yang melaksanakan Deteksi dini Hepatitis B dan atau Hepatitis C pada populasi beresiko	100 %		95 %		100 %		100 %		100,00 %		195 %		195,00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/kota yang 80 % Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar	85 %		66 %		73 %		80 %		109,59 %		146 %		171,76 %		Dinas Kesehatan	
			Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	92 %		89 %		70 %		81,13 %		115,90 %		170,13 %		184,92 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kab/Kota yang mempunyai IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	91 %		64 %		72,72 %		45,45 %		62,50 %		109,45 %		120,27 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas rujukan Rabies Center	11 Jumlah		8 Jumlah		9 Jumlah		11 Jumlah		122,22 %		19 Jumlah		172,73 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kab/kota yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	9 Jumlah		6 Jumlah		7 Jumlah		7 Jumlah		100,00 %		13 Jumlah		144,44 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 80%	100 %		75 %		100 %		100 %		100,00 %		175 %		175,00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase usia produktif ≥ 15 - 59 tahun yang beresiko PTM	45 %		35 %		40 %		49,8 %		75,50 %		84,8 %		188,44 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Pandu PTM	70 %		40 %		50 %		99,04 %		198,08 %		139,04 %		198,63 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarkat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS	78.586 Jumlah		66,126 Jumlah		77.586 Jumlah		77.195 Jumlah		99,50 %		77.261,126 Jumlah		98,31 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi	1,26 Jiwa		1,030478 Jiwa		1.250.000 Jiwa		1.052.650 Jiwa		84,21 %		1.052.651,030478 Jiwa		83.543.732,58 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	0 Jumlah		Jumlah		0 Jumlah		Jumlah		%		Jumlah		%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Standar Pelayanan SPM Bidang Kesehatan	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	6,952 Orang	184.352.753.000	1,253 Orang		133.475 Orang	419.274.500	133.475 Orang	210.358.345	100,00 %	50,17	133.476,253 Orang	210.358.345	1.919.969,12 %	0,11	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Pada Kondisi Kejadian luar biasa Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Jumlah	9.157.650.000	0 Jumlah		6.505 Jumlah	338.147.700	6.505 Jumlah	172.680.410	100,00 %	51,07	6.505 Jumlah	172.680.410	2.220,14 %	1,89	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	11.355.486.000	6 Dokumen		3 Dokumen	1.272.104.500	3 Dokumen	1.225.072.000	100,00 %	96,30	9 Dokumen	1.225.072.000	300,00 %	10,79	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	2.250.000.000	3 Dokumen		3 Dokumen	2.359.273.002	3 Dokumen	2.274.213.400	100,00 %	96,39	6 Dokumen	2.274.213.400	200,00 %	101,08	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2.870.500.000	2 Dokumen		2 Dokumen	65.719.500	2 Dokumen	63.500.700	100,00 %	96,62	4 Dokumen	63.500.700	200,00 %	2,21	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	5.798.410.000	6 Dokumen		4 Dokumen	143.904.500	4 Dokumen	30.340.000	100,00 %	21,08	10 Dokumen	30.340.000	250,00 %	0,52	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	3.000.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen	281.250.000	2 Dokumen	257.480.380	100,00 %	91,55	4 Dokumen	257.480.380	200,00 %	8,58	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	7.448.222.000	19 Dokumen		11 Dokumen	1.052.672.765	11 Dokumen	402.526.847	100,00 %	38,24	30 Dokumen	402.526.847	272,73 %	5,40	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	915.765.000	1 Dokumen		1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	34.580.000	100,00 %	96,06	2 Dokumen	34.580.000	200,00 %	3,78	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	1 Dokumen	1.831.530.000	1 Dokumen		1 Dokumen	63.915.500	1 Dokumen	36.373.000	100,00 %	56,91	2 Dokumen	36.373.000	200,00 %	1,99	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapakan rehabilitasi medis	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	299.143.079.000	4 Dokumen		4 Dokumen	55.149.594.440	4 Dokumen	54.697.829.132	100,00 %	99,18	8 Dokumen	54.697.829.132	200,00 %	18,28	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	1.831.530.000	5 Dokumen		5 Dokumen	504.903.000	5 Dokumen	282.840.000	100,00 %	56,02	10 Dokumen	282.840.000	200,00 %	15,44	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pertemuan LP/LS dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.189.335.000	1 Dokumen		1 Dokumen	1.381.917.155	1 Dokumen	578.515.374	100,00 %	41,86	2 Dokumen	578.515.374	200,00 %	11,15	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	7 Dokumen	1.780.000.000	7 Dokumen		7 Dokumen	789.796.750	7 Dokumen	658.840.340	100,00 %	83,42	14 Dokumen	658.840.340	200,00 %	37,01	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11 Jumlah	850.000.000	4 Jumlah		4 Jumlah	78.190.000	4 Jumlah		100,00 %		8 Jumlah		72,73 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	12 Dokumen	650.000.000	30 Dokumen		12 Dokumen	31.110.000	12 Dokumen	28.647.000	100,00 %	92,08	42 Dokumen	28.647.000	350,00 %	4,41	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional yang didistribusikan	0 Spesimen	0	Spesimen		0 Spesimen	0	Spesimen		%		Spesimen		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	90,91 %	1.526.275.000	55 %		72,73 %	133.156.000	100 %	12.000.000	137,49 %	9,01	155 %	12.000.000	170,50 %	0,79	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.526.275.000	Dokumen		1 Dokumen	133.156.000	1 Dokumen	78.217.000	100,00 %	58,74	1 Dokumen	78.217.000	100,00 %	5,12	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan Survey akreditasi	0 Jumlah	2.651.000.000	0 Jumlah		0 Jumlah	1.215.789.000	Jumlah	798.162.636	%	65,65	Jumlah	798.162.636	%	30,11	Dinas Kesehatan	
			Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi (Labkes)	100 %		%		100 %		100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Parameter Laboratorium Kesmas dan Laboratorium Klinik yang terakreditasi	0 Jumlah		0 Jumlah		0 Jumlah		Jumlah		%		Jumlah		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit	610.000.000	0 Unit		11 Unit	131.716.000	11 Unit	51.065.700	100,00 %	38,77	11 Unit	51.065.700	100,00 %	8,37	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	39 Unit	2.041.000.000	Unit		36 Unit	258.200.000	43 Unit	61.420.000	119,44 %	23,79	43 Unit	61.420.000	110,26 %	3,01	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	0 Unit	0	Unit		0 Unit	825.873.000	Unit	738.242.636	%	89,39	Unit	738.242.636	%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)Pelayanan Kesehatan	0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		100,00 %		1 Unit		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.001	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas tanpa Dokter	0 %	33.743.714.000	1 %		1 %	859.972.245	0,96 %	98.125.400	104,00 %	11,41	0,98 %	98.125.400	%	0,29	Dinas Kesehatan	
			Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memliki 7 Dokter Spesialis Lengkap	100 %		%		97 %		55 %		56,70 %		27,5 %		27,50 %		Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar	85 %		56,8 %		61,35 %		88,33 %		143,98 %		72,565 %		85,37 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	50 %	7.183.200.000	43 %		46 %	119.692.500	68,75 %	18.000.000	149,46 %	15,04	111,75 %	18.000.000	223,50 %	0,25	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24,252 Orang	7.183.200.000	20,95 Orang		21.997 Orang	119.692.500	23.485 Orang	91.441.100	93,24 %	76,40	23.505,95 Orang	91.441.100	96.923,76 %	1,27	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdistribusi	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	0 %	26.560.514.000	%		90,7 %	740.279.745	88,33 %	80.125.400	97,39 %	10,82	88,33 %	80.125.400	%	0,30	Dinas Kesehatan	
			persentase SDMK mengikuti pelatihan terakreditasi yang mendapatkan sertifikat	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompotensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompotensi dan Kualifikasi meningkat (Bapelkes)	900 Orang	20.937.500.000	650 Orang		600 Orang	388.282.200	1.590 Orang	226.501.490	265,00 %	58,33	2.240 Orang	226.501.490	248,89 %	1,08	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompotensi dan Kualifikasi meningkat (Bapelkes)	0 Orang		Orang		0 Orang		Orang		%		Orang		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11 Dokumen	5.623.014.000	11 Dokumen		11 Dokumen	351.997.545	11 Dokumen	208.237.300	100,00 %	59,16	22 Dokumen	208.237.300	200,00 %	3,70	Dinas Kesehatan	
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi kefarmasian dan Alkes yang berizin	100 %	1.729.789.000	25 %		100 %	198.839.000	100 %	6.070.000	100,00 %	3,05	62,5 %	6.070.000	62,50 %	0,35	Dinas Kesehatan	
			Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
			Persentase pedagang besar farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang direkomendasikan untuk mendapatkan perizinan	0 Jumlah	1.729.789.000	Jumlah		0 Jumlah	198.839.000	Jumlah	6.070.000	%	3,05	Jumlah	6.070.000	%	0,35	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	44 Sarana	1.729.789.000	40 Sarana		42 Sarana	198.839.000	44 Sarana	177.144.998	104,76 %	89,09	84 Sarana	177.144.998	190,91 %	10,24	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang direkomendasikan untuk mendapatkan perizinan	0 Jumlah		0 Jumlah		0 Jumlah		Jumlah		%	nan	Jumlah		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP / Nilai AKIP	82 %	306.450.016.000	81,91 %		78 %	52.173.771.364	82,6 %	11.326.124.289	105,90 %	21,71	82,255 %	11.326.124.289	100,31 %	3,70	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.569.487.000	100 %		100 %	625.438.200	100 %	53.529.501	100,00 %	8,56	200 %	53.529.501	200,00 %	1,50	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	724.730.000	4 Dokumen		4 Dokumen	415.440.200	1 Dokumen	242.580.351	25,00 %	58,39	5 Dokumen	242.580.351	125,00 %	33,47	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	141.594.000	1 Dokumen		1 Dokumen	16.856.500	1 Dokumen	16.856.500	100,00 %	100,00	2 Dokumen	16.856.500	200,00 %	11,90	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	160.903.000	1 Dokumen		1 Dokumen	21.945.000	1 Dokumen	21.945.000	100,00 %	100,00	2 Dokumen	21.945.000	200,00 %	13,64	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	3 Laporan	965.415.000	3 Laporan		3 Laporan	20.450.000	3 Laporan	15.047.000	100,00 %	73,58	6 Laporan	15.047.000	200,00 %	1,56	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.576.845.000	9 Laporan		9 Laporan	150.746.500	9 Laporan	48.262.000	100,00 %	32,02	18 Laporan	48.262.000	200,00 %	3,06	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100	%	265.023.540.000	100	%		100	%	42.084.874.629	100	%	7.921.755.667	100,00	%	18,82	200	%	7.921.755.667	200,00	%	2,99	Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	260.908.790.000	35	Orang/Bulan		14	Orang/Bulan	41.176.199.429	14	Orang/Bulan	37.029.416.199	100,00	%	89,93	49	Orang/Bulan	37.029.416.199	350,00	%	14,19	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3.125.800.000	30	Dokumen		12	Dokumen	825.547.200	12	Dokumen	626.340.000	100,00	%	75,87	42	Dokumen	626.340.000	350,00	%	20,04	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	988.950.000	3	Laporan		3	Laporan	83.128.000	3	Laporan	82.910.100	100,00	%	99,74	6	Laporan	82.910.100	200,00	%	8,38	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD	100	%	116.250.000	100	%		100	%	68.355.000	100	%		100,00	%		200	%		200,00	%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	116.250.000	2	Laporan		2	Laporan	68.355.000	2	Laporan	48.107.250	100,00	%	70,38	4	Laporan	48.107.250	200,00	%	41,38	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	80	%	1.314.500.000	76	%		77	%	508.488.500	86,62	%	48.000.000	112,49	%	9,44	162,62	%	48.000.000	203,28	%	3,65	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	410.000.000	3	Orang		3	Orang	210.500.000	4	Orang	44.359.570	133,33	%	21,07	7	Orang	44.359.570	233,33	%	10,82	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0		Orang		0	Orang	0		Orang			%			Orang			%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	904.500.000	25	Orang		25	Orang	297.988.500	49	Orang	205.921.400	196,00	%	69,10	74	Orang	205.921.400	296,00	%	22,77	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	95	%	5.198.245.000	92	%		93	%	934.775.939	93	%	349.957.811	100,00	%	37,44	185	%	349.957.811	194,74	%	6,73	Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketersediaan administrasi perangkat daerah	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketersediaan administrasi perangkat daerah	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	124.384.000	1	Paket		1	Paket	42.244.631	1	Paket	40.939.095	100,00	%	96,91	2	Paket	40.939.095	200,00	%	32,91	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0002 Bapelkes	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	77.226.000	1	Paket		1	Paket	47.367.972	1	Paket	46.599.764	100,00	%	98,38	2	Paket	46.599.764	200,00	%	60,34	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0002 Labkes	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0		Paket		1	Paket	0	1	Paket		100,00	%		1	Paket			%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	414.614.000	1	Paket		1	Paket	83.482.000	1	Paket	53.473.700	100,00	%	64,05	2	Paket	53.473.700	200,00	%	12,90	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Labkes)	1	Paket		0	Paket		1	Paket		1	Paket		100,00	%		1	Paket		100,00	%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	15	Paket	124.384.000	15	Paket		15	Paket	88.966.336	14	Paket	81.052.624	93,33	%	91,10	29	Paket	81.052.624	193,33	%	65,16	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	10	Dokumen	414.614.000	10	Dokumen		10	Dokumen	9.535.000	13	Dokumen	5.592.250	130,00	%	58,65	23	Dokumen	5.592.250	230,00	%	1,35	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4.043.023.000	30	Laporan		12	Laporan	663.180.000	12	Laporan	658.732.679	100,00	%	99,33	42	Laporan	658.732.679	350,00	%	16,29	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa	98	%	7.481.075.000	95	%		95	%	1.494.553.882	77,77	%	520.000.000	81,86	%	34,79	172,77	%	520.000.000	176,30	%	6,95	Dinas Kesehatan	
			Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Dinas Kesehatan	
			Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	4.294.850.000	5 Paket		5 Paket	597.703.200	5 Paket	520.000.000	100,00 %	87,00	10 Paket	520.000.000	200,00 %	12,11	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Labkes)	5 Unit	1.915.665.000	5 Unit		5 Unit	41.713.504	1 Unit	40.900.000	20,00 %	98,05	6 Unit	40.900.000	120,00 %	2,14	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		Unit		%		Unit		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.270.560.000	1 Unit		11 Unit	855.137.178	95 Unit	760.000.000	863,64 %	88,87	96 Unit	760.000.000	9.600,00 %	59,82	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perlengkapan Kantor	80 %	4.929.842.000	77 %		77 %	1.791.678.730	77 %	733.527.539	100,00 %	40,94	154 %	733.527.539	192,50 %	14,88	Dinas Kesehatan	
			Persentase Perlengkapan Kantor	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Perlengkapan Kantor (Labkes)	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	94.099.000	30 Laporan		12 Laporan	7.700.000	12 Laporan	5.600.000	100,00 %	72,73	42 Laporan	5.600.000	350,00 %	5,95	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes)	12 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00 %		12 Laporan		100,00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.414.458.000	30 Laporan		12 Laporan	1.327.976.000	12 Laporan	1.195.374.436	100,00 %	90,01	42 Laporan	1.195.374.436	350,00 %	35,01	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(labkes)	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00 %		12 Laporan		%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Bapelkes)	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00 %		12 Laporan		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jumlah	258.061.000	30 Jumlah		12 Jumlah	97.191.620	12 Jumlah	60.759.023	100,00 %	62,51	42 Jumlah	60.759.023	350,00 %	23,54	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.163.224.000	30 Laporan		12 Laporan	358.811.110	12 Laporan	352.705.057	100,00 %	98,30	42 Laporan	352.705.057	350,00 %	30,32	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Labkes)	12 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00 %		12 Laporan		100,00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bapelkes)	12 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00 %		12 Laporan		100,00 %		Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	100 %	9.047.077.000	100 %		100 %	2.704.388.160	90 %	978.627.115	90,00 %	36,19	190 %	978.627.115	190,00 %	10,82	Dinas Kesehatan	
			Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
			Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	4.125.701.000	15 Unit		15 Unit	663.960.000	13 Unit	397.587.388	86,67 %	59,88	28 Unit	397.587.388	186,67 %	9,64	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Bapelkes)	3 Unit		0 Unit		3 Unit		3 Unit		100,00 %		3 Unit		100,00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Labkes)	2 Unit		0 Unit		2 Unit		3 Unit		150,00 %		3 Unit		150,00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Labkes)	10 Unit	624.857.000	18 Unit		10 Unit	50.000.000	10 Unit	49.958.709	100,00 %	99,92	28 Unit	49.958.709	280,00 %	8,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.418.215.000	1 Unit		1 Unit	72.739.200	1 Unit	72.000.000	100,00 %	98,98	2 Unit	72.000.000	200,00 %	5,08	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 Unit	2.607.913.000	0 Unit		3 Unit	1.764.228.960	4 Unit	1.248.578.881	133,33 %	70,77	4 Unit	1.248.578.881	133,33 %	47,88	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bangunan Lainnya	Direhabilitasi																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Bapelkes)	1 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		100,00 %		1 Unit		100,00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Jumlah	270.391.000	7 Jumlah		7 Jumlah	153.460.000	7 Jumlah	125.508.600	100,00 %	81,79	14 Jumlah	125.508.600	200,00 %	46,42	Dinas Kesehatan	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan	100 %	9.770.000.000	100 %		100 %	1.961.218.324	100 %	720.726.656	100,00 %	36,75	200 %	720.726.656	200,00 %	7,38	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Labkes)	7 Unit Kerja	9.770.000.000	7 Unit Kerja		7 Unit Kerja	1.961.218.324	7 Unit Kerja	1.747.892.125	100,00 %	89,12	14 Unit Kerja	1.747.892.125	200,00 %	17,89	Dinas Kesehatan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	85,25 Persentase	3.113.277.054.000	81,21 Persentase		82,243 Persentase	486.562.734.945	74,7 Persentase	140.267.835.079	90,83 %	28,83	155,91 Persentase	140.267.835.079	182,89 %	4,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Wilayah I	85,25 Persentase	3.113.277.054.000	81,21 Persentase		85,325 Persentase	486.562.734.945	74,7 Persentase	140.267.835.079	87,55 %	28,83	155,91 Persentase	140.267.835.079	182,89 %	4,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Wilayah II	85,25 Persentase		81,21 Persentase		85,325 Persentase		74,7 Persentase		87,55 %		155,91 Persentase		182,89 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Wilayah III	85,25 Persentase		81,21 Persentase		85,325 Persentase		74,7 Persentase		87,55 %		155,91 Persentase		182,89 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi	74 Km	371.340.000.000	11 Km		11 Km	5.684.171.122	9 Km	5.039.076.363	81,82 %	88,65	20 Km	5.039.076.363	27,03 %	1,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang diPeliharaan Secara Rutin	146 Jembatan	16.850.000.000	26 Jembatan		130 Jembatan	982.422.000	130 Jembatan	295.136.048	100,00 %	30,04	156 Jembatan	295.136.048	106,85 %	1,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	0	KM		0 KM	0	KM		%		KM		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	123 Km	990.789.000.000	32,2 Km		21 Km	404.142.114.063	22,75 Km	379.007.280.388	108,33 %	93,78	54,95 Km	379.007.280.388	44,67 %	38,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1.063 Jembatan	453.250.000.000	355 Jembatan		268 Jembatan	3.448.900.000	Jembatan	11.587.125.918	%	335,97	355 Jembatan	11.587.125.918	33,40 %	2,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3.618 KM	287.500.000.000	112 KM		756 KM	20.014.300.000	756 KM	18.771.993.372	100,00 %	93,79	868 KM	18.771.993.372	23,99 %	6,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	104 KM	401.900.000.000	5,2 KM		8,5 KM	22.597.120.760	8,6 KM	34.125.117.972	101,18 %	151,02	13,8 KM	34.125.117.972	13,27 %	8,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	90 KM	575.000.000.000	13,1 KM		1 KM	24.306.707.000	1 KM	12.117.256.072	100,00 %	49,85	14,1 KM	12.117.256.072	15,67 %	2,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0	KM		0 KM	0	KM		%		KM		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Dokumen Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	10 Km	7.948.054.000	3 Km		4 Km	4.987.000.000	4 Km	4.385.470.012	100,00 %	87,94	7 Km	4.385.470.012	70,00 %	55,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Rakyat	
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	11 Dokumen	8.700.000.000	Dokumen		1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	396.991.000	100,00 %	99,25	1 Dokumen	396.991.000	9,09 %	4,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengurangan Kawasan Banjir dan Penanganan Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi	0 Persen	476.256.883.677	31,88 Persen		1,88 Persen	31.633.444.000	7,3 Persen	11.888.790.871	388,30 %	37,58	19,59 Persen	11.888.790.871	%	2,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.	0 Persen		78,02 Persen		64,51 Persen		16,75 Persen		25,96 %		47,385 Persen		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	87,52 Persentase	322.700.262.456	37,88 Persentase		63,45 Persentase	10.231.356.616	18,81 Persentase	1.971.162.238	29,65 %	19,27	56,69 Persentase	1.971.162.238	64,77 %	0,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Lembaga	20.257.770.329	3 Lembaga		5 Lembaga	1.084.861.000	5 Lembaga	543.935.668	100,00 %	50,14	8 Lembaga	543.935.668	36,36 %	2,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	23 KM	71.272.853.904	8,1 KM		5 KM	1.229.190.600	2 KM	111.180.100	40,00 %	9,04	10,1 KM	111.180.100	43,91 %	0,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	20 Dokumen	4.000.000.000	0 Dokumen		5 Dokumen	199.576.200	5 Dokumen	68.457.000	100,00 %	34,30	5 Dokumen	68.457.000	25,00 %	1,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	20 Dokumen	8.651.746.717	2 Dokumen		5 Dokumen	1.084.860.772	5 Dokumen	441.722.800	100,00 %	40,72	7 Dokumen	441.722.800	35,00 %	5,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	14 unit	6.191.626.708	3 unit		3 unit	199.734.172	3 unit	191.951.900	100,00 %	96,10	6 unit	191.951.900	42,86 %	3,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	18 KM	13.856.300.677	3 KM		1,5 KM	366.221.000	1,5 KM	929.285.400	100,00 %	253,75	4,5 KM	929.285.400	25,00 %	6,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Persentase	0	Persentase		0 Persentase	0	Persentase		%		Persentase		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	182.743.685.903	0,46 KM		0,25 KM	2.209.536.800	KM	101.302.000	%	4,58	0,46 KM	101.302.000	46,00 %	0,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	36 Dokumen	15.726.278.218	0 Dokumen		5 Dokumen	3.857.376.072	5 Dokumen	1.874.986.277	100,00 %	48,61	5 Dokumen	1.874.986.277	13,89 %	11,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	98 Persentase	153.556.621.221	86,01 Persentase		80,78 Persentase	21.402.087.384	80,78 Persentase	9.917.628.633	100,00 %	46,34	166,79 Persentase	9.917.628.633	170,19 %	6,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	6 KM	60.000.000.000	0 KM		2 KM	3.957.227.267	2 KM	2.818.987.073	100,00 %	71,24	2 KM	2.818.987.073	33,33 %	4,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	118 KM	24.076.546.026	6 KM		9 KM	12.604.370.233	9 KM	12.221.743.729	100,00 %	96,96	15 KM	12.221.743.729	12,71 %	50,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	359 KM	21.586.532.942	80 KM		80 KM	1.767.860.912	24 KM	1.741.765.500	30,00 %	98,52	104 KM	1.741.765.500	28,97 %	8,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.694 KM	25.619.910.630	534 KM		53 KM	2.092.734.972	53 KM	2.077.561.800	100,00 %	99,27	587 KM	2.077.561.800	21,79 %	8,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Rakyat	
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	103 Dokumen	22.273.631.623	15 Dokumen		20 Dokumen	979.894.000	20 Dokumen	859.659.400	100,00 %	87,73	35 Dokumen	859.659.400	33,98 %	3,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	16,79 Persentase	1.050.000.000	11,4 Persentase		100 Persentase	684.625.915	100 Persentase	78.935.049	100,00 %	11,53	111,4 Persentase	78.935.049	663,49 %	7,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	100 Persentase	1.050.000.000	24,9925 Persentase		100 Persentase	684.625.915	25 Persentase	78.935.049	25,00 %	11,53	49,9925 Persentase	78.935.049	49,99 %	7,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.01.0001	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	12 Dokumen	1.050.000.000	10 Dokumen		3 Dokumen	684.625.915	3 Dokumen	673.138.620	100,00 %	98,32	13 Dokumen	673.138.620	108,33 %	64,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	0 Orang		Orang		0 Orang		Orang		%	nan	Orang		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	0 Unit	0	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																	
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	16,79 Unit	55.000.000.000	0 Unit		550 Unit	13.239.240.196	550 Unit	644.664.848	100,00 %	4,87	550 Unit	644.664.848	3.275,76 %	1,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2.750 Unit Rumah	55.000.000.000	1.109 Unit Rumah		550 Unit Rumah	13.239.240.196	550 Unit Rumah	644.664.848	100,00 %	4,87	1.659 Unit Rumah	644.664.848	60,33 %	1,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2.750 Unit rumah	55.000.000.000	0 Unit rumah		550 Unit rumah	13.239.240.196	550 Unit rumah	13.020.579.856	100,00 %	98,35	550 Unit rumah	13.020.579.856	20,00 %	23,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	0 Hektar	0	Hektar		0 Hektar	0	Hektar		%		Hektar		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	30 Persen	92.163.924.000	27,6475 Persen		100 Persen	9.443.062.950	23,355 Persen	2.099.631.912	23,36 %	22,23	25,50125 Persen	2.099.631.912	85,00 %	2,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Bagi Masyarakat	30 Persen	92.163.924.000	27,6475 Persen		100 Persen	9.443.062.950	23,355 Persen	2.099.631.912	23,36 %	22,23	25,50125 Persen	2.099.631.912	85,00 %	2,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		(Tidak dianggarkan)																								
	1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Tidak Dianggarkan)	Tidak Ada indikator	0	Tidak Ada	0	0	Tidak Ada		0	Tidak Ada	0	Tidak Ada			%			Tidak Ada			%			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	10	Dokumen	6.826.924.000	2	Dokumen		2	Dokumen	820.000.000	2	Dokumen	903.545.048	100,00	%	110,19	4	Dokumen	903.545.048	40,00	%	13,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	355	Lokasi	85.337.000.000	220	Lokasi		52	Lokasi	8.623.062.950	52	Lokasi	7.154.614.147	100,00	%	82,97	272	Lokasi	7.154.614.147	76,62	%	8,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Fasilitas Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis	0	unit		unit			0	unit		unit				%	nan	unit				%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya fasilitas Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis	0	Unit		Unit			0	Unit		Unit				%	nan	Unit				%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0	Unit	0	Unit			0	Unit	0	Unit				%		Unit				%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Yang Layak Fungsi	7	Unit	639.159.250.000	0	Unit		2	Unit	260.702.306.439	2	Unit	70.624.750.363	100,00	%	27,09	2	Unit	70.624.750.363	28,57	%	11,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	37,5	Persentase	639.159.250.000	37,5	Persentase		37,5	Persentase	260.702.306.439	37,5	Persentase	70.624.750.363	100,00	%	27,09	75	Persentase	70.624.750.363	200,00	%	11,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	51	Dokumen	639.159.250.000	10	Dokumen		10	Dokumen	260.702.306.439	20	Dokumen	233.280.176.456	200,00	%	89,48	30	Dokumen	233.280.176.456	58,82	%	36,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0	Kawasan		Kawasan			0	Kawasan		Kawasan				%	nan	Kawasan				%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0	Kawasan		Kawasan			0	Kawasan		Kawasan				%	nan	Kawasan				%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0	Kawasan	0	Kawasan			0	Kawasan	0	Kawasan				%		Kawasan				%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	87	Persen	5.000.000.000	41,96	Persen		83,92	Persen	2.890.884.200	83,92	Persen	1.043.484.850	100,00	%	36,10	62,94	Persen	1.043.484.850	72,34	%	20,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persrentase tumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	87	persentase	5.000.000.000	79,08	persentase		83,92	persentase	2.890.884.200	83,92	persentase	1.043.484.850	100,00	%	36,10	163	persentase	1.043.484.850	187,36	%	20,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0	Persentase	0		Persentase		85	Persentase	1.449.653.000	85	Persentase	219.260.550	100,00	%	15,13	85	Persentase	219.260.550		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	5	Dok	5.000.000.000	1	Dok		1	Dok	1.441.231.200	1	Dok	1.335.090.700	100,00	%	92,64	2	Dok	1.335.090.700	40,00	%	26,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0 Persent	0	Persent		0 Persent	0	Persent		%		Persent		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	100 Persen		47,5 Persen		95 Persen	2.525.213.000	95 Persen	390.324.190	100,00 %	15,46	71,25 Persen	390.324.190	71,25 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	1 Dok/Lap		1 Dok/Lap		1 Dok/Lap	2.525.213.000	1 Dok/Lap	390.324.190	100,00 %	15,46	2 Dok/Lap	390.324.190	200,00 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun	0 Unit	0	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	20 Kab/Kota	0	9 Kab/Kota		7 Kab/Kota	2.525.213.000	14 Kab/Kota	2.501.268.000	200,00 %	99,05	23 Kab/Kota	2.501.268.000	115,00 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	80 Persentase	40.500.000.000	30 Persentase		60 Persentase	691.119.200	60 Persentase	149.076.217	100,00 %	21,57	90 Persentase	149.076.217	112,50 %	0,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	80 Persentase	40.500.000.000	120 Persentase		60 Persentase	691.119.200	170 Persentase	149.076.217	283,33 %	21,57	290 Persentase	149.076.217	362,50 %	0,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses sanitasi yang Layak	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	Persen		%		Persen		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	49 Dokumen	40.500.000.000	12 Dokumen		12 Dokumen	691.119.200	24 Dokumen	667.917.200	200,00 %	96,64	36 Dokumen	667.917.200	73,47 %	1,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Banjir yang Tertangani (Drainase)	36,51 Persentase	111.350.000.000	35 Persentase		36,5 Persentase	2.250.302.800	36,5 Persentase	93.808.379	100,00 %	4,17	71,5 Persentase	93.808.379	195,84 %	0,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.6.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	36,51 Persentase	111.350.000.000	Persentase		36,51 Persentase	2.250.302.800	36,51 Persentase	93.808.379	100,00 %	4,17	36,51 Persentase	93.808.379	100,00 %	0,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Persent	0	Persent		0 Persent	0	Persent		%		Persent		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																	
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	43 Dokumen	41.350.000.000	11 Dokumen		10 Dokumen	505.302.800	20 Dokumen	294.453.600	200,00 %	58,27	31 Dokumen	294.453.600	72,09 %	0,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten	160 Orang	30.250.000.000	0 Orang		120 Orang	3.612.823.577	65 Orang	163.541.649	54,17 %	4,53	65 Orang	163.541.649	40,63 %	0,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang di sertifikasi	120 Orang	16.500.000.000	0 Orang		120 Orang	2.762.956.520	65 Orang	111.550.000	54,17 %	4,04	65 Orang	111.550.000	54,17 %	0,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/ Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0 orang	0	0 orang		0 orang	0	orang		%		orang		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	600 orang	10.460.000.000	40 orang		120 orang	2.264.956.520	80 orang	1.238.503.105	66,67 %	54,68	120 orang	1.238.503.105	20,00 %	11,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	375 Lembaga	6.040.000.000	40 Lembaga		75 Lembaga	498.000.000	75 Lembaga	496.260.330	100,00 %	99,65	115 Lembaga	496.260.330	30,67 %	8,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	0 Lembaga	0	Lembaga		0 Lembaga	0	Lembaga		%		Lembaga		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	5 Dok/Lap	9.800.000.000	0 Dok/Lap		5 Dok/Lap	621.738.737	5 Dok/Lap	38.491.649	100,00 %	6,19	5 Dok/Lap	38.491.649	100,00 %	0,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi jasa Konstruksi	13 Dokumen	2.050.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	142.807.441	1 Dokumen	140.456.000	100,00 %	98,35	2 Dokumen	140.456.000	15,38 %	6,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	5 Dokumen	2.500.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	144.305.000	1 Dokumen	142.349.800	100,00 %	98,65	2 Dokumen	142.349.800	40,00 %	5,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	295 orang	5.250.000.000	60 orang		60 orang	334.626.296	60 orang	296.382.297	100,00 %	88,57	120 orang	296.382.297	40,68 %	5,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.03	Kebijakan khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi																	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaran, dam tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada Lintas Kab/Kota	13 Dokumen	3.950.000.000	2 Dokumen		3 Dokumen	228.128.320	1 Dokumen	178.246.143	33,33 %	78,13	3 Dokumen	178.246.143	23,08 %	4,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	0 persen	0	persen		0 persen	0	persen		%		persen		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	0 3 Dokumen	0	3 Dokumen		3 3 Dokumen	0	3 Dokumen		%		3 Dokumen		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Predikat AKIP Perangkat Daerah	85 Predikat	14.550.000.000	72 Predikat		70 Predikat	2.651.423.300	72 Predikat	682.315.181	102,86 %	25,73	144 Predikat	682.315.181	169,41 %	4,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Penataan Ruang	10 Persentase	3.750.000.000	10,8 Persentase		10 Persentase	493.620.600	10 Persentase	161.985.804	100,00 %	32,82	20,8 Persentase	161.985.804	208,00 %	4,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Pergub selain RTRW Provinsi	5 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	169.709.800	1 Dokumen	166.416.000	100,00 %	98,06	2 Dokumen	166.416.000	40,00 %	13,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	10 Dokumen	2.500.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen	323.910.800	2 Dokumen	312.883.648	100,00 %	96,60	4 Dokumen	312.883.648	40,00 %	12,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10 Persentase	3.000.000.000	10,8 Persentase		10 Persentase	477.630.100	10 Persentase	111.929.658	100,00 %	23,43	20,8 Persentase	111.929.658	208,00 %	3,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	5 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	214.000.000	1 Dokumen	212.372.398	100,00 %	99,24	2 Dokumen	212.372.398	40,00 %	14,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	263.630.100	1 Dokumen	208.178.975	100,00 %	78,97	2 Dokumen	208.178.975	40,00 %	13,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 Persentase	2.550.000.000	10,9 Persentase		10 Persentase	999.445.300	10 Persentase	189.985.804	100,00 %	19,01	20,9 Persentase	189.985.804	209,00 %	7,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	1.300.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	713.445.400	1 Dokumen	485.150.300	100,00 %	68,00	2 Dokumen	485.150.300	40,00 %	37,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	285.999.900	1 Dokumen	285.782.548	100,00 %	99,92	2 Dokumen	285.782.548	40,00 %	22,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10 Persentase	5.250.000.000	9,6 Persentase		10 Persentase	680.727.300	10 Persentase	218.413.915	100,00 %	32,09	19,6 Persentase	218.413.915	196,00 %	4,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 kasus	1.500.000.000	1 kasus		1 kasus	89.467.500	1 kasus	62.102.040	100,00 %	69,41	2 kasus	62.102.040	40,00 %	4,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	213.999.900	1 Dokumen	213.796.648	100,00 %	99,91	2 Dokumen	213.796.648	40,00 %	17,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	213.630.000	1 Dokumen	213.282.608	100,00 %	99,84	2 Dokumen	213.282.608	40,00 %	17,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/ atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	163.629.900	1 Dokumen	162.666.479	100,00 %	99,41	2 Dokumen	162.666.479	40,00 %	13,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	85 Persentase	277.616.527.564	72 Persentase	225.219.000	70 Persentase	45.895.164.523	72 Persentase	29.267.893.735	102,86 %	63,77	144 Persentase	29.493.112.735	169,41 %	10,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.067.037.000	3 Dokumen		3 Dokumen	2.374.235.033	1 Dokumen	607.454.971	33,33 %	25,59	4 Dokumen	607.454.971	133,33 %	3,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.129.640.000	3 Dokumen		3 Dokumen	773.431.143	3 Dokumen	599.697.546	100,00 %	77,54	6 Dokumen	599.697.546	200,00 %	14,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	822.990.000	9 Dokumen		9 Dokumen	175.688.100	9 Dokumen	144.669.200	100,00 %	82,34	18 Dokumen	144.669.200	200,00 %	17,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	949.832.000	9 Dokumen		9 Dokumen	176.085.050	9 Dokumen	113.308.581	100,00 %	64,35	18 Dokumen	113.308.581	200,00 %	11,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	1.954.074.000	9 Dokumen		9 Dokumen	152.067.500	9 Dokumen	119.970.535	100,00 %	78,89	18 Dokumen	119.970.535	200,00 %	6,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	1.028.653.000	9 Dokumen		9 Dokumen	150.070.300	9 Dokumen	106.475.495	100,00 %	70,95	18 Dokumen	106.475.495	200,00 %	10,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 Laporan	1.829.907.000	2 Laporan		2 Laporan	628.591.840	2 Laporan	521.105.878	100,00 %	82,90	4 Laporan	521.105.878	133,33 %	28,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.351.941.000	2 Laporan		2 Laporan	318.301.100	2 Laporan	287.553.781	100,00 %	90,34	4 Laporan	287.553.781	133,33 %	5,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	204.354.895.000	12 Laporan		12 Laporan	34.495.942.047	12 Laporan	13.326.058.142	100,00 %	38,63	24 Laporan	13.326.058.142	200,00 %	6,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.400 Orang/bulan	193.069.653.000	270 Orang/bulan		280 Orang/bulan	33.250.020.047	280 Orang/bulan	30.485.567.164	100,00 %	91,69	550 Orang/bulan	30.485.567.164	39,29 %	15,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	9.799.447.000	1 Dokumen		1 Dokumen	959.092.000	1 Dokumen	899.812.622	100,00 %	93,82	2 Dokumen	899.812.622	40,00 %	9,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1.485.795.000	1 Dokumen		1 Dokumen	286.830.000	1 Dokumen	271.339.954	100,00 %	94,60	2 Dokumen	271.339.954	40,00 %	18,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	3.347.325.000	1 Tahun	225.219.000	1 Tahun	1.249.669.108	1 Tahun	12.335.941.031	100,00 %	987,14	2 Tahun	12.561.160.031	200,00 %	375,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	1.410.278.000	2 Dokumen	225.219.000	2 Dokumen	993.151.108	1,5 Dokumen	12.923.011.063	75,00 %	1.301,21	3,5 Dokumen	13.148.230.063	35,00 %	932,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	1.937.047.000	3 Laporan		3 Laporan	256.518.000	2 Laporan	256.465.938	66,67 %	99,98	5 Laporan	256.465.938	33,33 %	13,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbinanya aparatur/ pegawai yang berkualitas/berkompetensi	40 Orang	6.073.645.000	30 Orang		30 Orang	654.157.402	30 Orang	128.777.821	100,00 %	19,69	60 Orang	128.777.821	150,00 %	2,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	997.260.000	1 Paket		1 Paket	199.500.000	1 Paket	198.787.500	100,00 %	99,64	2 Paket	198.787.500	40,00 %	19,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145 Orang	5.076.385.000	25 Orang		30 Orang	454.657.402	30 Orang	412.104.542	100,00 %	90,64	55 Orang	412.104.542	37,93 %	8,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Laporan	14.964.530.000	12 Laporan		12 Laporan	1.214.444.125	12 Laporan	297.745.250	100,00 %	24,52	24 Laporan	297.745.250	160,00 %	1,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.138.491.000	4 Paket		4 Paket	124.252.728	4 Paket	124.205.300	100,00 %	99,96	8 Paket	124.205.300	40,00 %	10,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	610.285.000	1 Paket		1 Paket	54.000.000	1 Paket	67.652.270	100,00 %	125,28	2 Paket	67.652.270	40,00 %	11,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	5.939.271.000	3 Dokumen		3 Dokumen	300.858.000	3 Dokumen	299.968.577	100,00 %	99,70	6 Dokumen	299.968.577	40,00 %	5,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	994.355.000	0 Laporan		5 Laporan	191.416.997	5 Laporan	166.405.000	100,00 %	86,93	5 Laporan	166.405.000	%	16,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	3.599.548.000	1 Laporan		1 Laporan	403.961.000	1 Laporan	403.848.765	100,00 %	99,97	2 Laporan	403.848.765	40,00 %	11,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	2.682.580.000	1 Dokumen		1 Dokumen	139.955.400	0,75 Dokumen	107.131.860	75,00 %	76,55	1,75 Dokumen	107.131.860	35,00 %	3,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	40 Unit	831.132.000	25 Unit		30 Unit	102.053.645	30 Unit	9.000.000	100,00 %	8,82	55 Unit	9.000.000	137,50 %	1,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	154 Unit	831.132.000	28 Unit		32 Unit	102.053.645	32 Unit	101.641.155	100,00 %	99,60	60 Unit	101.641.155	38,96 %	12,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	20.530.159.000	1 Tahun		1 Tahun	4.235.570.151	1 Tahun	1.993.235.220	100,00 %	47,06	2 Tahun	1.993.235.220	200,00 %	9,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	118.220.000	1 Laporan		1 Laporan	17.640.000	1 Laporan	17.640.000	100,00 %	100,00	2 Laporan	17.640.000	40,00 %	14,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5.676.777.000	1 Laporan		1 Laporan	1.216.438.635	1 Laporan	1.325.933.437	100,00 %	109,00	2 Laporan	1.325.933.437	40,00 %	23,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Laporan	1.035.605.000	1 Laporan		1 Laporan	172.869.516	1 Laporan	137.556.424	100,00 %	79,57	2 Laporan	137.556.424	40,00 %	13,28	Dinas Pekerjaan Umum dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perlengkapan Kantor	yang Disediakan															Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	10 Laporan	13.699.557.000	2 Laporan		2 Laporan	2.828.622.000	2 Laporan	2.828.577.310	100,00 %	100,00	4 Laporan	2.828.577.310	40,00 %	20,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	7 Unit	11.447.804.564	7 Unit		7 Unit	1.569.093.012	7 Unit	569.681.300	100,00 %	36,31	14 Unit	569.681.300	200,00 %	4,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	450 unit	6.928.044.000	90 unit		90 unit	1.267.993.000	90 unit	812.309.000	100,00 %	64,06	180 unit	812.309.000	40,00 %	11,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	586.847.564	90 Unit		90 Unit	111.100.000	90 Unit	111.077.100	100,00 %	99,98	180 Unit	111.077.100	40,00 %	18,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	3.932.913.000	5 Unit		5 Unit	190.000.012	5 Unit	189.989.000	100,00 %	99,99	10 Unit	189.989.000	40,00 %	4,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100 %	35.386.415.400	100 %		100 %	3.975.598.000	25 %	1.406.106.500	25,00 %	35,37	62,5 %	1.406.106.500	62,50 %	3,97	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Penegakan Perda dan Perkada	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
			Cakupan Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	0 Indeks		Indeks		0 Indeks		Indeks		%		Indeks		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	100 %	32.940.065.400	100 %		100 %	3.875.589.000	100 %	1.406.106.500	100,00 %	36,28	200 %	1.406.106.500	200,00 %	4,27	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 orang	500.000.000	0 orang		40 orang	70.000.000	orang	67.811.463	%	96,87	orang	67.811.463	%	13,56	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	251 laporan	30.373.019.200	0 laporan		75 laporan	3.743.169.000	551 laporan	3.728.279.000	734,67 %	99,60	551 laporan	3.728.279.000	219,52 %	12,27	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	251 laporan	2.067.046.200	0 laporan		53 laporan	62.420.000	53 laporan	55.295.000	100,00 %	88,59	53 laporan	55.295.000	21,12 %	2,68	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase pelanggar Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	2.146.350.000	0 %		100 %	50.824.000	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 laporan	755.000.000	0 laporan		24 laporan	7.760.000	laporan		%		laporan		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 laporan	966.350.000	0 laporan		36 laporan	34.150.000	36 laporan	26.115.000	100,00 %	76,47	36 laporan	26.115.000	900,00 %	2,70	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	15 unit	200.000.000	0 unit		1 unit	4.414.000	1 unit	3.366.000	100,00 %	76,26	1 unit	3.366.000	6,67 %	1,68	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																	
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 laporan	225.000.000	0 laporan		12 laporan	4.500.000	22 laporan		183,33 %		22 laporan		733,33 %		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan kapasitas dan karier PPNS	5 laporan	300.000.000	0 laporan		1 laporan	49.185.000	1 laporan		100,00 %		1 laporan		20,00 %		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 dokumen	150.000.000	0 dokumen		24 dokumen	29.150.000	24 dokumen	27.874.700	100,00 %	95,63	24 dokumen	27.874.700	800,00 %	18,58	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	3 laporan	150.000.000	0 laporan		1 laporan	20.035.000	1 laporan	19.895.000	100,00 %	99,30	1 laporan	19.895.000	33,33 %	13,26	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kesiapsiagaan pencegahan dan penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran	0 %	1.670.600.000	0 %		100 %	60.170.000	25 %	25.621.200	25,00 %	42,58	12,5 %	25.621.200	%	1,53	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	100 %	1.670.600.000	0 %		100 %	60.170.000	100 %	25.621.200	100,00 %	42,58	100 %	25.621.200	100,00 %	1,53	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 dokumen	800.000.000	0 dokumen		1 dokumen	27.060.000	1 dokumen	25.414.300	100,00 %	93,92	1 dokumen	25.414.300	20,00 %	3,18	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah dokumen yang memuat data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	5 dokumen	870.600.000	0 dokumen		1 dokumen	33.110.000	1 dokumen	31.400.400	100,00 %	94,84	1 dokumen	31.400.400	20,00 %	3,61	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	198.648.637.837	19,8975 Indeks		0 Indeks	22.970.495.981	Indeks	6.022.751.115	%	26,22	19,8975 Indeks	6.022.751.115	%	3,03	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	0 %	412.922.950	%		0 %	43.548.582	%	14.844.000	%	34,09	%	14.844.000	%	3,59	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
			Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD hasil pelaksananaan koordinasi perencanaan	9 dokumen	412.922.950	0 dokumen		2 dokumen	43.548.582	2 dokumen	37.679.800	100,00 %	86,52	2 dokumen	37.679.800	22,22 %	9,13	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	187.307.724.029	0 %		100 %	21.940.724.693	25,2325 %	5.410.131.162	25,23 %	24,66	25,2325 %	5.410.131.162	25,23 %	2,89	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14.868 orang	186.000.583.449	0 orang		2.478 orang	21.895.724.693	2.137 orang	21.830.368.687	86,24 %	99,70	2.137 orang	21.830.368.687	14,37 %	11,74	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60 dokumen	1.307.140.580	0 dokumen		12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	44.998.000	100,00 %	100,00	12 dokumen	44.998.000	20,00 %	3,44	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %		0 %		100 %		%		%	nan	%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	0	0 Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi																	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	4.889.159.547	0 %		100 %	500.860.000	25 %	341.763.100	25,00 %	68,24	25 %	341.763.100	25,00 %	6,99	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	20 paket	191.815.525	0 paket		1 paket	3.000.000	1,25 paket	3.000.000	125,00 %	100,00	1,25 paket	3.000.000	6,25 %	1,56	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	6 paket	400.299.469	0 paket		1 paket	10.000.000	1 paket	9.999.732	100,00 %	100,00	1 paket	9.999.732	16,67 %	2,50	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan	6 paket	365.876.800	0 paket		1 paket	60.000.000	1 paket	58.450.000	100,00 %	97,42	1 paket	58.450.000	16,67 %	15,98	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	6 paket	368.490.860	0 paket		1 paket	20.000.000	1 paket	18.850.000	100,00 %	94,25	1 paket	18.850.000	16,67 %	5,12	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	3.562.676.893	0 laporan		1 laporan	407.860.000	1 laporan	387.860.000	100,00 %	95,10	1 laporan	387.860.000	16,67 %	10,89	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		0 %		100 %		%		%	nan	%		%		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	0 %	3.569.274.735	0 %		100 %	248.550.000	25 %	156.471.900	25,00 %	62,95	25 %	156.471.900	%	4,38	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	245 unit	3.278.531.510	0 unit		33 unit	243.550.000	44 unit	233.719.900	133,33 %	95,96	44 unit	233.719.900	17,96 %	7,13	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	130 unit	290.743.225	0 unit		7 unit	5.000.000	7 unit	5.000.000	100,00 %	100,00	7 unit	5.000.000	5,38 %	1,72	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa kantor	0 %	2.469.556.576	0 %		100 %	236.812.706	25 %	99.540.953	25,00 %	42,03	25 %	99.540.953	%	4,03	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	6 laporan	1.277.526.297	0 laporan		1 laporan	106.812.706	1 laporan	85.624.433	100,00 %	80,16	1 laporan	85.624.433	16,67 %	6,70	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	6 laporan	1.192.030.279	0 laporan		1 laporan	130.000.000	1 laporan	126.950.850	100,00 %	97,65	1 laporan	126.950.850	16,67 %	10,65	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	angka	53.768.541.402	248	angka		63	angka	9.156.793.719	123	angka	1.928.136.824	195,24	%	21,06	371	angka	1.928.136.824	515,28	%	3,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian SAKIP	85	Angka		328	Angka		83	Angka		162	Angka		195,18	%		490	Angka		576,47	%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian SAKIP	100	Persen	1.683.707.199	100	Persen		100	Persen	286.735.684	100	Persen	95.390.000	100,00	%	33,27	100	Persen	95.390.000	100,00	%	5,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	1.683.707.199	36	Laporan		9	Laporan	286.735.684	9	Laporan	478.228.160	100,00	%	166,78	45	Laporan	478.228.160	500,00	%	28,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Persen	38.555.741.566	100	Persen		100	Persen	6.566.050.765	100	Persen	1.439.653.454	100,00	%	21,93	100	Persen	1.439.653.454	100,00	%	3,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207	Orang/Bulan	37.851.484.054	25	Orang/Bulan		45	Orang/Bulan	6.446.115.565	45	Orang/Bulan	4.038.309.329	100,00	%	62,65	70	Orang/Bulan	4.038.309.329	33,82	%	10,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	704.257.512	4	Dokumen		1	Dokumen	119.935.200	4	Dokumen	177.600.000	400,00	%	148,08	8	Dokumen	177.600.000	800,00	%	25,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Persen	475.331.190	100	Persen		100	Persen	80.949.000	100	Persen	14.550.000	100,00	%	17,97	100	Persen	14.550.000	100,00	%	3,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	375	Paket	404.990.700	76	Paket		78	Paket	68.970.000	78	Paket	66.400.000	100,00	%	96,27	154	Paket	66.400.000	41,07	%	16,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	143	Orang	70.340.490	25	Orang		29	Orang	11.979.000	29	Orang	14.550.000	100,00	%	121,46	54	Orang	14.550.000	37,76	%	20,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	persen	4.219.249.946	100	persen		100	persen	718.539.137	100	persen	92.169.000	100,00	%	12,83	100	persen	92.169.000	100,00	%	2,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	248.545.919	1	Paket		1	Paket	42.327.421	1	Paket	28.790.000	100,00	%	68,02	2	Paket	28.790.000	33,33	%	11,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	277.525.206	1	Paket		1	Paket	47.262.600	1	Paket	40.500.000	100,00	%	85,69	2	Paket	40.500.000	40,00	%	14,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	298.413.489	1	Paket		1	Paket	50.819.879	1	Paket	38.782.000	100,00	%	76,31	2	Paket	38.782.000	40,00	%	13,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	71.031.951	1	Dokumen		1	Dokumen	12.096.755	1	Dokumen	37.611.500	100,00	%	310,92	2	Dokumen	37.611.500	40,00	%	52,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490	Laporan	3.323.733.381	80	Laporan		100	Laporan	566.032.482	100	Laporan	400.000.000	100,00	%	70,67	180	Laporan	400.000.000	36,73	%	12,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	persen	696.418.135	100	persen		100	persen	118.600.152	100	persen	27.400.000	100,00	%	23,10	100	persen	27.400.000	100,00	%	3,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43	Unit	696.418.135	6	Unit		10	Unit	118.600.152	10	Unit	50.625.401	100,00	%	42,69	16	Unit	50.625.401	37,21	%	7,27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	persen	2.129.279.644	100	persen		100	persen	362.616.762	100	persen	92.477.920	100,00	%	25,50	100	persen	92.477.920	100,00	%	4,34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	Laporan	20.588.178	5	Laporan		5	Laporan	3.506.171	5	Laporan	4.000.000	100,00	%	114,08	10	Laporan	4.000.000	40,00	%	19,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	1.171.045.089	48	Laporan		12	Laporan	199.429.220	24	Laporan	161.102.418	200,00	%	80,78	72	Laporan	161.102.418	120,00	%	13,76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	660.601.646	1	Laporan		1	Laporan	112.500.597	1	Laporan	132.942.050	100,00	%	118,17	2	Laporan	132.942.050	40,00	%	20,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	277.044.731	1	Laporan		1	Laporan	47.180.774	2	Laporan	14.981.500	200,00	%	31,75	3	Laporan	14.981.500	60,00	%	5,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	persen	6.008.813.722	100	persen		100	persen	1.023.302.219	100	persen	166.496.450	100,00	%	16,27	100	persen	166.496.450	100,00	%	2,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	308 Unit	4.729.904.859	232 Unit		62 Unit	805.503.776	124 Unit	639.975.575	200,00 %	79,45	356 Unit	639.975.575	115,58 %	13,53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	136,14 angka	45.185.572.914	137,64 angka		137,14 angka	7.959.487.168	137,64 angka	3.645.482.414	100,36 %	45,80	275,28 angka	3.645.482.414	202,20 %	8,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi																	
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 persen	16.040.764.414	100 persen		100 persen	3.068.286.082	100 persen	899.954.939	100,00 %	29,33	100 persen	899.954.939	100,00 %	5,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	0 persen		persen		0 persen		persen		%		persen		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Kemampuan dan Keterampilan Relawan Penanggulangan Bencana	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah																	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	14 Kawasan	3.624.061.115	2 Kawasan		8 Kawasan	623.165.488	8 Kawasan	142.749.000	100,00 %	22,91	10 Kawasan	142.749.000	71,43 %	3,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	1.421.020.000	25 Orang		2.000 Orang	242.000.000	2.000 Orang	128.381.783	100,00 %	53,05	2.025 Orang	128.381.783	2.025,00 %	9,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	160 Orang	3.425.500.000	100 Orang		140 Orang	605.000.000	140 Orang	194.591.250	100,00 %	32,16	240 Orang	194.591.250	150,00 %	5,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Keluarga	2.796.431.044	1 Keluarga		2 Keluarga	691.034.044	4 Keluarga	58.108.940	%	8,41	5 Keluarga	58.108.940	250,00 %	2,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	0 1		1		0 1		1		%		1		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	130 Orang	2.430.000.000	20 Orang		200 Orang	500.000.000	200 Orang	231.830.470	100,00 %	46,37	220 Orang	231.830.470	169,23 %	9,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan tanggap darurat bencana sesuai kewenangan	100 Persen	23.036.086.099	100 Persen		100 Persen	3.716.584.918	100 Persen	2.459.596.430	100,00 %	66,18	100 Persen	2.459.596.430	100,00 %	10,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Kabupaten/Kota yang terpenuhi penguatan kebutuhan logistik bencana	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan penanggulangan bencana	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.910	Orang	3.552.550.000	473	Orang		520	Orang	605.000.000	520	Orang	458.715.230	100,00	%	75,82	993	Orang	458.715.230	34,12	%	12,91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	0	1		1			0	1		1			%			1			%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	17.627.136.099	1	Laporan		2	Laporan	2.671.584.918	2	Laporan	2.628.785.000	100,00	%	98,40	3	Laporan	2.628.785.000	150,00	%	14,91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100	Laporan	1.856.400.000	1	Laporan		2	Laporan	440.000.000	2	Laporan	119.951.460	100,00	%	27,26	3	Laporan	119.951.460	3,00	%	6,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	Orang	0		Orang		0	Orang	0		Orang			%			Orang			%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah terdampak bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi	100	Persen	6.108.722.401	100	Persen		100	Persen	1.174.616.168	100	Persen	285.931.045	100,00	%	24,34	100	Persen	285.931.045	100,00	%	4,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase penguatan kelembagaan (sementara)	0	persen			persen		0	persen			persen			%			persen			%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																								
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	Lembaga	0		Lembaga		0	Lembaga	0		Lembaga			%			Lembaga			%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1	Dokumen	1.597.936.990	1	Dokumen		1	Dokumen	272.129.000	2	Dokumen	325.330.000		%	119,55	3	Dokumen	325.330.000	300,00	%	20,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	12	Dokumen	1.856.400.000	12	Dokumen		12	Dokumen	440.000.000	4	Dokumen	95.159.450	166,67	%	21,63	16	Dokumen	95.159.450	133,33	%	5,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Panti sesuai dengan kebutuhan PPKS	1	Persen	45.027.873.000	0,25	Persen		1	Persen	8.369.164.309	0,25	Persen	8.657.207.450	25,00	%	103,44	0,25	Persen	8.657.207.450	25,00	%	19,23	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Panti sesuai dengan kebutuhan PPKS	1	persen		0,25	persen		1	persen		0,25	persen		25,00	%		0,25	persen		25,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	2	persen	14.160.000.000	2	persen		2	persen	4.303.878.549	2	persen	2.134.763.830	100,00	%	49,60	2	persen	2.134.763.830	100,00	%	15,08	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	150	Orang	8.900.000.000	600	Orang		150	Orang	1.900.656.700	600	Orang	2.807.628.050	400,00	%	147,72	1.200	Orang	2.807.628.050	800,00	%	31,55	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Warga Binaan SosialJumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	150	Orang	845.000.000	600	Orang		150	Orang	218.049.662	600	Orang	449.368.500	400,00	%	206,09	1.200	Orang	449.368.500	800,00	%	53,18	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	72	Orang	2.890.000.000	288	Orang		72	Orang	1.508.287.309	288	Orang	2.071.593.732	400,00	%	137,35	576	Orang	2.071.593.732	800,00	%	71,68	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Provinsi	72	Orang	265.000.000	288	Orang		72	Orang	286.200.000	288	Orang		400,00	%		576	Orang		800,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	72 Orang	160.000.000	288 Orang		72 Orang	21.552.680	288 Orang	35.674.144	400,00 %	165,52	576 Orang	35.674.144	800,00 %	22,30	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	72 Orang	625.000.000	288 Orang		72 Orang	271.334.400	288 Orang	274.209.798	400,00 %	101,06	576 Orang	274.209.798	800,00 %	43,87	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																	
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi	72 Orang	280.000.000	288 Orang		72 Orang	60.297.798	288 Orang	30.955.000	400,00 %	51,34	576 Orang	30.955.000	800,00 %	11,06	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi	72 Orang	195.000.000	288 Orang		72 Orang	37.500.000	144 Orang	19.283.000	200,00 %	51,42	432 Orang	19.283.000	600,00 %	9,89	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	0 Persen	1.795.000.000	0 Persen		0 Persen	200.992.672	Persen	131.565.000	%	65,46	Persen	131.565.000	%	7,33	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	72 Orang	1.105.000.000	288 Orang		72 Orang	20.992.672	288 Orang	291.240.584	400,00 %	1.387,34	576 Orang	291.240.584	800,00 %	26,36	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Pemulasaran kewenanga Provinsi	20 Orang	690.000.000	20 Orang		20 Orang	180.000.000	20 Orang	64.095.636	100,00 %	35,61	40 Orang	64.095.636	200,00 %	9,29	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	0,26 persen	9.340.000.000	0,22 persen		0,22 persen	1.242.641.770	0,22 persen	1.396.636.695	100,00 %	112,39	0,22 persen	1.396.636.695	84,62 %	14,95	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah anak yang yang mendapatkan layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	75 Orang	575.000.000	50 Orang		50 Orang	10.837.094	50 Orang	8.880.000	100,00 %	81,94	100 Orang	8.880.000	133,33 %	1,54	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	75 Orang	2.200.000.000	200 Orang		50 Orang	402.290.000	200 Orang	369.605.750	400,00 %	91,88	400 Orang	369.605.750	533,33 %	16,80	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	75 Orang	1.050.000.000	200 Orang		50 Orang	70.682.190	200 Orang	449.368.500	400,00 %	635,76	400 Orang	449.368.500	533,33 %	42,80	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	4 Orang	3.360.000.000	16 Orang		4 Orang	363.910.526	16 Orang	2.071.593.732	400,00 %	569,26	32 Orang	2.071.593.732	800,00 %	61,65	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	1 Orang	70.000.000	1 Orang		1 Orang	5.203.044	1 Orang	35.674.144	100,00 %	685,64	2 Orang	35.674.144	200,00 %	50,96	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	1 Orang	780.000.000	1 Orang		1 Orang	84.947.746	1 Orang	274.209.798	100,00 %	322,80	2 Orang	274.209.798	200,00 %	35,16	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	1 Orang	1.150.000.000	1 Orang		1 Orang	170.507.684	1 Orang	291.240.584	100,00 %	170,81	2 Orang	291.240.584	200,00 %	25,33	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak																	
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	1 Orang	155.000.000	1 Orang		1 Orang	134.263.486	1 Orang	106.286.225	100,00 %	79,16	2 Orang	106.286.225	200,00 %	68,57	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga																	
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.1.02.0012	Akses ke Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti																	
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti																	
	1.06.04.1.02.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti																	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	0,37 persen	4.212.848.000	0,36 persen		0,36 persen	769.184.623	0,36 persen	988.877.520	100,00 %	128,56	0,36 persen	988.877.520	97,30 %	23,47	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	0,37 Persen		0,36 Persen		0,36 Persen		0,36 Persen		100,00 %		0,36 Persen		97,30 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	72 Orang	1.260.848.000	288 Orang		72 Orang	104.040.000	288 Orang	449.368.500	400,00 %	431,92	576 Orang	449.368.500	800,00 %	35,64	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsI	72 Orang	1.805.000.000	288 Orang		72 Orang	516.169.830	288 Orang	2.071.593.732	400,00 %	401,34	576 Orang	2.071.593.732	800,00 %	114,77	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Provinsi	72 Orang	305.000.000	288 Orang		72 Orang	5.539.014	288 Orang		400,00 %		576 Orang		800,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	72 Orang	75.000.000	288 Orang		72 Orang	4.785.531	144 Orang		200,00 %		432 Orang		600,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	72 Orang	170.000.000	288 Orang		72 Orang	35.100.000	288 Orang	30.500.000	400,00 %	86,89	576 Orang	30.500.000	800,00 %	17,94	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	72 Orang	430.000.000	288 Orang		72 Orang	68.350.248	288 Orang	291.240.584	400,00 %	426,10	576 Orang	291.240.584	800,00 %	67,73	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan bagi lanjut usia terlantar kewenangan Provinsi	72 Orang	12.000.000	288 Orang		72 Orang	2.700.000	288 Orang	1.350.000	400,00 %	50,00	576 Orang	1.350.000	800,00 %	11,25	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaran kewenanga Provinsi	20 Orang	155.000.000	20 Orang		20 Orang	32.500.000	20 Orang	10.000.000	100,00 %	30,77	40 Orang	10.000.000	200,00 %	6,45	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti																	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan ProvinsiPanti	72 Orang	4.350.525.000	288 Orang		72 Orang	876.108.054	288 Orang	2.807.628.050	400,00 %	320,47	576 Orang	2.807.628.050	800,00 %	64,54	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar Lansia terlantar di dalam panti	pembinaan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti panti	72 Orang	310.000.000	288 Orang		72 Orang	58.804.991	288 Orang	14.430.444	400,00 %	24,54	576 Orang	14.430.444	800,00 %	4,65	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	20,8 persen	4.241.500.000	15,6 persen		15,6 persen	295.233.722	15,6 persen	1.374.931.135	100,00 %	465,71	15,6 persen	1.374.931.135	75,00 %	32,42	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	20,8 Persen		15,6 Persen		15,6 Persen		15,6 Persen		100,00 %		15,6 Persen		75,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	25 Orang	1.114.000.000	60 Orang		15 Orang	100.314.000	60 Orang	2.807.628.050	400,00 %	2.798,84	120 Orang	2.807.628.050	480,00 %	252,03	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	25 Orang	640.000.000	60 Orang		15 Orang	35.211.078	60 Orang	449.368.500	400,00 %	1.276,21	120 Orang	449.368.500	480,00 %	70,21	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/ Wisma yang Mudah	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan	25 Orang	1.500.000.000	60 Orang		15 Orang	76.729.650	60 Orang	137.332.000	400,00 %	178,98	120 Orang	137.332.000	480,00 %	9,16	Dinas Sosial, Kependudukan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Diakses	provinsi															dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	25 Orang	17.500.000	60 Orang		15 Orang	4.331.719	60 Orang	35.674.144	400,00 %	823,56	120 Orang	35.674.144	480,00 %	203,85	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	25 Orang	220.000.000	60 Orang		15 Orang	33.186.075	60 Orang	30.500.000	400,00 %	91,91	120 Orang	30.500.000	480,00 %	13,86	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau Identitas Anak																	
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangan ke daerah asal kewenangan Provinsi	25 Orang	750.000.000	15 Orang		15 Orang	45.461.200	15 Orang	2.500.000	100,00 %	5,50	30 Orang	2.500.000	120,00 %	0,33	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar Gelandangan dan Pengemis terlantar di dalam panti																	
	1.06.04.1.05.0009	Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
	1.06.04.1.04.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti																	
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	25 Orang	275.000.000	15 Orang		15 Orang	52.070.000	15 Orang	291.240.584	100,00 %	559,33	30 Orang	291.240.584	120,00 %	105,91	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan Provinsi	25 Orang	425.000.000	60 Orang		15 Orang	6.425.000	60 Orang	12.125.000	400,00 %	188,72	120 Orang	12.125.000	480,00 %	2,85	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Tuna Susila yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	22 persen	3.308.000.000	22 persen		22 persen	347.066.028	22 persen	1.374.931.135	100,00 %	396,16	22 persen	1.374.931.135	100,00 %	41,56	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Tuna Susila yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	22 Persen		22 Persen		22 Persen		22 Persen		100,00 %		22 Persen		100,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	15 Orang	867.000.000	15 Orang		15 Orang	150.525.000	15 Orang	2.807.628.050	100,00 %	1.865,22	30 Orang	2.807.628.050	200,00 %	323,83	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	15 Orang	350.000.000	60 Orang		15 Orang	60.646.006	60 Orang	449.368.500	400,00 %	740,97	120 Orang	449.368.500	800,00 %	128,39	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/ Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	15 Orang	1.758.000.000	60 Orang		15 Orang	123.330.000	60 Orang	137.332.000	400,00 %	111,35	120 Orang	137.332.000	800,00 %	7,81	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	15 Orang	73.000.000	60 Orang		15 Orang	5.065.022	60 Orang	35.674.144	400,00 %	704,32	120 Orang	35.674.144	800,00 %	48,87	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																	
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS yang dipulangan ke daerah asal kewenangan Provinsi	15 Orang	260.000.000	60 Orang		15 Orang	7.500.000	60 Orang	2.500.000	400,00 %	33,33	120 Orang	2.500.000	800,00 %	0,96	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.1	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	15 Orang	1.000.000.000	60 Orang		15 Orang	93.000.000	60 Orang	291.240.584	400,00 %	313,16	120 Orang	291.240.584	800,00 %	29,12	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan Provinsi	15 Orang	1.250.000.000	60 Orang		15 Orang	57.870.900	60 Orang	12.125.000	400,00 %	20,95	120 Orang	12.125.000	800,00 %	0,97	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	15 Orang	360.000.000	60 Orang		15 Orang	65.888.000	60 Orang	9.740.000	400,00 %	14,78	120 Orang	9.740.000	800,00 %	2,71	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	650 %	1.405.000.000	10 %		40 %	300.001.450	10 %	46.625.000	25,00 %	15,54	10 %	46.625.000	1,54 %	3,32	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	40 persen	1.405.000.000	13 persen		40 persen	300.001.450	13 persen	46.625.000	32,50 %	15,54	13 persen	46.625.000	32,50 %	3,32	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota	650 Orang	1.405.000.000	600 Orang		650 Orang	300.001.450	650 Orang	239.851.800	100,00 %	79,95	1.250 Orang	239.851.800	192,31 %	17,07	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah warga negara migran, orang terlantar, dan PPKS lainnya yang menerima layanan kesejahteraan sosial	3 Orang	2.962.490.020	3 Orang		3 Orang	653.990.700	3 Orang	117.861.500	100,00 %	18,02	6 Orang	117.861.500	200,00 %	3,98	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan oleh orang tua tunggal	50 persen	860.000.000	50 persen		50 persen	167.990.700	50 persen	62.661.500	100,00 %	37,30	50 persen	62.661.500	100,00 %	7,29	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	860.000.000	3 Orang		3 Orang	167.990.700	3 Orang	149.354.531	100,00 %	88,91	6 Orang	149.354.531	200,00 %	17,37	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang aktif pemutakhiran DTKS	100 persen	2.102.490.020	81,81 persen		81,81 persen	486.000.000	81,81 persen	55.200.000	100,00 %	11,36	81,81 persen	55.200.000	81,81 %	2,63	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota	11 Keluarga	365.000.000	44 Keluarga		11 Keluarga	160.118.000	44 Keluarga	95.514.000	400,00 %	59,65	88 Keluarga	95.514.000	800,00 %	26,17	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi	25 Orang	0	88 Orang		22 Orang	325.882.000	88 Orang	90.582.800	400,00 %	27,80	176 Orang	90.582.800	704,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Logistiknya	100 %		25 %		100 %	457.920.000	25 %	1.290.848.735	25,00 %	281,89	25 %	1.290.848.735	25,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100 persen		100 persen		100 persen	457.920.000	100 persen	1.290.848.735	100,00 %	281,89	100 persen	1.290.848.735	100,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah pengungsi yang mendapakan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	1.000 Orang	0	750 Orang		800 Orang	361.040.000	800 Orang	2.807.628.050	100,00 %	777,65	1.550 Orang	2.807.628.050	155,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																	
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Provinsi	3 Unit	0	3 Unit		3 Unit	20.880.000	3 Unit	18.300.000	100,00 %	87,64	6 Unit	18.300.000	200,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapakan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	1 Orang	0	1 Orang		1 Orang	76.000.000	1 Orang	71.202.600	100,00 %	93,69	2 Orang	71.202.600	200,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif	0	%	2.385.444.000	0	%		0	%	2.513.216.172		%	815.250.000		%	32,44		%	815.250.000		%	34,18	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data izin sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah yang telah diterbitkan	27	Dokumen	35.444.000	17	Dokumen		22	Dokumen		22	Dokumen		100,00	%	nan	39	Dokumen		144,44	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																							
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	8	Orang	2.350.000.000	32	Orang		8	Orang	2.513.216.172	32	Orang	815.250.000	400,00	%	32,44	64	Orang	815.250.000	800,00	%	34,69	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	325	Orang	0	50	Orang		60	Orang	265.507.536	60	Orang	17.410.000	100,00	%	6,56	110	Orang	17.410.000	33,85	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	325	Orang	0	50	Orang		60	Orang	316.494.664	60	Orang	222.481.700	100,00	%	70,30	110	Orang	222.481.700	33,85	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	641	Keluarga	0	600	Keluarga		641	Keluarga	1.633.214.000	600	Keluarga	1.404.756.200	93,60	%	86,01	1.200	Keluarga	1.404.756.200	187,21	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5	Lembaga	2.350.000.000	5	Lembaga		5	Lembaga	297.999.972	5	Lembaga	67.116.092	100,00	%	22,52	10	Lembaga	67.116.092	200,00	%	2,86	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	0	Orang		0	Orang		0	Orang			Orang			%	nan		Orang			%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.3	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	0	Keluarga		0	Keluarga		0	Keluarga			Keluarga			%	nan		Keluarga			%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.02.1.02.4	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	0	Lembaga		0	Lembaga		0	Lembaga			Lembaga			%	nan		Lembaga			%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti penguatan nilai KSN dan Kepahlawanan	50	Orang	1.187.741.980	10	Orang		50	Orang	179.262.798	10	Orang	29.952.840	20,00	%	16,71	20	Orang	29.952.840	40,00	%	2,52	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50	Dokumen	1.187.741.980	50	Dokumen		50	Dokumen	179.262.798	50	Dokumen	29.952.840	100,00	%	16,71	100	Dokumen	29.952.840	200,00	%	2,52	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																							
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana prasarana TMPNProvinsi yang di pelihara	1	Makam	0	1	Makam		1	Makam	97.301.678	1	Makam	20.842.720	100,00	%	21,42	2	Makam	20.842.720	200,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana prasarana TMPN Provinsi yang di amankan	1	Laporan	1.150.000.000	1	Laporan		1	Laporan	81.961.120	1	Laporan	69.940.000	100,00	%	85,33	2	Laporan	69.940.000	200,00	%	6,08	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.07.1.01.2	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	Makam		0	Makam		0	Makam			Makam			%	nan		Makam			%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.07.1.01.3	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan			Laporan			%	nan		Laporan			%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	0	Nilai	61.376.051.800	Nilai			0	Nilai	21.871.092.359		Nilai	3.019.329.211		%	13,81		Nilai	3.019.329.211		%	4,92	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	Nilai		Nilai			0	Nilai		Nilai				%		Nilai				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52	Dokumen		0	Dokumen		48	Dokumen		Dokumen				%	nan	Dokumen				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen				%	nan	Dokumen				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01.3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen				%	nan	Dokumen				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01.4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen				%	nan	Dokumen				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01.5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen				%	nan	Dokumen				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01.6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	1.450.000.000	0	Laporan		0	Laporan	388.288.976	Laporan		24.000.000		%	6,18	Laporan	24.000.000			%	1,66	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan data dukung penyusunan laporankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	24	Laporan	1.450.000.000	24	Laporan		24	Laporan	388.288.976	24	Laporan	262.370.895	100,00	%	67,57	48	Laporan	262.370.895	200,00	%	18,09	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	100	Dokumen	41.950.000.000	400	Dokumen		100	Dokumen	17.882.223.267	400	Dokumen	2.270.610.629	400,00	%	12,70	800	Dokumen	2.270.610.629	800,00	%	5,41	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	114	Bulan	40.000.000.000	114	Bulan		114	Bulan	17.667.183.267	114	Bulan	15.910.896.106	100,00	%	90,06	228	Bulan	15.910.896.106	200,00	%	39,78	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penatausaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	1.950.000.000	12	Dokumen		12	Dokumen	215.040.000	12	Dokumen	129.340.000	100,00	%	60,15	24	Dokumen	129.340.000	200,00	%	6,63	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.02.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		Laporan				%	nan	Laporan				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.02.4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		Laporan				%	nan	Laporan				%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	10.000.000	100	persen		100	persen	11.000.000	100	persen		100,00	%		100	persen		100,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	%	10.000.000	0	%		100	%	11.000.000	25	%		25,00	%		25	%		25,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100	persen	5.480.000.000	100	persen		100	persen	1.002.263.680	100	persen	-1.797.406	100,00	%	-0,18	100	persen	-1.797.406	100,00	%	-0,03	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Paket	290.000.000	100	Paket		100	Paket	21.194.600	100	Paket	21.194	100,00	%	0,10	200	Paket	21.194	200,00	%	0,01	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	1.950.000.000	1	Paket		1	Paket	99.930.420	1	Paket	73.244.620	100,00	%	73,30	2	Paket	73.244.620	200,00	%	3,76	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	350.000.000	1	Paket		1	Paket	93.368.480	1	Paket	53.317.500	100,00	%	57,10	2	Paket	53.317.500	200,00	%	15,23	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	190.000.000	1	Paket		1	Paket	213.022.009	1	Paket	82.470.000	100,00	%	38,71	2	Paket	82.470.000	200,00	%	43,41	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Sipil	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.700.000.000	12 Laporan		12 Laporan	574.748.171	12 Laporan	324.027.659	100,00 %	56,38	24 Laporan	324.027.659	200,00 %	12,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen	1.500.000.000	100 persen		100 persen	411.092.000	100 persen		100,00 %		100 persen		100,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang disediakan	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit		10 Unit	411.092.000	10 Unit	405.460.000	100,00 %	98,63	20 Unit	405.460.000	200,00 %	27,03	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa kantor	100 persen	4.030.600.000	100 persen		100 persen	1.255.564.436	100 persen	513.466.594	100,00 %	40,90	100 persen	513.466.594	100,00 %	12,74	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	2.580.600.000	12 Laporan		12 Laporan	534.564.630	12 Laporan	532.667.887	100,00 %	99,65	24 Laporan	532.667.887	200,00 %	20,64	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.450.000.000	12 Laporan		12 Laporan	720.999.806	12 Laporan	619.722.716	100,00 %	85,95	24 Laporan	619.722.716	200,00 %	42,74	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 persen	6.955.451.800	100 persen		100 persen	920.660.000	100 persen	213.049.394	100,00 %	23,14	100 persen	213.049.394	100,00 %	3,06	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	22 Unit	3.021.485.800	22 Unit		22 Unit	798.120.000	22 Unit	448.361.394	100,00 %	56,18	44 Unit	448.361.394	200,00 %	14,84	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	4 Unit	3.253.786.000	4 Unit		4 Unit	100.070.000	4 Unit		100,00 %		8 Unit		200,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	650.000.000	4 Unit		4 Unit	22.470.000	4 Unit	10.405.000	100,00 %	46,31	8 Unit	10.405.000	200,00 %	1,60	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	0 %	8.330.000.000	0 %		2,5 %	6.531.999.335	5,51 %	1.780.604.649	220,40 %	27,26	2,755 %	1.780.604.649	%	21,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	5,5 %		0 %		5,3 %		5,44 %		102,64 %		2,72 %		49,45 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.02.03.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLKP)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	0 orang		0 orang		85 orang		65 orang		76,47 %	nan	65 orang		%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	6 orang	8.080.000.000	0 orang		1.074 orang	6.469.325.735	1.074 orang	1.774.604.647	100,00 %	27,43	1.074 orang	1.774.604.647	17.900,00 %	21,96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLK)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	0 orang	8.000.000.000	0 orang		85 orang	6.359.999.415	16,25 orang	4.917.279.215	19,12 %	77,32	16,25 orang	4.917.279.215	%	61,47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetisi Pada Tahun	0 Orang	80.000.000	0 Orang		1.074 Orang	109.326.320	1.074 Orang	107.319.520	100,00 %	98,16	1.074 Orang	107.319.520	%	134,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja ditingkat Daerah	1	dokumen	250.000.000	0	dokumen		1	dokumen	62.673.600	1	dokumen	6.000.002	100,00	%	9,57	1	dokumen	6.000.002	100,00	%	2,40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen	250.000.000	0	Dokumen		1	Dokumen	62.673.600	1	Dokumen	60.322.898	100,00	%	96,25	1	Dokumen	60.322.898	100,00	%	24,13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30,5	%	1.250.000.000	0	%		30,3	%	294.952.370	34,9	%	112.076.189	115,18	%	38,00	17,45	%	112.076.189	57,21	%	8,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan layanan antar kerja	1	kegiatan	1.250.000.000	0	kegiatan		1	kegiatan	294.952.370	1	kegiatan	112.076.189	100,00	%	38,00	1	kegiatan	112.076.189	100,00	%	8,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan Melalui Layanan AKAD, AKL dan ULD	0	Orang	550.000.000	0	Orang		5.000	Orang	183.952.820	4.000	Orang	173.849.209	80,00	%	94,51	4.000	Orang	173.849.209		%	31,61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0	Orang	700.000.000	80	Orang		40	Orang	110.999.550	40	Orang	110.932.944	100,00	%	99,94	120	Orang	110.932.944		%	15,85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah calon PMI (PMI/PMI) yang terlindungi	1	1		0	1		1	1		1	1		100,00	%	nan	1	1		100,00	%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelayanan IMTA	1	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan			Kegiatan			%	nan		Kegiatan			%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaaan	10	%	900.000.000	0	%		9,8	%	150.940.000	15,76	%	78.134.944	160,82	%	51,77	7,88	%	78.134.944	78,80	%	8,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kerjasama tripartit	1	Kegiatan	500.000.000	0	Kegiatan		1	Kegiatan	39.722.000	1	Kegiatan	26.688.000	100,00	%	67,19	1	Kegiatan	26.688.000	100,00	%	5,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang di Bina	0	Lembaga	500.000.000	0	Lembaga		11	Lembaga	39.722.000	11	Lembaga	39.704.000	100,00	%	99,95	11	Lembaga	39.704.000		%	7,94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP	1	Kegiatan	400.000.000	0	Kegiatan		1	Kegiatan	111.218.000	1	Kegiatan	51.446.944	100,00	%	46,26	1	Kegiatan	51.446.944	100,00	%	12,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	0	Surat Keputusan	400.000.000	0	Surat Keputusan		5	Surat Keputusan	111.218.000	5	Surat Keputusan	110.932.944	100,00	%	99,74	5	Surat Keputusan	110.932.944		%	27,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan	80	%	3.000.000.000	0	%		78	%	296.060.000	98,6	%	91.183.490	126,41	%	30,80	49,3	%	91.183.490	61,63	%	3,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelaksanaan pengawasan norma kerja di perusahaan	1	Kegiatan	3.000.000.000	0	Kegiatan		1	Kegiatan	296.060.000	1	Kegiatan	91.183.490	100,00	%	30,80	1	Kegiatan	91.183.490	100,00	%	3,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaanyang Menerapkan Norma KetenagaKerjaan di Perusahaan (Termasuk di Perusahaan yang Memperkerjakan TKA)	0	Perusahaan	0	0	Perusahaan		4.000	Perusahaan	149.410.000	4.000	Perusahaan	149.329.442	100,00	%	99,95	4.000	Perusahaan	149.329.442		%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang di Selesaikan	0	Kasus	1.500.000.000	0	Kasus		3	Kasus	61.000.000	3	Kasus	59.140.000	100,00	%	96,95	3	Kasus	59.140.000		%	3,94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	4.000	Perusahaan	1.500.000.000	0	Perusahaan		4.000	Perusahaan	85.650.000	4.000	Perusahaan	82.599.469	100,00	%	96,44	4.000	Perusahaan	82.599.469	100,00	%	5,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01	PTOGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	76	%	2.500.000.000	0	%		70,01	%	20.839.178.516	70,6	%	4.683.567.758	100,84	%	22,47	35,3	%	4.683.567.758	46,45	%	187,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Nilai IKM	84,04	%		0	%		84,02	%		84,91	%		101,06	%		42,455	%		50,52	%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Pengaanggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sakip	100	%		100	%		100	%	104.631.600	100	%	17.152.090	100,00	%	16,39	200	%	17.152.090	200,00	%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0 Dokumen		1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	100,00 %	100,00	1 Dokumen	18.000.000	100,00 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0	0 laporan		4 laporan	86.631.600	4 laporan	86.631.600	100,00 %	100,00	4 laporan	86.631.600	%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	2.07.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	500.000.000	0 paket		1 paket	116.056.000	1 paket	21.905.777	100,00 %	18,88	1 paket	21.905.777	100,00 %	4,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	200.000.000	0 Paket		1 Paket	39.059.000	1 Paket	39.059.000	100,00 %	100,00	1 Paket	39.059.000	%	19,53	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket		1 Paket	2.003.800	1 Paket	6.439.500	100,00 %	321,36	1 Paket	6.439.500	%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	300.000.000	0 laporan		1 laporan	74.993.200	1 laporan	74.975.094	100,00 %	99,98	1 laporan	74.975.094	%	24,99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.106.0001	Penyedia Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																	
	2.07.01.106.0004	Penyedian BahanLogistik Kantor																	
	2.07.01.1.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusu Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik Daerah	1 unit	1.000.000.000	0 unit		20 unit	262.109.600	20 unit	96.438.700	100,00 %	36,79	20 unit	96.438.700	2.000,00 %	9,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	0 Unit	500.000.000	0 Unit		20 Unit	121.625.600	20 Unit	112.589.900	100,00 %	92,57	20 Unit	112.589.900	%	22,52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Paket	500.000.000	0 Paket		1 Paket	140.484.000	1 Paket	140.442.000	100,00 %	99,97	1 Paket	140.442.000	%	28,09	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.09.006	PemeliharaanPeralatan dan Mesin lainya																	
	2.07.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Jasa penunjang urusan Pemerintah yang disediakan	0 paket	1.000.000.000	0 paket		100 paket	744.815.000	100 paket	331.479.785	100,00 %	44,50	100 paket	331.479.785	%	33,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikakan	0 laporan	500.000.000	0 laporan		1 laporan	383.735.000	1 laporan	353.181.237	100,00 %	92,04	1 laporan	353.181.237	%	70,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	500.000.000	0 laporan		1 laporan	361.080.000	1 laporan	355.120.000	100,00 %	98,35	1 laporan	355.120.000	%	71,02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	20.07.01.1.07	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya																	
	: 2.07.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		12 bulan		12 bulan	19.611.566.316	12 bulan	4.216.591.406	100,00 %	21,50	24 bulan	4.216.591.406	200,00 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 bulan	0	0 bulan		12 bulan	19.611.566.316	12 bulan	18.088.399.226	100,00 %	92,23	12 bulan	18.088.399.226	%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Layanan RTKD	100 %	90.000.000	0 %		100 %	36.000.000	100 %	9.000.000	100,00 %	25,00	50 %	9.000.000	50,00 %	10,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	: 2.07.03.1.04	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Layanan RTKD	100 %	90.000.000	0 %		100 %	36.000.000	25 %	9.000.000	25,00 %	25,00	25 %	9.000.000	25,00 %	10,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunya Dokumen RTKD	100 dokumen	90.000.000	0 dokumen		100 dokumen	36.000.000	100 dokumen	36.000.000	100,00 %	100,00	100 dokumen	36.000.000	100,00 %	40,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS KETIMPANGAN GENDER	91 INDEKS	475.000.000	INDEKS		91 INDEKS	428.000.000	91 INDEKS		100,00 %		91 INDEKS		100,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
			Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0 indeks		indeks		0 indeks		indeks		%		indeks		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah Kewenangan provinsi yang melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) yang harus ditingkatkan	1 %	125.000.000	100 %		100 %	78.000.000	50 %		50,00 %		150 %		15.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	100 %	125.000.000	100 %		100 %	78.000.000	90 %	74.894.350	90,00 %	96,02	190 %	74.894.350	190,00 %	59,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	0 %	350.000.000	100 %		100 %	350.000.000	50 %		50,00 %		150 %		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga yang ditingkatkan Kapasitas Sumberdayanya	2 lembaga	350.000.000	2 lembaga		2 lembaga	350.000.000	1 lembaga	195.640.110	50,00 %	55,90	3 lembaga	195.640.110	150,00 %	55,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Indeks Ketimpangan Gender	0 indeks	325.000.000	indeks		0 indeks	294.020.000	indeks		%		indeks		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
			Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0 indeks		indeks		0 indeks		indeks		%		indeks		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	1 %	225.000.000	100 %		100 %	225.000.000	50 %		50,00 %		150 %		15.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	persentase korban/pelapor yang terlayani	100 %	225.000.000	100 %		100 %	225.000.000	50 %	178.990.020	50,00 %	79,55	150 %	178.990.020	150,00 %	79,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pengembangan dan penguatan sumber daya pengelola serta penyedian layanan perlindungan khusus permepuan pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	1 %	100.000.000	0 %		100 %	69.020.000	50 %		50,00 %		50 %		5.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100 %	100.000.000	100 %		100 %	69.020.000	50 %	61.637.800	50,00 %	89,30	150 %	61.637.800	150,00 %	61,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi															Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak	100 indeks	100.000.000	20 indeks		82 indeks	75.000.000	20 indeks		24,39 %		40 indeks		40,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	11 kab/kota	100.000.000	0 kab/kota		11 kab/kota	75.000.000	5 kab/kota		45,45 %		5 kab/kota		45,45 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	persentase Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	100 %	100.000.000	100 %		100 %	75.000.000	50 %	73.252.800	50,00 %	97,67	150 %	73.252.800	150,00 %	73,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70 Indeks	425.000.000	67 Indeks		69 Indeks	336.980.000	69 Indeks		100,00 %		136 Indeks		194,29 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	11 kab/kota	150.000.000	0 kab/kota		11 kab/kota	101.500.000	5 kab/kota		45,45 %		5 kab/kota		45,45 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	100 %	150.000.000	100 %		100 %	101.500.000	50 %	101.005.000	50,00 %	99,51	150 %	101.005.000	150,00 %	67,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi yang tersedia	1 %	275.000.000	0 %		100 %	235.480.000	50 %		50,00 %		50 %		5.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring	100 %	275.000.000	100 %		100 %	235.480.000	50 %	157.691.650	50,00 %	66,97	150 %	157.691.650	150,00 %	57,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	0 INDEKS	12.741.201.867	75 INDEKS		80 INDEKS	11.645.272.102	75 INDEKS		93,75 %		150 INDEKS		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
			IKM	0 indeks		0 indeks		0 indeks		indeks		%		indeks		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evfaluasi kinerja perengkat daerah yang disusun	1 dokumen	275.000.000	0 dokumen		15 dokumen	150.000.000	10 dokumen		66,67 %		10 dokumen		1.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen	15 BUKU	275.000.000	15 BUKU		15 BUKU	150.000.000	10 BUKU	108.243.570	66,67 %	72,16	25 BUKU	108.243.570	166,67 %	39,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	1	%	11.000.000.000	0	%		100	%	10.223.617.203	50	%		50,00	%		50	%		5.000,00	%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	periode penyediaan gaji dan Tunjangan	41	14 bulan	11.000.000.000	14	14 bulan		14	14 bulan	10.223.617.203	7	14 bulan	6.993.546.928	50,00	%	68,41	21	14 bulan	6.993.546.928	51,22	%	63,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian	100	%	100.000.000	0	%		100	%	29.920.000	50	%		50,00	%		50	%		50,00	%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0	orang	100.000.000	20	orang		10	orang	29.920.000	5	orang	3.420.000	50,00	%	11,43	25	orang	3.420.000		%	3,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	1	%	365.001.184	0	%		100	%	305.534.216	50	%		50,00	%		50	%		5.000,00	%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	komponen	15.000.000	100	komponen		100	komponen	5.073.140	50	komponen	5.053.664	50,00	%	99,62	150	komponen	5.053.664	150,00	%	33,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	%	100.001.184	100	%		100	%	100.001.184	50	%	62.734.184	50,00	%	62,73	150	%	62.734.184	150,00	%	62,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	250.000.000	100	%		100	%	200.459.892	50	%	124.503.075	50,00	%	62,11	150	%	124.503.075	150,00	%	49,80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	1	%	250.961.483	0	%		100	%	250.961.483	50	%		50,00	%		50	%		5.000,00	%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah lembar surat yang tersedia	1.000	lembar	1.500.000	1.000	lembar		1.000	lembar	1.500.000	500	lembar	1.500.000	50,00	%	100,00	1.500	lembar	1.500.000	150,00	%	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	119.459.880	12	bulan		12	bulan	119.459.880	6	bulan	59.483.019	50,00	%	49,79	18	bulan	59.483.019	150,00	%	49,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	periode Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	130.001.603	12	bulan		12	bulan	130.001.603	6	bulan	83.674.500	50,00	%	64,36	18	bulan	83.674.500	150,00	%	64,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diperlihara	1 %	750.239.200	0 %		100 %	685.239.200	50 %		50,00 %		50 %		5.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 UNIT	270.050.000	10 UNIT		10 UNIT	270.050.000	5 UNIT	149.222.125	50,00 %	55,26	15 UNIT	149.222.125	150,00 %	55,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 UNIT	205.189.200	10 UNIT		10 UNIT	205.189.200	5 UNIT	112.641.400	50,00 %	54,90	15 UNIT	112.641.400	150,00 %	54,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	100 %	275.000.000	100 %		100 %	210.000.000	50 %	201.231.735	50,00 %	95,82	150 %	201.231.735	150,00 %	73,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100 Persen		100 Persen		100 Persen	125.000.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100 Persen		100 Persen		100 Persen	125.000.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0 Laporan	0	0 Laporan		1 Laporan	125.000.000	Laporan	99.375.000	%	79,50	Laporan	99.375.000	%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Tersedia	0 Unit	0	0 Unit		3 Unit	0	1 Unit	9.921.500	33,33 %		1 Unit	9.921.500	%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.04 (1)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Kriteria dan Akurasi Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100 Persen		100 Persen		100 Persen	50.091.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase Cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kriteria dan Akurasi Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100 Persen		100 Persen		100 Persen	50.091.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	0	2 Dokumen		2 Dokumen	50.091.000	Dokumen	28.681.000	%	57,26	2 Dokumen	28.681.000	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03 (1)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Promosi Pencapaian Target Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	1.703.097.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
			persentase akurasi data dan informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase peningkatan distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok dan strategis	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Ketahanan Pangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	100 Persen		100 Persen		100 Persen	1.192.189.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0	1 Laporan		1 Laporan	507.398.000	Laporan	393.415.480	%	77,54	1 Laporan	393.415.480	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	0	3 Laporan		3 Laporan	18.500.000	1 Laporan	17.687.000	33,33 %	95,61	4 Laporan	17.687.000	133,33 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	405.000.000	Dokumen	193.619.800	%	47,81	1 Dokumen	193.619.800	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis	3 Laporan	0	3 Laporan		3 Laporan	100.000.000	1 Laporan	51.609.150	33,33 %	51,61	4 Laporan	51.609.150	133,33 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3 Unit	0	3 Unit		3 Unit	81.287.000	1 Unit	1.200.000	33,33 %	1,48	4 Unit	1.200.000	133,33 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	0	2 Dokumen		2 Dokumen	80.004.000	1 Dokumen	5.770.000	50,00 %	7,21	3 Dokumen	5.770.000	150,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Akurasi Data dan Informasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	100 Persen		100 Persen		100 Persen	249.456.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	69.996.000	Dokumen	42.333.757	%	60,48	1 Dokumen	42.333.757	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	61 Ton	0	61 Ton		61 Ton	61.550.000	61 Ton	44.489.800	100,00 %	72,28	122 Ton	44.489.800	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Ton	0	4 Ton		2 Ton	71.200.000	Ton	67.675.775	%	95,05	4 Ton	67.675.775	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	0	2 Laporan		2 Laporan	46.710.000	Laporan	46.709.900	%	100,00	2 Laporan	46.709.900	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Cakupan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	261.452.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	117.887.000	Dokumen	61.655.998	%	52,30	1 Dokumen	61.655.998	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	0	3 Laporan		3 Laporan	95.384.000	1 Laporan	51.314.000	33,33 %	53,80	4 Laporan	51.314.000	400,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun	1 Laporan	0	2 Laporan		1 Laporan	48.181.000	Laporan	41.865.000	%	86,89	2 Laporan	41.865.000	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen	381.150.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribui Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen		100 Persen	381.150.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Asal Tumbuhan	0 Sertifikat	0	22 Sertifikat		22 Sertifikat	75.260.000	12 Sertifikat	381.000	54,55 %	0,51	34 Sertifikat	381.000	%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	0 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	77.806.000	Dokumen	23.659.000	%	30,41	1 Dokumen	23.659.000	%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	0 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	69.667.000	Dokumen	10.840.000	%	15,56	1 Dokumen	10.840.000	%		Dinas Ketahanan Pangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembgaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	0 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	81.150.000	Dokumen	68.507.760	%	84,42	1 Dokumen	68.507.760	%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	77.267.000	Dokumen	17.820.000	%	23,06	1 Dokumen	17.820.000	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01 (1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Persen		87,024 Persen		84,5 Persen	12.023.682.909	87,024 Persen	670.621.970	102,99 %	5,58	87,024 Persen	670.621.970	101,19 %		Dinas Ketahanan Pangan	
			Nilai SAKIP	0 Nilai		Nilai		0 Nilai		Nilai		%		Nilai		%		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks/ Persentase Keselarasan Perencanaan	100 Persen		100 Persen		100 Persen	297.466.000	25 Persen	4.500.000	25,00 %	1,51	62,5 Persen	4.500.000	62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
			Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	100 Persen		100 Persen		100 Persen		25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja	100 Persen		100 Persen		100 Persen		25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	0	3 Dokumen		3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	97.037.333	100,00 %	97,04	6 Dokumen	97.037.333	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	2 Laporan		2 Laporan	197.466.000	1 Laporan	89.287.157	50,00 %	45,22	3 Laporan	89.287.157	150,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	9.651.913.742	25 Persen	666.121.970	25,00 %	6,90	62,5 Persen	666.121.970	62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	0	70 Orang/Bulan		60 Orang/Bulan	9.523.393.742	120 Orang/Bulan	7.849.171.514	200,00 %	82,42	190 Orang/Bulan	7.849.171.514	316,67 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	1 Dokumen		3 Dokumen	34.370.000	2 Dokumen	19.367.280	66,67 %	56,35	3 Dokumen	19.367.280	300,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	2 Dokumen		12 Dokumen	71.640.000	6 Dokumen	49.550.000	50,00 %	69,17	8 Dokumen	49.550.000	400,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	0	2 Laporan		2 Laporan	7.490.000	1 Laporan	1.560.000	50,00 %	20,83	3 Laporan	1.560.000	150,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	2 Dokumen		2 Dokumen	15.020.000	1 Dokumen	2.812.740	50,00 %	18,73	3 Dokumen	2.812.740	150,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Layanan Administrasi Kepegawaian	1 Persen		100 Persen		100 Persen	30.000.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		6.250,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0	20 Orang		20 Orang	30.000.000	10 Orang	7.050.000	50,00 %	23,50	30 Orang	7.050.000	150,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Adminitrasi Umum yang dipenuhi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	531.234.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																	
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	2 Paket		1 Paket	8.850.000	Paket	4.116.000	%	46,51	2 Paket	4.116.000	100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket		2 Paket	58.000.000	1 Paket	24.524.340	50,00 %	42,28	2 Paket	24.524.340	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan		12 Laporan	464.384.000	6 Laporan	159.364.088	50,00 %	34,32	7 Laporan	159.364.088	700,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penataan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen	159.028.064	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	2 Unit		1 Unit	159.028.064	Unit	79.980.000	%	50,29	2 Unit	79.980.000	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah yang dipenuhi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	972.644.103	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan		12 Laporan	168.014.103	6 Laporan	101.451.116	50,00 %	60,38	7 Laporan	101.451.116	700,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	12 Laporan		12 Laporan	120.630.000	6 Laporan	49.412.000	50,00 %	40,96	18 Laporan	49.412.000	1.800,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan		12 Laporan	684.000.000	6 Laporan	513.000.000	50,00 %	75,00	7 Laporan	513.000.000	700,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	381.397.000	25 Persen		25,00 %		62,5 Persen		62,50 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	0	20 Unit		20 Unit	301.960.000	10 Unit	151.612.300	50,00 %	50,21	30 Unit	151.612.300	150,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	0	2 Unit		2 Unit	15.710.000	Unit		%		2 Unit		100,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	0	2 Unit		2 Unit	63.727.000	2 Unit	47.700.000	100,00 %	74,85	4 Unit	47.700.000	200,00 %		Dinas Ketahanan Pangan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen	12.850.000.000	100 Persen		100 Persen		75 Persen		75,00 %	nan	87,5 Persen		87,50 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi yang disusun	11 dokumen	4.850.000.000	0 dokumen		0 dokumen		dokumen		%	nan	dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	6 dokumen	2.750.000.000	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	3 dokumen	2.100.000.000	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	1 dokumen	0	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 dokumen	0	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	26 dokumen	8.000.000.000	2 dokumen		2 dokumen		1,5 dokumen		75,00 %	nan	3,5 dokumen		13,46 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Provinsi yang disusun	3 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen		1 dokumen	0	0,75 dokumen		75,00 %		1,75 dokumen		58,33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	3 dokumen	1.050.000.000	0 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen		100,00 %		1 dokumen		33,33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	5 dokumen	2.500.000.000	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	15 dokumen	3.450.000.000	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indikator Kualitsa Udara (IKU)	84,82 poin	22.842.180.000	90,57 poin		84,62 poin	550.000.000	92,98 poin	302.400.857	109,88 %	54,98	183,55 poin	302.400.857	216,40 %	1,32	Dinas Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	61,59 poin		46,06 poin		61,39 poin		55,58 poin		90,54 %		101,64 poin		165,03 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	79,79 poin		70,69 poin		78,49 poin		83,01 poin		105,76 %		153,7 poin		192,63 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Indikator Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	75,89 poin		64,09 poin		74,89 poin		64,09 poin		85,58 %		128,18 poin		168,90 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penyelesaian pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	0 %		%		100 %		100 %		100,00 %		50 %		%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan	0 rupiah		0 rupiah		100 rupiah		100 rupiah		100,00 %		100 rupiah		%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penyusunan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	20.426.180.000	15 titik		94 titik	550.000.000	94 titik	302.400.857	100,00 %	54,98	109 titik	302.400.857	115,96 %	1,48	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42 dokumen	2.565.708.000	12 dokumen		12 dokumen	0	12 dokumen		100,00 %		24 dokumen		57,14 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	30 dokumen	3.250.000.000	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	18 dokumen	710.472.000	dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 dokumen	0	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	21.840 dokumen	13.900.000.000	1.846 dokumen		4.320 dokumen	550.000.000	1.985 dokumen	521.133.286	45,95 %	94,75	3.831 dokumen	521.133.286	17,54 %	3,75	Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium	0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00 %		3 dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboratorium lingkungan	0 laporan		0 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00 %		12 laporan		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	2.416.000.000	lokasi		10 lokasi		lokasi		%	nan	lokasi		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian	60 dokumen	1.391.000.000	2 dokumen		12 dokumen	0	12 dokumen		100,00 %		14 dokumen		23,33 %		Dinas Lingkungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sumber Pencemaran	Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/ Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan															Hidup	
	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	22 kegiatan	1.025.000.000	2 kegiatan		4 kegiatan	0	4 kegiatan		100,00 %		6 kegiatan		27,27 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 %	825.000.000	100 %		100 %		100 %		100,00 %	nan	100 %		100,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/ kota yang terinventarisasi	6 perusahaan	825.000.000	2 perusahaan		5 perusahaan		1 perusahaan		20,00 %	nan	3 perusahaan		50,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	0	0 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen		100,00 %		1 dokumen		20,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	109 dokumen	825.000.000	22 dokumen		22 dokumen	0	22 dokumen		100,00 %		44 dokumen		40,37 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	86 Persen	6.080.000.000	80 Persen		77 Persen	618.619.500	70 Persen	247.692.500	90,91 %	40,04	75 Persen	247.692.500	87,21 %	4,07	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase pemenuhan ketetntuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 perusahaan	6.080.000.000	31 perusahaan		70 perusahaan	618.619.500	10 perusahaan	247.692.500	14,29 %	40,04	41 perusahaan	247.692.500	58,57 %	4,07	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	100 dokumen	1.500.000.000	16 dokumen		20 dokumen	536.000.000	9 dokumen	532.372.161	45,00 %	99,32	25 dokumen	532.372.161	25,00 %	35,49	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang	550.000.000	4 orang		15 orang	5.350.000	15 orang	4.970.000	100,00 %	92,90	19 orang	4.970.000	126,67 %	0,90	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	80 badan usaha	2.950.000.000	17 badan usaha		70 badan usaha	77.269.500	10 badan usaha	42.503.000	14,29 %	55,01	27 badan usaha	42.503.000	33,75 %	1,44	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	22 orang	1.080.000.000	0 orang		0 orang	0	orang		%		orang		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	100 Persen	2.000.000.000	79 Persen		86 Persen	300.000.000	86 Persen	131.089.874	100,00 %	43,70	82,5 Persen	131.089.874	82,50 %	6,55	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal,	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak	42 MHA	1.250.000.000	33 MHA		36 MHA	100.000.000	29 MHA	79.195.874	80,56 %	79,20	62 MHA	79.195.874	147,62 %	6,34	Dinas Lingkungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui															Hidup	
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	55 dokumen	1.250.000.000	2 dokumen		11 dokumen	100.000.000	11 dokumen	79.195.874	100,00 %	79,20	13 dokumen	79.195.874	23,64 %	6,34	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	42 kelembagaan	750.000.000	33 kelembagaan		36 kelembagaan	200.000.000	29 kelembagaan	51.894.000	80,56 %	25,95	62 kelembagaan	51.894.000	147,62 %	6,92	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	42 dokumen	750.000.000	8 dokumen		36 dokumen	200.000.000	29 dokumen	183.107.000	80,56 %	91,55	37 dokumen	183.107.000	88,10 %	24,41	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80 Persen	2.700.000.000	60 Persen		70 Persen	210.000.000	70 Persen	26.553.365	100,00 %	12,64	65 Persen	26.553.365	81,25 %	0,98	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	5 kali	2.700.000.000	4 kali		4 kali	210.000.000	4 kali	26.553.365	100,00 %	12,64	8 kali	26.553.365	160,00 %	0,98	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	58 dokumen	2.200.000.000	4 dokumen		22 dokumen	210.000.000	22 dokumen	201.925.165	100,00 %	96,15	26 dokumen	201.925.165	44,83 %	9,18	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	525 orang	500.000.000	0 orang		0 orang	0	orang		%		orang		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen	5.910.000.000	100 Persen		100 Persen	167.380.500	100 Persen	6.050.000	100,00 %	3,61	100 Persen	6.050.000	100,00 %	0,10	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	19 kasus	5.910.000.000	13 kasus		17 kasus	167.380.500	7 kasus	6.050.000	158,82 %	3,61	20 kasus	6.050.000	105,26 %	0,10	Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	28 kasus		26 kasus		23 kasus		2 kasus		191,30 %		28 kasus		100,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	85 perkara	2.210.000.000	26 perkara		17 perkara	88.640.000	7 perkara	72.720.500	41,18 %	82,04	33 perkara	72.720.500	38,82 %	3,29	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	133 perkara	1.050.000.000	0 perkara		23 perkara	0	perkara		%		perkara		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	37 perkara	600.000.000	0 perkara		0 perkara	0	perkara		%		perkara		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	85 pengaduan	2.050.000.000	13 pengaduan		17 pengaduan	78.740.500	7 pengaduan	34.385.000	158,82 %	43,67	20 pengaduan	34.385.000	23,53 %	1,68	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	30 Persen	3.800.000.000	22 Persen		28 Persen	250.000.000	22 Persen	9.870.000	78,57 %	3,95	22 Persen	9.870.000	73,33 %	0,26	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	0 %		%		70 %		53,81 %		76,87 %		26,905 %		%		Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.982	ton/tahun	3.800.000.000	0	ton/tahun		205.866	ton/tahun	250.000.000	41.187,31	ton/tahun	9.870.000	20,01	%	3,95	41.187,31	ton/tahun	9.870.000	18,31	%	0,26	Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah penanganan timbulan sampah secara regional	524.960	ton/tahun		0	ton/tahun		522.019	ton/tahun		172.768,62	ton/tahun		33,10	%		172.768,62	ton/tahun		32,91	%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitasi TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3	unit	500.000.000	0	unit		0	unit	0		unit			%			unit			%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	8	dokumen	650.000.000	0	dokumen		0	dokumen	0		dokumen			%			dokumen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional yang Ditetapkan	524.960	ton	450.000.000		ton		522.019,05	ton	0	172.768,62	ton		33,10	%		172.768,62	ton		32,91	%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	61	dokumen	1.800.000.000	4	dokumen		13	dokumen	250.000.000	11	dokumen	196.028.180	84,62	%	78,41	15	dokumen	196.028.180	24,59	%	10,89	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	22	laporan	400.000.000	0	laporan		0	laporan	0		laporan			%			laporan			%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	0	laporan	0	0	laporan		0	laporan	0		laporan			%			laporan			%		Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi keuangan yang difasilitasi	0	Persen	104.370.950.000	0	Persen		0	Persen	17.974.716.961		Persen	4.454.721.655		%	24,78		Persen	4.454.721.655		%	4,27	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penataan administrasi BMD	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase layanan administrasi kepegawaian	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase peningkatan kualitas SDM yang difasilitasi	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Indeks / Persentase keselarasan perencanaan	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	0	persen		0	persen		0	persen			persen			%			persen			%		Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	123	laporan/ dokumen	3.815.000.000	24	laporan/ dokumen		25	laporan/ dokumen	45.065.281	25	laporan/ dokumen	8.908.600	100,00	%	19,77	49	laporan/ dokumen	8.908.600	39,84	%	0,23	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4	Dokumen	2.160.000.000	4	Dokumen		4	Dokumen	13.530.000	4	Dokumen	9.106.980	100,00	%	67,31	8	Dokumen	9.106.980	200,00	%	0,42	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	dokumen	15.000.000	3	dokumen		3	dokumen	4.500.000	3	dokumen	4.200.000	100,00	%	93,33	6	dokumen	4.200.000	40,00	%	28,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15	dokumen	15.000.000	3	dokumen		3	dokumen	0	3	dokumen		100,00	%		6	dokumen		40,00	%		Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 dokumen	15.000.000	3 dokumen		3 dokumen	4.500.000	3 dokumen	3.550.000	100,00 %	78,89	6 dokumen	3.550.000	40,00 %	23,67	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 dokumen	15.000.000	3 dokumen		3 dokumen	0	3 dokumen		100,00 %		6 dokumen		40,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	520.000.000	6 dokumen		6 dokumen	15.452.000	6 dokumen	7.228.600	100,00 %	46,78	12 dokumen	7.228.600	40,00 %	1,39	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen	1.075.000.000	2 dokumen		3 dokumen	7.083.281	3 dokumen	5.430.000	100,00 %	76,66	5 dokumen	5.430.000	38,46 %	0,51	Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	175 laporan/ dokumen	81.089.000.000	35 laporan/ dokumen		35 laporan/ dokumen	15.770.867.814	35 laporan/ dokumen	3.729.588.906	100,00 %	23,65	70 laporan/ dokumen	3.729.588.906	40,00 %	4,60	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang	81.000.000.000	100 orang		100 orang	15.754.757.814	100 orang	15.148.048.456	100,00 %	96,15	200 orang	15.148.048.456	166,67 %	18,70	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	10.000.000	0 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan	25.000.000	2 laporan		2 laporan	16.110.000	2 laporan	3.000.000	100,00 %	18,62	4 laporan	3.000.000	40,00 %	12,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	25 dokumen	21.000.000	5 dokumen		5 dokumen	0	5 dokumen		100,00 %		10 dokumen		40,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70 laporan	33.000.000	14 laporan		14 laporan	0	14 laporan		100,00 %		28 laporan		40,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian	150 orang	593.950.000	7 orang		100 orang		100 orang		100,00 %	nan	107 orang		71,33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	680 paket	442.000.000	0 paket		0 paket	0	paket		%		paket		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 orang	79.200.000	19 orang		0 orang	0	orang		%		19 orang		100,00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 orang	26.250.000	30 orang		0 orang	0	orang		%		30 orang		17,14 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	310 orang	46.500.000	0 orang		0 orang	0	orang		%		orang		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan adminsitrasi umum Perangkat Daerah	4 laporan	4.941.000.000	4 laporan		4 laporan	489.373.287	4 laporan	66.418.627	100,00 %	13,57	8 laporan	66.418.627	200,00 %	1,34	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 paket	100.000.000	6 paket		10 paket	5.728.430	10 paket	5.608.270	100,00 %	97,90	16 paket	5.608.270	32,00 %	5,61	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	195 paket	920.000.000	5 paket		40 paket	72.000.000	40 paket	71.973.500	100,00 %	99,96	45 paket	71.973.500	23,08 %	7,82	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.800 paket	370.000.000	900 paket		1.000 paket	15.050.000	1.000 paket	15.302.000	100,00 %	101,67	1.900 paket	15.302.000	39,58 %	4,14	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	305.000.000	4 paket		12 paket	15.094.857	12 paket	14.894.857	100,00 %	98,68	16 paket	14.894.857	26,67 %	4,88	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	21.000.000	12 dokumen		12 dokumen	6.500.000	12 dokumen	6.500.000	100,00 %	100,00	24 dokumen	6.500.000	40,00 %	30,95	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610 laporan	2.100.000.000	53 laporan		200 laporan	375.000.000	200 laporan	375.000.000	100,00 %	100,00	253 laporan	375.000.000	41,48 %	17,86	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16 dokumen	125.000.000	3 dokumen		3 dokumen	0	3 dokumen		100,00 %		6 dokumen		37,50 %		Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		1 dokumen		11,11 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	132 unit	5.070.000.000	22 unit		4 unit	39.728.500	4 unit	36.197.000	100,00 %	91,11	26 unit	36.197.000	19,70 %	0,71	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 unit	1.590.000.000	0 unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 unit	1.500.000.000	0 unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	180.000.000	22 unit		4 unit	39.728.500	4 unit	36.197.000	100,00 %	91,11	26 unit	36.197.000	130,00 %	20,11	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	1.800.000.000	0 unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	740 laporan	3.390.000.000	348 laporan		48 laporan	1.512.902.079	48 laporan	590.308.522	100,00 %	39,02	396 laporan	590.308.522	53,51 %	17,41	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250 laporan	15.000.000	300 laporan		300 laporan	3.000.000	300 laporan	3.000.000	100,00 %	100,00	600 laporan	3.000.000	48,00 %	20,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 laporan	1.950.000.000	36 laporan		36 laporan	271.382.329	36 laporan	269.974.232	100,00 %	99,48	72 laporan	269.974.232	40,00 %	13,84	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	1.425.000.000	12 laporan		12 laporan	1.238.519.750	12 laporan	1.238.519.750	100,00 %	100,00	24 laporan	1.238.519.750	40,00 %	86,91	Dinas Lingkungan Hidup	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	136 unit	5.472.000.000	99 unit		99 unit	116.780.000	99 unit	23.300.000	100,00 %	19,95	198 unit	23.300.000	145,59 %	0,43	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 unit	2.340.000.000	unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	2.340.000.000	1 unit		9 unit	92.960.000	3 unit	11.742.400	33,33 %	12,63	4 unit	11.742.400	44,44 %	0,50	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	351.000.000	19 unit		88 unit	13.320.000	88 unit	12.800.000	100,00 %	96,10	107 unit	12.800.000	116,30 %	3,65	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	441.000.000	1 unit		2 unit	10.500.000	2 unit	10.500.000	100,00 %	100,00	3 unit	10.500.000	25,00 %	2,38	Dinas Lingkungan Hidup	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelaporan Kab/Kota yang Menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk	99 persen	1.150.000.000	24,75 persen		99 persen	637.993.479	24,75 persen	36.289.600	25,00 %	5,69	24,75 persen	36.289.600	25,00 %	3,16	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen		98 persen		99 persen		99 persen		100,00 %	nan	98,5 persen		99,49 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase penyelenggraan pendaftaran penduduk	75 persen	1.150.000.000	75 persen		75 persen	637.993.479	75 persen	36.289.600	100,00 %	5,69	75 persen	36.289.600	100,00 %	3,16	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil fasilitasi layanan bidang Pendaftran Penduduk	11 Laporan	1.150.000.000	11 Laporan		11 Laporan	637.993.479	11 Laporan	308.882.138	100,00 %	48,41	22 Laporan	308.882.138	200,00 %	26,86	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk dari kab/kota	99 persen		99 persen		99 persen		99 persen		100,00 %	nan	99 persen		100,00 %		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaporan Kab/Kota yang Menyelenggarakan Pencatatan Sipil	98	%	1.100.000.000	23,75	%		96	%	217.971.000	24	%	29.993.750	25,00	%	13,76	23,875	%	29.993.750	24,36	%	2,73	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil	98	persen		95	persen		96	persen		96	persen		100,00	%	nan	95,5	persen		97,45	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	75	persen	1.100.000.000	75	persen		75	persen	217.971.000	75	persen	29.993.750	100,00	%	13,76	75	persen	29.993.750	100,00	%	2,73	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	11	Laporan	1.100.000.000	11	Laporan		11	Laporan	217.971.000	11	Laporan	134.153.990	100,00	%	61,55	22	Laporan	134.153.990	200,00	%	12,20	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	98	persen		95	persen		96	persen		96	persen		100,00	%	nan	95,5	persen		97,45	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang Melakukan PKS Data Kependudukan	0	OPD	3.829.933.076	0	OPD		0	OPD	252.945.000	OPD		55.115.240		%	21,79	OPD		55.115.240		%	1,44	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan	80	Lembaga		80	Lembaga		80	Lembaga		80	Lembaga		100,00	%		160	Lembaga		200,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80	persen		80	persen		80	persen		80	persen		100,00	%	nan	80	persen		100,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	80	persen	950.000.000	80	persen		80	persen	106.061.000	80	persen	11.607.320	100,00	%	10,94	80	persen	11.607.320	100,00	%	1,22	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	11	Laporan	950.000.000	11	Laporan		11	Laporan	106.061.000	11	Laporan	69.595.745	100,00	%	65,62	22	Laporan	69.595.745	200,00	%	7,33	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	80	persen	2.879.933.076	80	persen		80	persen	146.884.000	80	persen	43.507.920	100,00	%	29,62	80	persen	43.507.920	100,00	%	1,51	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	11	Laporan	2.879.933.076	11	Laporan		11	Laporan	146.884.000	11	Laporan	120.091.205	100,00	%	81,76	22	Laporan	120.091.205	200,00	%	4,17	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan	100	Buku	80.000.000	100	Buku		100	Buku	8.115.210	100	Buku		100,00	%		200	Buku		200,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan info profil kependudukan	100	persen	80.000.000	100	persen		100	persen	8.115.210	100	persen		100,00	%		100	persen		100,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan yang dibuat	1	Dokumen	80.000.000	1	Dokumen		1	Dokumen	8.115.210	1	Dokumen		100,00	%		2	Dokumen		200,00	%		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa Mandiri	0	jumlah		0	jumlah		0	jumlah			jumlah			%	nan		jumlah			%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.13.03.101	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	0	%		0	%		0	%			%			%	nan		%			%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																	
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	100 jumlah	300.000.000	100 jumlah		100 jumlah	250.000.000	50 jumlah		50,00 %		150 jumlah		150,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kab/kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 kab/kota	300.000.000	0 kab/kota		11 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota		45,45 %		5 kab/kota		500,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	JUMLAH KAB/KOTA YANG DIFasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11 kab/kota	300.000.000	11 kab/kota		11 kab/kota	250.000.000	6 kab/kota	179.855.060	54,55 %	71,94	17 kab/kota	179.855.060	154,55 %	59,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Desa Mandiri	0 jumlah	1.400.000.000	0 jumlah		0 jumlah	1.400.000.000	jumlah		%		jumlah		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelembagaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota	11 kab/kota	1.400.000.000	0 kab/kota		11 kab/kota	1.400.000.000	5 kab/kota		45,45 %		5 kab/kota		45,45 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	persentase Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	1.400.000.000	100 %		100 %	1.400.000.000	50 %	762.987.567	50,00 %	54,50	150 %	762.987.567	150,00 %	54,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,62 INDEKS	600.000.000	1,7 INDEKS		1 INDEKS	400.000.000	1,7 INDEKS		30,00 %		3,4 INDEKS		209,88 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.14.03.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kab/kota dalam pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	11 kab/kota	600.000.000	0 kab/kota		11 kab/kota	400.000.000	5 kab/kota		45,45 %		5 kab/kota		45,45 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	100 %	600.000.000	100 %		100 %	400.000.000	109 %	372.524.500	109,00 %	93,13	209 %	372.524.500	209,00 %	62,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0 indeks		indeks		0 indeks		indeks		%	nan	indeks		%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.14.03.101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	Jumlah kab/kota yang mengembangkan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi	1 jumlah		0 jumlah		100 jumlah		50 jumlah		50,00 %	nan	50 jumlah		5.000,00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal															Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																	
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	81 Persen	17.642.375.000	70 Persen		75 Persen	4.689.394.910	70 Persen	1.142.538.813	93,33 %	24,36	70 Persen	1.142.538.813	86,42 %	6,48	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLA J Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	1.560.000.000	4 Dokumen		1 Dokumen	432.198.400	2 Dokumen	136.260.000	200,00 %	31,53	6 Dokumen	136.260.000	600,00 %	8,73	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4 Laporan	1.560.000.000	10 Laporan		4 Laporan	145.790.800	3 Laporan	101.002.500	75,00 %	69,28	13 Laporan	101.002.500	325,00 %	6,47	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4 Laporan	0	10 Laporan		4 Laporan	286.407.600	3 Laporan	258.341.500	75,00 %	90,20	13 Laporan	258.341.500	325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia	400 Unit	14.517.375.000	200 Unit		11 Unit	199.986.666	11 Unit	25.179.343	100,00 %	12,59	211 Unit	25.179.343	52,75 %	0,17	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12 Laporan	14.517.375.000	30 Laporan		12 Laporan	199.986.666	9 Laporan	193.917.743	75,00 %	96,97	39 Laporan	193.917.743	325,00 %	1,34	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal Tipe B yang dikelola	3 Unit	1.000.000.000	3 Unit		3 Unit	930.509.734	1,5 Unit	304.165.000	50,00 %	32,69	4,5 Unit	304.165.000	150,00 %	30,42	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Type B	Jumlah SDM pengelola terminal type B	30 Personil	1.000.000.000	120 Personil		30 Personil	930.509.734	60 Personil	787.775.395	200,00 %	84,66	180 Personil	787.775.395	600,00 %	78,78	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah laporan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan		10 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	13 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	4 Dokumen		9 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	12 Dokumen		300,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA J di Jalan	Jumlah laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4 Laporan		9 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	12 Laporan		300,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi																	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	365.000.000	10 Laporan		4 Laporan	2.114.725.000	3 Laporan	631.078.028	75,00 %	29,84	13 Laporan	631.078.028	325,00 %	172,90	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	4 Laporan	365.000.000	10 Laporan		4 Laporan	983.055.000	3 Laporan	885.940.000	75,00 %	90,12	13 Laporan	885.940.000	325,00 %	242,72	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	0	10 Laporan		4 Laporan	1.131.670.000	3 Laporan	935.699.571	75,00 %	82,68	13 Laporan	935.699.571	325,00 %		Dinas Perhubungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Provinsi																	
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		10 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	13 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	3 Dokumen		10 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %	nan	13 Dokumen		433,33 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	3 Dokumen		9 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %	nan	12 Dokumen		400,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	3 Dokumen		9 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %	nan	12 Dokumen		400,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		9 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	12 Laporan		300,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		10 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	13 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	200.000.000	10 Laporan		4 Laporan	1.011.975.110	3 Laporan	45.856.442	75,00 %	4,53	13 Laporan	45.856.442	325,00 %	22,93	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	200.000.000	10 Laporan		4 Laporan	1.011.975.110	3 Laporan	985.587.438	75,00 %	97,39	13 Laporan	985.587.438	325,00 %	492,79	Dinas Perhubungan	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pelayaran	80 Persentase	250.000.000	60 Persentase		65 Persentase	551.826.000	62 Persentase	119.327.928	95,38 %	21,62	122 Persentase	119.327.928	152,50 %	47,73	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	4 Laporan		10 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	13 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	4 Laporan		10 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	13 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan	Jumlah laporan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal	4 Laporan	250.000.000	10 Laporan		4 Laporan	432.000.000	2 Laporan	87.067.928	50,00 %	20,15	12 Laporan	87.067.928	300,00 %	34,83	Dinas Perhubungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan																
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	4 laporan	250.000.000	10 laporan		4 laporan	432.000.000	3 laporan	298.498.373	75,00 %	69,10	13 laporan	298.498.373	325,00 %	119,40	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen	119.826.000	3 Dokumen	32.260.000	75,00 %	26,92	13 Dokumen	32.260.000	325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 dokumen	0	10 dokumen		4 dokumen	119.826.000	3 dokumen	103.124.000	75,00 %	86,06	13 dokumen	103.124.000	325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase terlaksananya pengelolaan Perkeretaapian	75 Persen		52,5 Persen		60 Persen		30,75 Persen		51,25 %	nan	41,625 Persen		55,50 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.04	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen		10 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		75,00 %	nan	13 Dokumen		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 Persen	3.240.000.000	55 Persen		60 Persen	11.056.563.846	50 Persen	3.007.608.580	83,33 %	27,20	52,5 Persen	3.007.608.580	70,00 %	92,83	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	400.000.000	223 Persentase		70 Persentase	394.759.500	125 Persentase	91.380.000	178,57 %	23,15	348 Persentase	91.380.000	348,00 %	22,85	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan kinerja perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen		4 Dokumen	394.759.500	3 Dokumen	286.837.149	75,00 %	72,66	13 Dokumen	286.837.149	325,00 %	71,71	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	500.000.000	30 Dokumen		12 Dokumen	8.708.229.868	9 Dokumen	2.189.295.145	75,00 %	25,14	39 Dokumen	2.189.295.145	325,00 %	437,86	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persentase	0	325 Persentase		100 Persentase	8.568.474.868	75 Persentase	8.514.504.128	125,00 %	99,37	400 Persentase	8.514.504.128	400,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 laporan	500.000.000	10 laporan		4 laporan	139.755.000	3 laporan	135.150.600	125,00 %	96,71	13 laporan	135.150.600	325,00 %	27,03	Dinas Perhubungan	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan		30 Laporan		12 Laporan		9 Laporan		75,00 %	nan	39 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1.190.000.000	30 Laporan		12 Laporan	1.119.320.256	9 Laporan	380.728.055	75,00 %	34,01	39 Laporan	380.728.055	325,00 %	31,99	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																	
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	200.000.000	10 Laporan		4 Laporan	355.316.456	3 Laporan	282.707.971	125,00 %	79,57	13 Laporan	282.707.971	325,00 %	141,35	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Laporan	250.000.000	10 Laporan		4 Laporan	144.592.000	3 Laporan	144.310.300	75,00 %	99,81	13 Laporan	144.310.300	325,00 %	57,72	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	150.000.000	10 Laporan		4 Laporan	187.090.000	3 Laporan	187.014.000	75,00 %	99,96	13 Laporan	187.014.000	325,00 %	124,68	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	590.000.000	10 Laporan		4 Laporan	432.321.800	3 Laporan	432.318.070	75,00 %	100,00	13 Laporan	432.318.070	325,00 %	73,27	Dinas Perhubungan	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan		10 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00 %	nan	13 Laporan		325,00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	850.000.000	30 Laporan		12 Laporan	440.034.222	9 Laporan	165.121.380	75,00 %	37,52	39 Laporan	165.121.380	325,00 %	19,43	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan		12 Laporan	263.005.236	6 Laporan	218.510.550	50,00 %	83,08	18 Laporan	218.510.550	150,00 %	54,63	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	450.000.000	10 Laporan		4 Laporan	177.028.986	3 Laporan	176.216.002	75,00 %	99,54	13 Laporan	176.216.002	325,00 %	39,16	Dinas Perhubungan	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	300.000.000	10 Laporan		4 Laporan	394.220.000	3 Laporan	181.084.000	75,00 %	45,93	13 Laporan	181.084.000	325,00 %	60,36	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Laporan	300.000.000	10 Laporan		4 Laporan	394.220.000	3 Laporan	392.464.750	75,00 %	99,55	13 Laporan	392.464.750	325,00 %	130,82	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	2.15.011.090.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	80 persen	105.905.255.320	persen		65 persen	17.317.045.119	65 persen	7.043.420.763	100,00 %	40,67	32,5 persen	7.043.420.763	40,63 %	6,65	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan	97 persen		persen		90 persen		90 persen		100,00 %		45 persen		46,39 %		Dinas Komunikasi dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pemerintah															Informatika	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	98 %	105.905.255.320	%		90 %	17.317.045.119	90 %	7.043.420.763	100,00 %	40,67	90 %	7.043.420.763	91,84 %	6,65	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media komunikasi Publik	220 Dokumen	79.394.911.368	0 Dokumen		12 Dokumen	13.699.841.315	12 Dokumen	17.074.407.385	100,00 %	124,63	12 Dokumen	17.074.407.385	5,45 %	21,51	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	7.635.388.720	0 Dokumen		12 Dokumen	213.034.900	12 Dokumen	149.675.500	100,00 %	70,26	12 Dokumen	149.675.500	100,00 %	1,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas InformasiMasyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0 Dokumen	9.823.231.948	0 Dokumen		8 Dokumen	1.663.150.887	10 Dokumen	1.622.309.530	125,00 %	97,54	10 Dokumen	1.622.309.530	%	16,52	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	120 Orang	2.772.031.231	0 Orang		180 Orang	145.999.600	60 Orang	119.091.585	33,33 %	81,57	60 Orang	119.091.585	50,00 %	4,30	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.1.01.0011	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola KomisiInformasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian SengketaInformasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	2.200.000.000	0 Dokumen		12 Dokumen	1.377.022.767	9 Dokumen	1.468.199.210	75,00 %	106,62	9 Dokumen	1.468.199.210	75,00 %	66,74	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Hasil Monitoring Pemberitaan, Opini,dan Aspirasi Publik.	12 Dokumen	4.079.692.053	0 Dokumen		12 Dokumen	217.995.650	12 Dokumen	165.920.031	100,00 %	76,11	12 Dokumen	165.920.031	100,00 %	4,07	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	90 persen	5.157.916.650	persen		70 persen	224.011.900	80 persen	17.217.450	114,29 %	7,69	40 persen	17.217.450	44,44 %	0,33	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah	95 %	5.157.916.650	%		80 %	224.011.900	100 %	17.217.450	125,00 %	7,69	100 %	17.217.450	105,26 %	0,33	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.1.01.0001	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 Dokumen	1.349.863.350	0 Dokumen		3 Dokumen	104.011.900	3 Dokumen	96.705.550	100,00 %	92,98	3 Dokumen	96.705.550	%	7,16	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	325 Orang	2.589.910.000	0 Orang		65 Orang	70.000.000	65 Orang	61.065.800	100,00 %	87,24	65 Orang	61.065.800	20,00 %	2,36	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	1.218.143.300	0 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	11.926.400	100,00 %	23,85	1 Dokumen	11.926.400	%	0,98	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	90 Persen	46.673.553.053	Persen		80 Persen	12.719.984.554	100 Persen	4.008.472.273	125,00 %	31,51	50 Persen	4.008.472.273	55,56 %	8,59	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur	89 jumlah	1.979.507.963	jumlah		86 jumlah	118.063.225	100 jumlah	4.543.725	116,28 %	3,85	100 jumlah	4.543.725	112,36 %	0,23	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.01.0002	Pengelolaan Nama Domain dan Sub DomainPenyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	0 Dokumen	1.979.507.963	0 Dokumen		1 Dokumen	118.063.225	1 Dokumen	63.904.925	100,00 %	54,13	1 Dokumen	63.904.925	%	3,23	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan SPBE di Provinsi Jambi	85 %	44.694.045.090	%		80 %	12.601.921.329	97 %	4.003.928.548	121,25 %	31,77	97 %	4.003.928.548	114,12 %	8,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.02.0001	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.139.213.000	0 Dokumen		1 Dokumen	128.214.600	1 Dokumen	92.441.367	100,00 %	72,10	1 Dokumen	92.441.367	100,00 %	2,94	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.02.0007	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	23 unit	5.135.597.000	0 unit		12 unit	560.156.200	12 unit	569.446.203	100,00 %	101,66	12 unit	569.446.203	52,17 %	11,09	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.02.0010	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	35.133.235.090	0 Dokumen		2 Dokumen	11.444.134.164	2 Dokumen	11.055.694.333	100,00 %	96,61	2 Dokumen	11.055.694.333	200,00 %	31,47	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.1.02.0011	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dokumen	1.286.000.000	0 Dokumen		4 Dokumen	469.416.365	4 Dokumen	458.935.610	100,00 %	97,77	4 Dokumen	458.935.610	%	35,69	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kotake Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																	
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks kematangan keamanan informasi	3 (leve1)	9.340.000.000	(leve1)		2,3 (leve1)	466.016.320	2,2 (leve1)	38.978.625	95,65 %	8,36	2,2 (leve1)	38.978.625	73,33 %	0,42	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) dan Non Elektronik	76 persen	8.740.000.000	persen		56 persen	414.283.820	60,46 persen	38.978.625	107,96 %	9,41	30,23 persen	38.978.625	39,78 %	0,45	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	9 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	18.714.720	2 Dokumen	13.885.934	200,00 %	74,20	2 Dokumen	13.885.934	22,22 %	1,85	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	6 Laporan	1.500.000.000	0 Laporan		1 Laporan	135.569.100	1 Laporan	130.631.245	100,00 %	96,36	1 Laporan	130.631.245	16,67 %	8,71	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	1.940.000.000	0 Laporan		1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	44.510.750	100,00 %	49,46	1 Laporan	44.510.750	8,33 %	2,29	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	4.550.000.000	Perangkat Daerah		15 Perangkat Daerah	170.000.000	15 Perangkat Daerah	146.795.350	100,00 %	86,35	15 Perangkat Daerah	146.795.350	42,86 %	3,23	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi	100 %	600.000.000	%		57 %	51.732.500	100 %		175,44 %		100 %		100,00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	35 Perangkat Daerah	600.000.000	Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah	51.732.500	10 Perangkat Daerah	50.324.480	100,00 %	97,28	10 Perangkat Daerah	50.324.480	28,57 %	8,39	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	persentase capaian kinerja	92 persen	85.812.549.573	persen		90 persen	13.395.602.600	100 persen	3.453.815.325	111,11 %	25,78	50 persen	3.453.815.325	54,35 %	4,02	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			tingkat efesiensi anggaran	97 persen		persen		95 persen		95 persen		100,00 %		47,5 persen		48,97 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			rata-rata iKM	3,64 Nilai		Nilai		3,56 Nilai		3,64 Nilai		102,25 %		3,64 Nilai		100,00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD	75 persen	1.506.594.360	persen		70 persen	272.576.100	74 persen	17.937.450	105,71 %	6,58	37 persen	17.937.450	49,33 %	1,19	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	246.271.360	2 Dokumen		2 Dokumen	39.796.500	3 Dokumen	28.009.000	150,00 %	70,38	5 Dokumen	28.009.000	250,00 %	11,37	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.260.323.000	0 Laporan		3 Laporan	232.779.600	3 Laporan	145.488.069	100,00 %	62,50	3 Laporan	145.488.069	150,00 %	11,54	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	95 persen	61.359.251.155	persen		90 persen	9.875.155.848	90 persen	2.284.421.760	100,00 %	23,13	45 persen	2.284.421.760	47,37 %	3,72	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	59.507.474.655	Orang/Bulan		90 Orang/Bulan	9.588.341.448	90 Orang/Bulan	9.180.669.871	100,00 %	95,75	90 Orang/Bulan	9.180.669.871	642,86 %	15,43	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	1.818.686.000	0 Dokumen		12 Dokumen	280.814.400	9 Dokumen	170.206.880	75,00 %	60,61	9 Dokumen	170.206.880	%	9,36	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	33.090.500	0 Dokumen		1 Dokumen	6.000.000	2,5 Dokumen	4.440.000	250,00 %	74,00	2,5 Dokumen	4.440.000	250,00 %	13,42	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Bimtek/ Diklat bagi ASN	95 persen	298.979.888	persen		65 persen	330.123.200	65 persen	27.252.350	100,00 %	8,26	32,5 persen	27.252.350	34,21 %	9,12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	298.979.888	0 Orang		25 Orang	330.123.200	28 Orang	201.667.698	112,00 %	61,09	28 Orang	201.667.698	%	67,45	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum OPD	100 persen	3.756.133.213	persen		90 persen	823.346.997	90 persen	162.975.220	100,00 %	19,79	45 persen	162.975.220	45,00 %	4,34	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	657.160.370	0 Paket		2 Paket	169.534.201	2 Paket	141.348.500	100,00 %	83,37	2 Paket	141.348.500	200,00 %	21,51	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	237.640.788	0 Paket		12 Paket	24.960.000	12 Paket	11.877.000	100,00 %	47,58	12 Paket	11.877.000	1.200,00 %	5,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	180.716.946	0 Paket		6 Paket	19.890.300	6 Paket	8.367.500	100,00 %	42,07	6 Paket	8.367.500	100,00 %	4,63	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	346.530.513	Dokumen		5 Dokumen	29.204.496	5 Dokumen	15.042.660	100,00 %	51,51	5 Dokumen	15.042.660	100,00 %	4,34	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.334.084.596	0 Laporan		12 Laporan	579.758.000	12 Laporan	469.328.568	100,00 %	80,95	12 Laporan	469.328.568	1.200,00 %	20,11	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya Barang/ peralatan kantor	100 persen	2.289.107.872	persen		90 persen	119.050.000	90 persen		100,00 %		45 persen		45,00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																	
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.289.107.872	0 Unit		17 Unit	119.050.000	12 Unit	117.875.000	70,59 %	99,01	12 Unit	117.875.000	24,00 %	5,15	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	13.231.609.133	persen		90 persen	1.564.020.055	90 persen	895.874.070	100,00 %	57,28	45 persen	895.874.070	45,00 %	6,77	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	13.888.098	0 Laporan		12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	400.000	100,00 %	40,00	12 Laporan	400.000	12,00 %	2,88	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,5 Laporan	13.130.547.465	Laporan		1 Laporan	1.556.520.468	1 Laporan	1.543.469.069	100,00 %	99,16	1 Laporan	1.543.469.069	40,00 %	11,75	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	87.173.570	0 Laporan		1 Laporan	6.499.587	1 Laporan	3.023.084	100,00 %	46,51	1 Laporan	3.023.084	1,00 %	3,47	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah	100 persen	3.370.873.952	persen		90 persen	411.330.400	90 persen	65.354.475	100,00 %	15,89	45 persen	65.354.475	45,00 %	1,94	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	2.114.601.720	0 Unit		26 Unit	372.060.400	24 Unit	287.502.275	92,31 %	77,27	24 Unit	287.502.275	24,00 %	13,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.256.272.232	0 Unit		2 Unit	39.270.000	Unit		%		Unit		%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	153 KSP/USP	1.408.625.036	0 KSP/USP		29 KSP/USP	125.000.000	KSP/USP		%		KSP/USP		%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	153 KSP/USP	1.408.625.036	0 KSP/USP		29 KSP/USP	125.000.000	KSP/USP		%		KSP/USP		%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20			4.484.556.405.204		4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST			ST			ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelesaian Perizinan Usaha Simpan Pinjam	153 KSP/USP	1.408.625.036	0 KSP/USP		29 KSP/USP	125.000.000	16 KSP/USP	93.609.000	55,17 %	74,89	16 KSP/USP	93.609.000	10,46 %	6,65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	50 %	304.399.920	45 %		47 %	200.000.000	45 %		95,74 %		45 %		90,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	25 koperasi	304.399.920	21 koperasi		25 koperasi	200.000.000	25 koperasi		100,00 %		46 koperasi		184,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	25 Koperasi	304.399.920	21 Koperasi		25 Koperasi	200.000.000	25 Koperasi	19.993.460	100,00 %	10,00	46 Koperasi	19.993.460	184,00 %	6,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	5 %	17.998.107.057	2,94 %		5 %	4.849.535.000	2,94 %		58,80 %		2,94 %		58,80 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500 Orang	17.998.107.057	210 Orang		800 Orang	4.849.535.000	390 Orang		48,75 %		600 Orang		120,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	3.310 Orang	17.998.107.057	510 Orang		800 Orang	4.849.535.000	800 Orang	576.105.600	100,00 %	11,88	1.310 Orang	576.105.600	39,58 %	3,20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	6,69 %	4.966.875.712	3,69 %		4,69 %	1.275.337.200	3,69 %		78,68 %		3,69 %		55,16 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Aktif dan/atau Koperasi RAT	6,69 %	4.966.875.712	3,69 %		4,69 %	1.275.337.200	3,69 %		78,68 %		7,38 %		110,31 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemn, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	35 Unit Usaha	3.948.875.712	25 Unit Usaha		10 Unit Usaha	757.337.200	10 Unit Usaha	290.034.595	100,00 %	38,30	35 Unit Usaha	290.034.595	100,00 %	7,34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	850.000.000	0 Keluarga		20 Keluarga	350.000.000	18 Keluarga	45.946.936	90,00 %	13,13	18 Keluarga	45.946.936	30,00 %	5,41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diFasilitasi Kemitraannya	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha		0 Unit Usaha	0	Unit Usaha		%		Unit Usaha		%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Kenaggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diberdayakan	5 Unit Usaha	168.000.000	0 Unit Usaha		5 Unit Usaha	168.000.000	5 Unit Usaha	116.394.900	100,00 %	69,28	5 Unit Usaha	116.394.900	100,00 %	69,28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	27,6 %	141.237.112.466	80,4 %		25,6 %	10.600.000.000	86,4 %	10.896.022.400	337,50 %	102,79	83,4 %	10.896.022.400	302,17 %	7,71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Persentase UMKM Binaan yang Difasilitasi Permodalan, Perijinan dan Pelatihan	27,6 %	141.237.112.466	21,6 %		25,6 %	10.600.000.000	21,6 %	10.896.022.400	84,38 %	102,79	43,2 %	10.896.022.400	156,52 %	7,71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemangku Kepentingan																	
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	10.020 Unit Usaha	141.237.112.466	3.090 Unit Usaha		2.000 Unit Usaha	10.600.000.000	2.117 Unit Usaha	11.087.245.400	105,85 %	104,60	5.207 Unit Usaha	11.087.245.400	51,97 %	7,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha		0 Unit Usaha	0	Unit Usaha		%		Unit Usaha		%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	9 Persen	2.912.430.200	6,68 Persen		8 Persen	375.999.950	6,68 Persen		83,50 %		6,68 Persen		74,22 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan yang Omset, Aset dan Tenaga Kerja Meningkat	150 Unit Usaha	2.912.430.200	8 Unit Usaha		200 Unit Usaha	375.999.950	100 Unit Usaha		50,00 %		108 Unit Usaha		72,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	654 Unit Usaha	2.912.430.200	4 Unit Usaha		200 Unit Usaha	375.999.950	130 Unit Usaha	93.945.250	65,00 %	24,99	134 Unit Usaha	93.945.250	20,49 %	3,23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	81 Indeks Nilai	22.250.148.796	70,6 Indeks Nilai		72 Indeks Nilai	13.605.717.486	70,6 Indeks Nilai	30.300.000	98,06 %	0,22	141,2 Indeks Nilai	30.300.000	174,32 %	0,14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan	100 %	1.202.858.330	100 %		100 %	313.937.326	50 %	30.300.000	50,00 %	9,65	150 %	30.300.000	150,00 %	2,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	10 Dokumen	331.642.555	2 Dokumen		2 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	50,00 %	100,00	3 Dokumen	60.000.000	30,00 %	18,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	871.215.775	0,5 Laporan		2 Laporan	253.937.326	0,5 Laporan	108.997.902	25,00 %	42,92	1 Laporan	108.997.902	10,00 %	12,51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 %		100 %		100 %	8.814.444.761	50 %		50,00 %		150 %		150,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	0	65 Orang		65 Orang	8.814.444.761	54 Orang	4.065.701.441	83,08 %	46,13	119 Orang	4.065.701.441	170,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	100 %	364.373.125	100 %		100 %	70.880.000	50 %		50,00 %		150 %		150,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350 Orang	364.373.125	70 Orang		60 Orang	70.880.000	30 Orang	6.610.000	50,00 %	9,33	100 Orang	6.610.000	28,57 %	1,81	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.980.240.633	100 %		100 %	851.849.724	50 %		50,00 %		150 %		150,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	224.232.990	15 Paket		10 Paket	24.999.060	5 Paket		50,00 %		20 Paket		80,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.087.515.774	4 Paket		4 Paket	169.999.664	2 Paket		50,00 %		6 Paket		30,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	221.225.424	475 Paket		500 Paket	44.948.000	500 Paket	19.828.000	100,00 %	44,11	975 Paket	19.828.000	162,50 %	8,96	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	471.272.616	15 Paket		15 Paket	50.000.000	8 Paket		53,33 %		23 Paket		153,33 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.975.993.829	0,25 Laporan		1 Laporan	561.903.000	0,25 Laporan	199.023.000	25,00 %	35,42	0,5 Laporan	199.023.000	10,00 %	6,69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.648.007.590	100 %		100 %	922.580.990	50 %		50,00 %		150 %		150,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang DIsediakan	6 Unit	1.534.521.000	0 Unit		1 Unit	684.521.000	1 Unit	626.450.000	100,00 %	91,52	1 Unit	626.450.000	16,67 %	40,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Item	722.576.720	5 Item		5 Item	120.000.000	1 Item		20,00 %		6 Item		30,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Item	2.390.909.870	8 Item		4 Item	118.059.990	Item		%		8 Item		32,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.666.930.259	100 %		100 %	1.825.514.685	50 %		50,00 %		150 %		150,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	462.759.720	0,25 Laporan		1 Laporan	4.990.720	0,25 Laporan	1.500.000	25,00 %	30,06	0,5 Laporan	1.500.000	10,00 %	0,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2.320.979.467	0,25 Laporan		1 Laporan	364.203.893	0,25 Laporan	53.175.419	25,00 %	14,60	0,5 Laporan	53.175.419	10,00 %	2,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	18.996.872	0,25 Laporan		1 Laporan	4.176.072	0,25 Laporan		25,00 %		0,5 Laporan		10,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	5 Laporan	3.864.194.200	0,25 Laporan		1 Laporan	1.452.144.000	0,25 Laporan	418.000.000	25,00 %	28,79	0,5 Laporan	418.000.000	10,00 %	10,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.387.738.859	100 %		100 %	806.510.000	50 %		50,00 %		150 %		150,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	173 Unit	2.706.403.750	36 Unit		37 Unit	456.240.000	30 Unit	76.283.500	81,08 %	16,72	66 Unit	76.283.500	38,15 %	2,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit	525.353.999	70 Unit		70 Unit	50.270.000	70 Unit	9.950.000	100,00 %	19,79	140 Unit	9.950.000	40,00 %	1,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	1.155.981.110	3 Unit		1 Unit	300.000.000	Unit		%		3 Unit		100,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kabupaten/ kota yang memiliki dokumen terkait perencanaan modal	50 Persen		10 Persen		10 Persen		7 Persen		70,00 %	nan	8,5 Persen		17,00 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase implementasi kesepakatan kerjasama strategis (kemitraan) antara PMA/PMDN dengan UMKM yang difasilitasi di Kabupaten	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Jumlah dokumen kajian potensi dan peluang investasi Provinsi Jambi	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen/produk hukum	2 2		1 2		2 2		2 2		100,00 %	nan	3 2		150,00 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan daerah (PERDA) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen	33.012.000	100,00 %		1 Dokumen	33.012.000	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	0 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	0	Dokumen		%		1 Dokumen		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	50 Bulan		10 Bulan		10 Bulan		7 Bulan	23.393.480	70,00 %	inf	17 Bulan	23.393.480	34,00 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase terlaksanya promosi	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		Kegiatan		%		Kegiatan		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Terlaksanya kegiatan temu bisnis	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		Kegiatan		%		Kegiatan		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah profil investasi daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	23.393.480	100,00 %	inf	2 Dokumen	23.393.480	200,00 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen	65.380.680	100,00 %		1 Dokumen	65.380.680	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal	25 Laporan		4 Laporan		5 Laporan		4 Laporan		80,00 %	nan	8 Laporan		32,00 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Pengawasan pengendalian penanaman modal	0 Pelaku usaha		0 Pelaku usaha		0 Pelaku usaha		Pelaku usaha		%		Pelaku usaha		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Peningkatan realisasi investasi penanaman modal	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Koordinasi lintas sektor antar organisasi perangkat daerah	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		%		Laporan		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	7.169 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		1.205 Pelaku Usaha		4.858 Pelaku Usaha		403,15 %	nan	4.858 Pelaku Usaha		67,76 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMDN yang diawasi	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan		80 Perusahaan	0	72 Perusahaan	52.294.000	90,00 %		72 Perusahaan	52.294.000	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	0 Kegiatan usaha	0	0 Kegiatan usaha		9 Kegiatan usaha	0	10 Kegiatan usaha	31.811.000	111,11 %		10 Kegiatan usaha	31.811.000	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang dibina	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha		330 Pelaku Usaha	0	585 Pelaku Usaha	213.678.520	177,27 %		585 Pelaku Usaha	213.678.520	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan bidang kesehatan, bidang PUPR bidang pendidikan bidang kehutanan, pariwisata, bidang pemuda dan olah raga bidang koperasi dan UKM bidang penanaman m	0 Izin		0 Izin		91 Izin	146.439.699	73 Izin	30.390.380	80,22 %	20,75	73 Izin	30.390.380	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Bidang Perizinan B)	92 Izin		89 Izin		91 Izin		73 Izin		80,22 %		162 Izin		176,09 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan (Prizinan A)	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		%		Laporan		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Pemenuhan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Pengaduan)	0 Persen		0 Persen		91 Persen		73 Persen		80,22 %		36,5 Persen		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Rata-Rata Nilai IKM (Pengaduan)	0 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		Nilai		%		Nilai		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Terselesaikan (Pengaduan)	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Pengawasan Pelaksanaan Survey IKM (Pengaduan)	0 Kab/Kota		0 Kab/Kota		0 Kab/Kota		Kab/Kota		%		Kab/Kota		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	2.860 Izin		Izin		580 Izin	80.619.800	240 Izin	22.564.609	41,38 %	27,99	240 Izin	22.564.609	8,39 %		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelayanan dan pengaduan yang diterima	0 Orang	0	0 Orang		120 Orang	80.619.800	87 Orang	77.429.909	127,50 %	96,04	87 Orang	77.429.909	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistempelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi	0 Pelaku usaha	0	0 Pelaku usaha		120 Pelaku usaha	0	129 Pelaku usaha	21.786.092	107,50 %		129 Pelaku usaha	21.786.092	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	xxx	Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah	0	Izin	0	0	Izin		580	Izin	65.819.899	480	Izin	65.613.999	82,76	%	99,69	480	Izin	65.613.999		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	75	Persen		73,31	Persen		75	Persen	624.664.155	74,05	Persen	170.699.153	98,73	%	27,33	73,68	Persen	170.699.153	98,24	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat daerah	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Penyediaaan jasa penunjang urusan urusan pemerintahan daerah	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran dan evaluasi	8	Dokumen			Dokumen		10	Dokumen	79.398.700	2	Dokumen	10.251.300	20,00	%	12,91	2	Dokumen	10.251.300	25,00	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan yang disusun	0	Dokumen	0	0	Dokumen		10	Dokumen	79.398.700	8	Dokumen	78.780.300	80,00	%	99,22	8	Dokumen	78.780.300		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi keuangan	12	Bulan			Bulan		12	Bulan		3	Bulan		25,00	%	nan	3	Bulan		25,00	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0	Bulan	0	14	Bulan		14	Bulan	0	12	Bulan	1.747.521.229	85,71	%		26	Bulan	1.747.521.229		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	Bulan	0	12	Bulan		12	Bulan	0	9	Bulan	205.580.000	75,00	%		21	Bulan	205.580.000		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dan PTT DPMPTSP Provinsi Jambi	100	Orang		39	Orang		100	Orang		10	Orang		10,00	%	nan	49	Orang		49,00	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	0	Orang	0	50	Orang		50	Orang	0	21	Orang	4.650.000	42,00	%		71	Orang	4.650.000		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi umum	12	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	167.265.455	3	Bulan	30.761.411	25,00	%	18,39	6	Bulan	30.761.411	50,00	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	0	Item	0	8	Item		8	Item	0	13	Item	4.853.000	162,50	%		21	Item	4.853.000		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	Item	0	10	Item		10	Item	0	7	Item	5.707.000	70,00	%		17	Item	5.707.000		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Periode penyediaan bahan logistik kantor	0	Bulan	0	12	Bulan		12	Bulan	0	9	Bulan	4.250.000	75,00	%		21	Bulan	4.250.000		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	0	Item	0	5	Item		5	Item	13.192.000	9	Item	13.171.800	180,00	%	99,85	14	Item	13.171.800		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	Laporan	0	3	Laporan		1	Laporan	154.073.455		Laporan	126.998.292		%	82,43	3	Laporan	126.998.292		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan	378.000.000	3	Bulan	129.686.442	25,00	%	34,31	15	Bulan	129.686.442	125,00	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpon dan PDAM	0	Bulan	0	12	Bulan		12	Bulan	243.000.000	9	Bulan	204.042.079	125,00	%	83,97	21	Bulan	204.042.079		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0	Laporan	0	1	Laporan		1	Laporan	135.000.000		Laporan	134.860.276		%	99,90	1	Laporan	134.860.276		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	60	Unit		56	Unit		64	Unit		15	Unit		23,44	%	nan	71	Unit		118,33	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52			
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasioan dan lapangan yang dipelihara dn dibayarkan pajak dan perizinannya	0 Unit	0	24 Unit		24 Unit	0	14 Unit	75.607.000	58,33 %		38 Unit	75.607.000	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	60 Unit		40 Unit	0	30 Unit	6.245.000	75,00 %		90 Unit	6.245.000	%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Gedung kantor	0 Paket	0	3 Paket		3 Paket	0	Paket		%		3 Paket		%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 %	127.052.112.500	0 %		0 %	16.029.025.909	%	4.351.729.602	%	27,15	%	4.351.729.602	%	3,43	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase pemenuhan dokumen penilaian SAKIP	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi fisik	0 %	5.039.931.500	0 %		0 %	400.000.000	%	41.656.800	%	10,41	%	41.656.800	%	0,83	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase realisasi keuangan	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	2.791.346.500	5 dokumen		1 dokumen	304.673.000	5 dokumen	210.066.568	500,00 %	68,95	10 dokumen	210.066.568	200,00 %	7,53	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	2.248.585.000	5 laporan		5 laporan	95.327.000	5 laporan	49.654.693	100,00 %	52,09	10 laporan	49.654.693	50,00 %	2,21	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang difasilitasi	100 %	95.158.904.000	100 %		100 %	11.979.852.261	100 %	2.898.342.541	100,00 %	24,19	200 %	2.898.342.541	200,00 %	3,05	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 orang/bulan	93.699.027.500	93 orang/bulan		93 orang/bulan	11.856.732.261	93 orang/bulan	11.390.122.430	100,00 %	96,06	186 orang/bulan	11.390.122.430	50,00 %	12,16	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	1.459.876.500	12 dokumen		12 dokumen	123.120.000	12 dokumen	121.760.000	100,00 %	98,90	24 dokumen	121.760.000	50,00 %	8,34	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penataan administrasi BMD	100 %	118.750.000	100 %		100 %	50.000.000	100 %	31.124.249	100,00 %	62,25	200 %	31.124.249	200,00 %	26,21	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	118.750.000	4 laporan		4 laporan	50.000.000	4 laporan	31.124.249	100,00 %	62,25	8 laporan	31.124.249	50,00 %	26,21	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	0 %		0 %		0 %		%		%	nan	%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0	paket		0 paket	0	paket		%		paket		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	orang		0 orang	0	orang		%		orang		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 %	4.960.796.000	100 %		100 %	463.694.748	95,8 %	123.022.335	95,80 %	26,53	195,8 %	123.022.335	195,80 %	2,48	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	5 paket	317.904.000	2 paket		1 paket	24.977.172	1 paket	21.850.000	100,00 %	87,48	3 paket	21.850.000	60,00 %	6,87	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlenkapan kantor yang Disediakan	11 paket	1.094.000.000	5 paket		2 paket	131.832.000	2 paket	120.518.090	100,00 %	91,42	7 paket	120.518.090	63,64 %	11,02	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	277.553.000	1 paket		2 paket	22.796.000	2 paket	22.716.000	100,00 %	99,65	3 paket	22.716.000	42,86 %	8,18	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	726.947.000	2 paket		2 paket	104.751.576	2 paket	82.090.700	100,00 %	78,37	4 paket	82.090.700	50,00 %	11,29	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0	dokumen		0 dokumen	0	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	205 laporan	2.544.392.000	50 laporan		50 laporan	179.338.000	40 laporan	112.716.607	80,00 %	62,85	90 laporan	112.716.607	43,90 %	4,43	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	0 %		0 %		0 %		%		%	nan	%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	0 unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	100 %	14.391.820.000	100 %		100 %	2.797.228.900	100 %	1.171.898.877	100,00 %	41,89	200 %	1.171.898.877	200,00 %	8,14	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporaan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	6.970.644.000	12 laporan		12 laporan	1.074.308.900	12 laporan	916.680.051	100,00 %	85,33	24 laporan	916.680.051	50,00 %	13,15	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	7.421.176.000	12 laporan		12 laporan	1.722.920.000	12 laporan	1.637.237.300	100,00 %	95,03	24 laporan	1.637.237.300	50,00 %	22,06	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	7.381.911.000	100 %		100 %	338.250.000	95,61 %	85.684.800	95,61 %	25,33	195,61 %	85.684.800	195,61 %	1,16	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	57 unit	4.112.043.000	51 unit		54 unit	105.140.000	31 unit	85.103.065	57,41 %	80,94	82 unit	85.103.065	143,86 %	2,07	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	774.870.000	85 unit		85 unit	97.110.000	110 unit	72.590.000	129,41 %	74,75	195 unit	72.590.000	229,41 %	9,37	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilatasi	14 unit	2.494.998.000	14 unit		14 unit	136.000.000	14 unit	126.000.000	100,00 %	92,65	28 unit	126.000.000	200,00 %	5,05	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan Bidang Pengembangan Pemuda	0,21 %	18.108.133.000	0,137 %		0,17 %	700.000.000	0,155 %	110.171.300	91,18 %	15,74	0,146 %	110.171.300	69,52 %	0,61	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase peningkatan peran serta kepemudaan Bidang Pemberdayaan Pemuda	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	persentase kegiatan pengembangan pemuda yang terlaksana Urusan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda	980 %	15.834.133.000	90 %		202 %	625.000.000	378 %	110.171.300	187,13 %	17,63	468 %	110.171.300	47,76 %	0,70	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			persentase kegiatan pengembangan pemuda yang terlaksana Urusan Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
			persentase kegiatan pemberdayaan pemuda yang terlaksana Urusan Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
			persentase kegiatan pemberdayaan pemuda yang terlaksana Urusan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	529 orang	6.263.633.000	80 orang		136 orang	236.057.120	80 orang	206.403.204	58,82 %	87,44	160 orang	206.403.204	30,25 %	3,30	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudan melalui pembentukan Tim Koordinasi Provinsi Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyususnan dan Implementasi Rancana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	6 Dokumen	2.520.500.000	1 Dokumen		2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	130.179.500	100,00 %	86,79	3 Dokumen	130.179.500	50,00 %	5,16	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	0 %	0	%		0 %	0	%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 orang	3.000.000.000	orang		10 orang	163.942.880	4 orang	157.433.166	40,00 %	96,03	4 orang	157.433.166	13,33 %	5,25	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	300 orang	4.050.000.000	orang		100 orang	75.000.000	40 orang	60.045.900	40,00 %	80,06	40 orang	60.045.900	13,33 %	1,48	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	30 organisasi	2.274.000.000	20 organisasi		20 organisasi	75.000.000	20 organisasi		100,00 %		40 organisasi		133,33 %		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui kemitraan berbasi peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 %	2.274.000.000	0 %		100 %	75.000.000	100 %	53.120.600	100,00 %	70,83	100 %	53.120.600	100,00 %	2,34	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100 %	17.122.607.000	100 %		100 %	2.725.000.000	100 %	15.280.000	100,00 %	0,56	100 %	15.280.000	100,00 %	0,09	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 organisasi	17.122.607.000	1 organisasi		1 organisasi	2.725.000.000	1 organisasi	15.280.000	100,00 %	0,56	2 organisasi	15.280.000	200,00 %	0,09	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	4 Laporan	17.122.607.000	1 Laporan		1 Laporan	2.725.000.000	1 Laporan	2.725.000.000	100,00 %	100,00	2 Laporan	2.725.000.000	50,00 %	15,91	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi yang lolos ke event olahraga pelajar tingkat nasional	7 orang	157.569.772.000	15 orang		8 orang	33.375.000.000	60 orang	2.985.713.200	750,00 %	8,95	75 orang	2.985.713.200	1.071,43 %	1,89	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Jumlah atlet berprestasi yang lolos ke event olahraga paralimpik pelajar tingkat nasional	10 orang		20 orang		11 orang		80 orang		-527,27 %		100 orang		1.000,00 %		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terlaksana	100 %	9.731.525.000	100 %		100 %	2.105.000.000	100 %	530.978.000	100,00 %	25,22	200 %	530.978.000	200,00 %	5,46	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan Singkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	36 unit	9.731.525.000	0 unit		12 unit	2.105.000.000	12 unit	1.985.848.000	100,00 %	94,34	12 unit	1.985.848.000	33,33 %	20,41	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan nasional yang terlaksana	100 %	132.620.729.000	125,53 %		100 %	26.650.000.000	63,6 %	593.086.600	63,60 %	2,23	189,13 %	593.086.600	189,13 %	0,45	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase keikutsertaan pada kejuaraan olahraga tingkat nasional	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga paralimpik yang terlaksana	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.030 orang	105.745.612.000	orang		300 orang	2.975.146.960	131 orang	2.938.848.400	43,67 %	98,78	131 orang	2.938.848.400	12,72 %	2,78	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	3 Kegiatan	4.790.000.000	Kegiatan		1 Kegiatan	4.060.000.000	1 Kegiatan	4.042.087.560	100,00 %	99,56	1 Kegiatan	4.042.087.560	33,33 %	84,39	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	26 Kegiatan	22.085.117.000	0 Kegiatan		9 Kegiatan	19.614.853.040	5 Kegiatan	19.449.384.494	55,56 %	99,16	5 Kegiatan	19.449.384.494	19,23 %	88,07	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi urusan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	100 %	15.217.518.000	102 %		100 %	4.620.000.000	77 %	1.861.648.600	77,00 %	40,30	179 %	1.861.648.600	179,00 %	12,23	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi urusan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	0 %		0 %		0 %		%		%		%		%		Dinas Pemuda dan Olahraga	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	42 Pelatda	13.967.518.000	13 Pelatda		14 Pelatda	4.530.000.000	11 Pelatda	3.349.633.535	78,57 %	73,94	24 Pelatda	3.349.633.535	57,14 %	23,98	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di Provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	3 Dokumen	1.250.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	90.000.000	Dokumen	15.050.400	%	16,72	Dokumen	15.050.400	%	1,20	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah Sertifikasi SDM Kebudayaan	20 Kali		0 Kali		4 Kali		4 Kali	937.487.850	100,00 %	inf	4 Kali	937.487.850	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Jumlah peningkatan pelaku seni	1.600 Orang		0 Orang		320 Orang		320 Orang		100,00 %		320 Orang		20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya yang diapresiasi	0 karya		karya		150 karya		60 karya	937.487.850	40,00 %	inf	60 karya	937.487.850	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Latihan (Ditingkatkan Kopetensinya)	200 Orang	0	0 Orang		200 Orang	0	200 Orang	1.294.333.160	100,00 %		200 Orang	1.294.333.160	100,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	263 Lembaga	0	0 Lembaga		53 Lembaga	0	53 Lembaga	928.609.840	100,00 %		53 Lembaga	928.609.840	20,15 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	24 persen		persen		20 persen		20 persen	1.071.940.140	100,00 %	inf	10 persen	1.071.940.140	41,67 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah kunjungan museum	0 orang		orang		46.500 orang		11.000 orang	1.071.940.140	23,66 %	inf	11.000 orang	1.071.940.140	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	3.450 koleksi	0	0 koleksi		690 koleksi	0	690 koleksi	1.227.878.423	100,00 %		690 koleksi	1.227.878.423	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	60 Orang	0	0 Orang		12 Orang	0	12 Orang	56.211.751	100,00 %		12 Orang	56.211.751	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	232.500 Orang	0	0 Orang		46.500 Orang	0	46.500 Orang	2.056.225.694	100,00 %		46.500 Orang	2.056.225.694	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	15 Museum	0	0 Museum		3 Museum	0	3 Museum	592.703.011	100,00 %		3 Museum	592.703.011	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah apresian di Taman Budaya Jambi	55.000 Apresian		Apresian		53.000 Apresian		53.000 Apresian	1.335.494.507	100,00 %	inf	53.000 Apresian	1.335.494.507	96,36 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Jumlah apresian di Taman Budaya Jambi	65.000 Apresian		Apresian		53.000 Apresian		20.000 Apresian		37,74 %		20.000 Apresian		30,77 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi seni budaya tradisional	174 karya		karya		39 karya		39 karya	114.050.057	100,00 %	inf	39 karya	114.050.057	22,41 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	24 objek	0	0 objek		4 objek	0	4 objek	268.815.777	100,00 %		4 objek	268.815.777	16,67 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata tradisoinal	0 Orang	0	0 Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang diberikan Penghargaan Untuk Mereka Yang Berjasa Dalam Pemajuan Kebudayaan	0 sertifikat	0	0 sertifikat		0 sertifikat	0	sertifikat		%		sertifikat		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah fasilitasi seni budaya	90 kelompok		kelompok		66 kelompok		33 kelompok	471.349.440	50,00 %	inf	33 kelompok	471.349.440	36,67 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	0	0 Objek		1 Objek	0	1 Objek	934.137.739	100,00 %		1 Objek	934.137.739	100,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	320 Orang	0	0 Orang		65 Orang	0	65 Orang	153.082.100	100,00 %		65 Orang	153.082.100	20,31 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi lembaga adat	12 lembaga		lembaga		12 lembaga		12 lembaga	750.095.010	100,00 %	inf	12 lembaga	750.095.010	100,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat Yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	0	0 Objek		1 Objek	0	1 Objek	1.311.009.200	100,00 %		1 Objek	1.311.009.200	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2:22:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah yang terpublikasi/ terdokumentasi	1 Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	98.516.676	100,00 %	inf	1 Dokumen	98.516.676	100,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	jumlah karya tulis lokal	5 karya		karya		1 karya		1 karya	98.516.676	100,00 %	inf	1 karya	98.516.676	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	0	0 Orang		40 Orang	0	40 Orang	121.481.876	100,00 %		40 Orang	121.481.876	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	125 Buah		Buah		115 Buah		115 Buah	195.880.985	100,00 %	inf	115 Buah	195.880.985	92,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya terdata	5 objek		objek		1 objek		1 objek	107.158.298	100,00 %	inf	1 objek	107.158.298	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang DIdaftarkan	75 Objek	0	0 Objek		75 Objek	0	75 Objek	42.950.300	100,00 %		75 Objek	42.950.300	100,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	5 objek	0	0 objek		3 objek	0	3 objek	105.259.998	100,00 %		3 objek	105.259.998	60,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah TACB tingkat provinsi jambi	35 orang		orang		7 orang		7 orang	88.722.687	100,00 %	inf	7 orang	88.722.687	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	15 objek	0	0 objek		5 objek	0	5 objek	109.166.567	100,00 %		5 objek	109.166.567	33,33 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Persen		0 Persen		85,64 Persen	15.085.575.684	63,785 Persen	4.061.621.936	74,48 %	26,92	31,8925 Persen	4.061.621.936	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prediket Akuntabilitas Kinerja	80,01 Nilai		0 Nilai		70,01 Nilai	352.043.718	69,415 Nilai	24.046.249	99,15 %	6,83	69,415 Nilai	24.046.249	86,76 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	30 Dokumen	0	0 Dokumen		6 Dokumen	226.997.970	6 Dokumen	154.445.049	100,00 %	68,04	6 Dokumen	154.445.049	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja	20 Laporan	0	0 Laporan		4 Laporan	125.045.748	Laporan	92.859.105	%	74,26	Laporan	92.859.105	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	0	0 Dokumen		4 Dokumen	0	3 Dokumen		75,00 %		3 Dokumen		15,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan		Bulan		12 Bulan	14.634.223.406	12 Bulan	2.995.534.986	100,00 %	20,47	12 Bulan	2.995.534.986	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	0	Bulan		12 Bulan	14.634.223.406	3 Bulan	14.115.178.201	25,00 %	96,45	3 Bulan	14.115.178.201	5,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150 Orang		0 Orang		30 Orang	4.500.000	30 Orang		100,00 %		30 Orang		20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150 Orang	0	0 Orang		30 Orang	4.500.000	5 Orang	2.310.000	16,67 %	51,33	5 Orang	2.310.000	3,33 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyedian Peralatan dan Bahan Penunjang Urusan Pemerintah	8.190 Paket		0 Paket		1.570 Paket	94.808.560	1.570 Paket	236.322.276	100,00 %	249,26	1.570 Paket	236.322.276	19,17 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	85 Paket	0	0 Paket		17 Paket	94.808.560	17 Paket	83.752.440	100,00 %	88,34	17 Paket	83.752.440	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	45 Paket	0	0 Paket		9 Paket	0	Paket	79.989.200	%		Paket	79.989.200	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	9 paket	0	0 paket		9 paket	0	paket	54.066.552	%		paket	54.066.552	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	0	0 paket		12 paket	0	paket	39.400.000	%		paket	39.400.000	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 paket	0	0 paket		12 paket	0	12 paket	60.000.000	100,00 %		12 paket	60.000.000	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 Laporan	0	0 Laporan		150 Laporan	0	150 Laporan	224.818.170	100,00 %		150 Laporan	224.818.170	21,43 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	150 Paket		0 Paket		30 Paket		30 Paket		100,00 %	nan	30 Paket		20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	23 unit	0	0 unit		2 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	150 unit	0	0 unit		30 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Jumlah Penyedian Jasa Yang Disediakan	6.568 Unit		Unit		1.318 Unit		1.318 Unit	532.198.168	100,00 %	inf	1.318 Unit	532.198.168	20,07 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	195 laporan	0	0 laporan		40 laporan	0	40 laporan	661.065.006	100,00 %		40 laporan	661.065.006	20,51 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan	0	0 laporan		12 laporan	0	12 laporan	1.673.420.000	100,00 %		12 laporan	1.673.420.000	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.09	Pemeliharaann Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20.105 Unit		0 Unit		4.265 Unit		4.265 Unit	273.520.257	100,00 %	inf	4.265 Unit	273.520.257	21,21 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	275 unit	0	0 unit		54 unit	0	54 unit	251.000.180	100,00 %		54 unit	251.000.180	19,64 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	37 unit	0	0 unit		7 unit	0	7 unit	336.365.077	100,00 %		7 unit	336.365.077	18,92 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dipelihara/ direhabilitasi	330 unit	0	0 unit		60 unit	0	60 unit		100,00 %		60 unit		18,18 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	73 Nilai	92.092.000.000	69,1 Nilai	13.087.926.823	71 Nilai	14.166.534.812	70,2 Nilai	3.783.250.377	98,87 %	26,71	139,3 Nilai	16.871.177.200	190,82 %	18,32	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan laporan	100 %	421.000.000	99,76 %	89.047.783	100 %	10.941.000	100 %		100,00 %		199,76 %	89.047.783	199,76 %	21,15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	421.000.000	1 Laporan	89.047.783	1 Laporan	10.941.000	1 Laporan	9.710.600	100,00 %	88,75	2 Laporan	98.758.383	33,33 %	23,46	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja ASN	100 %	81.711.000.000	94,01 %	11.428.052.206	100 %	12.879.937.628	100 %	3.243.184.235	100,00 %	25,18	194,01 %	14.671.236.441	194,01 %	17,96	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	79.976.000.000	80 Orang/Bulan	11.160.982.206	90 Orang/Bulan	12.585.950.128	80 Orang/Bulan	12.525.523.557	88,89 %	99,52	160 Orang/Bulan	23.686.505.763	177,78 %	29,62	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.735.000.000	1 Dokumen	267.070.000	1 Dokumen	293.987.500	1 Dokumen	258.467.500	100,00 %	87,92	2 Dokumen	525.537.500	33,33 %	30,29	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100 %	270.000.000	98,78 %	660.000	100 %	11.000.000	100 %	8.203.500	100,00 %	74,58	198,78 %	8.863.500	198,78 %	3,28	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	92 Orang	270.000.000	0 Orang	660.000	2 Orang	11.000.000	2 Orang	14.080.000	100,00 %	128,00	2 Orang	14.740.000	2,17 %	5,46	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100 %	3.285.000.000	99,96 %	499.207.966	100 %	277.226.663	100 %	150.099.459	100,00 %	54,14	199,96 %	649.307.425	199,96 %	19,77	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	147.000.000	1 Paket	23.989.300	1 Paket	5.563.704	1 Paket	5.438.200	100,00 %	97,74	2 Paket	29.427.500	200,00 %	20,02	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	498.000.000	1 Paket	39.397.550	1 Paket	23.999.000	1 Paket	23.999.000	100,00 %	100,00	2 Paket	63.396.550	200,00 %	12,73	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	276.000.000	1 Paket	53.318.000	1 Paket	40.800.000	1 Paket	50.756.000	100,00 %	124,40	2 Paket	104.074.000	200,00 %	37,71	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	462.000.000	1 Paket	55.217.000	1 Paket	49.999.710	1 Paket	30.136.175	100,00 %	60,27	2 Paket	85.353.175	200,00 %	18,47	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	8.655.000	14 Dokumen	5.207.778	4 Dokumen	5.180.000	28,57 %	99,47	8 Dokumen	13.835.000	9,52 %	17,29	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1.822.000.000	120 Laporan	318.631.116	120 Laporan	151.656.471	120 Laporan	261.893.755	100,00 %	172,69	240 Laporan	580.524.871	200,00 %	31,86	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	0 Persen		0 Persen		100 Persen	10.324.000	100 Persen	10.209.000	100,00 %	98,89	50 Persen	10.209.000	%		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit		3 Unit	10.324.000	3 Unit	10.209.000	100,00 %	98,89	3 Unit	10.209.000	%		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100 %	2.203.000.000	96,51 %	392.421.868	100 %	438.428.521	100 %	158.909.094	100,00 %	36,25	196,51 %	551.330.962	196,51 %	25,03	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.539.000.000	12 Laporan	264.556.868	12 Laporan	300.798.000	12 Laporan	276.002.658	100,00 %	91,76	24 Laporan	540.559.526	1.200,00 %	35,12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	664.000.000	12 Laporan	127.865.000	12 Laporan	137.630.521	12 Laporan	119.449.700	100,00 %	86,79	24 Laporan	247.314.700	200,00 %	37,25	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100 %	4.202.000.000	99,32 %	678.537.000	100 %	538.677.000	100 %	212.645.089	100,00 %	39,48	199,32 %	891.182.089	199,32 %	21,21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	246.000.000	1 Unit	39.167.500	1 Unit	39.240.000	1 Unit	29.235.656	100,00 %	74,50	2 Unit	68.403.156	200,00 %	27,81	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	1.888.000.000	52 Unit	376.436.926	52 Unit	309.212.000	52 Unit	342.128.250	100,00 %	110,65	104 Unit	718.565.176	200,00 %	38,06	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	354 Unit	517.000.000	354 Unit	97.794.500	354 Unit	35.810.000	354 Unit	66.131.000	100,00 %	184,67	708 Unit	163.925.500	200,00 %	31,71	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1.551.000.000	2 Unit	165.138.074	2 Unit	154.415.000	2 Unit	154.105.648	100,00 %	99,80	4 Unit	319.243.722	200,00 %	20,58	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Daerah	
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79,3 nilai	5.184.150.000	68,1 nilai	687.562.251	71,3 nilai	507.499.856	68,05 nilai	136.705.360	95,44 %	26,94	136,15 nilai	824.267.611	171,69 %	15,90	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
			Indeks pembangunan literasi masyarakat	71 nilai		62,84 nilai		63 nilai		65,43 nilai		103,86 %		128,27 nilai		180,66 %		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan perpustakaan provinsi	100 %	3.169.000.000	99,72 %	537.013.128	100 %	335.499.856	100 %	89.736.780	100,00 %	26,75	199,72 %	626.749.908	199,72 %	19,78	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi																	
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	81 Layanan	1.764.000.000	51 Layanan	399.276.172	61 Layanan	293.499.964	61 Layanan	293.940.773	100,00 %	100,15	112 Layanan	693.216.945	138,27 %	39,30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7.350 Eksemplar	1.159.000.000	910 Eksemplar	112.737.103	1.250 Eksemplar	20.999.872	Eksemplar	19.279.952	%	91,81	910 Eksemplar	132.017.055	12,38 %	11,39	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000	1 Perpustakaan	246.000.000	1 Perpustakaan	24.999.853	1 Perpustakaan	21.000.020	1 Perpustakaan	20.890.020	100,00 %	99,48	2 Perpustakaan	45.889.873	200,00 %	18,65	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tingkat gemar membaca Provinsi Jambi	41 %	2.015.150.000	35,06 %	150.549.123	40 %	172.000.000	40 %	46.968.580	100,00 %	27,31	75,06 %	197.517.703	183,07 %	9,80	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																	
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																	
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																	
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	170 Perpustakaan	2.015.150.000	26 Perpustakaan	150.549.123	28 Perpustakaan	172.000.000	28 Perpustakaan	164.523.580	100,00 %	95,65	54 Perpustakaan	315.072.703	31,76 %	15,64	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Predikat Pengawasan Kearsipan	91 Predikat	5.284.000.000	82 Predikat	330.582.967	81 Predikat	644.000.000	90 Predikat	116.356.251	111,11 %	18,07	172 Predikat	446.939.218	189,01 %	8,46	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase pengelolaan arsip dinamis	100 %	1.560.000.000	99,28 %		100 %	76.004.636	100 %	17.138.000	100,00 %	22,55	199,28 %	17.138.000	199,28 %	1,10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.386 Berkas	300.000.000	231 Berkas		231 Berkas	33.963.000	231 Berkas	32.631.000	100,00 %	96,08	462 Berkas	32.631.000	33,33 %	10,88	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan	27 Berkas	1.260.000.000	27 Berkas		27 Berkas	42.041.636	27 Berkas	42.041.636	100,00 %	100,00	54 Berkas	42.041.636	200,00 %	3,34	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pengelolaan arsip statis	100 %	1.444.000.000	99,98 %		100 %	152.661.000	100 %	39.630.000	100,00 %	25,96	199,98 %	39.630.000	199,98 %	2,74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	1.500 Arsip	1.444.000.000	250 Arsip		250 Arsip	152.661.000	250 Arsip	151.027.716	100,00 %	98,93	500 Arsip	151.027.716	33,33 %	10,46	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang dikelola dalam SIKN dan JIKN	100 %	2.280.000.000	99,64 %	330.582.967	100 %	415.334.364	100 %	59.588.251	100,00 %	14,35	199,64 %	390.171.218	199,64 %	17,11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2.100 Pengguna	640.000.000	350 Pengguna	28.950.103	350 Pengguna	21.376.000	350 Pengguna	19.005.197	100,00 %	88,91	700 Pengguna	47.955.300	33,33 %	7,49	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	1.640.000.000	1 Laporan	301.632.864	1 Laporan	393.958.364	1 Laporan	301.673.940	100,00 %	76,58	2 Laporan	603.306.804	200,00 %	36,79	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	55.800,3 Ton	41.533.849.053	73.447 Ton		55.136,7 Ton	7.253.849.053	45.187,8 Ton	2.644.145.240	81,96 %	36,45	118.634,8 Ton	2.644.145.240	212,61 %	6,37	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	51.194,5 Ton	14.264.141.600	65.190 Ton		50.320 Ton	759.141.600	40.573,8 Ton	659.827.000	80,63 %	86,92	105.763,8 Ton	659.827.000	206,59 %	4,63	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	12.500 Unit	14.264.141.600	3.973 Unit		2.500 Unit	759.141.600	348 Unit	1.315.398.400	13,92 %	173,27	4.321 Unit	1.315.398.400	34,57 %	9,22	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	6.775 Ton	4.140.159.210	7.890 Ton		4.816,7 Ton	100.159.210	4.614,2 Ton		95,80 %		12.504,2 Ton		184,56 %		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	1.750 Unit	4.140.159.210	1.809 Unit		350 Unit	100.159.210	2 Unit	6.061.600	0,57 %	6,05	1.811 Unit	6.061.600	103,49 %	0,15	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang meningkat	170 Izin		0 Izin		34 Izin		Izin		%	nan	Izin		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin kapal perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang meningkat	93 Izin		0 Izin		19 Izin		Izin		%	nan	Izin		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 2 (satu) daerah provinsi yang meningkat	100 Kapal		0 Kapal		20 Kapal		Kapal		%	nan	Kapal		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	20.840 Kapal	23.129.548.243	4.080 Kapal		4.180 Kapal	6.394.548.243	3.359 Kapal	1.984.318.240	80,36 %	31,03	7.439 Kapal	1.984.318.240	35,70 %	8,58	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tersedia	7 Unit	18.939.515.443	2 Unit		1 Unit	6.144.515.443	1 Unit	3.198.077.700	100,00 %	52,05	3 Unit	3.198.077.700	42,86 %	16,89	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan yang terlaksana	2 Layanan	4.190.032.800	1,6 Layanan		2 Layanan	250.032.800	2 Layanan	241.768.997	100,00 %	96,69	3,6 Layanan	241.768.997	180,00 %	5,77	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang tersedia	10 Kapal		0 Kapal		2 Kapal		Kapal		%	nan	Kapal		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan	Jumlah izin kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di	25 Kapal		0 Kapal		5 Kapal		Kapal		%	nan	Kapal		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	laut, sungai, danau , waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang tersedia																
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Kapal		0 Kapal		20 Kapal		Kapal		%	nan	Kapal		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	64.843,6 Ton	32.832.936.884	50.807,1 Ton		60.886 Ton	5.158.436.884	49.595 Ton	1.960.376.020	81,46 %	38,00	100.402,1 Ton	1.960.376.020	154,84 %	5,97	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang meningkat	40 izin		0 izin		30 izin		izin		%	nan	izin		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan di laut yang meningkat	5 Izin		0 Izin		3 Izin		Izin		%	nan	Izin		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah izin kapal pengangkut pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang tersedia	10 Izin		0 Izin		2 Izin		Izin		%	nan	Izin		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memiliki Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di laut dan lintas Kabupaten/Kota yang tersedia	37 Kelompok		0 Kelompok		7 Kelompok		Kelompok		%	nan	Kelompok		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumkah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Kegiatan	2.479.108.800	1 Kegiatan		1 Kegiatan	144.108.800	1 Kegiatan	47.671.000	100,00 %	33,08	2 Kegiatan	47.671.000	200,00 %	1,92	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat	2 Dokumen	2.479.108.800	2 Dokumen		2 Dokumen	144.108.800	Dokumen	142.550.200	%	98,92	2 Dokumen	142.550.200	100,00 %	5,75	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Kegiatan	30.353.828.084	0 Kegiatan		2 Kegiatan	5.014.328.084	2 Kegiatan	1.912.705.020	100,00 %	38,14	2 Kegiatan	1.912.705.020	100,00 %	6,30	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas DaerahKabupaten/ Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	30 Unit	2.571.797.600	6 Unit		6 Unit	277.297.600	6 Unit	270.341.763	100,00 %	97,49	12 Unit	270.341.763	40,00 %	10,51	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas DaerahKabupaten/ Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	500 Unit	27.782.030.484	184 Unit		100 Unit	4.737.030.484	95 Unit	4.633.572.874	95,00 %	97,82	279 Unit	4.633.572.874	55,80 %	16,68	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Pesisir, Ruang Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola Secara Berkelanjutan	1 Kawasan	6.225.936.193	0 Kawasan		2 Kawasan	1.155.936.167	Kawasan	227.704.500	%	19,70	Kawasan	227.704.500	%	3,66	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase wilayah perairan yang di kelola berdasarkan RZWP3K	95 %	6.225.936.161	%		75 %	1.155.936.161	%	227.704.500	%	19,70	%	227.704.500	%	3,66	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen materi teknis muatan perairan pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen final RZWP3K	1 Dokumen	1	1 Dokumen		1 Dokumen	1	Dokumen		%		1 Dokumen		100,00 %		Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola	39.143,44 Ha	4.717.968.080	Ha		5.713,04 Ha	577.968.080	Ha	543.032.461	%	93,96	Ha	543.032.461	%	11,51	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	240 Orang	1.507.968.080	0 Orang		60 Orang	577.968.080	Orang	227.829.603	%	39,42	Orang	227.829.603	%	15,11	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah perizinan yang sesuai dengan RZWP3K yang diterbitkan	10 dokumen	32	0 dokumen		2 dokumen	6	dokumen		%		dokumen		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.02.0001	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional	Jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	2 Rekomendasi	2	0 Rekomendasi		0 Rekomendasi	0	Rekomendasi		%		Rekomendasi		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bbawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi yang diterbitkan	10 Rekomendasi	10	0 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2	Rekomendasi		%		Rekomendasi		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional	Jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal dan tradisional yang diterbitkan	10 Rekomendasi	10	0 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2	Rekomendasi		%		Rekomendasi		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut	Jumlah lokasi perairan dallam sistem kadaster laut	10 Dokumen	10	0 Dokumen		2 Dokumen	2	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		0 Kelompok		4 Kelompok		Kelompok		%	nan	Kelompok		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	50 %	5.795.686.089	50 %		50 %	672.486.089	25 %	105.400.000	50,00 %	15,67	37,5 %	105.400.000	75,00 %	1,82	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang Terawasi	70 %	4.164.596.089	61,5 %		66 %	449.596.089	66 %	105.400.000	100,00 %	23,44	127,5 %	105.400.000	182,14 %	2,53	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	16 Dokumen	4.164.596.089	2 Dokumen		3 Dokumen	449.596.089	3 Dokumen	388.591.891	100,00 %	86,43	5 Dokumen	388.591.891	31,25 %	9,33	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	10 Dokumen	0	2 Dokumen		2 Dokumen	0	Dokumen		%		2 Dokumen		20,00 %		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	84 %	1.631.090.000	0 %		80 %	222.890.000	80 %		100,00 %		80 %		95,24 %		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	15 Dokumen	1.631.090.000	0 Dokumen		3 Dokumen	222.890.000	3 Dokumen	222.701.000	100,00 %	99,92	3 Dokumen	222.701.000	20,00 %	13,65	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu)	15 Dokumen	0	0 Dokumen		3 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20					4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST		ST				ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya																							
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	4.120	Ton	16.881.055.520	40,8	Ton		4.100	Ton	846.302.940	4.100	Ton	855.647.265	100,00	%	101,10	4.140,8	Ton	855.647.265	100,50	%	5,07	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	20	Izin	7.951.419.340	4	Izin		4	Izin	334.619.340	3	Izin	282.922.100	75,00	%	84,55	7	Izin	282.922.100	35,00	%	3,56	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berdasarkan skala usaha dan resiko	3	Dokumen	7.951.419.340	3	Dokumen		3	Dokumen	334.619.340	3	Dokumen	501.650.600	100,00	%	149,92	6	Dokumen	501.650.600	200,00	%	6,31	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan kemanan pangan	12	Kelompok	6.677.485.780	5	Kelompok		7	Kelompok	244.533.200	7	Kelompok	422.109.165	100,00	%	172,62	12	Kelompok	422.109.165	100,00	%	6,32	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	13	Unit Usaha	3.902.539.200	13	Unit Usaha		13	Unit Usaha	72.739.200	13	Unit Usaha	272.257.365	100,00	%	374,29	26	Unit Usaha	272.257.365	200,00	%	6,98	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah unit usaha yang diberikan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	65	Unit Usaha	2.774.946.580	13	Unit Usaha		13	Unit Usaha	171.794.000	13	Unit Usaha	307.602.400	100,00	%	179,05	26	Unit Usaha	307.602.400	40,00	%	11,08	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan danPemasaran Skala Menengah dan Besar																								
	3.25.06.1.02.003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan KeamananHasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produkyang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																								
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	1	dokumen	2.252.150.400	1	dokumen		1	dokumen	267.150.400	1	dokumen	150.616.000	100,00	%	56,38	2	dokumen	150.616.000	200,00	%	6,69	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan evaluasi	50	Unit Usaha	2.252.150.400	15	Unit Usaha		10	Unit Usaha	267.150.400	10	Unit Usaha	215.242.600	100,00	%	80,57	25	Unit Usaha	215.242.600	50,00	%	9,56	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5	Indeks	140.623.072.816	1	Indeks		5	Indeks	22.947.274.530	5	Indeks	6.239.074.577	100,00	%	27,19	6	Indeks	6.239.074.577	120,00	%	4,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Persentase Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	4	Nilai		4	Nilai		4	Nilai		4	Nilai		100,00	%		8	Nilai		200,00	%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	100	%	120.950.857.727	25	%		100	%	20.469.461.041	25	%	5.614.856.841	25,00	%	27,43	50	%	5.614.856.841	50,00	%	4,64	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	160	orang/bulan	118.427.259.327	154	orang/bulan		156	orang/bulan	20.170.862.641	156	orang/bulan	19.823.450.833	100,00	%	98,28	310	orang/bulan	19.823.450.833	193,75	%	16,74	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	2.523.598.400	1	Dokumen		1	Dokumen	298.598.400	1	Dokumen	280.800.600	100,00	%	94,04	2	Dokumen	280.800.600	200,00	%	11,13	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	.XX.01.1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	%	1.287.887.200	100	%		100	%	147.887.200	100	%	34.495.000	100,00	%	23,33	200	%	34.495.000	200,00	%	2,68	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.625	Paket	0	325	Paket		325	Paket	0		Paket			%		325	Paket		20,00	%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	Orang	418.000.000	20	Orang		20	Orang	18.000.000	20	Orang	14.660.000	100,00	%	81,44	40	Orang	14.660.000	40,00	%	3,51	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200	Orang	869.887.200	200	Orang		200	Orang	129.887.200		Orang	107.898.200		%	83,07	200	Orang	107.898.200	100,00	%	12,40	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	100	%	3.838.033.770	25	%		100	%	508.033.770	25	%	110.528.696	25,00	%	21,76	50	%	110.528.696	50,00	%	2,88	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	Paket	0	3	Paket		3	Paket	0		Paket			%		3	Paket		20,00	%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25	Paket	1.274.517.520	5	Paket		5	Paket	74.517.520	5	Paket	72.973.320	100,00	%	97,93	10	Paket	72.973.320	40,00	%	5,73	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	0	0	Paket		1	Paket	0		Paket			%			Paket			%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10	Paket	222.800.000	2	Paket		2	Paket	22.800.000	2	Paket	11.834.000	100,00	%	51,90	4	Paket	11.834.000	40,00	%	5,31	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	Paket	335.024.250	2	Paket		2	Paket	35.024.250	2	Paket	35.024.250	100,00	%	100,00	4	Paket	35.024.250	40,00	%	10,45	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	38.640.000	1	Dokumen		1	Dokumen	8.640.000	1	Dokumen	8.640.000	100,00	%	100,00	2	Dokumen	8.640.000	200,00	%	22,36	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	1.967.052.000	12	Laporan		12	Laporan	367.052.000	12	Laporan	300.594.900	100,00	%	81,89	24	Laporan	300.594.900	200,00	%	15,28	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan	90	%	4.209.582.100	90	%		90	%	642.582.100	90	%	157.903.500	100,00	%	24,57	180	%	157.903.500	200,00	%	3,75	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	90	%		90	%		90	%		90	%		100,00	%		180	%		200,00	%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	100	%		25	%		100	%		25	%		25,00	%		50	%		50,00	%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	1.219.899.600	1	Dokumen		2	Dokumen	179.899.600	1	Dokumen	149.977.600	50,00	%	83,37	2	Dokumen	149.977.600	100,00	%	12,29	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	0	0	Dokumen		2	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	Laporan	764.831.200	10	Laporan		10	Laporan	157.831.200	10	Laporan	118.829.200	100,00	%	75,29	20	Laporan	118.829.200	200,00	%	15,54	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	2.224.851.300	1	Laporan		1	Laporan	304.851.300	1	Laporan	269.207.000	100,00	%	88,31	2	Laporan	269.207.000	200,00	%	12,10	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	100	%	2.308.224.000	100	%		100	%	170.822.400	100	%	34.820.500	100,00	%	20,38	200	%	34.820.500	200,00	%	1,51	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	Dokumen	0	0	Dokumen		1	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan	2.308.224.000	2	Laporan		2	Laporan	170.822.400	2	Laporan	129.045.600	100,00	%	75,54	4	Laporan	129.045.600	200,00	%	5,59	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	6	Laporan	2.131.269.900	3	Laporan		6	Laporan	131.269.900	3	Laporan	27.406.000	50,00	%	20,88	6	Laporan	27.406.000	100,00	%	1,29	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	Unit	843.069.900	10	Unit		10	Unit	43.069.900	10	Unit	27.406.000	100,00	%	63,63	20	Unit	27.406.000	40,00	%	3,25	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50	Unit	1.288.200.000	10	Unit		10	Unit	88.200.000	10	Unit	88.125.000	100,00	%	99,91	20	Unit	88.125.000	40,00	%	6,84	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipenuhi	90	%	3.158.108.119	45	%		90	%	538.108.119	45	%	123.266.740	50,00	%	22,91	90	%	123.266.740	100,00	%	3,90	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan		1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	5.000.000	100,00	%	100,00	2	Laporan	5.000.000	200,00	%	20,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	3.133.108.119	4	Laporan		4	Laporan	533.108.119	4	Laporan	504.802.360	100,00	%	94,69	8	Laporan	504.802.360	200,00	%	16,11	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100	%	2.739.110.000	100	%		100	%	339.110.000	100	%	135.797.300	100,00	%	40,05	200	%	135.797.300	200,00	%	4,96	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59	Unit	2.208.310.000	59	Unit		59	Unit	208.310.000	59	Unit	207.793.954	100,00	%	99,75	118	Unit	207.793.954	200,00	%	9,41	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajjak dan perizinannya	4	Unit	530.800.000	4	Unit		4	Unit	130.800.000	4	Unit	150.196.900	100,00	%	114,83	8	Unit	150.196.900	200,00	%	28,30	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15	Unit	0	0	Unit		3	Unit	0		Unit			%			Unit			%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20	Unit	0	10	Unit		20	Unit	0	20	Unit	24.396.000	100,00	%		30	Unit	24.396.000	150,00	%		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
	2.2.222	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100	Persen			Persen		20	Persen		20	Persen	446.311.884	100,00	%	inf	10	Persen	446.311.884	10,00	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	jumlah pelaksanaan event	0	event			event		7	event		7	event	446.311.884	100,00	%	inf	7	event	446.311.884		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	34	Dokumen	0	0	Dokumen		7	Dokumen	0	7	Dokumen	931.404.296	100,00	%		7	Dokumen	931.404.296	20,59	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																								
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6	Kegiatan	0	0	Kegiatan		2	Kegiatan	0	2	Kegiatan	142.848.844	100,00	%		2	Kegiatan	142.848.844	33,33	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	89	Persen			Persen		18	Persen		6	Persen	265.928.982	33,33	%	inf	3	Persen	265.928.982	3,37	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah DTW unggulan provinsi	0	DTW			DTW		4	DTW			DTW			%	nan		DTW			%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	0	Dokumen			Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen	262.868.982	100,00	%	inf	2	Dokumen	262.868.982		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0	Objek	0	0	Objek		0	Objek	0		Objek			%			Objek			%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata yang tersedia dan terpelihara	5	unit	0	0	unit		1	unit	0	1	unit	551.699.800	100,00	%		1	unit	551.699.800	20,00	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	300	Orang	0	0	Orang		60	Orang	0	60	Orang	244.770.282	100,00	%		60	Orang	244.770.282	20,00	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peningkatan SDM tatakelola DTW	0	Peserta			Peserta		60	Peserta			Peserta			%	nan		Peserta			%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Dinas Kebudayaan dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Pariwisata	
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah SDM pengelola destinasi pariwisata provinsi	0 Laporan	0	0 Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi																	
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	0 industri		industri		50 industri		50 industri	3.060.000	100,00 %	inf	50 industri	3.060.000	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	5 Laporan	0	0 Laporan		1 Laporan	0	1 Laporan	138.205.320	100,00 %		1 Laporan	138.205.320	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tingkat Menengah Tinggi)	250 unit	0	0 unit		50 unit	0	50 unit	6.000.000	100,00 %		50 unit	6.000.000	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi																	
	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	100 Persen		Persen		20 Persen		Persen		%	nan	Persen		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	100 Persen		Persen		19 Persen		7 Persen	87.563.000	36,84 %	inf	3,5 Persen	87.563.000	3,50 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen pendukung kota kreatif	0 dokumen		dokumen		1 dokumen		dokumen		%	nan	dokumen		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen analisa ekraf	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	87.563.000	100,00 %	inf	1 dokumen	87.563.000	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	5 Dokumen	0	0 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen	114.808.000	100,00 %		1 Dokumen	114.808.000	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual																	
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah hasil dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekraf, serta pemanfaatan kekayaan intelektual pelaku ekraf	5 Orang	0	0 Orang		1 Orang	0	1 Orang	29.620.000	100,00 %		1 Orang	29.620.000	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Dokumen	0	Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen		100,00 %		1 Dokumen		33,33 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	100 Persen		Persen		19 Persen		7 Persen	15.186.875	36,84 %	inf	3,5 Persen	15.186.875	3,50 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	jumlah fasilitasi standarisasi kompetensi profesi	0 orang		orang		60 orang		orang		%	nan	orang		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif	225 Dokumen	0	0 Dokumen		45 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi manajemen pemasaran bagi pelaku ekraf	0 orang		orang		45 orang		45 orang	15.186.875	100,00 %	inf	45 orang	15.186.875	%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	225 Orang	0	0 Orang		45 Orang	0	45 Orang	62.131.875	100,00 %		45 Orang	62.131.875	20,00 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan kabupaten/kota	0 Persen		100 Persen		100 Persen	7.699.340.490	37,7 Persen	2.546.020.967	37,70 %	33,07	68,85 Persen	2.546.020.967	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan	0 kabupaten/ kota		100 kabupaten/ kota		100 kabupaten/ kota	153.050.000	91,35 kabupaten/ kota	12.480.000	91,35 %	8,15	191,35 kabupaten/ kota	12.480.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	0 laporan	0	0 laporan		11 laporan	71.000.000	5 laporan	46.850.000	45,45 %	65,99	5 laporan	46.850.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0 dokumen	0	0 dokumen		2 dokumen	82.050.000	1,2 dokumen	82.049.900	60,00 %	100,00	1,2 dokumen	82.049.900	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan Bersertifikat	0 komoditi		6 komoditi		6 komoditi	7.418.095.208	5 komoditi	2.512.183.396	83,33 %	33,87	11 komoditi	2.512.183.396	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	0 sertifikat	0	0 sertifikat		425 sertifikat	294.320.000	179 sertifikat	291.761.404	42,12 %	99,13	179 sertifikat	291.761.404	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat jenis/ varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 laporan	0	0 laporan		14 laporan	7.123.775.208	7 laporan	6.326.560.938	50,00 %	88,81	7 laporan	6.326.560.938	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	0 batang	0	batang		0 batang	0	batang		%		batang		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG Tumbuhan , Mikro Organisme yang dikelola	0 Kab/Kota		2 Kab/Kota		2 Kab/Kota	128.195.282	1 Kab/Kota	21.357.571	50,00 %	16,66	3 Kab/Kota	21.357.571	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	4 laporan	0	4 laporan		4 laporan	128.195.282	3 laporan	113.803.282	75,00 %	88,77	7 laporan	113.803.282	175,00 %		Dinas Perkebunan	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas areal Pengendalian OPT perkebunan dan penanganan Bencana Pertanian	0 persen		90 persen		100 persen	3.577.119.420	13,14 persen	1.351.586.866	13,14 %	37,78	51,57 persen	1.351.586.866	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	0 Kab/Kota		9 Kab/Kota		9 Kab/Kota	3.577.119.420	5 Kab/Kota	1.351.586.866	55,56 %	37,78	14 Kab/Kota	1.351.586.866	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	0 hektar	0	0 hektar		150 hektar	385.166.920	129 hektar	326.344.050	86,00 %	84,73	129 hektar	326.344.050	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 hektar	0	0 hektar		200 hektar	66.900.000	54 hektar	47.700.000	27,00 %	71,30	54 hektar	47.700.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0 hektar	0	0 hektar		400 hektar	3.125.052.500	21 hektar	1.899.046.931	5,25 %	60,77	21 hektar	1.899.046.931	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelengkapan Dokumen Perizinan Perusahaan Perkebunan	100 persen		100 persen		100 persen	2.125.854.100	50,38 persen	873.931.925	50,38 %	41,11	75,19 persen	873.931.925	75,19 %		Dinas Perkebunan	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perkebunan Yang Memenuhi SOP/Ketentuan Yang Berlaku	18 Perusahaan		18 Perusahaan		18 Perusahaan	2.125.854.100	7 Perusahaan	873.931.925	38,89 %	41,11	25 Perusahaan	873.931.925	138,89 %		Dinas Perkebunan	
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	0 dokumen		5 dokumen	125.854.100	3 dokumen	106.082.086	60,00 %	84,29	3 dokumen	106.082.086	%		Dinas Perkebunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 laporan	0	0 laporan		2 laporan	2.000.000.000	1,2 laporan	1.907.468.441	60,00 %	95,37	1,2 laporan	1.907.468.441	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Ketersediaan SDM dan Kelembagaan yang Mapan	0 persen		80 persen		100 persen	8.997.683.360	41,61 persen	3.409.605.700	41,61 %	37,89	60,805 persen	3.409.605.700	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Tenaga Penyuluh yang Terlampil	0 Orang		38 Orang		38 Orang		Orang		%	nan	38 Orang		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0 46	0	46		0 46	0	46		%		46		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	4 Kab/Kota		4 Kab/Kota		4 Kab/Kota	6.997.683.360	2 Kab/Kota	2.464.506.300	50,00 %	35,22	6 Kab/Kota	2.464.506.300	150,00 %		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi teknis, sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 dokumen	0	0 dokumen		1 dokumen	75.000.000	0,5 dokumen	64.795.300	50,00 %	86,39	0,5 dokumen	64.795.300	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	0 laporan	0	5 laporan		5 laporan	6.922.683.360	2 laporan	3.455.205.300	40,00 %	49,91	7 laporan	3.455.205.300	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Mapan	0 Kelompok		8 Kelompok		6 Kelompok	2.000.000.000	3 Kelompok	945.099.400	50,00 %	47,25	11 Kelompok	945.099.400	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	0 unit	0	0 unit		6 unit	500.000.000	4 unit	427.132.000	66,67 %	85,43	4 unit	427.132.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	0 unit	0	0 unit		3 unit	1.500.000.000	2 unit	1.357.761.400	66,67 %	90,52	2 unit	1.357.761.400	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan	0 %		0 %		95 %	6.289.598.605	23,75 %		25,00 %		11,875 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Luas Panen Hortikultura	0 %		0 %		95 %		23,75 %		25,00 %		11,875 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan	0 %		0 %		25 %		6,25 %		25,00 %		3,125 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kebun Binatang	0 %		0 %		70 %		17,5 %		25,00 %		8,75 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	11 Dokumen		3 Dokumen		11 Dokumen	6.289.598.605	11 Dokumen		100,00 %		14 Dokumen		127,27 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	0 Dokumen	0	7 Dokumen		7 Dokumen	3.208.000.000	6 Dokumen	1.101.859.740	85,71 %	34,35	13 Dokumen	1.101.859.740	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pndukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0	6 Laporan		6 Laporan	3.081.598.605	6 Laporan	1.617.324.426	100,00 %	52,48	12 Laporan	1.617.324.426	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	0 %		0 %		63,9 %	535.000.000	15,975 %		25,00 %		7,9875 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	0 %		0 %		12,5 %		3,125 %		25,00 %		1,5625 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Cakupan pengendalian wilayah yang terdampak serangan OPT,Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab/Kota		3 Kab/Kota		11 Kab/Kota	535.000.000	11 Kab/Kota		100,00 %		14 Kab/Kota		127,27 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	0	125 Ha		125 Ha	535.000.000	125 Ha	279.570.363	100,00 %	52,26	250 Ha	279.570.363	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perkebunan																	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	0 persen		100 persen		100 persen	581.591.900	71,87 persen	95.596.600	71,87 %	16,44	85,935 persen	95.596.600	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Ditata	0 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	581.591.900	2 Kegiatan	95.596.600	100,00 %	16,44	4 Kegiatan	95.596.600	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan dan Komoditas Pertanian	0 dokumen	0	2 dokumen		2 dokumen	70.091.900	1,2 dokumen	55.803.000	60,00 %	79,61	3,2 dokumen	55.803.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	0 laporan	0	1 laporan		2 laporan	511.500.000	1,2 laporan	384.552.650	60,00 %	75,18	2,2 laporan	384.552.650	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 unit	0	unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	0 %		0 %		100 %	16.272.656.160	25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Ketersediaan Alat Mesin Pertanian	0 %		0 %		100 %		25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard	0 %		0 %		40 %		10 %		25,00 %		5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	0 %		0 %		20 %		5 %		25,00 %		2,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Peningkatan Penyediaan Ternak	0 %		0 %		2,42 %		0,605 %		25,00 %		0,3025 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Peningkatan Penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH)	0 %		0 %		2,3 %		0,575 %		25,00 %		0,2875 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Peningkatan Kelahiran Bibit Ternak Berkualitas	0 %		0 %		15 %		3,75 %		25,00 %		1,875 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	11 Kab/Kota		3 Kab/Kota		11 Kab/Kota	4.870.000.000	11 Kab/Kota		100,00 %		14 Kab/Kota		127,27 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pndukung Pertanian	0 Laporan	0	11 Laporan		11 Laporan	4.705.000.000	11 Laporan	319.447.212	100,00 %	6,79	22 Laporan	319.447.212	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	77.315.009	100,00 %	46,86	2 Dokumen	77.315.009	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Cakupan Kab/Kota dalam pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	11 Kab/Kota		3 Kab/Kota		11 Kab/Kota	336.000.000	11 Kab/Kota		100,00 %		14 Kab/Kota		127,27 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	0 Sertifikat	0	110 Sertifikat		121 Sertifikat	336.000.000	117 Sertifikat	166.259.346	96,69 %	49,48	227 Sertifikat	166.259.346	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.02.00013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih																	
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Cakupan ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu pada Kab/Kota	11 Kab/Kota		11 Kab/Kota		11 Kab/Kota	1.180.000.000	11 Kab/Kota		100,00 %		22 Kab/Kota		200,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0	Dokumen	0	8	Dokumen		8	Dokumen	112.000.000	6	Dokumen	15.823.200	75,00	%	14,13	14	Dokumen	15.823.200		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0	Laporan	0	4	Laporan		4	Laporan	1.068.000.000	4	Laporan	430.512.500	100,00	%	40,31	8	Laporan	430.512.500		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	10.750	Ekor		0	Ekor		8.600	Ekor	9.886.656.160	261	Ekor		3,03	%		261	Ekor		2,43	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	0	ton	0	500	ton		600	ton	931.156.160	750	ton	711.539.546	125,00	%	76,41	1.250	ton	711.539.546		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	0	ekor	0	13.970	ekor		6.000	ekor	8.955.500.000	261	ekor	182.292.100	4,35	%	2,04	14.231	ekor	182.292.100		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan	0	%		0	%		90	%	1.652.000.000	22,5	%		25,00	%		11,25	%			%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	%		0	%		100	%		25	%		25,00	%		12,5	%			%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	0	%		0	%		100	%		25	%		25,00	%		12,5	%			%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan	11	Kab/Kota		3	Kab/Kota		11	Kab/Kota	701.000.000	11	Kab/Kota		100,00	%		14	Kab/Kota		127,27	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	Laporan	0	11	Laporan		11	Laporan	701.000.000	11	Laporan	409.849.950	100,00	%	58,47	22	Laporan	409.849.950		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Cakupan Kab/Kota dalam pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak	11	Kab/Kota		3	Kab/Kota		11	Kab/Kota	128.000.000	11	Kab/Kota		100,00	%		14	Kab/Kota		127,27	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0	Laporan	0	2	Laporan		11	Laporan	128.000.000	11	Laporan	53.764.400	100,00	%	42,00	13	Laporan	53.764.400		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	13.000	Sampel		2.500	Sampel		2.500	Sampel	460.000.000	2.000	Sampel		80,00	%		4.500	Sampel		34,62	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet	0	Dokumen	0	1	Dokumen		1	Dokumen	460.000.000	1	Dokumen	146.479.300	100,00	%	31,84	2	Dokumen	146.479.300		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	71	Sertifikat		0	Sertifikat		15	Sertifikat	363.000.000	13	Sertifikat		86,67	%		13	Sertifikat		18,31	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	0	Sertifikat	0	0	Sertifikat		15	Sertifikat	363.000.000	13	Sertifikat	74.991.200	86,67	%	20,66	13	Sertifikat	74.991.200		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP	0	Angka		67,91	Angka		73	Angka	16.591.717.790	45	Angka	3.523.883.510	61,64	%	21,24	112,91	Angka	3.523.883.510		%		Dinas Perkebunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52			
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DAERAH																	
			IKM	0 Angka		Angka		0 Angka		Angka		%		Angka		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran	0 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	611.516.280	5 dokumen	194.720.500	83,33 %	31,84	11 dokumen	194.720.500	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen		6 dokumen	303.590.000	5 dokumen	270.918.000	83,33 %	89,24	5 dokumen	270.918.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	0 laporan		4 laporan	307.926.280	2 laporan	285.483.000	50,00 %	92,71	2 laporan	285.483.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan akutansi dan keuangan	0 laporan		1 laporan		1 laporan	14.336.755.932	0,5 laporan	2.869.474.629	50,00 %	20,01	1,5 laporan	2.869.474.629	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang/bulan	0	0 orang/bulan		80 orang/bulan	13.911.595.932	160 orang/bulan	13.091.115.541	200,00 %	94,10	160 orang/bulan	13.091.115.541	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	2 dokumen		2 dokumen	304.440.000	1,2 dokumen	282.590.000	60,00 %	92,82	3,2 dokumen	282.590.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen		4 dokumen	120.720.000	2 dokumen	101.479.900	50,00 %	84,06	2 dokumen	101.479.900	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	0 laporan		1 laporan		1 laporan	16.500.000	0,35 laporan		35,00 %		1,35 laporan		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	0 orang		20 orang	16.500.000	10 orang	10.500.000	50,00 %	63,64	10 orang	10.500.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan kegiatan rutinitas kantor	0 laporan		1 laporan		1 laporan	621.031.889	0,6 laporan	158.817.739	60,00 %	25,57	1,6 laporan	158.817.739	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0 paket	0	0 paket		6 paket	41.164.920	6 paket	41.164.920	100,00 %	100,00	6 paket	41.164.920	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 paket	0	0 paket		48 paket	132.879.636	48 paket	132.416.442	100,00 %	99,65	48 paket	132.416.442	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 paket	0	8 paket		24 paket	84.000.000	10 paket	82.344.274	41,67 %	98,03	18 paket	82.344.274	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0 paket	0	0 paket		2 paket	11.000.000	1,2 paket	9.425.000	60,00 %	85,68	1,2 paket	9.425.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	0 laporan		12 laporan	351.987.333	6 laporan	329.254.923	50,00 %	93,54	6 laporan	329.254.923	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	0 jenis		3 jenis		3 jenis	41.426.393	2,3 jenis		76,67 %		5,3 jenis		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 paket	0	2 paket		2 paket	41.426.393	1,2 paket		60,00 %		3,2 paket		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan surat dan jasa komunikasi SDA dan listrik	0 laporan		2 laporan		2 laporan	398.406.896	0,7 laporan	112.124.817	35,00 %	28,14	2,7 laporan	112.124.817	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	1 laporan		1 laporan	29.996.896	0,3 laporan	29.810.000	30,00 %	99,38	1,3 laporan	29.810.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 laporan	0	1 laporan		1 laporan	368.410.000	0,3 laporan	326.789.848	30,00 %	88,70	1,3 laporan	326.789.848	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	0 unit		67 unit		67 unit	566.080.400	40 unit	188.745.825	59,70 %	33,34	107 unit	188.745.825	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0 unit	0	0 unit		40 unit	439.370.400	23 unit	392.103.506	57,50 %	89,24	23 unit	392.103.506	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	0	0 unit		27 unit	126.710.000	18 unit	126.710.000	66,67 %	100,00	18 unit	126.710.000	%		Dinas Perkebunan	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0	unit		0 unit	0	unit		%		unit		%		Dinas Perkebunan	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Penyuluh dan Petani	0 %		0 %		20 %	547.000.000	5 %		25,00 %		2,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kab/Kota dalam penerapan penyuluhan pertanian	11 Kab/Kota		3 Kab/Kota		11 Kab/Kota	547.000.000	11 Kab/Kota		100,00 %		14 Kab/Kota		127,27 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 Dokumen	0	5 Dokumen		5 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	8.570.000	100,00 %	10,71	10 Dokumen	8.570.000	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	0 Kelompok	0	25 Kelompok		30 Kelompok	467.000.000	30 Kelompok	142.917.800	100,00 %	30,60	55 Kelompok	142.917.800	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Jumlah Kab/Kota dalam penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak	0 Kab/Kota		11 Kab/Kota		11 Kab/Kota		8 Kab/Kota		72,73 %	nan	19 Kab/Kota		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	0 %		0 %		100 %	39.216.744.021	25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	0 %		0 %		100 %		25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Indeks penataan administrasi BMD	0 %		0 %		90 %		22,5 %		25,00 %		11,25 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Indeks layanan administrasi kepegawaian	0 Indeks		0 Indeks		100 Indeks		25 Indeks		25,00 %		25 Indeks		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase peningkatan kualitas SDM yang difasilitasi Bimtek/ Pendidikan/Pelatihan	0 %		0 %		80 %		20 %		25,00 %		10 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	0 %		0 %		100 %		25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	0 %		0 %		100 %		25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	0 %		0 %		80 %		20 %		25,00 %		10 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Indeks / Persentase keselarasan perencanaan	0 %		0 %		100 %		25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	0 %		0 %		100 %		25 %		25,00 %		12,5 %		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	45 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen	731.761.693	9 Dokumen		100,00 %		18 Dokumen		40,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	0	15 Dokumen		15 Dokumen	456.225.983	15 Dokumen	314.793.100	100,00 %	69,00	30 Dokumen	314.793.100	200,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	0 Laporan		2 Laporan	275.535.710	2 Laporan	144.527.350	100,00 %	52,45	2 Laporan	144.527.350	100,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	25 laporan		4 laporan		5 laporan	36.549.470.472	5 laporan		100,00 %		9 laporan		36,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0	3.864 Orang/Bulan		3.864 Orang/Bulan	35.844.830.472	3.864 Orang/Bulan	17.650.472.929	100,00 %	49,24	7.728 Orang/Bulan	17.650.472.929	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	12 Dokumen		12 Dokumen	704.640.000	12 Dokumen	279.930.000	100,00 %	39,73	24 Dokumen	279.930.000	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Peternakan	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan layanan administrasi umum perangkat daerah	35 laporan		7 laporan		7 laporan	108.750.000	7 laporan		100,00 %		14 laporan		40,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	12 Paket		12 Paket	8.750.000	12 Paket		100,00 %		24 Paket		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	3 Laporan		12 Laporan	100.000.000	3 Laporan	51.725.900	25,00 %	51,73	6 Laporan	51.725.900	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis	718.340.000	4 Jenis		100,00 %		8 Jenis		200,00 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	12 Laporan		12 Laporan	577.340.000	12 Laporan	257.486.961	100,00 %	44,60	24 Laporan	257.486.961	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	3 Laporan		12 Laporan	141.000.000	3 Laporan	56.100.000	25,00 %	39,79	6 Laporan	56.100.000	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dipelihara	462 Unit		138 Unit		411 Unit	1.108.421.856	411 Unit		100,00 %		549 Unit		118,83 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 unit	0	325 unit		350 unit	278.421.856	350 unit	103.371.700	100,00 %	37,13	675 unit	103.371.700	%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0	10 unit		11 unit	830.000.000	1 unit		9,09 %		11 unit		%		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	90 %	270.700.280.053	80 %		80 %	50.721.391.613	80 %	11.890.903.616	100,00 %	23,44	80 %	11.890.903.616	88,89 %	4,39	Dinas Kehutanan	
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	0 Indeks		Indeks		0 Indeks		Indeks		%		Indeks		%		Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi	100 %	1.871.919.031	100 %		100 %	336.776.631	50 %	55.555.180	50,00 %	16,50	150 %	55.555.180	150,00 %	2,97	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perangkat Daerah	100 %	1.119.504.351	100 %		100 %	205.986.451	100 %	194.313.260	100,00 %	94,33	200 %	194.313.260	200,00 %	17,36	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan monitoring evaluasi dan update data kehutanan	100 %	752.414.680	100 %		100 %	130.790.180	100 %	95.944.917	100,00 %	73,36	200 %	95.944.917	200,00 %	12,75	Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan	100 %	256.384.716.641	100 %		100 %	46.404.899.194	50 %	10.808.901.553	50,00 %	23,29	150 %	10.808.901.553	150,00 %	4,22	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	253.184.830.293	100 %		100 %	45.741.858.794	100 %	42.582.778.831	100,00 %	93,09	200 %	42.582.778.831	200,00 %	16,82	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	100 %	2.500.470.411	100 %		100 %	506.124.400	100 %	454.297.722	100,00 %	89,76	200 %	454.297.722	200,00 %	18,17	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan laporan keuangan berkala dan tahunan	100 %	699.415.937	100 %		100 %	156.916.000	100 %	125.315.350	100,00 %	79,86	200 %	125.315.350	200,00 %	17,92	Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Administrasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	1 %		%		1 %		%		%	nan	%		%		Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah	1 %		%		1 %		%		%	nan	%		%		Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian	90 %	461.556.000	75 %		80 %	55.645.000	40 %		50,00 %		115 %		127,78 %		Dinas Kehutanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase fasilitasi ASN mengikuti diklat formal	70 %	461.556.000	98,7 %		70 %	55.645.000	%		%		98,7 %		141,00 %		Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	100 %	3.221.725.831	100 %		100 %	2.043.156.325	75 %	590.147.907	75,00 %	28,88	175 %	590.147.907	175,00 %	18,32	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	100 %	71.945.750	100 %		100 %	17.320.075	%	4.681.722	%	27,03	100 %	4.681.722	100,00 %	6,51	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat perlengkapan kantor	100 %	1.356.363.900	100 %		100 %	501.800.729	100 %	419.787.481	100,00 %	83,66	200 %	419.787.481	200,00 %	30,95	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan pengandaan	0 %	343.023.780	100 %		100 %	87.603.300	100 %	24.261.400	100,00 %	27,69	200 %	24.261.400	%	7,07	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Konsumsi Tamu	100 %	5.000.000	100 %		100 %	5.000.000	50 %	2.360.000	50,00 %	47,20	150 %	2.360.000	150,00 %	47,20	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	100 %	1.445.392.401	100 %		100 %	1.431.432.221	58,11 %	1.272.089.449	58,11 %	88,87	158,11 %	1.272.089.449	158,11 %	88,01	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebuuhan BMD untuk penunjang Operasional	1 %		%		1 %		%		%	nan	%		%		Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	100 %	3.924.163.788	100 %		100 %	1.234.905.701	50 %	322.364.872	50,00 %	26,10	150 %	322.364.872	150,00 %	8,21	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase fasilitasi surat menyurat	100 %	135.262.400	100 %		100 %	12.253.600	100 %	11.500.000	100,00 %	93,85	200 %	11.500.000	200,00 %	8,50	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pembayaran tagihan listrik,air dan telekomunikasi dan pemasangan baru	100 %	2.489.388.324	100 %		100 %	508.279.012	67,11 %	453.770.006	67,11 %	89,28	167,11 %	453.770.006	167,11 %	18,23	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan peralataaan dan perlengkapan kantor	100 %	0	100 %		100 %	518.000.000	87,21 %	512.291.679	87,21 %	98,90	187,21 %	512.291.679	187,21 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100 %	1.299.513.064	100 %		100 %	196.373.089	66,07 %	174.120.000	66,07 %	88,67	166,07 %	174.120.000	166,07 %	13,40	Dinas Kehutanan	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	85 %	4.836.198.762	74 %		80 %	646.008.762	40 %	113.934.104	50,00 %	17,64	114 %	113.934.104	134,12 %	2,36	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dibiayai perawatan dan tagihan pajak	117 Unit	4.104.640.079	23 Unit		23 Unit	605.920.079	20 Unit	401.805.839	86,96 %	66,31	43 Unit	401.805.839	36,75 %	9,79	Dinas Kehutanan	
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	12 Unit	731.558.683	Unit		3 Unit	40.088.683	2 Unit		66,67 %		2 Unit		16,67 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan dari Retribusi dan Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,2 %	10.364.689.928	0,28 %		0,2 %	6.409.587.798	0,21 %	2.286.555.054	105,00 %	35,67	0,245 %	2.286.555.054	122,50 %	22,06	Dinas Kehutanan	
			Persentase Penurunan Lahan Kritis melalui Rehabilitasi	1,99 %		1,92 %		1,71 %		2,13 %		124,56 %		2,025 %		101,76 %		Dinas Kehutanan	
			Persentase penurunan laju deforestasi	0,83 %		1,39 %		0,83 %		1,34 %		161,45 %		1,365 %		164,46 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	45 %	449.760.000	30 %		40 %	94.604.265	30 %		75,00 %		60 %		133,33 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	0 Unit	449.760.000	Unit		1 Unit	94.604.265	1 Unit		100,00 %		1 Unit		%		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	85 %	730.223.720	70 %		75 %	525.866.245	70 %	365.671.226	93,33 %	69,54	140 %	365.671.226	164,71 %	50,08	Dinas Kehutanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	4 Dokumen	730.223.720	1 Dokumen		1 Dokumen	525.866.245	2 Dokumen	472.656.226	200,00 %	89,88	3 Dokumen	472.656.226	75,00 %	64,73	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan	70 %		50 %		50 %	164.872.760	50 %	8.450.000	100,00 %	5,13	100 %	8.450.000	142,86 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Hutan	4 %	0	1 %		6 %	51.558.760	2 %	40.865.000	33,33 %	79,26	3 %	40.865.000	75,00 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani																	
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan	98 %	1.800.584.450	24 %		25 %	1.623.984.450	24 %	733.269.723	96,00 %	45,15	48 %	733.269.723	48,98 %	40,72	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	0 Ha	0	Ha		25 Ha	200.000.000	1 Ha	183.029.600	4,00 %	91,51	1 Ha	183.029.600	%		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	419.677.450	Ha		10 Ha	340.677.450	3 Ha	319.611.181	30,00 %	93,82	3 Ha	319.611.181	6,00 %	76,16	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi	600 Kali	1.380.907.000	Kali		120 Kali	1.083.307.000	6 Kali	1.043.921.200	5,00 %	96,36	6 Kali	1.043.921.200	1,00 %	75,60	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83 %	6.856.138.758	1,39 %		0,83 %	3.511.882.078	1,39 %	1.128.526.345	167,47 %	32,13	2,78 %	1.128.526.345	334,94 %	16,46	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan patroli / sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 Laporan	6.856.138.758	Laporan		2 Laporan	2.903.701.278	1 Laporan	2.662.031.003	50,00 %	91,68	1 Laporan	2.662.031.003	50,00 %	38,83	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK serta Pembinaan Kelompok Tani Hutan	50 %		20 %		20 %		20 %		100,00 %	nan	40 %		80,00 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi	65 %		45 %		50 %	390.675.000	45 %		90,00 %		90 %		138,46 %		Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi																	
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	50	%	527.983.000	35	%		40	%	97.703.000	35	%	50.637.760	87,50	%	51,83	70	%	50.637.760	140,00	%	9,59	Dinas Kehutanan	
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar	8	Laporan	527.983.000	2	Laporan		2	Laporan	97.703.000	2	Laporan	81.874.760	100,00	%	83,80	4	Laporan	81.874.760	50,00	%	15,51	Dinas Kehutanan	
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	81	Persen	1.715.626.500	0,39	Persen		0,2	Persen	880.717.760	0,78	Persen	194.900.050	390,00	%	22,13	0,585	Persen	194.900.050	0,72	%	11,36	Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	75	%		55	%		60	%	680.207.660	55	%	146.741.050	91,67	%	21,57	110	%	146.741.050	146,67	%		Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang ditetapkan	0	Dokumen	0		Dokumen		20	Dokumen	156.868.000	3	Dokumen	3.154.500	15,00	%	2,01	3	Dokumen	3.154.500		%		Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Jumlah Luas Rehabilitasi di Areal TAHURA	0	Ha	0		Ha		50	Ha	215.715.860	1	Ha	51.520.000	2,00	%	23,88	1	Ha	51.520.000		%		Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	0	Operasi	0		Operasi		40	Operasi	307.623.800	14	Operasi	300.623.300	35,00	%	97,72	14	Operasi	300.623.300		%		Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	85	%	886.763.400	55	%		65	%	71.928.000	55	%	22.500.000	84,62	%	31,28	110	%	22.500.000	129,41	%	2,54	Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran CITIES	10	Laporan	886.763.400		Laporan		2	Laporan	71.928.000	1	Laporan	71.928.000	50,00	%	100,00	1	Laporan	71.928.000	10,00	%	8,11	Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	85	%	828.863.100	55	%		65	%	128.582.100	55	%	25.659.000	84,62	%	19,96	110	%	25.659.000	129,41	%	3,10	Dinas Kehutanan	
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	luas daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola	10	Ha	828.863.100		Ha		10	Ha	128.582.100	6	Ha	128.551.900	60,00	%	99,98	6	Ha	128.551.900	60,00	%	15,51	Dinas Kehutanan	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	44	Persen	5.621.778.078	21,58	Persen		26	Persen	7.303.596.322	21,58	Persen	517.186.227	83,00	%	7,08	21,58	Persen	517.186.227	49,05	%	9,20	Dinas Kehutanan	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	60,25	%	5.621.778.078	41,62	%		50,2	%	7.303.596.322	41,62	%	517.186.227	82,91	%	7,08	83,24	%	517.186.227	138,16	%	9,20	Dinas Kehutanan	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	12	Kelompok	1.556.071.000		Kelompok		4	Kelompok	1.082.912.457	1	Kelompok	1.003.790.667	25,00	%	92,69	1	Kelompok	1.003.790.667	8,33	%	64,51	Dinas Kehutanan	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																								
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																								
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	0	Ha	4.065.707.078		Ha		1.240	Ha	5.494.283.865	264	Ha		21,29	%		264	Ha			%		Dinas Kehutanan	
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	23,3	%	308.357.800	13,53	%		15,78	%	107.815.000	13,53	%	12.060.000	85,74	%	11,19	13,53	%	12.060.000	58,07	%	3,91	Dinas Kehutanan	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	23	UPTD dan Kelompok	308.357.800	20	UPTD dan Kelompok		17	UPTD dan Kelompok	107.815.000	20	UPTD dan Kelompok	12.060.000	117,65	%	11,19	40	UPTD dan Kelompok	12.060.000	173,91	%	3,91	Dinas Kehutanan	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	12	Kelompok	308.357.800		Kelompok		2	Kelompok	107.815.000	1	Kelompok	57.272.500	50,00	%	53,12	1	Kelompok	57.272.500	8,33	%	18,57	Dinas Kehutanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Persen	75.410.822.013	85,926 Persen		82 Persen	11.377.723.099	85,926 Persen	2.536.535.473	104,79 %	22,29	85,926 Persen	2.536.535.473	102,29 %	3,36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase pemenuhan dokumen penilaian SAKIP	0 Persen		Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Persen		9 Persen		12 Persen		12 Persen		100,00 %	nan	10,5 Persen		23,33 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0	2 Dokumen		2 Dokumen	0	2 Dokumen		100,00 %		4 Dokumen		40,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen		100,00 %		2 Dokumen		40,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen		100,00 %		2 Dokumen		40,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen		100,00 %		2 Dokumen		40,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen		100,00 %		2 Dokumen		40,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	0	2 Laporan		2 Laporan	0	2 Laporan		100,00 %		4 Laporan		40,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	0	8 Laporan		4 Laporan	0	4 Laporan		100,00 %		12 Laporan		30,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	60.067.622.013	100 persen		100 persen	9.711.035.205	100 persen	1.941.065.287	100,00 %	19,99	100 persen	1.941.065.287	100,00 %	3,23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16.474 Orang/Bulan	60.067.622.013	994 Orang/Bulan		966 Orang/Bulan	9.711.035.205	882 Orang/Bulan	9.455.622.211	91,30 %	97,37	1.876 Orang/Bulan	9.455.622.211	11,39 %	15,74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 persen	1.280.000.000	100 persen		100 persen	52.586.800	100 persen	6.060.000	100,00 %	11,52	100 persen	6.060.000	100,00 %	0,47	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	5 Laporan	1.280.000.000	1 Laporan		1 Laporan	52.586.800	1 Laporan	52.586.800	100,00 %	100,00	2 Laporan	52.586.800	40,00 %	4,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	680.000.000	100 persen		100 persen	36.200.000	100 persen	660.000	100,00 %	1,82	100 persen	660.000	100,00 %	0,10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun Yang dipulangkan	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	Orang		0 Orang	0	Orang		%		Orang		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	84 Orang	680.000.000	20 Orang		20 Orang	36.200.000	12 Orang	8.260.000	60,00 %	22,82	32 Orang	8.260.000	38,10 %	1,21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	4.740.000.000	100 persen		100 persen	692.377.951	100 persen	122.074.858	100,00 %	17,63	100 persen	122.074.858	100,00 %	2,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	150.000.000	1 Paket		1 Paket	6.582.320	1 Paket	6.582.320	100,00 %	100,00	2 Paket	6.582.320	40,00 %	4,39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	600.000.000	3 Paket		1 Paket	42.104.665	1 Paket	41.696.000	100,00 %	99,03	4 Paket	41.696.000	80,00 %	6,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Paket	345.000.000	1 Paket		1 Paket	18.623.400	2 Paket	15.779.000	200,00 %	84,73	3 Paket	15.779.000	60,00 %	4,57	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	189.720	1 Dokumen	189.720	100,00 %	100,00	2 Dokumen	189.720	40,00 %	0,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	3.500.000.000	12 Laporan		12 Laporan	624.877.846	12 Laporan	442.345.280	100,00 %	70,79	24 Laporan	442.345.280	40,00 %	12,64	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	57 Laporan	4.028.000.000	6 Laporan		15 Laporan	449.393.143	15 Laporan	199.386.712	100,00 %	44,37	21 Laporan	199.386.712	36,84 %	4,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan	80.000.000	1 Laporan		1 Laporan	3.126.800	1 Laporan	2.265.500	100,00 %	72,45	2 Laporan	2.265.500	40,00 %	2,83	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	38 Laporan	890.000.000	0 Laporan		12 Laporan	99.303.053	12 Laporan	82.874.022	100,00 %	83,46	12 Laporan	82.874.022	31,58 %	9,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	65.000.000	1 Laporan		1 Laporan	3.913.140	1 Laporan	2.802.750	100,00 %	71,62	2 Laporan	2.802.750	40,00 %	4,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	5 Laporan	2.993.000.000	1 Laporan		1 Laporan	343.050.150	1 Laporan	341.230.000	100,00 %	99,47	2 Laporan	341.230.000	40,00 %	11,40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	100 persen	4.615.200.000	100 persen		100 persen	436.130.000	100 persen	267.288.616	100,00 %	61,29	100 persen	267.288.616	100,00 %	5,79	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dan dibayar pajaknya	8 Unit	1.899.600.000	8 Unit		8 Unit	215.440.000	6 Unit	194.718.059	75,00 %	90,38	14 Unit	194.718.059	175,00 %	10,25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	28 Unit	1.177.200.000	28 Unit		28 Unit	139.480.000	28 Unit	138.378.983	100,00 %	99,21	56 Unit	138.378.983	200,00 %	11,75	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 Unit	345.000.000	40 Unit		40 Unit	12.710.000	40 Unit	12.709.500	100,00 %	100,00	80 Unit	12.709.500	40,00 %	3,68	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	4 Unit	1.193.400.000	4 Unit		4 Unit	68.500.000	2 Unit	43.839.400	50,00 %	64,00	6 Unit	43.839.400	150,00 %	3,67	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi Yang Terpetakan	100 Persen	500.000.000	20 Persen		40 Persen	70.808.400	33,17 Persen	5.050.000	82,93 %	7,13	26,585 Persen	5.050.000	26,59 %	1,01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase pengusahaan air tanah yang baik	100 Persen		0 Persen		60 Persen		60 Persen		100,00 %		30 Persen		30,00 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase area pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9 Persen		1 Persen		1 Persen		1 Persen		100,00 %	nan	1 Persen		11,11 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase Pengumpuan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Revisi Pergub NPA, pamanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjatan	9 Kabupaten/ Kota	500.000.000	1 Kabupaten/ Kota		1 Kabupaten/ Kota	70.808.400	1 Kabupaten/ Kota	5.050.000	100,00 %	7,13	2 Kabupaten/ Kota	5.050.000	22,22 %	1,01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	500.000.000	1 Laporan		1 Laporan	70.808.400	1 Laporan	54.087.200	100,00 %	76,39	2 Laporan	54.087.200	50,00 %	10,82	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan	45 persen		persen		25 persen		35,2 persen		140,80 %	nan	17,6 persen		39,11 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral BUkan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambnagan Rakyat	Persentase penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%	nan	Persen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.04.0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Surat Keputusan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		%	nan	Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Pembinaan bla bla bla.....	0 %		%		0 %		%		%	nan	%		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 %		%		25 %		10 %		40,00 %		10 %		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	24,85 Persen	12.082.158.670	1.686,04 Persen		20,21 Persen	1.051.920.000	22,03 Persen	855.273.084	109,01 %	81,31	854,035 Persen	855.273.084	3.436,76 %	7,08	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.05.	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah	Persentase Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%	nan	Persen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		provinsi	perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi																
	3.2.05.1.08	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																	
	3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase pemanfaatan aneka EBT	100 Persen	12.082.158.670	0 Persen		100 Persen	1.051.920.000	1 Persen	855.273.084	1,00 %	81,31	0,5 Persen	855.273.084	0,50 %	7,08	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi yang terkumpul	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	353 Unit	12.082.158.670	0 Unit		33 Unit	1.051.920.000	33 Unit	1.013.229.384	100,00 %	96,32	33 Unit	1.013.229.384	9,35 %	8,39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Berlistrik	99,99 persen	16.510.375.000	99,99 persen		99,99 persen	807.687.733	99,99 persen	9.880.000	100,00 %	1,22	99,99 persen	9.880.000	100,00 %	0,06	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase badan usaha yang melakukan penatausahaan ketenagalistrikan bernilai baik	30 Persen		0 Persen		28 Persen		28 Persen		100,00 %		14 Persen		46,67 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga LIstrik dalam daerah provinsi	Persentase rekomendasi teknis perizinanan berusaha bidang ketanagalistrikan	0 Persen		0 Persen		0 Persen		Persen		%	nan	Persen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan TenagListrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase badan usaha ketenaglisrikan yang taat aturan	100 persen	1.600.000.000	100 persen		100 persen	59.420.000	100 persen	5.050.000	100,00 %	8,50	100 persen	5.050.000	100,00 %	0,32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	20 Laporan	1.600.000.000	4 Laporan		4 Laporan	59.420.000	4 Laporan	38.950.000	100,00 %	65,55	8 Laporan	38.950.000	40,00 %	2,43	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data, informasi dan sasaran penerima manfaat, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik	0 Dokumen	14.910.375.000	0 Dokumen		0 Dokumen	748.267.733	Dokumen	4.830.000	%	0,65	Dokumen	4.830.000	%	0,03	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat idak Mampu	5 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen	90.410.000	1 Dokumen	48.264.500	100,00 %	53,38	2 Dokumen	48.264.500	40,00 %	21,45	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.660 Unit	14.685.375.000	590 Unit		275 Unit	657.857.733	Unit	43.014.000	%	6,54	590 Unit	43.014.000	22,18 %	0,29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PERDAGANGAN																		
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100 persen			persen		100 persen		persen		%	nan	persen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase Tertib Usaha	0 Persen			0 Persen		62 Persen		Persen		%		Persen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea/ Distributor yang diterbitkan	18 Dokumen			0 Dokumen		4 Dokumen		Dokumen		%	nan	Dokumen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1 %			0 %		1 %		%		%	nan	%		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	75 pelakuusaha			0 pelakuusaha		15 pelakuusaha		pelakuusaha		%	nan	pelakuusaha		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah dokumen SKA/API yang diterbitkan tepat waktu	720 Dokumen			0 Dokumen		120 Dokumen		Dokumen		%	nan	Dokumen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkaan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)	41 Persen			0 Persen		10 Persen		Persen		%	nan	Persen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi	0 %			0 %		0 %		%		%	nan	%		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	0 Persen			2,75 Persen		5,9 Persen	4.074.217.330	0,7375 Persen	68.294.000	12,50 %	1,68	1,74375 Persen	68.294.000	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase kinerja realisasi pupuk	0 Persen			0 Persen		92 Persen		11,5 Persen		12,50 %		5,75 Persen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	72 bulan			0 bulan		12 bulan		bulan		%	nan	bulan		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok bapok dan bapokting	0 bulan			0 bulan		12 bulan	4.002.097.330	6 bulan	63.244.000	50,00 %	1,58	6 bulan	63.244.000	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	72 BULAN			0 BULAN		12 BULAN		6 BULAN		50,00 %		6 BULAN		8,33 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pendistribusian sembako pasar murah HBKN	0 laporan		0	11 laporan		11 laporan	4.002.097.330	11 laporan	3.518.679.450	100,00 %	87,92	22 laporan	3.518.679.450	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja											ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11	kab/kota		0	kab/kota		11	kab/kota	72.120.000	5	kab/kota	5.050.000	45,45	%	7,00	5	kab/kota	5.050.000	45,45	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	laporan	0	6	laporan		11	laporan	72.120.000	11	laporan	72.069.160	100,00	%	99,93	17	laporan	72.069.160		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	0	Persen		0	Persen		6	Persen	130.225.600	-3,375	Persen	13.550.000	-56,25	%	10,41	-1,6875	Persen	13.550.000		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	30	produk			produk		6	produk	130.225.600	6	produk	13.550.000	100,00	%	10,41	6	produk	13.550.000	20,00	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kegiatan peningkatan citra produk ekspor	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan		6	Kegiatan	130.225.600	1	Kegiatan	101.225.000	16,67	%	77,73	1	Kegiatan	101.225.000		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	0	Persen		2,75	Persen		100	Persen	1.295.419.888	6,25	Persen	397.883.020	6,25	%	30,71	4,5	Persen	397.883.020		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	Persen		0	Persen		100	Persen		25	Persen		25,00	%		12,5	Persen			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0	Persen			Persen		66	Persen		28,79	Persen		43,62	%		14,395	Persen			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	81	(B)		0	(B)		79	(B)		20,75	(B)		26,27	%		20,75	(B)		25,62	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11	kab/kota		0	kab/kota		11	kab/kota	203.167.800	6	kab/kota	32.490.000	54,55	%	15,99	6	kab/kota	32.490.000	54,55	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah pengaduan penyelesaian sengketa konsumen yang Ditangani	0	sidang	0	11	sidang		40	sidang	203.167.800	9	sidang	202.727.940	22,50	%	99,78	20	sidang	202.727.940		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian mutu produk	15.654	-		0	-		2.641	-	982.132.088	45	-	352.843.020	1,70	%	35,93	45	-	352.843.020	0,29	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah PAD jasa pelayanan laboratorium	0	bulan		0	bulan		1.000	bulan		500	bulan		50,00	%		500	bulan			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			periode penerapan dokumen sistem mutu laboratorium terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC	0	bulan		0	bulan		12	bulan		6	bulan		50,00	%		6	bulan			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			periode layanan pengujian dan kalibrasi di UPTD BPSMB	0	bulan		0	bulan		12	bulan		6	bulan		50,00	%		6	bulan			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	0	sertifikat	0	525	sertifikat		600	sertifikat	361.963.360	738	sertifikat	359.591.677	123,00	%	99,34	1.263	sertifikat	359.591.677		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil jasa pelayanan pengujian Mutu Barang	0	paremeter	0	604	paremeter		2.515	paremeter	609.847.796	2.103	paremeter	586.626.160	83,62	%	96,19	2.707	paremeter	586.626.160		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang dipantau	0	produk	0	0	produk		50	produk	10.320.932	45	produk	10.313.700	90,00	%	99,93	45	produk	10.313.700		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa	11 kab/kota		0 kab/kota		11 kab/kota	110.120.000	8 kab/kota	12.550.000	72,73 %	11,40	8 kab/kota	12.550.000	72,73 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	0 produk	0	24 produk		9 produk	110.120.000	9 produk	109.886.025	100,00 %	99,79	33 produk	109.886.025	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	0 Persen		0 Persen		50 Persen	261.002.706	6,25 Persen	139.647.700	12,50 %	53,50	3,125 Persen	139.647.700	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri	0 kali		0 kali		5 kali	261.002.706	1 kali	139.647.700	20,00 %	53,50	1 kali	139.647.700	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	0 orang/UMKM	0	4 orang/UMKM		6 orang/UMKM	261.002.706	6 orang/UMKM	219.816.200	100,00 %	84,22	10 orang/UMKM	219.816.200	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM	60 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		dokumen		%	nan	dokumen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Perdagangan	11 KAB/KOTA		0 KAB/KOTA		11 KAB/KOTA		KAB/KOTA		%	nan	KAB/KOTA		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP	0 BB		68 BB		70,01 BB	14.680.416.013	138,15 BB	3.732.194.460	197,33 %	25,42	206,15 BB	3.732.194.460	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	42 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen	293.056.941	4 Dokumen	111.354.450	57,14 %	38,00	4 Dokumen	111.354.450	9,52 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 bulan		0 bulan		12 bulan		6 bulan		50,00 %		6 bulan		8,33 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	6 dokumen		6 dokumen	293.056.941	6 dokumen	281.760.190	100,00 %	96,15	12 dokumen	281.760.190	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	72 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	12.995.370.166	6 Bulan	3.220.367.659	50,00 %	24,78	6 Bulan	3.220.367.659	8,33 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	periode penyediaan gaji dan tunjangan asn	0 bulan	0	12 bulan		12 bulan	12.775.880.166	12 bulan	12.656.075.826	100,00 %	99,06	24 bulan	12.656.075.826	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen	219.490.000	12 dokumen	219.490.000	100,00 %	100,00	24 dokumen	219.490.000	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	18 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		Dokumen		%	nan	Dokumen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	1,013 orang		0 orang		185 orang		93 orang		50,27 %	nan	93 orang		9.180,65 %		Dinas Perindustrian dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
																									Perdagangan	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	BUlan		0	BUlan		12	BUlan	484.548.902	6	BUlan	87.313.200	50,00	%	18,02	6	BUlan	87.313.200	8,33	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																								
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	bulan	0	12	bulan		12	bulan	41.273.742	12	bulan	41.263.400	100,00	%	99,97	24	bulan	41.263.400		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	0	item	0	5	item		5	item	67.013.760	5	item	62.175.000	100,00	%	92,78	10	item	62.175.000		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	eksemplar	0	60	eksemplar		60	eksemplar	7.229.400	60	eksemplar	7.220.000	100,00	%	99,87	120	eksemplar	7.220.000		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	laporan	0	12	laporan		12	laporan	369.032.000	12	laporan	354.179.178	100,00	%	95,98	24	laporan	354.179.178		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah	71	unit		0	unit		9	unit		3	unit		33,33	%	nan	3	unit		4,23	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	periode penyedian jasa penunjang urusan pemerinah aerah	0	bulan		0	bulan		12	bulan	595.492.086		bulan	203.408.951		%	34,16		bulan	203.408.951		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	laporan	0	12	laporan		12	laporan	595.492.086	12	laporan	561.365.293	100,00	%	94,27	24	laporan	561.365.293		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72	Bulan		0	Bulan		12	Bulan	311.947.918		Bulan	109.750.200		%	35,18		Bulan	109.750.200		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaa n kendaraan Dinas/Opera sional roda 4 dan roda 2	0	unit	0	30	unit		30	unit	228.991.000	30	unit	227.497.200	100,00	%	99,35	60	unit	227.497.200		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	unit	0	0	unit		20	unit	18.600.000	10	unit	17.518.000	50,00	%	94,18	10	unit	17.518.000		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	laporan	0	20	laporan		20	laporan	64.356.918	20	laporan	64.255.000	100,00	%	99,84	40	laporan	64.255.000		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	0	Persen		0	Persen		1	Persen	1.657.050.234	0,085	Persen	527.916.462	8,50	%	31,86	0,0425	Persen	527.916.462		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0	Persen		0	Persen		0,43	Persen		1,79	Persen		416,28	%		0,895	Persen			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	0	Persen		0	Persen		8	Persen		2,4825	Persen		31,03	%		1,24125	Persen			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas	0	US$ Milyar		0	US$ Milyar		1	US$ Milyar		0,29	US$ Milyar		29,00	%		0,29	US$ Milyar			%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	0 Triliun		0 Triliun		0,63 Triliun		0,78 Triliun		123,81 %		0,78 Triliun		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembanguna n industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0 Persen		0 Persen		81 Persen		20,25 Persen		25,00 %		10,125 Persen		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	0 Orang		0 Orang		271,644 Orang		146.440 Orang		53.908,79 %		146.440 Orang		%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1 %		0 %		1 %	1.657.050.234	%	527.916.462	%	31,86	%	527.916.462	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0 dokumen	0	3 dokumen		3 dokumen	152.438.700	3 dokumen	149.988.100	100,00 %	98,39	6 dokumen	149.988.100	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0 dokumen	0	6 dokumen		6 dokumen	259.761.750	3 dokumen	89.024.300	50,00 %	34,27	9 dokumen	89.024.300	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 dokumen	0	5 dokumen		5 dokumen	1.244.849.784	5 dokumen	1.241.851.438	100,00 %	99,76	10 dokumen	1.241.851.438	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20 Persen		0 Persen		20 Persen	71.869.119	7 Persen	16.943.000	35,00 %	23,57	3,5 Persen	16.943.000	17,50 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1 %		0 %		1 %	71.869.119	1 %	16.943.000	100,00 %	23,57	1 %	16.943.000	100,00 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	0 dokumen	0	17 dokumen		30 dokumen	71.869.119	15 dokumen	71.868.923	50,00 %	100,00	32 dokumen	71.868.923	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	25 Persen		0 Persen		15 Persen	15.100.000	1,875 Persen	5.050.000	12,50 %	33,44	0,9375 Persen	5.050.000	3,75 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	6.690 -		0 -		1.115 -	15.100.000	1.536 -	5.050.000	137,76 %	33,44	1.536 -	5.050.000	22,96 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional $SIINas)	0 dokumen	0	1 dokumen		1 dokumen	15.100.000	1 dokumen	13.920.000	100,00 %	92,19	2 dokumen	13.920.000	%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah areal yang dicadangkanuntuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	1 lokasi	100.000.000	0 lokasi		1 lokasi	25.000.000	1 lokasi		100,00 %		1 lokasi		100,00 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Calon Lokasi Transmigrasi yang Clear and Clean	1 Dok	100.000.000	0 Dok		1 Dok	25.000.000	1 Dok		100,00 %		1 Dok		100,00 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	23.307.295	100,00 %	93,23	1 Dokumen	23.307.295	%	23,31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan permukiman transmigrasi yang berkualitas	1	lokasi	700.000.000	0	lokasi		0	lokasi	80.095.500	0,25	lokasi	2.858.492	%	3,57	0,25	lokasi	2.858.492	25,00	%	0,41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	1	kegiatan	700.000.000	0	kegiatan		1	kegiatan	80.095.500	1	kegiatan	2.858.492	100,00 %	3,57	1	kegiatan	2.858.492	100,00	%	0,41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	laporan	700.000.000	0	laporan		1	laporan	80.095.500	1	laporan	45.956.972	100,00 %	57,38	1	laporan	45.956.972	100,00	%	6,57	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase permukiman dankawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	0	%	900.000.000	0	%		27,61	%	131.904.500	51,56	%	44.801.600	186,74 %	33,97	25,78	%	44.801.600		%	4,98	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Nilai rata rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi dalam program perioritas nasional (Bathin III Ulu)	0	%		0	%		35,64	%		35,64	%		100,00 %		17,82	%			%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Nilai rata rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi dalam program perioritas kementerianRIAN (Bathin III Ulu)	0	%		0	%		41,8	%		41,8	%		100,00 %		20,9	%			%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Terwujudnya Penguatan Instruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman	1	SP	900.000.000	0	SP		1	SP	131.904.500	1	SP	44.801.600	100,00 %	33,97	1	SP	44.801.600	100,00	%	4,98	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	0	Satuan Pemukiman	900.000.000	0	Satuan Pemukiman		1	Satuan Pemukiman	131.904.500	1	Satuan Pemukiman	130.334.500	100,00 %	98,81	1	Satuan Pemukiman	130.334.500		%	14,48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
		SEKRETARIAT DAERAH																							
	03	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	0	Persen	12.820.710.000	0	Persen		100	Persen	1.690.800.000	100	Persen	48.000.000	100,00 %	2,84	50	Persen	48.000.000		%	0,37	Biro Hukum	
	04	KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase produk hukum provinsi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	0	Persen	7.081.916.000	100	Persen		100	Persen	867.800.000	100	Persen		100,00 %		100	Persen			%		Biro Hukum	
			Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	0	Persen		100	Persen		100	Persen		100	Persen		100,00 %		100	Persen			%		Biro Hukum	
	4.01.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum pengaturan yang disusun	300	Dokumen	2.014.683.000	60	Dokumen		60	Dokumen	229.800.000	60	Dokumen	77.996.563	100,00 %	33,94	120	Dokumen	77.996.563	40,00	%	3,87	Biro Hukum	
	4.01.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Penetapan	Jumlah Produk Hukum penetapan yang disusun	3.000	Produk Hukum	1.221.020.000	600	Produk Hukum		600	Produk Hukum	135.000.000	600	Produk Hukum	41.221.763	100,00 %	30,53	1.200	Produk Hukum	41.221.763	40,00	%	3,38	Biro Hukum	
	4.01.05.1.01.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya	3.300	Dokumen	1.709.428.000	660	Dokumen		660	Dokumen	203.000.000	660	Dokumen	77.376.260	100,00 %	38,12	1.320	Dokumen	77.376.260	40,00	%	4,53	Biro Hukum	
	4.01.05.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum kabupaten/ kota yang difasilitasi dan dievaluasi	450	Dokumen	2.136.785.000	90	Dokumen		90	Dokumen	300.000.000	90	Dokumen	114.716.160	100,00 %	38,24	180	Dokumen	114.716.160	40,00	%	5,37	Biro Hukum	
	05	KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM Provinsi Jambi yang Difasilitasi	0	Persen	5.738.794.000	100	Persen		100	Persen	823.000.000	100	Persen	48.000.000	100,00 %	5,83	100	Persen	48.000.000		%	0,84	Biro Hukum	
	4.01.05.1.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	50	Kasus	4.517.774.000	10	Kasus		10	Kasus	673.000.000	10	Kasus	329.287.785	100,00 %	48,93	20	Kasus	329.287.785	40,00	%	7,29	Biro Hukum	
	4.01.05.1.02.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	5	Kasus	1.221.020.000	5	Kasus		5	Kasus	150.000.000	5	Kasus	78.579.000	100,00 %	52,39	10	Kasus	78.579.000	200,00	%	6,44	Biro Hukum	
	04	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI	Persentase penyelesaian Permasalahan hukum dan HAM	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen		%	nan		Persen			%		Biro Hukum	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204					4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST						ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		HUKUM	Provinsi Jambi yang difasilitasi																
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	100 Persen	4.238.159.303	0 Persen		100 Persen	1.048.720.000	50 Persen	520.571.752	50,00 %	49,64	25 Persen	520.571.752	25,00 %	12,28	Biro Perekonomian	
			Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 Persen		0 Persen		100 Persen		50 Persen		50,00 %		25 Persen		25,00 %		Biro Perekonomian	
			Persentase Laporan sumber daya alam yang dilakukan	0 persentase		persentase		0 persentase		persentase		%		persentase		%		Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	100 Persentase	902.587.891	0 Persentase		100 Persentase	268.720.000	100 Persentase	83.500.593	100,00 %	31,07	100 Persentase	83.500.593	100,00 %	9,25	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	18 Dokumen	387.512.207	0 Dokumen		18 Dokumen	174.360.000	18 Dokumen	88.948.501	100,00 %	51,01	18 Dokumen	88.948.501	100,00 %	22,95	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12 Dokumen	515.075.684	0 Dokumen		12 Dokumen	94.360.000	12 Dokumen	35.492.992	100,00 %	37,61	12 Dokumen	35.492.992	100,00 %	6,89	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA	100 Persentase	1.219.358.673	0 Persentase		100 Persentase	400.000.000	100 Persentase	271.237.359	100,00 %	67,81	100 Persentase	271.237.359	100,00 %	22,24	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15 Dokumen	435.463.562	0 Dokumen		15 Dokumen	201.280.000	15 Dokumen	185.040.000	100,00 %	91,93	15 Dokumen	185.040.000	100,00 %	42,49	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10 Dokumen	445.760.345	0 Dokumen		10 Dokumen	84.360.000	10 Dokumen	61.371.750	100,00 %	72,75	10 Dokumen	61.371.750	100,00 %	13,77	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 Dokumen	338.134.766	0 Dokumen		12 Dokumen	114.360.000	12 Dokumen	97.118.069	100,00 %	84,92	12 Dokumen	97.118.069	100,00 %	28,72	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	100 Persentase	2.116.212.739	0 Persentase		100 Persentase	380.000.000	100 Persentase	165.833.800	100,00 %	43,64	100 Persentase	165.833.800	100,00 %	7,84	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 Dokumen	475.585.938	0 Dokumen		15 Dokumen	184.360.000	15 Dokumen	126.964.750	100,00 %	68,87	15 Dokumen	126.964.750	100,00 %	26,70	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 Dokumen	1.302.492.035	0 Dokumen		12 Dokumen	84.360.000	12 Dokumen	39.341.900	100,00 %	46,64	12 Dokumen	39.341.900	100,00 %	3,02	Biro Perekonomian	
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	10 Dokumen	338.134.766	0 Dokumen		10 Dokumen	111.280.000	10 Dokumen	107.700.800	100,00 %	96,78	10 Dokumen	107.700.800	100,00 %	31,85	Biro Perekonomian	
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SAKIP	0 Nilai		70 Nilai		72 Nilai	412.216.996	74 Nilai	1.734.451.181	102,78 %	420,76	144 Nilai	1.734.451.181	%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	0 Persen		44 Persen		89 Persen		22,375 Persen		25,14 %		33,1875 Persen		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			IKM Fasilitasi Keprotokolan	0 NIlai		44 NIlai		89 NIlai		44,5 NIlai		50,00 %		88,5 NIlai		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Persentase Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	0 Persen		44 Persen		89 Persen		22,25 Persen		25,00 %		33,125 Persen		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	236.731.796	1 Dokumen	96.202.500	100,00 %	40,64	2 Dokumen	96.202.500	%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		2 Dokumen		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00 %		10 Dokumen		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	40.822.000	1 Dokumen	40.822.000	100,00 %	100,00	2 Dokumen	40.822.000	%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0	1 laporan		1 laporan	18.150.000	1 laporan	17.745.000	100,00 %	97,77	2 laporan	17.745.000	%		Biro Administrasi Pimpinan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	laporan	0	5	laporan		5	laporan	177.759.796	5	laporan	175.086.696	100,00	%	98,50	10	laporan	175.086.696		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen		0	Dokumen		9	Dokumen	175.485.200	9	Dokumen	80.030.000	100,00	%	45,60	9	Dokumen	80.030.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang		0	Orang		76	Orang		76	Orang		100,00	%		76	Orang			%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	9	Dokumen		9	Dokumen	175.485.200	9	Dokumen	205.083.200	100,00	%	116,87	18	Dokumen	205.083.200		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0rang	0	76	0rang		76	0rang	0	76	0rang	26.325.000	100,00	%		152	0rang	26.325.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	paket		0	paket		8	paket		8	paket	465.353.542	100,00	%	inf	8	paket	465.353.542		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen		0	Dokumen		10	Dokumen		10	Dokumen		100,00	%		10	Dokumen			%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	laporan		0	laporan		16	laporan		16	laporan		100,00	%		16	laporan			%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	paket		0	paket		62	paket		62	paket		100,00	%		62	paket			%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	61	Paket		62	Paket	0	61	Paket	65.319.852	98,39	%		122	Paket	65.319.852		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0	paket	0	8	paket		8	paket	0	8	paket	19.250.000	100,00	%		16	paket	19.250.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	0	Dokumen	0	10	Dokumen		10	Dokumen	0	10	Dokumen	68.088.000	100,00	%		20	Dokumen	68.088.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	laporan	0	14	laporan		16	laporan	0	16	laporan	713.144.406	100,00	%		30	laporan	713.144.406		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	unit		0	unit		48	unit		48	unit	9.565.000	100,00	%	inf	48	unit	9.565.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	0	unit	0	48	unit		48	unit	0	48	unit	13.835.000	100,00	%		96	unit	13.835.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	0	Laporan		0	Laporan		12	Laporan		12	Laporan	616.817.753	100,00	%	inf	12	Laporan	616.817.753		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	0	Dokumen		0	Dokumen		240	Dokumen		240	Dokumen		100,00	%		240	Dokumen			%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0	Laporan		0	Laporan		986	Laporan		986	Laporan		100,00	%		986	Laporan			%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang disiapkan	0	Dokumen	0	240	Dokumen		240	Dokumen	0	240	Dokumen	183.115.900	100,00	%		480	Dokumen	183.115.900		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0	pidato/ sambutan	0	986	pidato/ sambutan		986	pidato/ sambutan	0	986	pidato/ sambutan	198.662.000	100,00	%		1.972	pidato/ sambutan	198.662.000		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	0	laporan	0	12	laporan		12	laporan	0	12	laporan	623.648.690	100,00	%		24	laporan	623.648.690		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0	Laporan		0	Laporan		725	Laporan		725	Laporan	466.482.386	100,00	%	inf	725	Laporan	466.482.386		%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0	Laporan		0	Laporan		4	Laporan		4	Laporan		100,00	%		4	Laporan			%		Biro Administrasi Pimpinan	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	Laporan		0	Laporan		847	Laporan		847	Laporan		100,00	%		847	Laporan			%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0	laporan	0	0	laporan		725	laporan	0	363	laporan	870.184.312	50,07	%		363	laporan	870.184.312		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	laporan	0	770	laporan		847	laporan	0	847	laporan	229.637.690	100,00	%		1.617	laporan	229.637.690		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0	laporan	0	3	laporan		4	laporan	0	4	laporan	53.578.700	100,00	%		7	laporan	53.578.700		%		Biro Administrasi Pimpinan	
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Predikat SAKIP Biro	77,25	Predikat	2.765.298.010	77,26	Predikat		77,1	Predikat	422.749.161	131,1	Predikat	179.884.831	170,04	%	42,55	208,36	Predikat	179.884.831	269,72	%	6,51	Biro Organisasi	
			Nilai IKM Biro	0	Nilai		0	Nilai		88,85	Nilai		88,94	Nilai		100,10	%		88,94	Nilai			%		Biro Organisasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kertas Kerja Evaluasi Dokumen SAKIP	100	Persen	619.890.490	0	Persen		100	Persen	96.155.190	100	Persen	62.940.340	100,00	%	65,46	50	Persen	62.940.340	50,00	%	10,15	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Dokumen	320.724.990	1	Dokumen		4	Dokumen	64.467.690	1	Dokumen	64.467.690	25,00	%	100,00	2	Dokumen	64.467.690	11,76	%	20,10	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	8	Dokumen	102.775.500	1	Dokumen		2	Dokumen	7.642.500	2	Dokumen	7.642.500	100,00	%	100,00	3	Dokumen	7.642.500	37,50	%	7,44	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8	Dokumen	103.385.000	1	Dokumen		2	Dokumen	11.500.000	2	Dokumen	11.500.000	100,00	%	100,00	3	Dokumen	11.500.000	37,50	%	11,12	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	Laporan	52.580.000	2	Laporan		2	Laporan	5.405.000	2	Laporan	5.282.000	100,00	%	97,72	4	Laporan	5.282.000	28,57	%	10,05	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Laporan	40.425.000	1	Laporan		1	Laporan	7.140.000	1	Laporan	7.140.000	100,00	%	100,00	2	Laporan	7.140.000	18,18	%	17,66	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	88,95	Indeks	1.946.667.520	80,25	Indeks		88,85	Indeks	293.853.971	88,94	Indeks	100.320.491	100,10	%	34,14	169,19	Indeks	100.320.491	190,21	%	5,15	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11	Paket	433.677.880	1	Paket		1	Paket	77.529.892	1	Paket	77.169.892	100,00	%	99,54	2	Paket	77.169.892	18,18	%	17,79	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7	Paket	117.367.549	1	Paket		1	Paket	7.560.488	1	Paket	7.546.480	100,00	%	99,81	2	Paket	7.546.480	28,57	%	6,43	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10	Paket	285.436.600	0,5	Paket		2	Paket	50.634.100	0,5	Paket	50.634.100	25,00	%	100,00	1	Paket	50.634.100	10,00	%	17,74	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	195	Laporan	1.110.185.491	25	Laporan		35	Laporan	158.129.491	35	Laporan	158.129.491	100,00	%	100,00	60	Laporan	158.129.491	30,77	%	14,24	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	88,95	Indeks	198.740.000	80,25	Indeks		88,85	Indeks	32.740.000	88,94	Indeks	16.624.000	100,10	%	50,78	169,19	Indeks	16.624.000	190,21	%	8,36	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Laporan	198.740.000	1	Laporan		1	Laporan	32.740.000	0,25	Laporan	32.284.000	25,00	%	98,61	1,25	Laporan	32.284.000	25,00	%	16,24	Biro Organisasi	
	4.01.02	Program Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	37,18	Nilai	6.006.274.167	0	Nilai		35,75	Nilai	921.275.617	39,37	Nilai	291.923.956	110,13	%	31,69	39,37	Nilai	291.923.956	105,89	%	4,86	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang ditata Kelembagaannya	100	Persen	2.517.403.150	0	Persen		100	Persen	389.196.750	100	Persen	177.949.668	100,00	%	45,72	50	Persen	177.949.668	50,00	%	7,07	Biro Organisasi	
			Persentase Kab/kota yang ditata Kelembagaannya	100	Persen		0	Persen		100	Persen		100	Persen		100,00	%		50	Persen		50,00	%		Biro Organisasi	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai Dasar Penataan Kepegawaian	100	Persen		0	Persen		100	Persen		100	Persen		100,00	%		50	Persen		50,00	%		Biro Organisasi	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	5	Dokumen	1.068.240.300	1	Dokumen		1	Dokumen	138.409.400	0,25	Dokumen	138.409.400	25,00	%	100,00	1,25	Dokumen	138.409.400	25,00	%	12,96	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/kota	5	Dokumen	823.215.850	1	Dokumen		1	Dokumen	174.320.850	0,25	Dokumen	153.792.050	25,00	%	88,22	1,25	Dokumen	153.792.050	25,00	%	18,68	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	5	Dokumen	625.947.000	1	Dokumen		1	Dokumen	76.466.500	0,25	Dokumen	76.466.500	25,00	%	100,00	1,25	Dokumen	76.466.500	25,00	%	12,22	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pemerintah Kab/kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi "B"	45	Persen	3.488.871.017	27	Persen		27	Persen	532.078.867	27	Persen	113.974.288	100,00	%	21,42	27	Persen	113.974.288	60,00	%	3,27	Biro Organisasi	
			Persentase Ketercapaian Target Kinerja Sasaran Strategis RB General	85,71	Persen		0	Persen		57	Persen		57	Persen		100,00	%		28,5	Persen		33,25	%		Biro Organisasi	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP Minimal BB	73,08	Persen		0	Persen		69,77	Persen		69,77	Persen		100,00	%		34,885	Persen		47,74	%		Biro Organisasi	
			Persentase Kab/kota dengan Predikat SAKIP Minimal BB	18	Persen		0	Persen		18	Persen		18	Persen		100,00	%		9	Persen		50,00	%		Biro Organisasi	
			Persentase Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang telah menerapkan Kebijakan Budaya Kerja	23,08	Persen		0	Persen		23,08	Persen		23,08	Persen		100,00	%		11,54	Persen		50,00	%		Biro Organisasi	
			Persentase Kab/kota yang telah Menerapkan Kebijakan Budaya Kerja	36	Persen		0	Persen		36	Persen		36	Persen		100,00	%		18	Persen		50,00	%		Biro Organisasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
			Persentase Perangkat Daerah yang telah Melaksanakan Ketatalaksanaan sesuai aturan	100	Persen		0	Persen		100	Persen		100	Persen		100,00	%		50	Persen		50,00	%		Biro Organisasi	
			Persentase Unit Pelayanan Publik Provinsi Jambi dengan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Baik	100	Persen		0	Persen		97,67	Persen		97,67	Persen		100,00	%		48,835	Persen		48,84	%		Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5	Dokumen	661.030.900	1	Dokumen		1	Dokumen	74.130.500	0,25	Dokumen	61.910.400	25,00	%	83,52	1,25	Dokumen	61.910.400	25,00	%	9,37	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas KInerja	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	Dokumen	950.755.050	1	Dokumen		1	Dokumen	137.035.200	1	Dokumen	137.029.200	100,00	%	100,00	2	Dokumen	137.029.200	40,00	%	14,41	Biro Organisasi	
			Persentase Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0	Persen		0	Persen		0	Persen			Persen			%			Persen			%		Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	5	Laporan	510.135.950	1	Laporan		1	Laporan	56.940.000	0,25	Laporan	52.787.800	25,00	%	92,71	1,25	Laporan	52.787.800	25,00	%	10,35	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	5	Dokumen	513.883.417	1	Dokumen		1	Dokumen	96.003.467	0,25	Dokumen	92.116.467	25,00	%	95,95	1,25	Dokumen	92.116.467	25,00	%	17,93	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	5	Dokumen	853.065.700	1	Dokumen		1	Dokumen	167.969.700	0,25	Dokumen	92.375.328	25,00	%	55,00	1,25	Dokumen	92.375.328	25,00	%	10,83	Biro Organisasi	
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah	0	%	181.330.240.299		%		76,5	%	63.837.289.315	74,25	%	41.282.697	97,06	%	0,06	37,125	%	41.282.697		%	0,02	Biro Umum	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Biro Umum	
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Biro Umum	
			Persentase Pemenuhan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Biro Umum	
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	0	Persen	256.217.500	79,84	Persen		76,5	Persen	111.554.100	148,3	Persen	41.282.697	193,86	%	37,01	114,07	Persen	41.282.697		%	16,11	Biro Umum	
	01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Jumlah	256.217.500	8	Jumlah		8	Jumlah	111.554.100	4	Jumlah	90.614.100	50,00	%	81,23	12	Jumlah	90.614.100	150,00	%	35,37	Biro Umum	
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi layanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100	Persen	89.570.723.424	0	Persen		100	Persen	783.474.853	12,5	Persen		12,50	%		6,25	Persen		6,25	%		Biro Umum	
	02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.700	Orang/Bulan	88.628.816.839	5.700	Orang/Bulan		5.700	Orang/Bulan	5.700	2.850	Orang/Bulan	1.988.840.501	50,00	%	34.891.938,61	8.550	Orang/Bulan	1.988.840.501	150,00	%	2,24	Biro Umum	
	02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9	Jumlah	706.997.354	9	Jumlah		9	Jumlah	568.783.069	4	Jumlah	316.564.300	44,44	%	55,66	13	Jumlah	316.564.300	144,44	%	44,78	Biro Umum	
	02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9	Laporan	99.834.570	9	Laporan		9	Laporan	95.296.635	2	Laporan	42.780.000	22,22	%	44,89	11	Laporan	42.780.000	122,22	%	42,85	Biro Umum	
	02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	135.074.661	4	Laporan		4	Laporan	119.389.449	2	Laporan		50,00	%		6	Laporan		150,00	%		Biro Umum	
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum	94	Skor Indeks	1.882.117.489	92,756	Skor Indeks		91	Skor Indeks	1.736.568.687	185,025	Skor Indeks		203,32	%		277,781	Skor Indeks		295,51	%		Biro Umum	
	03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	1.174.377.849	4	Dokumen		4	Dokumen	1.151.350.833	2	Dokumen	32.967.680	50,00	%	2,86	6	Dokumen	32.967.680	150,00	%	2,81	Biro Umum	
	03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18	Laporan	378.264.640	18	Laporan		18	Laporan	312.967.854	8	Laporan	92.381.443	44,44	%	29,52	26	Laporan	92.381.443	144,44	%	24,42	Biro Umum	
	03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	329.475.000	9	Laporan		9	Laporan	272.250.000	2	Laporan	96.413.500	22,22	%	35,41	11	Laporan	96.413.500		%	29,26	Biro Umum	
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Umum	0	Skor Indeks	13.361.912.141	0	Skor Indeks		89	Skor Indeks	9.544.498.592	46,25625	Skor Indeks		51,97	%		46,25625	Skor Indeks			%		Biro Umum	
	06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.331.891.407	3	Paket		3	Paket	934.517.111	1	Paket	704.437.827	33,33	%	75,38	4	Paket	704.437.827	133,33	%	52,89	Biro Umum	
	06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	5.667.049.828	15	Paket		15	Paket	5.100.854.931	5	Paket	1.053.699.740	33,33	%	20,66	20	Paket	1.053.699.740	133,33	%	18,59	Biro Umum	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	463.411.410	10 Paket		10 Paket	144.983.728	3 Paket	66.850.000	30,00 %	46,11	13 Paket	66.850.000	130,00 %	14,43	Biro Umum	
	06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3.153.048.117	15 Paket		15 Paket	1.019.028.339	7 Paket	495.472.140	46,67 %	48,62	22 Paket	495.472.140	146,67 %	15,71	Biro Umum	
	06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	910.771.457	8 Paket		8 Paket	827.974.052	4 Paket	332.704.390	50,00 %	40,18	12 Paket	332.704.390	150,00 %	36,53	Biro Umum	
	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.609.572.405	4 Laporan		4 Laporan	1.330.225.128	2 Laporan	309.802.213	50,00 %	23,29	6 Laporan	309.802.213	150,00 %	19,25	Biro Umum	
	06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	226.167.517	4 Dokumen		4 Dokumen	186.915.303	2 Dokumen	60.800.000	50,00 %	32,53	6 Dokumen	60.800.000	150,00 %	26,88	Biro Umum	
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kendaraan Dinas Dalam Jabatan	0 Persen	7.133.405.776	0 Persen		100 Persen	7.062.777.996	100 Persen		100,00 %		50 Persen		%		Biro Umum	
	07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	7.133.405.776	5 Unit		5 Unit	7.062.777.996	2 Unit	1.252.700.000	40,00 %	17,74	7 Unit	1.252.700.000	140,00 %	17,56	Biro Umum	
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Jasa Penunjang SETDA	0 Skor Indeks	19.326.163.740	0 Skor Indeks		89 Skor Indeks	12.975.051.086	46,25625 Skor Indeks		51,97 %		46,25625 Skor Indeks		%		Biro Umum	
	08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	226.167.517	12 Laporan		12 Laporan	121.000.000	6 Laporan	35.680.000	50,00 %	29,49	18 Laporan	35.680.000	150,00 %	15,78	Biro Umum	
	08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	6.180.867.910	3 Laporan		4 Laporan	5.618.970.827	2 Laporan	1.849.999.206	50,00 %	32,92	5 Laporan	1.849.999.206	125,00 %	29,93	Biro Umum	
	08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	5.852.247.764	11 Laporan		10 Laporan	1.611.572.717	4 Laporan	1.725.380.000	40,00 %	107,06	15 Laporan	1.725.380.000	150,00 %	29,48	Biro Umum	
	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	7.066.880.549	4 Laporan		4 Laporan	5.623.507.542	2 Laporan	1.842.132.980	50,00 %	32,76	6 Laporan	1.842.132.980	150,00 %	26,07	Biro Umum	
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang dipelihara	0 Persen	16.015.675.758	0 Persen		100 Persen	11.350.429.910	12,5 Persen		12,50 %		6,25 Persen		%		Biro Umum	
	09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	130 Unit	7.066.880.549	130 Unit		130 Unit	4.276.773.558	64 Unit	2.588.317.681	49,23 %	60,52	194 Unit	2.588.317.681	149,23 %	36,63	Biro Umum	
	09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	2.176.523.498	130 Unit		130 Unit	1.175.947.847	64 Unit	790.430.563	49,23 %	67,22	194 Unit	790.430.563	149,23 %	36,32	Biro Umum	
	09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	721.833.970	7 Unit		7 Unit	230.276.310	3 Unit	289.932.905	42,86 %	125,91	10 Unit	289.932.905	142,86 %	40,17	Biro Umum	
	09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	1.974.303.901	10 Unit		10 Unit	1.631.656.116	4 Unit	633.965.650	40,00 %	38,85	14 Unit	633.965.650	140,00 %	32,11	Biro Umum	
	09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 Unit	4.076.133.840	13 Unit		13 Unit	4.035.776.079	5 Unit	1.207.440.030	38,46 %	29,92	18 Unit	1.207.440.030	138,46 %	29,62	Biro Umum	
	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Persen	4.370.549.782	Persen		100 Persen	3.120.624.894	25 Persen		25,00 %		12,5 Persen		%		Biro Umum	
	11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	4.370.549.782	24 Orang/Bulan		24 Orang/Bulan	3.120.624.894	12 Orang/Bulan	1.769.378.903	50,00 %	56,70	36 Orang/Bulan	1.769.378.903	150,00 %	40,48	Biro Umum	
	11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
	12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100 Persen	29.413.474.689	0 Persen		100 Persen	17.152.309.197	12,5 Persen		12,50 %		6,25 Persen		6,25 %		Biro Umum	
			Persentase Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	0 %		%		0 %		%				%		%		Biro Umum	
			Persentase Pelayanan Kedinasan Sekretaris Daerah yang difasilitasi	0 %		%		0 %		%				%		%		Biro Umum	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	17.562.004.958	20 Paket		20 Paket	10.852.118.164	10 Paket	6.143.868.574	50,00 %	56,61	30 Paket	6.143.868.574	150,00 %	34,98	Biro Umum	
	12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	18 Paket	7.893.595.533	18 Paket		18 Paket	3.893.595.533	8 Paket	2.158.117.173	44,44 %	55,43	26 Paket	2.158.117.173	144,44 %	27,34	Biro Umum	
	12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket	3.957.874.198	3 Paket		4 Paket	2.406.595.500	3 Paket	611.628.500	75,00 %	25,41	6 Paket	611.628.500	200,00 %	15,45	Biro Umum	
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	0 Skor		Skor		23 Skor	590.128.983	5 Skor		21,74 %		5 Skor		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	0 nilai		nilai		14 nilai		4 nilai		28,57 %		4 nilai		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	0 Skor		0 Skor		39 Skor		24 Skor		61,54 %		24 Skor		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	01	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase pelayanan pengadaan secara elektronik	0 Persentase		Persentase		0 Persentase		Persentase		%	nan	Persentase		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	06	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	0	0 Laporan		12 Laporan	0	9 Laporan		75,00 %		9 Laporan		75,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	07	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	0	0 Laporan		12 Laporan	0	9 Laporan		75,00 %		9 Laporan		75,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	08	Pengelolaan Informasi PBJ	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	0	0 Laporan		12 Laporan	0	9 Laporan		75,00 %		9 Laporan		75,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen		0 Persen		36 Persen	144.823.383	18 Persen		50,00 %		9 Persen		9,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	03	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Laporan	0	0 Laporan		12 Laporan	144.823.383	9 Laporan		75,00 %		9 Laporan		9,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	04	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	300 Laporan	0	0 Laporan		12 Laporan	0	9 Laporan		75,00 %		9 Laporan		3,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	05	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Periode Pemantauan dan Evaluasi PBJ	12 Bulan	0	0 Bulan		12 Bulan	0	2,25 Bulan		18,75 %		2,25 Bulan		18,75 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.07.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	skor kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia PBJ	0 Persentase		Persentase		0 Persentase	445.305.600	Persentase		%		Persentase		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			skor tingkat kematangan UKBPJ	0 Persentase		Persentase		0 Persentase		Persentase		%		Persentase		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	09	Pembinaan SDM PBJ	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	0	0 Orang		10 Orang	0	20 Orang		200,00 %		20 Orang		20,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	10	Pembinaan Kelembagaan PBJ	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	11 Dokumen	0	0 Dokumen		4 Dokumen	445.305.600	3 Dokumen		75,00 %		3 Dokumen		27,27 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	11	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau BImbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	0	0 Dokumen		4 Dokumen	0	2 Dokumen	143.643.128	50,00 %		2 Dokumen	143.643.128	2,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	01.03	Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	Nilai LPPD	2,9 Nilai	3.055.238.048	Nilai		2,8 Nilai	900.000.830	3,023 Nilai	268.886.281	107,96 %	29,88	3,023 Nilai	268.886.281	104,24 %	8,80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Penyelesaian batas antar Kabupaten/kota dalam Provinsi jambi	88 persentase	1.417.855.917	0 persentase		82 persentase	300.000.000	107 persentase	147.012.394	130,49 %	49,00	107 persentase	147.012.394	121,59 %	10,37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	603.711.886	0 Dokumen		1 Dokumen	38.718.800	1 Dokumen	38.718.800	100,00 %	100,00	1 Dokumen	38.718.800	100,00 %	6,41	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Laporan	249.120.667	0 Laporan		1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	69.747.500	100,00 %	99,64	1 Laporan	69.747.500	100,00 %	28,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	565.023.364	0 Dokumen		1 Dokumen	191.281.200	1 Dokumen	191.281.200	100,00 %	100,00	1 Dokumen	191.281.200	100,00 %	33,85	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.02	Kegiatan pelaksanaan Otonomi daerah	Tersusunys LKPJ Provinsi jambi	1 Dokumen	1.154.237.104	0 Dokumen		1 Dokumen	350.000.830	1 Dokumen	76.372.943	100,00 %	21,82	1 Dokumen	76.372.943	100,00 %	6,62	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	320.412.430	0 Dokumen		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.604.131	100,00 %	99,60	1 Dokumen	99.604.131	100,00 %	31,09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	1 Dokumen	349.106.677	0 Dokumen		1 Dokumen	60.000.830	1 Dokumen	59.370.192	100,00 %	98,95	1 Dokumen	59.370.192	100,00 %	17,01	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	484.717.997	0 Laporan		1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	190.000.000	100,00 %	100,00	1 Laporan	190.000.000	100,00 %	39,20	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.03	Kegiatan fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama yang di fasilitasi	9 Naskah	483.145.027	0 Naskah		9 Naskah	250.000.000	27 Naskah	45.500.944	300,00 %	18,20	27 Naskah	45.500.944	300,00 %	9,42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	5 naskah	225.471.158	0 naskah		5 naskah	90.000.000	18 naskah	90.000.000	360,00 %	100,00	18 naskah	90.000.000	360,00 %	39,92	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerjasama Badan Usaha/ swasta yang difasilitasi	9 naskah	128.848.530	0 naskah		9 naskah	80.000.000	9 naskah	80.000.000	100,00 %	100,00	9 naskah	80.000.000	100,00 %	62,09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	128.825.339	0 Laporan		3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	100,00 %	100,00	3 Laporan	80.000.000	100,00 %	62,10	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Realisasi Fisik	0 Persen	3.053.771.020	0 Persen		76 Persen	366.854.699	76 Persen	115.730.296	100,00 %	31,55	38 Persen	115.730.296	%	3,79	Biro Hukum	
			Persentase Capaian Realisasi Keuangan	0 Persen		336 Persen		84 Persen		340 Persen		404,76 %		338 Persen		%		Biro Hukum	
	01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	persentase keselarasan perencanaan	0 persen	459.103.520	74 persen		75 persen	34.000.000	74,75 persen		99,67 %		74,375 persen		%		Biro Hukum	
	4.01.01.1.01.0001	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	80.587.320	3 Dokumen		3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen		100,00 %		6 Dokumen		%		Biro Hukum	
	4.01.01.1.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	0 Dokumen	67.156.100	2 Dokumen		2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen		100,00 %		4 Dokumen		%		Biro Hukum	
	4.01.01.1.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	10 Dokumen	67.156.100	2 Dokumen		2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen		100,00 %		4 Dokumen		40,00 %		Biro Hukum	
	4.01.01.1.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	10 Dokumen	91.576.500	2 Dokumen		2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	720.000	100,00 %	12,00	4 Dokumen	720.000	40,00 %	0,79	Biro Hukum	
	4.01.01.1.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	10 Dokumen	91.576.500	2 Dokumen		2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen		100,00 %		4 Dokumen		40,00 %		Biro Hukum	
	4.01.01.1.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	61.051.000	6 Laporan		6 Laporan	7.000.000	6 Laporan	600.000	100,00 %	8,57	12 Laporan	600.000	42,86 %	0,98	Biro Hukum	
	02	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi umum yang Terpenuhi	0 Persen	2.503.091.000	100 Persen		100 Persen	326.854.699	100 Persen	115.730.296	100,00 %	35,41	100 Persen	115.730.296	%	4,62	Biro Hukum	
	4.01.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	610.510.000	3 Paket		3 Paket	92.113.000	3 Paket	77.490.000	100,00 %	84,12	6 Paket	77.490.000	40,00 %	12,69	Biro Hukum	
	4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	4.01.01.1.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	4.01.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	1.892.581.000	12 Laporan		12 Laporan	234.741.699	12 Laporan	229.240.296	100,00 %	97,66	24 Laporan	229.240.296	40,00 %	12,11	Biro Hukum	
	03	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Persen	91.576.500	100 Persen		100 Persen	6.000.000	100 Persen		100,00 %		100 Persen		%		Biro Hukum	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DAERAH																	
	4.01.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan	91.576.500	12 Laporan		12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	720.000	100,00 %	12,00	24 Laporan	720.000	40,00 %	0,79	Biro Hukum	
	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata IKM	0 Indeks		0 Indeks		0 Indeks		Indeks		%	nan	Indeks		%		Biro Hukum	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Nilai		Nilai		85 Nilai	1.299.703.424	20 Nilai		23,53 %		20 Nilai		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	0 Nilai		Nilai		76 Nilai		80 Nilai		105,26 %		80 Nilai		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penataan administrasi umum dan jasa surat menyurat	100 Dokumen	0	0 Dokumen		12 Dokumen	517.392.804	8 Dokumen		66,67 %		8 Dokumen		8,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.01.106	Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	100 Paket		0 Paket		9 Paket	782.310.620	3 Paket		33,33 %		3 Paket		3,00 %		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	01	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 Laporan	0	0 Laporan		4 Laporan	782.310.620	3 Laporan		75,00 %		3 Laporan		%		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM	80 Index	1.306.884.308	Index		76 Index	167.534.426	19 Index	122.483.033	25,00 %	73,11	19 Index	122.483.033	23,75 %	9,37	Biro Perekonomian	
			Nilai SAKIP	0 Nilai		Nilai		0 Nilai		Nilai		%		Nilai		%		Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanaan administrasi perkantoran	100 Persentase	242.560.578	0 Persentase		100 Persentase	28.939.323	100 Persentase	22.890.477	100,00 %	79,10	100 Persentase	22.890.477	100,00 %	9,44	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	159.921.265	0 Dokumen		4 Dokumen	23.430.000	4 Dokumen	20.498.530	100,00 %	87,49	4 Dokumen	20.498.530	100,00 %	12,82	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	58.441.162	0 Laporan		5 Laporan	3.923.807	5 Laporan	3.922.997	100,00 %	99,98	5 Laporan	3.922.997	100,00 %	6,71	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	24.198.151	0 Laporan		2 Laporan	1.585.516	2 Laporan	1.585.450	100,00 %	100,00	2 Laporan	1.585.450	100,00 %	6,55	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanaan administrasi perkantoran	100 Persentase	1.064.323.730	0 Persentase		100 Persentase	138.595.103	100 Persentase	99.592.556	100,00 %	71,86	100 Persentase	99.592.556	100,00 %	9,36	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persentase	177.132.385	0 Persentase		100 Persentase	30.160.250	100 Persentase	29.672.008	100,00 %	98,38	100 Persentase	29.672.008	100,00 %	16,75	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.265.930	0 Paket		1 Paket	18.440.190	1 Paket	18.426.750	100,00 %	99,93	1 Paket	18.426.750	100,00 %	23,25	Biro Perekonomian	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	691.867.065	0 Paket		1 Paket	79.794.663	1 Paket	66.093.848	100,00 %	82,83	1 Paket	66.093.848	100,00 %	9,55	Biro Perekonomian	
	03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip	72 Nilai	301.146.926	Nilai		71,5 Nilai	180.368.828	72,4 Nilai	53.613.201	101,26 %	29,72	72,4 Nilai	53.613.201	100,56 %	17,80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanaan administrasi perkantoran	100 persentase	301.146.926	0 persentase		100 persentase	180.368.828	100 persentase	53.613.201	100,00 %	29,72	100 persentase	53.613.201	100,00 %	17,80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	109.080.499	0 paket		1 paket	58.766.568	1 paket	58.766.568	100,00 %	100,00	1 paket	58.766.568	100,00 %	53,87	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUmlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.717.229	0 paket		1 paket	39.539.180	1 paket	38.913.955	100,00 %	98,42	1 paket	38.913.955	100,00 %	135,51	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.349.198	0 Laporan		1 Laporan	82.063.080	1 Laporan	82.063.080	100,00 %	100,00	1 Laporan	82.063.080	100,00 %	50,24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah	0 persen	8.482.786.966	100 persen		100 persen	717.292.100	100 persen	245.742.900	100,00 %	34,26	100 persen	245.742.900	%	2,90	Biro Administrasi Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	4.01.08.1.01	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase kinerja pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	100	persen	5.241.646.264	100	persen		100	persen	414.594.500	100	persen	142.446.100	100,00	%	34,36	100	persen	142.446.100	100,00	%	2,72	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	0	laporan	1.639.777.725	4	laporan		4	laporan	140.000.000	4	laporan	117.080.400	100,00	%	83,63	8	laporan	117.080.400		%	7,14	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	0	laporan	868.425.718	4	laporan		4	laporan	69.594.500	4	laporan	69.594.500	100,00	%	100,00	8	laporan	69.594.500		%	8,01	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	0	laporan	2.733.442.821	4	laporan		4	laporan	205.000.000	4	laporan	201.307.000	100,00	%	98,20	8	laporan	201.307.000		%	7,36	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.02	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja pelaporan pelaksanaan pembangunan	0	persen	3.241.140.702	100	persen		100	persen	302.697.600	100	persen	103.296.800	100,00	%	34,13	100	persen	103.296.800		%	3,19	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	0	dokumen	822.279.404	4	dokumen		4	dokumen	77.697.600	4	dokumen	77.697.600	100,00	%	100,00	8	dokumen	77.697.600		%	9,45	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	laporan	1.465.892.453	4	laporan		4	laporan	145.000.000	4	laporan	145.000.000	100,00	%	100,00	8	laporan	145.000.000		%	9,89	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	0	dokumen	952.968.845	4	dokumen		4	dokumen	80.000.000	4	dokumen	80.000.000	100,00	%	100,00	8	dokumen	80.000.000		%	8,39	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Program Penunjang	0	persen	3.154.960.743	100	persen		100	persen	410.571.775	100	persen	142.944.005	100,00	%	34,82	100	persen	142.944.005		%	4,53	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan	0	persen	156.087.200	100	persen		100	persen	33.105.000	100	persen	26.295.000	100,00	%	79,43	100	persen	26.295.000		%	16,85	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dokumen	46.783.200	2	dokumen		2	dokumen	2.270.000	2	dokumen	1.312.500	100,00	%	57,82	4	dokumen	1.312.500	40,00	%	2,81	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4	dokumen	24.780.000	1	dokumen		1	dokumen	2.035.000	1	dokumen	2.010.354	100,00	%	98,79	2	dokumen	2.010.354	50,00	%	8,11	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	0	dokumen	24.780.000	1	dokumen		1	dokumen	2.000.000	1	dokumen	2.000.000	100,00	%	100,00	2	dokumen	2.000.000		%	8,07	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	0	dokumen	29.872.000	1	dokumen		1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.469.750	100,00	%	98,79	2	dokumen	2.469.750		%	8,27	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	4	dokumen	29.872.000	1	dokumen		1	dokumen	2.000.000	1	dokumen	2.000.000	100,00	%	100,00	2	dokumen	2.000.000	50,00	%	6,70	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat daerah	0	laporan	0	4	laporan		4	laporan	22.300.000	4	laporan	33.995.000	100,00	%	152,44	8	laporan	33.995.000		%		Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Rata – rata IKM	82	skor	2.811.358.043	81	skor		78	skor	354.297.592	81	skor	106.684.915	103,85	%	30,11	162	skor	106.684.915	197,56	%	3,79	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	0	paket	290.686.469	2	paket		1	paket	29.586.592	2	paket	29.586.430	200,00	%	100,00	4	paket	29.586.430		%	10,18	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	0	paket	152.836.895	2	paket		2	paket	24.711.000	2	paket	23.154.956	100,00	%	93,70	4	paket	23.154.956		%	15,15	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	laporan	2.367.834.679	60	laporan		70	laporan	300.000.000	65	laporan	284.574.130	92,86	%	94,86	125	laporan	284.574.130		%	12,02	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di fasilitasi	100	persen	187.515.500	100	persen		100	persen	23.169.183	100	persen	9.964.090	100,00	%	43,01	100	persen	9.964.090	100,00	%	5,31	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	laporan	187.515.500	4	laporan		4	laporan	23.169.183	4	laporan	22.680.000	100,00	%	97,89	8	laporan	22.680.000		%	12,10	Biro Administrasi Pembangunan	
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT																								
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	488.349.805.717	1	Dokumen		4	Dokumen	65.722.046.581	2	Dokumen	22.377.370.383	150,00	%	34,05	3	Dokumen	22.377.370.383		%	4,58	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang diKelola	3	Unit	333.208.116.365	3	Unit		3	Unit	26.742.524.661	3	Unit	16.786.529.492	100,00	%	62,77	6	Unit	16.786.529.492	200,00	%	5,04	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	10	Lembaga	155.141.689.352	2	Lembaga		2	Lembaga	38.979.521.920	1	Lembaga	39.495.293.121	150,00	%	101,32	3	Lembaga	39.495.293.121	30,00	%	25,46	Biro Kesejahteraan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	54.502.503.980	6 Dokumen		6 Dokumen	11.147.669.602	4 Dokumen		133,33 %		10 Dokumen		%		Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	47.399.239.839	2 Dokumen		2 Dokumen	9.557.009.792	1 Dokumen		150,00 %		3 Dokumen		30,00 %		Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen	10 Dokumen	3.103.491.834	2 Dokumen		2 Dokumen	745.335.110	1 Dokumen		150,00 %		3 Dokumen		30,00 %		Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	3.999.772.307	2 Dokumen		2 Dokumen	845.324.700	Dokumen		%		2 Dokumen		20,00 %		Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	5.054.811.175	3 Dokumen		6 Dokumen	1.182.813.727	2 Dokumen	160.861.883	166,67 %	13,60	5 Dokumen	160.861.883	%	3,18	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	1.650.241.118	2 Dokumen		2 Dokumen	366.747.983	Dokumen	103.791.280	%	28,30	2 Dokumen	103.791.280	20,00 %	6,29	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	2.084.425.653	2 Dokumen		2 Dokumen	519.709.160	Dokumen	152.785.887	%	29,40	2 Dokumen	152.785.887	20,00 %	7,33	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	1.320.144.404	2 Dokumen		2 Dokumen	296.356.584	Dokumen	87.263.303	%	29,45	2 Dokumen	87.263.303	20,00 %	6,61	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		SEKRETARIAT DPRD																	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Sekretariat DPRD terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	500 %		100 %		100 %	71.552.933.429	37 %	32.620.060.329	37,00 %	45,59	68,5 %	32.620.060.329	13,70 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terselesaikan	500 %		100 %		100 %	10.702.717.554	70 %	5.456.964.412	70,00 %	50,99	170 %	5.456.964.412	34,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	69 Dokumen	0	14 Dokumen		15 Dokumen	10.375.163.154	12 Dokumen	8.389.963.934	80,00 %	80,87	26 Dokumen	8.389.963.934	37,68 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	20 Dokumen	0	4 Dokumen		4 Dokumen	327.554.400	4 Dokumen	275.736.000	100,00 %	84,18	8 Dokumen	275.736.000	40,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	105 %		100 %		100 %	11.083.234.500	85 %	7.782.994.824	85,00 %	70,22	185 %	7.782.994.824	176,19 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	20 Dokumen	0	5 Dokumen		4 Dokumen	1.776.109.000	2 Dokumen	1.526.856.623	50,00 %	85,97	7 Dokumen	1.526.856.623	35,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 Orang	0	12 Orang		12 Orang	1.836.000.000	12 Orang	1.800.000.000	100,00 %	98,04	24 Orang	1.800.000.000	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 Orang	0	0 Orang		108 Orang	666.000.000	108 Orang	666.000.000	100,00 %	100,00	108 Orang	666.000.000	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0 Dokumen	0	5 Dokumen		5 Dokumen	6.805.125.500	5 Dokumen	7.590.176.801	100,00 %	111,54	10 Dokumen	7.590.176.801	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	500 %		100 %		100 %	22.122.662.075	100 %	9.581.843.951	100,00 %	43,31	200 %	9.581.843.951	40,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Laporan	0	12 Laporan		12 Laporan	3.586.398.000	12 Laporan	2.711.392.822	100,00 %	75,60	24 Laporan	2.711.392.822	40,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	14 Dokumen	0	3 Dokumen		2 Dokumen	18.536.264.075	2 Dokumen	18.141.658.577	100,00 %	97,87	5 Dokumen	18.141.658.577	35,71 %		Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang ditindaklanjuti	500	%		100	%		100	%	27.644.319.300	100	%	9.798.257.142	100,00	%	35,44	200	%	9.798.257.142	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60	Dokumen	0	12	Dokumen		12	Dokumen	26.472.507.300	12	Dokumen	29.726.464.661	100,00	%	112,29	24	Dokumen	29.726.464.661	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	0	Laporan	0		Laporan		0	Laporan	0		Laporan			%			Laporan			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil faslitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	Dokumen	0	12	Dokumen		12	Dokumen	1.171.812.000	12	Dokumen	1.519.019.409	100,00	%	129,63	24	Dokumen	1.519.019.409	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	70	%		67,31	%		80	%	81.166.681.415	67,31	%	25.343.584.816	84,14	%	31,22	67,31	%	25.343.584.816	96,16	%		Sekretariat DPRD	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	%		87,8	%		84,5	%		87,8	%		103,91	%		87,8	%		102,09	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Dokumen		100	Dokumen		100	Dokumen	416.324.800	100	Dokumen	174.882.662	100,00	%	42,01	200	Dokumen	174.882.662	200,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	0	11	Dokumen		12	Dokumen	416.324.800	12	Dokumen	412.123.515	100,00	%	98,99	23	Dokumen	412.123.515	38,33	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	0	0	Laporan		0	Laporan	0		Laporan			%			Laporan			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	0		Laporan		0	Laporan	0		Laporan			%			Laporan			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	100	%		100	%		100	%	9.829.402.809	100	%	2.621.960.576	100,00	%	26,67	200	%	2.621.960.576	200,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/Bulan	0	14	Orang/Bulan		14	Orang/Bulan	9.027.419.359	14	Orang/Bulan	9.240.733.201	100,00	%	102,36	28	Orang/Bulan	9.240.733.201	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	0	12	Dokumen		12	Dokumen	615.040.000	12	Dokumen	549.090.000	100,00	%	89,28	24	Dokumen	549.090.000	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	0	1	Laporan		1	Laporan	2.476.200	1	Laporan	2.476.200	100,00	%	100,00	2	Laporan	2.476.200	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	0	4	Laporan		4	Laporan	184.467.250	4	Laporan	175.268.142	100,00	%	95,01	8	Laporan	175.268.142	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	500	%		100	%		100	%	553.500.000	100	%		100,00	%		200	%		40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	0	49	Dokumen		49	Dokumen	553.500.000	49	Dokumen	559.063.258	100,00	%	101,01	98	Dokumen	559.063.258	3.266,67	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	500	%		100	%		100	%	306.188.000	100	%	124.143.300	100,00	%	40,54	200	%	124.143.300	40,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	0	0	Paket		1	Paket	175.198.000	1	Paket	113.925.000	100,00	%	65,03	1	Paket	113.925.000	50,00	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0		Dokumen			%			Dokumen			%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103	Orang	0	9	Orang		15	Orang	130.990.000	9	Orang	78.301.005	60,00	%	59,78	18	Orang	78.301.005	17,48	%		Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52			
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyeselasaian Pelayanan Administrasi Umum	500 %		100 %		100 %	6.339.759.023	86,93 %	2.948.871.348	86,93 %	46,51	186,93 %	2.948.871.348	37,39 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	28 Paket		28 Paket	224.570.793	26 Paket	209.910.597	92,86 %	93,47	54 Paket	209.910.597	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	75 Paket		75 Paket	397.182.100	46 Paket	275.491.137	61,33 %	69,36	121 Paket	275.491.137	6.050,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	46.321 Laporan		46.321 Laporan	2.594.094.000	41.766 Laporan	2.842.006.000	90,17 %	109,56	88.087 Laporan	2.842.006.000	734.058,33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	0	82 Paket		86 Paket	478.880.930	27 Paket	326.770.617	31,40 %	68,24	109 Paket	326.770.617	1.557,14 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	0	80,772 Paket		80.772 Paket	777.748.200	80,772 Paket	811.765.000	0,10 %	104,37	161,544 Paket	811.765.000	4.038,60 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	21 Laporan		27 Laporan	1.867.283.000	27 Laporan	2.071.566.244	100,00 %	110,94	48 Laporan	2.071.566.244	400,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500 %		25 %		100 %	6.815.450.749	3 %	2.533.065.000	3,00 %	37,17	28 %	2.533.065.000	5,60 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	13 Unit		13 Unit	6.815.450.749	7 Unit	6.561.228.000	53,85 %	96,27	20 Unit	6.561.228.000	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	500 %		100 %		100 %	3.475.099.674	87,5 %	1.081.384.228	87,50 %	31,12	187,5 %	1.081.384.228	37,50 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	1.700 Laporan		1.700 Laporan	1.059.146.000	1.275 Laporan	1.044.000.000	75,00 %	98,57	2.975 Laporan	1.044.000.000	24.791,67 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan		12 Laporan	2.415.953.674	12 Laporan	1.750.918.467	100,00 %	72,47	24 Laporan	1.750.918.467	200,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	500 %		100 %		100 %	10.947.655.662	85,64 %	5.480.501.816	85,64 %	50,06	185,64 %	5.480.501.816	37,13 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	83 Unit		83 Unit	1.977.440.000	68 Unit	1.592.128.155	81,93 %	80,51	151 Unit	1.592.128.155	%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	0	4 Unit		5 Unit	4.821.300.762	5 Unit	3.730.758.325	100,00 %	77,38	9 Unit	3.730.758.325	36,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	120 Unit	0	24 Unit		24 Unit	4.148.914.900	18 Unit	4.000.098.065	75,00 %	96,41	42 Unit	4.000.098.065	35,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	500 %		100 %		100 %	40.027.495.626	75,76 %	9.691.617.024	75,76 %	24,21	175,76 %	9.691.617.024	35,15 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	70 Orang/Bulan	0	14 Orang/Bulan		14 Orang/Bulan	38.567.416.946	14 Orang/Bulan	37.400.574.019	100,00 %	96,97	28 Orang/Bulan	37.400.574.019	40,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket	0	5 Paket		5 Paket	1.186.791.655	5 Paket	805.958.960	100,00 %	67,91	10 Paket	805.958.960	40,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	275 Orang	0	55 Orang		55 Orang	273.287.025	15 Orang	31.311.900	27,27 %	11,46	70 Orang	31.311.900	25,45 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Persentase Layanan Admnistrasi DPRD	500 %		100 %		100 %	2.455.805.072	100 %	687.158.862	100,00 %	27,98	200 %	687.158.862	40,00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	96 Paket	0	12 Paket		12 Paket	2.455.805.072	12 Paket	1.631.431.390	100,00 %	66,43	24 Paket	1.631.431.390	25,00 %		Sekretariat DPRD	
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN**																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		PEMERINTAHAN																								
		PERENCANAAN																								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	0	%	47.079.027.117	0	%		0	%	18.092.686.711		%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah	0	%		0	%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	0	%		0	%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	0	%		0	%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah	0	Nilai			Nilai		0	Nilai			Nilai			%			Nilai			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	0	Nilai			Nilai		0	Nilai			Nilai			%			Nilai			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Layanaan Keuangan Yang di Fasilitasi	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	%	1.388.410.005	0	%		1	%	589.423.388	0,5	%		50,00	%		0,5	%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	329.597.005	0	Dokumen		2	Dokumen	40.472.370	1	Dokumen	4.809.000	50,00	%	11,88	1	Dokumen	4.809.000		%	1,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	194.000.000	0	Dokumen		4	Dokumen	51.997.892	2	Dokumen	27.228.519	50,00	%	52,36	2	Dokumen	27.228.519		%	14,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	214.813.000	0	Laporan		2	Laporan	320.000.000	1	Laporan	13.025.250	50,00	%	4,07	1	Laporan	13.025.250		%	6,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	650.000.000	0	Laporan		2	Laporan	176.953.126	1	Laporan	30.660.800	50,00	%	17,33	1	Laporan	30.660.800		%	4,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	%	36.615.631.945	0	%		100	%	13.713.769.146	50	%		50,00	%		50	%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	orang/bulan	35.357.311.945	0	orang/bulan		105	orang/bulan	13.529.369.146	52,5	orang/bulan	3.278.182.414	50,00	%	24,23	52,5	orang/bulan	3.278.182.414		%	9,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	1.258.320.000	0	Dokumen		2	Dokumen	184.400.000	1	Dokumen	25.400.000	50,00	%	13,77	1	Dokumen	25.400.000		%	2,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	%	250.000.000	0	%		100	%	22.000.000	50	%		50,00	%		50	%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	250.000.000	0	Orang		5	Orang	22.000.000	1	Orang	2.560.000	20,00	%	11,64	1	Orang	2.560.000		%	1,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	%	1.699.778.047	0	%		100	%	1.233.717.217	50	%		50,00	%		50	%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0		Paket		0	Paket	0		Paket			%			Paket			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	377.999.805	0 Paket		1 Paket	263.124.000	0,5 Paket	8.400.000	50,00 %	3,19	0,5 Paket	8.400.000	%	2,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	524.000.000	0 Laporan		12 Laporan	105.430.000	6 Laporan	26.860.000	50,00 %	25,48	6 Laporan	26.860.000	%	5,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	0 Laporan	797.778.242	0 Laporan		5 Laporan	865.163.217	2 Laporan	152.230.850	40,00 %	17,60	2 Laporan	152.230.850	%	19,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		Dokumen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	4.394.568.440	0 %		100 %	1.793.108.460	50 %		50,00 %		50 %		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1.602.006.600	0 Laporan		1 Laporan	354.101.320	0,5 Laporan	75.709.990	50,00 %	21,38	0,5 Laporan	75.709.990	%	4,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	104.801.840	0 Laporan		1 Laporan	1.018.266.500	0,5 Laporan	348.750.000	50,00 %	34,25	0,5 Laporan	348.750.000	%	332,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	2.687.760.000	0 Laporan		1 Laporan	420.740.640	0,5 Laporan	132.100.000	50,00 %	31,40	0,5 Laporan	132.100.000	%	4,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	0 %	2.730.638.680	0 %		100 %	740.668.500	100 %		100,00 %		100 %		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya"	0 Unit	1.972.580.000	0 Unit		32 Unit	78.480.000	16 Unit		50,00 %		16 Unit		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya"	0 Unit	338.000.000	0 Unit		36 Unit	347.170.000	18 Unit	23.000.000	50,00 %	6,62	18 Unit	23.000.000	%	6,80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	30 Unit	420.058.680	0 Unit		1 Unit	315.018.500	0,5 Unit	15.706.500	50,00 %	4,99	0,5 Unit	15.706.500	1,67 %	3,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RPJMD dalam RKPD	100 %	35.095.827.200	100 %		100 %	3.461.972.200	100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Konsistensi program RKPD dalam APBD	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100,00 %		100 Persen		100,00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan Data dan Rencana dalam SIPD	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil pengendalian dan evaluasi	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perecanaan Daerah Diselesaikan Tepat Waktu	0 %	19.895.088.500	0 %		100 %	2.661.881.200	100 %		100,00 %		100 %		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0 Dokumen	12.149.091.500	0 Dokumen		2 Dokumen	738.789.400	1 Dokumen	31.400.848	50,00 %	4,25	1 Dokumen	31.400.848	%	0,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	889.306.000	0 Berita Acara		2 Berita Acara	40.413.500	1 Berita Acara	29.223.000	50,00 %	72,31	1 Berita Acara	29.223.000	%	3,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	0 Berita Acara	976.804.500	0 Berita Acara		1 Berita Acara	89.967.400	0,5 Berita Acara	33.723.400	50,00 %	37,48	0,5 Berita Acara	33.723.400	%	3,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	2.487.717.000	0 Berita Acara		1 Berita Acara	671.200.400	0,5 Berita Acara	364.872.750	50,00 %	54,36	0,5 Berita Acara	364.872.750	%	14,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	0 Dokumen	3.392.169.500	0 Dokumen		30 Dokumen	1.121.510.500	14 Dokumen	73.825.308	46,67 %	6,58	14 Dokumen	73.825.308	%	2,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan data sektoral untuk perencanaan Pembangunan Daerah	0 %	1.735.021.700	0 %		70 %	250.050.000	40 %		57,14 %		40 %		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	925.021.700	0 Dokumen		1 Dokumen	105.310.000	0,5 Dokumen	4.212.000	50,00 %	4,00	0,5 Dokumen	4.212.000	%	0,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	172 Orang	410.000.000	0 Orang		43 Orang	88.280.000	12 Orang	2.700.000	27,91 %	3,06	12 Orang	2.700.000	6,98 %	0,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah"	0 Orang	400.000.000	0 Orang		22 Orang	56.460.000	40 Orang		181,82 %		40 Orang		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase hasil Monitoring evaluasi pembangunan yang dijadikan dasar perencanaan	0 %	12.918.350.000	%		85 %	500.091.000	20 %		23,53 %		20 %		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	0	Laporan		0 Laporan	0	Laporan		%		Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0 Laporan	12.658.350.000	1 Laporan		1 Laporan	484.545.000	0,5 Laporan	131.825.000	50,00 %	27,21	1,5 Laporan	131.825.000	%	1,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota yang Difasilitasi / Evaluasi	0 Dokumen	260.000.000	22 Dokumen		22 Dokumen	15.546.000	11 Dokumen	3.867.000	50,00 %	24,87	33 Dokumen	3.867.000	%	1,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pmerintahan Daerah	Persentase Keterisian Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan	0 Persen	547.367.000	0 Persen		75 Persen	49.950.000	50 Persen		66,67 %		25 Persen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0 Dokumen	547.367.000	0 Dokumen		1 Dokumen	49.950.000	0,5 Dokumen		50,00 %		0,5 Dokumen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 Persen	29.723.091.000	Persen		96 Persen	8.295.328.276	25 Persen		26,04 %		12,5 Persen		13,02 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya alam	98 %		%		98 %		50 %		51,02 %		25 %		25,51 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase keselarasan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 %		%		95 %		75 %		78,95 %		37,5 %		39,47 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat	0	%	6.369.997.000	0	%		100	%	1.367.920.000	50	%		50,00	%		50	%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang Pemerintahan	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang Pembangunan Manusia	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	Dokumen	1.205.001.000	0	Dokumen		2	Dokumen	71.424.000	1	Dokumen	45.762.000	50,00	%	64,07	1	Dokumen	45.762.000		%	3,80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	Laporan	703.520.500	0	Laporan		5	Laporan	843.997.000	4	Laporan	421.196.298	80,00	%	49,90	4	Laporan	421.196.298		%	59,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	Laporan	655.000.000	0	Laporan		5	Laporan	50.048.000	5	Laporan	18.114.500	100,00	%	36,19	5	Laporan	18.114.500		%	2,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat	0	Laporan	792.767.000	0	Laporan		1	Laporan	121.216.000	0,5	Laporan	13.673.981	50,00	%	11,28	0,5	Laporan	13.673.981		%	1,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0	Laporan			Laporan		0	Laporan			Laporan			%			Laporan			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	Laporan	1.587.692.650	0	Laporan		9	Laporan	231.073.000	4	Laporan	144.477.362	44,44	%	62,52	4	Laporan	144.477.362		%	9,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	0	Laporan			Laporan		0	Laporan			Laporan			%			Laporan			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	0	Laporan	1.426.015.850		Laporan		0	Laporan	50.162.000		Laporan	7.839.000		%	15,63		Laporan	7.839.000		%	0,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	Laporan			Laporan		9	Laporan		4	Laporan		44,44	%		4	Laporan			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD (Urusan Pangan, Pertanian dan Perubahan Iklim)	0	%	9.978.703.400		%		100	%	3.911.121.276	25	%		25,00	%		25	%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD (Urusan Penanaman Modal, Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan)	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD (Urusan Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan ESDM)	0	%			%		0	%			%			%			%			%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																								
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD Pada Bidang Perekonomian (urusan Pangan, Pertanian,)	0 Laporan	790.000.000	0 Laporan		2 Laporan	608.000.000	1 Laporan	351.326.467	50,00 %	57,78	1 Laporan	351.326.467	%	44,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD Pada Bidang Perekonomian (urusan penanaman modal, koperasi, UMKM, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan)	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		%		Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD Pada Bidang Perekonomian (urusan Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, ESDM dan Perkebunan)	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		%		Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	1.031.140.000	0 Dokumen		1 Dokumen	668.700.000	0,5 Dokumen	470.941.096	50,00 %	70,43	0,5 Dokumen	470.941.096	%	45,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen		Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		%		Dokumen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen		Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		%		Dokumen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	989.422.800	0 Laporan		3 Laporan	788.363.996	2 Laporan	618.884.996	66,67 %	78,50	2 Laporan	618.884.996	%	62,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	2.717.785.000	0 Laporan		0 Laporan	720.167.000	Laporan	542.668.746	%	75,35	Laporan	542.668.746	%	19,97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		33,33 %		1 Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	0 Laporan	3.405.355.600	0 Laporan		2 Laporan	618.000.000	1 Laporan	517.543.296	50,00 %	83,74	1 Laporan	517.543.296	%	15,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase Capaian Perencanaan Tahunan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sub urusan Sumber daya Air, Laboratorium, bahan kontruksi, dan bina konstruksi Pekerjaan Umum dan Urusan Lingkungan Hidup	0 %	13.374.390.600	0 %		100 %	3.016.287.000	50 %		50,00 %		50 %		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Capaian Perencanaan Tahunan Pembangunan Bidang Infrastruktur sub urusan Bina marga pekerjaan umum, workhsop dan peralatan PU, sekretariat PU dan Urusan Perhubungan	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Capaian Perencanaan Tahunan Pembangunan Bidang Kewilayahan Sub Urusan Cipta karya, perumahan dan pemukiman dan bina program tata ruang pekerjaan umum	0 %		%		0 %		%		%		%		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur Sub Urusan Sumber Daya Air, Laboratorium Bahan Konstruksi, dan Bina Konstruksi yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	0 Dokumen	3.300.000.000	0 Dokumen		2 Dokumen	5.160.000	1 Dokumen	2.480.000	50,00 %	48,06	1 Dokumen	2.480.000	%	0,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sub Urusan Bina Marga PU, Workshop dan Peralatan PU, Sekretariat PU, dan Urusan Perhubungan yang Dikoordinir Penyusunannya	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		%		Dokumen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	0 Laporan	708.075.376	0 Laporan		0 Laporan	218.280.000	Laporan	123.010.500	%	56,35	Laporan	123.010.500	%	17,37	Badan Perencanaan Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sub Urusan Sumber Daya Air, Laboratorium Bahan Konstruksi, dan Bina Konstruksi															Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Sub Urusan Bina Marga PU, Workshop dan Peralatan PU, Sekretariat PU, dan Urusan Perhubungan	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		50,00 %		1 Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sub Urusan Sumber Daya Air, Laboratorium Bahan Konstruksi, dan Bina Konstruksi	0 Laporan	1.363.751.200	0 Laporan		2 Laporan	28.570.000	1 Laporan		50,00 %		1 Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sub Urusan Bina Marga PU, Workshop dan Peralatan PU, Sekretariat PU, dan Urusan Perhubungan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		%		Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur Sub Urusan Sumber Daya Air, Laboratorium Bahan Konstruksi, dan Bina Konstruksi	0 Laporan	1.857.990.800	0 Laporan		2 Laporan	110.740.000	1 Laporan	36.183.711	50,00 %	32,67	1 Laporan	36.183.711	%	1,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur Sub Urusan Bina Marga PU, Workshop dan Peralatan PU, Sekretariat PU, dan Urusan Perhubungan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		%		Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Urusan Lingkungan Hidup yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	2.500.000.000	0 Dokumen		2 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	202.270.455	50,00 %	67,42	1 Dokumen	202.270.455	%	8,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sub Urusan Cipta Karya PU, Perumahan dan Permukiman PU, dan Bina Program dan Tata Ruang PU yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		%		Dokumen		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Urusan Lingkungan Hidup	0 Laporan	661.394.224	0 Laporan		0 Laporan	1.400.000.000	Laporan	23.650.800	%	1,69	Laporan	23.650.800	%	3,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Sub Urusan Cipta Karya PU, Perumahan dan Permukiman PU, dan Bina Program dan Tata Ruang PU	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		50,00 %		1 Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Urusan Lingkungan Hidup	0 Laporan	1.356.511.200	0 Laporan		0 Laporan	6.450.000	Laporan	2.150.000	%	33,33	Laporan	2.150.000	%	0,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Sub Urusan Cipta Karya PU, Perumahan dan Permukiman PU, dan Bina Program dan Tata Ruang PU	0 Laporan		Laporan		2 Laporan		0,5 Laporan		25,00 %		0,5 Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan Urusan Lingkungan Hidup	0 Laporan	1.626.667.800	0 Laporan		0 Laporan	947.087.000	Laporan	521.427.823	%	55,06	Laporan	521.427.823	%	32,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome)/Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan Sub Urusan Cipta Karya PU, Perumahan dan Permukiman PU, dan Bina Program dan Tata Ruang PU	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		50,00 %		1 Laporan		%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		KEUANGAN																	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor IKM	0 Skor	666.700.304.198	Skor		80 Skor	90.610.296.425	80 Skor	26.735.803.218	100,00 %	29,51	80 Skor	26.735.803.218	%	4,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			Predikat AKIP	0 Predikat		Predikat		0 Predikat		Predikat		%		Predikat		%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan	100 %	2.421.831.318	100 %		100 %	515.420.100	100 %	297.919.554	100,00 %	57,80	200 %	297.919.554	200,00 %	12,30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	2.421.831.318	7 Laporan		5 Laporan	515.420.100	5 Laporan	549.295.668	100,00 %	106,57	12 Laporan	549.295.668	48,00 %	22,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitas	100 %	584.838.819.440	100 %		100 %	79.849.957.450	100 %	22.616.136.783	100,00 %	28,32	200 %	22.616.136.783	200,00 %	3,87	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang	18.420 Orang	579.364.752.790	3.684 Orang		3.684 Orang	78.934.326.000	3.684 Orang	74.613.859.317	100,00 %	94,53	7.368 Orang	74.613.859.317	40,00 %	12,88	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Orang	20 Dokumen	4.898.992.600	4 Dokumen		4 Dokumen	838.358.400	4 Dokumen	902.063.632	100,00 %	107,60	8 Dokumen	902.063.632	40,00 %	18,41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	575.074.050	1 Dokumen		1 Dokumen	77.273.050	1 Dokumen	72.000.000	100,00 %	93,18	2 Dokumen	72.000.000	40,00 %	12,52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penataan administrasi BMD	100 %	581.152.667	100 %		100 %	42.691.000	100 %	12.000.000	100,00 %	28,11	200 %	12.000.000	200,00 %	2,06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	581.152.667	4 Dokumen		4 Dokumen	42.691.000	4 Dokumen	42.438.800	100,00 %	99,41	8 Dokumen	42.438.800	40,00 %	7,30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	2.339.825.600	100 %		100 %	160.402.600	100 %	32.619.932	100,00 %	20,34	200 %	32.619.932	200,00 %	1,39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	813.667.600	5 Dokumen		4 Dokumen	79.402.600	4 Dokumen	86.163.300	100,00 %	108,51	9 Dokumen	86.163.300	45,00 %	10,59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	1.526.158.000	40 Orang		40 Orang	81.000.000	40 Orang	34.371.792	100,00 %	42,43	80 Orang	34.371.792	40,00 %	2,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 %	18.393.313.860	100 %		100 %	2.131.011.110	100 %	674.549.190	100,00 %	31,65	200 %	674.549.190	200,00 %	3,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.369.010.940	2 Paket		1 Paket	117.627.450	1 Paket	79.588.250	100,00 %	67,66	3 Paket	79.588.250	60,00 %	5,81	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Logistik kantor	5 Paket	4.284.139.010	2 Paket		1 Paket	116.419.100	1 Paket	114.301.200	100,00 %	98,18	3 Paket	114.301.200	60,00 %	2,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	8.542.022.770	1 Paket		1 Paket	1.466.958.750	1 Paket	1.701.878.163	100,00 %	116,01	2 Paket	1.701.878.163	40,00 %	19,92	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	757.464.840	6 Dokumen		4 Dokumen	37.056.810	4 Dokumen	35.750.000	100,00 %	96,47	10 Dokumen	35.750.000	50,00 %	4,72	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	1.021.563.690	12 Laporan		12 Laporan	242.949.000	9 Laporan	320.149.500	75,00 %	131,78	21 Laporan	320.149.500	35,00 %	31,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.419.112.610	12 Laporan		12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	238.354.170	100,00 %	158,90	24 Laporan	238.354.170	40,00 %	9,85	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.068.666.651	100 %		100 %	2.698.311.913	100 %	418.080.600	100,00 %	15,49	200 %	418.080.600	200,00 %	4,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit	10.068.666.651	70 Unit		50 Unit	2.698.311.913	50 Unit	2.569.954.656	100,00 %	95,24	120 Unit	2.569.954.656	48,00 %	25,52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 %	21.272.339.082	100 %		100 %	3.074.372.252	100 %	1.631.249.081	100,00 %	53,06	200 %	1.631.249.081	200,00 %	7,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	425.790.750	12 Laporan		12 Laporan	61.554.080	12 Laporan	56.500.000	100,00 %	91,79	24 Laporan	56.500.000	40,00 %	13,27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	9.253.181.827	12 Laporan		12 Laporan	2.189.804.267	12 Laporan	1.941.160.404	100,00 %	88,65	24 Laporan	1.941.160.404	40,00 %	20,98	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	11.593.366.505	4 Laporan		4 Laporan	823.013.905	4 Laporan	1.009.421.760	100,00 %	122,65	8 Laporan	1.009.421.760	40,00 %	8,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	26.784.355.580	100 %		100 %	2.138.130.000	100 %	1.053.248.078	100,00 %	49,26	200 %	1.053.248.078	200,00 %	3,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	345 Unit	9.227.897.620	69 Unit		69 Unit	1.219.690.000	69 Unit	1.521.140.468	100,00 %	124,72	138 Unit	1.521.140.468	40,00 %	16,48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	2.005.086.120	30 Unit		30 Unit	195.480.000	30 Unit	294.768.900	100,00 %	150,79	60 Unit	294.768.900	40,00 %	14,70	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	125	Gedung	15.551.371.840	25	Gedung		25	Gedung	722.960.000	25	Gedung	460.257.016	100,00 %		63,66	50	Gedung	460.257.016	40,00 %		2,96	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK	0	Nilai	7.844.941.412.861		Nilai		100	Nilai	1.063.219.635.267	100	Nilai	255.259.419.508	100,00 %		24,01	100	Nilai	255.259.419.508	%		3,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dan Penerbitan Dokumen Penganggaran	100	%	11.083.246.439	100	%		100	%	1.271.574.698	100	%	593.366.195	100,00 %		46,66	200	%	593.366.195	200,00 %		5,35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	1.352.523.037	0	Dokumen		2	Dokumen	314.257.578	2	Dokumen	255.568.505	100,00 %		81,32	2	Dokumen	255.568.505	20,00 %		18,90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Dokumen	9.730.723.402	0	Dokumen		2	Dokumen	957.317.120	2	Dokumen	996.920.642	100,00 %		104,14	2	Dokumen	996.920.642	20,00 %		10,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu	55	SK	3.397.684.637	11	SK		11	SK	543.964.508	11	SK	211.873.406	100,00 %		38,95	22	SK	211.873.406	40,00 %		6,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	55	SK	1.890.057.354	11	SK		11	SK	354.100.324	11	SK	250.695.321	100,00 %		70,80	22	SK	250.695.321	40,00 %		13,26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																								
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	180	Orang	1.507.627.283	36	Orang		36	Orang	189.864.184	36	Orang	186.197.666	100,00 %		98,07	72	Orang	186.197.666	40,00 %		12,35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah	100	%	10.495.010.267	0	%		98	%	942.123.685	98	%	134.555.130	100,00 %		14,28	98	%	134.555.130	98,00 %		1,28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	Dokumen	2.432.521.472	12	Dokumen		12	Dokumen	253.198.000	12	Dokumen	224.086.298	100,00 %		88,50	24	Dokumen	224.086.298	40,00 %		9,21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	Dokumen	2.607.353.425	12	Dokumen		12	Dokumen	248.313.060	12	Dokumen	292.868.386	100,00 %		117,94	24	Dokumen	292.868.386	40,00 %		11,23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	60	Dokumen	3.336.529.620	12	Dokumen		12	Dokumen	260.456.375	12	Dokumen	246.724.554	100,00 %		94,73	24	Dokumen	246.724.554	40,00 %		7,39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60	Dokumen	2.118.605.750	12	Dokumen		12	Dokumen	180.156.250	12	Dokumen	176.233.158	100,00 %		97,82	24	Dokumen	176.233.158	40,00 %		8,32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100	%	2.703.059.038	0	%		100	%	469.621.654	100	%	293.344.023	100,00 %		62,46	100	%	293.344.023	100,00 %		10,85	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05 %		10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	5 Perda dan Perkada	2.252.620.516	1 Perda dan Perkada		1 Perda dan Perkada	315.595.682	1 Perda dan Perkada	307.189.933	100,00 %	97,34	2 Perda dan Perkada	307.189.933	40,00 %	13,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 Dokumen	450.438.522	10 Dokumen		10 Dokumen	154.025.972	10 Dokumen	146.687.490	100,00 %	95,24	20 Dokumen	146.687.490	40,00 %	32,57	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	7.814.272.281.749	0 %		100 %	1.059.488.719.722	100 %	253.923.050.754	100,00 %	23,97	100 %	253.923.050.754	100,00 %	3,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60 Laporan	2.317.316.110.000	22 Laporan		12 Laporan	168.309.860.000	12 Laporan	54.759.180.000	100,00 %	32,53	34 Laporan	54.759.180.000	56,67 %	2,36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20 Laporan	1.289.058.861.126	4 Laporan		4 Laporan	8.897.877.996	3 Laporan		75,00 %		7 Laporan		35,00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	20 Laporan	4.207.897.310.623	4 Laporan		4 Laporan	882.280.981.726	4 Laporan	739.643.062.875	100,00 %	83,83	8 Laporan	739.643.062.875	40,00 %	17,58	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0 %	2.990.130.731	0 %		100 %	503.631.000	100 %	103.230.000	100,00 %	20,50	100 %	103.230.000	%	3,45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	860 Orang	2.990.130.731	172 Orang		172 Orang	503.631.000	172 Orang	496.863.024	100,00 %	98,66	344 Orang	496.863.024	40,00 %	16,62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	25.958.411.344	0 %		90 %	1.628.473.849	90 %	1.615.380.646	100,00 %	99,20	45 %	1.615.380.646	45,00 %	6,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	25.958.411.344	0 %		100 %	1.628.473.849	100 %	1.615.380.646	100,00 %	99,20	100 %	1.615.380.646	100,00 %	6,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen	2.549.388.478	1 Dokumen		1 Dokumen	84.185.200	1 Dokumen	73.763.503	100,00 %	87,62	2 Dokumen	73.763.503	40,00 %	2,89	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	60 Laporan	3.996.944.759	12 Laporan		12 Laporan	409.987.700	12 Laporan	1.351.732.951	100,00 %	329,70	24 Laporan	1.351.732.951	40,00 %	33,82	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	20 Laporan	13.107.925.668	4 Laporan		4 Laporan	507.231.600	4 Laporan	164.460.936	100,00 %	32,42	8 Laporan	164.460.936	40,00 %	1,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	60 Dokumen	3.491.906.809	12 Dokumen		12 Dokumen	386.609.749	12 Dokumen	368.116.711	100,00 %	95,22	24 Dokumen	368.116.711	40,00 %	10,54	Badan Pengelolaan Keuangan dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dan Penghapusan Barang Milik Daerah															Pendapatan Daerah	
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	2.812.245.630	12 Orang		12 Orang	240.459.600	12 Orang	154.550.507	100,00 %	64,27	24 Orang	154.550.507	40,00 %	5,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,7 %	97.284.664.827	%		106,1 %	13.543.189.362	106,1 %	5.843.476.187	100,00 %	43,15	53,05 %	5.843.476.187	791,79 %	6,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target	0 %	97.284.664.827	0 %		100 %	13.543.189.362	100 %	5.843.476.187	100,00 %	43,15	100 %	5.843.476.187	%	6,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target	0 %		0 %		100 %		100 %		100,00 %		100 %		%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	5.167.273.393	4 Laporan		4 Laporan	481.392.500	4 Laporan	537.629.010	100,00 %	111,68	8 Laporan	537.629.010	40,00 %	10,40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60 Laporan	31.761.576.232	12 Laporan		12 Laporan	1.800.175.689	12 Laporan	1.808.679.241	100,00 %	100,47	24 Laporan	1.808.679.241	40,00 %	5,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	48 Sarana dan Prasarana	29.346.066.270	48 Sarana dan Prasarana		48 Sarana dan Prasarana	7.574.943.077	48 Sarana dan Prasarana	7.281.558.412	100,00 %	96,13	96 Sarana dan Prasarana	7.281.558.412	200,00 %	24,81	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60 Laporan	22.186.970.754	12 Laporan		12 Laporan	3.087.350.410	12 Laporan	3.090.710.776	100,00 %	100,11	24 Laporan	3.090.710.776	40,00 %	13,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	60 Laporan	2.881.092.488	12 Laporan		12 Laporan	185.477.642	12 Laporan	203.857.240	100,00 %	109,91	24 Laporan	203.857.240	40,00 %	7,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	25 Laporan	2.684.441.955	5 Laporan		5 Laporan	176.031.100	5 Laporan	174.405.557	100,00 %	99,08	10 Laporan	174.405.557	40,00 %	6,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 Laporan	3.257.243.735	12 Laporan		12 Laporan	237.818.944	12 Laporan	270.526.121	100,00 %	113,75	24 Laporan	270.526.121	40,00 %	8,31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		KEPEGAWAIAN																	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Nilai SAKIP	85 %	88.496.249.954	77 %		75 %	14.878.721.127	78,81 %	3.704.018.126	105,08 %	24,89	77,905 %	3.704.018.126	91,65 %	4,19	Badan Kepegawaian Daerah	
			Persentase Capaian Skor Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	86 %		86 %		84,5 %		89,39 %		105,79 %		87,695 %		101,97 %		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.858.087.174	85 %		85 %	86.278.321	85 %	27.076.260	100,00 %	31,38	170 %	27.076.260	170,00 %	1,46	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	1.223.129.636	8 Dokumen		6 Dokumen	71.215.321	6 Dokumen	69.469.581	100,00 %	97,55	14 Dokumen	69.469.581	46,67 %	5,68	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	448.991.862	1 Dokumen		1 Dokumen	5.427.000	1 Dokumen	5.427.000	100,00 %	100,00	2 Dokumen	5.427.000	40,00 %	1,21	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	185.965.676	4 Laporan		4 Laporan	9.636.000	4 Laporan	9.636.000	100,00 %	100,00	8 Laporan	9.636.000	40,00 %	5,18	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat	98 %	60.052.432.521	85 %		85 %	12.692.528.050	85 %	3.115.987.896	100,00 %	24,55	170 %	3.115.987.896	173,47 %	5,19	Badan Kepegawaian	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Daerah															Daerah	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.700 Orang/Bulan	58.869.150.737	1.080 Orang/Bulan		1.140 Orang/Bulan	12.590.019.050	1.140 Orang/Bulan	12.266.279.274	100,00 %	97,43	2.220 Orang/Bulan	12.266.279.274	38,95 %	20,84	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.086.698.064	12 Dokumen		12 Dokumen	99.220.000	12 Dokumen	96.976.438	100,00 %	97,74	24 Dokumen	96.976.438	40,00 %	8,92	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	96.583.720	1 Laporan		1 Laporan	3.289.000	1 Laporan	3.288.750	100,00 %	99,99	2 Laporan	3.288.750	40,00 %	3,41	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.743.790.320	70 %		85 %	81.565.750	85 %	20.371.976	100,00 %	24,98	155 %	20.371.976	155,00 %	1,17	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	325.905.000	1 Paket		0 Paket	0	Paket		%		1 Paket		50,00 %		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	370 Orang	789.121.728	100 Orang		85 Orang	58.415.750	85 Orang	45.737.726	100,00 %	78,30	185 Orang	45.737.726	50,00 %	5,80	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 Orang	628.763.592	1 Orang		2 Orang	23.150.000	1 Orang	10.242.820	50,00 %	44,25	2 Orang	10.242.820	2,17 %	1,63	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.054.692.067	95,71 %		85 %	626.686.440	85 %	75.568.265	100,00 %	12,06	180,71 %	75.568.265	180,71 %	1,50	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	61.626.211	1 Paket		1 Paket	7.118.970	1 Paket	6.884.936	100,00 %	96,71	2 Paket	6.884.936	40,00 %	11,17	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	1.535.003.150	1 Paket		1 Paket	243.512.500	1 Paket	243.467.400	100,00 %	99,98	2 Paket	243.467.400	40,00 %	15,86	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	153.551.599	1 Paket		1 Paket	21.339.950	1 Paket	19.089.950	100,00 %	89,46	2 Paket	19.089.950	40,00 %	12,43	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	144.345.687	0,9 Dokumen		0 Dokumen	0	Dokumen		%		0,9 Dokumen		18,00 %		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	95.517.500	0,8 Laporan		1 Laporan	3.655.000	1 Laporan	3.655.000	100,00 %	100,00	1,8 Laporan	3.655.000	36,00 %	3,83	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.624.780.786	1 Laporan		26 Laporan	331.060.000	26 Laporan	289.986.150	100,00 %	87,59	27 Laporan	289.986.150	540,00 %	11,05	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.500 Dokumen	439.867.134	1.500 Dokumen		1.500 Dokumen	20.000.020	1.500 Dokumen	20.000.020	100,00 %	100,00	3.000 Dokumen	20.000.020	40,00 %	4,55	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.786.458.816	100 %		100 %		%		%	nan	100 %		100,00 %		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	16 Unit	929.650.000	Unit		0 Unit	0	Unit		%		Unit		%		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Paket	502.119.099	Paket		0 Paket	0	Paket		%		Paket		%		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	354.689.717	1 Unit		0 Unit	0	Unit		%		1 Unit		25,00 %		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.958.774.164	95,67 %		85 %	983.561.121	85 %	331.474.189	100,00 %	33,70	180,67 %	331.474.189	180,67 %	6,68	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	21.933.507	1 Laporan		1 Laporan	780.000	1 Laporan	580.000	100,00 %	74,36	2 Laporan	580.000	40,00 %	2,64	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	3.412.272.583	1 Laporan		1 Laporan	673.663.524	1 Laporan	665.507.918	100,00 %	98,79	2 Laporan	665.507.918	40,00 %	19,50	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	1.524.568.074	1 Laporan		1 Laporan	309.117.597	1 Laporan	306.331.923	100,00 %	99,10	2 Laporan	306.331.923	40,00 %	20,09	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.042.014.892	99 %		85 %	408.101.445	85 %	133.539.540	100,00 %	32,72	184 %	133.539.540	184,00 %	1,02	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Unit	1.723.267.642	25	Unit		25	Unit	273.721.445	25	Unit	246.480.900	100,00	%	90,05	50	Unit	246.480.900	200,00	%	14,30	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	75	Unit	178.527.250	25	Unit		15	Unit	10.630.000	15	Unit	10.610.490	100,00	%	99,82	40	Unit	10.610.490	53,33	%	5,94	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	11.055.000.000	1	Unit		1	Unit	99.960.000	1	Unit	99.900.000	100,00	%	99,94	2	Unit	99.900.000	200,00	%	0,90	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	35	unit	85.220.000	10	unit		29	unit	23.790.000	29	unit	23.400.000	100,00	%	98,36	39	unit	23.400.000	111,43	%	27,46	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Skor Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	300	Skor	33.806.783.289	175	Skor		300	Skor	2.366.838.960	253	Skor	1.075.667.608	84,33	%	45,45	428	Skor	1.075.667.608	142,67	%	3,18	Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Dimensi Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Aspek Manajemen Kinerja pada Indeks Penerapan Sistem Merit	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Nilai Aspek Pengadaan Kebutuhan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	80	Skor		58,03	Skor		27,5	Skor		76,92	Skor		279,71	%		134,95	Skor		168,69	%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Aspek Sistem Informasi pada Indeks Penerapan Sistem Merit	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Penerapan Sistem Merit	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
			Skor Dimensi Kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN	0	Skor			Skor		0	Skor			Skor			%			Skor			%		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90	%	10.995.715.636	101,51	%		90	%	672.708.600	90	%	333.746.975	100,00	%	49,61	191,51	%	333.746.975	212,79	%	3,04	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5	Dokumen	5.356.348.384	1	Dokumen		1	Dokumen	445.137.600	1	Dokumen	423.058.766	100,00	%	95,04	2	Dokumen	423.058.766	40,00	%	7,90	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	Dokumen	560.244.188	1	Dokumen		1	Dokumen	22.130.400	1	Dokumen	22.130.400	100,00	%	100,00	2	Dokumen	22.130.400		%	3,95	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi	1	Lembaga	2.457.526.600	1	Lembaga		1	Lembaga	82.981.200	1	Lembaga	69.026.660	100,00	%	83,18	2	Lembaga	69.026.660	200,00	%	2,81	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																								
	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Laporan	1.499.629.781	1	Laporan		1	Laporan	122.459.400	1	Laporan	104.767.321	100,00	%	85,55	2	Laporan	104.767.321	40,00	%	6,99	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95	%	7.451.778.194	85,69	%		95	%	853.952.920	95	%	504.997.740	100,00	%	59,14	180,69	%	504.997.740	190,20	%	6,78	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	4	Dokumen	784.858.535	4	Dokumen		4	Dokumen	27.663.250	4	Dokumen	27.663.250	100,00	%	100,00	8	Dokumen	27.663.250	200,00	%	3,52	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5	Laporan	1.142.261.400	4	Laporan		1	Laporan	44.395.800	1	Laporan	42.380.444	100,00	%	95,46	5	Laporan	42.380.444	100,00	%	3,71	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5	Dokumen	5.524.658.259	4	Dokumen		1	Dokumen	781.893.870	1	Dokumen	754.620.213	100,00	%	96,51	5	Dokumen	754.620.213	100,00	%	13,66	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90	%	11.252.998.241	97,9	%		90	%	710.884.200	90	%	220.346.625	100,00	%	31,00	187,9	%	220.346.625	208,78	%	1,96	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi meningkat Kapasitasnya	0	Orang	553.756.799	705	Orang		500	Orang	65.826.000	534	Orang	59.403.113	106,80	%	90,24	1.239	Orang	59.403.113		%	10,73	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5	Dokumen	1.572.847.334	1	Dokumen		1	Dokumen	76.041.000	1	Dokumen	54.387.882	100,00	%	71,52	2	Dokumen	54.387.882	40,00	%	3,46	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	5	Dokumen	6.356.327.969	1	Dokumen		1	Dokumen	433.006.000	1	Dokumen	375.895.185	100,00	%	86,81	2	Dokumen	375.895.185	40,00	%	5,91	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5	Dokumen	2.082.662.974	1	Dokumen		1	Dokumen	83.880.200	1	Dokumen	60.255.248	100,00	%	71,83	2	Dokumen	60.255.248	40,00	%	2,89	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5	Dokumen	687.403.165	1	Dokumen		1	Dokumen	52.131.000	1	Dokumen	49.187.461	100,00	%	94,35	2	Dokumen	49.187.461	40,00	%	7,16	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95	%	4.106.291.218	104,45	%		95	%	129.293.240	95	%	16.576.268	100,00	%	12,82	199,45	%	16.576.268	209,95	%	0,40	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	Dokumen	2.061.504.377	12	Dokumen		12	Dokumen	50.869.240	12	Dokumen	45.477.378	100,00	%	89,40	24	Dokumen	45.477.378	40,00	%	2,21	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	3.800	Orang	662.875.059	817	Orang		500	Orang	25.864.000	368	Orang	25.795.000	73,60	%	99,73	1.185	Orang	25.795.000	31,18	%	3,89	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	172	Orang	338.677.177	43	Orang		43	Orang	13.831.600	50	Orang	11.526.800	116,28	%	83,34	93	Orang	11.526.800	54,07	%	3,40	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	86	Laporan	1.043.234.605	20	Laporan		20	Laporan	38.728.400	23	Laporan	36.071.732	115,00	%	93,14	43	Laporan	36.071.732	50,00	%	3,46	Badan Kepegawaian Daerah	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai IKM	70	-		0	-		70	-	18.205.539.931	-		802.331.939		%	4,41	-		802.331.939		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Nilai SAKIP	70	Skor			Skor		70	Skor		73,63	Skor		105,19	%		73,63	Skor		105,19	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen		100	persen		100	persen	250.670.737	100	persen		100,00	%		100	persen		100,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	dokumen	0	100	dokumen		10	dokumen	155.000.000	10	dokumen		100,00	%		110	dokumen		110,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200	laporan	0	200	laporan		100	laporan	20.670.737	100	laporan		100,00	%		300	laporan		150,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	laporan	0	20	laporan		2	laporan	75.000.000	2	laporan		100,00	%		22	laporan		110,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100	persen		100	persen		100	persen	14.990.694.503	100	persen		100,00	%		100	persen		100,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.800	orang/bulan	0	600	orang/bulan		1.800	orang/bulan	14.780.976.503	1.800	orang/bulan		100,00	%		2.400	orang/bulan		133,33	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	dokumen	0	7	dokumen		7	dokumen	209.718.000	7	dokumen		100,00	%		14	dokumen			%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi BMD PD	100	persen		100	persen		100	persen			persen			%	nan	50	persen		50,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi retribusi daerah pendidikan dan pelatihan	100	persen		0	persen		100	persen			persen			%	nan		persen			%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	100	persen		0	persen		100	persen	20.000.000	100	persen		100,00	%		50	persen		50,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	0	1	paket		0	paket	0		paket			%		1	paket		100,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	orang	0	71	orang		4	orang	20.000.000	4	orang		100,00	%		75	orang		93,75	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100	persen		100	persen		100	persen	2.474.174.691	87,1	persen	579.307.257	87,10	%	23,41	93,55	persen	579.307.257	93,55	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	0	2	paket		2	paket	8.000.000	2	paket		100,00	%		4	paket		200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	paket	0	8	paket		8	paket	52.376.000	8	paket		100,00	%		16	paket		200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	0	4	paket		4	paket	38.920.001	4	paket		100,00	%		8	paket		200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket	0	7	paket		7	paket	7.624.000	7	paket	12.636.900	100,00	%	165,75	14	paket	12.636.900	200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	laporan	0		laporan		0	laporan	0		laporan			%			laporan			%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	0	2	laporan		2	laporan	247.304.000	2	laporan	282.767.971	100,00	%	114,34	4	laporan	282.767.971	200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	0	3	laporan		3	laporan	1.024.145.890	3	laporan	760.513.964	100,00	%	74,26	6	laporan	760.513.964	200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	laporan	0	3	laporan		3	laporan	5.000.000	3	laporan		100,00	%		6	laporan		200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	0	4	laporan		4	laporan	1.090.804.800	4	laporan	1.090.730.400	100,00	%	99,99	8	laporan	1.090.730.400	200,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen		0	persen		100	persen			persen			%	nan		persen			%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit	0		unit		0	unit	0		unit			%			unit			%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen		100	persen		100	persen		100	persen		100,00	%	nan	100	persen		100,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	0	1	laporan		0	laporan	0		laporan			%		1	laporan		100,00	%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	persentase pemeliharaan BMD	100	persen		100	persen		100	persen	470.000.000	90,55	persen	223.024.682	90,55	%	47,45	95,275	persen	223.024.682	95,28	%		Badan Pengembangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52			
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintahan Daerah																Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	0	1 unit		1 unit	170.000.000	1 unit	274.250.000	100,00 %	161,32	2 unit	274.250.000	200,00 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	0	50 unit		50 unit	20.000.000	50 unit	64.848.402	100,00 %	324,24	100 unit	64.848.402	200,00 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	0	10 unit		2 unit	280.000.000	2 unit	278.895.232	100,00 %	99,61	12 unit	278.895.232	120,00 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta sertifikasi Kompetensi	84 persen		0 persen		78 persen		13,33 persen		17,09 %	nan	6,665 persen		7,93 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi teknis inti	84 persen		0 persen		78 persen		100,002 persen		128,21 %		50,001 persen		59,53 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional	84 persen		0 persen		78 persen		100 persen		128,21 %		50 persen		59,52 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi manajerial	84 persen		0 persen		78 persen		100 persen		128,21 %		50 persen		59,52 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis inti	99 persen		100 persen		97 persen	1.015.253.999	100,02 persen	2.695.189.825	103,11 %	265,47	100,01 persen	2.695.189.825	101,02 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase penyelenggaraan sertifikasi Kompetensi	99 persen		100 persen		97 persen		100 persen		103,09 %		100 persen		101,01 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional	99 persen		0 persen		97 persen		100 persen		103,09 %		50 persen		50,51 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial	0 persen		0 persen		97 persen		171 persen		176,29 %		85,5 persen		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			persentase kerjasamaAntar Lembaga	99 persen		0 persen		0 persen		persen		%		persen		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase pengembangan kompetensi teknis inti	99 persen		100 persen		97 persen	346.920.666	100,02 persen	75.585.120	103,11 %	21,79	100,01 persen	75.585.120	101,02 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			persentase pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional	0 persen		0 persen		97 persen		100 persen		96,91 %		50 persen		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Pengembangan inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	800 orang	0	70 orang		70 orang	346.920.666	93 orang	342.465.562	132,86 %	98,72	163 orang	342.465.562	20,38 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Peserta Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	0 orang		0 orang		75 orang		106 orang		141,33 %		106 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Pengembangan Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	0 orang		0 orang		75 orang		139 orang		185,33 %		139 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	0 orang		0 orang		25 orang		23 orang		92,00 %		23 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Pilihan	0 orang		0 orang		50 orang		50 orang		100,00 %		50 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase pelaksanaan sertifikasi/ uji kompetensi	99 persen		100 persen		97 persen	668.333.333	100 persen	2.619.604.705	103,09 %	391,96	100 persen	2.619.604.705	101,01 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			persentase pengembangan kompetensi manajerial	0 persen		0 persen		97 persen		100 persen		103,09 %		50 persen		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			persentase pengembangan kompetensi teknis fungsional	0 persentase		0 persentase		97 persentase		100 persentase		103,09 %		100 persentase		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	800 orang	0	168 orang		30 orang	30.000.000	30 orang	29.038.121	100,00 %	96,79	198 orang	29.038.121	24,75 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 laporan	0	2 laporan		2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	100,00 %	100,00	4 laporan	50.000.000	200,00 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 dokumen	0	2 dokumen		2 dokumen	50.000.000	dokumen		%		2 dokumen		100,00 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi jabatan Fungsional)	750 orang	0	385 orang		25 orang	538.333.333	25 orang	3.050.273.931	100,00 %	566,61	410 orang	3.050.273.931	54,67 %		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	0 orang		0 orang		20 orang		20 orang		100,00 %		20 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	0 orang		0 orang		375 orang		375 orang		100,00 %		375 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural	0 orang		0 orang		50 orang		50 orang		100,00 %		50 orang		%		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan Stakeholder	75 Persen	6.686.115.000	Persen		70 Persen	885.163.619	100 Persen		142,86 %		50 Persen		66,67 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Indeks Inovasi Daerah	60,5 Angka		Angka		60 Angka		Angka		%		Angka		%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Policy Brief Hasil Riset yang diaplikasikan Stakeholder pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	75 %	895.000.000	%		70 %	200.000.000	100 %		142,86 %		100 %		133,33 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	11 Artikel		0 Artikel		3 Artikel		Artikel		%		Artikel		%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.02.0013	Perumusan Rekomendasi dan Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																	
	5.05.02.1.02.005	Fasiltasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 Laporan	895.000.000	0 Laporan		1 Laporan	200.000.000	0,61 Laporan	120.192.996	61,00 %	60,10	0,61 Laporan	120.192.996	12,20 %	13,43	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Police Brief Hasil Riset yang diaplikasikan Stakeholder pada Bidang Sosial dan Kependudukan del yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	75	%		%			70	%		100	%		142,86	%	nan	100	%		133,33	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Naskah Jurnal Bidang Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	11	Artikel		0	Artikel		3	Artikel			Artikel			%			Artikel			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																							
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Police Brief Hasil Riset yang diaplikasikan Stakeholder pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75	%	895.000.000	%			70	%	180.000.000	100	%		142,86	%		100	%		133,33	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	0	Artikel		0	Artikel		3	Artikel			Artikel			%			Artikel			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	-	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	5	Dokumen	895.000.000	0	Dokumen		1	Dokumen	180.000.000	0,65	Dokumen	118.647.560	65,00	%	65,92	0,65	Dokumen	118.647.560	13,00	%	13,26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																							
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																							
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Policy Brief hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang diaplikasikan Stakeholder	75	%	4.896.115.000	%			70	%	505.163.619	%				%		%			%			Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Artikel Hasil Pengembangan Teknologi yang masuk Jurnal Ilmiah	6	Artikel		0	Artikel		2	Artikel			Artikel			%			Artikel			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Persentase Publikasi Hasil Riset	100	Persentase			Persentase		100	Persentase		35	Persentase		35,00	%		35	Persentase		35,00	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Persentase Hak Kekayaan Intetektual (HKI) yang terlindungi dan Kerjasama yang terdata	100	Persentase			Persentase		100	Persentase		25	Persentase		25,00	%		25	Persentase		25,00	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Inovasi yang Dihasilkan	6	Dokumen		0	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		100,00	%		2	Dokumen		33,33	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jambi	2,2	Indeks IDSD		0	Indeks IDSD		1,9	Indeks IDSD			Indeks IDSD			%			Indeks IDSD			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Peta Jalan Produk Unggulan SIDa yang Dihasilkan	3	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen			Dokumen			%			Dokumen			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Inovasi Daerah yang dihasilkan di Provinsi Jambi	248	Inovasi		0	Inovasi		77	Inovasi			Inovasi			%			Inovasi			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Jumlah Inovasi Produk Daerah yang dihasilkan Provinsi Jambi	36	Jumlah Inovasi Produk Daerah		0	Jumlah Inovasi Produk Daerah		6	Jumlah Inovasi Produk Daerah			Jumlah Inovasi Produk Daerah			%			Jumlah Inovasi Produk Daerah			%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	25	Laporan	2.091.570.000	0	Laporan		1	Laporan	171.853.000	0,75	Laporan	75.669.944	75,00	%	44,03	0,75	Laporan	75.669.944	3,00	%	3,62	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	15	Laporan	1.421.145.000	0	Laporan		2	Laporan	128.147.000	1,52	Laporan	83.597.233	76,00	%	65,24	1,52	Laporan	83.597.233	10,13	%	5,88	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi dan HAsil-hasil Kelitbangan	15	Laporan	1.383.400.000	0	Laporan		3	Laporan	153.363.619	1,656	Laporan	63.603.401	55,20	%	41,47	1,656	Laporan	63.603.401	11,04	%	4,60	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																							
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Angka	58.830.380.000	Angka			80	Angka	9.006.615.232	84,167	Angka		105,21	%		84,167	Angka		102,64	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Nilai AKIP	70,5	Angka		Angka			70,01	Angka		67,65	Angka		96,63	%		67,65	Angka		95,96	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	100	%	2.005.000.000	%			100	%	166.332.500	25	%		25,00	%		25	%		25,00	%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi	35 Dokumen	1.805.000.000	0 Dokumen		9 Dokumen	155.127.500	3,36 Dokumen	61.231.339	37,33 %	39,47	3,36 Dokumen	61.231.339	9,60 %	3,39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
	5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen		3 Dokumen	9.435.000	0,48 Dokumen	2.562.750	16,00 %	27,16	0,48 Dokumen	2.562.750	4,80 %	1,28	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	46.900.000.000	%		100 %	7.417.859.021	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 Orang/Bulan	46.900.000.000	0 Orang/Bulan		60 Orang/Bulan	7.417.859.021	29,34 Orang/Bulan	3.509.531.221	48,90 %	47,31	29,34 Orang/Bulan	3.509.531.221	9,78 %	7,48	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		%		100 %		25 %		25,00 %	nan	25 %		25,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 %		%		100 %	21.750.000	25 %		25,00 %		25 %		2.500,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.900.000.000	%		100 %	312.057.002	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	125.000.000	0 Paket		1 Paket	9.360.000	0,5 Paket	3.374.742	50,00 %	36,05	0,5 Paket	3.374.742	10,00 %	2,70	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.000.000.000	0 Paket		2 Paket	92.001.000	0,968 Paket	45.549.688	48,40 %	49,51	0,968 Paket	45.549.688	9,68 %	4,55	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	0 Paket		1 Paket	5.100.000	0,648 Paket	900.000	64,80 %	17,65	0,648 Paket	900.000	12,96 %	0,45	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	275.000.000	0 Paket		2 Paket	14.950.000	1,3 Paket	7.564.317	65,00 %	50,60	1,3 Paket	7.564.317	13,00 %	2,75	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	2.300.000.000	0 Laporan		50 Laporan	190.646.002	25,05 Laporan	87.683.445	50,10 %	45,99	25,05 Laporan	87.683.445	10,02 %	3,81	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.450.000.000	%		100 %	478.110.271	%		%		%		%		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1.250.000.000	0 Unit		1 Unit	399.981.220	0,03 Unit		3,00 %		0,03 Unit		0,60 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.1.02.004	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	0 Paket		1 Paket	60.018.780	0,2 Paket		20,00 %		0,2 Paket		4,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.800.000.000	%		100 %	362.506.438	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	250.000.000	0 Laporan		12 Laporan	36.200.000	6 Laporan	18.000.000	50,00 %	49,72	6 Laporan	18.000.000	10,00 %	7,20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.250.000.000	0 Laporan		12 Laporan	159.800.633	6 Laporan	59.329.766	50,00 %	37,13	6 Laporan	59.329.766	10,00 %	4,75	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1.300.000.000	0 Laporan		2 Laporan	166.505.805	1 Laporan	65.250.000	50,00 %	39,19	1 Laporan	65.250.000	10,00 %	5,02	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.775.380.000	%		100 %	248.000.000	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan PAjaknya	119 Unit	1.600.380.000	0 Unit		23 Unit	238.000.000	11,5 Unit	135.241.275	50,00 %	56,82	11,5 Unit	135.241.275	9,66 %	8,45	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	175.000.000	0 Unit		32 Unit	10.000.000	25,6 Unit	4.217.470	80,00 %	42,17	25,6 Unit	4.217.470	17,07 %	2,41	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		PENGELOLAAN PENGHUBUNG																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Pelayanan Penghubung Yang Optimal	100	%		0	%		100	%	499.403.240	50	%		50,00	%		25	%		25,00	%		Badan Penghubung Daerah	
	2.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	0	persetanse		0	persetanse		100	persetanse	499.403.240	12,5	persetanse		12,50	%		12,5	persetanse			%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	83.238.240	50	Persentase	40.895.000	50,00	%	49,13	50	Persentase	40.895.000		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Seni Budaya (event)	0	Event	0	0	Event		100	Event	416.165.000	50	Event	234.597.500	50,00	%	56,37	50	Event	234.597.500		%		Badan Penghubung Daerah	
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	70,01	Nilai			Nilai		68	Nilai	13.186.177.540	70	Nilai		102,94	%		70	Nilai		99,99	%		Badan Penghubung Daerah	
	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	90	Dokumen		0	Dokumen		15	Dokumen			Dokumen			%	nan		Dokumen			%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanananya Administrasi Keuangan	100	%		0	%		100	%	7.151.177.619	50	%		50,00	%		50	%		50,00	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (bulan)	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	6.725.897.619	50	Persentase	4.546.136.352	50,00	%	67,59	50	Persentase	4.546.136.352		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Penanggungjawab Pengelola	0	persentase	0	0	persentase		100	persentase	425.280.000	50	persentase	243.920.000	50,00	%	57,36	50	persentase	243.920.000		%		Badan Penghubung Daerah	
	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100	%		0	%		100	%	205.500.000		%			%			%			%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya administrasi Barang Miliki Daerah	0	persentase	0	0	persentase		100	persentase	205.500.000		persentase			%			persentase			%		Badan Penghubung Daerah	
	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100	%			%		100	%			%			%	nan		%			%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	0	Persentase	0		Persentase		0	Persentase	0		Persentase			%			Persentase			%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	0	Persentase	0	0	Persentase		0	Persentase	0		Persentase			%			Persentase			%		Badan Penghubung Daerah	
	1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	100	%			%		100	%	2.015.405.268	25	%		25,00	%		25	%		25,00	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	28.253.600	25	Persentase	5.254.000	25,00	%	18,60	25	Persentase	5.254.000		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan jenis alat tulis kantor	0	persentase	0	0	persentase		100	persentase	125.921.438	50	persentase	97.568.790	50,00	%	77,48	50	persentase	97.568.790		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan bahan logistik kantor	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	717.292.500	50	Persentase	372.620.750	50,00	%	51,95	50	Persentase	372.620.750		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	27.252.150	50	Persentase	13.410.000	50,00	%	49,21	50	Persentase	13.410.000		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah Rapat koordinasi dan kunsultasi dalam dan luar daerah	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	806.685.580	50	Persentase	603.809.460	50,00	%	74,85	50	Persentase	603.809.460		%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	Persentase	0	0	Persentase		100	Persentase	310.000.000		Persentase			%			Persentase			%		Badan Penghubung Daerah	
	1.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%			%		100	%			%			%	nan		%			%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	0	Persentase	0	0	Persentase		0	Persentase	0		Persentase			%			Persentase			%		Badan Penghubung Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	0 Persentase	0	Persentase		0 Persentase	0	Persentase		%		Persentase		%		Badan Penghubung Daerah	
	1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	100 %		%		100 %	3.373.968.653	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat dan barang keluar daerah	0 Kali	0	0 Kali		100 Kali	132.100.000	50 Kali	68.380.000	50,00 %	51,76	50 Kali	68.380.000	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	0 Bulan	0	0 Bulan		100 Bulan	1.466.073.935	50 Bulan	864.545.998	50,00 %	58,97	50 Bulan	864.545.998	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengiisian tabung gas	0 Kali	0	0 Kali		100 Kali	96.431.868	Kali	50.400.000	%	52,26	Kali	50.400.000	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	0 Bulan	0	0 Bulan		100 Bulan	1.090.402.850	50 Bulan	573.746.406	50,00 %	52,62	50 Bulan	573.746.406	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	0 Persentase	0	0 Persentase		100 Persentase	588.960.000	50 Persentase	394.634.370	50,00 %	67,01	50 Persentase	394.634.370	%		Badan Penghubung Daerah	
	1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %		%		100 %	440.126.000	25 %		25,00 %		25 %		25,00 %		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	0 Unit	0	0 Unit		100 Unit	196.884.000	50 Unit	99.062.550	50,00 %	50,32	50 Unit	99.062.550	%		Badan Penghubung Daerah	
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit		100 Unit	243.242.000	50 Unit	205.410.491	50,00 %	84,45	50 Unit	205.410.491	%		Badan Penghubung Daerah	
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
		INSPEKTORAT DAERAH																	
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	80 Persen	46.144.000.791	90,83 Persen		76 Persen	5.226.553.042	94,12 Persen	2.034.385.020	123,84 %	38,92	92,475 Persen	2.034.385.020	115,59 %	4,41	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	80 Persen	40.490.096.200	90,83 Persen		76 Persen	3.998.843.420	88,24 Persen	1.606.919.400	116,11 %	40,18	89,535 Persen	1.606.919.400	111,92 %	3,97	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	280 LAPORAN	9.313.918.391	54 LAPORAN		56 LAPORAN	753.664.000	56 LAPORAN	1.125.525.817	100,00 %	149,34	110 LAPORAN	1.125.525.817	39,29 %	12,08	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	201 LAPORAN	7.113.238.783	40 LAPORAN		40 LAPORAN	944.075.000	40 LAPORAN	1.082.380.893	100,00 %	114,65	80 LAPORAN	1.082.380.893	39,80 %	15,22	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	109 LAPORAN	637.597.235	21 LAPORAN		21 LAPORAN	129.278.000	11 LAPORAN	172.368.150	52,38 %	133,33	32 LAPORAN	172.368.150	29,36 %	27,03	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	279 LAPORAN	1.466.473.640	55 LAPORAN		55 LAPORAN	520.598.060	55 LAPORAN	575.967.375	100,00 %	110,64	110 LAPORAN	575.967.375	39,43 %	39,28	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	107 LAPORAN	13.702.729.693	21 LAPORAN		21 LAPORAN	840.796.160	11 LAPORAN	672.985.605	52,38 %	80,04	32 LAPORAN	672.985.605	29,91 %	4,91	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	775 DOKUMEN	8.256.138.458	155 DOKUMEN		155 DOKUMEN	810.432.200	155 DOKUMEN	757.057.317	100,00 %	93,41	310 DOKUMEN	757.057.317	40,00 %	9,17	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	5.653.904.591	42,86 Persen		100 Persen	1.227.709.622	100 Persen	427.465.620	100,00 %	34,82	71,43 Persen	427.465.620	71,43 %	7,56	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10 LAPORAN	415.598.950	2 LAPORAN		2 LAPORAN	166.971.210	LAPORAN	131.170.465	%	78,56	2 LAPORAN	131.170.465	20,00 %	31,56	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95 LAPORAN	5.238.305.641	19 LAPORAN		19 LAPORAN	1.060.738.412	19 LAPORAN	1.147.198.242	100,00 %	108,15	38 LAPORAN	1.147.198.242	40,00 %	21,90	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	60 Persen	14.441.916.279	34,56 Persen		48 Persen	2.026.107.595	35,35 Persen	836.848.594	73,65 %	41,30	34,955 Persen	836.848.594	58,26 %	5,79	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	45 REKOMENDASI		7 REKOMENDASI		7 REKOMENDASI	141.511.160	5 REKOMENDASI	102.965.000	71,43 %	72,76	12 REKOMENDASI	102.965.000	26,67 %		Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	45 REKOMENDASI	0	7 REKOMENDASI		7 REKOMENDASI	141.511.160	5 REKOMENDASI	115.806.580	71,43 %	81,84	12 REKOMENDASI	115.806.580	26,67 %		Inspektorat Daerah Provinsi	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	14.441.916.279	34,56 Persen		100 Persen	1.884.596.435	69,7 Persen	733.883.594	69,70 %	38,94	52,13 Persen	733.883.594	52,13 %	5,08	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	215 Perangkat Daerah	3.078.032.227	33 Perangkat Daerah		43 Perangkat Daerah	234.620.000	43 Perangkat Daerah	201.467.057	100,00 %	85,87	76 Perangkat Daerah	201.467.057	35,35 %	6,55	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	215 PERANGKAT DAERAH	936.261.125	23 PERANGKAT DAERAH		43 PERANGKAT DAERAH	162.031.060	20 PERANGKAT DAERAH	125.076.900	46,51 %	77,19	43 PERANGKAT DAERAH	125.076.900	20,00 %	13,36	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	238 KEGIATAN	7.225.670.700	41 KEGIATAN		46 KEGIATAN	1.288.940.315	46 KEGIATAN	1.147.766.414	100,00 %	89,05	87 KEGIATAN	1.147.766.414	36,55 %	15,88	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31 PERANGKAT DAERAH	3.201.952.227	4 PERANGKAT DAERAH		6 PERANGKAT DAERAH	199.005.060	6 PERANGKAT DAERAH	176.420.530	100,00 %	88,65	10 PERANGKAT DAERAH	176.420.530	32,26 %	5,51	Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat APIP	0 SKOR	119.912.143.043	81 SKOR		81 SKOR	29.394.987.940	81 SKOR	9.283.915.360	100,00 %	31,58	162 SKOR	9.283.915.360	%	7,74	Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	109 DOKUMEN	1.711.749.961	21 DOKUMEN		21 DOKUMEN	714.110.920	21 DOKUMEN	382.271.100	100,00 %	53,53	42 DOKUMEN	382.271.100	38,53 %	22,33	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 DOKUMEN	902.270.120	4 DOKUMEN		4 DOKUMEN	199.794.168	4 DOKUMEN	196.751.260	100,00 %	98,48	8 DOKUMEN	196.751.260	33,33 %	21,81	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 LAPORAN	809.479.841	17 LAPORAN		17 LAPORAN	514.316.752	17 LAPORAN	644.470.640	100,00 %	125,31	34 LAPORAN	644.470.640	40,00 %	79,62	Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	82.323.961.915	108,16 Persen		100 Persen	20.061.211.533	100 Persen	6.559.777.644	100,00 %	32,70	104,08 Persen	6.559.777.644	104,08 %	7,97	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 orang	82.323.961.915	108,16 orang		100 orang	20.061.211.533	107 orang	21.023.669.970	107,00 %	104,80	215,16 orang	21.023.669.970	43,03 %	25,54	Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	12.443.938.528	54,29 Persen		100 Persen	2.537.849.075	100 Persen	269.264.320	100,00 %	10,61	77,145 Persen	269.264.320	77,15 %	2,16	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	370 orang	12.443.938.528	115,71 orang		75 orang	2.537.849.075	31 orang	1.253.193.698	41,33 %	49,38	146,71 orang	1.253.193.698	39,65 %	10,07	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100 Persen	9.681.169.892	35,59 Persen		100 Persen	1.756.114.298	93,75 Persen	656.330.888	93,75 %	37,37	64,67 Persen	656.330.888	64,67 %	6,78	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 PAKET	162.447.207	12 PAKET		12 PAKET	32.449.318	3 PAKET	31.813.780	25,00 %	98,04	15 PAKET	31.813.780	25,00 %	19,58	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 PAKET	451.757.905	12 PAKET		12 PAKET	99.995.100	12 PAKET	98.912.560	100,00 %	98,92	24 PAKET	98.912.560	40,00 %	21,90	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	144 PAKET	883.095.995	28 PAKET		28 PAKET	151.020.000	28 PAKET	59.022.580	100,00 %	39,08	56 PAKET	59.022.580	38,89 %	6,68	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 PAKET	636.507.184	12 PAKET		12 PAKET	127.600.250	6 PAKET	104.607.020	50,00 %	81,98	18 PAKET	104.607.020	30,00 %	16,43	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	132.386.125	12 Dokumen		12 Dokumen	29.062.837	6 Dokumen	2.250.000	50,00 %	7,74	18 Dokumen	2.250.000	30,00 %	1,70	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500 LAPORAN	7.414.975.476	500 LAPORAN		500 LAPORAN	1.315.986.793	500 LAPORAN	1.398.829.199	100,00 %	106,30	1.000 LAPORAN	1.398.829.199	40,00 %	18,86	Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.480.000.000	100 Persen		100 Persen	1.359.946.830	100 Persen		100,00 %		100 Persen		100,00 %		Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	239 UNIT	2.480.000.000	7 UNIT		8 UNIT	1.359.946.830	2 UNIT		175,00 %		9 UNIT		3,77 %		Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100 Persen	4.789.248.250	100 Persen		100 Persen	1.198.296.084	100 Persen	538.210.518	100,00 %	44,91	100 Persen	538.210.518	100,00 %	11,24	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 LAPORAN	335.971.660	12 LAPORAN		12 LAPORAN	101.975.520	12 LAPORAN	95.353.000	100,00 %	93,51	24 LAPORAN	95.353.000	40,00 %	28,38	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 LAPORAN	1.367.683.502	12 LAPORAN		12 LAPORAN	372.545.000	12 LAPORAN	369.239.010	100,00 %	99,11	24 LAPORAN	369.239.010	40,00 %	27,00	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 LAPORAN	451.757.905	12 LAPORAN		12 LAPORAN	49.737.500	12 LAPORAN	29.581.850	100,00 %	59,48	24 LAPORAN	29.581.850	40,00 %	6,55	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 LAPORAN	2.633.835.183	12 LAPORAN		12 LAPORAN	674.038.064	12 LAPORAN	496.550.264	100,00 %	73,67	24 LAPORAN	496.550.264	40,00 %	18,85	Inspektorat Daerah Provinsi	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen	6.482.074.497	69,76 Persen		100 Persen	1.767.459.200	100 Persen	878.060.890	100,00 %	49,68	84,88 Persen	878.060.890	84,88 %	13,55	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	56 UNIT	787.999.660	10 UNIT		13 UNIT	283.270.000	12 UNIT	262.983.538	92,31 %	92,84	22 UNIT	262.983.538	39,29 %	33,37	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya"	112 UNIT	1.554.672.935	21 UNIT		24 UNIT	325.490.000	24 UNIT	225.539.442	100,00 %	69,29	45 UNIT	225.539.442	40,18 %	14,51	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 UNIT	900.900.310	170 UNIT		170 UNIT	177.990.000	170 UNIT	38.298.843	100,00 %	21,52	340 UNIT	38.298.843	200,00 %	4,25	Inspektorat Daerah Provinsi	
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 UNIT	3.238.501.592	4 UNIT		2 UNIT	980.709.200	2 UNIT	710.110.351	100,00 %	72,41	6 UNIT	710.110.351	42,86 %	21,93	Inspektorat Daerah Provinsi	
7		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	83 %	2.757.366.833	%		80 %	1.385.617.600	20 %	259.538.960	25,00 %	18,73	10 %	259.538.960	12,05 %	9,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI	83 %	2.757.366.833	%		80 %	1.385.617.600	20 %	259.538.960	25,00 %	18,73	20 %	259.538.960	24,10 %	9,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti	180 Orang	280.000.000	Orang		100 Orang	230.000.000	Orang		%		Orang		%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.650 Peserta	2.077.366.833	Peserta		300 Peserta	969.617.600	70 Peserta	916.022.880	23,33 %	94,47	70 Peserta	916.022.880	4,24 %	44,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11 kab/kota	400.000.000	kab/kota		9 kab/kota	186.000.000	9 kab/kota	147.383.610	100,00 %	79,24	9 kab/kota	147.383.610	81,82 %	36,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	85 %	4.065.000.000	%		81 %	146.060.800.000	81 %	2.054.722.776	100,00 %	1,41	40,5 %	2.054.722.776	47,65 %	50,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.143.979.637.396		14.331.291.041		5.054.380.708.784	97,20	4.484.556.405.204				4.498.887.696.245	32.840,05 %	10,52		
Predikat Kinerja										ST	ST					ST	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		POLITIK																								
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksana Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bid.Pendidikan Politik	85	%	4.065.000.000	%		81	%	146.060.800.000	81	%	2.054.722.776	100,00	%	1,41	81	%	2.054.722.776	95,29	%	50,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11	Parpol	3.500.000.000	Parpol		11	Parpol	145.440.120.800	11	Parpol	145.636.549.592	100,00	%	100,14	11	Parpol	145.636.549.592	100,00	%	4.161,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	512	Peserta	350.000.000	0	Peserta		85	Peserta	560.457.700	220	Peserta	557.017.400	258,82	%	99,39	220	Peserta	557.017.400	42,97	%	159,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	kab/kota	215.000.000	kab/kota		8	kab/kota	60.221.500	8	kab/kota	55.828.500	100,00	%	92,71	8	kab/kota	55.828.500	80,00	%	25,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	95	%	8.330.864.160	%		90	%	1.387.153.200	22	%	952.745.592	24,44	%	68,68	11	%	952.745.592	11,58	%	11,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95	%	8.330.864.160	%		90	%	1.387.153.200	20	%	952.745.592	22,22	%	68,68	20	%	952.745.592	21,05	%	11,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1.158	Ormas	1.650.728.960	Ormas		234	Ormas	247.583.200	74	Ormas	231.466.592	31,62	%	93,49	74	Ormas	231.466.592	6,39	%	14,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah	531	Ormas	6.450.135.200	Ormas		103	Ormas	929.570.000	28	Ormas	925.563.550	27,18	%	99,57	28	Ormas	925.563.550	5,27	%	14,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti	20	Orang	230.000.000	Orang		4	Orang	210.000.000	Orang			%		Orang			%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95	%	3.293.790.500	%		92	%	336.000.000	22	%	83.333.900	23,91	%	24,80	11	%	83.333.900	11,58	%	2,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/*Kegiatan (Output)*	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekosusbud Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi KUB dan Penghayatan Kepercayaan	95	%	3.293.790.500	%			92	%	336.000.000	22	%	83.333.900	23,91	%	24,80	22	%	83.333.900	23,16	%	2,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	10	Prog Kerja	170.000.000	Prog Kerja			8	Prog Kerja	247.219.560	2	Prog Kerja	240.187.100	25,00	%	97,16	2	Prog Kerja	240.187.100	20,00	%	141,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	94	Dokumen	3.123.790.500	Dokumen			17	Dokumen	88.780.440	2	Dokumen	82.732.300	11,76	%	93,19	2	Dokumen	82.732.300	2,13	%	2,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	86	%	2.800.000.000	%			83	%	1.490.000.000	13	%	303.827.184	15,66	%	20,39	6,5	%	303.827.184	7,56	%	10,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	88	%	2.800.000.000	%			83	%	1.490.000.000	23	%	303.827.184	27,71	%	20,39	23	%	303.827.184	26,14	%	10,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	Dokumen	650.000.000	Dokumen			12	Dokumen	800.000.000	3	Dokumen	735.002.505	25,00	%	91,88	3	Dokumen	735.002.505	30,00	%	113,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11	kab/kota	115.000.000	kab/kota			11	kab/kota	100.000.000	2	kab/kota	99.823.416	18,18	%	99,82	2	kab/kota	99.823.416	18,18	%	86,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	kasus	35.000.000	kasus			11	kasus	100.000.000	11	kasus	99.135.416	100,00	%	99,14	11	kasus	99.135.416	91,67	%	283,24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	10	Dokumen	2.000.000.000	Dokumen			12	Dokumen	490.000.000	3	Dokumen	488.895.000	25,00	%	99,77	3	Dokumen	488.895.000	30,00	%	24,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan predikat SAKIP	85	%	11.387.500.000	%			84	%	9.749.665.590	20	%	2.009.129.860	23,81	%	20,61	10	%	2.009.129.860	11,76	%	17,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Program Kegiatan dan Renja Badan Kesbangpol	95	%	365.000.000	%			95	%	175.000.000	20	%	28.935.760	21,05	%	16,53	20	%	28.935.760	21,05	%	7,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74	Dokumen	125.000.000	Dokumen			12	Dokumen	15.072.000	3	Dokumen	14.178.520	175,00	%	94,07	3	Dokumen	14.178.520	4,05	%	11,34	Badan Kesatuan Bangsa dan	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5x100%			12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		Daerah																							Politik	
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	74	Bulan	240.000.000	Bulan			12	Bulan	159.928.000	3	Bulan	155.058.614	25,00	%	96,96	3	Bulan	155.058.614	4,05	%	64,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9.050.000.000	%			100	%	8.080.223.849	30	%	1.451.027.980	30,00	%	17,96	30	%	1.451.027.980	30,00	%	16,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	%	8.750.000.000	%			14	%	7.936.738.184	4	%	6.857.550.591	171,43	%	86,40	4	%	6.857.550.591	28,57	%	78,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	300.000.000	Bulan			12	Bulan	143.485.665	3	Bulan	141.147.284	25,00	%	98,37	3	Bulan	141.147.284	25,00	%	47,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100.000.000	%			100	%	102.000.000	25	%	74.660.000	25,00	%	73,20	25	%	74.660.000	25,00	%	74,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100	Paket	60.000.000	Paket			82	Paket	65.000.000		Paket	52.000.000		%	80,00		Paket	52.000.000		%	86,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Bulan	40.000.000	Bulan			12	Bulan	37.000.000	3	Bulan	25.110.000	175,00	%	67,86	3	Bulan	25.110.000	25,00	%	62,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	650.000.000	%			95	%	318.939.558	90	%	107.078.761	94,74	%	33,57	90	%	107.078.761	94,74	%	16,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	40.000.000	Bulan			12	Bulan	29.901.648	3	Bulan	29.901.450	175,00	%	100,00	3	Bulan	29.901.450	25,00	%	74,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bulan	60.000.000	Bulan			12	Bulan	43.350.000	6	Bulan	43.350.000	150,00	%	100,00	6	Bulan	43.350.000	50,00	%	72,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan	75.000.000	Bulan			12	Bulan	47.310.000	3	Bulan	45.675.000	175,00	%	96,54	3	Bulan	45.675.000	25,00	%	60,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66	Dokumen	25.000.000	Dokumen			12	Dokumen	14.000.000	3	Dokumen	14.000.000	175,00	%	100,00	3	Dokumen	14.000.000	4,55	%	56,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	450.000.000	Bulan			12	Bulan	184.377.910	6	Bulan	184.342.006	150,00	%	99,98	6	Bulan	184.342.006	50,00	%	40,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	240.000.000	%			100	%	154.938.831	35	%		35,00	%		35	%		35,00	%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120	unit	240.000.000	unit			21	unit	154.938.831	5	unit	144.784.000	23,81	%	93,45	5	unit	144.784.000	4,17	%	60,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	237.500.000	%			95	%	487.870.562	35	%	164.935.778	36,84	%	33,81	35	%	164.935.778	36,84	%	69,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	22.500.000	Bulan			12	Bulan	5.500.000	3	Bulan	5.545.000	25,00	%	100,82	3	Bulan	5.545.000	25,00	%	24,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	145.000.000	Bulan			12	Bulan	174.363.742	3	Bulan	197.611.471	25,00	%	113,33	3	Bulan	197.611.471	25,00	%	136,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	70.000.000	Bulan			12	Bulan	308.006.820	3	Bulan	295.133.876	25,00	%	95,82	3	Bulan	295.133.876	25,00	%	421,62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	745.000.000	%			100	%	430.692.790	25	%	182.491.581	25,00	%	42,37	25	%	182.491.581	25,00	%	24,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Bulan	320.000.000	Bulan			12	Bulan	273.200.000	6	Bulan	268.947.848	50,00	%	98,44	6	Bulan	268.947.848	50,00	%	84,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Bulan	100.000.000	Bulan			12	Bulan	39.500.000	6	Bulan	39.367.032	50,00	%	99,66	6	Bulan	39.367.032	50,00	%	39,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	Bulan	325.000.000	Bulan			12	Bulan	117.992.790	6	Bulan	92.137.198	50,00	%	78,09	6	Bulan	92.137.198	50,00	%	28,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)						24.143.979.637.396			14.331.291.041			5.054.380.708.784	97,20		4.484.556.405.204						4.498.887.696.245	32.840,05	%	10,52		
Predikat Kinerja													ST		ST							ST		SR		

3 BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh kondisi keuangan global, dan perang Rusia-Ukraina. Hal-hal tersebut diyakini akan berdampak pada berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dalam memitigasi dampak rambatan global dan dengan kinerja yang diakui secara internasional. Tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diprakirakan sebesar US$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang

melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023. Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan, yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US$36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif. Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023.

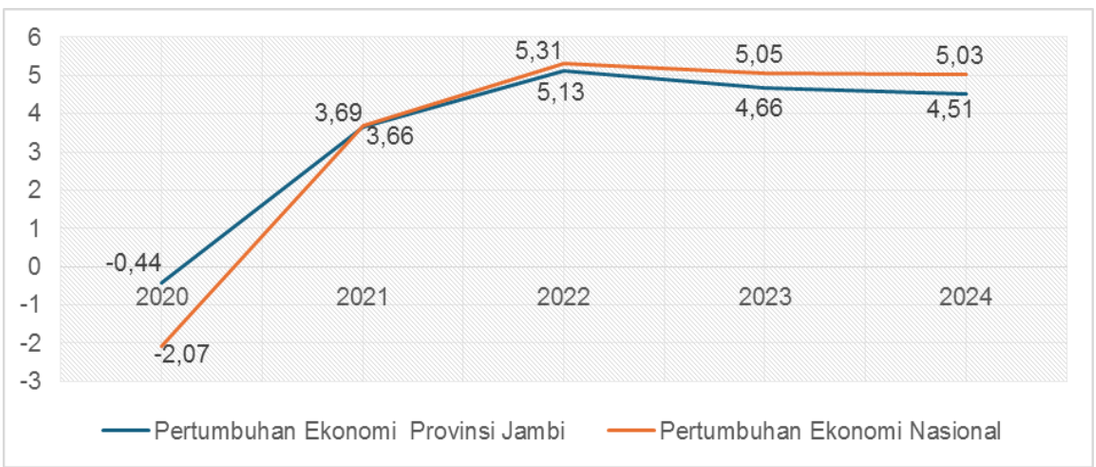

Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jambi, 2025

Gambar 3-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional (%) Tahun 2020 - 2024

Pembangunan Provinsi Jambi merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi, di mana keduanya saling bersinergi dan saling bergantung dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan dari 4,66 persen (*yoy*) di tahun 2023 menjadi 4,51 persen, serta lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian akibat dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batu bara. Di sisi lain, angkutan komoditas batu bara via darat masih belum optimal pasca dibuka kembali pada Mei 2024. Selanjutnya, menurunnya produksi CPO akibat adanya penutupan dua pabrik pengolahan kelapa sawit serta menurunnya produksi TBS kelapa sawit juga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sempat mengalami kontraksi sebesar 0,44 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia. Perkembangan ekonomi Provinsi Jambi hingga tahun 2023 masih berada dalam fase pemulihan seiring dengan upaya penyesuaian terhadap tekanan eksternal dan perbaikan aktivitas ekonomi domestik. Kontraksi dialami oleh sebagian besar sektor, terutama yang dialami oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara sektor Informasi dan Komunikasi megalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi *Covid-19* yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang kemudian dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring (dalam jaringan) membuat aktivitas Informasi dan Komunikasi jadi meningkat. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.

Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, terutama sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 15,55 persen. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*. Selanjutnya, diikuti oleh sektor Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 7,94 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reaparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,96 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,96 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

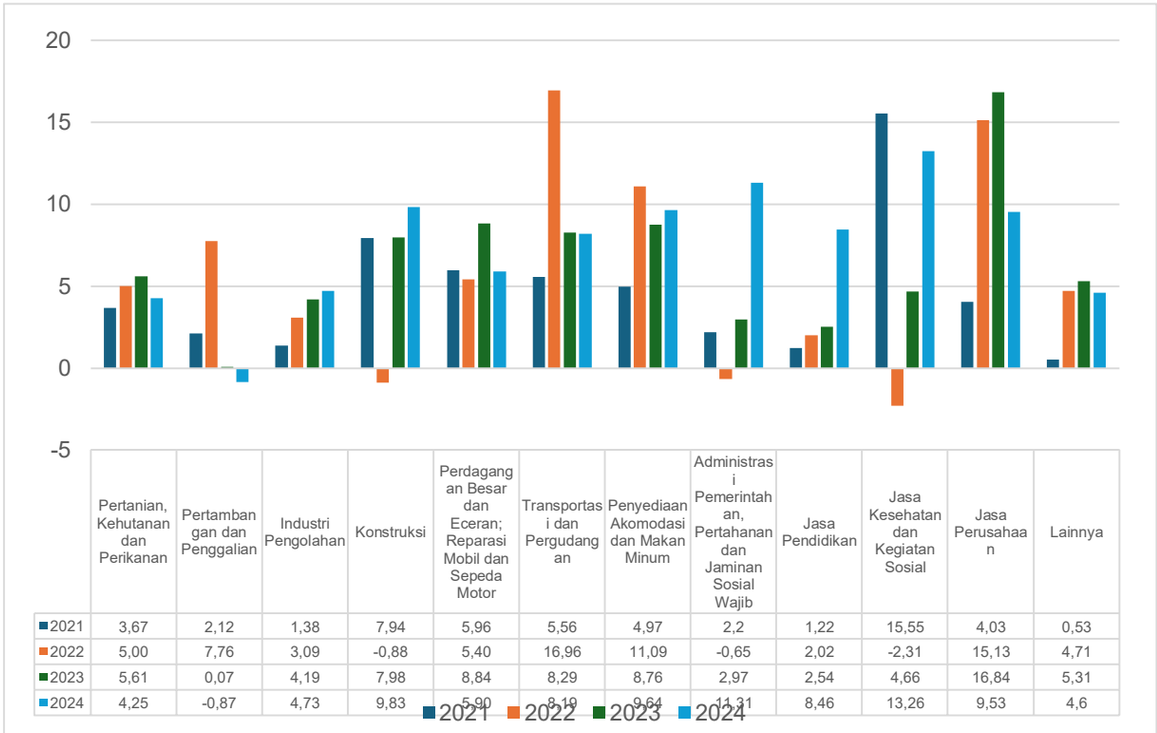

	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Perusahaan	Lainnya
2021	3,67	2,12	1,38	7,94	5,96	5,56	4,97	2,2	1,22	15,55	4,03	0,53
2022	5,00	7,76	3,09	-0,88	5,40	16,96	11,09	-0,65	2,02	-2,31	15,13	4,71
2023	5,61	0,07	4,19	7,98	8,84	8,29	8,76	2,97	2,54	4,66	16,84	5,31
2024	4,25	-0,87	4,73	9,83	5,90	8,19	9,64	11,31	8,46	13,26	9,53	4,6

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 3-2 Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat menjadi 4,66 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 5,05 persen. Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB yang hanya tumbuh sebesar 0,07 persen, jauh menurun dibandingkan tahun 2022. Meski demikian, penurunan ini bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi. Di sisi lain, terdapat kontribusi positif dari sektor lain yang mampu menahan tekanan perlambatan lebih lanjut.

Sektor Konstruksi, misalnya, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,83 persen. Kinerja sektor ini terdorong oleh pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatra (JTTS) Bayung Lencir–Tempino, proyek *multi-years Islamic Center*, Stadion Swarnabhumi, serta pembangunan fasilitas umum seperti PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center, dan drainase utama di Kota Jambi. Peningkatan aktivitas konstruksi tersebut memberikan dampak multiplier yang cukup besar terhadap sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan bahan bangunan dan jasa transportasi.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,51 persen (*yoy*). Penurunan ini tetap dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sebagai akibat dari penurunan harga batu bara acuan di pasar global pada yang telah terjadi sejak pertengahan 2023. Namun demikian, sektor-sektor lain mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, di antaranya sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 13,26 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat sebesar 11,31 persen, didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah peran belanja pemerintah, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Meskipun belanja pemerintah menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan, efektivitas dan keberlanjutan belanja tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Khususnya, perlu ditinjau apakah alokasi dan realisasi anggaran sudah cukup optimal untuk mendorong sektor-sektor produktif secara merata, serta memastikan kesinambungan proyek agar dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

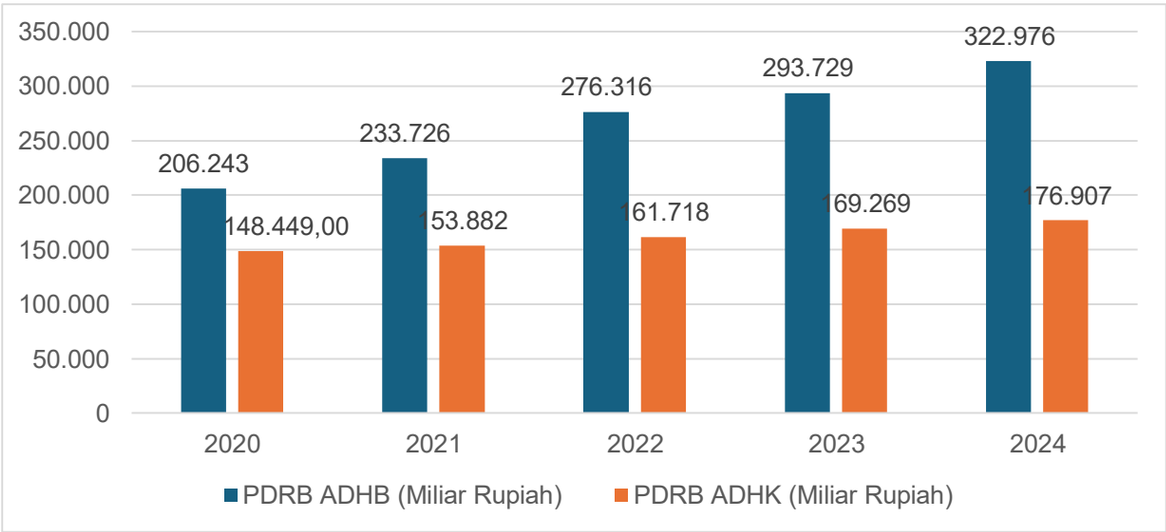

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 3-3 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 (Dalam Milyar Rupiah)

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir (2020-2024), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 33,93 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,25 persen. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua, meskipun di tahun 2024 kontribusinya menurun dibanding tahun sebelumnya, dari 15,31 persen menjadi 13,41 persen di tahun 2024. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 13,29 persen.

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

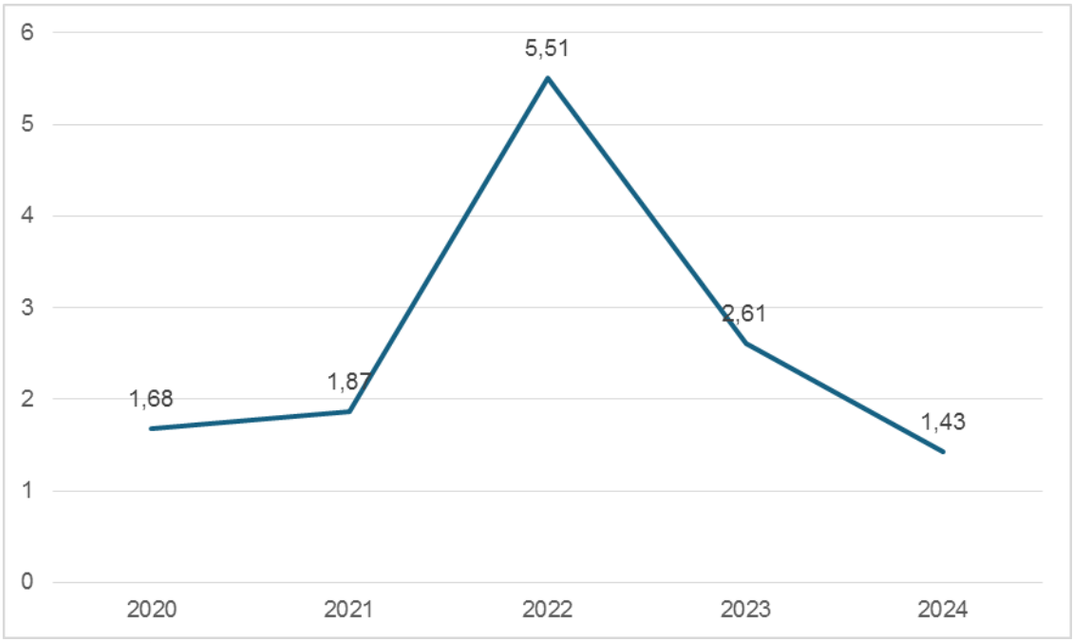

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 3-4 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, yang masing-masing pada tahun 2023 (*yoy*) tercatat sebesar 3,27 persen dan 2,85 persen. Tingginya inflasi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi, yaitu pada komoditas bensin, angkutan udara solar, dan cuci kendaraan. Kenaikan harga tarif angkutan udara tersebut diakibatkan kenaikan harga avtur serta kenaikan harga bensin dan solar yang ditetapkan sejak September 2022, di mana harga pertalite pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.000/liter.

Di samping itu, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau juga memberikan andil besar dalam meningkatnya inflasi di tahun 2022, terutama yang didorong oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan cabai merah, komoditas beras, rokok kretek filter, rokok kretek, rokok putih, telur ayam ras, dan ikan nila. Kenaikan inflasi dari sub-kelompok Rokok dan Tembakau dikarenakan dampak keberlanjutan dari transmisi kenaikan cukai hasil tembakau di tahun 2022 yang mendorong peningkatan harga komoditas rokok. Kenaikan harga komoditas telur ayam didorong oleh peningkatan biaya produksi yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA, serta adanya gangguan produksi di beberapa sentra produksi seiring dengan perubahan cuaca.

3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional dan Daerah.

3.1.2.1 Nasional

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2026 sebesar 5,8–6,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp16.500-Rp16.900 per US$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan *Exporter Tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real- time*; (5) Fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan

Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement*/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, (5) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah, (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp8.297,8 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3-6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong Transformasi Ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat

fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian *smelter* di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2026. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diprakirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,9–6,4 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,9–20,0 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri.

Pada tahun 2026, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2026. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

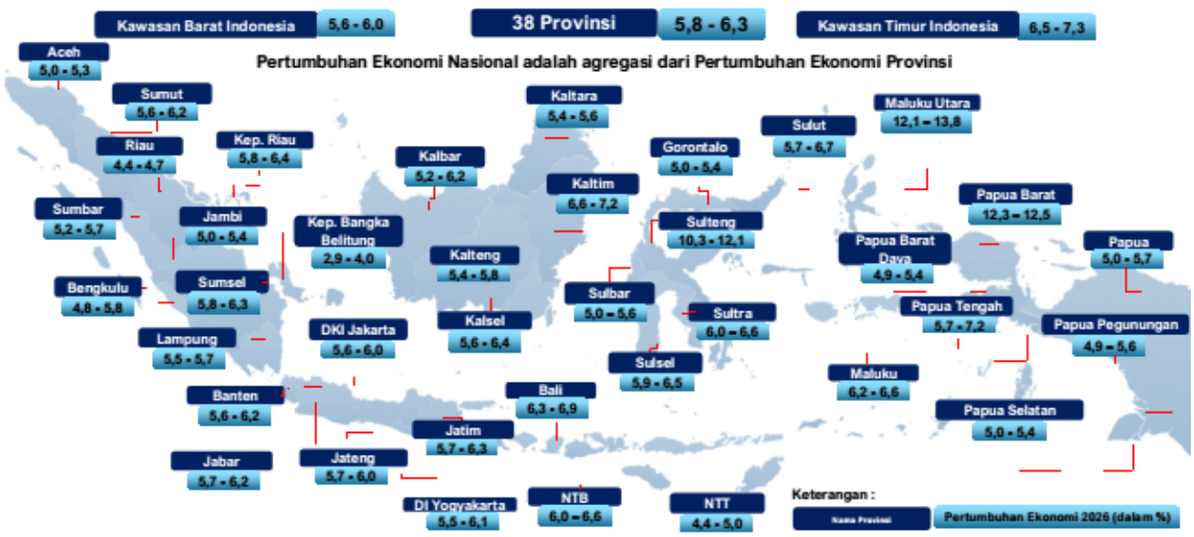

Gambar 3-5 Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi Tahun 2026

3.1.2.2 Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diperkirakan membaik pada tren positif berada pada kisaran 4,8 – 5,4 persen (yoy), asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan terus membaik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat ketidakpastian ekonomi dunia yang menahan laju ekspor perlu dilakukan dan dipersiapkan dengan baik. Salah satu sektor penting yang diharapkan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketidakpastian perekonomian global tahun 2026 diperkirakan berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk

mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2026.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2026, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi sejak pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif.

Adapun sasaran pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi Provinsi Jambi Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-1 Sasaran Pertumbuhan PDRB Sisi Produksi Provinsi Jambi Tahun 2026 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMD	Sasaran 2026
Pertumbuhan PDB	**4,8 - 5,4**	**4,8 - 5,4**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		6,0 – 6,4
Pertambangan dan Penggalian		0,4 – 0,6
Industri Pengolahan		4,46 – 6,6
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih		4,4 – 5,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,1 – 1,2
Konstruksi		8,6 – 8,8
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		8,6 – 8,8
Transportasi dan Pergudangan		5,1 – 5,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		6,6 -8,6
Informasi dan Komunikasi		7,4-7,8
Jasa Keuangan		8,1-8,6
Real Estate		0,01 – 0,05

Uraian	RPJMD	Sasaran 2026
Jasa Perusahaan		4,4–4,7
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib		2,9–3,2
Jasa Pendidikan		4,3 – 4,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		4,9 – 5,3
Jasa Lainnya		5,4 – 5,7

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Tabel 3-2 Sasaran Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2026 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMD	Sasaran 2024
Pertumbuhan PDRB	**4,8 - 5,4**	**4,8 - 5,4**
Konsumsi Rumah Tangga	-	4,5 – 4,7
Konsumsi LNPRT	-	6,9 – 7,2
Konsumsi Pemerintah	-	1,99 – 2,8
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	9,88 – 10,1
Ekspor Barang dan Jasa	-	0,1 – 0,25
Impor Barang dan Jasa	-	3,0 – 0,33

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh 1,99 – 2,8 persen dengan berjalannya tahapan pembangunan beberapa rencana pembangunan infrastruktur daerah ditambah dengan penyelesaian infrastruktur seperti jalan tol oleh Pemerintah Pusat. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur

diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 9,88 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan harga sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan walaupun berfluktuatif dalam ketidakpastian.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh pada kisaran 0,1-0,25 persen. Optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diprakirakan akan tumbuh 3 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2026 diarahkan pada hal-hal berikut :

1. Pembangunan infrastruktur, yang mendukung pelayanan dasar serta sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kominfo.
2. Pembangunan SDM, yang diarahkan pada upaya perluasan akses terhadap pendidikan; peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; pembangunan gender; serta peningkatan daya saing tenaga kerja.
3. Meningkatkan investasi sektor riil.
4. Memperluas lapangan usaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran, sekaligus memperluas lapangan pekerjaan yang layak.
5. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
6. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan tangkap dan kehutanan melalui:
    - intensifikasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian rendah karbon yang mendukung dalam proses penyiapan lahan, tata cara budidaya, cara panen dan pengolahan pasca panen termasuk mendorong pelaksanaan peremajaan karet dan kelapa sawit
    - mendorong sustainabilitas perkebunan kelapa sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis pada kemandirian petani
    - Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan :

- Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang tidak sehat serta mendorong terciptanya *corporate farming*.
- Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang *spot* dan *forward* untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura)
- Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani

- Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet dan sawit yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan serta didukung dengan :
  - Memprioritaskan penyelesaian kendala kritikal terkait penyediaan infrastruktur daerah dengan pertimbangan jangkauan, kapasitas, dan kualitas yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
  - Pengembangan industri berskala kecil dan menengah di sekitar area perkebunan sebagai solusi intern sebelum industri hilir skala besar terbentuk. Disamping untuk penciptaan nilai tambah, pengembangan tersebut juga dapat menahan pelemahan harga komoditas pada saat *supply* melimpah.

7. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif
8. Mendorong percepatan realisasi belanja modal pemerintah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas.
9. Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA, melalui :
   - Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
   - Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur);
   - Memberikan insentif bagi investor dan pelaku usaha, antara lain dengan relaksasi pajak/retribusi, penyediaan kawasan, bantuan promosi, termasuk penyediaan SDM yang sesuai kebutuhan industri melalui kerjasama dengan SMK dan perguruan tinggi;

- Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan di Jambi.

10. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan :
    - Memastikan ketersediaan stok pangan selama periode hari besar keagamaan dan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan ke wilayah Jambi dengan memprioritaskan aktivitas pengangkutan komoditas bahan pokok.
    - Menjaga ekspektasi inflasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bijak berkonsumsi, termasuk alternatif konsumsi daging beku serta diseminasi informasi kecukupan stok selama periode hari raya.
    - Mendorong sinergi TPID dan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan kewajaran harga bahan pangan.
    - Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kebutuhan selama libur
    - Memantau ketaatan maskapai penerbangan terhadap penerapan tarif batas atas terutama ditengah tingginya permintaan angkutan udara.
    - Mendorong pelaksanaan dan efektivitas operasi pasar/pasar murah, antara lain dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
    - Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga pada hari besar keagamaan dengan pemanfaatan teknologi pasca panen seperti teknologi ozon, penyediaan mesin pengawet dan/atau *cold storage*.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor

pengeolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan tehadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2026 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah,

dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga *administered price*, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2026 diprediksi sebesar Rp4.463.169.552.167,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.044.276.611.767,- pendapatan transfer sebesar Rp2.402.397.940.400,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp16.495.000.000,-. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jambi berasal dari pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor. Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2024, target tahun 2025 serta proyeksi tahun 2026 dan 2027 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-9 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Provinsi Jambi Tahun 2023-2027

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan (2025)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2026)	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
PENDAPATAN	**4.484.471.674.814**	**4.732.466.084.399**	**4.518.184.059.432**	**4.463.169.552.167**	**4.521.629.605.743**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**2.087.825.447.632**	**2.095.941.407.210**	**1.951.585.349.224**	**2.044.276.611.767**	**2.065.129.905.751**
Pendapatan Pajak Daerah	1.845.711.834.787,75	1.839.108.467.508	1.560.425.510.930	1.683.672.147.921	1.700.543.089.336
Hasil Retribusi Daerah	17.916.260.424,00	14.250.945.752	200.790.128.465	199.117.628.465	203.099.981.034
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.978.710.987,64	35.478.131.502	41.696.127.577	125.359.863.220	125.359.863.220
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193.218.641.433,08	207.103.862.448	148.673.582.252	36.126.972.161	36.126.972.161
PENDAPATAN TRANSFER	**2.376.006.895.706**	**2.613.755.920.792**	**2.550.255.323.000,00**	**2.402.397.940.400**	**2.454.699.699.992**
Transfer Dana Perimbangan	2.376.006.895.706	2.613.755.920.792	2.550.255.323.000,00	2.402.397.940.400	2.454.699.699.992
Transfer Lainnya	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**32.667.418.021**	**22.768.756.398**	**16.343.387.208**	**16.495.000.000**	**1.800.000.000**
Pendapatan Hibah	31.955.195.312	21.121.700.781	16.343.387.208	16.495.000.000	1.800.000.000,00
Sumbangan Pihak ketiga/ sejenis	-	44.353.468	-	-	-
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	712.222.709	-	-	-	-

Sumber : BPKPD,2025

Tabel 3-3 Proyeksi Pendapatan Tahun 2026

URAIAN	Proyeksi RPJMD	Proyeksi RKPD 2026
PENDAPATAN	**4.446.674.552.167**	**4.276.323.437.107**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**2.044.276.611.767**	**1.995.172.569.332**
Pendapatan Pajak Daerah	1.683.672.147.921	1.634.568.105.486
Hasil Retribusi Daerah	199.117.628.465	199.117.628.465
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.359.863.220	125.359.863.220
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.126.972.161	36.126.972.161
PENDAPATAN TRANSFER	**2.402.397.940.400**	**2.264.655.867.775**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**16.495.000.000,00**	**16.495.000.001,00**
Pendapatan Hibah	16.495.000.000	16.495.000.001
Dana Darurat	-	-

Sumber: BPKPD, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2026 meliputi :

a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka opmtimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, serta kontribusi terhadap capaian RPJMD, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk :

a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
b. Pemenuhan *mandatory spending* sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
d. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
e. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026.
f. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan priortas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah tahun 2026, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,513 Trilyun.

Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan (2025)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2026)	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
BELANJA	**5.175.212.402.247**	**4.597.652.753.214**	**4.582.597.196.566**	**4.513.022.450.088**	**4.557.482.503.664**
Belanja Operasi	**3.061.858.926.453**	**2.833.572.488.663**	**3.077.626.246.642**	**2.747.072.954.933**	**2.750.162.513.640**
Belanja Pegawai	1.485.016.143.305	1.605.144.672.135	1.838.166.640.985	1.948.726.203.467	2.046.162.513.640
Belanja Barang dan Jasa	1.412.126.405.370	1.017.010.009.757	1.128.797.200.978	694.346.751.466	600.500.000.000
Belanja Subsidi	5.739.553.750	3.296.278.000	2.194.434.000	500.000.000	500.000.000
Belanja Hibah	155.214.824.028	207.371.528.771	107.369.136.152	100.000.000.000	100.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	3.762.000.000	750.000.000	1.098.834.526	3.500.000.000	3.000.000.000
Belanja Modal	**1.039.534.897.828**	**969.771.429.676**	**459.055.715.080**	**832.791.584.711**	**708.958.227.843**
Belanja Tidak Terduga	**1.728.565.845**	**0**	**11.747.824.400**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
Belanja Transfer	**1.072.090.012.121**	**794.308.834.875**	1.034.167.410.444	**908.157.910.444**	**1.073.361.762.181**
Belanja Bagi Hasil	899.987.022.121	739.643.062.875	729.203.910.444	729.203.910.444	894.407.762.181
Belanja Bantuan Keuangan	172.102.990.000	54.665.772.000	304.963.500.000	178.954.000.000	178.954.000.000

Sumber: BPKPD, 2025

Tabel 3-5 **Proyeksi Belanja Tahun 2026**

URAIAN	RPJMD	Proyeksi RKPD 2026
BELANJA	**4.513.022.450.088**	**4.513.022.450.088**
Belanja Operasi	**2.747.072.954.933**	**2.747.072.954.933**
Belanja Pegawai	1.948.726.203.467	1.948.726.203.467
Belanja Barang dan Jasa	694.346.751.466	694.346.751.466
Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000
Belanja Hibah	100.000.000.000	100.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	3.500.000.000	3.500.000.000
Belanja Modal	**832.791.584.711**	**832.791.584.711**
Belanja Tidak Terduga	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
Belanja Transfer	**908.157.910.444**	**908.157.910.444**
Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444	729.203.910.444
Belanja Bantuan Keuangan	178.954.000.000	178.954.000.000

3.2.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi lima tahun terakhir sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah tahun 2026 terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2026, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
b. Penyertaan Modal pada Bank Jambi dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian *(prudential)*.
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Selengkapnya realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 dan target Tahun 2026 dan proyeksi Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 3-6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2027

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan (2025)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2025)	Proyeksi/Target pada Tahun 2026
PEMBIAYAAN	**621.327.501.413**	**53.522.386.751**	**64.413.137.133**	**49.413.137.133**	**49.852.897.921**
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	631.461.501.413	83.682.590.909	64.560.239.212,48	64.560.239.212	65.000.000.000
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**631.461.501.413**	**83.682.590.909,32**	**64.560.239.212**	**65.000.000.000**	**65.000.000.000**
Penyertaan modal (Investasi) daerah	10.000.000.000	30.000.000.000,00	0	15.000.000.000	15.000.000.000
Pembayaran pokok utang	134.000.000	160.204.158	147.102.079,00	147.102.079	147.102.079
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.134.000.000**	**30.160.204.158**	**147.102.079**	**15.147.102.079**	**15.147.102.079**

Sumber : BPKPD,2025

4 BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Provinsi Jambi pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Provinsi Jambi juga mempertimbangkan kebijakan nasional untuk keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Selain itu, perumusan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah dan keterkaitan antara misi dan program pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 berpedoman pada Visi dan Misi pembangunan pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dimana Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi MANTAP : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya saing : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan,

ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah:

1 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif.**

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, melibatkan seluasnya-luasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan serta adaptif dengan perubahan zaman. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2 **Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah**

Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut. Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas pada tiga lini, yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Sektor-sektor dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata adalah sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan dukungan infrastruktur yang handal, akses permodalan dan pasar serta ekosistem inovasi yang baik. Ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan daya saing daerah ini adalah Indeks Daya Saing Daerah.

3 **Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial**

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca telah menjadi ancaman serius yang memerlukan tindakan segera. Sistem perekonomian rendah karbon merupakan platform

pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan emisi GRK yang rendah. Melalui penerapan sistem perekonomian yang rendah karbon, diantaranya dengan pemanfaatan teknologi bersih dan praktik berkelanjutan pada berbagai sektor maka akan mengefisienkan penggunaan energi konvensional sehingga secara jangka panjang manfaat yang akan diterima jauh lebih besar dibanding biaya yang harus dikeluarkan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan inklusi secara sosial. Indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan tujuan ini adalah Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru.

4 **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.**

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan ini tercapai.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital**

Birokrasi yang melayani, berintegritas dan berbasis digital menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab dengan hasil kinerja yang terukur. Selain itu, sebagai wujud transparansi, masyarakat diberikan ruang untuk mendapatkan informasi pembangunan dalam berbagai platform yang adaptif. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE),

peningkatan indeks pelayanan publik, dan Indeks Keterbukaan Informasi

2. **Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**

   Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas dan Indeks daya saing infrastruktur.

3. **Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi**

   Transformasi digital merupakan perubahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk merancang ulang proses-proses tradisional sehingga bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Transfromasi digital tidak hanya mereplikasi proses atau layanan yang ada menjadi bentuk digital, namun juga mengubah proses tersebut menjadi lebih baik. Terwujudnya transformasi digital di Provinsi Jambi ditandai oleh indikator Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi, Tingkat inklusi keuangan Provinsi, serta Indeks Pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. **Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi**

   Upaya yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi di Provinsi Jambi adalah dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, swasembada pangan, serta meningkatkan investasi di daerah. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah inflasi, rasio kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks ketahanan pangan, ICOR dan PDRB perkapita.

5. **Meningkatnya produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata**

   Skala ekonomi masyarakat dan daerah didorong dengan meningkatkan nilai tambah lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong industrialisasi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Tidak hanya mendorong sektor sekunder, sektor

pariwisata dan sektor tersier lainnya juga akan didorong agar mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang besar terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu, UMKM yang ada di Provinsi Jambi akan didorong untuk lebih produktif melalui pemberian akses permodalan yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio PDRB penyediaan akomodaasi, makan dan minum; distribusi PDRB sektor tersier, rasio PDRB industri pengolahan, pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

6. **Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi**

   Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, korporasi, komunitas, institusi pendidikan dan lain-lain akan berkolaborasi mewujudkannya. Melalui jaringan informasi yang terbentuk dalam ekosistem inovasi, masing-masing pemangku kepentingan dapat berbagi informasi dan sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi akan ditandai oleh indikator meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya indeks inovasi daerah dan pengeluaran IPTEK dan Inovasi (Persen APBD).

7. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

   Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.

8. **Meningkatnya kualitas lingkungan**

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

9. **Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat**

Pesisir dan dan sumber daya kelautan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun sumber daya laut yang banyak belum bisa menjamin penduduk di wilayah pesisir dapat hidup dengan layak karena pemanfaatan sumber daya yang kurang baik. Keberhasilan sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari indikator peran sektor perikanan dalam PDRB, rata-rata konsumsi kalori ikan perkapita perhari dan persentase penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir.

10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup dan prevalensi stunting menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

11. Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah. Selain itu, kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkebudayaan menjadi salah satu sasaran yang

akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Sementara sebagai bentuk pengarusutamaan gender, optimalisasi peran perempuan perlu terus didorong. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.

Hubungan Visi dan misi serta tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada **Tabel** 4-1 dibawah ini.

Tabel 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital
	Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah	Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
			Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi Jambi
			Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi
			Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata
			Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi
	Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
			Menurunnya ketimpangan pendapatan
			Meningkatnya kualitas lingkungan
			Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkesetaraan gender	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender

Sumber : Ranhir RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Pembangunan Provinsi Jambi sebagai bagian dari pembangunan nasional tentu saja mendukung serta bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Tema pembangunan yang diusung dalam RKP 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Kebijakan pembangunan nasional juga memperhatikan 5 (lima) direktif Presiden, yaitu:

1. Penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Penerapan digitalisasi pendidikan
3. Pengentasan kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif
4. Pengelolaan sampah terpadu
5. Sekolah Rakyat, dengan memberikan Fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin

Selain itu memperhatikan pula 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, yaitu:

1. Gender dan Inklusi Sosial, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan
   b. Terwujudnya inklusivitas Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan sasaran menguatnya pelaksanaan SDGs melalui integrasi Perencanaan, pelaporan, serta Rekognisi
3. Pembangunan rendah karbon, dengan sasaran menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
4. Transformasi Digital, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional

b. Terwujudnya pemerintahan berbasis digital yang transparan, inklusif dan efisien

5. Pembangunan berketahanan iklim, dengan sasaran menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor pertanian prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan)

Berdasarkan tema RKP tahun 2026, serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis Provinsi Jambi maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing**". Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya yang merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, melalui pembangunan ekonomi yang progresif, pembangunan sosial budaya, serta peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis, maka peningkatan daya saing daerah akan terwujud.

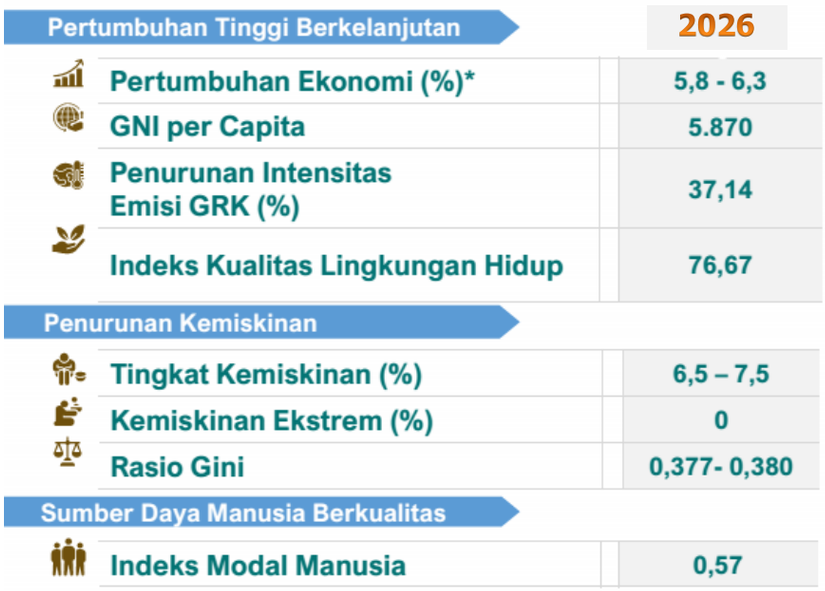

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2026, 2025

Gambar 4-1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Sementara Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada tahun 2026, antara lain :

Tabel 4-2 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada tahun 2026

Indikator	RPJMD	RKP	Skenario RKPD 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8 – 5,4	5,0 – 5,4	4,8 – 5,4
PDRB Per kapita (juta)	96,53	98,0 – 100,7	96,53
Kontribusi PDRB Provinsi	1,4	1,5	1,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2 – 4,35	3,82 – 4,35	4,2 – 4,35
Tingkat Kemiskinan (%)	6,25– 6,76	5,34 – 6,34	6,25 – 6,76
Gini Ratio (indeks)	0,314-0,32	0,337-0,341	0,314-0,32
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56	0,55	0,56
Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	80,76	77,12-79,29	77,12-79,29
Indeks Kulitas Lingkungan Hidup Daerah	73,92	73,92	73,92

Sumber : Ranhir RPJMD Prov. Jambi 2025-2029,Ranc. RKP,Hasil Rakortekrenbang, 2025

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2026, yaitu:

1. Quick Wins PROgram JAringan Majukan JamBI (PRO JAMBI), yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang

bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pro Jambi Cerdas, berupa bantuan biaya pendidikan (perlengkapan sekolah)/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 untuk umum. Selain itu juga terdapat pula menu pendidikan vokasi secara kemitraan dengan Lembaga/ Dunia Usaha baik dalam maupun luar negeri. Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa direncanakan sebagai berikut:

Tabel 4-3 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa

Tingkat Pendidikan	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa
	2026
SMA	2700
SMK	1600
SLB	500
S1	425
S2	100
S3	25

Selain bantuan biaya pendidikan/beasiswa yang diberikan satu kali selama pendidikan dengan skema di atas, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa selama masa perkuliahan maksimal 4 tahun dimulai pada tahun 2026 dengan target pemberian kepada 40 mahasiswa.

b. Pro Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin, bantuan gizi bagi ibu hamil, balita dan remaja, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota dengan target 100.000 jiwa.

c. Pro Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* milenial/Gen Z siap kerja; job fair (bursa kerja) mantap berdaya saing; jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti sopir angkot, ojek online dan pangkalan, penarik becak dan kusir delman, serta seniman dan budayawan; kredit murah 2% bagi petani, nelayan dan pedagang pasar tradisional. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan

perundang-undangan. Adapun target tahun 2026 untuk bedah rumah sebanyak 550 unit rumah dan bantuan permodalan sebanyak 1000 UMKM.

d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an.
e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lansia, dan tuna sosial; insentif Babinsa/ Babinkamtibmas; membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba) dan Saluran Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) yang menghimpun aspirasi dan layanan pengaduan masyarakat.

2. **Meningkatkan konektivitas** , diantaranya:
   a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
   b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
   c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan melalui skema tahun jamak *(multiyears)* sebagai berikut:
      - Ruas Jalan Betung Bedarah – Pintas – Tebo/Bungo
      - Ruas Jalan Simp. Sei Duren – Sei. Buluh (Pelebaran Jalan Ness)
      - Ruas Jalan Tabir Timur – Tabir Selatan
      - Ruas Jalan Kelok Sago (Kelok Sago – Keliling Danau)
      - Ruas Jalan Simpang/Berbak – Simpang Jembatan Muaro Sabak
   d. Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai strategis terhadap aktivitas perekonomian Provinsi Jambi
   e. Mendorong pembangunan jaringan kereta api di Provinsi Jambi
3. **Membangun pusat-pusat pertumbuhan**
   a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN Perkotaan Jambi, melalui pembangunan Flyover Tugu Juang (Mayang), Griya UMKM dan Revitalisasi GOR Kotabaru.
   b. Meningkatkan Peran dan fungsi PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
   c. Pengembangan Kawasan SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
   d. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
   e. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah
   f. Pengembangan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi lokasi prioritas untuk diintervensi pada periode tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Pada dasarnya tujuan Pembangunan adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta *stakeholders* harus bersinergi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2026, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi, yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;
2. Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;
3. Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis.
5. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Sinergitas antara program Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah mutlak diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tabel 4.4 di bawah ini dapat dilihat sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026.

Tabel 4-4 Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026

Tema RKP Tahun 2026:		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026**:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	**P4:** Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis	1) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
	Penguatan komunikasi publik dan media		5) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah
	Penguatan lembaga demokrasi		
	Pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan HAM		
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional, dilaksanakan melalui (a) pembangunan postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (d) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (e) peningkatan keamanan siber, sandi dan sinyal; (f) peningkatan keamanan laut dan hidro-oceanografi; (g) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (h) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; dan (i) penguatan diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.	**P4:** Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis	1) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi 2) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah

Tema RKP Tahun 2026:		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026**:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	Swasembada pangan, energi, dan air, dilaksanakan melalui (a) pengembangan KSPP/lumbung pangan; (b) penguatan cadangan pangan nasional; (c) pengembangan pangan hewani; (d) pengembangan pangan akuatik (*blue food*); (e) pengembangan pangan lokal dan nabati; (f) fortisifikasi pangan; (g) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia, riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; (h) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi; (i) peningkatan penyediaan energi; (j) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; (k) penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih; (l) penyediaan pasokan air berkelanjutan; (m) konservasi sumber daya air; (n) pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir; (o) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (*Citywide Inclusive Sanitation*); (p) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa	**P1:** Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	1) Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon 5) Peningkatan penggunaan enegi baru terbarukan
		P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur daerah	3) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak

Tema RKP Tahun 2026:		Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	Ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi biru dan ekonomi hijau, dilaksanakan melalui (a) penguatan industri dan UMKM halal; (b) penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi iternasional; (c) penguatan ekosistem halal; (d) penguatan keuangan syariah; (e) penguatan dana sosial syariah; (f) penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital; (g) penguatan tata kelola ekonomi biru; (h) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (i) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (j) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil 99 laut; (k) penguatan industri transportasi laut; (l) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (m) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru; (n) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (o) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik; (p) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (q) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (r) pembangunan rendah karbon; (s)peningkatan pekerjaan hijau/ green jobs; dan (t) penguatan	**P1:** Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	1) Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon 2) Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi 4) Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau serta pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau
		P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	2) Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas
			3) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
			4) Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tema RKP Tahun 2026:		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026**:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	pengelolaan hutan lestari.		
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	(a) Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda (b) Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik (c) Pendalaman sektor keuangan (d) Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi (e) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan (f) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	**P1:** Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	2) Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi 5) Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan
		P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur daerah	1) Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar 2) Penguatan infrastrutkur konektivitas dan sarana penunjang logistik daerah

Tema RKP Tahun 2026:		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026**:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
PN 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic* (STEAM);	**P2:** Pembangunan Sumberdaya manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	1) Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan
	Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan; (b) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi; (c) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola	**P2:** Pembangunan Sumberdaya manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	2) pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat
	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan	**P2:** Pembangunan Sumberdaya	4) Meningkatkan kapasitas inovasi daerah

Tema RKP Tahun 2026:		Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (c) pengembangan manajemen talenta nasional	manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	
	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;	**P2:** Pembangunan Sumberdaya manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	3) Meningkatkan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak 5) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter
	Prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat, melalui (a) peningkatan pembinaan prestasi olahraga; dan (b) peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan olahraga yang inklusif		
PN 5: melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi	a. pengembangan hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi,	**P1:** Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan	3) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan 6) Meningkatkan investasi daerah

Tema RKP Tahun 2026:		Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	serta berorientasi ekspor; b. pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. c. optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; d. peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; e. peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global f. optimalisasi investasi strategis Danantara	berkelanjutan	
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	(a) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi (b) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif (c) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif (d) Percepatan penyediaan perumahan dan pemukiman	**P1:** Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	2) Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi
		P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur daerah	4) Penanganan Permukiman kumuh

Tema RKP Tahun 2026:		Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	(e) Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan (f) Pembangunan perkotaan berkelanjutan (g) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	**P4:** Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis	1) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	(a) reformasi politik dan tata kelola pemilu (b) reformasi hukum, (c) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum (d) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* (e) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (f) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN (g) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan (h) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah (i) Pemerintah Digital (j) Perlindungan Warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran	**P4:** Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis	1) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2) Penerapan manajemen risiko 3) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit 4) Optimalisasi pendapatan daerah 5) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah

Tema RKP Tahun 2026:		Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	Indonesia (k) Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (l) Peningkatan produktitivitas BUMN (m) Optimalisasi pendapatan negara (n) Optimalisasi belanja negara (o) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (p) Pengendalian inflasi		
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa (c) pembangunan berketahanan iklim (d) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna	**P2:** Pembangunan Sumberdaya manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	5) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter
		P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1) Meningkatkan kolaborasi bencana dan mitigasi bencana dan mitigasi bencana 3) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tema RKP Tahun 2026:		Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026:	
"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"		**"Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya saing"**	
Prioritas RKP Tahun 2026		**Prioritas RKPD Tahun 2026**	
Prioritas Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
			4) Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan keterkaitan prioritas nasional tahun 2026 serta sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Keterkaitan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4-5 Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jambi dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
1	**P1:** Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan, dengan	**PN 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	10,45	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
	arah kebijakan: 1) Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon 2) Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi 3) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan 4) Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau serta pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau 5) Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan 6) Meningkatkan investasi daerah	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Indeks Ekonomi Hijau	73,65	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	33,41	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
		PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	2,93	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Rasio Kewirausahaan (%)	5,4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
		koperasi.	Rasio PDRB Pariwisata (%)	1,22	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		PN 5: melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	9,98 – 10,12 18,79 18,11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
2	**P2:** Pembangunan Sumberdaya manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan, dengan arah kebijakan : 1) Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan 2) pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat 3) Meningkatkan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak	**PN 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia	77,90-81,0	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
	perempuan dan anak 4) Meningkatkan kapasitas inovasi daerah 5) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		PN 4: memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Harapan lama sekolah (tahun)	13,3-13,31	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	72,0	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2 – 4,35	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,8-54,8	
			Usia Harapan Hidup (tahun)	74,25	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Kesehatan Ibu dan Anak		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
			a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	85	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			b. Angka keberhasilan pengobatan TBC (treatment succes rate)	95	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	72,43 - 72,55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,504	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	40,51 28,5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Persentase desa mandiri (%)	26,91	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PENATAAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	60,25-60,6 69,36-69,55	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
		toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3	**P3:** Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur daerah, dengan arah kebijakan : 1) Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar 2) Penguatan infrastrutkur konektivitas dan sarana penunjang logistik daerah 3) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak 4) Penanganan	**PN 2**: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	58,75 12,5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kontribusi PDRB PKN terhadap PDRB Provinsi (%)	13,9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
	permukiman kumuh				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4	**P4:** Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis, dengan arah kebijakan : 1) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2) Penerapan manajemen resiko 3) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit 4) Optimalisasi pendapatan daerah 5) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah	**PN 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	66,43	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		PN 4: memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Indeks Inovasi Daerah	58,89	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan	Indeks Integritas provinsi (Hasil SPI)	73,99	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
		Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Indeks Pelayanan Publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,87 4,0	PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
5	**P5:** Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana 2) Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas	**PN 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	70	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,565	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
	3) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
	4) Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	**PN 8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB (%) Indeks resiko Bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%)	 136,14 37,25	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			- Kumulatif (%)	21,05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN		Program
			Sasaran	Target 2026	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi serta kabupaten/kota dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan kewilayahan dengan kebijakan sektoral.

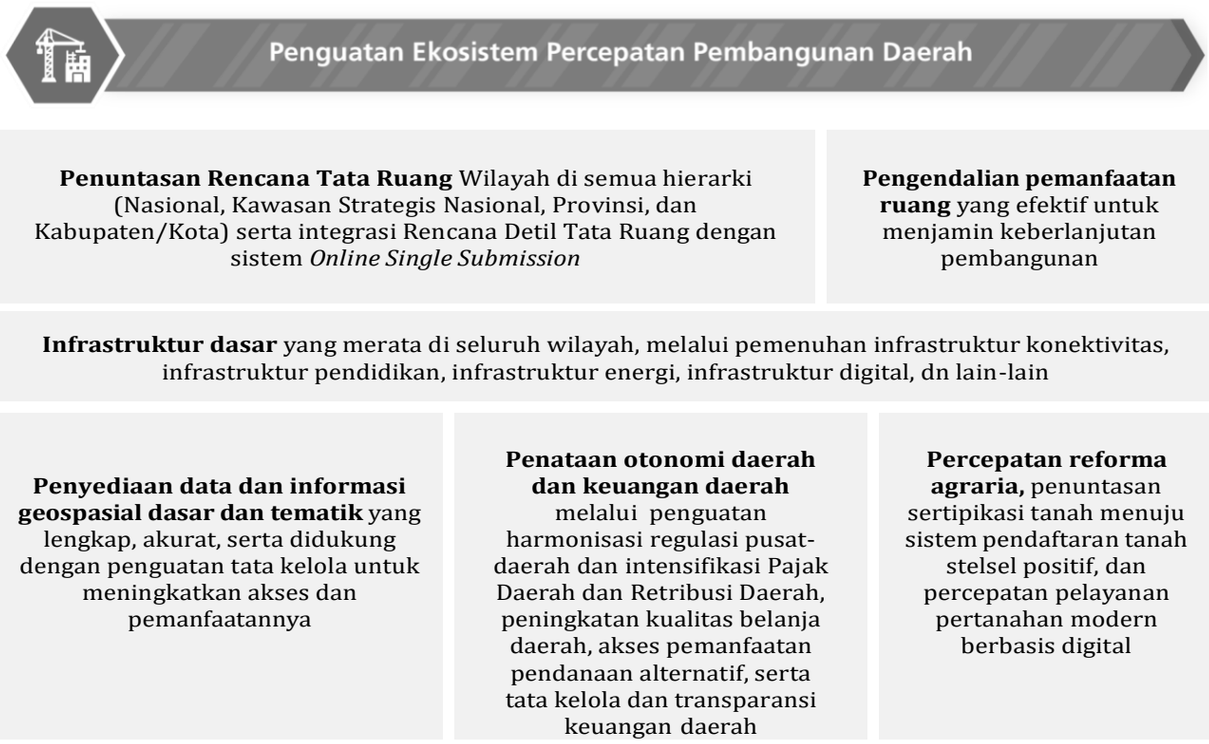

Sumber: Rancangan Awal RKP 2026, 2025

1-2 kebijakan umum pengembangan kewilayahan nasional

Kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lngkungan.

Sumber: Rancangan RKP 2026, 2025

Gambar 4-3 Kebijakan umum nasional dalam rangka pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, intervensi kebijakan dibuat berbasis kepulauan dan didetailkan sampai level provinsi. Dalam implementasinya, kebijakan kewilayahan tersebut didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan diarahkan prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakter wilayah.

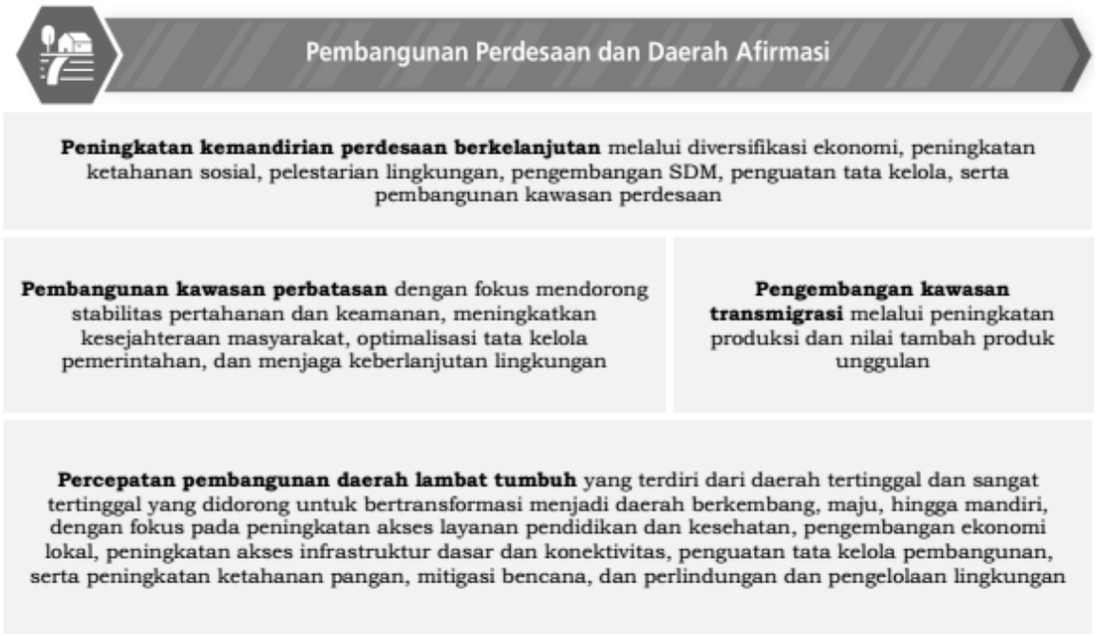

Sumber: Rancangan RKP 2026, 2025

Gambar 4-4 Kebijakan umum pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi

Selain itu peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

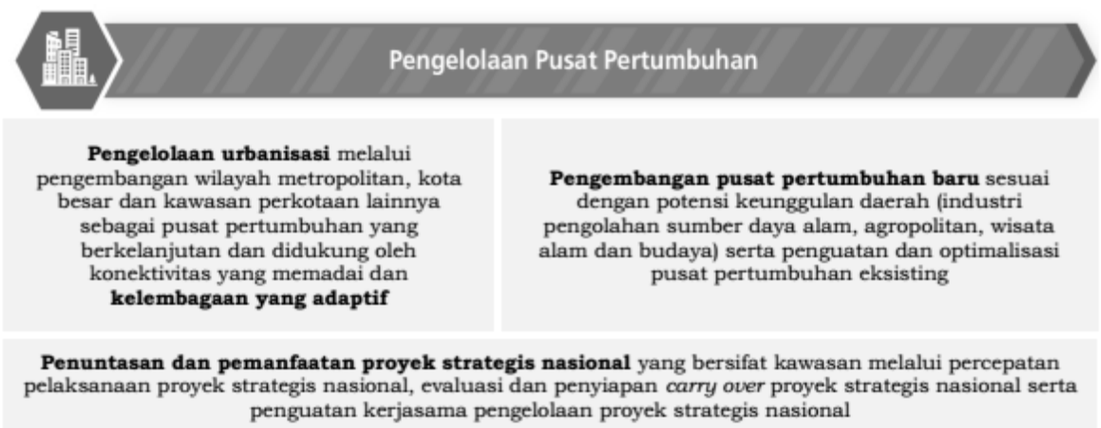

Sumber: Rancangan Awal RKP 2026, 2025

Gambar 4-5 Kebijakan umum nasional dalam pengelolaan pusat pertumbuhan

Sementara itu, arah kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jambi antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7

Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2023-2043 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.
2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan pada upaya mempererat keterkaitan ruang antar kawasan, percepatan pembangunan kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di setiap daerah.
3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada penyiapan manusia Jambi yang sehat dan dapat hidup layak.
4. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas sehingga menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup sekarang dan mendatang.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memberi jaminan kepastian hukum.

4.3 Arahan Pemerintah Pusat untuk Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan

Rakortekrenbang Tahun 2025 serta pemutakhirannya, dengan target Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 4-6 Arahan Pemerintah Pusat pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tahun 2026

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan	Warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	72,65%
		Warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	75,87%
		Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	71,3
		Rata–rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	63,25
		Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional	67,33
		Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan asesmen nasonal	60,59
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	63,62
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	63,62
		Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	58,69
		Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	55,27

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	54,05
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	58,91
		Tingkat penyerapan lulusan SMK	85,72%
		Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	75,94%
		Iklim keamanan SMA	81,25
		Iklim keamanan SMK	69,86
		Iklim keamanan SDLB	75,38
		Iklim keamanan SMPLB	66,48
		Iklim keamanan SMALB	71,78
		Iklim kebinekaan SMA	73,08
		Iklim kebinekaan SMK	71,25
		Iklim kebinekaan SDLB	67,23
		Iklim kebinekaan SMPLB	70,22
		Iklim kebinekaan SMALB	72,82
		Iklim inklusivitas SMA	61,85
		Iklim inklusivitas SMK	59,93
		Iklim inklusivitas SDLB	66,91
		Iklim inklusivitas SMPLB	65,42
		Iklim inklusivitas SMALB	66,38

2. Urusan Kesehatan

1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	100%

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
2.	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	63,85
3.	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	10
4.	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar	71
5.	Rumah sakit dan Puskesmas terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	60,87
6.	Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Penemuan Kasus TBC	70
7.	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	100

3. Urusan Pekerjaan Umum

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1.	Mewujudkan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	55,13
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	87%
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	2043
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	12 titik
		Panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengaman pantai yang dibangun	15000 meter

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
2.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	1,13
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	11,5
		Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	24,5
3.	Terselenggaranya jasa konstruksi di daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	-
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	120
		Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	70
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	-
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	70
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	50
4	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	87,83

4. Urusan Penataan Ruang

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1.	Terselesaikannya rencana tata ruang daerah	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi	11
		Jumlah rancangan Perda RTRW kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda	2
2.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi	1

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		administratif	
		Jumlah laporan kebutuhan PPNS penataan ruang di daerah	1

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	43,5

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100
		Jumlah personel TRC dan pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	
		Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan	

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		dinyatakan sah/legal	
		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	
		Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	5
		Jumlah daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	
2.	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	100
		Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	12 daerah
		Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesuai standar	12 daerah

6. Urusan Sosial

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100
		Presentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100
		Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100
		Presentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Presentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	100
		Presentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	100
3	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Presentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Pendapatannya	100 orang
5	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Presentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	72

D.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	2500
2	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	75
		Persentase Tenaga Kerja disektor prioritas yang	97

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		meningkat produktivitasnya	
3	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungin hak-hak dasarnya	105.000
		Jumlah pekerja pada perusahan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	154.926
		Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	2.100
4	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri	5,000
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	75
		Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	2
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	36.000
5	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada Dokumen RTKD	1

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100
		Indeks Pembangunan Gender(IPG)	91,5
		Indeks Ketimpangan Gender(IPG)	0,61

NO.	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
	dan TPPO		
2	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	701
		Provinsi Layak Anak (Provila)	1
		Persentase Anggaran Responsif Gender	75
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100

3. Urusan Pangan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Inflasi pangan bergejolak ± 1 dari target yang ditetapkan	5 ± 1
2	Terentaskanya kerawanan pangan dan gizi	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3,4
3	Meningkatnya ketersediaanya pangan strategis dalam negeri	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	73,57
4	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	79,21
5	Meningkatnya Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92,7

4. Urusan Pertanahan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	4 bidang

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
2	Memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	4 Kepala Keluarga

5. Urusan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53
2	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44
3	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	72
4	Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	28,15

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	100
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	97
		Persentase Kartu Indetitas Anak (KIA) yang diterbitkan	55
3	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	2

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	0
		Jumlah BPD yang Mengimplementasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	1,000
		Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Managemen Pemders	200
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Digital	100
		Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	100
2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	0,35
3	Menurunnya Kemiskinan di Pendesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	7,45
4	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	0

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,5
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,8
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-59 Tahun	2,1
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	65,57
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,8

9. Urusan Perhubungan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,5874
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	85
		Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	0
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Managemen keselamatan	1
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80,2

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	20
		Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	100
2	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	74
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100
		Persentase ASN Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	85
		Persentase Khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	85
		Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM,Bintek,pelatihan)	85

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
3	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintah	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90
		Persentase Kabupaten/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50
		Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	100
		Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemeritantah Daerah	30
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet A yang disediakan oleh Dinas	20
		Persentase ASN pengelola SPBE ditingkat pemerintah provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelola SPBE yang di fasilitasi oleh Dinas	100

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	15
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	5
		Pertumbuhan Wirausaha	15

12. Urusan Penanaman Modal

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp6,91 Trilyun

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosialisasi Kemasyarakatan	82,26
2	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	63,41
3	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olah Raga	33,57
4	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,103

14. Urusan Statistik

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelengaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,5

15. Urusan Persandian

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	4
		Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	3
		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	42
		Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	5

16. Urusan Kebudayaan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Kelestarian cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	34
		Persentase pemduduk usia 10 tahun keatas yang mengujungi peninggalan sejarah	21,16
		Persentase pemduduk usia 10 tahun keatas yang pernh terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	34
		Persentase rumah tangga yang menyelengarakan upacara adat	21

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	6
2	Pemajuan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	30
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,287

17. Urusan Perpustakaan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71
2	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79,3

18. Urusan Kearsipan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah	90,5

D.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	11.213,36

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
2	Tata kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	1 provinsi
3	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Garam	0
		Produksi Perikanan Tangkap	55.136,7 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	60.885 ton
4	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	Angka Konsumsi Ikan	20,57 kg/kap/th
5	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	70

2. Urusan Pariwisata

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	7.776.000
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	650.000.000
		Rasio PDB Pariwisata	1,3

3. Urusan Pertanian

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	300.639
		Jumlah Produksi Jagung	30.174
		Jumlah Produksi Kedelai	-
		Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	-
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	203.541

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	23.499
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	115.000
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	800
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	18.923
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	0
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Tebu	34.227.490
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	293.179
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	0
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	0
		Jumlah Produksi Susu	0
		Jumlah Produksi Telur	81.844
		Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik,babi)	118.927
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,50
		Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	99,60
		Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	98
		Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,5
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	50

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		DPI tanaman hortikultura	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	71
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	40

4. Urusan Kehutanan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	12.000.000.000
2	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTII	-
3	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	1.000 Ha
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	200 Ha
		Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	20 Ha
5	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	0 Unit
6	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	0 Ha

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pengunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru	Porsi EBT dalam Bauran Energi	24,85

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
	Terbarukan		
2	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	99,99
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Rasio Desa berlistrik	100

6. Urusan Perdagangan

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan eksport bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	7%
2	Meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100
3	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase kepatuhan berusaha	100

7. Urusan Perindustrian

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	5,7
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	0,88
3	Meningkatnya Tenaga Kereja di Sektor Industri Pengelolaan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	0,104767
4	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Inventasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp.Triliun)	2,3
5	tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	244,79

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
	Industri Pengolahan Nonmigas		

8. Urusan Transmigrasi

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	39,14
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	45,44

9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kebebasan sipil dan hak-haknya bernegara bagi masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	100
2	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	sedang
3	Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	1 (provinsi)
4	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	64
5	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan	38

NO	KINERJA	INDIKATOR	TARGET
		Kebangsaan	

5 BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

4.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten/Kota

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya dengan mempertimbangkan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh masing-masing kabupaten/kota, perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2020	2021	2022	2023	2024**
Kerinci	3,69	4,16	4,43	5,73	4,57
Merangin	0,78	5,09	5,72	5,28	4,55
Sarolangun	-0,26	6,61	6,73	4,02	3,70
Batang Hari	-0,27	4,74	12,27	3,70	2,99
Muaro Jambi	0,27	4,08	7,97	6,28	6,17
Tanjung Jabung Timur	-3,87	0,13	0,57	2,17	4,73
Tanjung Jabung Barat	-0,64	1,36	2,56	3,51	4,45
Tebo	-0,04	4,32	6,30	4,50	3,97
Bungo	-0,40	5,12	4,73	4,66	3,30
Kota Jambi	-3,28	3,94	5,36	6,61	4,98
Kota Sungai Penuh	-0,14	3,67	4,45	4,92	5,10

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Bila dilihat dari data *time serries* pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuatif, dan telah menunjukkan pemulihan ekonomi setelah Covid-19 Tahun 2020 yang lalu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 adalah Kabupaten Muaro Jambi, diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi. Persebaran perbandingan

capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

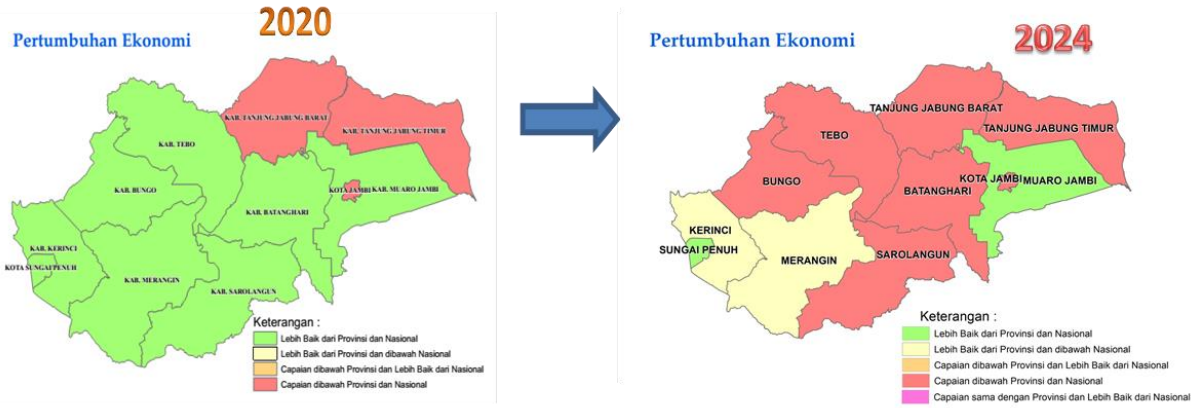

Gambar 5-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2024

lihan ekonomi di tiap wilayah tidak sama. Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dari Provinsi Jambi dan Nasional pada Tahun 2020, justru pertumbuhannya di bawah capaian Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2024. Hal ini merupakan implikasi dari perlambatan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor unggulan kabupaten-kabupaten tersebut.

Bila dilihat dari kontribusi Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi, yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontribusi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terutama berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari sub kategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, kontributor terbesar kedua adalah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi, Sementara untuk

kontributor terkecil adalah Kota Sungai Penuh, dengan kontribusi yang cenderung menurun sejak Tahun 2020.

Tabel 5-2 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA THD PDRB PROVINSI JAMBI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	5,03	4,84	4,43	4,59	4,64
Merangin	7,55	7,67	7,36	7,71	8,02
Sarolangun	6,98	7,13	7,53	7,36	7,15
Batanghari	7,91	8,06	8,82	8,71	8,24
Muaro Jambi	11,8	11,89	11,96	12,28	12,75
Tanjung Jabung Timur	9,39	9,38	9,29	8,58	8,60
Tanjung Jabung Barat	17,88	18,02	18,17	17,40	17,56
Tebo	7,1	7,27	7,15	7,25	7,53
Bungo	8,36	8,64	9,04	8,98	8,62
Kota Jambi	14,35	13,68	13,11	13,89	13,66
Kota Sungai Penuh	3,64	3,42	3,15	3,24	3,24

Sumber : Jambi Dalam angka 2025,2025

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin kabupaten/kota dari tahun 2020 – 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki persentase penduduk miskin yang paling besar, namun jika dilihat dari jumlah maka penduduk miskin terbanyak berada pada Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 2,92 persen, dan persentase ini terus menunjukan penurunan sejak meningkat pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 5-3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	7,30	7,71	7,57	7,54	6,93
Merangin	8,63	9,11	8,70	8,90	8,40
Sarolangun	8,42	8,87	8,48	8,54	8,36
Batang Hari	9,65	10,05	9,63	9,45	8,63
Muaro Jambi	3,83	4,53	4,47	4,43	3,65
Tanjung Jabung Timur	10,95	11,39	10,91	10,85	10,14
Tanjung Jabung Barat	10,29	10,75	10,00	9,79	9,54
Tebo	6,26	6,68	6,34	6,46	6,12
Bungo	5,8	6,23	5,38	5,29	5,06
Kota Jambi	8,27	9,02	8,33	8,24	7,73
Kota Sungai Penuh	3,03	3,41	2,97	3,00	2,92

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

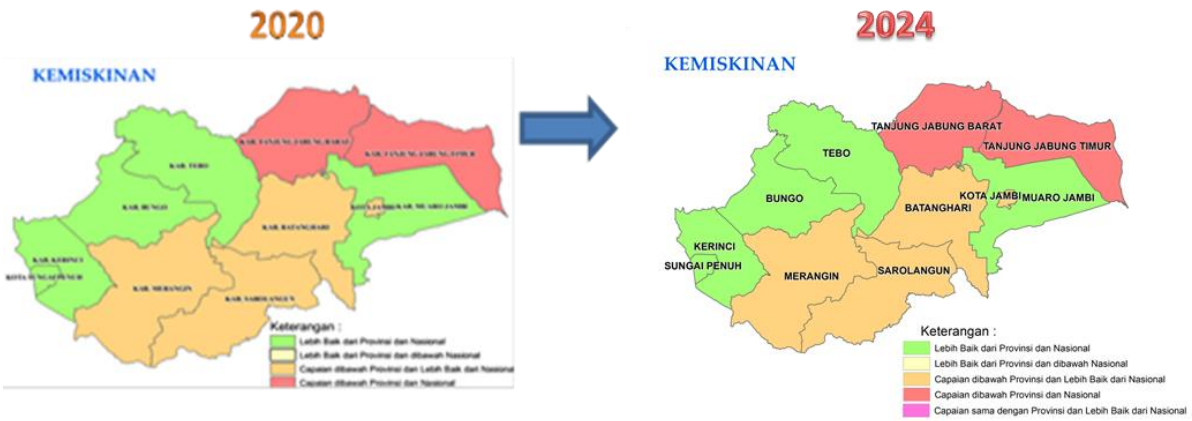

Gambar 5-2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Tabel 5-4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	2,43	2,32	2,63	2,48	2,51
Merangin	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18
Sarolangun	5,71	5,52	5,22	5,09	5,03
Batanghari	4,42	4,26	3,53	3,85	4,49
Muaro Jambi	5,43	5,59	5,35	5,40	5,27
Tanjung Jabung Timur	1,41	1,56	1,32	1,67	2,06
Tanjung Jabung Barat	2,16	2,53	2,88	2,95	3,20
Tebo	2,95	2,83	1,38	1,71	2,50
Bungo	5,94	5,86	5,50	5,23	4,67
Kota Jambi	10,49	10,66	8,95	8,27	7,38
Kota Sungai Penuh	5,56	3,00	2,49	3,80	4,30

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Gambar 5-3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Kota Jambi memiliki TPT tertinggi disusul oleh Kabupaten Bungo. Kedua kabupaten/kota

tersebut didominasi oleh sektor jasa, dimana dampak pandemi Covid-19 belum hilang sepenuhnya pada sektor ini. Namun demikian, pada dasarnya TPT pada kedua kabupaten/kota tersebut telah turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5-5 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Kerinci	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30
Merangin	0,32	0,29	0,35	0,36	0,36
Sarolangun	0,31	0,32	0,30	0,38	0,38
Batanghari	0,32	0,31	0,29	0,36	0,36
Muaro Jambi	0,28	0,32	0,27	0,34	0,34
Tanjung Jabung Timur	0,25	0,25	0,27	0,31	0,31
Tanjung Jabung Barat	0,28	0,25	0,26	0,32	0,32
Tebo	0,30	0,30	0,30	0,24	0,24
Bungo	0,31	0,30	0,32	0,28	0,28
Kota Jambi	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
Kota Sungai Penuh	0,31	0,31	0,29	0,31	0,31

Sumber : BPS, 2025

*Ket: * data terakhir 2023*

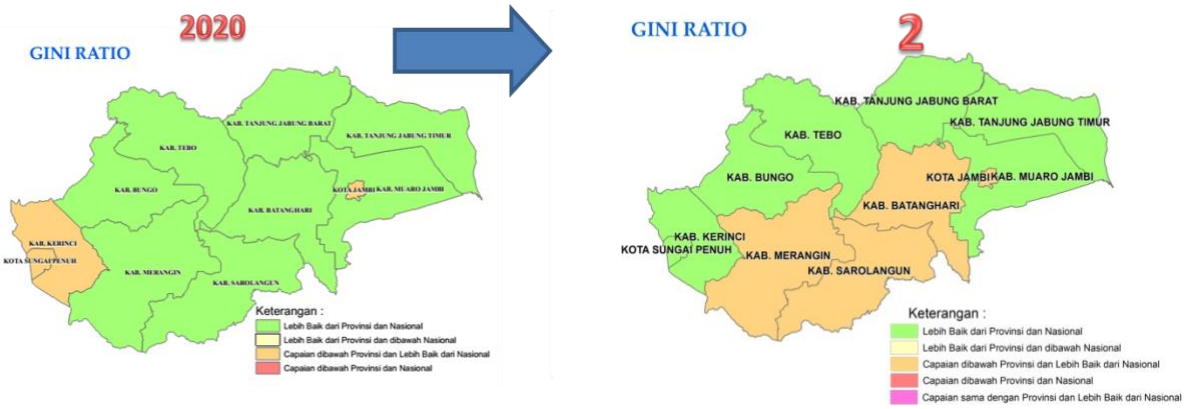

Gambar 5-4 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Koefisien Gini (Gini Rasio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/ kota menunjukan peningkatan yang berarti ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, kecuali kedua kabupaten tersebut.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi terus memperlihatkan perbaikan. Pada tahun 2020, baru 3 kabupaten/ kota yang termasuk dalam kategori IPM tingkat tinggi, pada tahun 2024 seluruh kabupaten/kota telah masuk dalam IPM kategori tinggi, bahkan Kota Jambi masuk kategori IPM sangat tinggi. Jika dilihat secara spasial dengan membandingkan capaian IPM Provinsi dan nasional, terdapat perubahan dari tahun 2020. Jika sebelumnya hanya 2 Kota yang capaiannya lebih baik dari provinsi dan nasional, yaitu Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh, maka pada 2024 Kabupaten Bungo mampu mengakselerasi IPM Kabupaten tersebut hingga lebih tinggi dibanding provinsi walaupun masih di bawah nasional.

Tabel 5-6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	71,21	71,45	71,99	73,77	74,33
Merangin	69,19	69,53	69,98	71,81	72,65
Sarolangun	69,86	70,25	70,89	73,05	73,76
Batanghari	69,84	70,11	70,51	72,50	73,12
Muaro Jambi	69,18	69,55	70,18	72,26	73,11
Tanjung Jabung Timur	64,43	64,91	65,77	69,85	70,77
Tanjung Jabung Barat	67,54	68,16	68,79	71,44	72,01
Tebo	69,14	69,35	69,78	71,99	72,67
Bungo	69,92	70,15	70,55	73,57	74,44
Kota Jambi	78,37	79,12	79,58	80,93	81,77
Kota Sungai Penuh	75,42	75,70	76,17	77,20	77,93

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025,2025

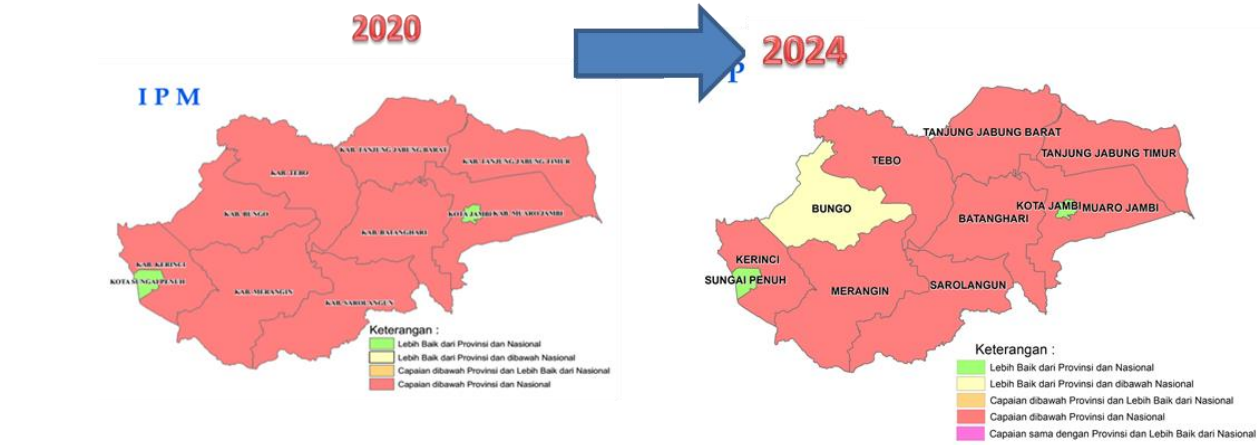

Gambar 5-5 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Berdasarkan beberapa kondisi perwilayahan diatas maka Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan

pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2045** juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dan biru dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2025-2029 akan diprioritaskan pada :

1. Reformasi birokrasi
2. Digitalisasi pelayanan publik
3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah
4. Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muara Jambi, KSPN Danau Kerinci dan Geopark Merangin)
5. Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi
6. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah
7. Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti – Tungkal -Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh

8. Fasilitasi Percepatan Ketahanan Energi Mendukung Kawasan Strategis
9. Percepatan Pengembangan sistem logistik transportasi daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X)
10. Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
11. PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)
12. Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah

Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam **RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi** yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
   a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan pengembangan kawasan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
   b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
   c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
   d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.

2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
   c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
   b. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
   c. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasam strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
   a. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
   b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
   c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
   d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung Iingkungan.
   e. Pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana.
4 Pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:

a. Pemantapan PKN Kawasan Perkotaan Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Muara Bulian, dan Perkotaan Muara Sabak sesuai arahan RTRWN.
c. Pemantapan PKL yang terdiri dari Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, Perkotaan Sanggaran Agung, Perkotaan Bangko, Perkotaan Sungai Manau, Perkotaan Pasar Masurai, Perkotaan Rantau Panjang, Perkotaan Pasar Pamenang, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Wirotho Agung, Perkotaan Sungai Bengkal, Perkotaan Sengeti, Perkotaan Pijoan, Perkotaan Sebapo, Perkotaan Marga, Perkotaan Sungai Gelam, Perkotaan Pauh, Perkotaan Pekan Gedang, Perkotaan Singkut, Perkotaan Rantau Keloyang, Perkotaan Embacang Gedang, Perkotaan Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Ikil, Perkotaan Simpang Sungai Rengas, Perkotaan Muara Tembesi, Perkotaan Muara Jangga, Perkotaan Merlung, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Mendahara, Perkotaan Nipah Panjang, dan Perkotaan Pandan Jaya.

5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melalui:
a. Penatagunaan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan.
b. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta peanfaatan jasa lingkungan.
c. Konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.
d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan lindung
e. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah daerah.

f. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
g. Menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.

6 Peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui:
a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah daerah
b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ Tentara Nasional Indonesia

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1 Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
2 Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.

3 Kabupaten Muaro Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar.
4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi.
6 Kota Sungai Penuh mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
7 Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, serta memperhatikan kendala pengembangan yang ada, maka sasaran pembangunan Kabupaten/ kota pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. KABUPATEN KERINCI

Kabupaten Kerinci didominasi oleh sektor Pertanian dan pariwisata, sehingga Kerinci diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan; peternakan dan perikanan, sehingga menjadi lokasi prioritas kawasan swasembada pangan , air dan energi. Demikian juga sektor pariwisata

dan kawasan Konservasi, mengingat Kerinci menjadi lokasi prioritas pariwisata unggulan Provinsi Jambi serta menjadi kawasan konservasi dan rawan bencana. Selain itu, Kabupaten Kerinci juga menjadi lokasi prioritas komoditas kopi yang tidak hanya didorong produktivitasnya, namun juga hilirisasi produk tersebut. Sementara untuk sasaran pembangunan Kabupaten Kerinci pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-7 Sasaran Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,65%
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,39%-2,45%
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,6%-6,9%
4	Rasio Gini	0,28-0,29
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	776.349,15

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-8 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Kerinci

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Peningkatan ketahanan pangan keluarga
	Peningkatan pangan berbasis sumber daya lokal
	Pengembangan sektor pariwisata
	Bantuan permodalan UMKM
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/ SMK
P3: Peningkatan dan	Peningkatan infrastruktur jalan

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	dan drainase
	Bedah rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Perhutananan Sosial

2. KABUPATEN MERANGIN

Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor Pertanian dan pariwisata, sehingga Merangin diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan; peternakan dan perikanan, sehingga selain perwujudan perkotaan Bangko, Kabupaten Merangin juga menjadi lokasi prioritas kawasan swasembada pangan , air dan energi, serta lokasi prioritas pariwisata unggulan Provinsi Jambi seperti Geopark Merangin, serta menjadi kawasan konservasi dan rawan bencana. Sementara untuk sasaran pembangunan Kabupaten Merangin pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-9 Sasaran Pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,92 – 5,02
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,98 – 4,08
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,38 – 7,96
4	Rasio Gini	0,300 – 0,345
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	812.477,02

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di

Kabupaten Merangin, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Sarana prasarana pertanian
	Sarana prasarana perikanan budidaya
	Infrastruktur cadangan pangan
	Pengembangan sektor pariwisata
	Bantuan permodalan UMKM
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
	Peningkatan kapasitas SDM Pendidik dan tenaga kependidikan
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	Bedah rumah
	infrastruktur jalan
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Perhutananan Sosial

3. KABUPATEN SAROLANGUN

Kabupaten Sarolangun didominasi oleh sektor Pertanian. Untuk itu, Kabupaten Sarolangun diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Selain itu, Kabupaten Sarolangun juga menjadi lokasi prioritas kawasan swasembada air dan energi. Sementara untuk sasaran pembangunan Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-10 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Sarolangun Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97 – 5,5
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,54 – 4,57
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,34 – 7,92
4	Rasio Gini	0,34 – 0,35
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	839.486,39

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2025, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-11 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Sarolangun

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Sarana Prasarana Pertanian
	Peralatan pengolahan hasil perkebunan
	Pelatihan bagi UMKM/IKM
	Bantuan permodalan UMKM
	Pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	infrastruktur jalan dan drainase
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Limun-Singkut
	Bedah rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah

P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
	Optimalisasi perhutanan sosial

4. KABUPATEN BATANG HARI

Kabupaten Batang Hari didominasi oleh sektor Pertanian, sehingga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Kabupaten Batang Hari menjadi lokasi prioritas swasembada pangan, serta pengembangan komoditas karet dan sawit. Sementara untuk sasaran pembangunan Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-12 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Batang Hari Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,85 – 4,87
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,80 – 4,30
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,59 – 8,19
4	Rasio Gini	0,3330 – 0,340
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	750.875,59

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2025, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di

Kabupaten Batang Hari, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-13 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Batang hari

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Sarana produksi perikanan
	Sarpras pertanian
	Intensifikasi tanaman karet
	Bantuan permodalan UMKM
	Pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
	Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	peningkatan dan Pemeliharaan jalan provinsi
	Bedah rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Respon cepat bencana karhutlah

5. KABUPATEN MUARO JAMBI

Sektor basis Kabupaten Muaro Jambi adalah Industri pengolahan, disamping sektor Pertanian, sehingga Kabupaten Muaro Jambi diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan; peternakan dan perikanan dengan terus meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan di wilayahnya. Kabupaten Muaro Jambi menjadi lokasi prioritas kawasan komoditas unggulan sawit dan karet; kawasan swasembada air dan energi; kawasan pertumbuhan baru

SENTUSA; serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Candi Muaro Jambi. Sementara untuk sasaran pembangunan Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-14 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,25 – 6,5
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,27 – 5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	3,20 – 3,46
4	Rasio Gini	0,320
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	1.967.023,36

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5-15 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Muaro Jambi

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Jaringan listrik
	Sarpras pertanian
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
P3: Peningkatan dan	Penanganan jalan provinsi

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	Bedah rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Respon cepat bencana karhutlah

6. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh sektor Pertanian sebagai sektor basisnya, untuk itu, Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi lokasi prioritas kawasan komoditas unggulan sawit, pinang dan kelapa; kawasan swasembada air dan energi; kawasan pertumbuhan baru SENTUSA; Kawasan swasembada pangan; serta kawasan konservasi dan rawan bencana Taman Nasional Berbak. Sementara untuk sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-16 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	1,4
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,0 – 9,24
4	Rasio Gini	0,306
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	1.716.830,62

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-17 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Bantuan alat tangkap bagi nelayan
	Pengolahan hasil perikanan (pelatihan dan bantuan alat pengolahan ikan dan hasil laut lainnya)
	Sarpras Pertanian
	Bantuan permodalan UMKM
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	OP DI/R kewenangan Provinsi
	Infratruktur Jalan
	Bedah Rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Pengelolaan mangrove
	Pengendalian karhutlah

7. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Produksi minyak dan gas yang melimpah menjadikan kabupaten ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Selain itu, sektor industri pengolahan juga menjadi basis kabupaten ini, sehingga dalam upaya menumbuhkan perekonomian di Provinsi Jambi sektor basis ini termasuk sektor yang akan digenjot pada tahun 2026. Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menjadi lokasi prioritas kawasan komoditas unggulan sawit, pinang dan kelapa; kawasan swasembada air dan energi; kawasan swasembada pangan; serta kawasan pertumbuhan baru SENTUSA. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-18 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 – 5,5
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,25
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,85 – 8,0
4	Rasio Gini	0,287
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	1.609.438,64

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-19 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Sarpras pertanian
	Penyediaan infrastruktur Penunjang Ketahanan pangan
	Alat tangkap perikanan
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	peningkatan dan Pemeliharaan jalan provinsi
	Bedah Rumah
	Penanganan kawasan kumuh
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Pengelolaan mangrove
	Pengendalian karhutlah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Pengelolaan mangrove
	Pengendalian karhutlah

8. KABUPATEN TEBO

Kabupaten Tebo lebih didominasi oleh sektor Pertanian, sehingga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan; peternakan dan perikanan, serta menjadi lokasi prioritas swasembada pangan, serta pengembangan komoditas karet dan sawit. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-20 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Tebo Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,38 – 2,44
3	Tingkat Kemiskinan (%)	5,81
4	Rasio Gini	0,257
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	898.993,11

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-21 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Tebo

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Alsintan (traktor, kultivator,hand tractor, sarana pompa air)
	Pengembangan tanaman kacang tanah
	Pengembangan kawasan cabe dan bawng merah
	Infratruktur ketahanan pangan
	Pelatihan IKM dan industri kreatif
	Intensifikasi tanaman karet
	Alat pengelolaan kebun
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/ SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	Bedah rumah
	Peningkatan jalan Simpang Betung Bedarah-Simpang Pintas-Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Perhutanan sosial

9. KABUPATEN BUNGO

Sektor basis Kabupaten Bungo didominasi oleh sektor jasa, sehingga pada Tahun 2026 Kabupaten ini menjadi lokasi prioritas untuk perwujudan Perkotaan Bungo. Namun demikian, Kabupaten ini tetap didorong menjadi lokasi prioritas swasembada pangan wilayah tengah Provinsi Jambi dan lokasi prioritas pengembangan sawit dan karet. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-22 Sasaran Pembangunan untuk Kabupaten Bungo Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75 – 4,97
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,45 – 4,56
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,8 – 5,0
4	Rasio Gini	0,270-0,280
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	503.643,33

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kabupaten ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-23 Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Bungo

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Sarpras Pertanian
	Bantuan permodalan UMKM
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Rehab SMA/ SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	Peningkatan jalan Muara Bungo-peninjau Junction (jalan, drainase, dinding penahan longsor, box culvert)
	Jalan lingkar Muara Bungo (Jalan Lingkar Simpang Sei. Buluh-jembatan Tanjung Menanti)
	Peningkatan jalan Simpang Betung Bedarah-Simpang Pintas-Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo
	Bedah Rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi Pendapatan Daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Perhutanan Sosial

10. KOTA JAMBI

Sebagai ibukota provinsi, struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh sektor jasa, sehingga perwujudan Perkotaan Jambi perlu terus dilakukan. Adapun sasaran pembangunan Kota Jambi Tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

Tabel 5-24 Sasaran Pembangunan untuk Kota Jambi Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,75 – 6,0
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,72

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,25
4	Rasio Gini	0,33
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	38.878,33

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kota ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-25 Highlight Indikasi Intervensi di Kota Jambi

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Pelatihan dan magang tenaga kerja
	Bantuan permodalan UMKM
	Gerakan pangan murah
	Pengembangan tanaman cabai
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Sarpras SMA/SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	Peningkatan jalan provinsi
	Rambu-rambu lalu lintas
	Bedah rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Pengendalian banjir

11. KOTA SUNGAI PENUH

Sebagai wilayah perkotaan, struktur perekonomian Kota Sungai Penuh didominasi oleh sektor jasa, sehingga pada Tahun 2026 Kota ini

menjadi lokasi prioritas untuk perwujudan Perkotaan Sungai Penuh. Selain itu, Kota Sungai Penuh juga menjadi lokasi prioritas kawasan swasembada pangan , air dan energi; kawasan pariwisata unggulan dan kawasan Konservasi. Selain itu, Kota Sungai Penuh juga menjadi lokasi prioritas pengembangan komoditas kopi yang tidak hanya didorong produktivitasnya, namun juga hilirisasi produk tersebut. Adapun sasaran pembangunan Kota Sei. Penuh Tahun 2026diarahkan sebagai berikut:

Tabel 5-26 Sasaran Pembangunan untuk Kota Sungai Penuh Tahun 2026

NO	Sasaran Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,84
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,10 – 4,20
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,77 – 2,88
4	Rasio Gini	0,300-0,310
5	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	242.382,81

Sumber: Hasil Rakortek, 2025

Dalam perpektif pembangunan wilayah Provinsi Jambi oleh Pusat sebagaimana diarahkan dalam RKP Tahun 2026, serta sebagai implementasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi, maka indikasi intervensi yang akan dilaksanakan di Kota ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-27 Highlight Indikasi Intervensi di Kota Sei. Penuh

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
P1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;	Bantuan alsintan
	Pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif
	Pelatihan eceng gondok

Prioritas Daerah Provinsi	Indikasi intervensi
	Bantuan permodalan UMKM
P2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan;	Jaminan kesehatan masyarakat
	Sarpras SMA/SMK
P3: Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;	Pelebaran jalan Sekungkung-Batas Kerinci/ Sungai Penuh – Batu Kutik
	Rehabilitasi Jalan Depati Parbo
	Rehabilitasi Jalan Debai-Dusun Baru-Batas Kota Sungai Penuh-Simpang 4 Sebukar
	Bedah rumah
P4: Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan demokratis;	Optimalisasi pendapatan daerah
P5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana
	Perhutanan Sosial

6 BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, target-target kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu-isu strategis yang berkembang serta aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dijabarkan dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 15 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Program dan kegiatan perangkat daerah pada Tahun 2026 ini juga sudah melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**1.359.205.087.182,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.358.812.708.012,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.358.812.708.012,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**958.833.082.731,00**							**0,00**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Indeks Keterbukaan Informasi** **Predikat AKIP**	**98.00** **99.00** **A**	**92.92** **95.80** **BB**	**93.00** **96.00** **BB**	**94.00** **96.50** **BB**	**958.833.082.731,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.002.723.807,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	452.018.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	87.705.557,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	162.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	301.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	945.569.851.770,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9151 Orang/ Bulan	945.178.851.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	114.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	128.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	149.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	145.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	91.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	91.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	98.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	98.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.868.752.847,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	136.589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	473.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	605.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	652.999.847,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**958.833.082.731,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.696.130.507,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	925.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Indeks Keterbukaan Informasi** **Predikat AKIP**	**98.00** **99.00** **A**	**92.92** **95.80** **BB**	**93.00** **96.00** **BB**	**94.00** **96.50** **BB**	**958.833.082.731,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.770.790.507,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.361.163.900,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	704.070.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	338.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.318.718.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.800.460.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				105 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.400.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	199.999.900,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	199.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**-**	**398.589.625.682,00**							**0,00**	
		[Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas]	**Iklim Inklusivitas SDLB**	**55.05**	**53.65**	**53.80**	**54.05**	**398.589.625.682,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
			Iklim Inklusivitas SMA	**57.67**	**54.07**	**54.67**	**55.27**									
			Iklim inklusivitas SMALB	**58.53**	**55.33**	**56.03**	**56.53**									
			Iklim Inklusivitas SMK	**60.69**	**55.53**	**57.63**	**58.69**									
			Iklim inklusivitas SMPLB	**60.91**	**56.19**	**58.19**	**58.91**									
			Iklim keamanan SDLB	**67.85**	**57.69**	**58.39**	**59.93**									
			Iklim keamanan SMA	**69.13**	**57.91**	**58.41**	**60.59**									
			Iklim keamanan SMALB	**69.39**	**58.85**	**60.35**	**61.85**									
			Iklim keamanan SMK	**69.65**	**59.78**	**61.65**	**63.25**									
			Iklim keamanan SMPLB	**70.02**	**60.05**	**62.02**	**63.62**									
			Iklim kebinekaan SDLB	**71.02**	**60.42**	**64.02**	**65.42**									
			Iklim kebinekaan SMA	**71.23**	**62.62**	**64.78**	**66.38**									
			Iklim kebinekaan SMALB	**71.28**	**63.18**	**65.28**	**66.48**									
			Iklim kebinekaan SMK	**72.11**	**64.08**	**65.61**	**66.91**									
			Iklim kebinekaan SMPLB	**72.53**	**64.31**	**66.03**	**67.23**									
			Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	**72.78**	**64.73**	**66.23**	**67.33**									
				73.70	**65.23**	**67.82**	**69.86**									
			Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	**74.01**	**66.62**	**68.42**	**70.22**									
				74.66	**67.46**	**68.66**	**71.25**									
			Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	**76.45**	**68.65**	**69.95**	**71.30**									
				76.98	**68.82**	**70.48**	**71.78**									
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	**77.08**	**69.18**	**70.70**	**72.65**									
				77.38	**70.10**	**70.82**	**72.82**									
			Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	**77.42**	**70.95**	**72.08**	**73.08**									
				80.00	**71.08**	**72.31**	**75.38**									
				80.23	**71.97**	**74.88**	**75.87**									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional **Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional** **Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional** **Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional** **Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional** **Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK** **Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah** **Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus** **Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**80.82** **86.05** **93.95**	**74.38** **74.48** **81.60**	**75.02** **80.05** **83.66**	**75.94** **81.25** **85.72**									
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	219.984.605.696,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				22 Unit	10.183.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	3.639.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				80 Paket	16.378.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				6000 Paket	8.604.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	7.119.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	667.985.131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				920 Peserta didik	2.284.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	358.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				500 Orang	19.495.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				249 Orang	778.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				256 Satuan Pendidikan	133.897.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				768 Orang	490.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				247 Orang	233.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	160.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				247 Orang	207.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				247 Komunitas	183.999.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	599.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				8 Unit	7.196.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	7.075.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				247 Orang	183.999.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	148.592.342.838,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	810.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	8.944.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				18 Ruang	1.375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				23 Paket	13.730.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3520 Paket	5.651.320.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	3.858.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	270.912.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				600 Peserta didik	2.652.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	168.970.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				500 Orang	19.462.997.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				185 Orang	674.999.724,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				185 Satuan Pendidikan	249.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				187 Satuan Pendidikan	77.361.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				561 Orang	242.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				185 Komunitas	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1.270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				5 Ruang	5.448.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				22 Ruang	4.278.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				182 Orang	244.074.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	30.012.677.148,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1.201.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	159.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1.259.920.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				5 Ruang	499.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				5 Ruang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				5 Ruang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	1.499.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1100 Paket	2.043.999.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				35 Paket	149.998.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				29 Peserta Didik	3.233.999.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				460 Peserta Didik	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				100 Orang	6.876.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				24 Orang	250.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				24 Satuan Pendidikan	9.632.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				72 Orang	193.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	122.988.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	179.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				24 Kegiatan	258.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				24 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					**-**	**179.999.855,00**							**0,00**	
		[Terakomodirnya muatan lokal dalam kurikulum sekolah]	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**179.999.855,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-			-	179.999.855,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	179.999.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**-**	**1.009.999.940,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan]	**Persentase terpenuhinya kebutuhan Pendidik ASN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.009.999.940,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	1.009.999.940,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	269.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	740.999.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**					**-**	**199.999.804,00**							**0,00**	
		[terlestarikannya bahasa dan sastra daerah]	**Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Kewenangan Provinsi**	**20**	**20**	**20**	**20**	**199.999.804,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	199.999.804,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi														
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi				94 Orang	199.999.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	X	**NON URUSAN**						**392.379.170,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**392.379.170,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**392.379.170,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**392.379.170,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	99.999.900,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	99.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	292.379.270,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	292.379.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						**111.740.186.183,00**							**128.382.528.863,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**111.740.186.183,00**							**128.382.528.863,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**111.740.186.183,00**							**128.382.528.863,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**82 % 82 Nilai**	**50.006.543.035,00**							**55.967.141.630,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.006.543.035,00**	-	-	-	-	-	-	**55.967.141.630,20**	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 % 100 %	489.646.000,00			-	-	-	-	556.420.612,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	295.207.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		332.886.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	16.604.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		18.264.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	20.325.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		22.357.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	18.175.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		19.992.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	139.335.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		162.919.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan* *Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan*	-			100 % 100 %	45.319.159.135,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	50.247.680.698,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	45.039.394.135,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		49.543.333.548,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	246.120.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		607.332.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	9.800.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		52.015.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	23.845.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.006.543.035,00**	-	-	-	-	-	-	**55.967.141.630,20**	-
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	131.361.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	62.387.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	131.361.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		62.387.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	247.356.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	482.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	93.290.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		75.660.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		154.139.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	154.066.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		252.242.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	892.047.540,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	831.640.678,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		11.003.458,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.178.540,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	20.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		47.563.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	9.435.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		11.478.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	22.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	770.434.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		721.595.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	414.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	762.308.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		116.184.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	414.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		646.124.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	735.127.400,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	953.788.965,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.500.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	606.380.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		667.018.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	97.427.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		107.171.482,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.820.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		168.599.483,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.777.845.960,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	2.070.872.056,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	512.260.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		563.486.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	198.565.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		329.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	913.560.960,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.004.917.056,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	153.460.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		173.294.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**60.515.120.148,00**							**71.153.054.513,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Standar sarana dan prasarana Instalasi farmasi provinsi yg terpenuhi* *Persentase Pemenuhan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alkes) dan SDM Kesehatan Laboratorium Kesehatan* *Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar* *Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*	-			100 % 95 % 80 % 70 %	1.641.890.360,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	4.831.507.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	175.922.960,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		193.515.256,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1.465.967.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		4.637.992.394,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*ersentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana* *Jumlah Kab/Kota yang memiliki "e 20% Pus rujukan Rabies Center* *Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%* *Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarkat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS* *Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi* *Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U)* *Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70%* *Persentase Kab/Kota dengan cakupan Kunjungan Neonatal sesuai standar minimal 95%* *Persentase Kab/Kota dengan cakupan Kunjungan Neonatal sesuai standar minimal 95%* *Persentase Kab/Kota dengan cakupan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 95%* *Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui MTBS* *Persentase Kab/kota yang 80 % Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar* *Persentase Kab/kota yang melaksanakan Deteksi dini Hepatitis B dan atau Hepatitis C pada populasi beresiko* *Persentase Kab/Kota yang mempunyai IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk* *Persentase Kab/Kota yang mencapai Treatment Coverage TBC minimal 50% (Ditemukan dan Diobati)*	-			100 % 11 Jumlah 4 Jumlah 78586 Jumlah 1260000 Jumlah 10 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 85 % 100 % 91 % 72,73 % 87 % 100 % 100 % 95 % 70 % 76 % 45 % 92 %	58.397.982.788,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	65.607.899.863,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ODHA Baru yang memulai ARV *Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)* *Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana* *Persentase Pengobatan Kasus Malaria sesuai standar* *Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Pandu PTM* *Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar* *Persentase usia pr 15 - 59 tahun yang beresiko PTM* *Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat*														
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				600 Orang	850.500.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		439.619.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				226 Orang	728.100.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				9 Dokumen	1.697.006.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		829.968.700,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	1.450.085.100,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.428.861.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	38.108.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		27.563.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	50.156.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		53.842.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	195.517.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		210.541.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	1.431.318.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.432.687.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	135.808.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		83.045.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	124.090.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		138.118.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				145 Orang	154.170.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		70.379.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	50.150.237.688,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		58.896.857.030,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	259.987.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		121.350.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				5 Dokumen	201.568.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		722.299.523,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				7 Dokumen	785.880.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.093.341.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				11 Unit	39.420.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	79.740.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		34.221.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	26.292.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		25.202.760,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	38.520.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	328.379.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	38.520.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		328.379.700,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat]	**Angka Kematian Ibu (AKI)** **Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	**70** **9.1:9.1**	**13.5:13.5** **177**	**11.9:11.9** **122**	**109** **11.50:11.50**	**60.515.120.148,00**	-	-	-	-	-	-	**71.153.054.513,00**	-
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	436.727.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	385.267.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				11 Unit	40.020.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				38 Unit	263.797.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		283.906.700,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				36 Unit	132.910.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		101.360.600,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**0 % 78 Persen 100 % 71,58 % 50 persen 50 %**	**210.734.000,00**							**197.679.020,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan]	**Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar**	**58 83.58 94**	**68.75 88.33 97**	**68.75 88.33 97**	**50 71.58 90**	**210.734.000,00**	-	-	-	-	-	-	**197.679.020,00**	-
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar*	-			50 %	82.304.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	157.877.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				23097.30885 Orang	82.304.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		123.768.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				273 Orang	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		34.109.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar* *Akreditasi layanan Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi standar pelatihan* *Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi*	-			0 % 0 Klasifikasi 100 %	128.430.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	39.801.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				11 Dokumen	128.430.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		39.801.300,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**100 persen 100 % 100 Persen**	**234.720.000,00**							**154.129.800,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**234.720.000,00**	-	-	-	-	-	-	**154.129.800,00**	-
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatn (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan* *Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan* *Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan*	-			100 % 100 % 100 %	128.148.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	154.129.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				44 Sarana	128.148.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		154.129.800,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**234.720.000,00**	-	-	-	-	-	-	**154.129.800,00**	-
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	106.572.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				44 Sarana	106.572.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**773.069.000,00**							**910.523.900,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**773.069.000,00**	-	-	-	-	-	-	**910.523.900,00**	-
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	363.958.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	703.354.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				3 Dokumen	363.958.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		703.354.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	194.385.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	126.335.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	194.385.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		126.335.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	214.726.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	80.834.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				3 Dokumen	214.726.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		80.834.600,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI PELATIHAN KESEHATAN						**1.889.831.652,00**							**2.180.045.617,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.889.831.652,00**							**2.180.045.617,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.889.831.652,00**							**2.180.045.617,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**1.368.789.602,00**							**1.505.668.562,20**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**50** **90** **91.5**	**16** **80** **88.4**	**25** **80** **89**	**30** **80** **89.5**	**1.368.789.602,00**	-	-	-	-	-	-	**1.505.668.562,20**	-
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	220.560.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	242.616.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	220.560.000,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		242.616.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	164.782.082,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	181.260.290,20	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.402.315,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		31.242.546,50	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.034.900,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		13.238.390,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	21.536.867,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		23.690.553,70	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	102.808.000,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		113.088.800,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.230.900,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	62.953.990,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	57.230.900,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		62.953.990,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	416.940.320,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	458.634.352,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.700.000,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		2.970.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	388.200.000,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		427.020.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	26.040.320,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		28.644.352,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	509.276.300,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	560.203.930,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	83.240.000,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		91.564.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	271.920.000,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		299.112.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	154.116.300,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		169.527.930,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**-**	**521.042.050,00**							**674.377.055,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**521.042.050,00**	-	-	-	-	-	-	**674.377.055,00**	-
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	521.042.050,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	674.377.055,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				900 Orang	521.042.050,00	Kab. Muaro Jambi, Jambi Luar Kota, Pijoan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		674.377.055,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						**6.619.698.420,00**							**8.493.515.977,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.619.698.420,00**							**8.493.515.977,10**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.619.698.420,00**							**8.493.515.977,10**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**3.366.515.000,00**							**3.045.066.613,60**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.366.515.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.045.066.613,60**	-
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	319.800.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	155.100.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	319.800.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		155.100.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	289.180.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	227.672.137,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.400.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		8.802.827,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.800.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		41.063.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.600.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		22.000.110,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	197.380.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		155.806.200,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	204.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	48.161.300,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	204.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		48.161.300,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.366.515.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.045.066.613,60**	-
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	442.620.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	414.695.386,60	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	385.020.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		381.040.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57.600.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		33.655.386,60	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	210.915.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	109.437.790,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	112.440.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		50.501.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	98.475.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		58.936.790,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.900.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	2.090.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				7 Unit Kerja	1.900.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN DARI BLUD	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		2.090.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**3.253.183.420,00**							**5.448.449.363,50**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.040.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	4.687.018.600,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	2.040.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		4.687.018.600,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.213.183.420,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	761.430.763,50	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1.213.183.420,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		761.430.763,50	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		RSUD RD. MATTAHER						**392.238.824.842,00**							**412.584.485.819,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**369.355.095.202,00**							**388.553.671.319,10**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**369.355.095.202,00**							**388.553.671.319,10**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**299.575.830.059,00**							**315.939.411.778,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70.00** **73.25** **87.86**	**12.15** **70.75** **86.36**	**15.00** **71.00** **86.50**	**30.00** **71.25** **86.66**	**299.575.830.059,00**	-	-	-	-	-	-	**315.939.411.778,20**	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	263.508.291,00			-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	388.500.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	149.981.441,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		157.500.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	52.550.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		126.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	41.826.850,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		52.500.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	19.150.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		52.500.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	134.337.463.167,00			-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	141.444.400.522,95	RSUD RD. MATTAHER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				960 Orang/ Bulan	133.808.953.167,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		140.499.400.522,95	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	528.510.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		945.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.368.197.161,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.437.187.500,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	568.198.161,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		597.187.500,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				232 Orang	799.999.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		840.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.046.300.540,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.149.323.755,25	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	700.001.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		735.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.146.312.540,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.204.323.755,25	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.997.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		105.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	99.990.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		105.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.560.360.900,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.520.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	399.522.900,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		420.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.160.838.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.050.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.050.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	160.000.000.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	168.000.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	160.000.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		168.000.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**69.779.265.143,00**							**72.614.259.540,90**	
		[Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat]	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah**	**92.30**	**53.84**	**53.84**	**61.53**	**69.779.265.143,00**	-	-	-	-	-	-	**72.614.259.540,90**	-
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	68.133.108.768,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	70.712.373.540,90	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				50 Unit	2.999.770.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		3.150.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				155 Unit	24.749.606.772,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		24.794.561.040,90	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	16.989.820.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		17.850.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	23.393.911.596,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		24.917.812.500,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	660.254.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	863.009.437,50	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	239.654.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		255.256.312,50	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	420.600.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		607.753.125,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	699.937.175,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	735.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	699.937.175,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		735.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	285.965.200,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	303.876.562,50	RSUD RD. MATTAHER
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	285.965.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		303.876.562,50	RSUD RD. MATTAHER
	X	**NON URUSAN**						**22.883.729.640,00**							**24.030.814.500,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**22.883.729.640,00**							**24.030.814.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**22.883.729.640,00**							**24.030.814.500,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.883.729.640,00**	-	-	-	-	-	-	**24.030.814.500,00**	-
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	18.497.264.640,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	19.425.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.450.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.497.264.640,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.975.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.386.465.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	4.605.814.500,00	RSUD RD. MATTAHER
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				58 Unit	886.490.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		930.814.500,00	RSUD RD. MATTAHER
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2.000.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.100.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	1.499.975.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.575.000.000,00	RSUD RD. MATTAHER
		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR						**100.162.800.537,00**							**106.750.214.397,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.162.800.537,00**							**106.750.214.397,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**100.162.800.537,00**							**106.750.214.397,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**BB Predikat BB Nilai**	**75.960.826.875,00**							**81.735.396.864,00**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72** **88** **92**	**70** **84** **90**	**71** **85** **90**	**71** **86** **90**	**75.960.826.875,00**	-	-	-	-	-	-	**81.735.396.864,00**	-
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan Keuangan Perangkat Daerah* *Persentase kegiatan Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 % 100 %	51.057.509.187,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat	-	56.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3400 Orang/ Bulan	51.057.509.187,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		56.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana* *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*	-			98 % 98 %	5.786.383.228,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat	-	6.402.585.966,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.234.260.028,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		1.357.630.446,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4.552.123.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		5.044.955.520,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persentase Terpeliharan ya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 % 95 %	2.116.934.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat	-	2.332.810.898,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.116.934.460,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		2.332.810.898,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap RSJ* *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ* *Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	-			86 % 86 % 86 %	17.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat	-	17.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	17.000.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		17.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**86 Nilai** **87 Nilai**	**24.201.973.662,00**							**25.014.817.533,00**	
		[Terpenuhinya Upaya kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat]	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah**	**92.30**	**0**	**53.84**	**61.53**	**24.201.973.662,00**	-	-	-	-	-	-	**25.014.817.533,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi*	-			95 % 95 %	21.941.593.662,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat	-	22.528.399.533,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	10.002.824.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		11.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				15 Unit	150.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		165.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	11.788.769.262,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		11.363.399.533,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi* *Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi*	-			95 % 95 %	2.260.380.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat	-	2.486.418.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				4 Dokumen	2.260.380.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	Pegawai dan masyarakat		2.486.418.000,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR
		DINAS PEKERJAAN UMUM						**513.097.921.177,00**							**1.176.605.954.381,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**513.097.921.177,00**							**1.176.605.954.381,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**513.097.921.177,00**							**1.160.955.954.381,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**44.678.619.617,00**							**57.488.974.381,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.678.619.617,00**	-	-	-	-	-	-	**57.488.974.381,00**	-
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.923.350.950,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.876.169.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	839.904.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.112.398.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9 Dokumen	136.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		198.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9 Dokumen	116.766.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		235.789.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	179.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		240.989.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	127.814.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		240.989.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	184.223.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		423.752.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	338.407.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		423.752.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	31.312.059.740,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	36.911.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ Bulan	30.077.002.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		35.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	953.445.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.385.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	281.611.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		125.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	560.144.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	825.742.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	196.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		350.207.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	363.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		475.535.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	356.364.900,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.751.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		250.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	356.364.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.366.452.600,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	3.757.129.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	52.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		273.028.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31.461.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		987.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	696.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.287.330.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	117.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		225.983.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	367.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		857.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		125.988.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.128.731.010,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.279.255.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	944.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	184.271.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		200.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		538.755.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.332.826.465,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	5.297.004.381,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		55.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.689.022.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.858.004.381,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	118.809.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		258.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.521.395.121,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.698.689.952,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	3.791.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	1.631.289.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.661.455.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	94.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		585.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	972.550.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.545.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**-**	**48.266.428.360,00**							**166.816.980.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.458.031.006,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	81.016.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0005	Pembangunan Bendungan														
			Jumlah Bendungan yang Dibangun				0 Bendungan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	3.453.305.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)														
			Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				5 Lembaga	1.721.793.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		416.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	5.993.449.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	472.722.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi														
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi														
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	564.870.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				10 Titik	985.730.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung														
			Jumlah Embung yang dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0134	Rehabilitasi Embung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	462.921.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung														
			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara				5 Unit	2.803.236.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.808.397.354,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	85.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				0 Bendung	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,5 KM	10.648.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				0 Bendung	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				1 KM	17.011.990.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,8 KM	833.220.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,7 KM	1.761.086.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				13 Dokumen	1.553.976.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**-**	**1.345.392.400,00**							**32.500.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	1.345.392.400,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	32.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2 Kabupaten/ Kota	1.345.392.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Liter/Detik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Kabupaten/ Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**-**	**4.368.108.400,00**							**400.000.000,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	4.368.108.400,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				2 Kabupaten/ Kota	3.368.108.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				0 Ton/hari	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**-**	**1.346.983.600,00**							**3.400.000.000,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	1.346.983.600,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				0 M³/Hari	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				14 Dokumen	1.346.983.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 kabupaten/ kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**-**	**5.817.383.800,00**							**76.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	5.817.383.800,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	76.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				8 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				5 Dokumen	817.383.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**					**-**	**5.755.377.600,00**							**5.000.000.000,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	5.755.377.600,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07.1.01.0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi yang Disediakan				0 Unit	377.688.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				0 Liter/Detik	5.377.688.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07.1.01.0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				2 Ton/hari	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07.1.01.0041	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				0 M³/Hari	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**-**	**107.893.127.200,00**							**25.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	107.893.127.200,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	25.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara														
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				0 Rumah Negara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				0 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara														
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				0 Bangunan Gedung Negara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				0 Bangunan Gedung	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				15 Dokumen	107.893.127.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**-**	**428.203.600,00**							**27.000.000.000,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	428.203.600,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	27.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				0 kabupaten/ kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				11 Kawasan	428.203.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**1 % 85,24 %**	**286.556.493.900,00**							**749.300.000.000,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap*	-			85,24 %	286.556.493.900,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	749.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	107.925.207.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		200.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				13 Dokumen	280.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		19.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	1.667.767.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				10 Dokumen	9.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				3 KM	18.210.285.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		75.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				3 KM	15.600.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		90.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				1,032,844 KM	4.506.840.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				35 Meter	27.388.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0055	Pembangunan Flyover														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Flyover yang Dibangun				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala				6 KM	20.518.736.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				287 Meter	1.299.737.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	89.147.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				4 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**-**	**3.965.058.812,00**							**11.850.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	2.226.970.835,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	6.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.730.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				120 Orang	1.661.958.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				75 Lembaga	397.601.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				40 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				3 Lembaga	167.411.145,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	1.011.372.860,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	247.976.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	154.665.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	523.754.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Orang	84.976.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	726.715.117,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				5 Paket Pekerjaan	281.074.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				5 Bangunan Konstruksi	131.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				2 Dokumen	314.094.145,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**-**	**2.676.743.888,00**							**4.900.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-			-	685.191.744,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	481.805.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				300 Orang	203.386.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-			-	411.565.972,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	194.789.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	216.776.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	867.183.336,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	434.578.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	432.604.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	712.802.836,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	342.373.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	132.689.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	152.849.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal														
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	84.890.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**0,00**							**15.650.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**-**	**0,00**							**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				0 Unit Rumah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**-**	**0,00**							**15.200.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	15.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.01.0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				0 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**0,00**							**0,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**					**-**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**					**-**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.10.05.1.01.0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN						**26.976.976.535,00**							**43.574.978.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.976.976.535,00**							**43.574.978.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**26.976.976.535,00**							**43.574.978.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**22.515.583.810,00**							**16.364.399.000,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.696.080.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.136.421.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1.696.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.136.421.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.140.467.860,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	4.255.223.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		51.726.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.990.467.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.787.954.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		58.793.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		356.750.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.394.000.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	4.931.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	14.394.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.431.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.500.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	693.867.450,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.094.535.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		9.317.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	167.317.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		154.695.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	526.549.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		930.523.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.591.168.500,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	3.947.220.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	87.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.529.494.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				54 Unit	1.503.668.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		417.726.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**-**	**4.461.392.725,00**							**27.210.579.000,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	4.461.392.725,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	27.210.579.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				400 KM	4.461.392.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		27.210.579.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						**2.061.849.755,00**							**5.255.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.061.849.755,00**							**5.255.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.061.849.755,00**							**5.255.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**2.061.849.755,00**							**5.255.000.000,00**	
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	77.582.300,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	550.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	77.582.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		550.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	221.246.425,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	305.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	74.327.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		90.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	82.003.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		125.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	64.915.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		90.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	304.299.750,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.800.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	304.299.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.800.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.458.721.280,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.600.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	1.458.721.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		2.600.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**45.596.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39.596.400.000,00**							**0,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**39.596.400.000,00**							**0,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**9.532.202.998,00**							**0,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	767.213.300,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	199.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	81.764.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	70.923.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	105.775.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	109.094.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.627.138.367,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	2.527.138.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.964.765.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	1.964.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	351.348.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	351.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	653.522.500,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	50.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	30.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	233.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	150.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.109.869.600,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	543.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	566.394.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	849.938.231,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	499.938.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.208.408.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	201.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1.006.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**-**	**2.540.827.500,00**							**0,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	248.790.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				0 Dokumen	248.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	1.047.750.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				0 Orang	1.047.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	1.244.287.500,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				0 Unit Rumah	725.238.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun				0 Unit Rumah	519.049.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				0 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				0 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**-**	**22.762.978.215,00**							**0,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	1.739.846.455,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				0 Dokumen	605.846.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				0 Sistem Informasi	1.134.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	21.023.131.760,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	14.835.384.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				0 Hektar	6.187.747.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**-**	**4.660.385.282,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	4.660.385.282,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				0 Dokumen	340.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				0 Laporan	150.565.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														
			Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				0 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				0 Lokasi	4.169.794.377,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**-**	**100.006.005,00**							**0,00**	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-	-			-	100.006.005,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				0 Laporan	100.006.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**6.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**					**-**	**6.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	6.000.000.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan				0 Dokumen	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**					**-**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**27.130.177.407,00**							**32.509.354.402,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.130.177.407,00**							**32.509.354.402,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**27.130.177.407,00**							**32.509.354.402,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**23.023.462.834,00**							**26.361.954.402,00**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**89** **97.00** **98** **A**	**87** **96.4** **97** **B** **BB**	**88.31** **96.4** **97** **BB**	**88.45** **96.4** **98** **BB**	**23.023.462.834,00**	-	-	-	-	-	-	**26.361.954.402,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	92.364.080,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	187.325.050,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	19.594.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		96.176.850,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	72.769.580,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		91.148.200,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	22.232.318.167,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	24.457.037.983,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4564 Orang/ Bulan	22.161.998.167,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		24.378.197.983,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	70.320.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		78.840.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.500.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	177.815.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				163 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		117.975.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	5.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		59.840.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	254.775.765,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	596.307.640,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.399.420,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		29.344.200,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.402.130,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		27.176.040,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.879.968,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.606.900,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	223.094.247,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		469.180.500,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	188.996.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		60.292.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		128.704.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	219.376.013,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	254.071.079,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	91.344.211,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		92.500.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128.031.802,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		161.571.079,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	219.128.809,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	500.401.650,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				33 Unit	161.912.809,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		328.758.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	5.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		49.243.650,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	51.816.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		122.400.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**4.032.584.573,00**							**5.237.400.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	3.951.716.473,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	4.644.900.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				7 Dokumen	11.380.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah]	**Indeks Ketenteraman dan Ketertiban** **Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas**	**80** **81**	**0**	**0**	**35** **72**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				1 Dokumen	50.789.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		90.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	47.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		65.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				1 laporan	3.842.047.473,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.304.900.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				30 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-			-	80.868.100,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	227.500.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	80.868.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		50.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		17.500.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah]	**Indeks Ketenteraman dan Ketertiban** **Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas**	**80** **81**	**0**	**0**	**35** **72**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah]	**Indeks Ketenteraman dan Ketertiban** **Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas**	**80** **81**	**0**	**0**	**35** **72**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada														
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	365.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		125.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah]	**Indeks Ketenteraman dan Ketertiban** **Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas**	**80** **81**	**0**	**0**	**35** **72**	**4.032.584.573,00**	-	-	-	-	-	-	**5.237.400.000,00**	-
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		45.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**-**	**74.130.000,00**							**910.000.000,00**	
		[Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran]	**Indeks Penyelenggaraan Kebakaran**	**80**	**0**	**0**	**60**	**74.130.000,00**	-	-	-	-	-	-	**910.000.000,00**	-
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-			-	74.130.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	910.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.130.000,00**	-	-	-	-	-	-	**910.000.000,00**	-
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran]	**Indeks Penyelenggaraan Kebakaran**	**80**	**0**	**0**	**60**	**74.130.000,00**	-	-	-	-	-	-	**910.000.000,00**	-
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				30 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		30.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		50.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		45.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		45.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi				11 Kabupaten/Kota	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		75.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0028	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.130.000,00**	-	-	-	-	-	-	**910.000.000,00**	-
	1.05.04.1.01.0030	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		50.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran]	**Indeks Penyelenggaraan Kebakaran**	**80**	**0**	**0**	**60**	**74.130.000,00**	-	-	-	-	-	-	**910.000.000,00**	-
	1.05.04.1.01.0033	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0034	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota				11 Kabupaten/Kota	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0035	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi														
			Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi				1 Dokumen	74.130.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		45.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0005	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**8.484.602.638,00**							**14.625.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.484.602.638,00**							**14.625.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.484.602.638,00**							**14.625.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**72 Angka** **84 Angka**	**6.112.018.310,00**							**8.255.000.000,00**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80** **90**	**70** **84**	**70** **84**	**72** **85**	**6.112.018.310,00**	-	-	-	-	-	-	**8.255.000.000,00**	-
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			72 Angka 100 Persen	326.286.474,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	326.286.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	4.282.626.484,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	5.280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ Bulan	4.071.563.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		5.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	211.063.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	47.447.500,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	30.647.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	416.557.900,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	820.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	119.736.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	199.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*	-			100 Persen	539.729.952,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	715.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	507.853.558,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	23.805.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.070.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	499.370.000,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	499.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**136.14 Angka**	**2.372.584.328,00**							**6.370.000.000,00**	
		[Outcome1]	**Indeks Resiko Bencana**	**134.14**	**138.02**	**138.02**	**136.14**	**2.372.584.328,00**	-	-	-	-	-	-	**6.370.000.000,00**	-
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Persentase Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi*	-			100 Persen	80.000.000,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	-			100 Persen	524.715.182,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	2.370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				6 Kawasan	204.363.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.372.584.328,00**	-	-	-	-	-	-	**6.370.000.000,00**	-
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				1 Dokumen	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Outcome1]	**Indeks Resiko Bencana**	**134.14**	**138.02**	**138.02**	**136.14**	**2.372.584.328,00**	-	-	-	-	-	-	**6.370.000.000,00**	-
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				100 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	44.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				35 Orang	84.243.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Keluarga	46.554.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				160 Orang	41.545.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	-			100 Persen	1.386.112.340,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	2.450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				531 Orang	269.137.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	1.056.338.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	60.636.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.372.584.328,00**	-	-	-	-	-	-	**6.370.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana*	-			100 Persen	381.756.806,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat	-	1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				2 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi				10 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				25 Orang	140.047.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Outcome1]	**Indeks Resiko Bencana**	**134.14**	**138.02**	**138.02**	**136.14**	**2.372.584.328,00**	-	-	-	-	-	-	**6.370.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				12 Dokumen	97.209.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				10 kabupaten/kota	144.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemerintah, Media, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi dan Masyarakat		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**29.260.596.204,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.008.256.264,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**29.008.256.264,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**20.008.008.623,00**							**0,00**	
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	330.625.100,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				52 Laporan	330.625.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				24 Substansi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.802.928.096,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	16.575.207.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	227.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Indeks Kepuasan Masyarakat]	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**A**	**B**	**B**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	408.842.075,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.886.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	38.849.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.051.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Indeks Kepuasan Masyarakat]	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**A**	**B**	**B**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	330.054.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	471.615.000,00			-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	471.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.445.168.352,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD**	**A**	**A**	**A**	**A**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	723.649.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	721.519.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	530.830.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	478.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**20.008.008.623,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	11.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	40.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**-**	**638.754.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	**Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos**	**A**	**B**	**B**	**B**	**638.754.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	13.170.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50 Dokumen	13.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	625.584.500,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				579 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				5 Lembaga	30.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan				5 Lembaga	57.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				594 Orang	525.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar				1 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan														
			Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan				10 Badan Usaha	11.795.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi				5 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**-**	**246.987.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan]	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi**	**98**	**96.6**	**96.6**	**97.5**	**246.987.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-			-	246.987.200,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				650 Orang	246.987.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**-**	**5.720.793.807,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial** **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial**	**100** **85**	**100** **85**	**100** **85**	**100** **85**	**5.720.793.807,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	2.842.109.565,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				177 Orang	1.807.491.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				177 Orang	133.514.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				177 Orang	721.102.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				177 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				177 Orang	9.467.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				177 Orang	74.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				177 Orang	14.856.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				177 Orang	24.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				177 Orang	18.743.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.				11 Kabupaten/Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				177 Orang	660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				4 orang	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi				10 orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	1.016.585.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				30 Orang	14.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	80.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				30 Orang	338.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	4.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	40.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	51.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				30 Orang	129.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				30 Orang	13.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				30 Orang	12.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	322.473.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				4 Dokumen	3.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				4 Orang	2.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)														
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				30 Orang	1.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				30 Orang	1.683.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.231.867.135,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				72 Orang	789.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				72 Orang	20.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				72 Orang	172.271.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				72 Orang	72.919.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				72 Orang	72.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				72 Orang	60.926.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				72 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				12 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				72 Orang	1.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				72 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	12.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-			-	231.666.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				9 Orang	106.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				9 Orang	14.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				9 Orang	76.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				9 Orang	3.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				9 Orang	6.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				9 Orang	6.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				9 Orang	2.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				9 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				9 Orang	3.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				4 Dokumen	1.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				9 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.04.0017	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi				4 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-			-	398.566.107,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				9 Orang	106.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				9 Orang	11.580.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				9 Orang	63.001.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				9 Orang	3.755.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				9 Orang	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				9 Orang	8.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				9 Orang	3.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				9 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyandang Masalah *Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal*				9 Orang	11.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS														
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi				50 Orang	87.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah														
			Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0018	Pemulasaraan														
			Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi				4 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0019	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**-**	**1.771.257.150,00**							**0,00**	
		[Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.771.257.150,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-			-	44.067.570,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				8 Orang	44.067.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				12 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	1.727.189.580,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				130 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				1130 Orang	1.452.391.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin				11 Kab/Kota	98.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial														
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota				1 Orang	175.874.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**-**	**480.194.836,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM**	**97.00**	**96.4**	**96.4**	**96.4**	**480.194.836,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			-	480.194.836,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1100 Orang	382.763.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				250 Orang	16.489.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				250 Orang	14.843.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				500 Orang	53.098.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				2 Orang	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda														
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai				50 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana														
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0020	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial														
			Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial				1 Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)														
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0023	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana														
			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi				1 Desa/Kelurahan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**-**	**142.260.148,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	**Persentase pewujudan Nilai nilai Kepahlawanan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**142.260.148,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	142.260.148,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				4 Dokumen	37.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	50.520.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				12 Laporan	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0004	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0005	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**252.339.940,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**252.339.940,00**							**0,00**	
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**-**	**63.852.040,00**							**0,00**	
		[Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk]	**Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk**	**100**	**100**	**100**	**100**	**63.852.040,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	63.852.040,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	63.852.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**-**	**58.626.000,00**							**0,00**	
		[Outcome1]	**Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil**	**100**	**98**	**98**	**99**	**58.626.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	58.626.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	58.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**-**	**124.061.900,00**							**0,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	40.652.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				12 Laporan	40.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	83.409.900,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	83.409.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**-**	**5.800.000,00**							**0,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-	-			-	5.800.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				2 Dokumen	5.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**21.502.481.738,00**							**26.482.451.741,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.215.481.738,00**							**25.942.451.741,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**21.215.481.738,00**							**25.942.451.741,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**20.061.318.908,00**							**22.236.139.247,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.061.318.908,00**	-	-	-	-	-	-	**22.236.139.247,00**	-
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	146.710.800,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	249.999.732,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	67.931.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		99.999.732,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	78.779.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.588.387.859,05			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	20.629.239.515,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ Bulan	18.588.387.859,05	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.629.239.515,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.800.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 tahun Orang	8.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	209.348.603,95			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	446.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.409.204,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	49.064.999,95	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		19.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	135.874.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	28.724.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket Unit	28.724.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	686.243.045,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	445.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	367.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 tahun/ Laporan	318.858.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	393.104.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 tahun / Unit	241.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 tahun/ Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 tahun / Unit	146.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		370.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**					**100 Persen**	**63.288.200,00**							**100.000.000,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Tersusun Dokumen RTKD*	-			100 Persen	63.288.200,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				22 Orang	63.288.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**5,40 %**	**196.999.860,00**							**1.350.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan koordinasi lintas lembaga*	-			Kegiatan	145.323.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				0 Orang	145.323.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja*	-			1 Kegiatan	51.676.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	51.676.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**30.50 Persen**	**371.999.770,00**							**983.029.194,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelayanan layanan antar kerja*	-			1 Kegiatan	371.999.770,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	983.029.194,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				5000 Orang	208.952.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		323.860.830,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	136.046.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		584.168.364,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				50 Orang	27.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**-**	**175.940.000,00**							**458.190.000,00**	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	68.239.100,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	432.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				11 Lembaga	68.239.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		432.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	107.700.900,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	25.590.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 dokumen Surat Keputusan	107.700.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		25.590.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**					**-**	**345.935.000,00**							**815.093.300,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	345.935.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	815.093.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				4000 perusahaan Perusahaan	189.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		256.865.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				1 Laporan Kasus	70.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				4000 perusahaan Perusahaan	85.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		393.227.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**287.000.000,00**							**540.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**287.000.000,00**							**540.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**27.233.500,00**							**175.000.000,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	27.233.500,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	27.233.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**94.630.500,00**							**25.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	94.630.500,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	94.630.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**165.136.000,00**							**340.000.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-			-	165.136.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				45.08 Satuan Permukiman	165.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI						**3.360.000.000,00**							**3.360.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.360.000.000,00**							**3.360.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**3.360.000.000,00**							**3.360.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**-**	**3.360.000.000,00**							**3.360.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	3.360.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	3.360.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				320 Orang	3.360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		3.360.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK						**13.080.055.919,00**							**19.140.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.080.055.919,00**							**19.140.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.951.886.568,00**							**16.340.000.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**11.072.894.936,00**							**14.790.000.000,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.383.849,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	60.383.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.323.602.833,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	13.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	10.323.602.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		13.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.889.664,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	395.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.585.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.655.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.201.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	120.446.377,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	269.959.390,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	566.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	125.766.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	143.625.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	270.059.200,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	124.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	135.427.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**-**	**266.139.784,00**							**500.000.000,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	35.597.500,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	35.597.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	230.542.284,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				50 Orang	230.542.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**-**	**248.789.348,00**							**450.000.000,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	179.769.348,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100 % orang	179.769.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	69.020.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				50 Orang	69.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**-**	**32.422.500,00**							**150.000.000,00**	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	32.422.500,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek				50 Orang	32.422.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**-**	**331.640.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	101.500.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	230.140.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				1 Dokumen	230.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**891.088.586,00**							**2.200.000.000,00**	
1.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**					**-**	**36.914.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-			-	36.914.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	36.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**119.268.595,00**							**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-			-	119.268.595,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	29.216.495,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	90.052.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**-**	**734.905.991,00**							**1.600.000.000,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	734.905.991,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	29.216.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	705.689.491,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**237.080.765,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**-**	**74.400.760,00**							**200.000.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	74.400.760,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	74.400.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**-**	**162.680.005,00**							**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	162.680.005,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	14.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Daerah	148.167.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**13.943.459.358,00**							**18.398.393.182,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.943.459.358,00**							**18.398.393.182,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**13.943.459.358,00**							**18.398.393.182,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**100 Persen 100 %**	**10.940.972.782,00**							**13.727.523.031,00**	
		[Outcome1]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**80** **90.40** **A**	**15.4** **89.9** **B**	**15.4** **89.9** **B**	**40** **90** **B**	**10.940.972.782,00**	-	-	-	-	-	-	**13.727.523.031,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	127.294.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	368.706.645,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	27.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		79.757.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11 Dokumen	19.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		94.926.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	40.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		106.442.275,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	22.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		50.608.020,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	16.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		36.972.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Admintrasi Keuangan*	-			100 %	9.427.834.725,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	10.757.066.725,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ Bulan	9.367.703.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.649.224.613,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	13.013.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		37.890.487,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	37.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		42.780.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		11.603.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	5.461.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.568.125,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	16.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		16.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	207.292.057,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	649.452.391,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.312.309,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.615.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.396.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	22.827.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		65.623.082,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		12.144.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	176.414.757,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		551.977.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	64.109.900,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	164.298.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	64.109.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		164.298.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	938.955.100,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.307.555.520,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		28.819.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	156.785.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		176.858.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	16.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		126.623.625,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	758.047.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		975.254.395,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	168.287.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	463.883.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	143.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		392.161.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		18.064.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.940.972.782,00**	-	-	-	-	-	-	**13.727.523.031,00**	-
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	18.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		53.657.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**					**-**	**304.186.040,00**							**455.083.870,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	**Persentase Jumlah Cadangan Pangan**	**100**	**66.316**	**70.0**	**73.57**	**304.186.040,00**	-	-	-	-	-	-	**455.083.870,00**	-
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	304.186.040,00			-	-	-	-	455.083.870,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	41.698.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		108.630.092,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia				35 Unit	262.487.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		346.453.778,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**-**	**891.882.353,00**							**1.659.317.414,00**	
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**konsumsi beras (kg/kap/thn)** **konsumsi energi (kkal/kap/hr)** **konsumsi protein (gr/kap/hr** **Skor PPH**	**3.300** **64.50** **81.50** **94**	**2.012** **58.73** **78.3** **92.5**	**2.012** **58.73** **78.3** **92.5**	**2.100** **62.5** **83.5** **92.7**	**891.882.353,00**	-	-	-	-	-	-	**1.659.317.414,00**	-
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	679.961.488,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	1.063.671.912,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	252.361.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		371.664.693,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	43.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.127.220,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	249.893.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		352.946.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				3 Laporan	73.061.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.082.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				3 Unit	40.059.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		94.063.224,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	21.370.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		88.787.475,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	85.847.845,00			-	-	-	-	207.496.431,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	15.527.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.079.790,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				61 Ton	33.025.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		81.589.676,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	37.294.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		68.826.965,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-			-	126.073.020,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	388.149.071,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	71.286.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		158.928.821,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				3 Laporan	42.633.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		84.220.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				2 Laporan	12.153.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		145.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**-**	**1.595.129.368,00**							**2.056.229.371,00**	
		[OMeningkatnya penanganan kerawanan pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**1.50**	**0**	**0**	**3.5**	**1.595.129.368,00**	-	-	-	-	-	-	**2.056.229.371,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-			-	90.977.410,00			-	-	-	-	326.839.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				2 Dokumen	90.977.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		326.839.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.504.151.958,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	1.729.389.711,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 Dokumen	66.856.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		62.544.061,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				2 Dokumen	1.310.217.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.349.525.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2 Laporan	50.389.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.409.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				2 Dokumen	76.689.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171.911.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**-**	**211.288.815,00**							**500.239.496,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**	**84**	**86.42**	**86.42**	**80**	**211.288.815,00**	-	-	-	-	-	-	**500.239.496,00**	-
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	211.288.815,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	500.239.496,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				22 Sertifikat	37.947.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		74.986.278,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	49.116.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		116.839.885,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	44.786.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		115.210.769,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	30.563.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		91.447.425,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	48.874.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		101.755.139,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**19.626.415.261,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.626.415.261,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**19.626.415.261,00**							**0,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**86.42 poin BB predikat**	**17.725.860.374,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP**	**0** **86.00** **A**	**85.40** **86.22** **BB**	**84.00** **85.50** **BB**	**0** **85.60** **BB**	**17.725.860.374,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			25 laporan/dokumen	91.941.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	64.402.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	9.517.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12.021.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	15.802.145.829,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/ Bulan	15.797.145.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	100.882.835,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				155 Paket	100.882.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	239.662.738,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	11.073.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	31.140.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				550 Paket	30.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12.457.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.441.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.253.447.472,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	398.331.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	854.115.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Seluruh ASN		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	237.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	146.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	39.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**					**15 %**	**40.839.400,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.839.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi*	-			1 dokumen	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi														
			Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	**Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**20**	**75**	**100**	**15**	**40.839.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi*	-			1 dokumen	40.839.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota				11 Dokumen	40.839.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**78.01 poin 69.98 poin**	**884.031.287,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**Indeks Kualitas Air** **Indeks Kualitas Udara**	**70.58** **78.91**	**55.58** **92.98**	**69.78** **77.71**	**69.98** **78.01**	**884.031.287,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup*	-			2 kali	833.865.287,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				6 Lokasi	49.074.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				480 Dokumen	784.790.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			4 lokasi	50.166.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				12 Dokumen	25.077.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota				12 Kegiatan	25.088.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**-**	**0,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**23**	**0**	**0**	**7**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**20 %**	**87.984.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**	**24**	**0**	**0**	**20**	**87.984.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			12 dokumen	87.984.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				12 Dokumen	87.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**40 %**	**725.911.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi**	**20**	**70**	**75**	**40**	**725.911.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	-			70 usaha/kegiatan	725.911.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				20 Dokumen	665.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				11 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				70 Usaha/Kegiatan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**					**0 %**	**0,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH]	**Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**100**	**79**	**86**	**20**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	-			0 entitas	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	-			0 kelembagaan	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**20 %**	**14.357.200,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**20**	**0**	**0**	**20**	**14.357.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi*	-			4 kali	14.357.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				4 Dokumen	14.357.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**100 %**	**120.932.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	**100**	**120.932.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi*	-			13 Pengaduan	120.932.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				3 Perkara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				13 Pengaduan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				7 Sanksi	60.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**50 poin**	**26.500.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**52**	**0**	**0**	**50**	**26.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional*	-			524960 Ton	26.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				11 Dokumen	26.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Masyarakat, usaha/kegiatan, instansi pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**15.694.313.774,00**							**18.456.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.694.313.774,00**							**18.456.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**15.694.313.774,00**							**18.456.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**10.892.927.275,11**							**12.873.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.892.927.275,11**	-	-	-	-	-	-	**12.873.000.000,00**	-
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	202.637.170,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	161.302.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				0 Dokumen	41.335.170,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Predikat AKIP**	**BB**	**B**	**B**	**B**	**10.892.927.275,11**	-	-	-	-	-	-	**12.873.000.000,00**	-
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.696.838.477,71			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	9.120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	8.571.483.797,71	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	125.354.680,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.892.927.275,11**	-	-	-	-	-	-	**12.873.000.000,00**	-
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	115.705.690,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	110.645.690,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		115.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	5.060.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	750.447.276,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.228.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	26.413.242,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		37.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	300.874.203,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		370.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	39.540.736,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	151.886.095,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		201.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	81.991.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	149.742.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		420.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	553.865.390,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.090.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	553.865.390,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.090.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	289.645.271,40			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	335.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	73.680.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	207.522.712,40	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	8.442.559,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.788.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	231.348.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	16.040.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	36.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**-**	**4.404.666.498,89**							**5.048.000.000,00**	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-			-	175.436.200,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	405.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				0 Dokumen	73.544.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		185.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				0 Dokumen	101.892.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	330.120.717,50			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	330.120.717,50	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	522.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.				0 Orang	522.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	70.656.793,07			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				0 Laporan	70.656.793,07	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	2.275.342.069,72			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	2.483.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				0 Laporan	1.169.551.249,72	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Unit	1.105.790.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.203.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.031.110.718,60			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.075.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Laporan	1.031.110.718,60	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.075.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**-**	**396.720.000,00**							**535.000.000,00**	
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	-	-			-	294.960.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan	294.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	101.760.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	101.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**34.707.325.175,00**							**39.457.339.115,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**34.707.325.175,00**							**39.457.339.115,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**34.229.660.941,20**							**38.523.339.115,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**78 Nilai 77 Indeks**	**12.611.838.624,70**							**13.749.339.115,00**	
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**100.000** **A**	**97.9** **A** **BB**	**97.9** **A** **BB**	**98** **B** **BB**	**12.611.838.624,70**	-	-	-	-	-	-	**13.749.339.115,00**	-
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan* *Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD*	-			6 Dokumen 90 Persen	201.786.567,30			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	21.818.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	179.968.412,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN* *Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan*	-			14 Bulan 93 Persen	10.376.275.378,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	10.480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	10.017.921.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	355.354.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Bimtek/Diklat bagi ASN* *Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana*	-			30 Persen 100 %	137.591.200,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	137.591.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan Administrasi Umum OPD Persentase Administrasi umum yang terlaksana*	-			100 Persen 100 %	732.618.961,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.023.539.115,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	48.883.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		195.539.115,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	21.483.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	29.057.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		39.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	633.194.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		758.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang/peralatan kantor* *Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana*	-			90 Persen 100 %	440.957.124,40			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	583.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	65.219.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	375.737.964,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		385.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana* *Tersedianya Barang/peralatan kantor*	-			100 % 100 Persen	339.507.394,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	393.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		17.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.611.838.624,70**	-	-	-	-	-	-	**13.749.339.115,00**	-
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	322.707.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		376.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Predikat AKIP Perangkat Daerah]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**100.000** **A**	**97.9** **A** **BB**	**97.9** **A** **BB**	**98** **B** **BB**	**12.611.838.624,70**	-	-	-	-	-	-	**13.749.339.115,00**	-
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana* *Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah*	-			100 % 92 Persen	383.102.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	609.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				26 Unit	306.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		531.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	77.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		78.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**80 %** **80 %** **- PERSEN** **95 %** **75 PERSEN** **80 persen**	**14.643.632.257,00**							**17.004.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.643.632.257,00**	-	-	-	-	-	-	**17.004.000.000,00**	-
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Meningkatnya Kulalitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik* *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik*	-			95 % 98 Persen	14.643.632.257,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	17.004.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				120 Orang	143.309.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		229.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				12 Laporan	1.443.980.419,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.879.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				35 Komunitas	2.411.349.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		3.027.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	175.685.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				30 Rekomendasi	274.588.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		326.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				220 Media	10.194.719.052,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		11.283.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**- % 55 % 3.6 Indeks 90 Persen**	**6.974.190.059,50**							**7.770.000.000,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur* *Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur*	-			89 Persen 89 %	74.980.800,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	163.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				1 Dokumen	74.980.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		163.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan SPBE di Provinsi Jambi* *Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan SPBE di Provinsi Jambi*	-			85 Persen 85 %	6.899.209.259,50			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	7.607.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				11 kabupaten/kota	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	191.178.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		232.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				33 Perangkat Daerah	5.381.790.059,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.766.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				25 Aplikasi	573.876.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				12 Laporan	452.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		629.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**159.541.600,00**							**302.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**90 % 90 %**	**159.541.600,00**							**302.000.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah*	-			95 Persen 95 %	159.541.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	302.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				33 %	51.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		114.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				60 %	84.660.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		112.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				108 Orang	23.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		76.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**318.122.633,80**							**632.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**Level III indeks - INDEKS 55 PERSEN**	**318.122.633,80**							**632.000.000,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) dan Non Elektronik* *Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) dan Non Elektronik*	-			76 % 76 Persen	299.561.633,80			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	585.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	64.245.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		128.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				33 Perangkat Daerah	143.166.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		191.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	82.114.512,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		238.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.				2 Dokumen	10.035.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi* *Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi*	-			100 % 100 Persen	18.561.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	18.561.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**18.878.958.370,00**							**35.387.548.320,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.878.958.370,00**							**35.387.548.320,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**18.878.958.370,00**							**35.387.548.320,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**A (81) indeks**	**11.798.958.370,00**							**21.266.038.861,00**	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui penerapan SPBE berintegritas dengan pelayanan publik prima]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**95** **A** **BB**	**89** **BB**	**89** **BB**	**90** **A** **BB**	**11.798.958.370,00**	-	-	-	-	-	-	**21.266.038.861,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	151.027.404,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	305.944.375,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35.021.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		73.648.125,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	56.006.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		152.296.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	59.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan*	-			80 Orang 100 %	8.447.459.990,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	14.494.899.173,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	8.447.459.990,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		14.494.899.173,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	-			1 Laporan	141.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	390.864.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				135 Paket	96.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		138.399.625,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	45.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		252.465.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	554.181.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	1.285.125.325,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		76.043.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	94.599.010,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		304.824.886,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				550 Paket	36.400.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		53.171.064,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	25.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		149.691.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.450.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	358.732.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		684.393.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			100 %	119.800.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	1.374.393.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	54.670.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		304.175.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	65.130.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		1.070.218.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.798.958.370,00**	-	-	-	-	-	-	**21.266.038.861,00**	-
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.853.947.366,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	2.364.929.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.720,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		182.505.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui penerapan SPBE berintegritas dengan pelayanan publik prima]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**95** **A** **BB**	**89** **BB**	**89** **BB**	**90** **A** **BB**	**11.798.958.370,00**	-	-	-	-	-	-	**21.266.038.861,00**	-
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	387.165.046,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		743.762.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.798.958.370,00**	-	-	-	-	-	-	**21.266.038.861,00**	-
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		4.866.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui penerapan SPBE berintegritas dengan pelayanan publik prima]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**95** **A** **BB**	**89** **BB**	**89** **BB**	**90** **A** **BB**	**11.798.958.370,00**	-	-	-	-	-	-	**21.266.038.861,00**	-
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.460.781.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		1.433.795.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	530.942.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN	-	1.049.881.863,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	400.624.100,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		675.228.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	30.130.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		168.823.209,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100.188.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN		205.829.904,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**					**29.40 %**	**110.000.000,00**							**1.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam]	**Persentase akumulasi KSP/USP yang telah mengajukan izin Usaha simpan pinjam** **Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**10** **56**	**10** **23**	**10** **23**	**10** **30**	**110.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	110.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi	-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				20 Unit Usaha	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**23 %**	**200.000.000,00**							**828.244.459,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	**Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (Koperasi yang melaksanakan RAT)** **Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**10** **55**	**10** **19**	**10** **19**	**10** **32**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**828.244.459,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi	-	420.160.059,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				20 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi		420.160.059,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi lintas kabupaten / kota	-	408.084.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				25 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi lintas kabupaten / kota		408.084.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					**20 %**	**150.000.000,00**							**410.815.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Pengelolaan koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif** **Persentase KSP/USP Sehat dan Cukup Sehat**	**60** **7**	**1** **32**	**2** **32**	**3** **36**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**410.815.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	150.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi	-	410.815.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi		410.815.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**20 %**	**200.000.000,00**							**4.258.450.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan** **Persentase Pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi (Koperasi Binaan)**	**5** **7**	**1** **25**	**2** **25**	**3** **5**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.258.450.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi, UKM	-	4.258.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				90 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi, UKM		4.258.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**25 %**	**550.000.000,00**							**693.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produktivitas Koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas** **Persentase Pertumbuhan koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha koperasi (Koperasi Binaan)**	**40** **7**	**1** **19**	**19** **2**	**22** **3**	**550.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**693.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	550.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi	-	693.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				20 Unit Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				20 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				20 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Koperasi		118.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**30 %**	**5.595.000.000,00**							**6.995.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri]	**Persentase akumulasi Peningkatan UMKM Binaan Provinsi** **Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal** **Pertumbuhan Wirausaha**	**7** **85**	**1** **60**	**2** **60**	**3** **65**	**5.595.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.995.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan*	-			100 %	5.595.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	UMKM	-	6.995.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan															
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1000 Unit Usaha	5.495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	UMKM		6.875.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.595.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.995.000.000,00**	-
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				100 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	UMKM		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**20 %**	**275.000.000,00**							**935.000.000,00**	
		[Meningkatnya Daya Saing UMKM]	**Persentase Usaha Kecil yang meningkat Omsetnya (UMKM Binaan)** **Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**	**32** **7**	**1** **14**	**14** **2**	**20** **3**	**275.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**935.000.000,00**	-
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Terfasilitasinya produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi*	-			100 Unit Usaha	275.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	UMKM	-	935.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	UMKM		935.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						**13.316.260.534,00**							**14.421.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.316.260.534,00**							**14.421.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**13.316.260.534,00**							**14.421.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**12.667.529.684,00**							**13.194.000.000,00**	
		[Peningkatan nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70** **90**	**70** **90**	**70** **90**	**70** **90**	**12.667.529.684,00**	-	-	-	-	-	-	**13.194.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			10 Dokumen	65.219.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	65.219.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Periode penyediaan administrasi keuangan*	-			12 Bulan	11.300.439.815,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	11.330.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	10.483.887.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		10.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	816.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		830.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai dan PTT DPMPTSP Provinsi Jambi*	-			110 Orang	120.163.485,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	68.339.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	51.823.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Periode penyediaan administrasi umum*	-			12 Bulan	456.011.785,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	459.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.057.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	272.441.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		290.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13.430.660,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	161.082.574,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.667.529.684,00**	-	-	-	-	-	-	**13.194.000.000,00**	-
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Periode pemeliharaan barang milik daerah*	-			44 Unit	30.146.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		[Peningkatan nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70** **90** **90**	**70** **90** **90**	**70** **90** **90**	**70** **90** **90**	**12.667.529.684,00**	-	-	-	-	-	-	**13.194.000.000,00**	-
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah*	-			12 Bulan	404.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	385.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	269.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		245.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Periode pemeliharaan barang milik daerah*	-			44 Unit	290.708.639,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT	-	445.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	222.558.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	18.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	PNS dan PTT		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					**undefined undefined**	**82.836.200,00**							**160.000.000,00**	
		[meningkatnya kemudahan berinvestasi]	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**2**	**2**	**2**	**2**	**82.836.200,00**	-	-	-	-	-	-	**160.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah dokumen peta potensi investasi*	-			1 Dokumen	82.836.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat	-	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	42.126.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	40.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					**undefined undefined**	**70.820.000,00**							**155.000.000,00**	
		[meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**2**	**2**	**2**	**2**	**70.820.000,00**	-	-	-	-	-	-	**155.000.000,00**	-
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah investor yang berinvestasi*	-			998 investor PMA & PMDN	70.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat	-	155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	70.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**undefined undefined**	**256.532.650,00**							**474.000.000,00**	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**256.532.650,00**	-	-	-	-	-	-	**474.000.000,00**	-
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*	-			500 Kegiatan Usaha	256.532.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat	-	474.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				120 Pelaku Usaha	85.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		158.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				110 Pelaku Usaha	86.876.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		158.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**256.532.650,00**	-	-	-	-	-	-	**474.000.000,00**	-
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	84.056.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		158.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**undefined undefined**	**238.542.000,00**							**438.000.000,00**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**5**	**5**	**5**	**5**	**238.542.000,00**	-	-	-	-	-	-	**438.000.000,00**	-
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Pelaku Usaha yang terselesaiakan permasalahannya*	-			20 Pelaku Usaha	238.542.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat	-	438.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan usaha	171.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan usaha	10.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	56.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan masyarakat		168.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						**65.953.522.373,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65.953.522.373,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**65.953.522.373,00**							**0,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**25.562.940.149,00**							**0,00**	
		[OUTCOME1]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**45** **88** **BB**	**1** **85.56** **BB**	**1** **85.56** **BB**	**25** **86.3** **BB**	**25.562.940.149,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	530.185.344,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	400.012.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	117.932.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.562.940.149,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.033.668.155,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	11.887.563.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	146.104.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	251.994.500,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	173.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	78.394.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	662.213.622,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	181.136.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	249.992.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.354.299.393,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	928.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	734.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	2.690.773.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.245.350.200,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.973.441.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.271.908.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.435.228.935,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				57 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				109 Unit	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.505.228.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**-**	**2.045.695.575,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan]	**Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda** **Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan**	**0.114** **0.29**	**0.092** **0.155**	**0.092** **0.155**	**0.093** **0.18**	**2.045.695.575,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.370.695.575,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				80 Orang	690.685.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				80 Persentase	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	265.676.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	89.333.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.045.695.575,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	675.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda														
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				100 Persentase	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				10 Organisasi	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**-**	**34.390.582.224,00**							**0,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	4.657.641.752,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				12 Unit	4.657.641.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-			-	24.532.940.472,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				110 Orang	5.032.940.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				5 Kegiatan	16.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	5.200.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				0 Pelatda	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				52 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**-**	**3.954.304.425,00**							**0,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	3.954.304.425,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				1 Laporan	3.954.304.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**29.569.520.011,00**							**44.060.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.539.520.011,00**							**37.390.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**24.539.520.011,00**							**37.390.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**19.634.286.191,00**							**24.480.000.000,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				6 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.637.902.888,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	15.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	14.637.902.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	154.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	629.092.112,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.005.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.929.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	89.682.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	57.479.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	28.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	57.232.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	354.888.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	312.611.750,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	184.728.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	127.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.377.555.541,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	663.425.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.714.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.023.123.900,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	220.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	726.083.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	76.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**-**	**3.132.856.616,00**							**3.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.039.167.830,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				300 Orang	451.292.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				4 Objek	525.271.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	29.983.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Laporan	32.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	286.410.490,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				6 Objek	81.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	70.566.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	134.611.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.807.278.296,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1.807.278.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					**-**	**200.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	3.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				200 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				50 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				58 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					**-**	**350.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal *Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal*				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**-**	**1.122.377.204,00**							**1.650.000.000,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	553.552.730,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				75 Objek	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	303.552.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	568.824.474,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				1 Objek	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	468.824.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					**-**	**100.000.000,00**							**3.810.000.000,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	3.810.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				820 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		1.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				12 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		2.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.030.000.000,00**							**6.670.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**5.030.000.000,00**							**6.670.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**-**	**2.130.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				4 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-			-	1.380.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				6 Unit	1.080.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-			-	550.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				4 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				75 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi														
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				6 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**-**	**1.450.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-			-	1.450.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	1.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				6 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					**-**	**670.000.000,00**							**970.000.000,00**	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	670.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	970.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual				5 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif														
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**-**	**780.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-	-			-	430.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				75 Orang	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				150 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	350.000.000,00			-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-	-	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				150 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				5 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						**16.073.057.056,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.073.057.056,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**15.829.053.056,00**							**0,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**15.396.045.974,00**							**0,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	176.194.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	58.886.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	117.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.230.731.375,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/ Bulan	12.910.499.165,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	279.227.500,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	41.004.710,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	109.277.695,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				135 Paket	87.865.695,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	21.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	279.103.192,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.563.704,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.001.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.999.710,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5.207.778,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	194.331.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	141.738.850,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	141.738.850,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	502.623.362,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	364.997.248,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	137.626.114,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	956.377.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	415.567.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	35.810.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	462.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**-**	**388.006.432,00**							**0,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	266.000.432,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				81 Layanan	251.086.908,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1350 Eksemplar	7.699.872,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	7.213.652,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	122.006.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				32 Perpustakaan	122.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					**-**	**45.000.650,00**							**0,00**	
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-	-			-	45.000.650,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				0 Eksemplar	45.000.650,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**244.004.000,00**							**0,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**-**	**244.004.000,00**							**0,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	64.559.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				27 Arsip	25.559.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				231 Arsip	39.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	125.601.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				250 Arsip	125.601.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	53.844.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				350 Pengguna	6.840.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				1 Laporan	47.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**27.330.646.832,00**							**33.999.643.510,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**27.330.646.832,00**							**33.999.643.510,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**27.330.646.832,00**							**33.999.643.510,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**22.225.755.103,72**							**22.819.134.380,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	319.171.710,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	514.320.420,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	99.073.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		191.556.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	62.391.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		92.530.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	157.707.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		230.233.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.854.540.173,94			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	20.854.540.174,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				151 Orang/ Bulan	20.588.461.773,94	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.588.461.774,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	266.078.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		266.078.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	84.554.400,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	114.554.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	84.554.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		114.554.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	85.355.850,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	105.739.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	79.355.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		87.739.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	189.920.551,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	387.322.067,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	21.533.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.827.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		31.822.167,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	34.559.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		40.499.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.999.961,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	3.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		3.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	534.108.118,78			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	538.108.119,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	533.108.118,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		533.108.119,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	158.104.300,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	301.350.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				59 Unit	79.133.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		141.975.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	71.280.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		144.375.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	7.690.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**					**-**	**847.905.200,00**							**882.468.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	847.905.200,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	882.468.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				5715,13 Ha	643.727.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		667.620.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				60 Orang	204.178.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		214.848.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**-**	**1.820.804.908,28**							**3.998.079.980,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	1.133.275.500,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	1.215.381.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2500 Unit	1.133.275.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		1.215.381.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	444.129.300,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	481.369.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				150 Unit	444.129.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		481.369.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	243.400.108,28			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	2.301.328.780,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		2.022.056.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	243.400.108,28	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		279.272.280,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**-**	**1.467.155.100,00**							**2.564.802.500,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	135.112.400,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	157.108.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				2 Unit	135.112.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		157.108.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	1.332.042.700,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	2.407.693.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	273.382.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		327.693.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit	1.058.660.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		2.080.000.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**-**	**296.465.300,00**							**3.014.629.900,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	288.965.300,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	2.275.129.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	288.965.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		2.275.129.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	7.500.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	739.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		739.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**-**	**672.561.220,00**							**720.528.750,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	324.845.400,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	335.772.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				3 Dokumen	324.845.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		335.772.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	197.537.440,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	216.663.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	110.814.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		118.924.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	86.722.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		97.739.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.178.380,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	168.093.550,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				10 Unit Usaha	150.178.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		168.093.550,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN						**56.255.110.998,00**							**61.094.475.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**56.255.110.998,00**							**61.094.475.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**56.255.110.998,00**							**61.094.475.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**38.398.269.635,00**							**42.712.446.000,00**	
		[Predikat AKIP]	**Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**38.398.269.635,00**	-	-	-	-	-	-	**42.712.446.000,00**	-
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	503.662.604,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	935.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	271.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	232.662.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		385.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.398.269.635,00**	-	-	-	-	-	-	**42.712.446.000,00**	-
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	36.152.022.001,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	39.707.411.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				232 Orang/ Bulan	35.447.646.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		38.992.411.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	704.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		715.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	133.839.590,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	302.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	33.839.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		82.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.226.677.440,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.272.535.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	807.350.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		942.535.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	419.327.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		330.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	382.068.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	495.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				148 Unit	332.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**-**	**13.454.842.660,00**							**10.331.029.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	6.133.820.000,00			-	PP 1: Pem bangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjut an	-	-	3.025.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				11 Laporan	4.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pem bangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjut an	-		2.750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				3 Dokumen	1.833.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pem bangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjut an	-		275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	1.140.022.660,00			-	PP 1: Pem bangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjut an	-	-	1.861.029.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				150 Sertifikat	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		715.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				11.000 Batang	60.703.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				810 Ton	579.319.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjut	-		761.029.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	767.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	990.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				12 laporan	767.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		990.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				12 laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-	-			-	4.414.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	4.345.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				100 Ton	392.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		495.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				1065 Ekor	4.021.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		3.850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**-**	**2.204.655.350,00**							**3.188.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	2.204.655.350,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	3.188.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				7 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	2.026.721.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		2.838.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				12 Dokumen	91.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				12 Unit	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**-**	**1.097.343.353,00**							**1.925.000.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	391.222.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				12 Laporan	391.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	135.641.700,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				11 Laporan	135.641.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	447.343.353,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	825.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	447.343.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		825.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	-	-			-	123.136.300,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				7 Sertifikat	123.136.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**-**	**600.000.000,00**							**1.585.000.000,00**	
		[Pengendalian OPT dan Penangan DPI]	**Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura** **Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan** **Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT** **Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT**	**50**	**50**	**50**	**50**	**600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.585.000.000,00**	-
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-	-	1.585.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3088 Ha	457.507.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2318 Ha	70.492.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.585.000.000,00**	-
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		330.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		155.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**500.000.000,00**							**1.353.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**90**	**90**	**90**	**90**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.353.000.000,00**	-
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	114.473.600,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	330.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				25 Unit	27.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				120 Orang	86.749.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	230.890.800,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	748.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				3 Dokumen	117.341.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				40 Kelompok	113.549.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		528.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.353.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	154.635.600,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				11 Unit	86.749.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				11 Unit	67.886.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		DINAS PERKEBUNAN						**30.004.727.994,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**30.004.727.994,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**30.004.727.994,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**17.879.750.000,00**							**0,00**	
		[Peningkatan Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP**	**72** **90** **A**	**70.2** **84.65** **BB**	**71** **88** **BB**	**71** **88** **BB**	**17.879.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.950.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/ Bulan	14.500.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	158.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	108.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	571.250.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	170.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				44 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**-**	**3.278.520.500,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.278.520.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	195.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	2.833.520.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				185 Sertifikat	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				50000 Batang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				4 Laporan	1.533.520.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				2 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**-**	**3.227.942.890,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.227.942.890,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	3.227.942.890,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				60 Ha	1.327.942.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				15 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**-**	**2.530.000.000,00**							**0,00**	
		[Persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.530.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	2.530.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				75 Ha	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				60 Ha	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**					**-**	**100.000.000,00**							**0,00**	
		[Persentase Perizinan yang diselesaikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**2.988.514.604,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.988.514.604,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				46 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				2 Kelompok	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SAWIT	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	1.588.514.604,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				4 Unit	238.514.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				10 Unit	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
		DINAS KEHUTANAN						**52.781.239.983,00**							**45.378.205.339,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**52.781.239.983,00**							**45.378.205.339,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**52.781.239.983,00**							**45.378.205.339,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**49.483.404.264,00**							**44.401.805.339,00**	
		[Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70** **80** **87**	**25** **70** **86**	**70** **75** **86**	**70** **75** **87**	**49.483.404.264,00**	-	-	-	-	-	-	**44.401.805.339,00**	-
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	393.995.793,66			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	245.796.543,66	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	148.199.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	45.125.048.622,00			-	-	-	-	44.339.805.339,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	44.458.250.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.339.805.339,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	509.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	156.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.483.404.264,00**	-	-	-	-	-	-	**44.401.805.339,00**	-
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	433.727.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.184.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.792.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	249.495.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	12.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.879.380.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				170 Unit	1.879.380.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	974.072.148,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	508.279.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	464.663.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	627.180.000,34			-	-	-	-	62.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	557.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69.300.000,34	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		62.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**1.732.331.375,00**							**500.000.000,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	65.794.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				3 Dokumen	65.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	50.764.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				15 Dokumen	50.764.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	669.482.700,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	73.012.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	46.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	549.950.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	695.666.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	496.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				2000 Ha	199.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	179.590.175,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				9 Unit Managemen	179.590.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	71.034.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				2 Laporan	71.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**					**-**	**226.749.450,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya]	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**226.749.450,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	145.437.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				2 Laporan	145.437.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-			-	81.312.250,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				100 Ha	81.312.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**1.095.824.894,00**							**476.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan]	**Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal** **Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)**	**50** **60.00**	**26** **26,00%**	**26,00%** **38**	**44** **44,00%**	**1.095.824.894,00**	-	-	-	-	-	-	**476.400.000,00**	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	1.095.824.894,00			-	-	-	-	476.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				24 Kelompok	287.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				50 Orang	382.139.894,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Hektar	276.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		276.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**					**-**	**242.930.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)]	**Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk** **Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS**	**36** **36%**	**15,78%** **15.78**	**15,78%** **19.54**	**23,30%** **23.30**	**242.930.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	242.930.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	242.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KPHP KERINCI UNIT I						**663.293.994,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**663.293.994,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**663.293.994,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**120.284.488,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.284.488,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.284.488,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.010.124,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.404.364,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.750.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.120.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**373.902.506,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	47.127.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	47.127.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	211.308.256,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				200 Ha	118.781.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	92.527.256,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	115.466.750,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	66.126.750,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10 Ha	49.340.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**169.107.000,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	169.107.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	80.930.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	88.177.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP KERINCI UNIT I
		UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III						**1.654.174.370,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.654.174.370,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.654.174.370,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**430.036.420,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	113.891.420,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.781.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.509.100,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.400.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	90.201.320,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	316.145.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	296.145.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**759.583.350,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	37.480.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	37.480.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	175.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	175.000.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	0,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	507.103.350,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	220.843.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				1 Operasi	286.260.350,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**464.554.600,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	464.554.600,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				40 Kelompok	169.873.600,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				160 Orang	193.231.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Hektar	1.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	-		0,00	UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III
		UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI						**2.279.370.096,00**							**2.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.279.370.096,00**							**2.500.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**2.279.370.096,00**							**2.500.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**403.596.800,00**							**2.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.596.800,00			-	-	-	-	2.500.000,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	87.934.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	63.162.800,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	228.000.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**737.020.761,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	114.724.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	114.724.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	25.682.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	25.682.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	270.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	250.000.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	262.521.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				200 Ha	202.521.000,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	64.093.761,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	64.093.761,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				2 Unit Managemen	0,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**1.138.752.535,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	1.138.752.535,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Hektar	70.479.416,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	1.068.273.119,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
		UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN						**1.260.188.882,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.260.188.882,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.260.188.882,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**164.557.532,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	144.557.532,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.921.812,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.120,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	125.635.600,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**739.000.500,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	49.674.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	49.674.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	96.620.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	96.620.500,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	592.706.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	432.465.500,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				2000 Ha	160.240.500,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**356.630.850,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	356.630.850,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	86.729.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	170.000.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				4 Unit	99.901.850,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANGUN
		UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN						**765.447.115,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**765.447.115,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**765.447.115,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**190.510.615,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.510.615,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.466.870,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.459.145,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.800.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	62.784.600,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**413.080.500,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	30.545.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	30.545.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	26.946.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	26.946.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	150.518.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				2 Ha	130.318.500,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	20.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	205.071.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	84.451.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				20 Ha	120.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**161.856.000,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	161.856.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				11 Kelompok	24.062.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				35 Orang	6.582.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	29.582.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	101.630.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
		UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX						**912.827.528,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**912.827.528,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**912.827.528,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**122.576.448,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	102.576.448,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.394.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.514.948,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.400.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	87.267.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**542.861.980,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	17.940.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	17.940.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	20.880.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	20.880.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	95.477.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				150 Ha	95.477.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	408.564.480,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	271.822.980,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1000 Ha	136.741.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**247.389.100,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	247.389.100,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	108.483.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				10 Hektar	48.804.700,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				4 Unit	90.101.400,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
		UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X						**894.699.980,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**894.699.980,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**894.699.980,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**116.960.780,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	96.960.780,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.123.780,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	83.337.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**594.269.200,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	47.241.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	47.241.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	45.707.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	45.707.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	95.477.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				500 Ha	95.477.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	372.598.700,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	229.500.700,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				2000 Ha	143.098.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	33.245.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	33.245.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**183.470.000,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	183.470.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	88.862.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				50 Hektar	62.674.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	31.934.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
		UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII						**1.051.866.900,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.051.866.900,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.051.866.900,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**152.680.100,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	132.422.100,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.655.200,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.924.500,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110.842.400,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.258.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.258.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**572.659.900,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	38.810.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	38.810.000,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	96.620.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	96.620.500,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	310.664.400,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	178.459.000,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				20 Ha	132.205.400,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	76.565.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	76.565.000,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**326.526.900,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	326.526.900,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	141.930.000,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2 Hektar	24.362.500,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	160.234.400,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII
		UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII						**765.716.075,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**765.716.075,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**765.716.075,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**115.036.300,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	95.036.300,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.015.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.682.500,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.338.800,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**471.709.825,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	68.043.225,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				107 Ha	68.043.225,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	293.666.600,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				45 Laporan	165.303.600,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				70 Ha	128.363.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	60.000.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**178.969.950,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	178.969.950,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	78.969.950,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	50.000.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	50.000.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII
		UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV						**781.416.210,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**781.416.210,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**781.416.210,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**100.843.330,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.843.330,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.492.330,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.499.800,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	72.851.200,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**539.573.130,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	33.860.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	33.860.000,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	75.466.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	36.446.000,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	39.020.000,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	90.097.500,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	90.097.500,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	340.149.630,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				4 Laporan	279.569.130,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				150 Ha	60.580.500,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**140.999.750,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	140.999.750,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				3 Unit	90.999.750,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
		UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII						**749.303.042,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**749.303.042,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**749.303.042,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**78.423.967,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	78.423.967,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.277.340,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.582.827,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	64.563.800,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**-**	**401.587.075,00**							**0,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	37.480.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	37.480.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	25.764.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	25.764.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	93.362.206,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	93.362.206,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	244.980.869,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	130.661.541,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10 Ha	114.319.328,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					**-**	**269.292.000,00**							**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	269.292.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	28.751.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				20 Unit	190.541.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI DAN XVII
		UPTD TAHURA						**1.120.820.000,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.120.820.000,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.120.820.000,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**402.000.000,00**							**0,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	402.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD TAHURA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD TAHURA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD TAHURA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD TAHURA
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**					**-**	**718.820.000,00**							**0,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-	-			-	718.820.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD TAHURA
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				11 Dokumen	154.282.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD TAHURA
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi														
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				18 Ha	244.145.000,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD TAHURA
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi														
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				20 Ha	320.393.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		0,00	UPTD TAHURA
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**15.900.918.128,00**							**34.619.826.920,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.900.918.128,00**							**34.619.826.920,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**15.900.918.128,00**							**34.619.826.920,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**12.530.140.128,00**							**20.559.451.920,00**	
		[OUTCOME1]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**92** **96.00** **A**	**35** **87** **BB**	**35** **87** **BB**	**78** **88** **BB**	**12.530.140.128,00**	-	-	-	-	-	-	**20.559.451.920,00**	-
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	788.757.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.635.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		6.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		7.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		6.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	16.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		65.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	65.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		185.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	30.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	615.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				3 Berita Acara	43.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.737.085.330,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	15.579.811.920,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				882 Orang/ Bulan	9.737.085.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.579.811.920,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	68.325.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	68.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	109.400.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	251.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	53.900.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		91.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	55.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		160.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	870.697.378,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	960.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.582.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	200.323.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	621.191.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	478.185.420,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	823.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.087.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	132.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		190.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.913.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	339.684.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		598.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	477.690.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.010.040.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	182.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		412.320.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	133.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		235.440.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	32.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	129.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		287.280.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**					**-**	**744.165.000,00**							**550.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**744.165.000,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	594.165.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	594.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[OUTCOME1]	**Persentase pemegang izin usaha air tanah (kewenangan provinsi) yang melaksanakan pengusahaan air tanah dengan baik dan benar.**	**80**	**33**	**33**	**40**	**744.165.000,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				11 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**					**-**	**428.444.000,00**							**2.350.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	99.855.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				10 Dokumen	99.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	*Jumlah Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan*	-			7 izin	55.970.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Provinsi Jambi	-	1.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Dokumen	55.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Provinsi Jambi		1.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-			-	50.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	100.309.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				5 Dokumen	79.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				5 Laporan	20.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	122.310.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Laporan	122.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**					**-**	**399.698.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	199.698.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	5.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	199.698.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-			-	200.000.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi														
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**					**-**	**1.798.471.000,00**							**5.160.375.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				30 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	340.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				20 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		340.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-			-	220.361.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				10 Dokumen	120.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				10 Laporan	100.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	1.328.110.000,00			-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-	-	4.270.375.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	68.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		225.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				4 Laporan	47.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				0 Unit	561.867.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	-		3.445.375.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**20.417.270.682,00**							**26.215.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**20.417.270.682,00**							**26.165.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**18.422.532.317,00**							**22.780.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**A Predikat**	**14.854.308.025,00**							**17.060.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.854.308.025,00**	-	-	-	-	-	-	**17.060.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*	-			7 Dokumen	375.880.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	520.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	296.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	79.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.200.625.702,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	13.470.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	12.989.346.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		13.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	185.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.399.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		95.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.390.023,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.390.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	321.687.500,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	945.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	59.687.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				70 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		535.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	602.724.800,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	645.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	161.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	421.926.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		435.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	730.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**100 persen 62 persen**	**10.000.000,00**							**35.000.000,00**	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	*Jumlah pengendalian usaha perdagangan*	-			19 pelaku usaha	10.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**					**94 Persen 5.90 Persen**	**2.104.999.537,00**							**2.565.000.000,00**	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	*Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting*	-			12 bulan	25.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-			-	2.000.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				11 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-			-	79.999.537,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	59.999.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi														
			Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**6 Persen**	**130.735.000,00**							**385.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi*	-			6 Produk	130.735.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				2 Produk	130.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**51.1 Persen 70 Persen 81 (B) Indeks 100 Persen**	**1.155.082.755,00**							**2.485.000.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen*	-			11 Kab/Kota	204.837.200,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	560.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				3 BPSK	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				2 LPKSM	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				20 Pengaduan	194.837.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	875.245.555,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	1.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				650 Sertifikat	318.656.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				1 laporan	541.460.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah produk potensial yang dipantau				50 Produk	15.128.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				9 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**65 Persen**	**167.407.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri*	-			5 kali	156.637.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				6 UMKM	156.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	5.400.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				3 UMKM	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	5.370.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Laporan	5.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.994.738.365,00**							**3.385.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**84 Persen 0.927 Triliun Rupiah 10 Persen 112,000 Orang 1.76 USD Miliar 1 Persen 4 Persen**	**1.829.738.365,00**							**2.970.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi* *Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP*	-			1 % 84 %	1.829.738.365,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	2.970.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	200.338.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1.332.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		1.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**20 Persen**	**90.000.000,00**							**225.000.000,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	*Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait* *Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait* *Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait*	-			100 % 100 % 100 %	90.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**25 Persen**	**75.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Periode penyampaian infomasi Industri Kewenangan Provinsi Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas*	-			12 Bulan 1115 unit	75.000.000,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**50.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**50.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						**962.241.558,00**							**1.738.406.625,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**816.403.549,00**							**1.540.168.256,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**816.403.549,00**							**1.540.168.256,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**					**-**	**816.403.549,00**							**1.540.168.256,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	304.496.004,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif	-	612.871.715,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	172.803.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		372.228.358,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	58.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		105.536.860,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	72.794.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		135.106.497,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-			-	325.336.651,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif	-	587.995.817,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	78.269.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		150.768.156,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	53.779.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		97.999.304,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	193.286.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		339.228.357,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	186.570.894,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif	-	339.300.724,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				4 Dokumen	53.805.894,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		94.236.883,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				5 Dokumen	52.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		94.295.683,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	80.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif		150.768.158,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**145.838.009,00**							**198.238.369,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**145.838.009,00**							**198.238.369,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**145.838.009,00**							**198.238.369,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan*	-			100 %	19.641.310,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya kulitas pelayanan publik	-	41.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	19.641.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya kulitas pelayanan publik		41.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126.196.699,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya kulitas pelayanan publik	-	156.438.369,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.216.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya kulitas pelayanan publik		65.138.369,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya kulitas pelayanan publik		36.300.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	33.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Meningkatnya kulitas pelayanan publik		55.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						**86.521.015.149,00**							**85.254.729.805,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**86.521.015.149,00**							**85.254.729.805,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**86.521.015.149,00**							**85.254.729.805,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**1.241.240.351,00**							**895.177.181,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	141.000.360,00			-	-	-	-	135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	65.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	12.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	13.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	24.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24.610.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.100.239.991,00			-	-	-	-	760.177.181,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	108.464.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		87.301.451,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.274.384,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	66.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.927.167,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	909.935.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		554.674.179,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**-**	**85.279.774.798,00**							**84.359.552.624,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	76.193.386.206,00			-	-	-	-	71.472.149.729,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				3 Unit	37.007.742.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.528.828.382,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				2 Lembaga	39.185.643.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.943.321.347,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	8.524.332.592,00			-	-	-	-	11.586.307.794,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	8.136.188.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.063.446.925,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				2 Dokumen	203.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		819.868.621,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				2 Dokumen	185.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.702.992.248,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	562.056.000,00			-	-	-	-	1.301.095.101,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				2 Dokumen	188.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		342.422.782,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				2 Dokumen	188.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		693.680.076,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				2 Dokumen	184.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		264.992.243,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO PEREKONOMIAN						**925.486.333,00**							**2.059.884.326,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**925.486.333,00**							**2.059.884.326,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**925.486.333,00**							**2.059.884.326,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**356.701.733,00**							**604.042.500,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan*	-			100 %	39.212.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	131.800.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		51.300.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	11.012.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		44.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		36.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi*	-			100 %	317.489.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	472.242.500,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	56.651.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		77.028.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.820.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		58.790.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	250.017.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		336.424.500,00	BIRO PEREKONOMIAN
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**100 Persen**	**568.784.600,00**							**1.455.841.826,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Persentasi percepatan kebijakan masalah perekonomian*	-			100 %	149.635.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	394.201.826,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				18 Dokumen	90.521.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		225.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				12 Dokumen	59.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		169.201.826,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA*	-			100 %	200.112.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	530.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				15 Dokumen	93.699.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		231.280.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				10 Dokumen	40.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		134.360.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				12 Dokumen	65.913.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		164.360.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD*	-			100 %	219.036.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	531.640.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				15 Dokumen	93.198.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		235.360.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				12 Dokumen	53.028.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		125.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				10 Dokumen	72.808.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		171.280.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**904.409.454,00**							**1.758.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**904.409.454,00**							**1.758.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**904.409.454,00**							**1.758.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**333.711.637,00**							**683.500.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	39.500.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	89.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen Dokumen	2.950.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		6.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	24.850.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		60.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.011.637,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	559.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	38.519.560,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		71.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.245.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		37.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	221.247.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		450.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.200.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	35.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	14.200.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		35.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**					**-**	**570.697.817,00**							**1.075.000.000,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	298.665.737,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	595.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				4 Laporan	88.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		195.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	53.522.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		125.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				4 Laporan	156.978.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		275.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	272.032.080,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	480.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				4 Laporan	154.016.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		275.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				4 Dokumen	118.016.040,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		205.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BIRO UMUM						**120.230.651.387,00**							**132.703.675.711,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**114.796.651.387,00**							**126.703.675.711,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**114.796.651.387,00**							**126.703.675.711,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**114.796.651.387,00**							**126.703.675.711,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	67.825.777.228,00			-	-	-	-	67.825.777.208,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				400 Orang/ Bulan	67.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	595.867.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		595.867.977,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	99.834.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.834.570,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	95.074.661,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.074.661,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	632.606.864,00			-	-	-	-	756.246.509,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	254.377.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		374.377.849,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	107.193.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		107.193.660,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	104.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.675.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	31.360.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.551.436.583,00			-	-	-	-	6.512.803.576,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.828.044.696,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	565.998.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.331.891.407,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.086.473.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.453.903.084,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	198.964.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.964.389,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	923.641.000,00			-	-	-	-	7.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	923.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		2.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.680.993.833,00			-	-	-	-	9.426.652.539,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	114.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.700.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	6.034.588.917,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.034.588.917,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.531.704.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.531.704.916,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.745.658.706,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.123.989.191,00			-	-	-	-	8.123.989.191,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	3.684.058.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.684.058.326,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	1.263.410.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.263.410.635,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1.980.911.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.980.911.434,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1.195.608.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.195.608.796,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	3.739.876.293,00			-	-	-	-	3.739.876.293,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	528.120.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		528.120.496,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/ Bulan	3.211.755.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.211.755.797,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	23.218.330.395,00			-	-	-	-	23.218.330.395,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	14.793.171.495,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.793.171.495,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				0 Paket	6.289.754.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.289.754.823,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	2.135.404.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.135.404.077,00	BIRO UMUM
	X	**NON URUSAN**						**5.434.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**5.434.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.434.000.000,00			-	-	-	-	6.000.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5.434.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000.000,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						**2.334.283.551,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.334.283.551,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.334.283.551,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**2.334.283.551,00**							**0,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	135.851.000,00			-	-	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	16.664.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.579.900,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	110.607.100,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	71.270.303,30			-	-	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	59.680.303,30	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				76 Orang	11.590.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	660.562.888,70			-	-	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				61 Paket	83.656.027,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	19.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	23.820.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	533.836.861,70	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.870.000,00			-	-	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	9.870.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	659.946.300,00			-	-	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				240 Dokumen	84.358.660,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				986 Laporan	97.762.640,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	477.825.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	796.783.059,00			-	-	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				700 Laporan	545.007.059,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				770 Laporan	231.856.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				3 Laporan	19.920.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**2.481.402.281,00**							**4.680.129.159,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.299.739.081,00**							**4.652.629.159,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.299.739.081,00**							**4.652.629.159,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**561.044.309,00**							**1.598.359.759,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	69.222.309,00			-	-	-	-	61.050.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	28.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.050.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				45 Laporan	20.970.309,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	22.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	17.050.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				45 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.050.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	471.688.000,00			-	-	-	-	1.416.935.659,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		311.316.683,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.601.500,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.512.041,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	471.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.041.255.435,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.250.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.134.000,00			-	-	-	-	81.324.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	20.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.324.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**					**-**	**1.738.694.772,00**							**3.054.269.400,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	625.759.600,00			-	-	-	-	1.090.886.390,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	121.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		251.014.016,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	401.997.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		533.137.979,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	101.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		306.734.395,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	681.364.000,00			-	-	-	-	893.434.476,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	500.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		497.244.708,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	104.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		204.147.328,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	75.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		192.042.440,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	431.571.172,00			-	-	-	-	1.069.948.534,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				17 Orang	85.577.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		246.462.636,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	152.372.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		389.109.933,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	193.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		434.375.965,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	X	**NON URUSAN**						**181.663.200,00**							**27.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**181.663.200,00**							**27.500.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**181.663.200,00**							**27.500.000,00**	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	181.663.200,00			-	-	-	-	27.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	181.663.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BIRO HUKUM						**1.363.695.574,00**							**2.194.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.363.695.574,00**							**2.194.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.363.695.574,00**							**2.194.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**98 Persen 94 Persen**	**240.666.299,00**							**402.950.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persensase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran* *Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja*	-			100 Persen 100 Persen	18.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah	-	26.400.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		6.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		6.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		6.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		6.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum yang terpenuhi*	-			100 Persen	215.166.299,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah	-	365.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		90.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	169.792.299,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		275.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase lancarnya pengelolaan surat menyurat*	-			100 Persen	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah	-	11.550.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		11.550.000,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**					**undefined undefined**	**1.123.029.275,00**							**1.791.300.000,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*	-			100 %	477.376.275,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah	-	946.300.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				50 Dokumen	116.554.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		253.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				600 Dokumen	69.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		143.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				650 Dokumen	116.331.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		220.300.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				90 Dokumen	174.716.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		330.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Persentase penyelesaian Permasalahan hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi*	-			100 Persen	645.653.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah	-	845.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	584.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		680.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	61.139.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Aparatur Pemerintah		165.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI						**1.277.332.427,00**							**2.018.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**678.137.650,00**							**1.200.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**678.137.650,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**					**- skor** **37,18 Indeks**	**678.137.650,00**							**1.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Persentase Kab/Kota yang ditata Kelembagaannya* *Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai Dasar Penataan Kepegawaian* *Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang ditata Kelembagaannya*	-			100 % 100 % 100 %	234.827.650,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	550.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	130.960.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	23.867.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				0 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	443.310.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	650.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				0 Dokumen	43.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		190.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				0 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		80.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				0 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		180.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X	**NON URUSAN**						**599.194.777,00**							**818.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**599.194.777,00**							**818.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**BB Predikat BB Predikat 90 Indeks 88,90 Indeks**	**599.194.777,00**							**818.000.000,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Predikat Akuntabilitas Kinerja Biro* *Nilai SAKIP Biro*	-			BB Predikat 79,40 Nilai	148.418.100,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	203.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		135.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		20.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	11.418.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		13.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Biro*	-			90 Indeks 100 Persen	418.026.677,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	560.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	20.931.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		80.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	131.094.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Kantor* *Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			100 Persen 90 Indeks	32.750.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	55.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	32.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		55.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		SEKRETARIAT DPRD						**126.224.802.562,00**							**159.416.584.866,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**126.224.802.562,00**							**159.416.584.866,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**126.224.802.562,00**							**159.416.584.866,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**70 %**	**73.935.401.411,00**							**75.935.639.210,00**	
		[Nilai SAKIP]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80**	**70**	**80**	**80**	**73.935.401.411,00**	-	-	-	-	-	-	**75.935.639.210,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan*	-			41 Dokumen	217.987.615,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	305.974.833,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				41 Dokumen	198.812.140,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		269.646.315,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.221.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		7.035.834,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.221.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		7.035.834,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		8.442.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		8.442.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.673.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.686.425,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	980.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.686.425,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan*	-			100 %	9.804.366.041,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	10.372.378.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				151 Orang / 12 Bulan Orang/ Bulan	9.565.587.241,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.043.866.603,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	129.776.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		167.573.097,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.299.165,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.588.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		6.502.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	3.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		3.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	99.334.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		142.017.555,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**99.09**	**85**	**97.15**	**97.15**	**73.935.401.411,00**	-	-	-	-	-	-	**75.935.639.210,00**	-
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 %	571.180.465,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	579.868.624,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	571.180.465,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		579.868.624,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah*	-			100 %	158.312.500,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	335.513.775,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	109.882.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		220.863.825,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	46.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		112.549.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyeselasaian Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	3.269.162.934,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	7.236.313.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	127.558.980,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		293.387.409,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	174.837.764,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		417.269.741,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	225.924.210,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		547.554.341,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	371.613.480,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		879.408.869,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.313.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		3.024.266.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.055.428.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.074.427.535,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	294.821.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	296.295.708,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				44 Unit	294.821.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		296.295.708,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			100 %	9.960.767.475,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	5.871.447.566,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	131.882.800,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		140.846.730,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.325.987.586,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.706.334.736,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.502.897.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		3.024.266.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	8.036.859.794,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	8.898.179.343,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	252.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		582.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	883.800.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.380.417.750,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5.472.823.594,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.500.187.712,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	1.427.536.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.434.673.881,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			100 %	38.964.162.923,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	39.248.997.529,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang / 12 Bulan Orang/ Bulan	37.887.458.778,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		38.130.934.922,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	853.193.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		883.375.905,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	223.511.145,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		234.686.702,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Layanan Administrasi DPRD*	-			12 Bulan	2.657.780.064,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.790.669.067,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	2.657.780.064,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.790.669.067,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**100 %**	**52.289.401.151,00**							**83.480.945.656,00**	
		[Persentase Penyelesaian Tugas dan Fungsi DPRD]	**Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD**	**88.16**	**86**	**86.43**	**86.43**	**52.289.401.151,00**	-	-	-	-	-	-	**83.480.945.656,00**	-
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terselesaikan*	-			100 Persen	5.400.021.870,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	11.441.758.046,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				11 Dokumen	5.025.044.370,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		11.048.031.671,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	374.977.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		393.726.375,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	6.168.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	19.634.888,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	6.168.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	19.634.888,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	1.542.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		4.908.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD*	-			100 %	7.881.047.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	11.955.756.113,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	1.696.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.059.381.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				27 Orang	1.836.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.836.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	666.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		666.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.289.401.151,00**	-	-	-	-	-	-	**83.480.945.656,00**	-
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	838.857.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.053.176.686,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase Penyelesaian Tugas dan Fungsi DPRD]	**Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD**	**88.16**	**86**	**86.43**	**86.43**	**52.289.401.151,00**	-	-	-	-	-	-	**83.480.945.656,00**	-
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	2.843.436.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		6.341.197.747,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindak Lanjuti*	-			100 %	20.328.957.630,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	31.030.138.470,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	1.284.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.989.935.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	19.044.654.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		28.040.202.570,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi*	-			100 %	18.667.036.851,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	29.014.023.251,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	17.311.940.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		25.295.176.530,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	1.355.096.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		3.718.846.721,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**29.635.990.069,00**							**35.974.239.761,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.830.390.069,00**							**35.974.239.761,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**28.830.390.069,00**							**35.974.239.761,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**A Predikat A Nilai Akip**	**17.031.357.400,00**							**19.367.666.871,00**	
		[Peningkatan Nilai Sakip Bappeda]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP Perangkat Daerah**	**87** **AA**	**86** **B**	**86** **BB**	**86** **A**	**17.031.357.400,00**	-	-	-	-	-	-	**19.367.666.871,00**	-
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 % 100 %	191.327.630,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	210.460.393,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30.113.470,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		33.124.817,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8.026.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		8.829.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	9.418.520,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		10.360.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	27.220.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		29.942.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5.153.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.668.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	15.130.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		16.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	96.266.140,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		105.892.754,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 % 100 %	14.458.996.561,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	15.931.366.617,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	14.300.646.061,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.730.710.667,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	125.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		163.970.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	21.200.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		23.320.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	12.150.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		13.365.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 % 100 %	94.000.503,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				94 Paket	79.000.503,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	15.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	753.964.058,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.652.986.731,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.564.135,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		60.020.549,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	84.982.100,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		183.994.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	81.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		219.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	71.920.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		161.838.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	42.800.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		47.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.200.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		14.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	61.465.123,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		67.611.635,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	40.315.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		44.346.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	258.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		804.440.177,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.739.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		8.513.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	37.728.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		41.500.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	901.234.448,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	971.335.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.970.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		9.867.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	354.101.320,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		389.511.452,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	11.470.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		12.617.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	526.692.628,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		559.339.508,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	631.834.200,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	585.017.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	94.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		103.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	403.159.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		443.475.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	34.675.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		38.142.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**-**	**1.841.039.769,00**							**4.180.044.890,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD** **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**199** **98**	**100** **97**	**100** **97**	**100** **98**	**1.841.039.769,00**	-	-	-	-	-	-	**4.180.044.890,00**	-
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.239.774.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.780.962.545,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	339.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		578.657.321,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	143.209.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		198.527.999,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	49.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		110.343.035,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	381.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.220.972.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				30 Dokumen	327.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		672.461.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	123.260.780,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	358.600.825,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	43.427.730,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		69.402.124,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				35 Orang	79.833.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		205.873.426,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		83.325.275,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	478.004.989,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	965.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	114.770.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		192.242.290,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	308.738.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		691.612.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				22 Dokumen	54.496.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		81.945.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	74.681.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		74.681.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**-**	**9.957.992.900,00**							**12.426.528.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.957.992.900,00**	-	-	-	-	-	-	**12.426.528.000,00**	-
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	1.285.074.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	54.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		96.349.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	430.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		621.502.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				14 Laporan	105.986.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		112.833.710,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		85.349.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	122.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		552.996.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				14 Laporan	368.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		408.275.868,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	202.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		243.275.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				14 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		79.416.612,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	5.425.697.600,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	6.160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		47.440.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		56.386.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		116.656.628,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2.100.477.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.873.321.572,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	673.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		685.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	1.054.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.005.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	654.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		579.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	943.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		795.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	3.247.221.300,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	4.066.528.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	3.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		66.951.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	106.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		118.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	10.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		236.933.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	1.707.621.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.870.165.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		357.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	18.154.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		187.902.660,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	5.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		113.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	1.021.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.114.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**805.600.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**805.600.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**805.600.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**805.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	805.600.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	805.600.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**1.127.965.802.443,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.127.965.802.443,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.127.965.802.443,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**11.737.551.405,00**							**0,00**	
		[Terpenuhinya Kebutuhan Anggaran Penunjang Urusan]	**Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP**	**87** **96** **BB**	**86** **93** **BB**	**86** **93** **BB**	**86** **93** **BB**	**11.737.551.405,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	363.367.548,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	100.497.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	262.870.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.293.616.491,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				319 Orang/ Bulan	7.467.847.091,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	811.478.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.291.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	33.358.980,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	33.358.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	177.007.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	121.898.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	55.108.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	336.349.895,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.108.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	86.236.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6.031.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	202.423.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	417.481.810,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	417.481.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.342.363.117,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.562.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	162.989.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.176.811.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	774.006.364,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				69 Unit	600.318.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	67.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	106.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**-**	**1.113.374.399.831,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah]	**Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan** **Persentase penetapan APBD tepat waktu** **Persentase Penyampaian Ranperda/Ranp erkada Provinsi pelaksanaan APBD yang tepat waktu** **Persentase Ranperda/Ranp erkada Kab./Kota tentang Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD yang dievaluasi/disah kan tepat waktu** **Persentase realisasi serapan APBD**	**100**	**0**	**0**	**100**	**1.113.374.399.831,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.317.116.111,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	198.434.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4 Dokumen	1.118.681.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	544.476.719,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				11 Laporan	292.021.843,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				11 Laporan	252.454.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				36 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	906.029.560,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	251.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	316.677.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	269.076.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	68.724.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	468.059.237,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	279.943.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				10 Dokumen	188.115.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	1.109.804.783.432,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	186.461.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	194.664.364.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				4 Laporan	728.678.958.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	333.934.772,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				172 Orang	333.934.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**-**	**2.853.851.207,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset, dan tersedianya data akurat mengenai kekayaan daerah]	**Jumlah laporan penatausahaan, pengamanan, pemanfataan barang milik daerah** **Persentase pengamanan barang milik daerah**	**100** **8**	**0** **90**	**0** **90**	**8** **92**	**2.853.851.207,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	2.853.851.207,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	344.774.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.853.851.207,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	14.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	94.864.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset, dan tersedianya data akurat mengenai kekayaan daerah]	**Jumlah laporan penatausahaan, pengamanan, pemanfataan barang milik daerah** **Persentase pengamanan barang milik daerah**	**100** **8**	**0** **90**	**0** **90**	**8** **92**	**2.853.851.207,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	636.850.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	788.984.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	229.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	524.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				12 Orang	219.886.926,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**90.104.085.151,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**90.104.085.151,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**90.104.085.151,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**82.341.838.340,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.341.838.340,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	364.334.391,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	100.497.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	263.836.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	68.335.480.479,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				319 Orang/ Bulan	67.562.146.379,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	759.043.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.290.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	33.399.132,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	33.399.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	176.927.300,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	121.898.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	55.028.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.178.974.633,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.868.691.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6.287.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	202.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.456.204.584,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				69 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	2.456.204.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.395.824.621,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.638.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.775.248.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4.617.937.197,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.400.693.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				69 Unit	767.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	80.237.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	1.553.166.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**7.762.246.811,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	7.762.246.811,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	429.470.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	2.748.952.407,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	3.680.783.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	455.299.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				5 Laporan	185.659.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	262.081.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KOTA JAMBI						**1.463.852.260,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.463.852.260,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.463.852.260,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**1.463.852.260,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.463.852.260,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KOTA JAMBI
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Sarana dan Prasarana	1.463.852.260,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KOTA JAMBI
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN MUARO JAMBI						**803.082.289,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**803.082.289,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**803.082.289,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**803.082.289,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	803.082.289,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN MUARO JAMBI
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Sarana dan Prasarana	803.082.289,00	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN MUARO JAMBI
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN BATANGHARI						**646.976.588,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**646.976.588,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**646.976.588,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**646.976.588,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	646.976.588,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN BATANGHARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	646.976.588,00	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN BATANGHARI
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT						**603.537.940,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**603.537.940,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**603.537.940,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**603.537.940,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	603.537.940,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	603.537.940,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR						**450.160.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.160.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**450.160.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**450.160.000,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	450.160.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	450.160.000,00	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TEBO						**582.964.844,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**582.964.844,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**582.964.844,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**582.964.844,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	582.964.844,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TEBO
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	582.964.844,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN TEBO
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN BUNGO						**716.831.005,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**716.831.005,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**716.831.005,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**716.831.005,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	716.831.005,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN BUNGO
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	716.831.005,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN BUNGO
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN SAROLANGUN						**832.300.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**832.300.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**832.300.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**832.300.000,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	832.300.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN SAROLANGUN
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	832.300.000,00	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN SAROLANGUN
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN MERANGIN						**944.379.551,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**944.379.551,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**944.379.551,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**944.379.551,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	944.379.551,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN MERANGIN
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	944.379.551,00	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN MERANGIN
		UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN KERINCI						**815.349.740,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**815.349.740,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**815.349.740,00**							**0,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**815.349.740,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	815.349.740,00			-	-	-	-	0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN KERINCI
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	815.349.740,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD-PPD BAPENDA PROVINSI JAMBI PADA KABUPATEN KERINCI
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**18.698.086.804,00**							**146.739.655.963,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.698.086.804,00**							**146.739.655.963,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**18.698.086.804,00**							**146.739.655.963,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**94 % 80 % 87 %**	**16.035.641.653,00**							**143.823.550.178,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Keterbukaan Informasi Predikat AKIP**	**91 96 AA**	**86 93.5 BB**	**86 94 BB**	**87 94 BB**	**16.035.641.653,00**	-	-	-	-	-	-	**143.823.550.178,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Jenis	234.396.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	257.835.678,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	188.920.980,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		207.813.078,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	19.347.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		21.281.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	26.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		28.740.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 Jenis 100 %	12.908.991.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	140.384.280.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1190 Orang/ Bulan	12.745.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		140.204.878.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen Dokumen	150.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		165.277.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.841.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		14.125.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	372.281.842,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	409.509.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	68.990.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		75.889.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	199.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		219.957.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	103.330.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		113.663.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	960.012.561,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	1.055.995.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.558.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		13.797.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	480.630.490,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		528.693.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.365.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		25.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.300.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		21.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	29.034.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		31.937.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	361.510.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		397.662.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	33.614.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		36.976.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.035.641.653,00**	-	-	-	-	-	-	**143.823.550.178,00**	-
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	30.606.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	33.666.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30.606.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		33.666.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Indeks Keterbukaan Informasi** **Predikat AKIP**	**91** **96** **AA**	**86** **93.5** **BB**	**86** **94** **BB**	**87** **94** **BB**	**16.035.641.653,00**	-	-	-	-	-	-	**143.823.550.178,00**	-
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.041.900.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	1.146.076.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.460.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		4.906.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	722.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		795.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	314.450.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		345.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	487.454.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah	-	536.187.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	243.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		268.114.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	28.560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		31.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195.024.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		214.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	20.130.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Internal Perangkat Daerah		22.143.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**275 Skor 67,5 Skor**	**2.662.445.151,00**							**2.916.105.785,00**	
		[Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meritokrasi dalam Tata Kelol Manajemen ASN]	**Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN**	**325 90**	**253 76.92**	**260 77.5**	**265 80**	**2.662.445.151,00**	-	-	-	-	-	-	**2.916.105.785,00**	-
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Skor Aspek Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Skor Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Skor Aspek Pengadaan ASN pada Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Skor Aspek Sistem Informasi ASN pada Indeks Penerapan Sistem Merit ASN*	-			11 Skor 27,5 Skor 27,5 Skor 90 % 16,5 Skor	568.232.766,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi	-	625.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4 Dokumen	249.390.460,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		274.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	54.410.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		59.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	88.754.520,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		97.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Laporan	175.677.786,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		193.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN* *Skor Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Penerapan Sistem Merit* *Skor Aspek Promosi dan Mutasi Sistem Merit ASN*	-			95 % 82,5 Skor 30 Skor	587.296.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi	-	646.010.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				4 Dokumen	127.195.690,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		139.910.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				4 Laporan	167.030.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		183.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	293.070.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		322.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Skor Dimensi Kompetensi ASN* *Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN* *Skor Aspek Pengembangan Karir Sistem Merit ASN* *Skor Dimensi Kualifikasi IP ASN*	-			25,37 Skor 90 % 82,5 Skor 16,88 Skor	1.124.556.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi	-	1.236.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				250 Orang	30.279.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		33.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	178.521.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		196.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	601.184.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		661.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	187.043.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		205.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.662.445.151,00**	-	-	-	-	-	-	**2.916.105.785,00**	-
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1 Dokumen	127.527.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		140.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meritokrasi dalam Tata Kelol Manajemen ASN]	**Indeks Penerapan Sistem Merit ASN** **Indeks Profesionalitas ASN**	**325** **90**	**253** **76.92**	**260** **77.5**	**265** **80**	**2.662.445.151,00**	-	-	-	-	-	-	**2.916.105.785,00**	-
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* *Skor Dimensi Disiplin IP ASN* *Skor Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Sistem Merit ASN* *Skor Dimensi Kinerja IP ASN* *Skor Aspek Manajemen Kinerja Sistem Merit ASN*	-			95 % 5 Skor 27,5 Skor 20,25 Skor 55 Skor	382.359.945,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi	-	408.075.785,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	125.005.785,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		125.005.785,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				350 Orang	100.735.460,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		110.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				43 Orang	44.597.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		49.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	112.021.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	ASN Pemerintah Provinsi Jambi		123.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**22.166.575.738,00**							**39.315.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**22.166.575.738,00**							**39.315.000.000,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**22.166.575.738,00**							**39.315.000.000,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**B BB**	**18.631.578.933,00**							**24.615.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP**	**82** **BB**	**84** **BB**	**82** **BB**	**82** **BB**	**18.631.578.933,00**	-	-	-	-	-	-	**24.615.000.000,00**	-
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	262.774.523,98			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	130.547.273,98	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20.019.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	112.207.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.974.475.008,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	15.680.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	13.784.475.008,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		15.500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	190.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		180.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	171.006.680,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	51.406.680,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	119.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	805.878.721,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.430.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	75.238.066,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	475.890.655,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	32.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	59.150.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	163.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	800.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.892.000.000,02			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.505.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		5.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	765.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.126.000.000,02	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.525.444.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	2.700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	245.444.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	155.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1.125.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**5 % 90 % 60 %**	**3.534.996.805,00**							**14.700.000.000,00**	
		[Meningkatnya ASN yang mengikuti pelatihan 20 JP/Tahun]	**Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi**	**1.34 A**	**1.19 B**	**1.19 B**	**1.19 B**	**3.534.996.805,00**	-	-	-	-	-	-	**14.700.000.000,00**	-
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	1.150.975.839,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	6.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				650 Orang	1.150.975.839,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		6.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	2.384.020.966,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	8.700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				120 Orang	80.262.190,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	240.870.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				2 Dokumen	58.772.950,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3500 Orang	2.004.115.826,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		7.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**9.388.178.276,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.388.178.276,00**							**0,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**9.388.178.276,00**							**0,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**-**	**8.714.452.201,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.714.452.201,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	140.294.540,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	130.225.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.117.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.952.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.999.105.011,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/ Bulan	7.999.105.011,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	17.357.500,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	17.357.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	175.148.907,60			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.787.960,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.800.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.023.539,60	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	140.537.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	207.266.242,40			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	145.057.244,70	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	62.208.997,70	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.280.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	144.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	31.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**-**	**673.726.075,00**							**0,00**	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	242.980.800,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	137.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	105.570.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	125.141.950,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	125.141.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	305.603.325,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Laporan	196.316.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	109.286.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adaftif dan demokratis	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH						**18.616.291.419,00**							**22.579.645.589,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**962.859.860,00**							**1.141.322.094,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**962.859.860,00**							**1.141.322.094,00**	
1.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**					**100 %**	**962.859.860,00**							**1.141.322.094,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal*	-			100 persen	962.859.860,00			-	-	-	-	1.141.322.094,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				5 Laporan	160.250.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.480.672,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				20 Laporan	802.609.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		961.841.422,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**17.653.431.559,00**							**21.438.323.495,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**17.653.431.559,00**							**21.438.323.495,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**BB Predikat**	**17.653.431.559,00**							**21.438.323.495,00**	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi keuangan*	-			100 persen	7.475.613.827,00			-	-	-	-	8.483.990.540,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	7.102.985.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.018.262.284,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	372.628.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		465.728.256,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah* *Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 % 100 persen	207.900.000,00			-	-	-	-	232.848.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	207.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.848.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah* *Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah*	-			100 % 100 persen	63.140.000,00			-	-	-	-	136.505.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	63.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.065.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.440.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum* *Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum*	-			100 persen 100 %	2.475.374.969,00			-	-	-	-	2.820.803.961,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	48.762.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.614.504,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	385.861.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		432.165.059,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	492.631.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.130.944,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	48.119.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.893.454,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.680.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	831.657.086,00			-	-	-	-	2.264.255.936,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.680.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	88.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.181.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39 Unit	433.102.086,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		485.074.336,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah* *Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah*	-			100 % 100 persen	3.080.858.220,00			-	-	-	-	3.461.997.506,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13 Laporan	89.454.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.857.228,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.564.018.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.084.832,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	101.754.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.965.161,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	1.325.630.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.533.090.285,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah* *Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah*	-			100 % 100 persen	3.518.887.457,00			-	-	-	-	4.037.921.952,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	1.146.918.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.332.932.608,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	843.065.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		944.232.912,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.528.903.957,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.760.756.432,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						**37.335.288.156,00**							**49.233.405.528,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**37.335.288.156,00**							**49.233.405.528,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**37.335.288.156,00**							**49.233.405.528,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**BB Predikat**	**31.046.470.529,00**							**38.357.585.808,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Predikat AKIP**	**A**	**B**	**A**	**A**	**31.046.470.529,00**	-	-	-	-	-	-	**38.357.585.808,00**	-
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan*	-			23 Dokumen	994.358.563,00			-	-	-	-	1.678.163.881,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	272.209.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		393.687.067,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	722.149.063,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.065.032.589,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		219.444.225,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	22.463.834.870,00			-	-	-	-	23.485.899.242,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				114 Orang/ Bulan	22.100.114.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.153.511.242,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.046.470.529,00**	-	-	-	-	-	-	**38.357.585.808,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	363.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		332.388.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Predikat AKIP**	**A**	**B**	**A**	**A**	**31.046.470.529,00**	-	-	-	-	-	-	**38.357.585.808,00**	-
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-			100 %	1.974.290.882,00			-	-	-	-	3.582.432.752,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		126.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	1.783.356.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.810.860.596,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	190.934.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		431.372.156,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		214.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja*	-			100 %	1.172.304.905,00			-	-	-	-	2.421.939.975,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.495.877,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.489.284,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	37.568.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		94.912.755,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.139.742,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	84.352.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.020.262,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.621.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.382.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	1.022.782.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.854.995.932,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	12.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuh barang milik daerah*	-			100 %	694.784.000,00			-	-	-	-	2.645.183.835,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		495.841.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	694.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.149.342.335,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor*	-			100 %	1.375.258.149,00			-	-	-	-	1.277.578.138,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	94.327.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		107.074.296,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	394.204.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		445.725.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.224.375,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	865.241.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		672.554.467,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	2.371.639.160,00			-	-	-	-	3.266.387.985,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	240.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		297.433.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	175.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		599.434.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	70.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.889.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.885.079.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.182.630.485,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**80 %**	**4.622.579.428,00**							**8.598.637.382,00**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan]	**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**	**75**	**73**	**73**	**75**	**4.622.579.428,00**	-	-	-	-	-	-	**8.598.637.382,00**	-
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal*	-			80 %	3.737.988.983,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	7.029.953.542,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				60 Laporan	1.427.474.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.332.055.880,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				41 Laporan	1.305.521.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		2.463.625.395,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				23 Laporan	19.860.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		52.789.380,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.622.579.428,00**	-	-	-	-	-	-	**8.598.637.382,00**	-
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				23 Laporan	24.517.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		40.845.945,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan]	**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**	**75**	**73**	**73**	**75**	**4.622.579.428,00**	-	-	-	-	-	-	**8.598.637.382,00**	-
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				22 Laporan	434.999.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.064.901.652,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				155 Dokumen	525.616.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.075.735.290,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			100 %	884.590.445,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.568.683.840,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	83.702.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		180.737.770,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				19 Laporan	800.887.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.387.946.070,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**60 %**	**1.666.238.199,00**							**2.277.182.338,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Teknis Pengawasan serta Terlaksananya Pendampingan & Asistensi]	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** **Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Terdefinisi** **Terintegrasi (Integrated)**	**Terdefinisi** **Terintegrasi (Integrated)**	**Terdefinisi** **Terintegrasi (Integrated)**	**Terdefinisi** **Terintegrasi (Integrated)**	**1.666.238.199,00**	-	-	-	-	-	-	**2.277.182.338,00**	-
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah kebijakan teknis yang selesai dirumuskan*	-			7 Rekomendasi	282.587.075,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	298.370.782,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	282.587.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		298.370.782,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase OPD yang diberikan pendampingan dan asistensi*	-			100 %	1.383.651.124,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-	-	1.978.811.556,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				43 Perangkat Daerah	108.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		246.351.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 Perangkat Daerah	112.134.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		170.117.913,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				50 Kegiatan	1.024.414.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		1.353.387.330,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 Perangkat Daerah	138.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	-		208.955.313,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**21.280.640.033,00**							**26.675.183.061,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**21.280.640.033,00**							**26.675.183.061,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**21.280.640.033,00**							**26.675.183.061,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**BB Predikat 85 Nilai**	**9.021.521.071,00**							**10.080.183.061,00**	
		[OUTCOME1]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Predikat AKIP**	**85** **BB**	**85** **BB**	**85** **BB**	**85** **BB**	**9.021.521.071,00**	-	-	-	-	-	-	**10.080.183.061,00**	-
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	123.771.810,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota	-	275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	26.607.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	97.164.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			50 orang	7.838.237.781,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	-	7.932.770.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	7.702.770.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		7.702.770.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	135.467.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan disiplin pegawai Perangkat Daerah*	-			100 %	15.720.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	-	93.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		51.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	15.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor*	-			95 %	281.865.317,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	-	526.179.871,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.009.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		41.061.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.601.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		63.345.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		7.500.570,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	233.654.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		414.272.211,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercapainya pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	98.627.906,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	-	278.540.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	98.627.906,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		278.540.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 %	355.269.057,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	-	457.218.895,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.215.097,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	158.233.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		186.751.341,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	195.820.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		263.467.554,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	308.029.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	-	517.474.095,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	190.509.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		269.528.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	92.519.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		107.569.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi		140.376.495,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**83 %**	**4.301.491.949,00**							**7.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**83**	**83**	**83**	**83**	**4.301.491.949,00**	-	-	-	-	-	-	**7.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kabangsaan*	-			11 Kab/Kota	4.301.491.949,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, Tokoh agama/masyarakat, Pelajar, Aparatur Pemerintah dan Pemuda	-	7.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	2.606.522.133,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, Tokoh agama/masyarakat, Pelajar, Aparatur Pemerintah dan Pemuda		4.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	1.484.033.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, Tokoh agama/masyarakat, Pelajar, Aparatur Pemerintah dan Pemuda		2.583.971.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				7 Laporan	210.936.739,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Masyarakat, Tokoh agama/masyarakat, Pelajar, Aparatur Pemerintah dan Pemuda		416.028.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**87 %**	**6.097.971.188,00**							**6.500.000.000,00**	
		[Outcome]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.097.971.188,00**	-	-	-	-	-	-	**6.500.000.000,00**	-
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Terealisasinya pelaksanaan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*	-			100 %	6.097.971.188,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Parpol, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Lembaga lainnya	-	6.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	5.790.418.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Parpol, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Lembaga lainnya		5.844.758.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				90 Orang	280.934.798,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Parpol, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Lembaga lainnya		565.186.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				13 Laporan	26.617.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Parpol, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Lembaga lainnya		90.056.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**95 %**	**794.768.816,00**							**970.000.000,00**	
		[OUTCOME1]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**794.768.816,00**	-	-	-	-	-	-	**970.000.000,00**	-
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan*	-			95 %	794.768.816,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Ormas dalam negeri dan Ormas Asing di daerah	-	970.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	124.471.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Ormas dalam negeri dan Ormas Asing di daerah		220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				125 Orang	500.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Ormas dalam negeri dan Ormas Asing di daerah		695.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				11 Orang	169.929.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Ormas dalam negeri dan Ormas Asing di daerah		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**95 %**	**348.005.305,00**							**600.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan*	-			95 %	348.005.305,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Tokoh Agama, Pelajar/Mahasiswa dan masyarakat	-	600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				9 Dokumen	87.828.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Tokoh Agama, Pelajar/Mahasiswa dan masyarakat		171.870.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Orang	260.177.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Tokoh Agama, Pelajar/Mahasiswa dan masyarakat		428.129.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**86 %**	**716.881.704,00**							**1.525.000.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			86 %	716.881.704,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA, Lembaga Asing,Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	1.525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				13 Orang	376.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA, Lembaga Asing,Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		835.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	41.899.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA, Lembaga Asing,Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				11 Laporan	41.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA, Lembaga Asing,Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				10 Dokumen	256.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaftif dan demokratis	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA, Lembaga Asing,Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		490.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**4.832.035.053.492,00**							**3.063.774.750.977,60**	

7 BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Guna mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan

daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi Tahun 2026

Indikator	Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2026
Indeks Reformasi Birokrasi	BB (79,5)	BB (79,5)
Indeks Daya Saing Daerah	3,47	3,47
Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	75,2	75,2
Pertumbuhan Ekonomi	4,80 - 5,40	4,80 - 5,40
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20-4,37	4,20-4,37
Indeks Ketahanan Pangan	76,94	76,94
Indeks Inovasi Daerah	58,89	58,89
Tingkat Kemiskinan	6,3 - 6,8	6,3 - 6,8
Indeks Ekonomi Hijau	73,65	73,65
Indeks Ekonomi Biru	15,35	15,35
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	73,92
Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	80,76	80,76
Indeks Modal Manusia	0,56	0,56

7.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 maka ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,94	76,94
1.2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	82,16	82,56
1.3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak	%	83,04	83,25
1.4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	NA	0,565
1.5	Kualitas Lingkungan Hidup: a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	68,15*	73.92
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	NA	12,5
	c. Pengelolaan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	NA	30
	d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% RT	NA	38
1.6	Ketahanan energi, air dan pangan			
	a. Ketahanan energi			
	- Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	768	779,52
	- Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	113.405
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernurishment*)	%	10,58	10,45
	c. Ketahanan air - Kapasitas tampungan air	M3/kapita	NA	855
1.7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	NA	38,75
1.8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	138,02	136,14
1.9	Persentase penurunan emisi GRK a. Kumulatif	%	NA	21,05
	b. Tahunan	%	NA	37,25

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
1.10	Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	%	77,27*	80,76
1.11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	1,15
1.12	Rasio penduduk	%	103,4	102,39
1.13	Kepadatan penduduk	Orang/km2	75,94	77,93
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
2.1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,51	4,80 - 5,40
2,2	Tingkat Kemiskinan	%	7,1	6,3 - 6,8
2.3	PDRB Perkapita	juta rupiah perkapita per tahun	86,72	96,53
2.4	Rasio Gini	-	0,321	0,330 – 0,337
2.5	Cakupan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan	%	39,52	40,51
2.6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	63	71
2.7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54*	0,56
2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,8	87
2.9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,06	74,25
2.10	Angka kematian ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	44	120
2.11	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	19,60**	12,21
2.12	Rata-rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,9	9,5
2.12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	13,30-13,31
2.13	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	%	11,84	11,85
2.14	Kasus kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian	354	344
2.15	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,5	11,5
2.16	Prevalensi wasting pada balita	%	6,6	6,1
2.17	Insidensi tubercolusis (per 100.000 penduduk)			
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	NA	85

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
	b. Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment succes rate)	%	87	95
2.18	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	92,3	98,7
2.19	hasil pembelajaran: - persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) literasi membaca	%	NA	9,09-9,09
	b) numerasi	%	NA	0,00-9,09
	- persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) literasi membaca	%	NA	40,80-43,25
	b) numerasi	%	NA	35,30-37,80
2.20	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	NA	10,21-10,30
2.21	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	NA	72
2.22	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	NA	3700
2.23	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	unit	NA	8
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	%	NA	28,5
2.24	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	%	64	65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
2.25	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	64,24	90
2.26	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	8	9
2.27	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100%	100%
2.28	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	%	100%	100%
2.29	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabag yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100%	100%
2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	4,20-4,37
2.31	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	NA	45
2.32	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	51,17	52,80-54,80
2.33	Indeks kerukunan Umat Beragama	Indeks	69,24	69,36-69,55
2.34	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,92*	60,25-60,6
2.35	Indeks perlindungan anak (IPA)	indeks	76.12	84.24
2.36	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	NA	72,43-72,55
2.37	Indeks Ketimpangan Gender(IKG)	Indeks	0,528	0.504
2.38	Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	89.29	89.59
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
3.1	Nilai Tukar Petani	-	156,1	157,4
3.2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	47,46	48,52
3.3	Rasio ketergantungan	-	31,06	45,42
3.4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	-	9,77	9,98 -10,12
3.5	Rasio PDRB penyediaan akomodasi Makan dan Minum	%	1,1	1,22

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
3.6	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang		5,9
3.7	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	%		2,93
3.8	Rasio kewirausahaan	-	NA	5,4
3.9	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%		0,72
3.10	*Return on Asset (ROA)* BUMD	%		3,42
3.11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,59	58,89
3.12	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	57,92**	73,65
3.13	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	14,03*	15,35
3.14	Porsi EBT Dalam Bauran Energi	%	24	33,41
3.15	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	Indeks	42,3**	46,8
3,16	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,92*	6,01
3.17	Rasio pajak daerah terhadap PDRB		0,57	1,24
3.18	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	17
3.19	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0,082
3.20	Nilai transaksi saham per kapita per provinsi	Rupiah	NA	5.300.125
3.21	Total Kredit/PDRB	%	NA	18,7
3.22	Tingkat inklusi keuangan Provinsi	%	85%*	91,86
3.23	Pembentukan Modal tetap Bruto	%	21,69	18,79
3.24	Ekspor Barang dan Jasa	%	29,27	18,11
3.25	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	2,38	2,56
3.26	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	66,21	70,39
3.27	Persentase Desa Mandiri	%	9,97	26,91
3.28	Tingkat Inflasi	%	1,43	2,5 ± 1
ASPEK PELAYANAN UMUM				
4.1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	NA	42,42
4.2	Indeks SPBE	Indeks	3,05	4
4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B (3,67)	B (3,87)
4.4	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	65,36	73,99

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
4.5	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	100	100
4.6	Indeks Demokrasi Indonesia	%	74,47	77,90-81,0
4.7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	65,56	66,43
4.8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,38	3,47
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
Fokus Pelayanan Urusan Wajib				
1	*Kesehatan*			
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar	%	100	100
1.1	Persentase RS terakreditasi paripurna	%	70,45	72,72
1.2	Persentase FKTP yang terakreditasi minimal Utama	%	87,98%	91,35%
1.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100%	100%
1.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100%	100%
1.5	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	68,75%	50%
1.6	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio	1,26	1,27
1.7	Rasio Puskesmas per Kecamatan	Rasio	98,61	98,61
1.8	Persentase cakupan universal health coverage Provinsi Jambi			
1.9	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Jumlah	100	100
2	*Pendidikan*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
2.2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	71,97%	72,65%
2.4	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	59,78%	75,87%
2.5	Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	nilai	70,1	71,3
2.6	Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	nilai	60,05	63,25
2.7	Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional	nilai	64,73	67,33
2.8	Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan asesmen nasional	nilai	56,19	60,59
2.9	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	nilai	60,42	63,62
2.1	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	nilai	55,53	56,53
2.11	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	nilai	57,69	58,69
2.12	Rata-rata kompetensi numerasi SDLBberdasarkan asesmen nasional	nilai	54,07	55,27
2.13	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	nilai	53,65	54,05
2.14	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	nilai	57,91	58,91
2.15	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	81,60%	85,72%
2.16	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	74,48	75,94%
2.17	Iklim keamanan SMA	nilai	70,95	81,25

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
2.18	Iklim keamanan SMK	nilai	67,46	69,86
2.19	Iklim keamanan SDLB	nilai	74,38	75,38
2.2	Iklim keamanan SMPLB	nilai	64,08	66,48
2.21	Iklim keamanan SMALB	nilai	69,18	71,78
2.22	Iklim kebinekaan SMA	nilai	71,08	73,08
2.23	Iklim kebinekaan SMK	nilai	68,65	71,25
2.24	Iklim kebinekaan SDLB	nilai	65,23	67,23
2.25	Iklim kebinekaan SMPLB	nilai	66,62	70,22
2.26	Iklim kebinekaan SMALB	nilai	68,82	72,82
2.27	Iklim inklusivitas SMA	nilai	58,85	61,85
2.28	Iklim inklusivitas SMK	nilai	55,33	59,93
2.29	Iklim inklusivitas SDLB	nilai	64,31	66,91
2.3	Iklim inklusivitas SMPLB	nilai	62,62	65,42
2.31	Iklim inklusivitas SMALB	nilai	63,18	66,38
3	*Sosial*			
3.1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	KPM	1025	500
3.2	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	1337	550
3.3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	25	35
3.4	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100
3.5	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	7,93	7,93
3.6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	21,49	21,49
3.7	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	2,19	2,19

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
3.8	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	1,1	1,1
3.9	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
4	*Trantibum dan Perlindungan Masyarakat*			
4.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
4.2	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100
4.3	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
4.4	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100
5	*PU dan Penataan Ruang*			
5.1	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	62,49	67,14
5.2	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	74,7	75,2
5.3	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	160	160
5.4	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	50	50
5.5	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	100	100
5.6	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	100	100
5.7	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100
5.8	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100
5.9	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi	Dokumen	7	3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
5.10	Jumlah rancangan Perda RTRW kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda	Dokumen	2	3
5.11	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	-	1
5.12	Jumlah laporan kebutuhan PPNS penataan ruang di daerah	Dokumen	-	1
6	*Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*			
6.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
6.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
7	*Tenaga Kerja*			
7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	4,20-4,37
7.2	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker	%	41	42
7.3	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	15,76	15,8
7.4	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	1350	1400
7.5	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	2027	3000
7.6	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	%	68	69
7.7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	98,6	98,7
8	*Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
8.1	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%	100%
8.2	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	nilai	700	701
8.3	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	55	60
8.4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%	100%
9	*Pangan*			
9.1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:			
a	Skor PPH Konsumsi	Skor	95,2	95,8
b	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	86,42	87
9.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:			
a	Skor PPH Ketersediaan	%	NA	91,5
b	Desa Mandiri Pangan	Desa	NA	3,4
9.3	Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:			
a	Inflasi pangan bergejolak	%	NA	5 ± 1
b	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	NA	73,57
10	*Pertanahan*			
10.1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang		4
10.2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	KK		4
11	*Lingkungan Hidup*			
11.1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,538	0,589
11.2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	50
12	*Administrasi Kependudukan dan Capil*			
12.1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
12.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100%	100%
12.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100%	100%
12.4	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100%	100%
12.5	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98%	99%
12.6	Persentase Kartu Indetitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	100%	100%
12.7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2
13	*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*			
13.1	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	149	149
13.2	Jumlah BPD yang Mengimplementasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	BPD	1.414	1.414
13.3	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	orang	5,137	1.979
13.4	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Digital	Desa	1.414	1.414
13.5	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	989	1.131
13.6	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	%	6,08%	5,88%
13.7	Persentase BUM Desa Maju	%	0,31	1,91
14	*Pengendalian Penduduk dan KB*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
14.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	63,66	67,06
14.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun	22,4	22
14.3	Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)	Rata-rata anak per wanita	2,25	2,21
14.4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,48	70,48
14.5	Persentase kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	%	89,3	90,2
14,6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	13,1	7,55
15	*Perhubungan*			
15.1	On time Performance Layanan transportasi	%	93	94
15.2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0.5874	0.59
15.3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	%	75	76
15.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Managemen keselamatan	Unit	27	28
15.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Rasio	76,78	76,9
16	*Komunikasi dan Informasi*			
16.1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Indeks		
16.2	Indeks SPBE	Indeks	3,05	4
16.3	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks		
16.4	Jumlah area blankspot yang mendapatkan akses internet	Indeks		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
16.5	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	1	1.1
16.6	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	50	60
16.7	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	91.12	91.12
16.8	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100
16.9	Persentase ASN Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	50	60
16.10	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM,Bintek,pelatihan)	%	57.89	69
16.11	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100
16.12	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
16.13	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100
16.14	Persentase Kabupaten/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	30
16.15	Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	2.95	75
16.16	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	62.5	66
16.17	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet A yang disediakan oleh Dinas	%	0	40
17	*Koperasi dan UKM*			
17.1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	24,56	26,5
17.2	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	24,96	28,82
17.3	Pertumbuhan Wirausaha	%	4	4.1
18	*Penanaman Modal*			
17.1	Realisasi PMDN	Rp. Trilyun	9,94	10,14
17.2	Realisasi PMA	Rp. Trilyun	1,63	1,66
19	*Kepemudaan dan Olahraga*			
19.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosialisasi Kemasyarakatan	%	0.486	0.728
19.2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	0.016	0.023
19.3	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.004	0.004
19.4	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	kegiatan	11	11
20	*Statistik*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
20.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,6	3
21	*Persandian*			
21.1	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	orang	1	1
20.2	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	orang	1	1
20.3	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	36,38%	65%
20.4	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	2	1
22	*Kebudayaan*			
22.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	28	31
22.2	Persentase pemduduk usia 10 tahun keatas yang mengujungi peninggalan sejarah	%	2,7	3,1
22.3	Persentase pemduduk usia 10 tahun keatas yang pernh terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	4,6	4,9
22.4	Persentase rumah tangga yang menyelengarakan upacara adat	%	19	20
22.5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	8	5
22.6	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	unit	4,6	4,9
23	*Perpustakaan*			
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71.3	79.3
24	*Kearsipan*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
24.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	90,03 (A)	90.5
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan				
1	*Kelautan dan Perikanan*			
1.1	Luasan Kawasan konservasi	Ha	0	10.772,33
1.2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	45.187	47.500
1.3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	49595	52074.7
1.4	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ thn	41,5	21,48
1.5	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%		
2	*Pariwisata*			
2.1	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. juta	1.000	1.500
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,13	0,1
2.3	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	4.595.145	4.955.905
3	*Pertanian*			
3.1	Jumlah Produksi Padi	Ton GKG	281.022	292.375,29
3.2	Jumlah Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	18.825	19.203,38
3.3	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	869,3	872,78
3.4	Populai ternak:			
	- Populasi Sapi	Ekor	106.511	109.730,29
	- Populasi Kambing	Ekor	114.564	118.026,70
3.5	Produksi Daging:			
	- sapi	Ribu ton	4,38	4,56
	- kambing	Ribu ton	0,49	0,49
	- Ayam Buras	Ribu ton	1,39	1,55
	- Ayam Ras Petelur	Ribu ton	0,67	0,82
	- Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	57,54	69,62
	- Itik	Ribu ton	0,69	0,7
3.6	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	77.237,54	77.546,80
3.7	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kw	1.642.414	2.365.076,30
3.8	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Kw	124.12	150.185,44
3.9	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	TON	115778	118693

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
3.1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	TON	716	716
3.11	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	TON	20587	23518
3.12	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	TON	334829	333742
3.13	Jumlah Produksi Susu	Liter		
3.14	Jumlah Produksi Telur	Ribu ton	40,44	41,66
3.15	Persentase peningkatan wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	%	80,56	83,92
3.16	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	53,76	54,06
3.17	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	83,74	84,14
3.18	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	HA	175	200
3.19	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	13,95	14,15
3.20	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	12,26	12,56
3.21	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	HA	100	115
3.22	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	NA	1,6
3.23	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	NA	15,1
3.24	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	%	NA	1,6
3.25	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ternak	%	NA	4,1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
3.26	Persentase Peningkatan Luas Areal tanaman pangan dan Hortikultura yang terkena dampak yang terkendali pada Penanggulangan OPT dan DPI	%	46,5	48.00
4	*Kehutanan*			
4.1	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	*Rp. Milyar*	269.504.315,75	300.000.000
4.2	Nilai transaksi ekonomi KTII	*Rp.Milyar*	10.462.277.300	12.000.000.000
4.3	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	*Ha*	*217.229,20*	*220.000*
4.4	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	*Ha*	*3.875,10*	*200*
4.5	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	*Ha*	*61*	*100*
5	*ESDM*			
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,99%	99,99%
5.2	Intesitas Energi Primer	SBM/Miliar rupiah	NA	113.405
6	*Perdagangan*			
6.1	Nilai ekspor barang	Milyar rupiah	NA	57.083,20
6.2	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Provinsi	Trilyun rupiah	NA	9,51
7	*Perindustrian*			
7.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5.52	5.56
7.2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	9.97	10.18
7.3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	78.085	78.889
7.4	Nilai Inventasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp.Triliun	0,7	0,944
7.5	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	USD Miliar	0.793	0.813
8	*Transmigrasi*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
8.1	Jumlah kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	lokasi	1 lokasi	1 lokasi
8.2	Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	%	27.61	30.25
8.3	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan Clean	lokasi	1 lokasi	1 lokasi
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	*Perencanaan*			
1.1	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.2	Konsistensi program RKPD dalam APBD	%	100	100
2	*Keuangan*			
2.2	Opini BPK	-	WTP	WTP
2.3	Persentase SilPA terhadap LRA	%	1.34	1
2.4	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	1.3	1
2.5	Persentase belanja pendidikan	%	27.31	20
2.6	Persentase belanja kesehatan	%	11.92	10
3	*Kepegawaian dan Diklat*			
3.1	Persentase tingkat pendidikan aparatur Pemprov yang berpendidikan S1-S2-S3	%	83,6	84
3.2	Persentase ASN yang memperoleh Beasiswa Pendidikan	%	0.09	0.17
3.3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif Pemprov Jambi (Eselon I dan II)	%	4,08	5
3.4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi (Diklat 20 JP)	%	1,19	1,19
4	*Penelitian dan Pengembangan*			
4.1	Persentase hasil riset dan teknologi yang diaplikasikan stakeholders	%	100	75
5	*Pengawasan*			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
1	2	3	4	6
5.1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	%	85	86
5.2	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK	%	77,96	78
6	*Kesatuan Bangsa dan Politik*			
6.1	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	-	80
6.2	Jumlah Prov/Kab/kota yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Kab/Kota	11	11
6.3	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	-	80
6.4	Jumlah Prov/Kab/kota yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kab/Kota	11	11
6.5	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai		

8 BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan RKPD Tahun Pertama RPJMD periode 2025-2029 dan mengacu pada arah kebijakan RKP. RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, pedoman penyusunan KUA PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta sebagai dasar penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.

Dukungan berupa pemberian masukan dan keterlibatan monitoring dan pengendalian program/kegiatan pembangunan tahun 2026 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal, sehingga seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Provinsi Jambi pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dukungan pendanaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Sebagai tahun transisi pasca pemilihan umum dan pilkada, maka tantangan pembangunan pada tahun 2026 diperkirakan cukup banyak, terutama berkaitan dengan berbagai penyesuaian kebijakan-kebijakan baru yang mungkin saja terjadi. Namun kesinambungan dan percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pembangunan itu sendiri.

GUBERNUR JAMBI

dto

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H.